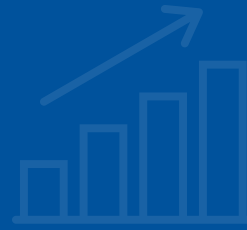




Tak Pernah Berhenti
Menumbuhkembangkan
dan Memberdayakan yang Kecil
**Menjadi Semakin Berarti
Bagi Negeri**

LAPORAN TAHUNAN

2019



Tak Pernah Berhenti

Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil **Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri**

BRI memiliki sejarah panjang sebagai bank yang telah melayani masyarakat Indonesia berskala ekonomi kecil. Bahkan walau usianya yang telah mencapai 124 tahun pada tahun 2019, BRI senantiasa mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI merupakan satu dari sedikit bank di dunia yang konsisten memberikan yang terbaik pada segmen tersebut untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Jumlah nasabah UMKM BRI yang “Naik Kelas” setiap tahunnya juga terus menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada laporan tahunan BRI 2019 dan dalam rangka menyambut usia BRI yang akan memasuki 125 tahun di tahun 2020 adalah “Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri”.

Dengan meluncurkan visi menjadi *The Most Valuable Bank in Southeast Asia and Home to the Best Talent*, banyak hal yang telah dan akan dilakukan BRI untuk mewujudkannya. Kapasitas BRI menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dan perantara keuangan tak bisa dipungkiri telah teruji. Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri pada tahun 2019, BRI mampu mempertahankan pertumbuhan positif di atas rata-rata industri pada kedua indikator tersebut.

Penuh komitmen menyediakan pelayanan yang prima serta bekerja dengan optimal dan baik telah membawa BRI ke level usaha yang lebih tinggi. Hasilnya, BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan jumlah aset yang mencapai Rp1.416,8 triliun pada tahun 2019. Selain itu, BRI juga sukses meraih banyak penghargaan atas produk dan layanannya dari institusi-institusi independen terkemuka selama tahun 2019. BRI pun proaktif mendukung program Pemerintah seperti peningkatan inklusi keuangan, penyaluran kredit bersubsidi Kredit Usaha Rakyat, dan atau Bantuan Sosial Non Tunai. Pencapaian semua hasil positif ini tak lepas dari kedisiplinan BRI mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pertumbuhan Kinerja Yang Stabil

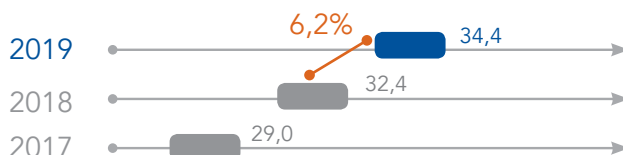


Bank BRI sukses menyalurkan KUR kepada lebih dari

4 Juta Debitur
pada 2019 dengan volume penyaluran sebesar

Rp87,9 triliun

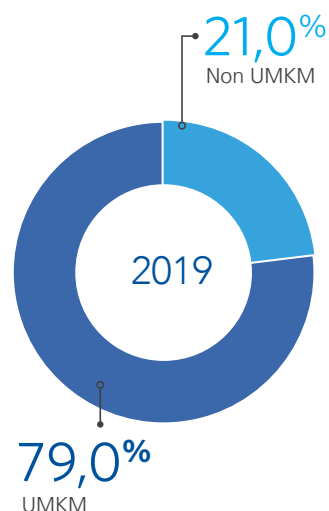
Laba (Rp Triliun)



Laba bersih mencapai Rp34,4 triliun pada 2019,
atau tumbuh **6,2%** *year on year*

Non UMKM
Rp191,1
Triliun

UMKM
Rp716,3
Triliun



NPL Gross

BRI **2,62%** (Bank saja)

Kualitas kredit Bank BRI yang tercermin dari NPL Gross masih di level aman yaitu 2,62%.





Ekuitas tumbuh

12,7%

mencapai Rp208,8 triliun



Pendapatan

Recovery tumbuh

13,8%

mencapai Rp7,1 triliun

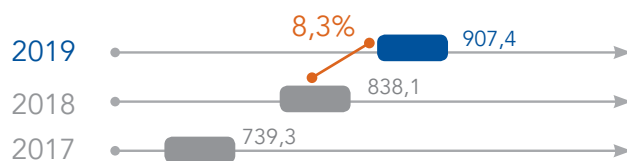


Dana Pihak Ketiga
mencapai

Rp1.021,2 triliun

pada 2019, atau tumbuh
8,1% year on year

Kredit (Rp Triliun)



Kredit mencapai Rp907,4 triliun
pada 2019,

atau tumbuh **8,3%** year on year



Pendapatan Fee &
Commission tumbuh

20,7%

mencapai Rp14,5 triliun

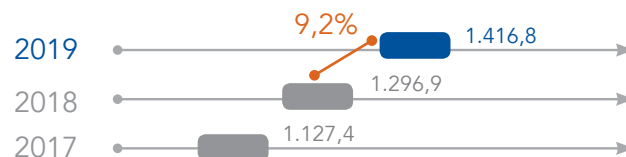


Pendapatan
e-channel dan
e-banking tumbuh

53,2%

mencapai
Rp4,9 triliun

Aset (Rp Triliun)



Jumlah aset mencapai Rp1.416,8 triliun
pada 2019,

atau tumbuh **9,2%** year on year

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu mencatat pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan pada tahun 2019. Prestasi ini tak lepas dari komitmen Bank BRI terhadap pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

BRI Menjadi Agent of Development Melalui Ekonomi Kerakyatan



Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

4 Juta Debitur

Pada 2019 terdapat Rp87,9 triliun penyaluran KUR. Jumlah debitur KUR 4 Juta debitur. Dari total KUR yang disalurkan selama tahun 2019 oleh Bank BRI tersebut, Rp 75,7 Triliun atau 86,1% diantaranya disalurkan khusus di segmen mikro. Dengan demikian, sejak tahun 2015, Bank BRI telah berhasil menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp 323,4 Triliun kepada lebih dari 16,6 juta pelaku UMKM diseluruh Indonesia.



Program Keluarga Harapan (PKH)

3,7 juta Keluarga Penerima Manfaat

Berpatisipasi menyukkseskan PKH dengan penyaluran kepada 3,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 265 Kabupaten/Kota. Penyaluran PKH BRI naik dari Rp6,08 triliun di tahun 2018 menjadi Rp13,3 triliun di 2019

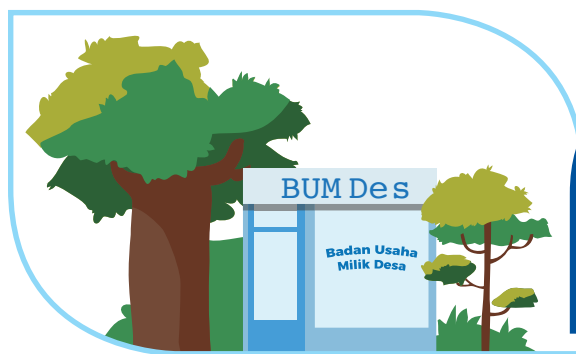


Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

5,44 juta Keluarga Penerima Manfaat

Berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan pemerintah melalui program BPNT dengan penyaluran kepada 5,44 juta KPM yang tersebar di 265 Kabupaten/Kota sebesar Rp4,84 triliun pada 2019

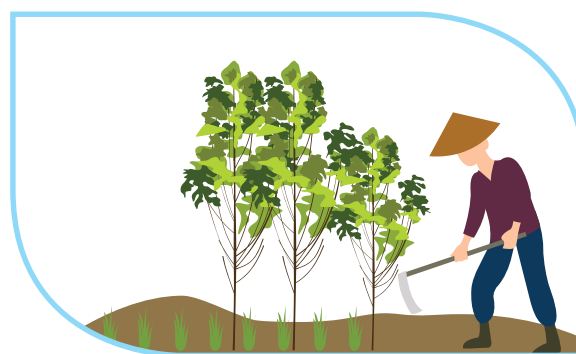
124 tahun Bank BRI hadir sebagai *Agent of Development* di dalam kehidupan rakyat Indonesia dengan semangat **membangun ekonomi kerakyatan melalui layanan perbankan dan keuangan dengan setulus hati.**



**Badan Usaha
Milik Desa
(BUMDes)**

**22.654
Rekening**

Menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat melalui BUMDes sebagai Agen BRILink yang mencapai 22.654 rekening, 8.662 agen dan 4,8 juta transaksi (Januari-Desember 2019). Nominal transaksi BUMDes mencapai lebih dari Rp4,5 triliun (Januari-Desember 2019)



**Program
Perhutanan
Sosial**

**5.733
Petani**

**31.519 Hektar lahan di Jawa
Tengah, Jawa Barat, Sumatera
Selatan, dan Jambi**

Merupakan program sinergi BUMN yang bertujuan memberi kepastian lahan garapan, hak garap petani sekitar hutan, serta penyediaan akses layanan perbankan. Baik itu melalui pendanaan KUR, subsidi sarana produksi pertanian, maupun pembinaan pengelolaan lahan hutan lebih intensif agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Semangat melayani dengan setulus hati, BRI tak pernah berhenti memberi pendampingan, menyediakan akses keuangan serta pembiayaan kepada para pelaku UMKM mengingat peran penting mereka bagi perekonomian negeri ini.

Pemberdayaan UMKM



Pembiayaan, pendampingan, pelatihan, go-ekspor serta pelaksanaan program dari pemerintah.

Rumah Kreatif BUMN (RKB)



**Jumlah Anggota RKB 329.969 orang |
Jumlah Pelatihan 4.133**

Kolaborasi BUMN membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM. BRI memiliki 54 RKB di seluruh Indonesia.

BRIncubator

**1,9 Juta Debitur
UMKM Naik Kelas**



Pendampingan, pemberdayaan dan modernisasi kelompok UMKM, sehingga mampu mendorong produktivitas pelaku UMKM, menciptakan teknopreneur dan mendorong UMKM untuk naik kelas.



BRI Microfinance Center (BMC)

Lembaga riset dan konsultasi serta jaringan untuk mendorong perkembangan bisnis UMKM, khususnya keuangan mikro agar dapat tumbuh pesat dan mampu bersaing di pasar global.

Indonesia Mall

**5 e-commerce |
> 350.000 Pengunjung**



Perluasan pasar produk UMKM melalui berbagai *channel e-commerce* di dalam dan luar negeri. BRI Indonesia Mall mendapat penghargaan dari The Asian Banker dalam upayanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM hingga 40%.

BRILIAN PRENEUR 2019 UMKM EXPORT

**BRILian Prenerur 2019 Catatkan
Transaksi Senilai USD 33,5 Juta**

Ajang pertemuan para pelaku bisnis UMKM dan pameran produk-produk UMKM 20 – 22 Desember 2019 di Assembly Hall JCC Jakarta. Acara dimeriahkan dengan *Art Installation*, *Talk Show*, *Business Matching*, Festival Kopi Nusantara dan *Barista Competition*.





**BRI Memberdayakan UMKM
Untuk Majukan
Ekonomi Kerakyatan**

BRI Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

BRI aktif dan berkomitmen mendukung program inklusi dan literasi keuangan untuk mengurangi keterbatasan masyarakat akan akses perbankan dan keuangan sehingga ekonomi kerakyatan dapat semakin maju.



Tersebar
Seluruh Desa
Indonesia

66%

Agen BRILink

Menjadikan masyarakat sebagai Agen BRILink dengan pencapaian total sebanyak 422.160 Agen yang tersebar di 49.184 desa, atau 66% dari total seluruh desa di Indonesia. Volume transaksi BRILink mencapai 521 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp673 triliun pada 2019.



4,6 juta
Pemegang
Polis

28,6%

Asuransi Mikro

Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal dunia (AM-KKM) BRI memberikan perlindungan permasalahan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Literasi keuangan digambarkan melalui peningkatan jumlah pemegang polis AM-KKM sebesar 28,6% menjadi 4,6 juta pemegang polis selama 2019.



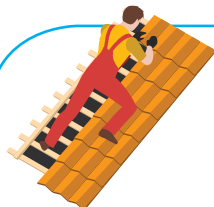
 **teman
Simpedes**

Telah didistribusikan ke
1.370 BRI Unit & 2.750
Agen BRILink

Merupakan upaya Bank BRI untuk mendorong masyarakat menggunakan produk perbankan, berupa fasilitas tambahan dari rekening Tabungan BRI Simpedes berbentuk wadah terkunci yang digunakan nasabah sebagai sarana menabung, yang hanya bisa dibuka menggunakan *Universal Key* yang dipegang oleh Agen BRILink. Uang yang terkumpul di Teman Simpedes tersebut kemudian disetorkan secara rutin (bulanan) ke rekening Tabungan BRI Simpedes nasabah melalui AgenBRILink. Pada tahap awal, Teman Simpedes telah didistribusikan 110 ribu unit di 1.370 BRI Unit dan 2.750 Agen BRILink.

Antusiasme dan Kontribusi BRI Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Melalui BRI Peduli 2019

Antusiasme dan kontribusi BRI bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan dilakukan dengan berbagai kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang aktif dilakukan tiap tahunnya.



Renovasi/pembangunan
144 sekolah/pesantren.



Pembangunan sarana
dan prasarana 57
Sekolah Luar Biasa (SLB).



Pelatihan 10.000 UMKM di 100 titik
lokasi seluruh Indonesia.

Sosialisasi sadar bahaya
narkoba kepada 1.900
siswa/siswi dan guru
SMA/SMK/ sederajat
di 19 titik seluruh
Indonesia.



Pembangunan
389 sarana
ibadah seluruh
Indonesia.



Pembagian 64.000
paket sembako di
seluruh Indonesia.



Berbagi bahagia
bersama BRI dengan
program Buka Bersama
dan Santunan 7.300
anak yatim.



Bantuan 78 mobil ambulans.

Pemenuhan sarana
dan prasarana di 19
universitas.



Perbaikan 310
rumah tidak
layak huni.



Semangat BRI menuju Indonesia BRILian ditunjukkan dengan menghadirkan inovasi digital ke dalam ekonomi kerakyatan agar tercipta transaksi yang lebih cepat, murah, mudah dan aman.

BRI Membawa Inovasi Melalui **Digital Banking**

Akses layanan yang lebih cepat dan mudah melalui Digital Banking yang Andal

Digitizing Core

Exploitation

Digitize existing services and transactions (Business Process)

- Optimize Existing Channels
- Integrated Digitized Operation
- Simplified and Standardized System

AgenBRIlink
Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor
Branchless Banking Initiatives for Micro



Digital based loan underwriting

BRI mobile
Advanced Mobile Banking

Boost Productivity & Unleash The Potential

Digital Ecosystem

Exploitation

Build ecosystem to offer products and services beyond core business

- Digital Platform for Business
- Build New Business Model
- Partnership with Fintech (Application Programming)

IndonesiaMall
BRI Official Online Store

BRI api
Digital partnership & Collaboration

investree
BRI Digital Loan Partnership

BRI Bill
B2B2C Integrated Billing System

BRI Mola
LPG Gas 3kg ordering system



BRI School Management System



BRIStore
Supply chain platform for trading ecosystem

Leveraging New Liquidity, New Opportunities, New Source of Growth

New Digital Propositions

Exploitation

Create and launch an independent greenfield digital bank in Indonesia

- Mobile First channel
- Fully Digital for Untapped Market
- Build New Digital Capability



Big Data Analytics



Credit CardlessProduct



The First Bank with ISO Certificate in Big Data

Tap the Untapped Embedded in Customer Life

BRI^{mo}

Aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh Nasabah maupun Non Nasabah BRI tanpa perlu datang ke cabang (Branchless) dengan pilihan sumber dana Giro dan Tabungan untuk setiap fitur-fiturnya.



Aplikasi BRI ini telah digunakan oleh

2,2 juta orang
setahun setelah diluncurkan.

Product Vision



Product

Upaya Rejuvenasi / Peremajaan Produk Tabungan dan fitur transaksi via BRI Mobile
Memberikan New Experiences bagi nasabah BRI Eksisting dan Baru.



Innovation

Melakukan Digital Attacker Product Perbankan
Inovasi merupakan urgensi dari dilakukannya Pengembangan New BRI Mobile



Application

Aplikasi mobile yang sesuai dengan era digitalisasi.
User experience dan User Interface yang sama untuk aplikasi perbankan demi kenyamanan nasabah.
Aplikasi yang dapat mengakses seluruh layanan perbankan dengan pilihan source of fund yang berbeda



Award

Menjadi The Best Mobile Application in South East Asia



Branchless Banking
Initiatives for Micro

Aplikasi pinjaman personal
yang mudah dan cepat
dengan jumlah unduhan
mencapai

117.391
kali





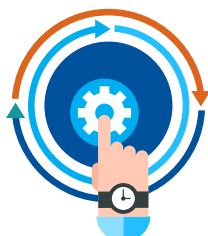
K O N S U M E R

BRISPOT Konsumer telah memproses lebih dari

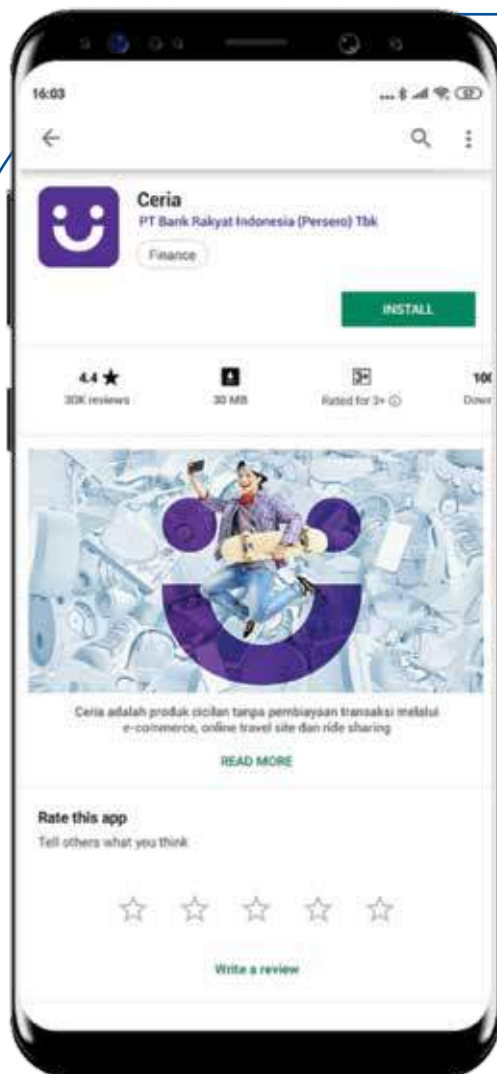
147 ribu
debitur

Bank BRI terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita sebagai “*Leading Consumer Banking in Indonesia*”. Salah satunya dengan melakukan *Business Process Re-Engineering* dengan didukung pengembangan BRISPOT Konsumer sebagai platform aplikasi untuk layanan jasa dan fasilitas perbankan bisnis konsumer.

BRISPOT Konsumer mendigitalisasi seluruh proses bisnis konsumer secara *end to end* di BRI dan melakukan inovasi proses bisnis yang memberikan *customer experience* bagi Nasabah BRI. Platform aplikasi berbasis android & web yang digunakan oleh pekerja sebagai *business process tools* untuk semua fasilitas dan jasa keuangan konsumer baik simpanan maupun pinjaman seperti KPR, KKB, BRIGUNA, Kartu Kredit, dan menunjang aktivitas perencanaan, portofolio *checking*, *dashboard*, *cross-selling (Frontliner)*, hingga layanan *Customer Relationship Management (CRM)*.



Platform BRISPOT Konsumer memberikan kemudahan proses bisnis secara sederhana, *mobile*, dan dapat digunakan kapanpun, di manapun.



Cicil. Cepat. Ceria.

Bikin Belanja Makin Ceria

Apa Itu Ceria?

Ceria adalah produk cicilan tanpa kartu untuk pembiayaan transaksi melalui *e-commerce*, *online travel site*, dan *ride sharing*

- Pengajuan kredit kilat! Hanya dalam 60 menit.
- Plafond menarik, mulai Rp500 ribu - Rp20 juta.
- Bunga ringan dan bebas biaya admin bulanan,
- Kemudahan pembayaran dengan cicilan 1-12 bulan.
- Aplikasi dari BANK BRI sehingga aman & nyaman karena terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Untungnya Pakai Ceria



Cepat

Proses pengajuan kurang dari 60 menit.
Proses registrasi data diri, foto KTP, foto wajah, semua dilakukan secara digital



Aman

CERIA merupakan produk pinjaman digital yang dikeluarkan oleh BANK BRI yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Ringan

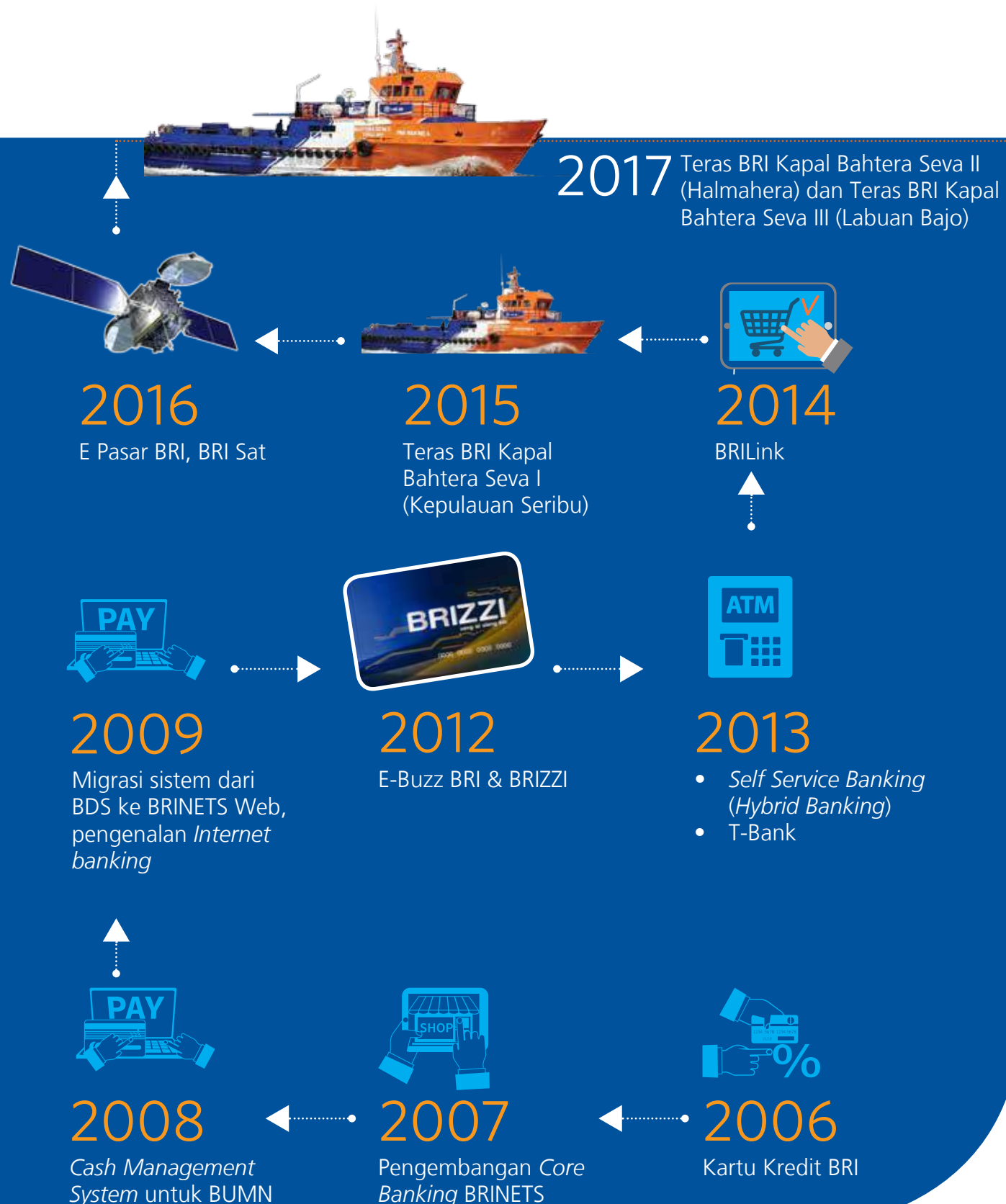
Bebas biaya administrasi.
Bunga ringan: 1,42% flat per bulan.
Limit kredit Rp500 ribu - Rp20 juta, bersifat revolving (sesuai dengan penggunaan dan pembayaran tagihan)
Jangka waktu cicilan 1-12 bulan.



Promo

Banyak promo asyik dan menarik bagi pengguna.

PERJALANAN DIGITAL BANKING BRI





2018

Asisten Virtual
Perbankan BRI
(SABRINA),
BRISPOT Mikro,
BRIAPI, Indonesia
Mall

2019

BRImo, BRISPOT Konsumer, Pinang,
Ceria, Ekosistem Digital (BRImola,
Junio Smart, BRI Bill, BRI Store,
dsb.).



DAFTAR ISI



IKHTISAR KINERJA UTAMA

- 22 Ringkasan Kinerja Keuangan 2019
Ikhtisar Keuangan
Informasi Harga Saham
Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Aksi Korporasi
Pembayaran Dividen
Peristiwa Penting



PROFIL PERUSAHAAN

- 66 Identitas Perseroan
Makna Logo
Riwayat Singkat BRI
Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar
Produk dan Jasa
Wilayah Operasional
Jejak Langkah
Struktur Organisasi
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama
Budaya Perusahaan
Profil Dewan Komisaris
Profil Direksi
Profil *Senior Executive Vice President* (SEVP)
Demografi Karyawan
Komposisi Pemegang Saham
Struktur Perusahaan
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
Kronologi Pencatatan Saham
Kronologi Penerbitan Efek Lain
Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang
Penghargaan dan Sertifikasi
Sertifikasi
Peringkat BRI
Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan
Perusahaan Anak
Informasi Pada *Website* Perusahaan
Pendidikan Dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Dan Unit Audit Internal
Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 166 Tinjauan Ekonomi & Industri
Tinjauan Industri Perbankan & BRI
Rencana Strategis Bank
Bank BRI untuk Indonesia
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Bisnis Mikro
Layanan BRILink
Bisnis Program
Bisnis Ritel
Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel dan Menengah
Produk Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel & Menengah
Bisnis Pinjaman Konsumer, Simpanan Ritel, dan Jasa Perbankan Ritel
Bisnis Simpanana Ritel
Bisnis Jasa Perbankan Ritel
Bisnis Korporasi
Bisnis Pinjaman Korporasi BUMN, Dana Institusi, dan Transaction Banking
Bisnis Pinjaman Korporasi Non-BUMN
Bisnis Sindikasi Dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank
Bisnis Internasional, Treasury, dan Jasa Penunjang Pasar Modal
Bisnis Treasury
Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal
Bisnis Entitas Anak
Tinjauan Keuangan
Human Capital Development
Teknologi Informasi & Operasional
Operasional
Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan
Pengadaan Barang Dan Jasa



LAPORAN MANAJEMEN

- 40 Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

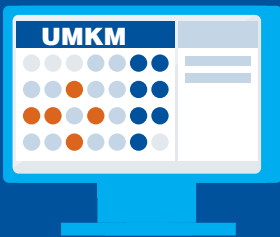
Daftar Isi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

382	Tata Kelola Perusahaan Pelaksanaan Roadmap GCG Kebijakan Tata Kelola Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola Tata Kelola Teknologi Informasi Evaluas I Dan Penilaian GCG 2019 Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai <i>Guidelines of Corporate Goverance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh <i>Basel Committee in Banking Supervision</i> Rencana Peningkatan GCG 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Penyelenggaraan RUPS 2019 Pelaksanaan RUPS Tahunan Dan Rups Luar Biasa 2019 Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2019 Dewan Komisaris Tata Tertib Dewan Komisaris (BOCCharter) Kriteria, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Larangan Dewan Komisaris Kriteria Penilaian Dewan Komisaris Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris Dan Perubahan Tahun 2019 Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Independensi Dewan Komisaris Hubungan Afiliasi Kebijakan Dan Penerapan Rangkap Jabatan Kepemilikan Saham & Perubahan Tahun 2019 Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris Komisaris Independen	461	Program Orientasi, Pelatihan Dan Pengembangan Dewan Komisaris Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019 Rekomendasi Dewan Komisaris 2019 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Penilaian Atas Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris Direksi Penilaian Penerapan GCG 2019 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pengungkapan Hubungan Afiliasi Organ Pendukung Dewan Komisaris Komite Audit Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Pengawas Manajemen Risiko Komite Tata Kelola Terintegrasi Komite Direksi Sekretaris Perusahaan Hubungan Investor Satuan Kerja Audit Internal Akuntan Publik Fungsi Kepatuhan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Manajemen Risiko Sistem Pengendalian Internal Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan Akses Informasi Data Perusahaan Kode Etik Budaya Perusahaan <i>Whistleblowing System</i>	Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan & Prosedur Anti Korupsi Program Pengendalian Gratifikasi Kebijakan Perlindungan Hak Kreditur Kebijakan Perlindungan Nasabah Benturan Kepentingan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Aktiva Tetap Rencana Strategis Bank 2019 Kebijakan Lainnya Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKHPN) Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi
			 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
		868	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen	

01 IKHTISAR KINERJA UTAMA



Pada tahun 2019, BRI berhasil mencatat pencapaian kredit sebesar Rp907,4 triliun,

tumbuh 8,3% dibanding tahun 2018 sebesar Rp838,1 triliun.

Kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 79,0% dari total kredit BRI. Hal ini selaras dengan aspirasi BRI untuk mempercepat pertumbuhan sektor UMKM.





IKHTISAR KINERJA UTAMA

RINGKASAN KINERJA KEUANGAN 2019



Aset

Aset sebesar

Rp1.416,8 triliun

naik 9,2% yoy pada 2019, dari tahun sebelumnya Rp1.296,9 triliun



Liabilitas

Liabilitas sebesar

Rp1.208,0 triliun

pada 2019, naik 2,7% yoy dari tahun sebelumnya Rp1.111,6 triliun



Ekuitas

Ekuitas sebesar

Rp208,8 triliun

tumbuh 12,7% yoy pada 2019, dari tahun sebelumnya Rp185,3 triliun

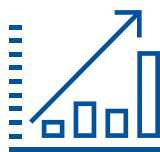


Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga sebesar **Rp1.021,2** triliun

pada 2019, naik 8,1% yoy dari tahun sebelumnya Rp944,3 triliun

Ringkasan Kinerja Keuangan 2019

**Laba Bersih**

Laba Bersih sebesar

Rp34,4 triliun

tumbuh 6,2 % yoy pada 2019, dari tahun sebelumnya Rp32,4 triliun

**Pendapatan Bunga dan Syariah**

Pendapatan Bunga dan Syariah sebesar

Rp121,8 triliun

tumbuh 9,1% yoy pada 2019 dari tahun sebelumnya Rp111,6 triliun

**Pendapatan Operasional Lainnya**

Pendapatan Operasional Lainnya sebesar

Rp28,5 triliun

tumbuh 21,8% yoy pada 2019, dari tahun sebelumnya Rp23,4 triliun

**Laba Operasional**

Laba Operasional sebesar

Rp43,4 triliun

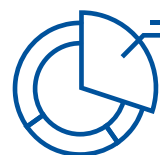
tumbuh 4,1% yoy pada 2019, dari tahun sebelumnya Rp41,7 triliun

**Beban Bunga dan Syariah Beban**

Beban Bunga dan Syariah sebesar

Rp40,0 triliun

pada 2019 naik 18,1% yoy dari tahun sebelumnya Rp33,9 triliun

**Beban Operasional Lainnya**

Beban Operasional Lainnya sebesar

Rp45,3 triliun

pada 2019, naik 7,9% yoy dari tahun sebelumnya Rp42 triliun



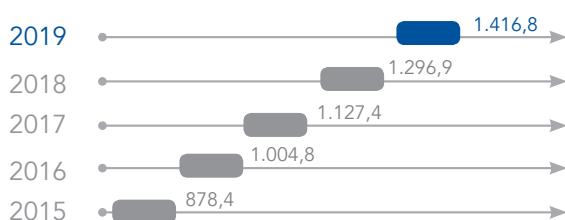
IKHTISAR KINERJA UTAMA

IKHTISAR KEUANGAN

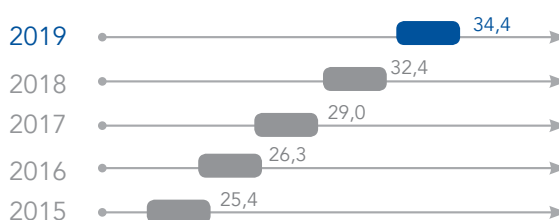
Neraca	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	878,426	1,003,064	1,127,447	1,296,898	1,416,759
Total Aset Produktif	781,913	904,657	1,025,487	1,178,211	1,298,079
Kredit – Gross	581,095	663,420	739,337	838,141	907,388
Obligasi Rekap Pemerintah	3,816	3,318	3,318	1,505	1,130
Aktiva Produktif Non Kredit	197,003	237,918	282,833	338,565	389,561
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-17,514	-22,806	-30,104	-35,303	-39,196
Total Aset Non Produktif	23,538	40,365	49,111	55,409	56,240
Total Liabilitas	765,299	856,832	959,440	1,111,623	1,207,975
Dana Pihak Ketiga	668,995	754,526	841,656	944,269	1,021,197
Giro	114,367	142,547	147,436	180,669	174,928
Tabungan	272,471	303,270	349,441	387,180	414,333
Deposito	282,157	308,709	344,780	376,420	431,936
Liabilitas Berbeban Bunga Lainnya	68,544	69,341	77,758	118,158	137,417
Liabilitas Tidak Berbeban Bunga	27,759	32,965	40,025	49,196	49,361
Modal/Ekuitas	113,127	146,813	167,347	185,275	208,784

Laba/Rugi	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Bunga & Syariah	85,434	93,995	102,899	111,583	121,756
Beban Bunga dan Syariah	-27,154	-28,577	-29,894	-33,917	-40,049
Pendapatan Bunga Bersih	58,280	65,418	73,005	77,666	81,707
Pendapatan Premi Neto	0	279	385	946	1,011
Pendapatan Operasional Lainnya	13,855	16,999	19,091	23,425	28,521
Biaya Operasional Lainnya	-31,276	-34,941	-38,442	-41,990	-45,310
Biaya CKPN	-8,900	-13,791	-17,234	-18,321	-22,497
Laba Operasional	31,959	33,965	36,806	41,726	43,432
Beban/Pendapatan Non Operasional	535	9	216	28	-68
Laba Sebelum Pajak	32,494	33,974	37,022	41,754	43,364
Beban Pajak	-7,083	-7,746	-7,978	-9,335	-8,950
Laba Bersih Tahun Berjalan	25,411	26,228	29,044	32,418	34,414
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	25,398	26,234	28,997	32,351	34,373
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	13	51	48	67	41
Laba Rugi Komprehensif	24,872	41,446	30,881	28,941	39,499
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	24,861	41,385	30,808	28,911	39,404
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan non Pengendali	11	61	72	30	95
Laba Bersih per Saham (Rp)	1,030	214	237	265	281

Aset (Rp Triliun)



Laba Bersih (Rp Triliun)



Ikhtisar Keuangan

RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)	2015	2016	2017	2018	2019
Likuiditas					
LDR	86.88%	87.77%	88.13%	89.57%	88.64%
Kualitas Kredit					
NPL Gross	2.02%	2.03%	2.10%	2.14%	2.62%
NPL Nett	1.22%	1.09%	0.88%	0.92%	1.04%
NPL Coverage	151.15%	170.34%	195.54%	200.61%	166.59%
Profitabilitas					
NIM	7.85%	8.00%	7.93%	7.45%	6.98%
BOPO	67.96%	68.93%	69.14%	68.48%	70.10%
CER	41.28%	41.26%	41.15%	41.02%	40.26%
ROA	4.19%	3.84%	3.69%	3.68%	3.50%
ROE	29.89%	23.08%	20.03%	20.49%	19.41%
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR Total)	20.59%	22.91%	22.96%	21.21%	22.55%
Rasio Kecukupan Modal Tier 1 (CAR Tier 1)	16.76%	21.91%	21.95%	20.15%	21.52%

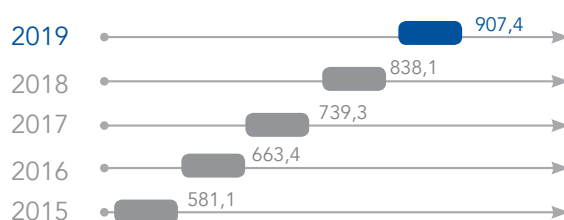
Kepatuhan	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Giro Wajib Minimum	9.31%	6.94%	6.52%	7.16%	6.57%
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	8.43%	8.03%	8.15%	8.01%	7.91%
Giro Wajib Minimum (Valas)	2.33%	6.67%	4.22%	3.73%	1.91%
Posisi Devisa Neto	2.33%	6.67%	4.22%	3.74%	1.94%

Angka kinerja keuangan tersebut di atas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas anak untuk tahun 2015: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRIIngin Remittance Co. Ltd Hongkong dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera; untuk tahun 2016: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2017: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; untuk tahun 2018: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2019: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama

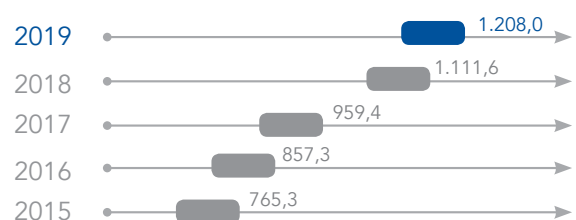
Rasio Keuangan menggunakan data bank saja.

*) Pada tahun 2016 peningkatan aset dan modal dikarenakan adanya revaluasi aset tetap sebesar Rp14,3 triliun

Kredit (Rp Triliun)



Liabilitas (Rp Triliun)





IKHTISAR KINERJA UTAMA

INFORMASI HARGA SAHAM

INFORMASI HARGA SAHAM

Harga, Volume, dan Kapitalisasi Pasar Saham BRI tahun 2015 - 2019

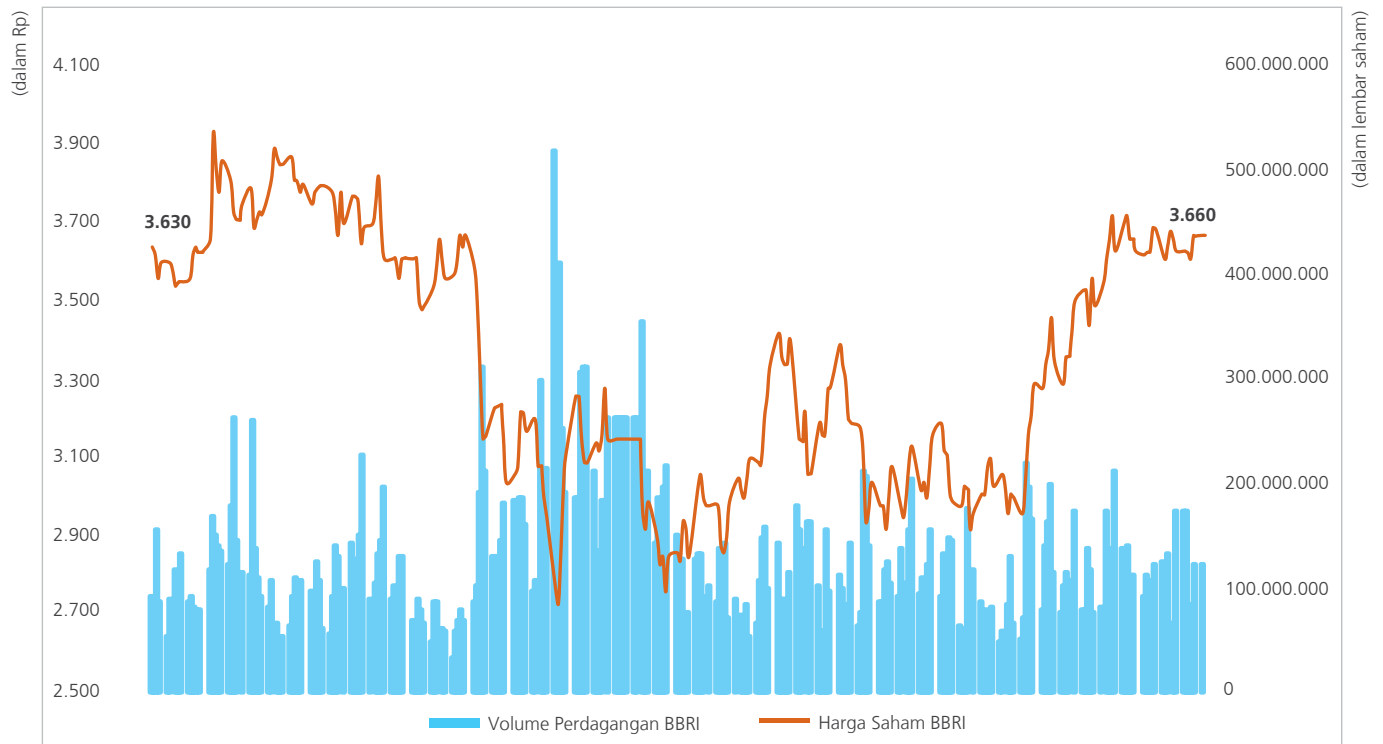
Tahun	Harga Lembar/ Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2015	2,305	2,690	1,595	2,285		34,957,535,000	
Triwulan ke-1	2,305	2,655	2,265	2,655	24,669,162,000	8,290,667,000	327.48
Triwulan ke-2	2,655	2,690	2,010	2,070		9,697,584,500	255.33
Triwulan ke-3	2,070	2,180	1,595	1,730		9,290,696,500	213.39
Triwulan ke-4	1,745	2,340	1,710	2,285		7,678,587,000	281.85
2016	2,280	2,595	1,905	2,335		32,143,440,000	
Triwulan ke-1	2,280	2,460	2,085	2,285	24,669,162,000	8,417,654,500	281.85
Triwulan ke-2	2,260	2,260	1,905	2,160		8,472,383,500	266.43
Triwulan ke-3	2,180	2,450	2,140	2,440		8,073,172,000	300.96
Triwulan ke-4	2,440	2,595	2,085	2,335		7,180,230,000	288.01
2017	2,350	3,720	2,315	3,640		23,211,823,300	
Triwulan ke-1	2,350	2,650	2,315	2,595	24,669,162,000	5,965,294,500	320.08
Triwulan ke-2	2,595	3,060	2,485	3,050		5,359,020,000	376.20
Triwulan ke-3	3,000	3,150	2,860	3,055		5,878,135,000	376.82
Triwulan ke-4	3,055	3,720	3,025	3,640	123,345,810,000 ^{*)}	6,009,373,800	448.98
2018	3,690	3,920	2,720	3,660		28,131,320,100	
Triwulan ke-1	3,690	3,920	3,530	3,600	123,345,810,000	7,159,651,000	444.04
Triwulan ke-2	3,500	3,660	3,720	2,840		8,999,924,100	350.30
Triwulan ke-3	2,890	3,410	2,830	3,150		7,056,550,400	388.53
Triwulan ke-4	3,150	3,710	2,910	3,660		6,966,375,800	451.44
2019	3,610	4,730	3,580	4,400		28,131,320,100	
Triwulan ke-1	3,610	4,140	3,580	4,120	123,345,810,000	6,650,751,600	508.18
Triwulan ke-2	4,140	4,730	3,660	4,360		7,125,444,800	537.79
Triwulan ke-3	4,400	4,560	4,000	4,120		5,934,903,000	508.18
Triwulan ke-4	4,120	4,470	3,810	4,400		6,691,041,300	542.72

^{*)} Pada tanggal 10 November 2017, Bank BRI melakukan aksi korporasi dengan memecah jumlah lembar saham (stock split) dengan rasio 1:5. Seluruh harga saham di atas telah disesuaikan dengan harga setelah stock split pada tahun 2017.

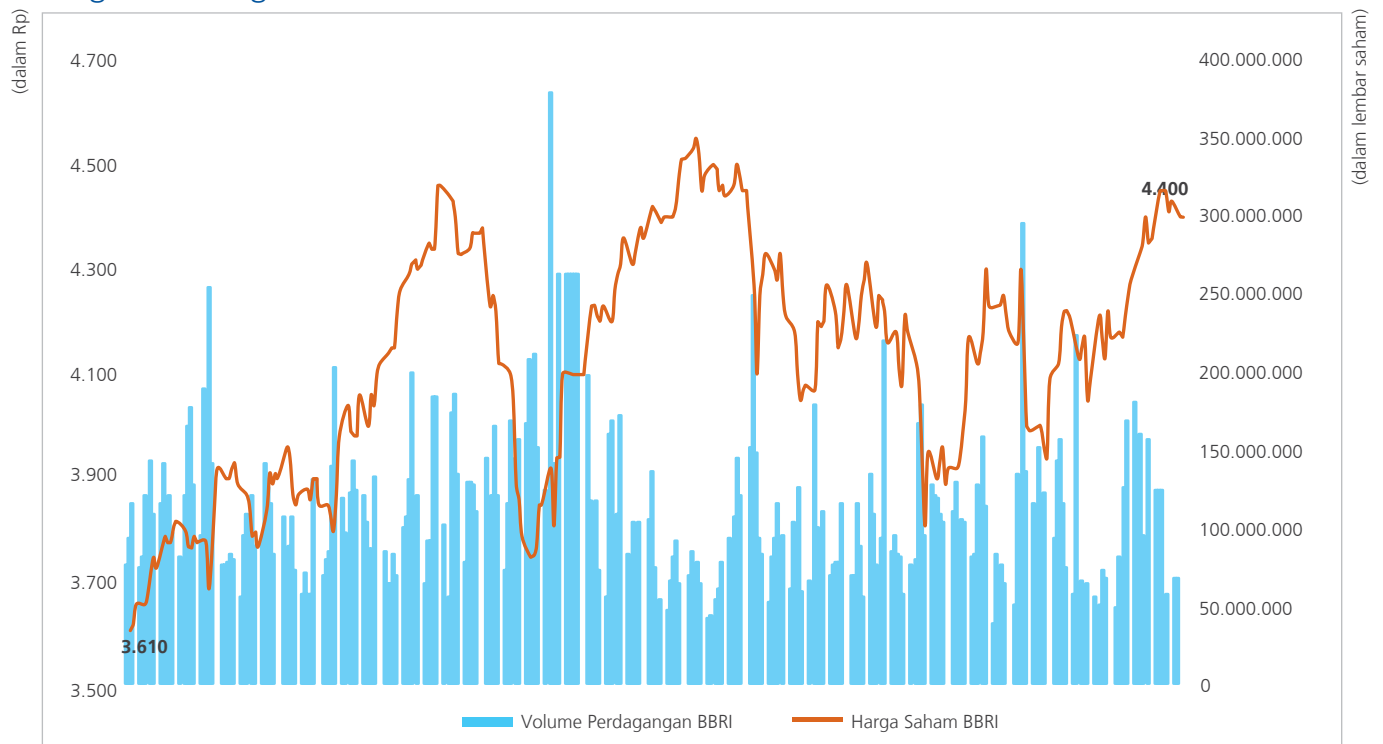
Di akhir tahun 2019, saham BRI mampu mencatat kinerja yang positif. Secara year on year, saham BRI menguat 20,22% dengan harga penutupan sebesar Rp4,400 per lembar saham dibandingkan harga penutupan tahun 2018 sebesar Rp3.660.

Saham BRI mampu mengungguli beberapa indeks saham di Indonesia, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik hanya sebesar 1,70% (year on year) dan JAKFIN (indeks harga saham perusahaan bidang keuangan) yang naik sebesar 15,22% (year on year)

Pergerakan Harga dan Volume Transaksi Saham BRI tahun 2018



Pergerakan Harga dan Volume Transaksi Saham BRI tahun 2019



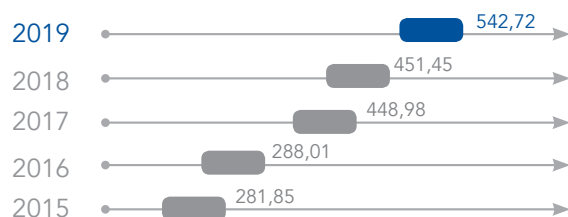


IKHTISAR KINERJA UTAMA

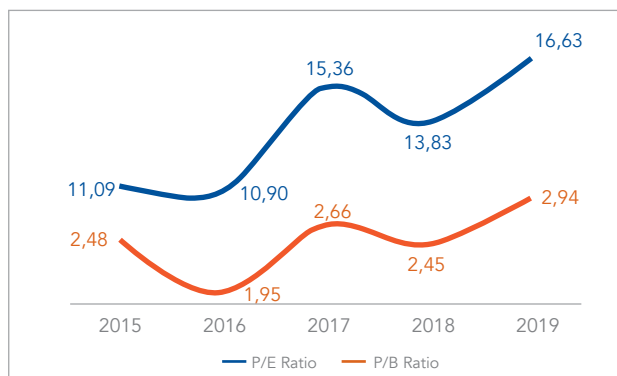
Informasi Harga Saham

Kapitalisasi Pasar Saham BRI tahun 2015-2019

(dalam Rp Triliun)



Indikator Kinerja Saham BRI tahun 2015-2019



Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham BRI Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, pasar modal Indonesia relatif stagnan, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dinamika dan menantang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 1,70% yoy mencapai level 6.299,54, lebih baik dibanding indeks akhir tahun 2018 yang terkoreksi sebesar -2,54% (yoy).

Tren membaiknya IHSG didorong berbagai sentimen positif dari dalam negeri, antara lain pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat, terkendalinya tingkat inflasi, tren penurunan suku bunga acuan dan peningkatan peringkat kredit Indonesia oleh S&P yang memicu capital inflows ke pasar domestik.

Meskipun demikian, pertumbuhan IHSG masih relatif terbatas seiring dengan pelemahan kondisi perekonomian global akibat ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta meningkatnya tensi geopolitik di beberapa negara emerging market.

Sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang terjaga, pada tahun 2019 BRI juga mencatat kinerja yang baik. Kredit BRI tumbuh sebesar 8,3% yoy, diatas industri perbankan yang sebesar 6,1% yoy, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 8,1% yoy, lebih baik dari rata-rata industri sebesar 6,6% yoy. BRI juga berhasil menjaga kualitas kredit dimana NPL terjaga pada level 2,6% (Bank Saja).

Pada periode yang sama, harga saham BRI mencatat kinerja yang positif dan lebih baik dari market yaitu tumbuh 20,2% yoy mencapai level Rp4.400, dengan harga saham perdagangan harian tertinggi dan terendah selama tahun 2019 masing-masing mencapai Rp4.730 pada 18 April 2019 dan Rp3.580 pada 3 Januari 2019.

Kapitalisasi pasar saham BRI mencapai Rp542,72 triliun di akhir tahun 2019. Posisi tersebut menjadikan BRI sebagai bank dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara, lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi keempat.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR

Informasi Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Harga Penawaran	Tenor (Bulan)	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat	Tujuan Utama Penerbitan
										2019	2018	2017		
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	25 Jul'15	3 Jul'20	Rp1.420.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	9.30	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	19 Jan'16	4 Feb'21	Rp2.823.500	100% dari jumlah pokok obligasi	60	9.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	4 Mei'16	25 Mei'21	Rp701.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.70	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	2 Des'16	1 Des'21	Rp193.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.20	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	2 Dec'16	1 Des'23	Rp477.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	8.65	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	2 Dec'16	1 Des'26	Rp2.350.000	100% dari jumlah pokok obligasi	120	8.90	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	12 Apr'17	11 Apr'20	Rp1.743.500	100% dari jumlah pokok obligasi	36	8.10	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	12 Apr'17	11 Apr'22	Rp925.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.30	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	Rp1.300.500	100% dari jumlah pokok obligasi	120	8.80	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Aug'20	Rp980.500	100% dari jumlah pokok obligasi	36	7.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Agu'17	24 Aug'22	Rp1.652.500	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.00	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Aug'24	Rp2.517.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	8.25	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	IDR	22 Feb'18	21 Feb'23	Rp1.837.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	6.65	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	IDR	22 Feb'18	21 Feb'25	Rp605.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	6.90	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	



IKHTISAR KINERJA UTAMA

Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Informasi Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Harga Penawaran	Tenor (Bulan)	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat	Tujuan Utama Penerbitan
										2019	2018	2017		
15	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	IDR	27 Jun'18	26 Jun'23	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	7.70	Belum Jatuh Tempo	AA oleh Pefindo	AA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK <i>Recovery Plan</i> dan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) dan selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan peningkatan aset produktif.
16	Senior Unsecured Notes Due 2023	USD	16 Jul'18	20 Jul'23	USD500	99.696% dari jumlah pokok Obligasi.	60	4.63	Belum Jatuh Tempo	Baa2 oleh Moodys BBB- oleh Fitch Rating	Baa2 oleh Moodys BBB- oleh Fitch Rating	-	Bank of New York Mellon, London Branch	Memperkuat Struktur Pendanaan Umum
17	Sustainability Bond (Senior Unsecured Notes) Due 2024	USD	28 Mar'19	28 Mar'24	USD500	99.713% dari jumlah pokok obligasi	60	3.95	Belum Jatuh Tempo	Baa2 oleh Moodys BBB- oleh Fitch Rating	-	-	Bank of New York Mellon, London Branch	Mendanai <i>Eligible Project</i> sesuai <i>Sustainability Framework</i>
18	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	IDR	7 Nov'19	17 Nov'20	Rp737.850	100% dari jumlah pokok obligasi	370 hari	6.50	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
19	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	IDR	7 Nov'19	7 Nov'20	Rp2.089.350	100% dari jumlah pokok obligasi	36	7.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
20	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	IDR	7 Nov'19	7 Nov'24	Rp2.172.800	100% dari jumlah pokok obligasi	60	7.85	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	

Informasi Obligasi yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	USD 150	120	7.75	B3	Moodys	Memperkuat permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	Rp500.000	120	13.50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22 Des'09	22 Des'14	Rp2.000.000	60	10.95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	USD500	60	2.95	Baa3	Moodys	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25 Jun'15	7 Jul'16	Rp650.000	370 hari	8.40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25 Jun'15	3 Jul '18	Rp925.000	36	9.20	AAA	Pefindo	

Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Informasi Obligasi yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
7	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19 Jan'16	8 Feb'17	Rp808.000	370 hari	8.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19 Jan'16	4 Feb'19	Rp1.018.500	36	9.25	AAA	Pefindo	
9	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	4 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
10	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	4 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	2 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	2 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 hari	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2019, BRI tidak pernah menerbitkan sukuk.

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2019, BRI tidak pernah menerbitkan obligasi konversi.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Konversi dengan Pelunasan Dipercepat

Sampai dengan 31 Desember 2019, BRI tidak pernah memiliki obligasi dengan pelunasan yang dipercepat.



IKHTISAR KINERJA UTAMA

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Informasi *Medium Term Note (MTN)* yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10/10/2014	370 hari	IDR	300.000	15/10/2015	8,75	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10/10/2014	24	IDR	60.000	10/10/2016	9,25	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10/10/2014	36	IDR	360.000	10/10/2017	9,5	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24/12/2014	12	IDR	520.000	24/12/2015	8,9	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16/9/2016	370 hari	IDR	1.925.000	21/9/2017	7,4	Sudah Lunas

Informasi *Negotiable Certificate Deposit (NCD)* yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
NCD BRI Tahun 2014 Seri A	2/12/2014	3	IDR	165.000	2/3/2015	8,00	Sudah Lunas
NCD BRI Tahun 2014 Seri B	2/12/2014	6	IDR	790.000	2/6/2015	8,60	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	22/4/2015	3	IDR	595.000	22/7/2015	7,10	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	22/4/2015	6	IDR	1.020.000	22/10/2015	8,00	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	22/4/2015	9	IDR	265.000	22/1/2016	8,10	Sudah Lunas

AKSI KORPORASI

28 Maret 2019:

Sustainability Bond BRI Tahun 2019 (*Senior Unsecured Notes Due 2024*), jatuh tempo pada 28 Maret 2024, dengan nilai nominal USD500.000.000 dan *coupon rate* sebesar 3,95%, serta peringkat Baa2 dari Moodys dan BBB- Fitch.

26 September 2019

Pengambilalihan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur ("BRINS") sebesar 90% kepemilikan senilai Rp1,04 Triliun.

7 November 2019:

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2019 Seri A, jatuh tempo pada 17 November 2020, dengan nilai nominal Rp737.850.000.000 dan *coupon rate* sebesar 6,50%, serta peringkat AAA dari Pefindo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2019 Seri B, jatuh tempo pada 7 November 2022, dengan nilai nominal

Rp2.089.350.000.000 dan *coupon rate* sebesar 7,60%, serta peringkat AAA dari Pefindo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2019 Seri C, jatuh tempo pada 7 November 2024, dengan nilai nominal Rp2.172.800.000.000 dan *coupon rate* sebesar 7,85%, serta peringkat AAA dari Pefindo.

PEMBAYARAN DIVIDEN

Target RUPS	Tanggal Pembayaran	Tahun	Rasio Pembayaran Dividen (%)	Dividen (Rp Miliar)	Dividen Per Saham*
2004	23 Juli 2004	2003	75,01	990	84,19
2005	5 Juli 2005	2004	50	1.816	152,88
2006	10 Juli 2006	2005	50	1.904	156,18
2007	2 Juli 2007	2006	50	2.129	173,04
2008	7 Juli 2008	2007	50	2.419	196,34
2009	3 Juli 2009	2008	35	2.085	168,82
2010	15 Juli 2010	2009	30	2.192	132,08
2011	15 Juni 2011	2010	20	2.294	70,04
2012	15 Mei 2012	2011	20	3.017	122,28
2013	15 April 2013	2012	30	5.556	225,23
2014	14 Mei 2014	2013	30	6.348	257,33
2015	22 April 2015	2014	30	7.272	294,80
2016	22 April 2016	2015	40	7.619	311,66
2017	13 April 2017	2016	40	10.478	428,61
2018	4 April 2018	2017	45	13.048	106,74
2019	13 Juni 2019	2018	50	16.176	132,17

*) Seluruh angka dividen telah disesuaikan dengan *Stock Split* 1: 2 pada Januari 2011 dan 1:5 pada Oktober 2017

Penentuan besaran dividen diputuskan dalam RUPST sebagai organ utama perusahaan. Dalam RUPST 2019 untuk tahun buku 2018, telah diputuskan pembayaran dividen sebesar Rp16.176 miliar atau rasio *Dividend Pay Out/* DPO sebesar 50%. Dalam proses

penentuan DPO tersebut, manajemen berhak untuk mengajukan besaran dividen dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memperhatikan pemenuhan rasio kecukupan modal (CAR).

Dengan implementasi Basel III yang dimulai pada Januari 2015 secara bertahap sampai dengan implementasi penuh pada Januari 2019, maka tingkat minimum CAR yang harus dijaga adalah sebesar 14,53%.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Sampai dengan penerbitan Laporan Tahunan 2019 ini, Bank BRI tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham Perseroan ataupun penghapusan pencatatan saham.



IKHTISAR KINERJA UTAMA

PERISTIWA PENTING

31 Januari



Bank BRI bersama PT. Pupuk Indonesia menggelar event *Spirit of Millennials: Green Festival* di Jakarta Convention Center yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan minat generasi milenials terhadap gaya hidup ramah lingkungan, *urban framing*, dan agrikultur di Indonesia.

13 Maret



Wakil Direktur Utama Bank BRI Sunarso berbagi ilmu dengan para praktisi humas dalam rangkaian acara kongres dan musyawarah nasional forum humas BUMN yang bertajuk "*Public Relation in the Perspective of the BOD*".

21 Maret



Bank BRI mendapatkan penghargaan bergengsi dari The Asian Banker Sebagai *Best Retail Banking in Indonesia* dan *Best Digital Banking in Indonesia* yang diselenggarakan di Dubai pada *International Excellence in Retail Financial Services Award 2019*.

20 Februari



Bank BRI berbagi pengalaman dengan 1.200 mahasiswa UNPAD dalam Kegiatan Kuliah Umum yang digelar oleh BUMN mengenai strategi bisnis BRI, dan juga profil BRI secara komprehensif.

25 Februari



Bank BRI bekerja sama dengan Konsulat Jendral RI menyelenggarakan pelatihan bagi para wirausaha karya kriya untuk menjadi pelaku UMKM yang berorientasi ekspor. Dalam event ini juga turut mengundang Jennifer Isaacson sebagai pakar *craft business* dan kurator dari AS untuk memberikan *coaching clinic* kepada 30 pelaku kriya terpilih.

27 Februari



Bank BRI meluncurkan aplikasi BRI_{mo} berbasis data dengan *user interface* dan *user experience* dan fitur terbaru yang dapat digunakan oleh nasabah/non nasabah, salah satu fiturnya adalah kemudahan *log in* menggunakan *finger print* maupun *face ID recognition*.

4 April



Bank BRI meraih predikat Best of The Best Company dari BUMN Marketeers Award 2019.

15 April



Bank BRI menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon dengan memfasilitasi pembiayaan kendaraan emisi rendah karbon yang ramah lingkungan melalui Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Peristiwa Penting

16 April



Bank BRI dukung pemerintah genjot pariwisata halal yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai *Moslem District Destination*.

21 April



Bank BRI mengadakan acara talkshow inspiratif dalam memperingati Hari Kartini, adapun pembicara teridiri dari Komisaris BRI Rofikoh Rokhim, Direktur Konsumer BRI Handayani, Direktur HC BRI R. Sophia Aliza dan Maudy Koenaeadi dengan peserta lebih dari 250 wanita milenial BRI.

24 April



Pemaparan Kinerja Triwulan I Bank BRI raih laba Rp8,20 triliun

21 Mei



Bank BRI menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama 3.500 anak yatim piatu dari 70 yayasan yatim piatu dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, dan SEVP Bank BRI.

28 Mei



Bank BRI menggelar program mudik bareng BRI menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019

29 Mei

Bank BRI mendapatkan Penghargaan sebagai *The Best Managed Bank in Indonesia* dari The Asian Banker.



3 Juli



Bank BRI mendapatkan 3 Penghargaan Prestisius dari Corporate Governance Asia, diantaranya Asia's Best CEO (Investor Relations), Asia's Best CFO (Investor Relations), dan Best Investor Relations Company.

30 Juli



Bank BRI bersama OJK mengadakan kegiatan bertema Aksi Mahasiswa dan Menabung 2019 yang dihadiri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ketua Dewan Komisiner OJK, Direktur Konsumer BRI, dll.



IKHTISAR KINERJA UTAMA

Peristiwa Penting

14 Agustus



Pemaparan Kinerja Triwulan II, kredit UMKM Bank BRI tumbuh 13% yoy.

15 Agustus



Bank BRI berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus di IDX Channel Innovation Award 2019 sebagai *The Best Innovative Company in Finance Sector*, *The Best Innovation*, *The Best CEO*, dan *The Best Millenials Investor Choice*.

19 Agustus



Bank BRI memberikan apresiasi kepada tim paskibraka nasional tahun 2019 yang telah mengibarkan sang saka merah putih di istana negara pada HUT RI ke 74

23 Agustus



Bank BRI tambah kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta.

2 September



Bank BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada tanggal 2 september 2019. Dalam acara tersebut, dipaparkan kinerja keuangan Bank BRI 2018 serta perubahan pengurus perseroan. Perubahan Pengurus: mengangkat Direktur Utama Bank BRI Sunarso Wadirut: Catur Budi Harto, Direktur Hubungan Kelembagaan: Agus Noorsanto, Direktur HC: Herdy Rosadi Harman, Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto, Direktur Kepatuhan: Azizaton Azimah.

11 November



Bank BRI bekerjasama dengan NOAH, dimana disetiap konsernya NOAH akan turut memperkenalkan super app milik Bank BRI yaitu BRIMO.

14 November



Bank BRI mendapatkan juara 3 Annual Report Award 2018 di kategori BUMN Keuangan Listed.

23 November



Bank BRI menggelar pentas teater musikal Lala Love di Taman Kantor Pusat Bank BRI.

28 November



Bank BRI dinobatkan sebagai Bank UMKM terbaik dan Bank pendukung pendalaman pasar uang terbaik pada pertemuan tahunan Bank Indonesia.

Peristiwa Penting

4 September



Bank BRI mengapresiasi nasabah yang datang ke Unit Kerja sebagai bentuk penghargaan loyalitas nasabah pada Hari Pelanggan Nasional.

11 September



Bank BRI menyalurkan CSR BRI Peduli di bidang lingkungan dan sarana umum kepada masyarakat di sekitar Danau Ranu Pane, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan berupa pengerukan dan pelebaran bibir Danau Ranu Pane yang berlokasi di kaki gunung Semeru, penanaman 5000 bibit pohon cemara gunung di sekitar hutan lindung gunung Semeru dan merevitalisasi shelter pendakian.

13 September



Bank BRI memenangkan penghargaan kategori *Best Operating Model Master* dengan produk Agen BRILink dari International Data Corporation.

11 Oktober



Bank BRI bekerjasama dengan Grab yang meluncurkan e-scooter (Grabwheels) menciptakan kawasan bisnis ramah lingkungan dengan mendukung program Go Green untuk meminimalisasi pemanasan global.

1 Desember



Bank BRI menggelar acara BRILian RUN 2019 Surabaya Series. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT 124 Bank BRI.

16 Desember



Bank BRI merayakan hari ulang tahunnya yang ke-124. HUT kali ini mengambil tema "Untuk Indonesia BRILian" dan dilaksanakan di area Gedung BRI Kantor Pusat

20-22 Desember



Dalam rangka pemberdayaan UMKM Indonesia, Bank BRI menggelar "UMKM Export BRILian Preneur 2019" di Assembly Hall JCC, Jakarta, dengan diikuti oleh tak kurang 150 UMKM binaan Bank BRI

22 Desember



65.000 orang yang terdiri dari pekerja Bank BRI dan keluarganya di area Jabodetabek mengikuti BRILian Family Festival (BRIFFEST) yang merupakan puncak rangkaian HUT ke-124 Tahun Bank BRI yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC).

02

LAPORAN MANAJEMEN



Perseroan mampu meningkatkan pembiayaan ke segmen UMKM sebesar Rp 700,84 Triliun atau setara 77,60% dari total kredit BRI di Tahun 2019. Hal tersebut, sesuai dengan aspirasi Bank BRI untuk mewujudkan porsi kredit segmen UMKM mencapai minimal 80% dari total kredit BRI di tahun 2022.





Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

ASET PERSEROAN SECARA KONSOLIDASIAN MENCAPAI RP1.416,8 TRILIUN DI AKHIR TAHUN 2019 TELAH MENEMPATKAN PERSEROAN SEBAGAI KONGLOMERASI KEUANGAN TERBESAR DI INDONESIA DENGAN PEROLEHAN LABA YANG TERBESAR MENCAPAI RP34,4 TRILIUN, MERUPAKAN YANG TERTINGGI DI INDUSTRI KEUANGAN DAN BERTURUT-TURUT SELAMA 14 TAHUN TERAKHIR.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya. Kami sampaikan pada 2019, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) telah berhasil mempertahankan kinerja terbaik dan beradaptasi dengan berbagai perubahan di dunia perbankan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Manajemen atas pencapaian perseroan selama 2019. Perseroan masih menunjukkan kondisi terbaik di tengah perlambatan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional yang moderat. Bahkan, angka kinerja Perseroan mengalami pertumbuhan dari pada tahun sebelumnya dan di atas rata-rata Industri perbankan nasional.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian kinerja Perseroan tidak lepas dari kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham yang telah diperoleh selama ini menjadi landasan bagi perkembangan bisnis Perseroan saat ini dan di masa mendatang.



Modal Perseroan juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) mencapai

22,8%

jauh di atas ketentuan regulator



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris

Aksi korporasi berupa akuisisi dan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan asuransi umum, PT. BRI Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) menjadikan Perseroan memiliki delapan perusahaan anak sehingga konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia semakin lengkap dalam menyediakan layanan jasa keuangan.

PENILAIAN ATAS KINERJA MANAJEMEN

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Manajemen Perusahaan pada 2019 berdasarkan rencana kerja tahunan dan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai secara keseluruhan selama tahun 2019 Manajemen telah menunjukkan kinerja yang baik dan membanggakan dalam mengelola Perseroan di tengah dinamika perekonomian. Manajemen juga berada pada arah yang konsisten untuk mencapai tujuan Perseroan tahun 2022.

Aset Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp1.416,8 triliun di akhir 2019 telah menempatkan Perseroan sebagai konglomerasi keuangan terbesar di Indonesia dengan perolehan laba yang terbesar mencapai Rp34,4 triliun, merupakan yang tertinggi di industri keuangan dan berturut-turut selama 14 tahun terakhir. Perseroan dapat memelihara fungsi intermediasi bank pada tingkat yang optimal sepanjang tahun 2019. Likuiditas dan kualitas kredit dengan *non-performing loan* (NPL) terjaga dengan baik. Modal Perseroan juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 22,8%, jauh di atas ketentuan regulator. Secara umum, kinerja keuangan Perseroan pada 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif di semua indikator utama.

Peran serta Perseroan sebagai Agen Pembangunan tercermin dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, baik dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak-pihak lainnya, patut dibanggakan. Selama tahun 2019, Perseroan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lebih dari 4 juta debitur senilai Rp87,9 triliun, sebanyak 3,2 juta Kartu Tani, Program Keluarga

Harapan (PKH) kepada sekitar 3,7 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 5,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta menyediakan akses layanan keuangan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai agen BRILink yang mencapai 22.654 rekening, 8.662 agen, dan lebih dari 4 juta transaksi. Perseroan juga membentuk *digital economy ecosystem* melalui pembinaan 318.093 UMKM di 53 Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI. Melalui RKB BRI, Perseroan dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi *BRIIncubator* untuk melakukan pendampingan, modernisasi dan pemberdayaan kelompok untuk menciptakan *teknopreneur* baru dan memfasilitasi UMKM menjadi *well literate* dan naik kelas. Semangat memberdayakan UMKM, Perseroan tunjukkan melalui penyelenggaraan BRILianpreneur UMKM Export 2019 sebagai ajang pertemuan para pelaku bisnis UMKM dan pameran produk-produk UMKM dan pelatihan 10.000 UMKM yang dilaksanakan serentak di 100 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Aktivasi dan komitmen Perseroan dalam program *branchless banking* Bank Indonesia, program inklusi keuangan dan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan, diwujudkan melalui 422.160 agen BRILink yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan pemegang polis asuransi AM-KKM BRI (Asuransi Mikro-Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia) sebesar 28,6% menjadi sebanyak 4,6 juta polis, dan fasilitas tambahan berupa wadah terkunci bernama teman simpedes bagi 110 ribu pemegang rekening.

Kewajiban Perseroan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) telah dijalankan dengan antusias, konsisten dan berkesinambungan, baik kegiatan maupun anggaran.

Laporan Dewan Komisaris

Berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui tujuh klaster program bina lingkungan yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari, dan Indonesia Sejahtera telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Program bina lingkungan “BRI Peduli” ini merupakan bentuk kontribusi dan komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia.

Perseroan dalam kapasitas sebagai entitas utama konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia, melalui perencanaan bisnis yang tepat dan membangun sinergi di semua aspek yang disertai dengan pengawasan yang efektif, berhasil membawa kinerja semua entitas perusahaan anak untuk tumbuh lebih baik. Sepanjang 2019, Dewan Komisaris telah memberikan dua persetujuan aksi korporasi yang meliputi tambahan penyertaan modal dan fasilitas penyediaan dana kepada perusahaan anak, akuisisi perusahaan lain dan rencana strategis lainnya. Melalui aksi korporasi berupa akuisisi dan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan asuransi umum, PT. BRI Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) menjadikan Perseroan memiliki delapan perusahaan anak. Dengan demikian, konglomerasi keuangan BRI semakin lengkap dalam menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini akan mendorong terwujudnya peran BRI sebagai *integrated financial solution* bagi semua segmen nasabah dengan bermacam ragam kebutuhan layanan keuangan pada 2020.

Selama 2019, Perseroan menerbitkan berbagai produk dan aktivitas baru, memperkaya *business model* dan menyempurnakan *business process*, baik dalam rangka mempertahankan *existing customer* maupun menyasar *new customer*, termasuk kelompok masyarakat milenial. Tidak saja terbatas dalam konteks Perseroan sebagai lembaga intermediasi tetapi juga penyedia layanan jasa sistem pembayaran yang handal, terpercaya dan efisien. Dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang mengarah pada *digital banking* pada semua produk dan aktivitas akan meningkatkan daya saing Perseroan dalam menghadapi tuntutan yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dewasa ini. Disertai perbaikan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan internalisasi nilai-nilai utama Perseroan (*Integrity, Professionalism, Trust,*

Innovation dan Customer Centric), kami yakin bahwa Perseroan akan selalu dapat memenangkan persaingan dan tumbuh secara berkelanjutan. Keyakinan kami semakin bertambah dengan adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi dan capaian kinerja Perseroan oleh berbagai lembaga yang kredibel, baik lembaga domestik maupun internasional.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja, dan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawabannya, Dewan Komisaris menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib kerja, yang selalu disesuaikan dengan perubahan ketentuan dan tuntutan yang dihadapi.

PENGENDALIAN RISIKO & PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pencapaian kinerja bisnis, peran sebagai Agen Pembangunan dan tanggungjawab sosial yang cukup solid tersebut di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pengelolaan risiko Perseroan yang *prudent*. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas risiko dalam seluruh aktivitas fungsional Perseroan pada triwulan IV/2019 tercatat pada peringkat komposit 2 atau *low to moderate*, yaitu merupakan hasil penggabungan dari faktor risiko inheren pada peringkat *low to moderate* dan faktor kualitas penerapan manajemen risiko pada peringkat *satisfactory*.



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris

Pengelolaan risiko Perseroan sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan juga mengadopsi *best practice* yang didukung dengan sistem informasi manajemen risiko yang memadai sehingga ketepatan penilaian dapat diyakini, baik faktor risiko inheren maupun faktor kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR). Parameter dan *limit* yang ditetapkan pada setiap jenis risiko pada 2019 sudah cukup mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur serta dilakukan penyempurnaan beberapa aspek kualitas penerapan manajemen risiko. Penetapan risiko dibahas dan ditetapkan dalam forum *Risk Management Committee*, yang diselenggarakan setiap triwulan dan disampaikan dalam forum rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direktur terkait.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yang terdiri dari *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* telah menjamin dan membuktikan terselenggaranya dengan baik *day to day operation* atas 11 (sebelas) faktor GCG sebagaimana ketentuan yang diatur oleh regulator. Perseroan juga mengadopsi prinsip dan standar *best practice* penerapan GCG yang berlaku secara umum, termasuk perbankan seperti *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operational Development* (OECD), *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta Pedoman Umum GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Tinjauan dan perbaikan terus dilakukan dalam rangka menyempurnakan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi Perseroan. Kerjasama dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memperoleh penilaian dan masukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pembahasan mengenai kualitas manajemen risiko dan implementasi GCG tidak hanya terbatas di lingkup induk Perseroan tetapi secara berkala juga dilakukan bersama dengan perusahaan anak dalam konteks konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Memastikan bahwa kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan atas setiap aktivitas fungsional Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan regulator senantiasa menjadi komitmen Perseroan. Dewan

Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan semakin baik di semua jenjang organisasi dan fungsi, antara lain dengan membangun dan menyempurnakan sistem dan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Kesalahan pelaporan kepada regulator yang berdampak pada pengenaan sanksi kewajiban membayar, sebagai akibat *human error* dan kelemahan sistem, menjadi salah satu yang harus dihindari.

PENGENDALIAN INTERN

First line of defence, *second line of defence* dan *third line of defence* dalam kerangka pengendalian intern Perseroan, secara umum sudah berfungsi efektif memberikan keyakinan yang memadai. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan fungsi ini, yaitu unit kerja bisnis, operasional dan pendukung bisnis telah dibekali pedoman kerja dan dukungan sistem, unit kerja pengelola risiko telah melakukan pemantauan dan memberikan masukan serta unit kerja pengawasan intern telah melakukan pengawasan dan audit dengan baik.

Temuan audit, baik yang dilakukan oleh otoritas pengawas, akuntan publik maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan tindak lanjut oleh Perseroan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Temuan audit yang belum selesai ditindak lanjuti, terus dipantau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit agar dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan rekomendasi auditor. Temuan audit tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan audit serta digunakan sebagai dasar menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan mengaudit Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

STRATEGI ANTI FRAUD DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Selama setahun terakhir, *fraud* dilakukan oleh oknum internal Perseroan, eksternal dan kerjasama keduanya dengan modus yang semakin bervariasi, baik dengan cara konvensional maupun dengan bantuan sarana teknologi informasi dan digital. Frekuensi kejadian dan kerugian yang ditimbulkan menjadi perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan risiko reputasi dan Perseroan harus selalu menjaga kepercayaan

Laporan Dewan Komisaris

masyarakat, mengingat pihak yang disasar dan dirugikan adalah Perseroan dan nasabah Perseroan.

Sebagai wujud perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk pencegahan *fraud* dan upaya pengendalian *fraud* terus dilakukan melalui perbaikan empat pilar strategi yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Perseroan telah mengembangkan sistem deteksi dini dengan berbagai metodologi pendekatan melalui perangkat teknologi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai profil pekerja Perseroan dan nasabah yang lengkap dan akurat dalam prinsip *Know Your Employee* dan *Know Your Customer*. Dalam waktu bersamaan *low enforcement* disertai dengan *punishment* yang tegas kepada mereka para pelaku *fraud* yang sudah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan saat ini. Semua upaya di atas diharapkan dapat mengarah pada *zero fraud*.

Perseroan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perseroan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, yang salah satunya adalah dengan menyampaikan surat pengumuman larangan memberikan dan menerima gratifikasi kepada seluruh pengurus dan pekerja Perseroan menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, Perseroan telah membentuk unit kerja Unit Pengendalian Gratifikasi BRI yang memberikan layanan informasi dan pelaporan gratifikasi serta perlu mengembangkan deteksi anti *fraud* yang berbasis *big data*.

PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris memandang *whistle blowing system* (WBS) memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan telah memiliki dan melaksanakan WBS dengan membuka beberapa saluran pengaduan (telepon, sms, email, dan *website*). Pada 2019, Dewan Komisaris memberikan arahan dalam penyusunan dan melakukan pengawasan penerapan sistem WBS khusus terkait dengan laporan keuangan. SKAI bertugas untuk membantu memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik. Banyak pengaduan dan kasus yang telah ditindaklanjuti bersumber dari pengembangan WBS. Secara periodik, Dewan Komisaris

memantau dan memastikan WBS berjalan secara efektif, antara lain dengan memanfaatkan laporan dari SKAI dan tindak lanjutnya serta memastikan WBS ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dewan Komisaris meyakini WBS merupakan bagian dari upaya pemeliharaan budaya dan kepedulian yang baik atas lingkungan kerja sekitar.

RENCANA KERJA 2020

Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Perseroan 2020 yang disusun secara realistis dengan berdasarkan asumsi makro yang relevan dan mengacu pada angka-angka perkiraan yang dikeluarkan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris menilai tepat rencana kerja 2020 yang mencakup rencana bisnis, peran BRI sebagai agen pembangunan dan agen penciptaan nilai yang fokus pada ekonomi kerakyatan melalui beberapa aktivitas inkubasi, peningkatan kapasitas UMKM, penyaluran berbagai program pemerintah dan program inklusi keuangan.

Dewan Komisaris optimis target kinerja keuangan dan non-keuangan akan tercapai mengingat secara historis Perseroan memiliki inisiatif-inisiatif strategis dalam mencapai target yang ditetapkan. Inisiatif strategis tersebut dibangun sesuai dengan *destination statement* yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Pada 2020, Perseroan telah menetapkan *integrated financial solution* sebagai *destination statement* yang tentunya sangat relevan dengan profil konglomerasi BRI dengan delapan perusahaan anak. Destinasi ini merupakan bagian dari tahapan rencana perusahaan dalam kerangka mencapai visi menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent* di tahun 2022.

REKOMENDASI

Berdasarkan capaian dan prestasi pada 2019 dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perseroan 2020 serta memperhatikan *outlook* kondisi perekonomian, perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan *stakeholders* yang semakin kompleks, maka Dewan Komisaris menengarai masih cukup ruang untuk peningkatan kinerja Perseroan, antara lain dengan cara :

- Terus berinovasi mengembangkan *business model* dan *business process* disertai penguatan penanaman nilai-nilai utama Perseroan agar mampu menjawab tantangan dan memberikan solusi di era digital;



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris

- Fokus dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi yang tangguh di BRI Induk dan Perusahaan anak secara terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa keuangan yang cepat, efisien dan aman;
- Fokus dalam pengembangan *human capital*, pemberian remunerasi berbasis kinerja, serta optimalisasi alokasi anggaran pengembangan *human capital* yang sejalan dengan arah pemerintah untuk mendorong perbaikan kualitas SDM.
- Mendorong peningkatan aktivitas *transactional banking* utamanya yang berbasis digital, yang pada gilirannya akan memperbaiki struktur dana Perseroan, memperbesar pangsa *current account-saving account* (CASA) sehingga menurunkan *cost of fund* dan meningkatkan *fee based income*;
- Meningkatkan sinergi bisnis dengan Perusahaan Anak dan antar Perusahaan Anak sehingga kontribusi perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan BRI semakin meningkat;
- Meningkatkan *prudential banking*, mengurangi *non-performing loan*, lebih selektif dalam restrukturisasi kredit dan meningkatkan *recovery* kredit yang sudah dihapusbuku;
- Mengendalikan risiko operasional dan risiko kredit, dan
- Menjadikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) semakin efektif dan optimal dalam membawa kelompok sasaran naik kelas dan mendukung perbaikan kualitas pembangunan, terutama di sektor Pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan SDM Unggul.

PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama 2019, telah terjadi dua kali perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Pertama dengan ditetapkannya Sdr. Gatot Trihargo sebagai Komisaris PT. Pertamina (Persero), maka sejak tanggal 29 April 2019 tidak lagi menjabat wakil komisaris utama Bank BRI. Selanjutnya, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Mei 2019 rapat mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Gatot Trihargo sebagai Wakil Komisaris Utama dan Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Independen. Sebagai penggantinya, RUPST mengangkat dua orang Dewan Komisaris Perseroan, Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama dan Sdr. Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) digelar tanggal 2 September 2019, memutuskan menyetujui pengangkatan Sdr. Loeke Larasati Agustina sebagai Komisaris Perseroan. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero), maka sejak tanggal 18 November 2019 tidak lagi menjabat Wakil Komisaris Utama Bank BRI.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Gatot Trihargo, Sdr. Mahmud dan Sdr. Wahyu Kuncoro atas segala dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris BRI. Pengalaman yang mumpuni dan pengetahuan yang dalam industri jasa keuangan dan perbankan, dari keduanya sangat terasa dalam memberikan pemikiran dan gagasan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2019 terdiri dari Komisaris Utama/Komisaris Independen, empat orang Komisaris Independen dan tiga orang Komisaris, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/ Independen	Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Hendrikus Ivo
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	Hadiyanto
Komisaris	Loeke Larasati Agoestina*

*) Efektif setelah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK

Laporan Dewan Komisaris

PENUTUP

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemegang saham, nasabah, mitra usaha, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Kepada semua pekerja BRI dan segenap Perusahaan Anak di Kantor Pusat sampai unit kerja terkecil yang tersebar di seluruh penjuru negeri, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama ini dalam memajukan Perseroan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan kinerja terbaiknya pada tahun-tahun yang akan datang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas Nama Dewan Komisaris



Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Independen

DEWAN KOMISARIS



1. Hendrikus Ivo
Komisaris Independen

2. Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris

3. Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen

2. A. Sonny Keraf
Komisaris Independen



5. Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Independen



6. Loeke Larasati Agoestina
Komisaris



7. A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen



8. Hadiyanto
Komisaris



Sunarso
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

SELAMA TAHUN 2019, BANK BRI BERHASIL MEMBUKUKAN KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN DIATAS RATA-RATA INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL. TERJAGANYA KINERJA SEJALAN DENGAN KOMITMEN BRI UNTUK TAK PERNAH BERHENTI MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN YANG KECIL MENJADI SEMAKIN BERARTI BAGI NEGERI.

**Assalamu'alaikum Wr Wb,
Pemangku kepentingan yang terhormat,**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan lindungan yang diberikan-Nya sehingga Bank BRI berhasil membuahkan kinerja positif dan berkelanjutan. Hingga di Usia yang ke-124 tahun, Bank BRI terus memantapkan perannya sebagai pemberdaya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Indonesia melalui berbagai inisiatif yang dijalkannya. Selanjutnya, perkenankan kami menyajikan rangkuman kinerja BRI dan situasi selama tahun 2019.

**KONDISI MAKRO
EKONOMI**

Kondisi perlambatan perekonomian dunia masih berlanjut di Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat

pertumbuhan ekonomi dunia di Tahun 2019 yang diperkirakan hanya tumbuh sekitar 3,0%, turun dari Tahun 2018 yang sebesar 3,6%.

Untuk itu, sebagai respon dari penurunan pertumbuhan ekonomi Dunia, berbagai bank sentral di Dunia merubah stance kebijakan moneter dari kontraktif menjadi ekspansif yang terlihat dengan menurunnya suku bunga acuan di Tahun 2019. Misalnya, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), telah menurunkan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 75 bps menjadi 1,50-1,75% di akhir Tahun 2019 dimana sebelumnya Tahun 2018, The Fed melanjutkan normalisasi suku bunga acuan dengan meningkatkan suku bunga sebanyak empat kali menjadi 2,25-2,50%.



Kontribusi kredit Mikro sebesar

35,8%
terhadap total kredit Bank, pertumbuhan tersebut sejalan dengan target perusahaan untuk terus tumbuh hingga memiliki porsi mencapai 40% di Tahun 2022.



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Direksi

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2019 sebesar

Rp87,9 triliun
kepada lebih dari
4 juta debitur

Selain itu, perkembangan positif pada perjanjian tariff dagang AS dan China berdampak pada penurunan risiko pasar keuangan global dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara berkembang dengan masuknya aliran dana asing.

Ditengah tekanan ekonomi Dunia pada tahun 2019, walaupun lebih rendah dari Tingkat Pertumbuhan Tahun 2018 yang sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi domestik masih dapat terjaga dan diperkirakan tumbuh sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan Inflasi terendah sejak 10 tahun terakhir, yaitu di level 2,72%.

Disisi lain, tekanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2019 berasal dari Neraca Perdagangan (Trade Balance). Belum membaiknya kondisi ekonomi Dunia yang menekan Volume Perdagangan internasional, turut menekan perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekspor yang tercatat -6,9% (yoy) dan pertumbuhan impor menurun lebih dalam yaitu -9,5% (yoy). Akibatnya Defisit Neraca Pembayaran (Balance of payment) dan Neraca Berjalan (Current Account) masih berlanjut di Tahun 2019.

Sejalan dengan Bank Sentral di Dunia, yaitu melakukan stance moneter yang ekspansif dan konsisten untuk pre-emptive serta ahead of the curve, Bank Indonesia (BI) selama Tahun 2019 telah menurunkan suku bunga acuan (BI 7 Day Repo Rate/BI7DRR)

sebesar 100 bps menjadi 5% dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1% menjadi 5,5%.

Tahun 2019, meskipun fungsi intermediasi perbankan nasional terlihat mengalami tekanan. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) perbankan yang tinggi sekitar 23,3% dan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah di 2,5% (gross) atau 1,2% (net).

Sementara, Pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat turun menjadi 6,1% (yoy) di Tahun 2019 dari sebelumnya 11,8% (yoy) di Tahun 2018. Disisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) stagnan di 6,6% (yoy) dimana sebelumnya juga tumbuh sebesar 6,5% (yoy) di Tahun 2018. Akibat pertumbuhan DPK diatas pertumbuhan Kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) dapat turun menjadi ke 93,6% dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 94,0%.

KINERJA, PENCAPAIAN TARGET, DAN STRATEGI

Secara Umum, Kinerja Bank BRI terus menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan konsisten tumbuh di atas Industri. Total aset Bank BRI konsolidasi di Tahun 2019 mencapai Rp1.416,8 triliun atau secara tahunan tumbuh 9,2% year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp1.296,9 triliun (2018). Sementara itu, pertumbuhan kredit BRI mencapai 8,3% (yoy) atau menjadi Rp907,4 triliun dari sebelumnya Rp838,1 triliun di Tahun 2018

Laporan Direksi

dengan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap manageable di level 2,80%.

Kontribusi terbesar pertumbuhan kredit BRI berasal dari *core business* selama ini yaitu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2019 Segmen Bisnis Mikro mencapai Rp329,5 triliun, tumbuh 13 % dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp291,6 triliun.

Pertumbuhan Segmen Bisnis Mikro merupakan yang tertinggi diantara Segmen Bisnis lainnya dan mampu menyalurkan kepada lebih dari 10 juta nasabah mikro. Kontribusi kredit mikro BRI telah mencapai 35,8% dari total kredit (bank saja), sejalan dengan target perusahaan untuk terus tumbuh hingga memiliki porsi mencapai 40% di Tahun 2022.

Pertumbuhan kredit mikro BRI juga didukung dengan keberhasilan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2019 sebesar Rp87,9 triliun kepada lebih dari 4 juta nasabah KUR sehingga outstanding KUR BRI pada akhir 2019 tercatat sebesar Rp84,9 triliun. Pencapaian tersebut menjadikan BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio 62,2% dari total target penyaluran KUR nasional 2019 sebesar Rp141,3 triliun. Selain itu, Perseroan mencatat terdapat 290 ribu debitur yang berhasil naik kelas selama tahun 2019.

Sementara, Segmen Bisnis Ritel mencapai Rp386,8 triliun, meningkat 7,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp359,2 triliun. Sementara itu, nilai kredit Konsumer (bank saja) sebesar

Rp140,5 Triliun, tumbuh 7,4% (yoy) dibandingkan dengan nilainya sebesar Rp130,8 triliun di Tahun 2018.

Dengan demikian, Perseroan mampu meningkatkan pembiayaan ke segmen UMKM yang tercatat Rp716,3 Triliun, setara 79% dari total kredit BRI di Tahun 2019 dan naik cukup signifikan dari porsi sebelumnya yang 77,0% di Tahun 2018. Hal tersebut, sesuai dengan aspirasi Bank BRI untuk mewujudkan porsi kredit segmen UMKM mencapai minimal 80% dari total kredit BRI di tahun 2022.

Selain Segmen UMKM, Perusahaan juga melakukan penyaluran kredit di segmen Korporasi dengan nilai mencapai Rp191,1 triliun di Tahun 2019. Porsi segmen korporasi mengalami penurunan dibandingkan total kredit BRI. Sementara itu, tingkat pertumbuhan segmen korporasi cenderung stagnan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,04%. Untuk segmen ini, BRI memiliki target berupa peningkatan profitabilitas, dengan cara semakin memperluas cakupan layanan perbankan yang dapat dinikmati oleh nasabah korporasi BRI dan secara langsung mendukung pertumbuhan bisnis value-chain, yaitu dana murah, fee based serta jasa layanan keuangan lainnya, seperti asuransi, sekuritas, dan lainnya.

Dari sisi pendanaan, Bank BRI mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Tahun 2019 sebesar Rp1.21,2 triliun atau tumbuh 8,2% dari posisi tahun 2018 sebesar Rp944,3 Triliun dengan Rasio Current Account

Savings Account (CASA) BRI sebesar 57,70%.

Selain penerbitan umum berkelanjutan dalam rupiah yang rutin dilakukan, sebagai alternatif sumber pendanaan untuk ekspansi kredit, khususnya segmen usaha mikro kecil dan menengah serta bentuk komitmen dalam mengimplementasikan praktik keuangan berkelanjutan, BRI menerbitkan Global Sustainability Bond pertama di Indonesia sebesar US\$ 500 juta pada awal Tahun 2019. Hal tersebut juga sebagai bentuk implementasi atas komitmen BRI sebagai bank yang masuk dalam kelompok First Movers on Sustainable Banking.

Dari sisi permodalan, total ekuitas Bank BRI mencapai Rp208,8 triliun, atau secara tahunan tumbuh 12,7%. Selain itu, secara year-on-year (YoY), Fee & Pendapatan Ops Lainnya tumbuh 21,8% menjadi Rp28,5 triliun, laba operasional tumbuh 4,1% menjadi Rp43,4 triliun dari sebelumnya (tahun 2018) Rp41,7 triliun, dan laba bersih tumbuh 6,2% menjadi Rp34,4 triliun dari Rp32,4 triliun (tahun 2018).

Dapat kami sampaikan bahwa pada bulan September 2019, BRI telah menyelesaikan proses pengambilalihan PT BRI Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) dengan porsi kepemilikan BRI sebesar 90%. Dengan akuisisi ini akan menjadikan BRI sebagai grup keuangan di Indonesia yang dapat menyediakan Integrated Financial Solution bagi nasabahnya.



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Direksi

Tabel Pencapaian Target Perusahaan

NO	INDIKATOR KINERJA (BANK SAJA)	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
1	Total Aset (Rp. dalam miliar)	1.350.666,4	1.343.077,9	99,4%
2	Kredit (Rp. dalam miliar)	900.265,2	859.570,9	95,5%
3	Simpanan (Rp. dalam miliar)	996.268,4	969.750,0	97,3%
4	Laba Bersih (Rp. dalam miliar)	36.115,4	34.028,7	94,2%
5	FBI (Rp. dalam miliar)	13.332,4	14.293,4	107,2%
6	LDR	90,36%	88,64%	101,9%
7	NPL Gross	2,16%	2,62%	82,4%
8	NPL Nett	1,17%	1,04%	112,5%
9	NIM	7,16%	6,98%	97,5%
10	CER	42,72%	40,26%	106,1%
11	CAR	21,22%	22,55%	106,3%
12	Pertumbuhan Market Cap BBRI dibanding Jakfin	15,2%	20,2%	132,7%

Bila dilihat dari target perusahaan sebagaimana ditampilkan dalam tabel, 6 (enam) indikator kinerja, yaitu FBI, LDR (Likuiditas), NPL Nett (Kualitas Aset), CER (Efisiensi), CAR (Permodalan) dan Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (Market Cap), mencapai atau bahkan melampaui targetnya. Sementara indikator lainnya Total Aset, Kredit, Simpanan, Laba

Bersih, NPL Gross, Net Interest Margin (NIM), dan CAR tidak memberikan pencapaian penuh, tetapi menunjukkan selisih yang tidak jauh dibanding target, dan jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan, BRI secara konsisten mampu tumbuh lebih tinggi. Hal ini terlihat dari pangsa pasar kredit dan simpanan BRI yang terus meningkat masing-masing menjadi 15,30% dan 16,16% pada akhir tahun 2019 dari sebelumnya 15,09% dan 15,95% pada akhir tahun 2018.

Dengan pencapaian tersebut dan melihat berbagai tantangan kedepannya, terutama yang dipicu oleh cepatnya perubahan Teknologi Digital dan Preferensi Nasabah, Perseroan menetapkan strategi dengan terus melakukan inovasi yang terprogram, terencana, terukur dalam format Transformasi Perusahaan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi Perusahaan menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia dan Home to the Best Talent, di Tahun 2016 Perseroan telah menyusun Blue Print Transformasi BRI yang disebut BRIVolution. Inti dari BRIVolution adalah Perusahaan melakukan Transformasi di Area Digital dan Kultural.

TRANSFORMASI DIGITAL

Diarahkan untuk Digitalisasi proses bisnis Perseroan agar lebih efisien dan juga untuk menemukan bisnis model yang baru, sehingga dapat menciptakan value yang baru. Terdapat 3 framework dalam melakukan Transformasi Digital, yaitu:

- Pertama: Digitizing Core, BRI memiliki "Super Apps" untuk melayani nasabah BRI yaitu BRImo,
- Kedua: Digital Ecosystem, dimana BRI mulai masuk ke emerging digital ecosystem,
- Ketiga: New Digital Proposition, Perseroan menciptakan terobosan bisnis model baru untuk Go smaller, Go shorter, dan Go faster.

TRANSFORMASI KULTURAL

Diarahkan agar mindset dan perilaku Human Capital dalam bekerja sesuai dengan kebutuhan di era digital dan fokus kepada kebutuhan nasabah. Di dalam Transformasi Kultural, Perseroan akan melakukan pengembangan Sistem Human Capital yang baru sehingga dapat meningkatkan kinerja, produktivitas kerja, serta memotivasi seluruh Insan BRILian untuk merancang kesuksesannya sendiri.

Laporan Direksi

Terdapat 3 pilar yang menjadi fokus Transformasi Kultural yaitu:

- Great People, Pekerja yang mampu mengantarkan BRI terus berkembang dengan melalui segala tantangan bisnis,
- Great Culture, Budaya perusahaan yang kokoh, dan
- Great Organization, sebagai kendaraan yang mengantarkan perusahaan mencapai target-target bisnisnya.

Sebagai awalan penerapan tersebut, saat Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke -124, BRI telah me-launching atau menerapkan Culture Transformation Movement. Gerakan ini untuk mengajak seluruh Individu BRI, Insan BRILian, dari atas hingga ke bawah, bergerak menuju Transformasi.

VALUE CREATION PERUSAHAAN

Komitmen BRI untuk Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri terlihat dari berbagai program UMKM "Naik Kelas" dan dukungan BRI terhadap berbagai Program Pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk Value Creation yang dilakukan oleh Perseroan dalam memberikan dukungan pada pemberdayaan UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan.

Dukungan Perseroan tercermin dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2015, Perseroan telah menyalurkan KUR sebesar Rp323,4 triliun kepada lebih 16,6 juta pelaku UMKM. Selain itu, BRI juga meningkatkan kapasitas ekonomi para debitur KUR. Secara kumulatif untuk segmen KUR Mikro, tercatat sebanyak lebih dari 1,9 juta Debitur berhasil naik kelas, meningkat kapasitasnya sehingga dapat berpindah ke Kredit lebih besar dan/atau Kredit Komersial.

BRI selalu berkomitmen untuk turut mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini tercermin dari infrastruktur sejumlah 9.226 jaringan kerja BRI yang didukung oleh 4 (empat) buah Teras Kapal BRI untuk melayani nasabah di tempat-tempat terpencil, seperti di Kep. Seribu, Labuan Bajo, Halmahera Selatan dan

Anambas yang terletak di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.

Konsistensi BRI untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada juga terlihat dari jumlah Agen BRILink yang terus meningkat dan optimal. Tercatat pada Tahun 2019, Agen BRILink sudah mencapai 422.160 agen dan transaksi menembus angka 521 juta dengan volume transaksi finansial mencapai Rp673 triliun. Tingginya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen bank semakin dipercaya oleh Masyarakat.

Selain itu, untuk mendekatkan akses keuangan bagi petani, BRI telah menyalurkan lebih dari 3,24 juta kartu tani. Pada Tahun 2019, BRI juga menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 3,76 juta dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 5,44 juta KPM.

Dengan komitmennya untuk Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan segmen UMKM, secara aktif BRI telah mendirikan 54 Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan 1 Teras BRI Kapal yang berfungsi sebagai RKB dengan jumlah pelatihan UMKM mencapai 4.133 kali dan anggota binaan lebih dari 328 ribu pelaku UMKM pada akhir Tahun 2019. BRI juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Dalam Negeri.

BRI juga melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tersebar di 437 kota/kabupaten dengan jumlah rekening operasional BUMDes mencapai 22.654 rekening. Sebagai upaya untuk menghadirkan One Stop Services di Desa, Bank BRI bersinergi dengan BUMN lain mendirikan BUMN Shop dimana BUMDes dapat sebagai agen BRILink, agen RPK Bulog, Pertashop, agen pupuk dan Wifi Corner. Dengan sinergi BUMN tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa melalui BUMDes



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Direksi

PANDANGAN KE DEPAN

Kondisi ekonomi Global di tahun 2020 diperkirakan akan mengalami perbaikan. IMF dalam World Economic Outlook 2019 memprediksi ekonomi dunia 2020 tumbuh 3,4%, atau lebih baik dibandingkan 2019 yang diproyeksikan 3,0%.

Hal tersebut didorong oleh ketegangan perdagangan dunia, penyelesaian Brexit, berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif, seperti relaksasi kebijakan moneter dan melanjutkan pembelian surat Aset (Surat Berharga dan Obligasi), serta stabilnya kondisi ekonomi negara berkembang. Disisi lain, perlu juga diantisipasi atas proyeksi pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat dan Negara Eropa di tahun 2020.

Dengan kondisi pertumbuhan global yang lebih baik, BRI percaya bahwa kondisi ekonomi nasional tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,10-5,35% di tahun 2020, sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi BRI di tahun 2019 sekitar 5,05-5,20%. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan belanja rumah tangga dan investasi sektor swasta yang lebih baik, serta belanja pemerintah yang semakin efektif.

Selain itu, stance kebijakan moneter dan makroprudential oleh Bank Indonesia (BI) di Tahun 2020 diperkirakan masih akomodatif. Untuk itu, terdapat ruang Bank Sentral untuk dapat menurunkan suku bunga 2 - 3 kali menjadi 4,25-4,50%. Ditambah kebijakan fiskal yang countercyclical dan upaya Pemerintah memperbaiki Defisit Neraca Berjalan (Current Account Deficit/CAD) diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan Rupiah. Bank BRI memperkirakan CAD tahun 2020 akan relative stabil pada kisaran 2,6-2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejalan dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang membaik, pertumbuhan kredit perbankan nasional diperkirakan akan lebih tinggi. Bank BRI memperkirakan pertumbuhan Kredit dan DPK Industri Perbankan tahun 2020 masing-masing akan berada di sekitar 10,0-12,0 (yoy) dan 7,5-9,5% (yoy).

Membaiknya perekonomian dan perbankan nasional, serta potensi pengembangan bisnis UMKM di Indonesia yang masih besar, maka prospek usaha Bank BRI kedepannya masih sangat baik. Namun demikian, masih tingginya tantangan di lingkungan perekonomian global

mendorong Bank BRI untuk tetap selektif dalam memilih strategi sehingga peluang-peluang bisnis yang ada bisa ditangkap dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi Bank kedepannya, antara lain Rencana Penerapan PSAK 71, 72, dan 73, Implementasi Qanun, dan lainnya.

Mempertimbangkan hal-hal di atas dan selaras dengan rencana kerja jangka panjang BRI, tema yang diusung oleh BRI tahun 2020 adalah Integrated Financial Solution. Tema tersebut merangkum aspirasi BRI menjadi Penyedia Layanan dan Solusi Keuangan Terintegrasi (End to End Financial Solution) sesuai pada kebutuhan dan life journey nasabah.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus BRI untuk merealisasikan tema 2020 adalah peningkatan cross selling produk dan layanan beserta perusahaan anak dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI Group, data analytics dan digital marketing. Dengan strategi ini, prospek usaha Perseroan memberikan optimisme pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder-nya.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank BRI tetap konsisten untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) dan menjamin adanya peningkatan kualitas dalam menerapkan GCG. Hal ini terlihat dari governance outcome yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana kinerja operasional maupun keuangan menunjukkan pertumbuhan yang kontinyu dan merupakan hasil dari implementasi GCG.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah komitmen yang dimiliki oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh pekerja BRI (Insan BRILiaN). Menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang telah digariskan di dalam aturan dan kebijakan Bank dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senantiasa menjadi pedoman bagi setiap individu di BRI.

Ketaatan terhadap tata kelola tentunya menyumbang pencapaian kinerja BRI sepanjang tahun 2019. Untuk itu, BRI selalu berusaha memperbaiki pelaksanaan aspek ini dari tahun ke tahun. Beberapa penguatan tata kelola yang telah dilakukan pada tahun 2019, yaitu:

- Penandatanganan komitmen GCG oleh seluruh Insan BRILiaN,
- Sosialisasi penerapan strategi anti fraud dalam

Laporan Direksi

- Forum Peningkatan Kinerja BRI
- Revitalisasi kebijakan dan penambahan saluran pelaporan whistleblowing system pada situs perusahaan, dan
- Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi dan peningkatan tata kelola konglomerasi keuangan.

Dalam pengukuran kinerjanya di bidang tata kelola, BRI melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan mengikuti penilaian yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang independen. Dari Corporate Governance Performance Index (CGPI) Tahun 2019, Perseroan mendapatkan skor 90,75 dengan predikat Sangat Terpercaya (Most Trusted Company). Selain itu, dari penilaian yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) BRI memperoleh penghargaan The Best Overall Good Corporate Governance Award.

Dalam hal pelaporan, sejak tahun 2013, BRI telah menyusun laporan berkelanjutan yang berpedoman pada kerangka Global Reporting Initiative (GRI) dimana tanggung jawab sosial BRI pun mencakup pula pekerja dan nasabah. Melalui pengelolaan hubungan industrial yang baik, selain kepuasan (satisfaction) pekerja yang tinggi, BRI mencatat tingkat turnover pekerja yang sangat rendah, sebesar 2,29% turun dari tahun sebelumnya 2,97% atau jauh di bawah tingkat turnover industri yang mencapai 12%.

Selain itu sebagai salah satu bank yang turut membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia atas implementasi Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik, Bank BRI telah membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di Tahun 2019.

Penyusunan RAKB juga menunjukkan bahwa pencapaian kinerja BRI yang berorientasi pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Atas realisasi yang sudah dilakukan selama tahun 2019, BRI membuat laporan dalam bentuk Sustainability Report yang diberikan bersamaan Buku Laporan Tahunan Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Tanggung jawab sosial Bank BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Program Bina Lingkungan (BL) yang disebut dengan Program BRI Peduli.

Kegiatan BRI Peduli memiliki pilar utama, yaitu konsep 3P (People, Planet, Profit).

- People: komitmen perusahaan untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- Planet: tanggung jawab perusahaan, terhadap lingkungan hidup dan keragaman hayati, dan
- Profit: kegiatan perusahaan untuk terus dapat meningkatkan keuntungan dari operasional bisnis perusahaan yang terus berkembang

Perseroan mengimplementasikan ketiga konsep tersebut kedalam 7 (tujuh) sektor bantuan BRI Peduli yaitu:

1. INDONESIA PEDULI, sektor bantuan untuk korban bencana alam,
2. INDONESIA CERDAS, sektor bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan
3. INDONESIA SEHAT, sektor peningkatan kesehatan,
4. INDONESIA MEMBANGUN, sektor pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, yang dikomunikasikan dengan nama
5. INDONESIA TAKWA, sektor sarana ibadah,
6. INDONESIA LESTARI, sektor pelestarian alam,
7. INDONESIA SEJAHTERA, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan,

Secara total, pada tahun 2019 BRI telah menyalurkan Rp226,6 miliar untuk pelaksanaan kegiatan BRI Peduli. BRI juga memperhatikan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Bagi BRI sebagai bank BUKU 4, peraturan ini menetapkan bahwa BRI harus telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan per Januari 2019.



LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Direksi

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 3 Januari 2019, RUPSLB memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat masa bakti Kuswiyoto sebagai Direktur Corporate Banking, menambah nomenklatur Wakil Direktur Utama, dan mengangkat Sunarso untuk mengisi nomenklatur baru.

Dengan demikian, sejak ditutupnya RUPSLB pada 3 Januari 2019, komposisi Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Dalam Periode 3 Januari 2019 – 2 September 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Suprajarto*	Direktur Utama	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sunarso	Wakil Direktur Utama	RUPSLB tanggal 3 Januari 2019
Supari	Direktur Bisnis Mikro	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST tanggal 23 Maret 2016
R. Sophia Alizsa	Direktur Human Capital	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018

*) Ybs. Efektif s/d 28 Agustus 2019

Selanjutnya, BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 September 2019 dengan putusan: Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat Suprajarto sebagai Direktur Utama, Osbal Saragi Rumarhorbo sebagai Direktur Jaringan dan Layanan, Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan, R. Sophia Alizsa sebagai Direktur Human Capital, dan Mohammad Irfan sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPSLB juga mengangkat Sunarso sebagai Direktur Utama, Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama, Agus Noorsanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, Agus Sugiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko, Herdy Rosadi Harman Direktur Human Capital, Azizatun Azhimah sebagai Direktur Kepatuhan, dan memberi penugasan baru kepada Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan, Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro, Priyastomo sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah.

Laporan Direksi

Dengan demikian, sejak ditutupnya RUPSLB pada 2 September 2019, komposisi Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Sunarso	Direktur Utama	RUPSLB tanggal 03 Januari 2019 sebagai Wakil Direktur Utama dan RUPSLB 2 September 2019 dialihkan tugasnya sebagai Direktur Utama
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 2 September 2019
Haru Koesmahargo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Supari	Direktur Bisnis Mikro	RUPST tanggal 22 Maret 2018
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	RUPSLB tanggal 2 September 2019
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan & Layanan	RUPST tanggal 22 Maret 2018
Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	RUPSLB 2 September 2019
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	RUPSLB 2 September 2019
Azizatun Azhimah	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 2 September 2019

APRESIASI

Mewakili Direksi, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja BRI/ Insan BRILiaN atas komitmen dan dedikasi yang mereka berikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada semua nasabah, mitra usaha, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan atas dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada BRI. Sinergi BRI dan semua pihak yang terkait adalah sumber energi kami untuk menumbuhkembangkan dan memberdayakan yang kecil menjadi semakin berarti.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas nama Direksi



Sunarso

Direktur Utama

DIREKSI



1. Herdy Rosadi Harman
Direktur Human Capital

2. Priyastomo
Direktur Bisnis Kecil,
Ritel dan Menengah

3. Indra Utoyo
Direktur Digital, Teknologi
Informasi dan Operasi

4. Handayani
Direktur Konsumer

5. Sunarso
Direktur Utama

6. Agus Noorsanto
Direktur Hubungan Kelembagaan
dan BUMN



7. Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

8. Supari
Direktur Bisnis Mikro

9. Azizatul Azhimah
Direktur Kepatuhan

10. Ahmad Solichin
Lutfiyanto
Direktur Jaringan dan
Layanan

11. Haru Koesmahargyo
Direktur Keuangan

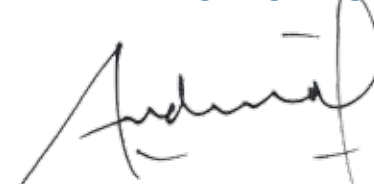
12. Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 27 Januari 2020

DEWAN KOMISARIS



Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Independen



A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen



A. Sonny Keraf
Komisaris Independen



Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen



Hendrikus Ivo
Komisaris Independen



Nicolaus Teguh
Budi Harjanto
Komisaris



Hadiyanto
Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 27 Januari 2020

DIREKSI



Sunarso
Direktur Utama



Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama



Haru Koesmahargyo
Direktur Keuangan



Priyastomo
Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah



Indra Utoyo
Direktur Digital, Teknologi Informasi
dan Operasi



Supari
Direktur Bisnis Mikro



Handayani
Direktur Konsumer



Herdy Rosadi Harman
Direktur *Human Capital*



Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Jaringan & Layanan



Agus Noorsanto
Direktur Hubungan Kelembagaan
& BUMN



Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko



Azizatul Azhimah
Direktur Kepatuhan

03

PROFIL PERUSAHAAN



BRI mewujudkan inklusi keuangan melalui pengembangan ekosistem finansial dengan lingkup nasional. Untuk itu BRI melakukan proses integrasi operasional pada seluruh jaringan kerjanya.

Jaringan kerja ini terdiri atas

- ✓ Kantor Cabang
- ✓ Kantor Cabang Khusus
- ✓ Kantor Cabang Luar Negeri
- ✓ Kantor Cabang Pembantu
- ✓ BRI Unit
- ✓ Kantor Kas
- ✓ Teras BRI
- ✓ Teras BRI Keliling
- ✓ Teras BRI Kapal

Total Jumlah Unit Kerja

9.234

serta lebih dari

227.000

jaringan *e-channel*,

yang mencakup

3.809 CRM

19.184 ATM

204.386 EDC

100 Self Service Banking dan

20 Hybrid Machine termasuk

Jaringan Agen BRILink

422.160





PROFIL PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN

 Nama Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	 Bidang Usaha Perbankan	
 Segmen Usaha Bisnis Mikro Bisnis Ritel Bisnis Korporasi Bisnis Entitas Anak	 Dasar Hukum Pendirian Undang-Undang No 21 Tahun 1968	 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp6.167.290.500.000
 Jaringan • 1 Kantor Pusat • 19 Kantor Wilayah • 467 Kantor Cabang (Termasuk Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang Luar Negeri) • 611 Kantor Cabang Pembantu • 5.382 BRI Unit • 952 Kantor Kas • 2.049 Teras BRI • 133 Teras BRI Keliling • 4 Teras BRI Kapal	 Tanggal Pendirian 16 Desember 1895	 Modal Dasar Rp15.000.000.000.000
	 Jumlah Karyawan 125.602	 Bursa Efek Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.
	 Komposisi Pemegang Saham Pemerintah Indonesia: 56,75% Publik: 43,25%	
 Kantor Pusat Gedung BRI I Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 No. Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279 No. Fax : (62-21) 250-0077 Website : www.bri.co.id		 Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary Division Gedung BRI 1, Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Email : humas@bri.co.id Call center Tel. : (021) 5751966 Fax. : (021) 5700916

MAKNA LOGO



BANK BRI

**DIREKSI BANK RAKYAT
INDONESIA MELALUI
SURAT KEPUTUSAN
NO.S.3-DIR/2/1985
TANGGAL 28 FEBRUARI
1985 MENETAPKAN
BERLAKUNYA LOGO
BANK RAKYAT
INDONESIA.**

Bentuk segi empat sama sisi dengan garis sudut lengkung. Empat sisi yang sama menandakan keseimbangan dengan garis lengkung yang artinya dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Bold huruf BRI dengan huruf kapital menandakan ketegasan.

Garis, bentuk dan pewarnaan (*bold*) secara tegas, sederhana serta terukur dengan maksud untuk menghadirkan kesan-kesan yang merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan-kemudahan maupun keamanan yang tercermin secara imajinatif pada logotype tersebut.

Ungkapan bentuk secara totalitas yang sederhana diharapkan mempercepat proses pengenalan dan mudah untuk diingat.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang

mementingkan ketelitian dan ketepatan. Ini berkaitan dengan kesan management modern dalam suatu kegiatan usaha nasional yang mempunyai wawasan internasional dan berlandaskan semangat pembaharuan.

Garis, bentuk dan pewarnaan ditampilkan secara lugas untuk memberi kesan sederhana tetapi mantap dengan harapan mampu mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

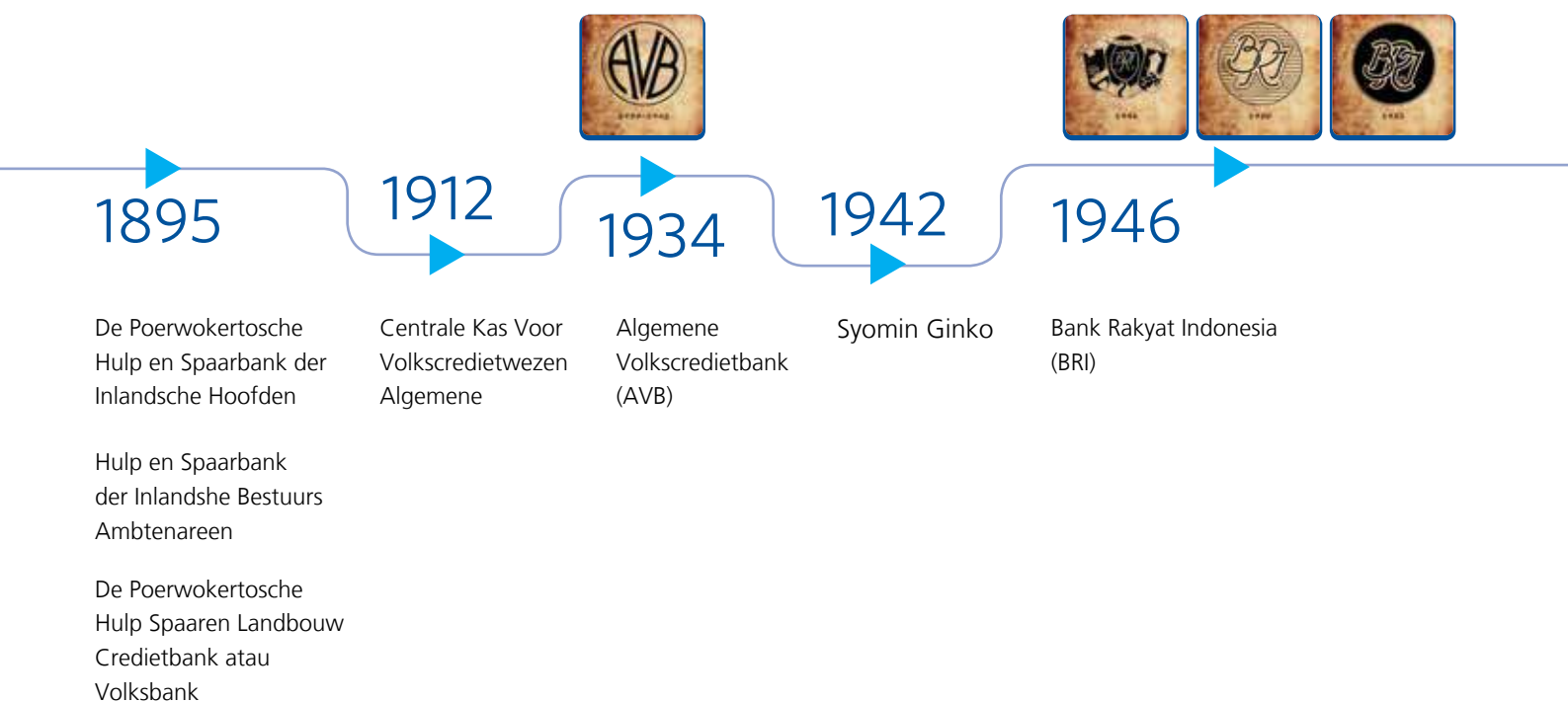
Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan. Sebagai perusahaan yang fokus pada pelayanan jasa keuangan, BRI bertekad dapat memberikan kenyamanan tersebut dengan menyediakan berbagai layanan yang aman, fasilitas yang canggih dan lengkap, serta jaringan terluas untuk para nasabah.



PROFIL PERUSAHAAN

RIWAYAT SINGKAT BRI

Perubahan Nama Bank Rakyat Indonesia





1960

Bank Koperasi Tani
Nelayan (BKTN)

1968

Bank Rakyat Indonesia
(Bank Umum)

1992

PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero)

2003

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
10 November 2003





PROFIL PERUSAHAAN

Riwayat Singkat BRI

Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”, “Bank”, atau “Perseroan”) dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana.

Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, Hulp en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan UU No. 21 tahun 1968.

Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRIsyariah. Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRIsyariah (BRIsyariah) pada 1 Januari 2009 dan kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 BRI

mengakuisisi saham PT Agro Niaga Tbk dari Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Komitmen ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama di segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 15 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis.

Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking pada tahun 2013.

Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Di tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRIsat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, BRI memiliki ATM hingga 19,184 unit, jumlah mesin EDC sebanyak 204,386 unit, serta jumlah mesin CRM sebanyak 3,809 unit, termasuk 422.160 agen BRILink. Jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut menjadi bukti konsistensi BRI dalam menjangkau yang tidak terjangkau.

Riwayat Singkat BRI

Perluasan jaringan juga terus dilakukan. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global, BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong. Pada tahun 2017, BRI membuka unit kerja di Timor Leste.

Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan, BRI mempunyai target untuk menjadi *integrated financial service group*, yaitu satu grup perusahaan yang menyediakan berbagai layanan atau jasa keuangan kepada nasabahnya, baik layanan perbankan, asuransi, remitansi, maupun layanan keuangan lainnya.

Elaborasi di segmen asuransi dan pembiayaan kian terlihat pada tahun 2015, BRI menambah anggota baru yang bergerak di bidang asuransi dengan mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) dan disusul pada tahun 2016 BRI menambah penyertaan saham pada PT BTMU- BRI Finance dari 45% menjadi 99% sehingga BRI menjadi pemegang saham pengendali. Dengan selesainya proses tersebut, PT BTMU BRI Finance kemudian berganti nama menjadi PT BRI Multifinance Indonesia.

Setiap langkah korporasi dan rencana kerja yang dijalankan adalah bagian dari upaya memberikan layanan perbankan

yang lengkap bagi para nasabah, terutama sektor UMKM. Dengan kehadiran BRIsat, BRI dapat memaksimalkan layanan *digital banking*. Berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi di tahun 2016, mulai dari pembangunan Teras BRI Digital, pengembangan e-Pasar, sampai pembukaan *co-working space*. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2018 dengan meluncurkan Indonesia Mall dan mengadakan *Cowork Festival*. Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital.

Selain itu pada tahun 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste. BRI juga resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera.

Pada tahun 2017 BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2017

yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

Guna memajukan sektor UMKM, BRI terus berkomitmen memberikan kemudahan layanan perbankan utamanya melalui inovasi perbankan digital. Oleh karena itu, BRI sejak tahun 2017 telah meluncurkan BRISPOT dan terus dikembangkan di tahun 2018. BRISPOT adalah sebuah aplikasi *mobile-based* dengan konsep *one stop service* bagi *Account Officer* untuk proses kredit *end to end*.

Pada tahun 2018, dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai *BRI New Assistance* yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.

Selain itu, Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas. BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.



PROFIL PERUSAHAAN

Riwayat Singkat BRI

Sebagai entitas, BRI Group merupakan sebuah grup keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap, mulai dari layanan perbankan konvensional maupun syariah, asuransi dan multifinance. Hal ini sesuai dengan rencana jangka panjang BRI 2018-2022 untuk mencapai aspirasi sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasi.

Untuk mencapai aspirasi tersebut, pada bulan Desember 2018 BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Venture) dan PT Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM).

BRI Venture akan dikembangkan menjadi *Corporate Venture Capital* (CVC) untuk melakukan *strategic investment* terutama kepada perusahaan *growth-stage startup* yang memiliki potensi sinergi dengan BRI Group dan/atau potensi *capital gain*.

Pada tahun 2019, Bank BRI terus melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam *digital banking* di Indonesia. Beberapa produk *digital banking* yang diluncurkan melalui BRI Agro atau PINANG yang merupakan Digital Lending Perbankan Pertama di Indonesia. Kemudian adalah BRI Mo yang merupakan aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (*user interface/ user experience*) dan fitur-fitur terbaru. Yang terbaru, Bank BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA.

Semua inisiatif ini dilakukan untuk terus merealisasikan aspirasi menjadi perbankan yang unggul di era ekonomi digital saat ini.

Untuk mewujudkan *integrated financial solution*, Bank BRI melakukan langkah strategis perseroan dengan melengkapi layanan keuangan, yakni dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur atau BRINS.

Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 8 (delapan) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRI Syariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures), Sekuritas (Danareksa Sekuritas) dan PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS).

BIDANG USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 81 tanggal 23 April 2015 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0926947 tanggal 23 April 2015, Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar BRI adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

- berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak

memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;

- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



PROFIL PERUSAHAAN

PRODUK DAN JASA



Produk Simpanan



Tabungan BRI BritAma

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Bisnis, BritAma Umum, BritAma Rencana, BritAma X, serta BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.



Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.



Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian, Simpedes Usaha dan Simpedes Kredit Pangan. Selain itu Bank BRI memiliki produk simpanan lainnya yaitu:

1. Tabunganku
2. SimPel (Simpanan Pelajar)
3. Tabungan Haji
4. Deposito (Rupiah and Foreign Exchange)
5. Giro (Rupiah and Foreign Exchange)



Produk Pinjaman

Kredit Mikro

Kupedes

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.

KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula.

Kredit Konsumer

- ▶ Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
- ▶ Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- ▶ Kartu Kredit
- ▶ Ceria (Pinjaman Digital)

BRIGuna

Kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap. BRIGuna menyediakan 3 jenis produk pilihan, yaitu BRIGuna Karya, untuk karyawan aktif yang masih memiliki penghasilan tetap, kemudian BRIGuna Umum, yaitu kredit yang diberikan sejak pegawai tetap hingga masa pensiun, sedangkan BRIGuna Purna, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pensiunan.

Kredit Ritel Komersial

- ▶ Kredit Agunan Kas
- ▶ Kredit Investasi (KI)
- ▶ Kredit Modal Kerja (KMK)
- ▶ KMK Ekspor
- ▶ KMK Konstruksi
- ▶ KMK Konstruksi BO-I
- ▶ Kredit Waralaba
- ▶ Kredit SPBU
- ▶ Kredit Resi Gudang Komersial
- ▶ Kredit Pemilikan Gudang
- ▶ KMK Talangan SPBU
- ▶ Kredit Pre-Financing
- ▶ Kredit Post-Financing
- ▶ Kredit Distributor

Kredit Program

- ▶ Resi Gudang Subsidi
- ▶ KUR TKI BRI
- ▶ KUR Kecil BRI (KUR Khusus sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan)

Kredit Menengah/Korporasi

- ▶ Kredit Modal Kerja (KMK)
- ▶ Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
- ▶ Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
- ▶ Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
- ▶ Kredit Investasi (KI)
- ▶ Kredit Sindikasi



PROFIL PERUSAHAAN



Jasa

Cash Management System

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas *online*. Juga menyediakan fasilitas *national pooling*, *added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang

menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan *virtual account* yang memudahkan nasabah dalam

melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), serta berbagai layanan *cash management* lainnya.

Jasa Kelembagaan

- ▶ SIM (Surat Izin Mengemudi) - *Online*
- ▶ MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
- ▶ E-Tax (*Electronic Tax*)
- ▶ *Hospital Online*
- ▶ SPP-*Online* Mahasiswa
- ▶ *Visa on Arrival* (VoA)
- ▶ Layanan terkait Nasabah Instansi Kerja Sama (NIK)
- ▶ Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- ▶ Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
- ▶ Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
- ▶ KTA Elektronik
- ▶ E-Samsat
- ▶ E-Tilang (*Tilang Online*)
- ▶ PDAM *Online*
- ▶ BPJS-TK *Service Point Office*

Jasa Bisnis dan Keuangan

- ▶ Bank Garansi
- ▶ Bank Kliring
- ▶ *Bill Payment*
- ▶ Penerimaan Setoran
- ▶ Transaksi *Online*
- ▶ Transfer LLG (Lalu Lintas)
- ▶ Giro) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

E-Banking

- ▶ ATM BRI
- ▶ *Mobile Banking* (SMS Base)
- ▶ *Internet Banking* BRI
- ▶ CRM BRI
- ▶ EDC BRI
- ▶ BRIZZI (*Electronic Money* BRI)
- ▶ BRI_{mo}

Jasa Layanan Bisnis Internasional

▶ Layanan Impor	▶ Jasa Penagihan Ekspor	▶ <i>Refinancing LC</i>
▶ Penerbitan <i>Letter of Credit</i> (LC)	▶ <i>Outward Documentary Collection</i>	▶ <i>Risk Participation</i>
▶ Penerbitan Amendment LC	▶ <i>Outward Clean Collection</i>	▶ <i>Banker Acceptance</i>
▶ Fasilitas Kredit Impor	▶ <i>Pre-Shipment Financing</i>	▶ <i>USD Local Settlement</i>
▶ <i>Pre-Impor Financing</i> (Penanguhan Jaminan Impor)	▶ <i>Post-Shipment Financing</i>	▶ <i>Guarantee (Standby LC)</i>
▶ <i>Post-Impor Financing</i> (KMKI & <i>Trust Receipt</i>)	▶ <i>Negosiasi Wesel Ekspor</i>	▶ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
▶ Layanan Ekspor	▶ Diskonto Wesel Ekspor Berjangka	▶ <i>Bill Purchase Financing</i>
▶ <i>Advising LC</i>	▶ Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka	▶ <i>Money Changer</i>
▶ LC <i>Confirmation</i>		▶ <i>Forfaiting</i>
		▶ <i>Counter Guarantee</i>

Produk dan Jasa

BRIfast Remittance

BRIfast *Remittance* adalah layanan *remittance* BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan *Remittance* BRI meliputi fitur *outgoing remittance* ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance credit to BRI account* (iriman masuk ke rekening BRI) dan *credit to other bank account* (iriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur *incoming remittance cash pick-up* (iriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI di Indonesia secara *real time online*.

Jasa Layanan Treasury

- ▶ Transaksi Valuta Asing/ *Foreign Exchange*
- ▶ Transaksi *Swap*
- ▶ Transaksi *Forward*
- ▶ Jasa Wali Amanat
- ▶ Jasa Agen Penjual Efek
- ▶ Jasa Kustodian
- ▶ Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI)

BRI Prioritas

Layanan *Wealth Management* dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan konsep *one stop financial solution* dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan *Wealth Management* BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, *Saving Bond* Ritel, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk *Bancassurance*.





PROFIL PERUSAHAAN

Jaringan Internasional



Unit Kerja

Outlets	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	19	19	19	19	19	19
Kantor Cabang	461	467	467	468	468	467
Kantor Cabang Pembantu	584	603	609	610	609	611
BRI Unit	5.293	5.360	5.380	5.382	5.381	5.382
Kantor Kas	971	983	984	992	964	568
Teras BRI	2.457	2.543	2.545	2.536	2.069	2.049
Teras BRI Keliling	610	636	638	638	133	133
Teras BRI Kapal	-	1	3	3	3	4
Jumlah Unit Kerja Operasional Total	10.395	10.613	10.646	10.649	9.650	9.234
Total Unit Kerja termasuk 5 KC & 3 KCP Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)						

WILAYAH OPERASIONAL

Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel

Jaringan Kantor Wilayah Indonesia

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.234 unit kerja, 227.436 jaringan e-channel dan 422.160 agen BRLink yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



E-Channel

E-Channel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ATM	20.792	22.792	24.292	24.684	24.684	19.184
EDC	131.204	187.758	257.712	302.921	284.426	204.386
CRM	392	892	1.392	1.992	2.609	3.809
E-Buzz	55	57	57	57	57	57
Total	152.443	211.499	283.453	329.654	309.776	227.436
Agen BRLink	-	50.259	84.550	279.750	401.550	422.160



PROFIL PERUSAHAAN

JEJAK LANGKAH

1895

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi Syomin Ginko (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

2015

- ▶ Pada tahun 2015 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Singapura serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life)
- ▶ Pada tanggal 4 Agustus 2015 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan.
- ▶ BRI juga meresmikan BRI *Corporate University* sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja.

2014

- ▶ Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- ▶ BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan *Space System/ Loral* (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self-service banking* yang pertama di Indonesia.

2011

- ▶ Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1: 2.
- ▶ Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- ▶ Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer dan Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

2009

Interkoneksi *real time online* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan *ticker* "BBRI". Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).

2016

- ▶ Tanggal 18 Juni 2016, pukul 18.38 Waktu Kourou, Guyanan Prancis, satelit milik BRI, BRIsat meluncur dengan sukses. BRIsat menjadi infrastruktur penunjang layanan digital Bank BRI.
- ▶ BRI Mengakuisisi BTMU Finance yang bergerak di bidang *multifinance*. BTMU Finance berubah nama menjadi BRI Finance.
- ▶ Meluncurkan layanan *full-digital branch* di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan juga program digitalisasi untuk UMKM seperti e-Pasar, Teras BRI Digital. 1 Juta Domain Gratis Untuk UMKM dan Rumah Kreatif BUMN.

2017

- ▶ Pada tanggal 14 Maret 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste
- ▶ Pada tanggal 24 Februari 2017 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera
- ▶ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

2018

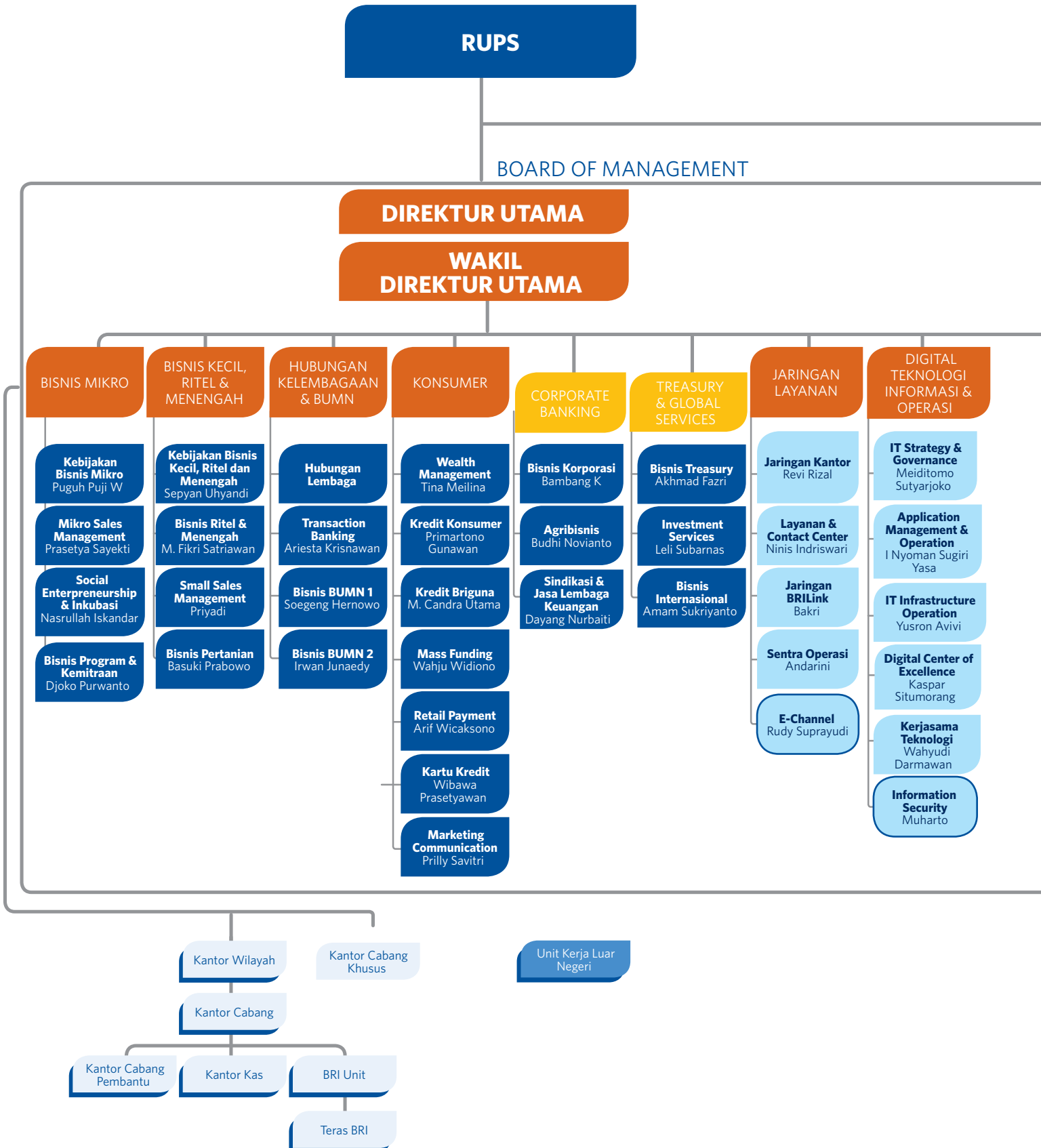
- ▶ Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai *BRI New Assistance* yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.
- ▶ Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.
- ▶ BRI menerbitkan beberapa surat berharga berikut:
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1.837.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
 - Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 21 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.

- ▶ Bank BRI melalui perusahaan anak BRI Agro meluncurkan PINANG, *Digital Lending* Perbankan Pertama di Indonesia. Dengan mengkombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat proses pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap muka secara langsung. Melalui proses yang cepat, murah, dan aman, serta plafon yang bersaing, PINANG akan memberikan kemudahan ekstra kepada nasabah untuk mengajukan pinjaman.
- ▶ Bank BRI melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS), akuisisi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menjadi *integrated financial solution* yang akan semakin melengkapi layanan keuangan yang dimiliki oleh BRI Group.
- ▶ Guna memberikan kemudahan dan keamanan layanan transaksi perbankan, Bank BRI kembali meluncurkan terobosan digital banking terbarunya. Yang terbaru, Bank BRI meluncurkan aplikasi BRImo, aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (*user interface/ user experience*) dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh nasabah maupun non nasabah BRI tanpa perlu datang ke kantor cabang dengan pilihan sumber dana giro, tabungan dan Uang Elektronik untuk setiap fitur-fiturnya. BRImo memiliki berbagai keunggulan menarik, yakni kemudahan dalam pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, login aplikasi menggunakan *finger print* maupun *face id Recognition*, cek mutasi rekening hingga 1 tahun kebelakang, penggunaan alias rekening serta akses info promo Bank BRI. Pengguna BRImo hingga Desember 2019 telah mencapai 2,96 juta pengguna.
- ▶ Pada 12 Desember 2019, Bank BRI melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam *digital banking* di Indonesia. Yang terbaru, Bank BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA. Melalui peluncuran ini, Bank BRI menjadi bank BUMN pertama yang memiliki aplikasi pinjaman *online*.
- ▶ Selain berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk *digital banking*, selama periode tahun 2019 Bank BRI juga terus melakukan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran KUR senilai Rp 87,9 Triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM. Dari total KUR yang disalurkan selama tahun 2019 oleh Bank BRI tersebut, Rp75,7 Triliun atau 86,1% diantaranya disalurkan khusus di segmen mikro. Dengan demikian, sejak tahun 2015, Bank BRI telah berhasil menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp 323,4 Triliun kepada lebih dari 16,6 juta pelaku UMKM diseluruh Indonesia.
- ▶ BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Venture) dan PT Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM). Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 7 (tujuh) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRI Syariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (Danareksa Sekuritas).
- ▶ BRI juga meresmikan BRI *Institute* sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.



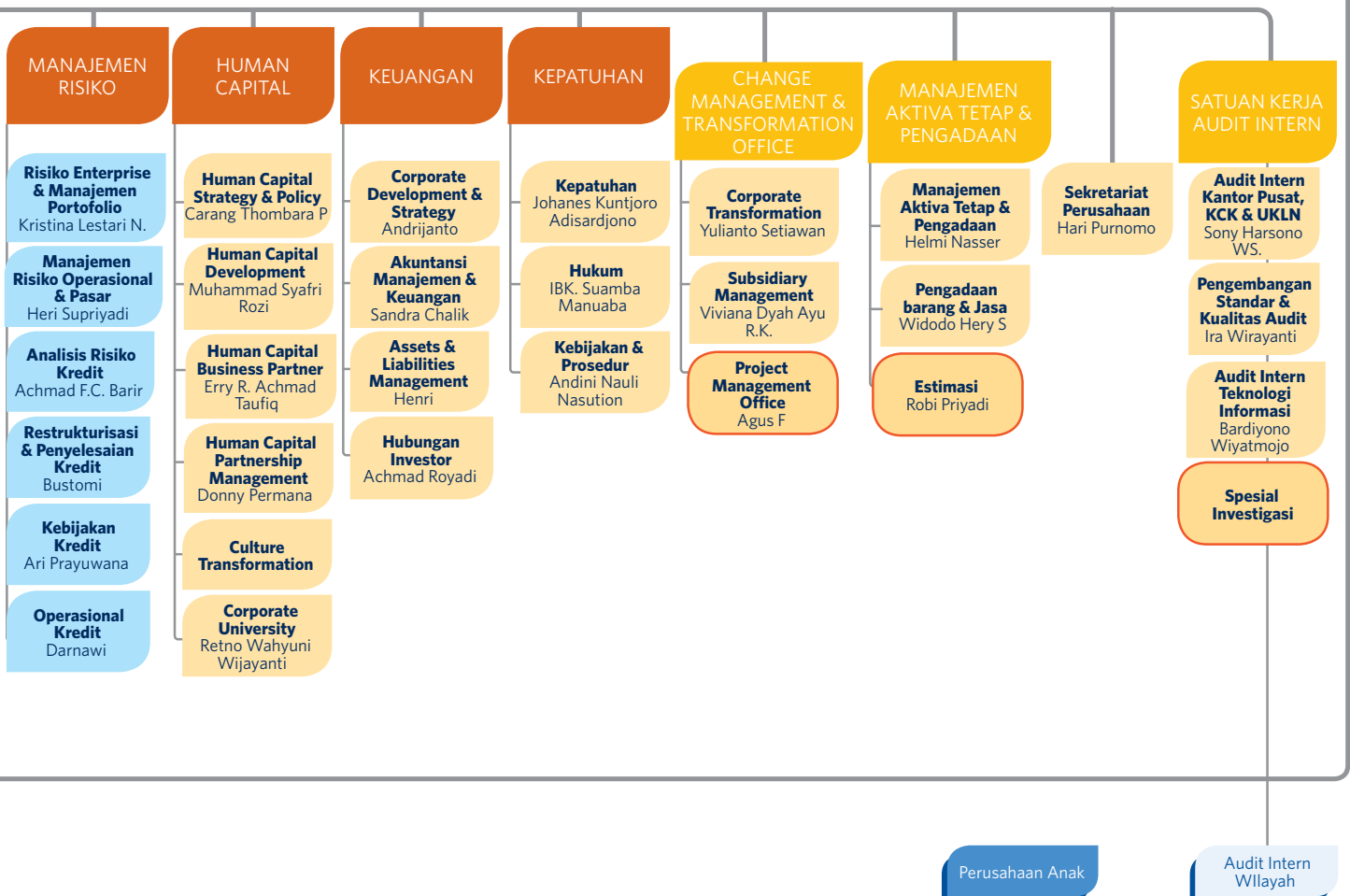
PROFIL PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI



Struktur Organisasi

DEWAN KOMISARIS



- Direktur
- SEVP
- Bisnis
- Penunjang Bisnis
- Support

Komite Dewan Komisaris
Komite Direksi

: Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantau Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi
: Manajemen Risiko, Kebijakan Kredit, Kredit ALCO, Kebijakan Human Capital, TI, Capital & Investment, Evaluasi Jabatan, Produk, Project Management Office, Pengadaan Barang & Jasa



PROFIL PERUSAHAAN

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA



Visi

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent



Misi

- ✓ Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- ✓ Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui:
 - ▶ Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*)
 - ▶ Teknologi informasi yang handal dan *future ready*
 - ▶ Jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*.
 - ▶ Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

Persetujuan Visi dan Misi

Visi & Misi BRI telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan NOKEP. 403-DIR/CDS/05/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama

Nilai-Nilai Utama



Integrity

Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan.



Professionalism

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab.



Trust

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan.



Innovation

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan.



Customer Centric

Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan.



PROFIL PERUSAHAAN

BUDAYA PERUSAHAAN

BRILiaN

Budaya BRI yakni BRILIAN, **10 Sikap Perilaku**, **20 Indikator Perilaku** dan **20 Tindakan Budaya Kerja** menunjukkan komitmen dan tekad BRI untuk menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dan terdepan dalam membangun ekonomi bangsa.

10 (Sepuluh) Sikap Perilaku Insan BRI

adalah sikap dan perilaku setiap insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI (BRILiaN)

1. Terbuka, Jujur dan tulus.
2. Patuh Terhadap Peraturan.
3. *Continous Learner*.
4. *Fairness*.
5. Saling menghargai.
6. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri.
7. *Visioner*.
8. *Pionir* Perubahan.
9. Melayani Lebih dari Ekspektasi Nasabah dengan setulus hati.
10. *Collaborative*.

Budaya Perusahaan

Selanjutnya terdapat juga

20 (Dua Puluh) Tindakan Budaya Kerja

merupakan tindakan-tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh setiap insan BRI dan mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja:

1. Senantiasa menjaga nama baik pribadi dan reputasi perusahaan.
2. Aktif mengemukakan pendapat/sharing pada kesempatan *briefing* pagi, *meeting*, dan forum lainnya.
3. *Say No to Fraud*, dan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan bawahan, rekan kerja, maupun Atasan.
4. Disiplin dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan).
5. Meningkatkan Pengetahuan & pemahaman terhadap bidang tugas dan pengetahuan perbankan agar dapat mengenali dan mengendalikan risiko.
6. *Up to date* terhadap perkembangan informasi perbankan terkini.
7. Memberikan penghargaan kepada Pekerja yang berhasil dengan baik dalam kinerja maupun perilaku (penghargaan tidak harus dalam bentuk *financial*).
8. Membangun budaya berbasis kinerja (*performance driven culture*) di setiap lini dan unit kerja.
9. Menghargai pendapat bawahan, rekan kerja, dan atasan yang berorientasi pada kemajuan perusahaan.
10. Menjaga hubungan yang baik antara Pekerja dengan Perusahaan termasuk dalam berkomunikasi di sosial media.
11. Saling memotivasi melalui dialog, forum diskusi maupun pertemuan lainnya.
12. Menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* (GCG) dan menghindari *Conflict of Interest* di setiap bidang tugas.
13. Senantiasa berdiskusi dalam tim untuk menemukan solusi terbaik yang berdampak jangka panjang dan berkesinambungan.
14. Aktif dalam menggali ide-ide inovasi untuk menjawab tantangan di unit kerja.
15. Senantiasa melakukan penyempurnaan dengan ide baru yang kreatif dan inovatif.
16. Membangun Budaya Ramah dalam memberikan pelayanan (Senyum, Sapa, dan Salam) kepada nasabah intern maupun ekstern.
17. Menyelesaikan *complain*/pelayanan lebih cepat dari *service level agreement* (SLA).
18. Menjaga kebersihan & kenyamanan lingkungan kerja
19. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar bidang tugas untuk memperoleh solusi terbaik bagi kebutuhan nasabah dan perusahaan.
20. Selalu mendahulukan kebutuhan dan kepentingan nasabah di seluruh aktifitas perusahaan.



PROFIL PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan

Budaya Kerja Perusahaan merupakan salah satu landasan utama untuk mencapai keberhasilan visi dan misi perusahaan. Untuk mendorong pencapaian visi dan misi perusahaan diperlukan implementasi Budaya Kerja yang kuat yang dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, memperkuat kerjasama tim serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yaitu antara lain:

- Perkembangan dan perubahan tantangan di bidang jasa keuangan berupa disrupsi digital harus didukung dengan peningkatan pengetahuan, skill, layanan dan profesionalisme SDM dalam menghadapi persaingan.
- Proporsi jumlah Pekerja usia muda (Generasi Millenials) yang signifikan dengan membawa latar belakang Budaya yang berbeda.
- Tingkat persaingan perbankan yang semakin ketat menuntut kualitas sumber daya manusia BRI yang unggul.

Oleh karena itu, pada awal tahun 2018, BRI telah menetapkan 5 nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI yang disingkat BRILiaN (**BRI dengan Lima Nilai**) sebagai berikut:

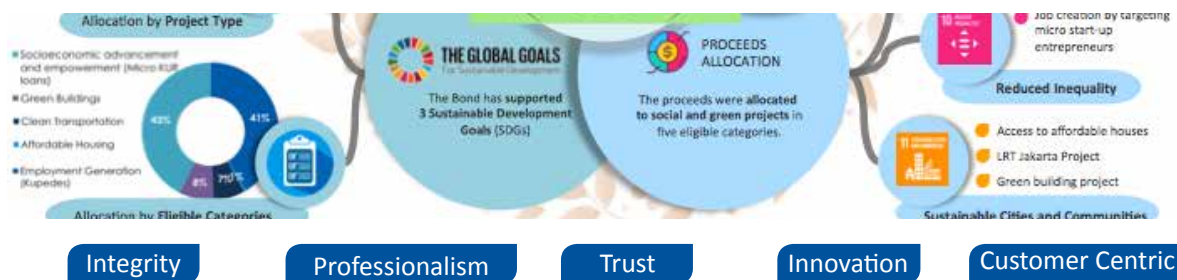
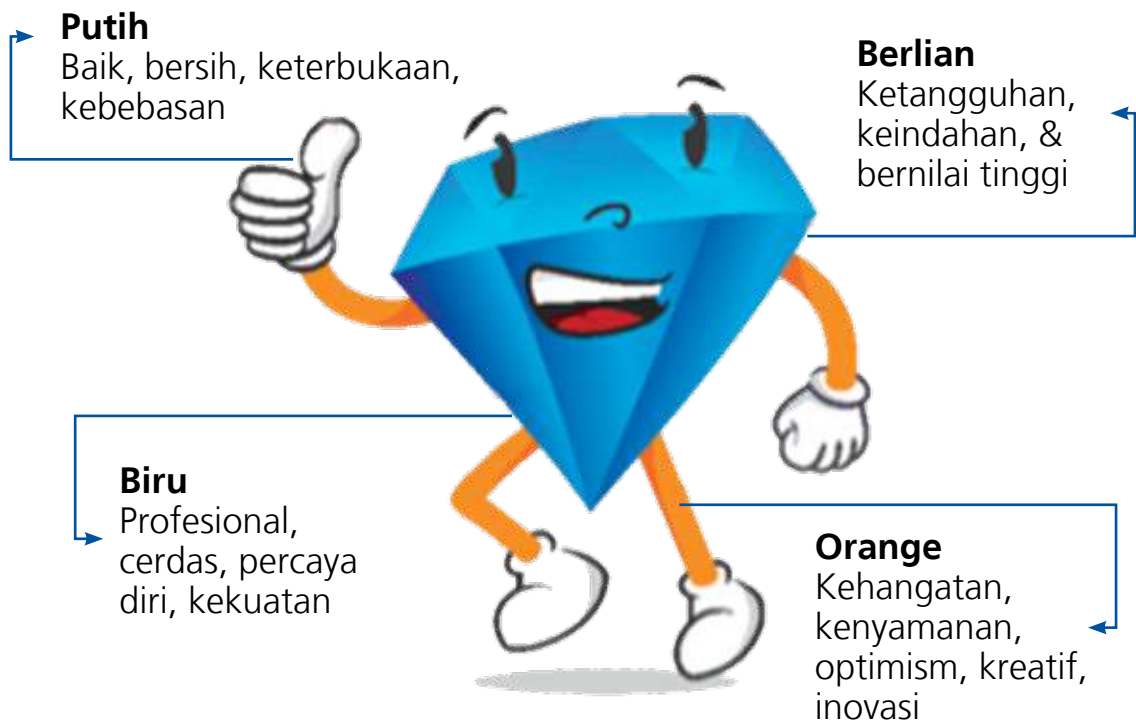
- *Integrity*
- *Professionalism*
- *Trust*
- *Innovation*
- *Customer Centric*



Budaya Perusahaan

Maskot Budaya Kerja BRI disebut dengan si “BRILiaN”. Maskot Budaya Kerja BRI melambangkan peranan Budaya Kerja dalam mendukung kegiatan bisnis BRI untuk meningkatkan kinerja perusahaan, kesejahteraan Pekerja, dan kemakmuran serta pemerataan di seluruh pelosok Indonesia.

Gambar Maskot Budaya Kerja BRI memiliki arti/ makna sebagai berikut :





PROFIL PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan

Budaya Kerja BRI dijabarkan kembali menjadi 5 nilai-nilai pokok (*core values*) Budaya Kerja, 10 (sepuluh) sikap perilaku utama insan BRI, dan 20 (dua puluh) Tindakan Budaya Kerja. 10 (sepuluh) Sikap Perilaku Insan BRI adalah sikap dan perilaku setiap insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI (BRILiaN). Sedangkan 20 (dua puluh) Tindakan Budaya Kerja adalah tindakan-tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh setiap insan BRI dan mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja.

Nilai-nilai Pokok Budaya Kerja BRI (BRILiaN) dijelaskan sebagai berikut :

Integritas		
Definisi	Senantiasa berfikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan dan taat aturan.	
Sikap & Perilaku	Tindakan Budaya Kerja	
1. Terbuka, Jujur dan tulus	Senantiasa menjaga nama baik pribadi dan reputasi perusahaan. Aktif mengemukakan pendapat/sharing pada kesempatan briefing pagi, meeting, dan forum lainnya.	
2. Patuh Terhadap Peraturan	Say No to Fraud , dan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan bawahan, rekan kerja, maupun Atasan. Disiplin dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan).	
Professionalism		
Definisi	Berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab.	
Sikap & Perilaku	Tindakan Budaya Kerja	
3. <i>Continuous Learner</i>	1. Meningkatkan Pengetahuan & pemahaman terhadap bidang tugas dan pengetahuan perbankan agar dapat mengenali dan mengendalikan risiko. 2. Up to date terhadap perkembangan informasi perbankan terkini.	
4. <i>Fairness</i>	3. Memberikan penghargaan kepada Pekerja yang berhasil dengan baik dalam kinerja maupun perilaku (penghargaan tidak harus dalam bentuk financial) 4. Membangun budaya berbasis kinerja (<i>performance driven culture</i>) di setiap lini dan unit kerja.	
Trust		
Definisi	Membangun keyakinan dan saling percaya di antara para stakeholders demi kemajuan perusahaan.	
Sikap & Perilaku	Tindakan Budaya Kerja	
5. Saling menghargai	5. Menghargai pendapat bawahan, rekan kerja, dan atasan yang berorientasi pada kemajuan perusahaan. 6. Menjaga hubungan yang baik antara Pekerja dengan Perusahaan termasuk dalam berkomunikasi di sosial media. 7. Saling memotivasi melalui dialog, forum diskusi maupun pertemuan lainnya	
6. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri	8. Menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dan menghindari Conflict of Interest di setiap bidang tugas.	

Budaya Perusahaan

Innovation		
Definisi	Mendayagunakan kemampuan dan keahlian dalam menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk / kebijakan yang menjawab tantangan permasalahan perusahaan.	
	Sikap & Perilaku	Tindakan Budaya Kerja
	7. <i>Visioner</i>	9. Senantiasa berdiskusi dalam tim untuk menemukan solusi terbaik yang berdampak jangka panjang dan berkesinambungan. 10. Aktif dalam menggali ide-ide inovasi untuk menjawab tantangan di unit kerja
	8. <i>Pionir Perubahan</i>	11. Senantiasa melakukan penyempurnaan dengan ide baru yang kreatif dan inovatif
Customer Centric		
Definisi	Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan	
	Sikap & Perilaku	Tindakan Budaya Kerja
	9. Melayani Lebih dari Ekspektasi Nasabah dengan setulus hati	12. Membangun Budaya Ramah dalam memberikan pelayanan (Senyum, Sapa, dan Salam) kepada nasabah intern maupun ekstern. 13. Menyelesaikan complain/pelayanan lebih cepat dari <i>service level agreement</i> (SLA). 14. Menjaga kebersihan & kenyamanan lingkungan kerja
	10. <i>Collaborative</i>	15. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar bidang tugas untuk memperoleh solusi terbaik bagi kebutuhan nasabah dan perusahaan. 16. Selalu mendahulukan kebutuhan dan kepentingan nasabah di seluruh aktifitas perusahaan.



PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Andrinof A. Chaniago

Komisaris Utama / Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	57 tahun
Domisili	Jakarta

Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (1990)
- Diploma, The National Development Courses, Fu Hsing Kang College, Taiwan (2004)
- Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) (2015-2017)
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (2014-2015)
- Direktur Eksekutif, CIRUS Surveyors (2008-2014)

Penunjukkan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama/Independen BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017
- Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi, Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rangkap Jabatan

Saat ini aktif sebagai Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (2006 – sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Profil Dewan Komisaris



Ahmad Fuad Rahmany

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	65 tahun
Domisili	Depok

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1981)
- Master of Art bidang Economics dari Duke University, North Carolina, USA (1987)
- Doktor bidang Economics dari Vanderbilt University, Tennessee, USA (1997).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (2014-2015)
- Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2013-2014)
- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2011-2014)
- Komisioner ex-officio Lembaga Penjamin Simpanan (2009-2014)
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (2006-2011)

Penunjukkan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS
- Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-85/D.03/2015 tanggal 19 Mei 2015.
- Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Audit, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Dewan Komisaris



A. Sonny Keraf

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	61 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	
- Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta (1988) - Master in Philosophy dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1992) - Doctor (Ph.D.) in Philosophy dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1995)	
Riwayat Pekerjaan	
- Anggota DPR-RI dan Wakil ketua Komisi VII DPR RI, Oktober (2004–2009) - Menteri Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup (1999-2001) - Dosen Luar Biasa Program Pasca sarjana S3 Universitas Indonesia (2001-2014)	
Penunjukkan	
- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan Surat OJK No. SR-98/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015 - Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BRI	
Rangkap Jabatan	
- Komisaris Independen PT Gorontalo Sejahtera Mining (2015-sekarang) - Anggota Dewan Energi Nasional (2014-Juli 2019) - Pengajar di UNIKA Atmajaya Jakarta (1988-sekarang)	
Hubungan Afiliasi	
Tidak ada	

Profil Dewan Komisaris



Rofikoh Rokhim

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	48 tahun
Domisili	Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993)
- Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994)
- Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (2000)
- D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002)
- Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (2005).
- Pendidikan Profesional: Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics and Political Science (LSE), Said Business School-University of Oxford, Chicago Booth School of Business, Stanford Graduate School of Business, Wharton Business School, INSEAD, Harvard Business School, Harvard Kennedy School.

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017)
- Komite Pelayanan dan Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan (2016-2017)
- Kinerja Organisasi dan SDM di BPJS Ketenagakerjaan (2016-2017)
- Tim Task Force/Satgas Desa Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (2016-2017)
- Tim Task Force/Satgas Migas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2014-2015)
- Komite Audit dan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT POS Indonesia (Persero) (2012-2015), dan Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008-2013)

Penunjukkan

- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018.
- Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BRI dan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko

Rangkap Jabatan

Saat ini aktif sebagai Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2006-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Dewan Komisaris



Hendrikus Ivo

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	61 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	
- Sarjana Hukum Perusahaan dari Universitas Sumatera Utara (1993) - Master Manajemen dari STIE IPWI (2000)	
Riwayat Pekerjaan	
- Advisor Senior Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2018) - Deputy Komisiner Penyidikan, Organisasi dan SDM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) - Deputy Komisiner Penyidikan & APU PPT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016) - Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015) - Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014) - Kepala Kantor Regional 6 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014)	
Penunjukkan	
- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan hasil RUPST - Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No: SR-242/PB.12/2019 tanggal 29 Agustus 2019 - Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi & Remunerasi	
Rangkap Jabatan	
Tidak ada	
Hubungan Afiliasi	
Tidak ada	

Profil Dewan Komisaris



Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	47 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada (1996) - M.A. Ilmu Politik dari Ohio University, Ohio, USA (2003) - Ph.D. Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Northern Illinois University (2010).
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017 - sekarang) - Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2016 - 2017) - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2015 - sekarang)
Penunjukan	- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan - Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017 - Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BRI dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Rangkap Jabatan	- Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2015-sekarang) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 2015-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Dewan Komisaris



Hadiyanto

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	57 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1986) - Certificate International Tax Program - Master of Law dari Harvard University Law School, USA (1993) - Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2012)
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris PT Telkom Indonesia (2012-2018) - Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (2011-2015) - Dewan Pengawas Gelora Bung Karno (2010-2011) - Dewan Direktur Indonesia LPEI (Eximbank) (2009-2015) - Komisaris PT Tuban Petro Indonesia (2007-2013) - Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2007-2012) - Komisaris Utama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (2007-2009) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (2006-2015) - Komisaris PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (2006-2008) - Alternate Executive Director World Bank, Washington DC (2003-2005) - Kepala Biro Hukum & Humas Departemen Keuangan (1993-2003)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 22 Maret 2018 - Telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No: SR-194/PB.12/2018 tanggal 21 September 2018 - Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Tata kelola Terintegrasi, dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BRI
Rangkap Jabatan	- Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (2015-sekarang) - Ketua Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016-sekarang) - Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris



Loeke Larasati Agoestina*

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	60 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Hukum Perdata, Universitas Katolik Parahyangan (1994) - Gelar Master dalam Human Capital, IPWI (2001)
Riwayat Pekerjaan	- Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI (2017-2019) - Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Jawa Barat (2017) - Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (2015-2017)
Penunjukkan	- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019 sebagai Komisaris - Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BRI
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.



PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL DIREKSI



Sunarso

Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 Tahun
Domisili	Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (tahun 1988)
- Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (tahun 2002)

Achievement

- The Best CEO BUMN : Talent Development (Anugerah BUMN 2018, BUMN Track)
- The Best CEO BUMN : The Best Good Corporate Governance & Service (7sky Media, 2018)
- The Best CEO : The Best Transformative Leader (7sky Media, 2018)
- The Best SME Banker 2013 in Asia Pacific : The Triple A Awards (The Asset Magazine, Hong Kong)
- The Most Influential People in Southeast Asia – Leading Corporate & Commercial Bankers (Alpha Southeast Asia Magazine, 2012)

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Januari 2019-September 2019)
- Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (Oktober 2017-Januari 2019)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Maret 2015-Oktober 2017)
- Direktur Comercial & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2010-Maret 2015)

Penunjukkan

- Diangkat sebagai Direktur Utama pada RUPSLB pada tanggal 02 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No:SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Profil Direksi



Catur Budi Harto

Wakil Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	55 tahun
Domisili	Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1986)
- Gelar Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (2002)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019)
- Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Executive Vice President (SEVP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016)

Penunjukkan

- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 02 September 2019
- Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada





PROFIL PERUSAHAAN

Profil Direksi



Supari

Direktur Bisnis Mikro

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	53 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang (1989) - Master Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005).
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Bisnis Mikro (September 2019-sekarang) - Direktur Bisnis Ritel dan Menengah (Maret 2018-September 2019) - SEVP Transformation BRI (Oktober 2017-Maret 2018) - SEVP Manajemen Jaringan BRI (Mei 2017-Oktober 2017) - SEVP UKM Konsumer BRI (2016-2017)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan - Telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-34/KDK.03/2018 tanggal 04 Desember 2018
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi



Priyastomo

Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 tahun
Domisili	Tangerang
Pendidikan	- Sarjana Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987) - Magister Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Kredit Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018) - Direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017) - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016) - Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016) - Pemimpin Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016) - Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015) - Pemimpin Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan - Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Direksi



Handayani

Direktur Konsumer

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	54 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya (1988) - Gelar Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung (2001)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2016-2017) - Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Tbk (2014-2016) - Direktur Marketing & Alternate Distribution PT AXA Mandiri (2013-2014)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Direktur Konsumer BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan Surat OJK No. KEP-44/D.03/2018 tanggal 14 Maret 2018
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi



Haru Koesmahargyo

Direktur Keuangan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	53 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989) - MBA, Investment Banking, Emory University, Amerika Serikat (2000)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Strategi Bisnis & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018) - Direktur Strategi & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017) - Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017) - Presiden Komisaris PT BTMU BRI Finance (2014-2015) - Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015) - General Manager, Kantor Cabang New York PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan - Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-109/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Direksi



Indra Utoyo

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi

Kewarganegaraan Indonesia

Umur 57 tahun

Domisili Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1985)
- Magister Communication and Signal Processing, Imperial College, University of London, UK (1994)
- Doctor Strategic Management Universitas Indonesia, (2019)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018)
- Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom Group PT Telkom (2012-2017)
- CEO CFU Digital Service Telkom Group PT Telkom (2016-2017)
- Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009-2016)
- Direktur IT Solution & Supply PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2012)

Penunjukkan

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan
- Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Profil Direksi



Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Jaringan dan Layanan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	49 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Pendidikan	- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1990) - Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM Adger Collage University Norway (1999)
Riwayat Pekerjaan	- Dierktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018-2019) - Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital BRI (2017-2018) - Kepala Divisi Transaction Banking BRI (2016-2017) - Wakil Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel BRI (2012-2016)
Penunjukkan	- Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan - Telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-150/PB.12/2018 tanggal 27 Juli 2018
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Direksi



Herdy Rosadi Harman

Direktur Human Capital

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	
- Sarjana Hukum, dari Universitas Padjadjaran (1986) - Master of Business Administration (MBA), Asian Institute Management Philippines, Institute Management Bandung (TELKOM University) (1993) - Master of Law (LLM Program), American University, Washington College of Law (1998)	
Riwayat Pekerjaan	
- Staf Khusus V Menteri BUMN Bidang Pengembangan SDM, Kementerian BUMN (s/d September 2019) - Direktur Human Capital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2014-2019) - Direktur human Capital Management PT Telekomunikasi Seluler (2012-2014) - VP Regulatory Management PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2012)	
Penunjukkan	
- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019 - Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019	
Rangkap Jabatan	
Tidak ada	
Hubungan Afiliasi	
Tidak ada	

Profil Direksi



Agus Sudiarto

Direktur Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	55 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	- Sarjana Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (1988) - Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2004)
Riwayat Pekerjaan	- SEVP Special Asset Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019) - Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (2014-2017) - Group Head Special Asset Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2014)
Penunjukkan	- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019 - Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

Profil Direksi



Agus Noorsanto

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	55 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Pendidikan	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1988) - Master dalam Jurusan Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1999)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (2017-2019) - SEVP Bussiness Small, Medium & Consumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016) - Senior Executive Vice President Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017)
Penunjukkan	- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019 - Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi



Azizatun Azhimah

Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	44 tahun
Domisili	Bogor
Pendidikan	- Sarjana dari Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro (1997) - Master of Business Administration dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, US (2009)
Riwayat Pekerjaan	- Wakil Kepala Divisi, Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) - General Manager, Kantor Cabang Singapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018)
Penunjukkan	- Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2019 - Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: SR.342/PB.12/2019 tanggal 20 Desember 2019
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)



Gunawan Sulistyio SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

55 tahun
Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak 1 Mei 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Deputy Chief Learning Officer BRI Corporate University.

Riwayat Pendidikan

Meraih Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan Magister Management bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Listiarini Dewajanti SEVP Treasury & Global Services

54 tahun
Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai SEVP Treasury & Global Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak Juli 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Development and Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, General Manager BRI New York Agency, dan Kepala Desk Hubungan Investor BRI.

Riwayat Pendidikan

Meraih Sarjana Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989), dan Master of Business (Banking and Finance), Monash University, Melbourne, Australia (1999).



Hari Siaga Amijarso SEVP Satuan Kerja Audit Intern

54 tahun
Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Sejak Juli 2019 menjabat sebagai SEVP Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Wilayah Jakarta 1, Yogyakarta dan Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Riwayat Pendidikan

Meraih Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, Malang (1989).



Lina Sari SEVP Corporate Banking

54 tahun
Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai SEVP Corporate Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak November 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Agribisnis dan Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Riwayat Pendidikan

Meraih Sarjana Pertanian, Universitas Andalas, Padang (1989), dan Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2001).

DEMOGRAFI KARYAWAN

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2016	2017	2018	2019
Senior Executive Vice President	4	5	3	4
Executive Vice President	86	98	103	109
Vice President	193	209	198	177
Assistant Vice President	380	345	353	345
Senior Manager	747	735	766	788
Manager	1.248	1.331	1.320	1.532
Assistant Manager	4.992	5.41	5.599	5.277
Officer	12.214	12.003	11.945	12.574
Assistant	73.469	72.722	69.656	70.814
Total	93.333	92.858	89.943	91.620

*di luar pekerja *outsourcing*

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	2016	2017	2018	2019
≤ SLTA / Setingkat	3.133	2.652	2.308	1.952
Diploma	12.055	10.134	10.595	10.825
Strata 1	76.966	78.867	75.797	77.509
Strata 2	1.172	1.202	1.237	1.325
Strata 3	7	3	6	9
Total	93.333	92.858	89.943	91.620

*di luar pekerja *outsourcing*

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2016	2017	2018	2019
Pekerja Tetap	58.811	60.764	60.947	61.449
Pekerja Kontrak	34.262	31.994	28.970	29.899
Trainee	64	100	63	272
Outsourcing	36.197	37.929	33.949	33.982
Total	129.334	130.787	123.929	125.602



PROFIL PERUSAHAAN

Demografi Karyawan

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENDIDIKAN SERTIFIKASI BAGI PEKERJA

Dalam rangka peningkatan kualitas human capital BRI untuk mendukung pencapaian kinerja unggul, pada tahun 2019 BRI telah melakukan pembaruan kebijakan Pendidikan Sertifikasi bagi Pekerja.

Dalam kebijakan ini Pekerja didorong untuk lebih mudah mengambil sertifikasi di bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga keahlian atau kompetensi Pekerja di bidang tersebut telah memenuhi standar industri atau diakui oleh lembaga/institusi bidang keahlian tersebut.

Pada tahun 2019, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 4.231.199 peserta dengan komposisi 3,06% pendidikan *In Class* dan 91,39% *e-Learning*, serta sisanya sebesar 2,9% merupakan peserta FPK/FGD dan 2,65% untuk sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	2017	2018	2019
1	<i>Development</i>	11.326	9.895	13.350
2	<i>Enhancement</i>	1.604.946	2.799.661	3.982.868
3	FPK/FGD	93.691	109.762	122.889
4	Sosialisasi	63.231	67.963	112.096
Total		1.773.194	2.987.284	4.231.199

Catatan:

Untuk program Pendidikan *Enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *e-Learning*. Sedangkan untuk Pendidikan *development* termasuk Pendidikan *master degree/S2*.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI & LEMBAGA PELATIHAN KERJA BRI

Dalam rangka memastikan bahwa Pekerja BRI Group telah kompeten dan memiliki Talent, untuk bersama-sama menuju Pencapaian Visi BRI "*Home to The Best Talent*" serta menuju SDM Unggul Indonesia Maju, melalui SK Direksi BRI No. B.723-DIR/CDS/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BRI yang bertujuan untuk melakukan Uji Kompetensi ke seluruh pekerja BRI Group. LSP BRI sebagai LSP P2 merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP BRI adalah sertifikat Negara dengan Lambang Burung Garuda.

Selain itu, BRI *Corporate University* dan *Campus BRI Corporate University* Seluruh Indonesia juga telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perusahaan, sehingga BRI *Corporate University* dapat menerbitkan 'Sertifikat Pelatihan' serta seluruh Pendidikan dan Pelatihan Pekerja BRI yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan.

BIAYA PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Biaya pendidikan dan pengembangan human capital BRI di tahun 2019 tercatat sebesar Rp696 miliar. BRI berhasil melakukan efisiensi biaya pendidikan sebesar 72,9% dengan biaya per pekerja sebesar Rp165.000 per peserta melalui implementasi teknologi (*e-learning*). Berikut rincian biaya pendidikan human capital BRI tahun 2019:

Demografi Karyawan

Rupiah (Juta)

Program	Real 2019
<i>Development</i>	138.293
<i>Enhancement</i>	384.395
<i>Total Development & Enhancement</i>	522.688
FPK/FGD	154.335
Sosialisasi	4.771
Literasi	200,46
Support	14.799
Total FPK, Sosial, Literasi, & Support	174.106
Total Biaya	696.794

Program	2018	2019	%
<i>Development</i>	9.895	13.350	34,9%
<i>Enhancement</i>	2.799.661	3.982.868	42,2%
<i>Total Development & Enhancement</i>	2.809.556	3.996.218	42,2%
FPK/FGD	109.762	122.889	12%
Sosialisasi	67.963	112.092	64,9%
Total FPK, Sosial & Literasi	177.728	234.981	32,2%
Total Peserta	2.987.284	4.231.199	41,6%

Program	2018	2019	% <i>Efficiency</i>
<i>Development</i>	10.781	10.359	3,9%
<i>Enhancement</i>	116	96,5	16,8%
Biaya per Peserta I	153	131	14,6%
FPK/FGD	1.419	1.256	11,5%
Sosialisasi	50	43	15,4%
Literasi	-	-	-
Biaya per Peserta II	972	741	23,8%
Total Biaya per Peserta I & II	202	165	18,4%

Terdapat efisiensi sebesar 18,4% pada tahun 2019 dibandingkan realisasi tahun 2018, yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah peserta *Enhancement* yang didominasi oleh *e-learning*, sehingga menyebabkan biaya per peserta yang lebih murah.

Learning Effectiveness

Selama tahun 2019 BRI telah melakukan program pendidikan *development* dan *enhancement* kepada 4.231.199 peserta pendidikan. Hasil dari evaluasi terhadap efektivitas pendidikan BRI mencapai 87,85.

Program	Learning Evaluation	Total Evaluation		
		Level 1	Level 2	Level 3
<i>Development</i>		85,82	85,76	80,07
<i>Enhancement</i>		84,65	89,69	
<i>Average</i>		84,77	89,28	80,07

Catatan:
Tingkat Kelulusan 77,5
Level 1: *Student Reaction & Satisfaction* (30%)
Level 2: *Student Learning Result (Skill & Knowledge Improvement)* (50%)
Level 3: *Student Learning Behaviour (Application)* (20%)



PROFIL PERUSAHAAN

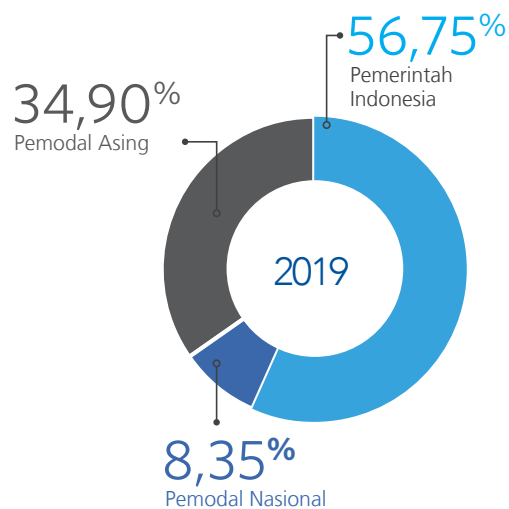
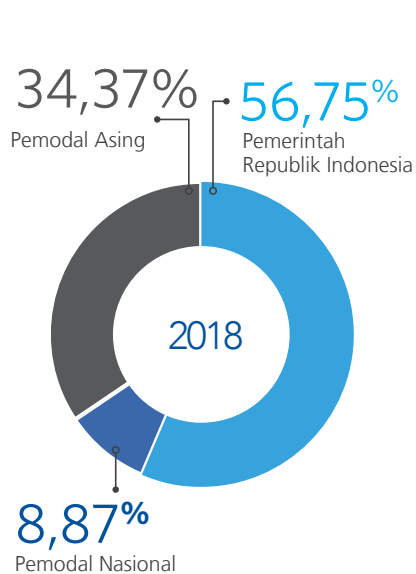
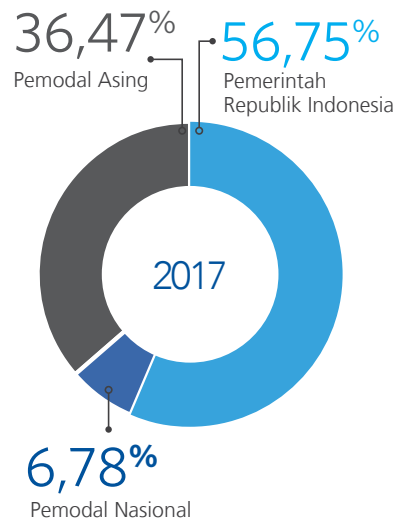
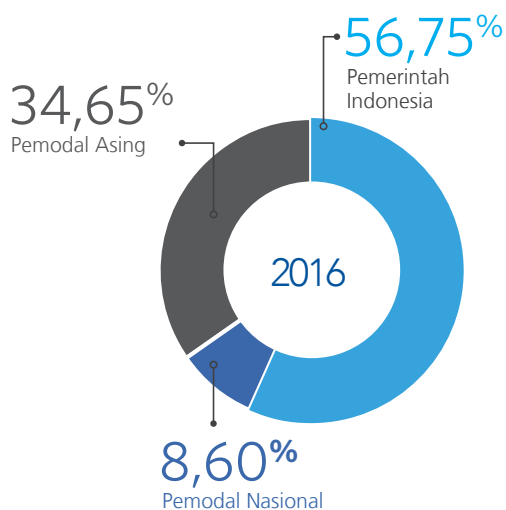
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Jumlah pemegang saham BRI pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 125.198 pemegang saham yang terdiri dari 122.930 pemodal nasional dan 2.268 pemodal asing.

Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 56,75%. Masyarakat atau publik memiliki porsi

kepemilikan saham sebesar 43,25% dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek.

Pemodal nasional memiliki porsi kepemilikan 65,10% dan sisanya pemodal asing dengan porsi kepemilikan 34,90%.



Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham BRI Posisi 31 Desember 2019

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%) Kepemilikan
PEMODAL NASIONAL			
Negara Republik Indonesia	1	70.000.000.000	56,75102
Perorangan Indonesia	70.046	1.038.520.920	0,84196
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00129
Karyawan	52.162	275.521.900	0,22337
Koperasi	14	3.026.752	0,00245
Yayasan	24	151.029.000	0,12244
Dana Pensiun	120	712.551.700	0,57769
Asuransi	105	2.568.500.800	2,08236
Bank	2	965.252.000	0,78256
Perseroan Terbatas	109	1.680.233.350	1,36221
Reksadana	346	2.906.071.211	2,35604
Jumlah Pemodal Nasional	122.930	80.302.297.633	65,10339
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	210	38.661.300	0,03134
Badan Usaha Asing	2.058	43.004.851.067	34,86527
Jumlah Pemodal Asing	2.268	43.043.512.367	34,89661
Total	125.198	123.345.810.000	100%



PROFIL PERUSAHAAN

20 Pemegang Saham Terbesar BRI Posisi 31 Desember 2019

No	Nama Investor	Status	Saham	Kepemilikan (%)
1	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	70.000.000.000	56,75102
2	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Asuransi	1.306.748.400	1.05942
3	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	Badan Usaha Asing	1.233.877.585	1.00034
4	JPMBLSAA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	927.662.979	0.75208
5	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	855.123.000	0.69327
6	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	782.069.618	0.63405
7	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	683.784.100	0.55436
8	JPMBL SA UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	682.590.730	0.55340
9	THE NT TST CO S/A HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	559.937.512	0.45396
10	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144613424	Badan Usaha Asing	504.722.500	0.40919
11	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY	Badan Usaha Asing	500.330.134	0.40563
12	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHINA-2039845393	Badan Usaha Asing	414.637.900	0.33616
13	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	400.191.143	0.32445
14	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	Badan Usaha Asing	385.123.195	0.31223
15	RBC S/A VONTOBEL FUND - MTX SUITANABLE EMERGING MARKETS LEADERS	Badan Usaha Asing	383.475.000	0.31089
16	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	360.758.550	0.29248
17	BNYM RE VIRTUS VONTOBEL EMERGING MARKETS OPPS FUND-2039925749	Badan Usaha Asing	357.228.869	0.28962
18	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	Badan Usaha Asing	353.595.000	0.28667
19	SSB SWV4 S/A CALIFORNIA PUBLIC EMP RETIREMENT SYS-2144618013	Badan Usaha Asing	320.840.410	0.26011
20	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	318.614.200	0.25831

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Posisi 31 Desember 2019

Kategori	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	70.000.000.000	56,75102

Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5% Posisi 31 Desember 2019

Kategori	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
PEMODAL NASIONAL			
Perorangan Indonesia	70.046	1.038.520.920	0,84196
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00129
Karyawan	52.162	275.521.900	0,22337
Koperasi	14	3.026.752	0,00245
Yayasan	24	151.029.000	0,12244
Dana Pensiun	120	712.551.700	0,57769
Asuransi	105	2.568.500.800	2,08236
Bank	2	965.252.000	0,78256
Perseroan Terbatas	109	1.680.233.350	1,36221%
Reksa Dana	346	2.906.071.211	2,35604
Jumlah Pemodal Nasional	122.929	10.302.297.633	8,35237
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	210	38.661.300	0,03134
Badan Usaha Asing	2.058	43.004.851.067	34,86527
Jumlah Pemodal Asing	2.268	43.043.512.367	34,89661
Total	125.197	53.345.810.000	43,24898

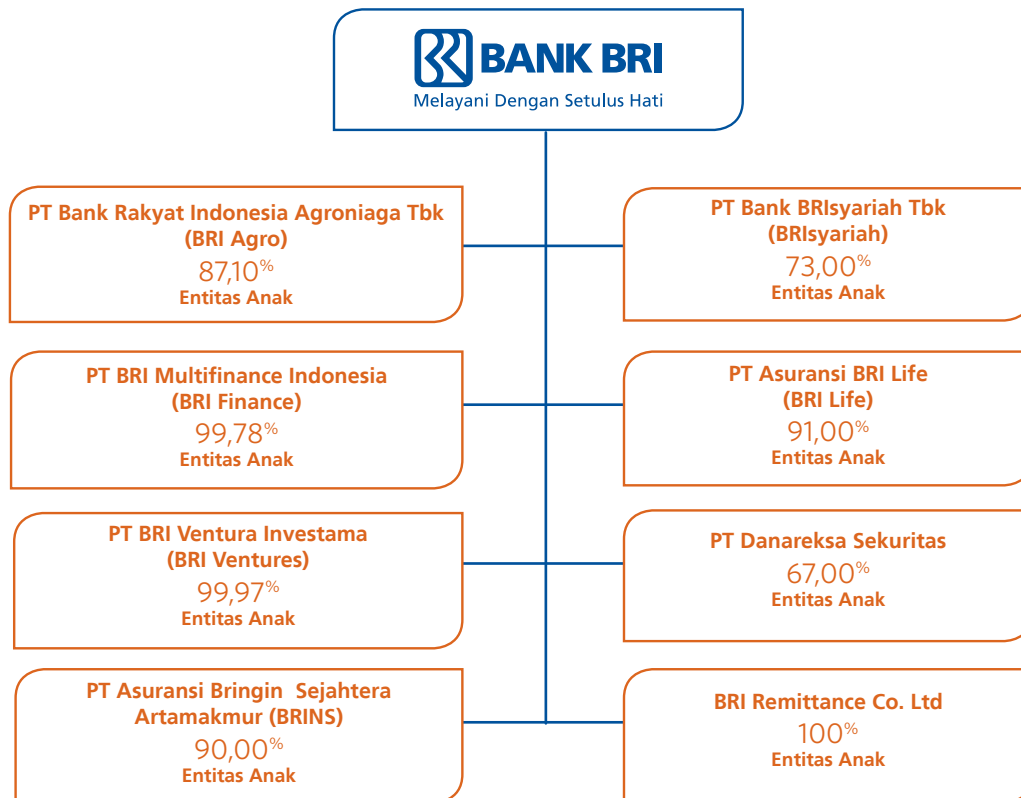
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan %
DEWAN KOMISARIS				
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	0	0,0000000
2	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	386.700	0,0003135
3	Hadiyanto	Komisaris	201.200	0,0001631
4	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	0	0,0000000
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	0	0,0000000
6	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	0	0,0000000
7	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	0	0,0000000
8	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	0	0,0000000
DIREKSI				
9	Sunarso	Direktur Utama	0	0,0000000
10	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	0	0,0000000
11	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	944.400	0,0007657
12	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	46.800	0,0000379
13	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	944.400	0,0007657
14	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	835.200	0,0006771
15	Supari	Direktur Bisnis Mikro	351.100	0,0002846
16	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan dan Layanan	928.200	0,0007525
17	Azizatun Azhimah	Direktur Kepatuhan	25.100	0,0000203
18	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	0	0,0000000
19	Handayani	Direktur Konsumer	522.300	0,0004234
20	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	0	0,0000000
			5.185.400	0,0042038



PROFIL PERUSAHAAN

STRUKTUR PERUSAHAAN



Entitas Asosiasi



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

ENTITAS ANAK

Nama Perusahaan	Jenis Usaha/ Bidang Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Jumlah Aset	Kepemilikan %	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah)	Bank Umum Syariah	19 Desember 2007	Rp 43,165 miliar	73,00%	16 Oktober 2008 Masih Beroperasi	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta 10160
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)	Bank Umum Swasta Nasional	3 Maret 2011	Rp 27,145 miliar	87,10%	27 September 1989 Masih Beroperasi	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	Pembiayaan	7 Desember 1983	Rp 4,606 miliar	99,78%	7 Desember 1983 Masih Beroperasi	Gedung Lippo Kuningan, Lt 11 dan GF, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan Jakarta 12920
PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	Perusahaan Asuransi Jiwa	14 Desember 2015	Rp 11,219 miliar	91,00%	28 Oktober 1987 Masih Beroperasi	Graha Irama Lt.2,5,7,11 & 15, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2, Jakarta 12950, Indonesia
PT Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	21 Desember 2018	Rp 1,082 miliar	67,00%	1 Juli 1992 Masih Beroperasi	Gedung BRI II Lantai 23 Jl Jend Sudirman No 44 – 46 Jakarta 10210
PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)	Perusahaan Modal Ventura	20 Desember 2018	Rp 1,514 miliar	99,97%	22 Januari 1998 Masih Beroperasi	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)	Perusahaan Remittance	16 Desember 2011	Rp 7,07 miliar	100,00%	7 April 2005 Masih Beroperasi	Lippo Centre, Tower II 22nd Floor, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS)	Perusahaan Asuransi Umum	26 September 2019	Rp 2,585 miliar	90,00%	17 April 1989 Masih Beroperasi	Graha BRINS Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790



PROFIL PERUSAHAAN

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

ENTITAS ASOSIASI

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Kepemilikan %	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Modal Ventura	21 November 2017	35,00%	5 Agustus 1992 Masih Beroperasi	Wisma Prima Lantai 5, Jl. Kapten P. Tendean No. 34, Jakarta Selatan 12790
PT Danareksa Investment Management (DIM)	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	20 Desember 2018	35,00%	9 Oktober 1992 Masih Beroperasi	Plaza BP Jamsostek Lt 11 Jl HR. Rasuna Said No 112 Blok B Jakarta 12910
PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (SBPI)	Investasi	1 Juni 1981	8,00%	27 Oktober 1981 Masih Beroperasi	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jl. HR Rasuna Said Kav 62 Kuningan Jakarta Selatan 12920
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Lembaga Penyelesaian Efek	5 Desember 1997	3,00%	11 November 1998 Masih Beroperasi	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Pemeringkat Efek	15 Juni 1995	0,21%	21 Desember 1993 Masih Beroperasi	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Jakarta 12220

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

2003

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO)

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam - sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003). Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjabatan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

2004-2010

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM/MSOP)

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP).

Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa exercise MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam- LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No.Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Saham MSOP yang telah di-exercise sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa exercise, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-exercise yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III.

Dengan berakhirnya exercise MSOP pada tahun 2010 maka komposisi kepemilikan saham pemerintah berubah dari 59,07% di tahun 2004 menjadi 56,75% di tahun 2010.



PROFIL PERUSAHAAN

2011

STOCK SPLIT 1:2

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham (Rasio 1:2).

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp9.300,00 pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp4.800 pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2011

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

2015-2016

STOCK BUY-BACK

BRI melakukan *Stock buy-back* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi peninjauan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Pelaksanaan Buy Back Saham di tahun 2015-2016

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
221.718.000 lembar	Rp 10.910/lembar	Rp9.5/lembar
*sebelum <i>stock split</i> 1:5		

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi, Perseroan mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:

- Undang-undang (UU) RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK (POJK) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan.
- Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan *buyback* ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi *buy back* telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja BRI

2017

STOCK SPLIT 1:5

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5).

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah <i>Stock Split</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000

2019

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM/ESOP)

Berdasarkan Putusan RUPS tanggal tgl 23 Maret 2016 pada Agenda 5 yakni Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasury (treasury stock) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna, serta memperhatikan Surat Kementrian BUMN yang berisi bahwa mendukung implementasi kepemilikan saham bagi Pekerja BRI/Employee Stock Ownership Program (ESOP), BRI pada tahun 2019 telah melaksanakan ESOP dalam bentuk Bonus Saham untuk tahap I. Saham Treasury yang telah dipakai untuk ESOP tahap I tersebut dan telah dilimpahkan kepada masing-masing Pekerja pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019 dalam bentuk Script Saham sebanyak 143.415.500 lembar saham. Pelimpahan saham treasury untuk ESOP dimaksud telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Mei 2019.



PROFIL PERUSAHAAN

Kronologi Pencatatan Saham

TABEL KRONOLOGIS PENERBITAN/PENCATATAN SAHAM 2003-2019

Tahun	Aksi Korporasi	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)
		Pemerintah		Masyarakat				
		Jumlah	%	Jumlah	%			
2003	Penawaran Umum Saham Perdana	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50	500	11.764.705.000	5.882.353
2004	Exercise MSOP 85.385.500	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93	500	11.850.090.500	5.925.045
2005	Exercise MSOP 185.610.000	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84	500	12.035.700.500	6.017.850
2006	Exercise MSOP 250.721.000	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03	500	12.286.421.500	6.143.211
2007	Exercise MSOP 31.379.000	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17	500	12.317.800.500	6.158.900
2008	Exercise MSOP 7.499.000	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21	500	12.325.299.500	6.162.650
2009	Exercise MSOP 4.553.000	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23	500	12.329.852.500	6.164.926
2010	Exercise MSOP 4.728.500	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000	6.167.291
2011	Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2015	Stock Buy-Back sebanyak 221.718.000 lembar saham	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2016		14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291
2017	Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291
2018		70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291
2019	Exercise ESOP 143.415.500	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) untuk BRI

Kronologi Pencatatan Saham

Kronologi Penerbitan Obligasi yang Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013 Obligasi	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	USD 150	120	7.75	B3	Moody's	Memperkuat permodalan
2	Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004 Obligasi	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	Rp500.000	120	13.50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 Obligasi	IDR	22 Des'09	22 Des'14	Rp2.000.000	60	10.95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	USD500	60	2.95	Baa3	Moody's	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25 Jun'15	7 Jul'16	Rp650.000	370 hari	8.40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25 Jun'15	3 Jul '18	Rp925.000	36	9.20	AAA	Pefindo	
7	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19 Jan'16	8 Feb'17	Rp808.000	370 hari	8.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19 Jan'16	4 Feb'19	Rp1.018.500	36	9.25	AAA	Pefindo	
9	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	4 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
10	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	4 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	2 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	2 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 hari	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .



PROFIL PERUSAHAAN

Kronologi Pencatatan Saham

Kronologi Penerbitan Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Harga Penawaran	Tenor (Bulan)	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat	Tujuan Utama Penerbitan
										2019	2018	2017		
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	25 Jul'15	3 Jul'20	Rp1.420.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	9.50	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	19 Jan'16	4 Feb'21	Rp2.823.500	100% dari jumlah pokok obligasi	60	9.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	4 Mei'16	25 Mei'21	Rp701.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.70	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	2 Des'16	1 Des'21	Rp193.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.20	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	2 Dec'16	1 Des'23	Rp477.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	8.65	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	2 Dec'16	1 Des'26	Rp2.350.000	100% dari jumlah pokok obligasi	120	8.90	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	12 Apr'17	11 Apr'20	Rp1.743.500	100% dari jumlah pokok obligasi	36	8.10	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	12 Apr'17	11 Apr'22	Rp925.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.30	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	Rp1.300.500	100% dari jumlah pokok obligasi	120	8.80	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Aug'20	Rp980.500	100% dari jumlah pokok obligasi	36	7.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Agu'17	24 Aug'22	Rp1.652.500	100% dari jumlah pokok obligasi	60	8.00	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Aug'24	Rp2.517.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	8.25	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

Kronologi Penerbitan Obligasi yang Masih Beredar

No	Uraian	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi (juta)	Harga Penawaran	Tenor (Bulan)	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat	Tujuan Utama Penerbitan
										2019	2018	2017		
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	IDR	22 Feb'18	21 Feb'23	Rp1.837.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	6.65	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	IDR	22 Feb'18	21 Feb'25	Rp605.000	100% dari jumlah pokok obligasi	84	6.90	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
15	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	IDR	27 Jun'18	26 Jun'23	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	60	7.70	Belum Jatuh Tempo	AA oleh Pefindo	AA oleh Pefindo	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK <i>Recovery Plan</i> dan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) dan selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan peningkatan aset produktif.
16	Senior Unsecured Notes Due 2023	USD	16 Jul'18	20 Jul'23	USD500	99,696% dari jumlah pokok Obligasi.	60	4.63	Belum Jatuh Tempo	Baa2 oleh Moody's BBB- oleh Fitch Rating	Baa2 oleh Moody's BBB- oleh Fitch Rating	-	Bank of New York Mellon, London Branch	Memperkuat Struktur Pendanaan Umum
17	Sustainable Bond (Senior Unsecured Notes) Due 2024	USD	28 Mar'19	28 Mar'24	USD500	99,713% dari jumlah pokok obligasi	60	3.95	Belum Jatuh Tempo	Baa2 oleh Moody's BBB- oleh Fitch Rating	-	-	Bank of New York Mellon, London Branch	Mendanai <i>Eligible Project</i> sesuai <i>Sustainability Framework</i>
18	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	IDR	7 Nov'19	17 Nov'20	Rp737.850	100% dari jumlah pokok obligasi	370 hari	6.50	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
19	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	IDR	7 Nov'19	7 Nov'20	Rp2.089.350	100% dari jumlah pokok obligasi	36	7.60	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
20	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	IDR	7 Nov'19	7 Nov'24	Rp2.172.800	100% dari jumlah pokok obligasi	60	7.85	Belum Jatuh Tempo	AAA oleh Pefindo	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	



PROFIL PERUSAHAAN

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Kronologi Penerbitan Medium Term Note (MTN) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10/10/2014	370 hari	IDR	300.000	15/10/2015	8,75	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10/10/2014	24	IDR	60.000	10/10/2016	9,25	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10/10/2014	36	IDR	360.000	10/10/2017	9,5	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24/12/2014	12	IDR	520.000	24/12/2015	8,9	Sudah Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16/9/2016	370 hari	IDR	1.925.000	21/9/2017	7,4	Sudah Lunas

Kronologi Penerbitan Negotiable Certificate Deposit (NCD) yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
NCD BRI Tahun 2014 Seri A	2/12/2014	3	IDR	165.000	2/3/2015	8,00	Sudah Lunas
NCD BRI Tahun 2014 Seri B	2/12/2014	6	IDR	790.000	2/6/2015	8,60	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	22/4/2015	3	IDR	595.000	22/7/2015	7,10	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	22/4/2015	6	IDR	1.020.000	22/10/2015	8,00	Sudah Lunas
NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	22/4/2015	9	IDR	265.000	22/1/2016	8,10	Sudah Lunas

BOND BUY BACK

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan belum pernah melaksanakan pembelian kembali obligasi.

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	150.000.000	120	7,75	B3	Moody's	Memperkuat permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	500.000.000.000	120	13,50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22 Des'09	22 Des'14	2.000.000.000.000	60	10,95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	500.000.000	60	2,95	Baa3	Moody's	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	IDR	10 Okt'14	15 Okt'15	300.000.000.000	370 hari	8,75	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	IDR	10 Okt'14	10 Okt'16	60.000.000.000	24	9,25	AAA	Fitch Indonesia	
7	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	IDR	10 Okt'14	10 Okt'17	360.000.000.000	36	9,50	AAA	Fitch Indonesia	
8	NCD BRI Tahun 2014 Seri A	IDR	2 Des'14	2 Mar'15	165.000.000.000	3	8,00	Tidak ada Rating NCD	-	Ekspansi bisnis melalui Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
9	NCD BRI Tahun 2014 Seri B	IDR	2 Des'14	2 Jun'15	790.000.000.000	6	8,60	Tidak ada Rating NCD	-	
10	MTN BRI Tahap II Tahun 2014	IDR	24 Des'14	24 Des'15	520.000.000.000	370 hari	8,90	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>Prudential Banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
11	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	22 Apr'15	22 Jul'15	595.000.000.000	3	7,10	Tidak ada Rating NCD	-	Ekspansi bisnis melalui Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
12	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	22 Apr'15	22 Okt'15	1.020.000.000.000	6	8,00	Tidak ada Rating NCD	-	
13	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	22 Apr'15	22 Jan'16	265.000.000.000	9	8,10	Tidak ada Rating NCD	-	



PROFIL PERUSAHAAN

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
14	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25 Jun'15	7 Jul'16	650.000.000.000	370 hari	8,40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25 Jun'15	3 Jul '18	925.000.000.000	36	9,20	AAA	Pefindo	
16	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19 Jan'16	8 Feb'17	808.000.000.000	370 hari	8,50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
17	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19 Jan'16	4 Feb'19	1.018.500.000.000	36	9,25	AAA	Pefindo	
18	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	4 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7,50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
19	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	4 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8,20	AAA	Pefindo	
20	MTN Bank BRI Tahap I Tahun 2016	IDR	16 Sept'16	21 Sept'17	1.925.000.000.000	370 hari	7,40	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
21	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	2 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7,25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
22	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	2 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8,00	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
23	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 hari	7,20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	25 Jul'15	3 Jul'20	1.420.000.000.000	60	9,50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	19 Jan'16	4 Feb'21	2.823.500.000.000	60	9,60	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	4 Mei'16	25 Mei'21	701.000.000.000	60	8,70	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	2 Des'16	1 Des'21	193.000.000.000	60	8,20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	2 Dec'16	1 Des'23	477.000.000.000	84	8,65	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	2 Dec'16	1 Des'26	2.350.000.000.000	120	8,90	AAA	Pefindo	
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	12 Apr'17	11 Apr'20	1.743.500.000.000	36	8,10	AAA	Pefindo	
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	12 Apr'17	11 Apr'22	925.000.000.000	60	8,30	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	1.300.500.000.000	120	8,80	AAA	Pefindo	
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Aug'20	980.500.000.000	36	7,60	AAA	Pefindo	
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Agu'17	24 Aug'22	1.652.500.000.000	60	8,00	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Aug'24	2.517.000.000.000	84	8,25	AAA	Pefindo	



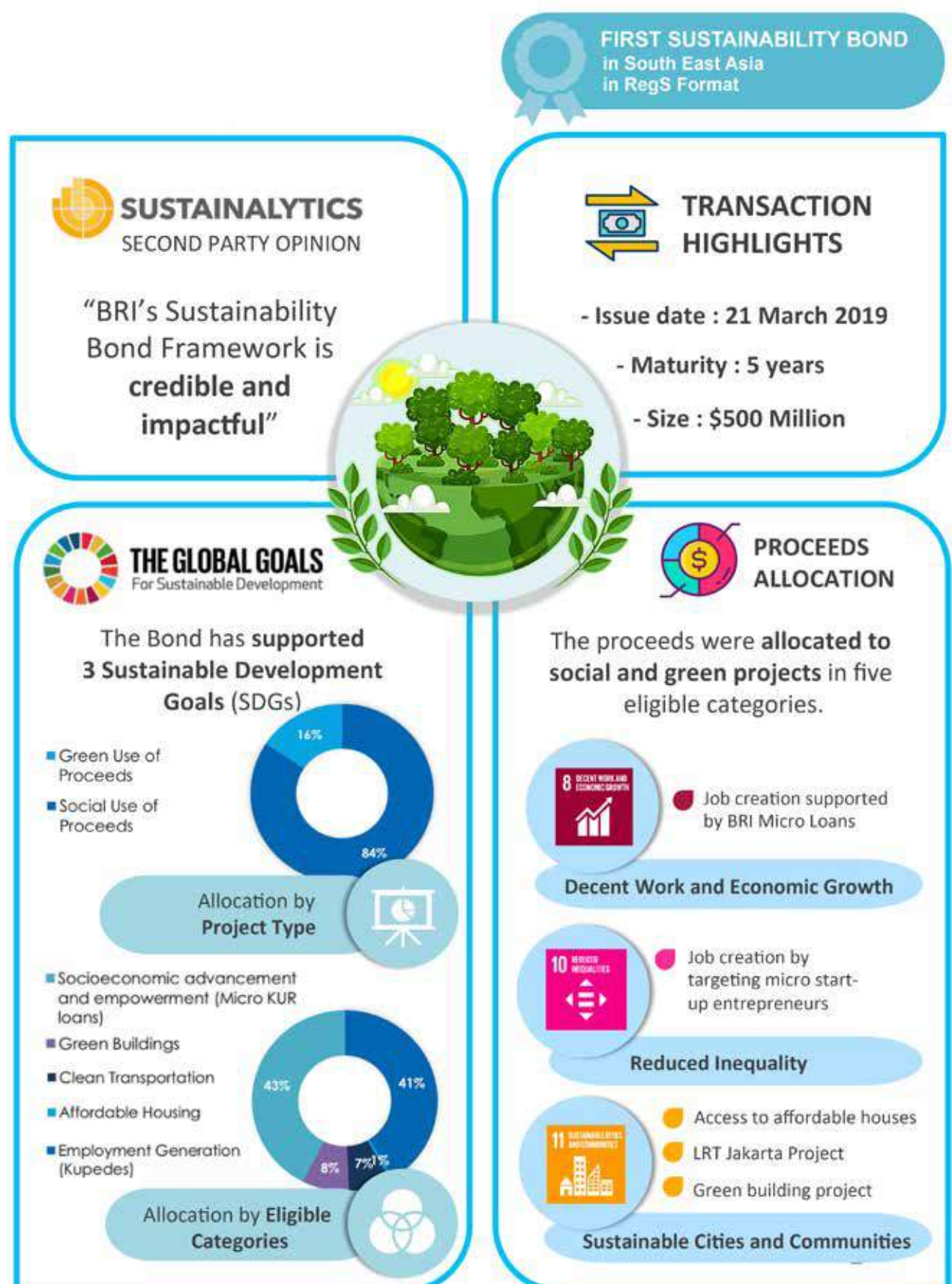
PROFIL PERUSAHAAN

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	IDR	22 Feb'18	21 Feb'23	1.837.000.000.000	60	6,65	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	IDR	22 Feb'18	21 Feb'25	605.000.000.000	84	6,90	AAA	Pefindo	
15	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	IDR	27 Jun'18	26 Jun'23	500.000.000.000	60	7,70	AAA	Pefindo	Memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK <i>Recovery Plan</i> dan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dan selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan peningkatan aset produktif.
16	Senior Unsecured Notes Due 2023	USD	16 Jul'18	20 Jul'23	500.000.000	60	4,63	Baa2	Pefindo	Memperkuat Struktur Pendanaan Umum
17	Senior Unsecured Notes Due 2024	USD	28 Mar'18	28 Mar'24	500.000.000	60	3,95	Baa2	Moodys Fitch	Mendanai <i>Eligible Project</i> sesuai <i>Sustainability Framework</i>
18	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	IDR	7 Nov'19	17 Nov'20	737.850.000.000	370 hari	6,50	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
19	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	IDR	7 Nov'19	7 Nov'20	2.089.350.000.000	36	7,60	AAA	Pefindo	
20	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	IDR	7 Nov'19	7 Nov'24	2.172.800.000.000	60	7,85	AAA	Pefindo	

BRI SUSTAINABILITY BOND 2019





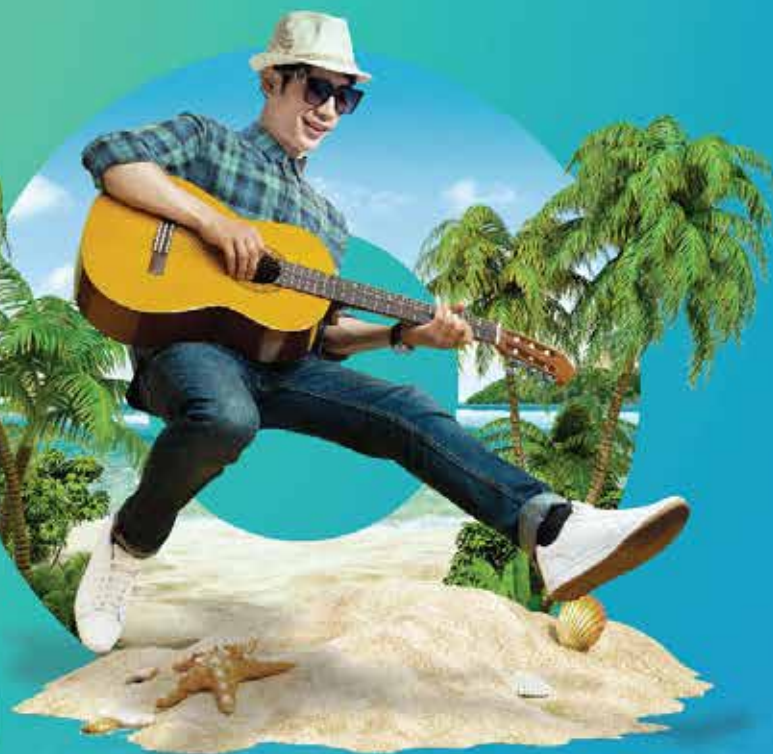
PROFIL PERUSAHAAN

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

Nama & Alamat	Jasa	Biaya (Rp)	Periode Penugasan
PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (62-21) 5150515 Fax. (62-21) 5150330 E-mail: callcenter@idx.co.id	Intitusi Pasar Modal ▶ Penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana perdagangan efek ▶ Penyedia sarana penyebarluasan informasi ▶ Pengawasan transaksi perdangan yang wajar	Rp150.000.000	Jan 2019 s/d Des 2019
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5299 1003 Fax. (62-21) 5299 1129 Website:www.ksei.co.id	Kustodian ▶ Jasa penyimpanan efek dalam bentuk elektronik ▶ Jasa penyelesaian transaksi efek ▶ Jasa administrasi efek ▶ Jasa distribusi hasil corporate action	0	2019
PT Datindo Entrycom Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Tel. (62-21) 570 9009	Biro Administrasi Efek ▶ Jasa Administrasi Efek ▶ Jasa Penyelenggaraan RUPS ▶ Jasa Pembayaran Dividen	Rp1.195.656.000	2 (Dua) bulan setelah bukti pemotongan pajak atas Deviden disetujui oleh BRI
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Kav. 19 Jakarta	Lembaga Rating Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019	Rp165.000.000	2019
PT Fitch Rating Indonesia Prudential Tower Lantai 20 Jl. Jend Sudirman Kav. 79 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5795 7755 Fax. (62-21) 5795 7750	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp761.995.000	2019
Moody's Singapore Pte. Ltd. 50th Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp1.919.718.000	2019
Standard & Poors 30 Cecil Street #17-01/08 Prudential Tower Singapore 049712 Tel. (65) 6438 2881 Fax. (65) 6438 2321	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp973.770.000	2019
Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5289 5000 Fax. (62-21) 5289 4100	Kantor Akuntan Publik ▶ Jasa Audit Laporan Keuangan ▶ Jasa Review Audit Terbatas	Rp2.200.000.000	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan proses penerbitan final comfort letter dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 selesai.

m

Wow Banget Buka Rekening dari Hape



Dapetin kemudahan buka rekening dengan aplikasi BRI mo dari BANK BRI. Gak perlu ribet untuk bisa punya rekening tambahan, tapi cukup dengan hapemu.

#Loginkeseruanmu

Download Sekarang



atau
Scan QR



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan peserta penjaminan LPS 

CONTACT **BRI 14017 / 1500017** | www.bri.co.id |  **BANK BRI** |  **@promo_BRI**



PROFIL PERUSAHAAN

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan Nasional

1 Top Digital PR Award 2019 Trans Co. Info Brand 25 Januari 2019 Info Brand	6 Top Brand Award Kartu Kredit (Produk KK BRI Peringkat -4) 14 Februari 2019 Top Brands
2 Top Brand Award Kategori Saving Account (Produk Britama - Peringkat ke 2) 14 Februari 2019 Top Brands	7 Top Brand Award Kartu Prepaid (Produk Brizzi Peringkat ke-4) 14 Februari 2019 Top Brands
3 Top Brand Award Kategori Tabungan Berjangka (Produk BRI Simpedes Impian Peringkat ke 2) 14 Februari 2019 Top Brands	8 Top Brand Award Deposito (Produk Deposito BRI Peringkat ke -2) 14 Februari 2019 Top Brands
4 Top Brand Award Tabungan Junior (Produk BRI Junio - Peringkat ke 1) 14 Februari 2019 Top Brands	9 Top Brand Award KPR (Produk KPR BRI Peringkat ke -5) 14 Februari 2019 Top Brands
5 Top Brand Award Tabungan Berjangka (Produk Britama Rencana - Peringkat ke 1) 14 Februari 2019 Top Brands	10 Top Brand Award Mobile Banking (Produk BRI Mobile Peringkat ke -2) 14 Februari 2019 Top Brands



1



13



14



20



24



Penghargaan dan Sertifikasi

11 Top Brand Award Internet Banking (Produk Internet Banking BRI Peringkat ke -3) 14 Februari 2019 Top Brands 12 Top Brand Award Call Center (Produk Call Center BRI Peringkat ke-4) 14 Februari 2019 Top Brands 13 Awards Obsession Media Group (Best CEO) 6 Maret 2019 Obsession Media Group 14 Awards Obsession Media Group (Best State Owned Enterprise Bank) 6 Maret 2019 Obsession Media Group 15 Wow Brand Award Saving Account (Produk Britama -Silver) 14 Maret 2019 Wow Brands 16 Wow Brand Kartu Kredit (Produk Kartu Kredit -Gold) 14 Maret 2019 Wow Brands	17 Wow Brand Electronic Money (Produk BRIZZI -Bronze) 14 Maret 2019 Wow Brands 18 Wow Brand ATM Network (Produk ATM -Silver) 14 Maret 2019 Wow Brands 19 Wow Brand Call Centre (Produk Call Center BRI -Silver) 14 Maret 2019 Wow Brands 20 The Asian Banker 2019 Dubai Best Retail Bank In Indonesia 22 Maret 2019 The Asian Banker 21 The Asian Banker 2019 Dubai Best Digital In Indonesia 22 Maret 2019 The Asian Banker 22 Best Social Media 28 Maret 2019 PR Indonesia Award 23 Majalah Internal Terbaik 28 Maret 2019 PR Indonesia Award





PROFIL PERUSAHAAN

Penghargaan dan Sertifikasi

24 Website Of The Year 2018 27 April 2019 Indonesia Website Award 25 Website Of The Month 27 April 2019 Indonesia Website Award 26 BUMN Marketeers Awards The Most Promising Company In Marketing 3.0 (Awards Bank BRI -Gold) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 27 BUMN Marketeers Awards The Most Promising Company In Entrepreneurial SOES (Awards Bank BRI -Silver) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 28 BUMN Marketeers Awards The Most Promising Company In Branding Campaign (Awards Bank BRI -Gold) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 29 BUMN Marketeers Awards The Most Promising Company In Tactical Marketing (Awards Bank BRI -Gold) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 30 BUMN Marketeers Awards The Most Promising Company In Strategic Marketing (Awards Direktur Konsumer Bank BRI -Handayani) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards	31 BUMN Marketeers Awards Best Of The Best (Awards Bank BRI) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 32 BUMN Marketeers Awards CMO Of The Year (Awards Direktur Konsumer Bank BRI -Handayani) 24 April 2019 BUMN Marketeers Awards 33 Emiten Terbaik Perbankan 16 Mei 2019 Majalah Investor 34 Leadership Achievement Award 2019 29 Mei 2019 The Asian Banker 35 Best Managed Bank 29 Mei 2019 The Asian Banker 36 Banking Service Excellence Awards 2019: Kategori Internet Banking 27 Juni 2019 Infobank 37 Kredit Bank UMKM Terbaik 28 Juni 2019 Berita Satu



38

39

40

41

42

44

Penghargaan dan Sertifikasi

38 Bank Buku 4 Terbaik 28 Juni 2019 Berita Satu 39 Best CEO 28 Juni 2019 Asian Excellence Awards 40 Best CFO 28 Juni 2019 Asian Excellence Awards 41 Best Investor Relations Company 28 Juni 2019 Asian Excellence Awards 42 Bisnis Indonesia Award 2019: CEO of the Year 2019 12 Juli 2019 Bisnis Indonesia 43 CSA Award 2019: Emiten Kinerja Terbaik 18 Juli 2019 CSA Award 44 Perusahaan Perbankan Inovatif melalui Transformasi BRInovasi dan BRInvolution 26 Juli 2019 Warta Ekonomi	45 The Best Of The Best Risk Management 2019 3 Agustus 2019 Economic Review 46 Empowering BOC And Its Committees To Ensure GCG Implementation 8 Agustus 2019 ICD (Indonesian Corporate Directorship) 47 IDX Channel Award: The Best Chief Executive Officer (CEO) 14 Agustus 2019 IDXChannel 48 IDX Channel Award: The Best Innovative Company in Finance Sector 14 Agustus 2019 IDXChannel 49 IDX Channel Award: The Best Millenials Investor Choice 14 Agustus 2019 IDXChannel 50 IDX Channel Award: The Best Innovation 14 Agustus 2019 IDXChannel 51 Mortgage Product of The Year 22 Agustus 2019 The Asian Banker





PROFIL PERUSAHAAN

Penghargaan dan Sertifikasi

52 BrandZ Top 50 The Most Valuable Indonesian Brands 2019: Peringkat Ke-2 23 Agustus 2019 BrandZ 53 The Best CSR In Asia Money Awards 26 Agustus 2019 Asia Money 54 Top Bank Buku IV 2019 28 Agustus 2019 Top Business - Asia Business Research Center 55 Top Bank Bidang Pertumbuhan Kredit 28 Agustus 2019 Top Business - Asia Business Research Center 56 Top Kredit Mikro UMKM 2019 28 Agustus 2019 Top Business - Asia Business Research Center 57 Top SMS Banking 2019 28 Agustus 2019 Top Business - Asia Business Research Center 58 Best Innovative Bank 29 Agustus 2019 Infobank 59 Best Transaction Growth As Acquirer 29 Agustus 2019 Infobank	60 Top 20 Companies With Highest Market Capitalization (IBIA) 29 Agustus 2019 Pikiran Rakyat 61 The Best Issuers 2019 In Finance Sector (Asset Above 800T) 29 Agustus 2019 Pikiran Rakyat 62 The Most Successful Microbanking 29 Agustus 2019 Infobank 63 The Biggest TAX Payer Bank 29 Agustus 2019 Infobank 64 Kinerja Keuangan Selama 2018 29 Agustus 2019 Infobank 65 Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2004-2018 29 Agustus 2019 Infobank 66 Planet Tourism Indonesian Award 2019 : Kategori Kartu Kredit 5 September 19 MarkPlus Center for Tourism and Hospitality (MPTCH), MarkPuls, Inc



53



60



57



63



64



Penghargaan dan Sertifikasi

67 Indonesia Go Champion: Kategori Financial Service 5 September 19 ASEAN Marketing Summit 2019 68 Best Operating Model Master dengan produk Agen BRllink 13 September 2019 IDC (International Data Corporation) 69 Anugerah Kolaborasi Kompas Gramedia: Kontan BeRI untuk negeri 14 September 19 Kompas Gramedia 70 Anugrah Kolaborasi Kompas Gramedia : Jelajah Terumbu Karang 14 September 19 Kompas Gramedia 71 Pemberdayaan Ekonomi Komunitas CSR Award 2019 18 September 19 The LA Tofi School of CSR 72 Peningkatan Mutu Pendidikan CSR Award 2019 18 September 19 The LA Tofi School of CSR	73 Pemberdayaan Penyandang Disabilitas CSR Award 2019 18 September 19 The LA Tofi School of CSR 74 Pengembangan Desa Wisata CSR Award 2019 18 September 19 The LA Tofi School of CSR 75 Peningkatan Mutu Kesehatan CSR Award 2019 18 September 19 The LA Tofi School of CSR 76 The Best Performance Bank Buku IV 20 September 19 Bisnis Indonesia 77 Stability + Profitability 20 September 19 Bisnis Indonesia 78 Indonesia Best Corporate Social Initiative Award 2019 : The Best Of Creating Shared Value 21 September 19 Mix Marketing & Communication 79 Excellence in brand building among indonesia millennials in 2019 26 September 19 Iconomics





PROFIL PERUSAHAAN

Penghargaan dan Sertifikasi

80 Indonesia Best Corporate Social Initiative Awards 2019 4 Oktober 2019 MIX 81 Program RKB Daerah 3T Terbaik Tahun 2018 7 Oktober 2019 Kementerian BUMN 82 Bank Terbaik Dalam Mendukung Program Pemerintah Melalui Simpel 19 Oktober 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 83 Best of The Best Company 30 Oktober 2019 Forbes Indonesia 84 Fundamental Jangka Panjang Perusahaan Market Cap dan Net Income 30 Oktober 2019 Forbes Indonesia 85 Pemenang Bidikmisi (Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi) 30 Oktober 2019 Bidikmisi Awards 2019 86 Social Economy Contribution : Gold 05 November 19 RRI Financial Award 2019	87 Juara 3 Kategori BUMN Keuangan Listed 16 November 19 ARA Award 88 Flight Executive Best Net 17 November 19 PGY TOUR 89 Penghargaan Mitra Dukcapil 25 November 19 Dukcapil Go Digital 90 Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik Transaksi Repurchase Sesuai GMRA 28 November 19 Bank Indonesia 91 Bank Pendukung UMKM Terbaik Bank Buku 3 dan 4 28 November 19 Bank Indonesia



Penghargaan dan Sertifikasi

92 Best In Country Indonesia 3 Desember IR Magazine Awards-South East Asia 93 The Best Public Company Financial Sector 4 Desember 2019 CNBC Indonesia Award 2019 94 Indonesia Humane Entrepreneurship Award 2019 5 Desember 2019 Asia Council for Small Business (ACSB) dan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia 95 Indonesian Most Trusted Company 11 Desember 2019 Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 96 The Bank in Digital Services 27 Desember 2019 Tempo Group 97 The Best Financial Performance Bank kategori Bank Konvensional 27 Desember 2019 Tempo Group	98 BUMN Terbaik 2019 Bidang Keuangan Sektor Perbankan 12 Desember 2019 Majalah Investor 99 The Best Performing Bank 2019 : Core Capital Up To Rp. 30 Trillion Buku 4 11 Desember 2019 The Finance 100 The Best CFO In Financial Institutions 2019 : Bank Buku 4 11 Desember 2019 The Finance





PROFIL PERUSAHAAN

SERTIFIKASI

ISO 9001:2015

Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan ruang lingkup "Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control, and Corporate Financial & Tax Compliance" dari Lembaga Sertifikasi PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi AMK selalu melakukan peningkatan kualitas penyusunan dan pengawasan Kebijakan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder BRI dalam rangka menjamin kewajaran Laporan Keuangan.

Divisi Asset & Liabilities Management berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 6 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2021 dengan ruang lingkup Preparation of Data for Financial Statement dan Provision of External Report (Laporan Bulanan Bank Umum). Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas dalam penyiapan data untuk laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BRI dapat semakin baik.

Divisi Sentra Operasi BRI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan 8 (delapan) ruang lingkup meliputi: "Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, Payment System Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and e-Banking Settlement, Cash and Trade Finance" dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 13 Januari 2018 Sampai dengan 9 Desember 2020 terkait dengan "Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

BRI Corporate University berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register yang berlaku sejak 25 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2019. Adapun sertifikasi ini mengakui management System Standard BRI Corporate University dalam hal "Provision of Banking Training Services". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI Corporate University selalu melakukan peningkatan kualitas operasional pendidikan dan mengutamakan kepuasan peserta didik.

Divisi Bisnis Internasional berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 Dengan sertifikasi ini management System Standard Divisi Bisnis Internasional diakui dalam hal "Provision of Trade Processing Centre Service Including Supporting Function of Policy and Development & Monitoring Trade Finance". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas operasional sehingga menjadi perantara perdagangan yang terpercaya.

Divisi Operasional Human Capital BRI telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 19 September 2018 sampai dengan 9 November 2021. Hal ini menunjukkan bukti komitmen BRI dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada Pekerja. Sertifikat ISO ini diberikan untuk sistem manajemen mutu di bidang pengelolaan data, komunikasi, dan pembayaran kompensasi dan benefit Human Capital dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat.

Divisi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan Properti telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 26 November 2018 sampai dengan 25 November 2021 terkait dengan "Provision of Establishment Strategy and Policy of AT Management Division & Property Procurement Including Vendor Management". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

Sertifikasi

Desk Estimasi telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 29 November 2018 sampai dengan 28 November 2021 terkait dengan "Provision of Cost Estimation Processes". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

Divisi Marketing Communication telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 23 Oktober 2019 sampai dengan 22 Oktober 2022, dengan ruang lingkup pekerjaan "Marketing Plan & Database Analysis". Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi Marketing Communication selalu melakukan peningkatan kualitas komunikasi yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan Bisnis Bank BRI.

Satuan Kerja Audit Intern telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 20 Mei 2018 sampai dengan 4 Desember 2020. Sertifikasi tersebut diberikan kepada seluruh unit

kerja SKAI termasuk Divisi Pengembangan Standar Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan 19 Audit Intern Wilayah BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI menjadi strategic business partner yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi benchmark of best practice bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

ISO 27001:2013

Divisi Digital Center of Excellence juga telah memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 yang berlaku sejak 14 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2021 dari Lembaga BSI dengan ruang lingkup *the management of information security in provision of big data dan analytics*. Hal tersebut menunjukkan keseriusan BRI untuk mengembangkan teknologi big data yang akan mendukung strategi pengembangan bisnis BRI ke depan.



PROFIL PERUSAHAAN

PERINGKAT BRI

FITCH

Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	bbb-
National Long-Term Rating	AA+ (idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-

Standard and Poor's

Outlook	Stable
Issuer Credit Rating	BBB-
Stand-Alone Credit Profile (SACP)	bbb-

PEFINDO

National Rating	id AAA, Stable Outlook

MOODY'S

Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa2/P-2
Baseline Credit Assessment	baa2
Adjusted Baseline Credit Assessment	baa2
Counterparty Risk Assessment	Baa1 (cr)/P-2(cr)

JAPAN CREDIT RATING AGENCY, Ltd

Long Term Foreign Currency	BBB
Outlook	Stable
Long Term Local Currency	BBB+
Outlook	Stable

ALAMAT KANTOR DAN/ATAU KANTOR PERWAKILAN

[posisi Desember 2019]

ALAMAT JARINGAN KANTOR

KANTOR PUSAT

Gedung BRI I dan II,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Tel. : (021) 2510244, 2510254, 2510264
Fax. : (021) 2500065, 2500077

KANTOR WILAYAH

Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No. 17
Banda Aceh
Tel. : (0651) 22822
Fax. : (0651) 23487, 22352

Bandar Lampung

Jl. Raden Intan No.51 Tanjung Karang, Bandar
Lampung 35118
Tel. : (0721) 259340
Fax. : (0721) 259397

Bandung

Gedung Menara BRI Lt.4, Jl. Asia Afrika 57 - 59,
Bandung
Tel. : (022) 4200363, 4207977
Fax. : (022) 4236710

Banjarmasin

Jalan Jend A. Yani KM 3,5 No 151 Banjarmasin
Tel. : (0511) 3252056, 3257057, 3251647, 3251649
Fax. : (0511) 3252992, 32521649

Denpasar

Jalan Hayam Wuruk No 123, Denpasar
Tel. : (0361) 228715
Fax. : (0361) 225402

Jakarta 1

I. Veteran No.8, Jakarta Pusat
Tel. : (021) 3840802
Fax. : (021) 3453685

Jakarta 2

Jl. Gatot Subroto Kav.9-11
Gedung Mulia Lt.2 No. 72,
Jakarta Selatan 13330
Tel. : (021) 52920581, 52920585
Fax. : (021) 52920586, 52920587

Jakarta 3

Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav CBD II No.I, Kel.
Lengkong Gudang, Kec.Serpong
Tel. : (021) 29703751 ex 52
Fax. : (021) 7255732

Jayapura

Gedung BRI
Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II, Kel.
Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,
Papua 99112
Tel. : (0967) 524652, 524453
Fax. : (0967) 524862, 537191

Makassar

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 4, Kel.Karuwisi Utara, Kec.
Panakukkang, Kota Makassar
Tel. : (0411) 312498, 323507
Fax. : (0411) 312731

Malang

Jl. Laksmana Martadinata 80 Lt. 4, Malang
Tel. : (0341) 555422, 555425, 555620, 555423,
555420
Fax. : (0341) 555421

Manado

Jl. Sarapung No.4-6, Manado
Tel. : (0431) 863592, 863378
Fax. : (0431) 862779, 866966

Medan

Jalan Putri Hijau No 2A, Medan
Tel. : (061) 45256666, 4528323
Fax. : (061) 4536082

Padang

Jl Bagindo Azis Chan No. 30 Padang
Tel. : (0751) 7052111, 7052528 / (Sementara) (0751)
71045, 778910 892311, 892312
Fax. : (0751) 7054995 / (0751) 72653

Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.15, Palembang
Tel. : (0711) 310173, 310178
Fax. : (0711) 312343



PROFIL PERUSAHAAN

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No. 11-11A
Rt. 01/RW 01 Simpang Tiga, Pekanbaru
Tel. : (0761) 8011100 , 8011110
Fax. : (0761) 7865019

Semarang

Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang
Tel. : (024) 8311110
Fax. : (024) 8318436

Surabaya

Jalan Jend Basuki Rahmat No 122-138 Gedung BRI
Tower Lt 20, Surabaya
Tel. : (031) 5324230

Yogyakarta

Jl. Cik Di Tiro No.3 Terban, Gondokusuman, Kota
Yogyakarta
Tel. : (0274) 510850,520268
Fax. : (0274) 514166, 584883

KANTOR CABANG KHUSUS

Gedung BRI II
Jl. Jend. Sudirman Kav. No
Tel. : (021) 5709060
Fax. : (021) 5713181

KANTOR CABANG LUAR NEGERI

New York Agency

140 Broadway 36th Floor
New York, NY 10005
Tel. : +1 212 3793840
Fax. : +1 212 3793850

Hong Kong Representative

Room 221, 22/F Lippo Center Tower 2
89 Queensway, Hong Kong
Tel. : (852) 98815293
Fax. : (852) 28623693

Singapore Branch

50 Collyer Quay, #08-06,
Oue Bayfront, Singapore 049321
Tel. : +65 68050680

Cayman Island

Cayman Island Branch
190 Elgin Avenue Grand Cayman,
KY1-9005, Cayman Island
Tel. : +1 212 3793840

BRI Timor-Leste Branch

Grand Diocese Colmera Complex,
Rua Nicolau Dos Reis Lobato
Colmera Dili, Timor Leste
Tel. : +6703311372

- a. BRI Audian Sub-Branch Timor Leste
Rua 12 De Novembro No. 12 St. Cruz Municipi Dili,
Timor Leste
Tel. : +670 3311208
- b. BRI Fatuhada Sub-Branch
Times Square Complex, Rua Nicolau Doc Reis
Lobato Fatuhada Dili, Timor Leste
Tel. : +670 3310436
- c. BRI Hudilaran Sub-Branch
Top One Complex, Rua Hudilaran Bairopite Dili,
Timor Leste
Tel. : +670 3311208

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

[posisi Desember 2019]

Jumlah Unit Kerja Dibawah binaan Kantor Wilayah, KCK & UKLN

Kantor Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	BRI Unit	Teras BRI	Teras BRI Keliling	Teras BRI Kapal
Banda Aceh	11	15	9	141	35	1	-
Bandar Lampung	14	16	13	188	59	-	-
Bandung	30	45	60	608	231	26	-
Banjarmasin	31	31	22	290	122	7	-
Denpasar	31	27	19	298	158	4	1
Jakarta 1	25	54	68	96	69	-	-
Jakarta 2	31	69	67	191	77	-	-
Jakarta 3	36	55	42	260	106	-	1
Jayapura	13	13	11	86	36	1	-
Makassar	36	28	22	348	130	-	-
Malang	24	36	20	528	205	5	-
Manado	18	17	15	205	52	43	1
Medan	24	34	27	270	104	15	-
Padang	14	8	11	157	54	-	-
Palembang	21	29	13	234	92	-	-
Pekanbaru	22	20	19	171	100	1	-
Semarang	22	38	44	421	142	-	-
Surabaya	25	39	24	290	125	8	-
Yogyakarta	33	34	58	600	152	1	-
Kantor Cabang Khusus	1	-	4	-	-	-	-
Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)	5	3	-	-	-	-	-
TOTAL	467	611	568	5.382	2.049	133	3



PROFIL PERUSAHAAN

PERUSAHAAN ANAK

PT Bank BRISyariah (BRI Syariah)

Jl. Abdul Muis No. 2-4,
Jakarta 10160
Tel. : (021) 3450226, 3450227
Fax. : (021) 3518812, 3441904

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Gedung BRI Agro
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta 12740
Tel. : (021) 79199980, 80667600
Fax. : (021) 79199950

BRI Remittance Company Ltd Hongkong (BRI Remittance)

Lippo Centre
Tower II 22nd Floor
89 Queensway, Admiralty
Hong Kong
Tel. : +852 25271318
Fax. : +852 28613693

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Kantor Pusat BRI Life
Gedung Graha Irama
Lt. 2, 5, 7, 11 & 15,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta
12950
Tel. : (021) 5261260, 5261261
Fax. : (021) 5261258, 5261472

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Gedung Lippo Kuningan
Lt. 11 dan GF
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan
Jakarta Selatan, 12920
Tel. : (021) 5745333
Fax. : (021) 5745444

PT Danareksa Sekuritas (DS)

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel. : (021) 50914100

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

District 8 Office, Prosperity Tower
Lt. 16 Unit F, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Senayan
Kebayoran Baru, Jakarta 12190

PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS)

Graha BRINS
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 18
Jakarta Selatan 12790
Call center : (021) 1500699
Tel. : (021) 791 70477, 791 70478
Fax. : (021) 791 97432

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan terbuka, Bank BRI memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh *stakeholder* melalui situs web resmi Bank BRI dengan alamat www.bri.co.id yang berdasar pada peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. POJK tersebut mewajibkan web perusahaan emiten untuk mencantumkan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi, secara garis besar, website BRI berisi:

- Situs Perusahaan;
- Karir;
- Hubungan Investor;
- Perusahaan Anak;
- GCG; dan
- CSR BRI.

Informasi pada situs perusahaan terdiri dari:

- Informasi umum tentang BRI yang terdiri dari: Sejarah BRI, Visi dan Misi, Informasi Umum Emiten, Manajemen, dan Informasi Bagi Investor.
- Informasi tentang produk Simpanan, yang terdiri dari: Tabungan, Deposito dan Giro BRI.
- Informasi tentang produk Pinjaman, yang terdiri dari: Pinjaman Mikro, Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah, serta BRI Guna.
- Informasi tentang produk Internasional, yang terdiri dari: BRI *Trade Finance & Services*, BRI *Fast Remittance*, *Financial Institution*, BRI *Money Changer*, Unit Kerja Luar Negeri.
- Informasi tentang Jasa Bank, yang terdiri dari: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Kelembagaan, *E-Banking*, dan *Treasury*.
- Informasi tentang Produk Konsumer, yang terdiri dari: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Kendaraan Bermotor.

- Informasi tentang Investasi Perbankan, yang terdiri dari: DPLK, ORI & SR, Jasa Wali Amanat, Jasa Kustodian.
- Informasi tentang Layanan Prioritas, yang terdiri dari: Produk Layanan & Privileges, Reksadana, Kartu BRI Prioritas, Outlet, Kriteria Nasabah.
- Informasi tentang Info Lelang, yang terdiri dari: Lelang Aset, Lelang Pengadaan
- Informasi tentang GCG, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar, Struktur dan Kebijakan GCG, Kode Etik, Asean *Corporate Governance Scorecard*, Komite Audit termasuk Piagam Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, *Whistleblowing System*, dan Hak-hak Pemegang Saham.
- Pada bagian Karir, BRI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi karyawan melalui menu *e-recruitment* BRI.
- Sementara bagian Hubungan Investor menjelaskan mengenai *overview*, Informasi Keuangan, GCG, Layanan bagi Pemegang Saham, Event, dan Berita.
- Selanjutnya pada bagian perusahaan anak memberikan informasi umum mengenai perusahaan anak dan dapat disambungkan dengan website masing-masing perusahaan anak.
- Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, *Website* BRI telah memuat, Struktur Grup Perusahaan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Informasi bagi Pemegang Saham.

Website BRI juga memenuhi standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mencakup:

- Part A. *Rights of Shareholders*
- Part B. *Equitable Treatment of Shareholders*
- Part C. *Role of Stakeholder*
- Part D. *Disclosure & Transparency*
- Part E. *Responsibilities of the Board*

Secara keseluruhan, *Website* BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.



PROFIL PERUSAHAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Pendidikan & Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
1.	Andrinof A. Chaniago	25 – 29 Maret 2019	SRW & Co	Asian Global Leadership Programme	London
		21 – 23 Agustus 2019	LPS	Seminar Internasional LPS	Bali
		22 – 25 September 2019	Bank Central of Kuwait	International Banking Conference: Shaping The Future	Kuwait
		29 Oktober - 07 November 2019	LPPI	Executive Risk Management Refresher Program Batch 3, "Coping with Complex Digital Society"	Swedia
2.	A. Fuad Rahmany	25 – 29 Maret 2019	SRW & Co.	Asian Global Leadership Programme	London
		27 – 28 Juni 2019	BARa Risk Forum	Penerapan PSAK 71	Bali
		29 Okt – 7 Nov 2019	LPPI	Executive Risk Management Program Batch 3	Oslo dan Stockholm
3.	Rofikoh Rokhim	30 – 31 Januari 2019	CECT CSR	Social Return on your CSR Investment	Jakarta
		4 – 8 Maret 2019	University of Chicago	Merger and Acquisition	Chicago
		10 – 14 Juni 2019	London School of Economics and Political Science	Data Science for Executives : Vocabulary data, Data Anonymity, Vocabulary Machine, Machine Learning, and Measurement Model.	London
		27 – 28 Juni 2019	BARa Risk Forum	Penerapan PSAK 71	Bali
		21 – 23 Agustus 2019	LPS	Seminar Internasional LPS	Bali

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,
Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
4.	A. Sonny Keraf	29 Juni – 7 Juli 2019	IBI & LSPP	International Risk management Refreshment and Wealth Management Certification Programme	Moscow
		4 – 8 November 2019	Linkage	The Linkage 20 Conversations @ Harvard	USA
5.	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	10 – 14 Juni 2019	London School of Economics and Political Science	Data Science for Executive: Vocabulary data, Data Anonymity, Vocabulary Machine, Machine Learning, and Measurement Model.	London
6.	Hendrikus Ivo	28 November 2019	BSMR	Pancasilanomics dalam Pembangunan Sektor Keuangan yang Berkeadilan dalam Prespektif Nationwide Risk Management	Jakarta
7.	Hadiyanto	10-15 April 2019	IMF World Bank	Spring Meeting IMF	Washington DC
8.	Wahyu Kuncoro	4 November 2019	BSMR	Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	Jakarta
9.	Mahmud	26 Maret 2019	LSPP	Risiko Operasional dan Fraud pada sektor Perbankan	Jakarta
10.	Gatot Trihargo	26 Maret 2019	LSPP	Risiko Operasional dan Fraud pada sektor Perbankan	Jakarta



PROFIL PERUSAHAAN

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pendidikan & Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
1.	Suprajarto ^{*)}				
2.	Sunarso				
3.	Sis Apik Wijayanto ^{*)}	21 Februari 2019	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Risk Management & Compliance Refreshment Program	Jakarta
4.	Mohammad Irfan ^{*)}				
5.	Haru Koesmahargyo	26 Maret 2019	LSPP	Risk Management Refreshment Program "Risiko Operasional dan Fraud Pada Sektor Perbankan	Jakarta
		23 Juli 2019	LSPP	How Do Bank Manage Liquidity Risk	Jakarta
		29 Oktober - 7 November 2019	LPPI	Executive Risk Management Refresher Program Batch 3 dengan topik Coping with Complex Digital Society	Oslo dan Stockholm
6.	Indra Utoyo	20 Maret – 22 Maret 2019		Announcement of Winners : International Excellence in Retail Financial Services Awards 2019	Conrad Dubai, United Arab Emirates
		25-31 Mei 2019	SAP	Benchmark Teknologi New Finance System	Amerika Serikat
		23-24 Mei 2019	Benchmark ORACLE	Benchmark Teknologi New Finance System	Malaysia
		21 Juni 2019	BRI Corporate University	Sosialisasi Divisi Perencanaan & Pengembangan Teknologi Informasi	Jakarta
7.	Priyastomo	12 – 21 Juli 2019	LPPI	Executive Risk Management Refresher Program "Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0"	Spanyol – Italia – Prancis
8.	R. Sophia Alizsa ^{*)}	19 - 22 Mei 2019	ATD Global	ATD International Conference & Exposition 2019	Washington D.C - Amerika Serikat
		05 Juli 2019	Daya Dimensi Indonesia	Value-Based Leadership : Leading Cultural Transformation	Jakarta

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,
Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
9.	Handayani	29 Juni - 6 Juli 2019	Aberdeen Standard Investment	Edinburgh Investment Forum 2019 : Connecting You To Deeper Insights In an Uncertain World	Inggris
		24 - 25 Oktober 2019	BARA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective	Jakarta
10.	Supari	26 Maret - 28 Maret 2019	Credit Suisse	Credit Suisse 22nd ASIA Investment Conference	Hongkong
11.	Osbal Saragi Rumahorbo ^{*)}	12 – 21 Juli 2019	LPPI	Executive Risk Management Refresher Program “Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0”	Spainyol – Italia – Prancis
12.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	25 Februari – 01 Maret 2019	BRI	dbAccess Indonesia Corporate Day dan Non Deal Roadshow	Amerika Serikat
		29 Oktober - 07 November 2019	LPPI	Executive Risk Management Refresher Program Batch 3, “Coping with Complex Digital Society”	Swedia
13.	Azizatul Azhimah	29 - 30 April 2019	BRI Corporate University	In House Training Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) 2019	Jakarta
		09 Juli 2019	BRI Corporate University	Brilian Shine “ Tantangan dan Peluang Perbankan di Era Industri 4.0”	Jakarta
		05-09 Agustus 2019	BRI Corporate University	Group Head (GH), Kepala Bagian (Kabag), Dealer, dan Staf Divisi Treasury Business Enhancement Program Tahun 2019	Jakarta

*) Efektif menjabat s/d 2 September 2019



PROFIL PERUSAHAAN

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pendidikan & Pelatihan Anggota Komite-Komite

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
1.	Pamuji Gesang Raharjo Komite Audit	27-28 Juni 2019	BARA Risk Forum	Prinsip, Praktek, dan Isu Fundamental Penerapan PSAK 71	Denpasar
2.	Sunu Aji Noor W Komite Audit	27-28 Juni 2019	BARA Risk Forum	Prinsip, Praktek, dan Isu Fundamental Penerapan PSAK 71	Denpasar
3.	Suindiyo Komite Pemantau Manajemen Risiko	27-28 Juni 2019	BARRA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Prespective	Bali
4.	Sumaryo Komite Pemantau Manajemen Risiko	27-28 Juni 2019	BARRA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Prespective	Bali

Pendidikan & Pelatihan Sekretaris Perusahaan

No.	Nama	Tanggal	Penyelenggara	Topik	Kota
1.	Hari Purnomo	14 Maret 2019 – 16 Maret 2019	LSPP	Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan 5	Jakarta
2.	Bambang Tribaroto	14 Maret 2019	BRI Corporate University	BRILian Shine Refreshment Manajemen Risiko dengan tema “Peran Stakeholder dalam meminimalkan Fraud Internal dan Eksternal”	Jakarta

Pendidikan & Pelatihan Jajaran Sekretaris Perusahaan

No.	Tanggal	Penyelenggara	Topik
1.	8 Februari 2019	BRI Corporate University	LHC - Psikoedukasi “ Work Life Balance”
2.	14 Maret - 18 Maret 2019	BRI Corporate University	LHC - IHT Pelatihan interpretasi Kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU) BUMN
3.	14 Maret 2019	BRI Corporate University	BRILian Shine Refreshment Manajemen Risiko dengan tema “Peran Stakeholder dalam meminimalkan Fraud Internal dan Eksternal”
4.	01 Juli - 02 Juli 2019	BRI Corporate University	LHC - Pendidikan TOT Change Agent Koordinator Tahun 2019
5.	10 Juli - 11 Juli 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request Training Master of Ceremony (MC)
6.	16 Juli - 18 Juli 2019	BRI Corporate University	RCA- Pendidikan Personal Branding Tahun 2019
7.	17 Juli 2019	BRI Corporate University	LHC - BRILIAN SHINE Leading And Winning In The Era Of Digital Transformation
8.	26 Juli 2019	BRI Corporate University	TOS - BRILian Shine “How a Bank Creates Value”

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,
Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

No.	Tanggal	Penyelenggara	Topik
9.	05 Agustus - 07 Agustus 2019	BRI Corporate University	LHC - Pendidikan Enhancement Program Internalisasi Value Professionalism "Brilian Presentation"
10.	29 Agustus 2019	BRI Corporate University	BRILian SHine "Bulding Capability And Acknowledgement"
11.	29 Agustus - 30 Agustus 2019	BRI Corporate University	LHC-IHT PRODUCT LIFE CYCLE
12.	11 September - 13 September 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Supervisor Kantor Pusat Tahun 2019
13.	03 Oktober - 04 Oktober 2019	BRI Corporate University	Pendidikan Enhancement Sekretaris Divisi, Desk, Kantor Wilayah, Kantor Audit Intern Wilayah
14.	20 Oktober 2019	BRI Corporate University	TOS - BRILian Shine Dengan Tema "Digital Leadership"

Pendidikan & Pelatihan Jajaran Unit Audit Internal

No.	Tanggal	Penyelenggara	Topik
1.	Januari 2019	BRI Corporate University	Special Request Audit Internal Wilayah Yogyakarta Tahun 2019
2.	09 Januari - 10 Januari 2019	BRI Corporate University	Special Request AIW BRI Lampung Tahun 2019
3.	16 Januari - 17 Januari 2019	BRI Corporate University	Special Request Bagi Kepala Audit Intern Wilayah BRI Selindo
4.	21 Januari - 23 Januari 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Kanca Enhancement Program Intermediate (R)
5.	23 Januari - 25 Januari 2109	BRI Corporate University	Special Request AIW Surabaya
6.	Februari 2019	BRI Corporate University	Special Request Auditor AIW BRI Jakarta 3
7.	6 Februari 2019	BRI Corporate University	Special Request Auditor, RAK & RAU AIW Jakarta 1
8.	06 Februari - 08 Februari 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
9.	06 Februari - 08 Februari 2019	BRI Corporate University	Auditor Audit Intern Wilayah Enhancement Program Intermediate (R)
10.	20 Februari - 21 Februari 2019	BRI Corporate University	Enhancement Special Request bagi RAK dan RAU AIW Malang Tahun 2019
11.	04 Maret - 05 Maret 2019	BRI Corporate University	Pendidikan Enhancement Special Request Auditor Kanins BRI Bandung Tahun 2019
12.	20 Maret - 22 Maret 2019	BRI Corporate University	Training of Trainer (TOT) Root Cause Analysis
13.	25 Maret - 29 Maret 2019	BRI Corporate University	Enhancement Special Request Audit Investigatif
14.	26 Maret - 28 Maret 2019	BRI Corporate University	Enhancement Special Request Auditor Audit Intern Wilayah BRI Jakarta 2 Tahun 2019



PROFIL PERUSAHAAN

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

No.	Tanggal	Penyelenggara	Topik
15.	27 Maret - 29 Maret 2019	BRI Corporate University	ITOS - Pendidikan Special Request In House Training IT Strategic Plan
16.	27 Maret - 29 Maret 2019	BRI Corporate University	Enhancement Special Request Audit Intern Wilayah BRI Manado Tahun 2019
17.	28 Maret - 29 Maret 2019	BRI Corporate University	Special Request Auditor AIW Denpasar Tahun 2019
18.	April 2019	BRI Corporate University	Enhancement Special Request Auditor Auditor Intern Wilayah BRI Pekanbaru
19.	4 April 2019 – 15 April 2019	BRI Corporate University	Special Request Auditor Internal Wilayah Padang 2019
20.	10 April - 11 April 2019	BRI Corporate University	Special Request bagi Auditor, RAK AIW BRI Banjarmasin Tahun 2019
21.	10 April - 11 April 2019	BRI Corporate University	Special Request bagi RAU AIW BRI Banjarmasin Tahun 2019
22.	10 April - 12 April 2019	BRI Corporate University	TOS- Pendidikan Enhancement AIW Medan 2019
23.	23 April - 24 April 2019	BRI Corporate University	Enhancement <i>Special Request</i> bagi RAU AIW BRI Semarang Tahun 2019
24.	23 April - 25 April 2019	BRI Corporate University	Enhancement <i>Special Request</i> bagi Auditor, RAK AIW BRI Semarang Tahun 2019
25.	24 April - 26 April 2019	BRI Corporate University	<i>Special Request</i> Auditor Kanins BRI Makassar
26.	24 April - 26 April 2019	BRI Corporate University	<i>Special Request</i> bagi Auditor, RAK dan RAU AIW BRI Banda Aceh Tahun 2019
27.	24 April - 28 April 2019	BRI Corporate University	Pendidikan Enhancement Special Request Auditor, RAK & RAU AIW Surabaya Tahun 2019
28.	29 April - 30 April 2019	BRI Corporate University	In House Training Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) 2019
29.	02 Mei - 03 Mei 2019	BRI Corporate University	Pendidikan Enhancement <i>Special Request</i> Auditor Audit Intern Wilayah BRI Palembang Tahun 2019
30.	Juni 2019	BRI Corporate University	Associate Auditor Competency Development Program
31.	17 Juni - 19 Juni 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Kanca Enhancement Program Intermediate (R)
32.	19 Juni - 21 Juni 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
33.	20 Juni - 22 Juni 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
34.	26 Juni - 28 Juni 2019	BRI Corporate University	Auditor Audit Intern Wilayah Enhancement Program Intermediate (R)
35.	03 Juli - 05 Juli 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Kanca Enhancement Program Intermediate (R)

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,
Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

No.	Tanggal	Penyelenggara	Topik
36.	03 Juli - 05 Juli 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
37.	15 Juli - 16 Juli 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request Group Head Jajaran Audit
38.	05 Agustus - 07 Agustus 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Kanca Enhancement Program Intermediate (R)
39.	12 Agustus - 14 Agustus 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
40.	19 Agustus - 21 Agustus 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Kanca Enhancement Program Intermediate (R)
41.	16 September - 18 September 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request bagi RAK dan RAU Kanins Banda Aceh Tahun 2019
42.	25 September - 27 September 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request Audit Intern Kanins Medan Tahun 2019
43.	27 September 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request Audit Intern Kanins BRI Jakarta 2 Tahun 2019
44.	07 Oktober - 10 Oktober 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
45.	09 Oktober - 11 Oktober 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request In House Training PSAK 71 Tahun 2019
46.	November 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request In House Training PSAK 73 Tahun 2019
47.	3 November – 5 November 2019	BRI Corporate University	Resident Auditor Unit Enhancement Program Intermediate (R)
48.	12 November – 13 November 2019	BRI Corporate University	TOS - Pendidikan Enhancement Special Request In House Training PSAK 73 Tahun 2019
49.	28 November – 29 November 2019	BRI Corporate University	Enhancement training program special request untuk Auditor, RAK dan RAU Intern Wilayah Semarang



PROFIL PERUSAHAAN

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Sertifikasi /Refreshment MR		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Waktu
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama / Independen	LSPP	Level 2	21 April 2017
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	BSMR	Level 1	11 April 2015
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	9 April 2017
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	LPPI	Level 2	9 Juli 2018
Mahmud	Komisaris Independen	LPPI	Level 5	9 Juli 2018
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 November 2017
Nicolaus T. Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 1	6 April 2017
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Level 1	14 Mei 2018
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	LSPP	Level 1	29 November 2018
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	BSMR	Level 3	28 November 2019
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	BSMR	Level 1	11 Januari 2019
		LSPP	Level 1	1 November 2019

Sertifikasi Manajemen Risiko Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Sertifikasi /Refreshment MR		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Waktu
Supari	Direktur Ritel & Menengah	LSPP	Level 5	11 Januari 2018
Osbal Saragi R	Direktur Jaringan & Layanan	BSMR	Level 5	06 April 2018
R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>	BSMR	Level 5	06 Januari 2018
Ahmad Solichin	Direktur Kepatuhan	BSMR	Level 5	06 April 2018
Azizatul Azhimah	Direktur Kepatuhan	MCI	Certified Wealth Manager (CWM)	11 Januari-16 Maret 2019
		LSPP	Level 3	17 – 19 Januari 2019
			Level 4 & 5	5 Oktober 2019
Herdy Rosadi Harman	Direktur <i>Human Capital</i>	LSPP	Level 4 & 5	5 Oktober 2019



PESTA RAKYAT Simpedes

Berbagi Suka Se-Indonesia

PENGUMUMAN PEMENANG
PANEN HADIAH
Simpedes
PERIODE 1

Pawai PRS
Karnaval

Panggung PRS
Hiburan & kesenian

Pojok X'sis
Area milenial

Panen Hadiah
Penarikan hadiah undian

Pasar
Bazaar aneka produk

Peduli
Berbagi bersama Bank BRI

Sambut kembali kemeriahan Pesta Rakyat Simpedes di kota anda! Jangan lewatkan keseruan acaranya dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiahnya!



Tabungan BRI
Simpedes

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CONTACT **BRI 14017 / 1500017** | www.bri.co.id | [f BANK BRI](#) | [@promo_BRI](#)

04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



Indikator-indikator makroekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2019 menunjukkan performa yang baik.

Profitabilitas BRI tetap bertumbuh di tengah iklim perekonomian global yang masih melambat. Laba bersih BRI tercatat menjadi Rp34,41 triliun di penutupan akhir tahun 2019. Total aset Bank BRI konsolidasi di Tahun 2019 mencapai Rp1.416,76 triliun atau tumbuh 9,2%. Sementara itu, pertumbuhan kredit BRI mencapai 8,3% atau menjadi Rp907,4 triliun dari sebelumnya dengan kualitas kredit (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap terjaga di level 2,8%. Posisi level CAR BRI yang tinggi sebesar 22,7% menjadi modal utama BRI mengarungi tahun 2019 dan sekaligus untuk menghadapi tahun 2020 yang merupakan tahun penuh dinamika.

Kontribusi terbesar pertumbuhan kredit BRI berasal dari core business selama ini yaitu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada segmen Mikro, total kredit tumbuh 13% atau mencapai Rp329,5 triliun. Pertumbuhan kredit segmen Mikro merupakan pertumbuhan tertinggi diantara Segmen Bisnis lainnya dan mampu menyalurkan kepada lebih dari 10 juta nasabah mikro. Dengan kontribusi segmen Mikro sebesar 36,3% terhadap total kredit Bank, pertumbuhan tersebut sejalan dengan target perusahaan untuk terus tumbuh hingga porsi kredit mikro mencapai 40% di Tahun 2022.





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI

PEREKONOMIAN GLOBAL

Di tahun 2019 perlambatan ekonomi dunia masih berlanjut, namun ketidakpastian pada pasar keuangan global cenderung menurun. Meskipun sejumlah risiko geopolitik masih terjadi, namun terdapat perkembangan positif terkait perundingan tarif dagang antara AS dan China, serta proses *Brexit* atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Global Growth Zone (percent)



TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI

Pertumbuhan Ekonomi Dunia di tahun 2019 diperkirakan International Monetary Fund (IMF) akan berada pada level 3,0%, sedangkan di tahun 2020 diproyeksikan meningkat menjadi 3,1%, kenaikan tersebut diperkirakan didukung oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Di tahun 2019 Perekonomian AS dan China cenderung melambat dipengaruhi terbatasnya stimulus dan dampak pengenaan tarif yang sudah dikenakan sebelumnya. Perbaikan ekonomi terjadi pada Jepang dan Eropa walaupun masih terbatas akibat permintaan domestik yang membaik.

Perkembangan positif pada perjanjian tarif dagang AS dan China berdampak pada penurunan risiko pasar keuangan global dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara berkembang dengan masuknya aliran dana asing.

Walaupun perekonomian global belum sepenuhnya positif, bank-bank sentral di dunia berupaya untuk melakukan stimulus ekonomi dengan menurunkan tingkat bunga atau mempertahankan suku bunga rendah. The Fed, misalnya mempertahankan levelnya di 1,75% hingga akhir tahun 2019. Langkah The Fed tersebut diikuti oleh sejumlah bank sentral negara maju dan berkembang, termasuk Bank Indonesia (BI).

PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah kemelut perang dagang dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2019, perekonomian Indonesia tumbuh 5,02%. Hal ini karena ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, ekspansi fiskal yang terakselerasi, dan perbaikan ekspor. Aktivitas Investasi juga menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah seperti di Sulawesi terkait hilirisasi nikel dan adanya sejumlah kebijakan transformasi ekonomi yang ditempuh Pemerintah. Sehingga keyakinan dunia usaha perlahan tapi pasti mulai meningkat kembali. Investasi bangunan juga terus membaik didorong oleh peningkatan kegiatan konstruksi.

Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia

Indikator	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB (%)	5,07	5,17	5,02*
Nominal PDB (USD Miliar)	1.015,29	1.022,45	1.111,71*
PDB/Kapita (USD)	3.885	3.871	4.164*
Ekspor (USD Miliar)	168,88	180,73	167,53
Impor (USD Miliar)	150,07	181,16	170,72
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	18,81	-0,44	-3,2
Cadangan Devisa (USD Miliar)	130,20	120,65	129,2
Suku Bunga Acuan – BI 7 Day Reverse Repo (%)	4,25	6,00	5,00
Inflasi (%)	3,61	3,13	2,72%
IHSG (nilai riil)	6.356	6.194	6.299

Sumber: BPS, BI, IMF
*Q3 2019

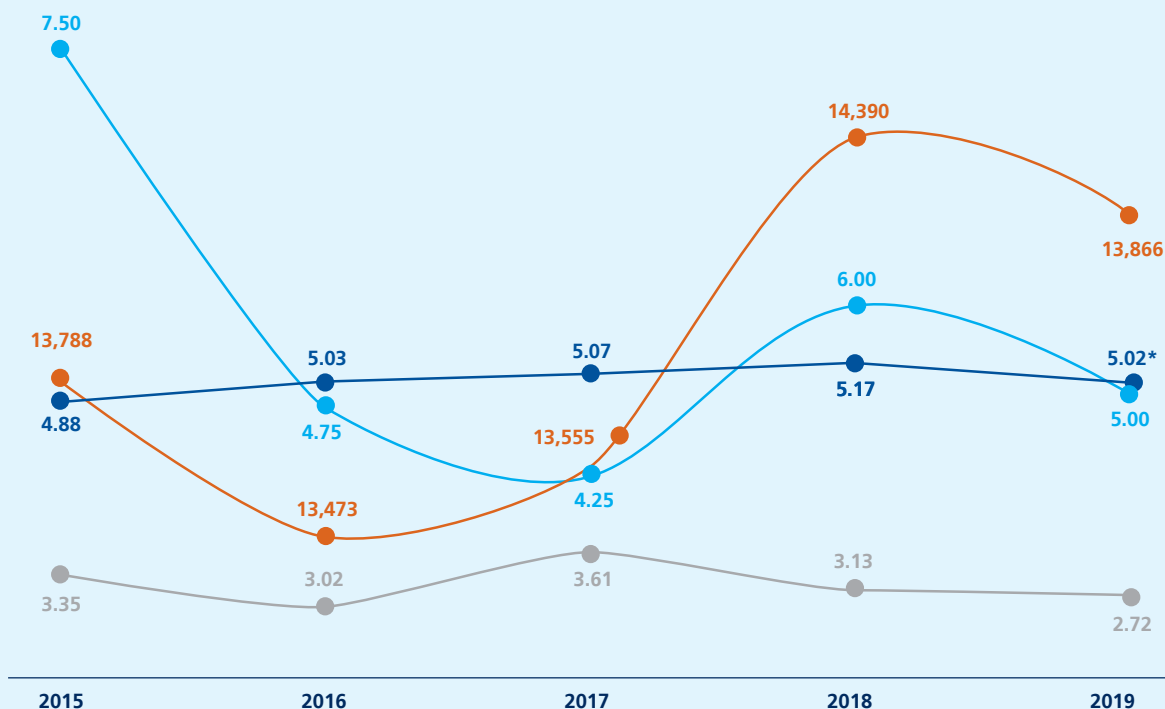


ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI

Posisi cadangan devisa Indonesia per Desember 2019 mencapai US\$129,2 miliar, atau setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Sedang posisi suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo (BI7DRR), BI menutupnya di level 5,00% pada akhir 2019. BI mempertahankan level BI7DRR tersebut karena inflasi terkendali di kisaran sasaran, stabilitas eksternal relatif terjaga, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indikator Makro Indonesia



*) Q3 2019

- BI 7 DRR (%)
- Kurs Rp/US\$ (Rp)
- PDB (%)
- Inflasi (%)

Dari sisi nilai tukar Rupiah, posisinya menunjukkan penguatan dibanding tahun 2018 karena adanya dukungan dari kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang membaik. Selain itu, penguatan Rupiah juga didukung oleh pasokan valas dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, serta daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar.

Sementara perkembangan pasar modal selama tahun 2019 masih dipengaruhi oleh sentimen global dan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2019 berada pada posisi 6.299,53 atau mengalami kenaikan sebesar 2,18% jika dibandingkan dengan posisi akhir 2018.

TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI

PROYEKSI PEREKONOMIAN INDONESIA 2020

Pertumbuhan ekonomi global memang telah melambat pada 2019, tetapi pada 2020 diproyeksikan akan tetap tumbuh terbatas. IMF memprakirakan ekonomi dunia 2020 tumbuh 3,4%, atau lebih baik dibandingkan 2019 yang diproyeksikan 3,0%. Sinyal positif dimaksud antara lain meredanya ketegangan perdagangan dunia, berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif, penyelesaian *Brexit* yang *orderly*, serta stabilnya kondisi ekonomi negara berkembang yang mengalami tekanan.

Proyeksi Perekonomian Indonesia 2020

No.	Asumsi	APBN 2020	IMF	WORLD BANK	ASIAN DEVELOPMENT BANK	BRI *
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,1	5,3	5,2	5,03 – 5,10
2	BI 7 DRR (%)	-	-	-	-	4,25 – 4,50
3	Inflasi (%)	3,1	3,1	-	-	3,10 – 3,60
4	Nilai Tukar Rp/US\$ (Rp)	14.400	-	-	-	13.825 – 14.100

*) Grup Economist & Corporate Research BRI

Otoritas fiskal dan moneter memperkirakan perekonomian Indonesia juga akan meningkat dalam rentang 5,1-5,3% pada tahun 2020, atau lebih baik dibanding tahun 2019 yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,1%. Beberapa sentimen positif yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 antara lain kurs Rupiah diperkirakan stabil sesuai dengan fundamentalnya, inflasi terkendali di kisaran sasaran 3,10%-3,60%, kondisi NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing, pelonggaran kebijakan moneter negara maju berdampak positif, serta likuiditas di pasar uang dan perbankan Indonesia tetap memadai.

INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Hingga Desember 2019, ketahanan bank umum masih terjaga dengan menguatnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencapai 23,3%. Namun pertumbuhan kredit bank umum mengalami penurunan seiring dengan melambatnya pembiayaan perekonomian, yakni hanya 6,08% (yoy). Meski demikian, kualitas kredit (*Non Performing Loan*) masih terjaga di level 2,5% pada Desember 2019.

Indikator Keuangan Utama Perbankan Indonesia

Indikator	2017	2018	2019
Aset (Rp Triliun)	7.388	8.068	8.345*
Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (Rp Triliun)	4.738	5.295	5.616,8
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	5.289	5.630	6.000,86
Laba Setelah Pajak (Rp Triliun)	131	150	131*
CAR (%)	23,01	22,89	23,3
NPL (%)	2,59	2,37	2,5*
NIM (%)	5,15	5,00	4,9
ROA (%)	2,38	2,50	2,45*
BOPO (%)	79,28	78,33	80,83*
LDR (%)	89,57	94,04	93,6

*) Data Oktober 2019



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI

Di sisi lain, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum tumbuh terbatas seiring dengan perlambatan pertumbuhan kredit. DPK bank umum tercatat tumbuh sebesar 6,58% (yoy) per Desember 2019. Oleh karena itu, bank umum terus mengoptimalkan sumber pendanaan non DPK untuk menguatkan likuiditas.

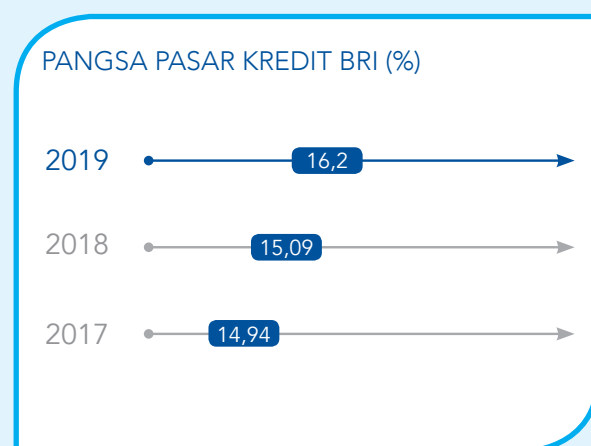
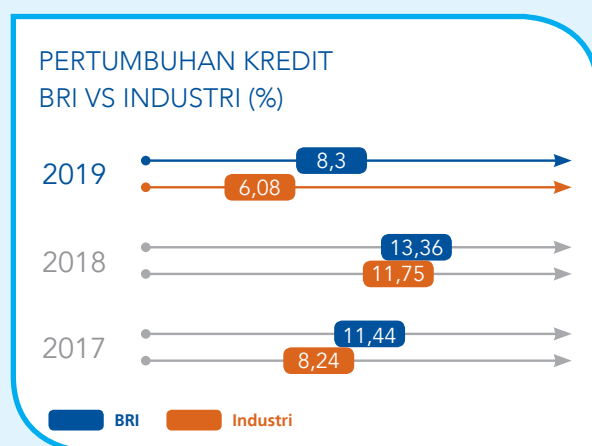
Dari sisi profitabilitas, kondisinya relatif stabil di tengah melambatnya pertumbuhan kredit dan DPK selama tahun 2019. Rasio *Return on Assets* (ROA) tercatat sebesar 2,45% per Oktober 2019, sedikit lebih rendah dari posisi akhir 2018 yang sebesar 2,50%. Kondisi ini didorong oleh penurunan margin keuntungan oleh bank umum untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan kredit. *Net Interest Margin* (NIM) turun tipis di level 4,9%. Meski demikian, kemampuan bank untuk menjaga efisiensi yang tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) relatif stabil di level 80,83% (Oktober 2019). Sehingga bank umum mampu menahan penurunan profitabilitas yang lebih dalam.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN & BRI

PERTUMBUHAN KREDIT 2019

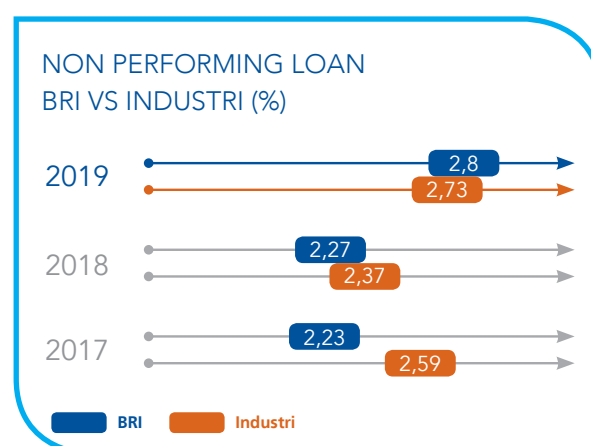
Di tengah melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit bank umum selama tahun 2019, BRI tetap mampu menumbuhkan kreditnya di atas rata-rata industri. Pertumbuhan kredit BRI dan industri perbankan masing-masing tumbuh 8,3% dan 6,08% di tahun 2019, atau

meningkat menjadi Rp907,4 triliun dan Rp5.616,8 triliun. Seiring dengan peningkatan kredit, pangsa kredit BRI juga menguat menjadi 16,2% sampai dengan Desember 2019.



KUALITAS KREDIT

Rata-rata rasio NPL bank umum menunjukkan peningkatan menjadi 2,73% per Oktober 2019 dari sebelumnya 2,37% pada tahun 2018. Kondisi yang serupa juga dialami oleh BRI yang kualitas kreditnya tercatat menjadi 2,8% per Desember 2019 dibanding posisinya pada 2018 yang masih sebesar 2,27%. Meski demikian, NPL BRI masih terjaga di bawah batas maksimal ketentuan NPL yang sebesar 5% dan rata-rata NPL industri.





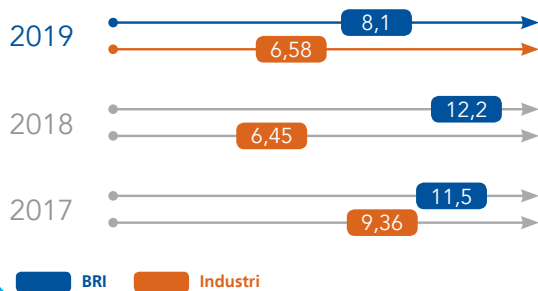
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN & BRI

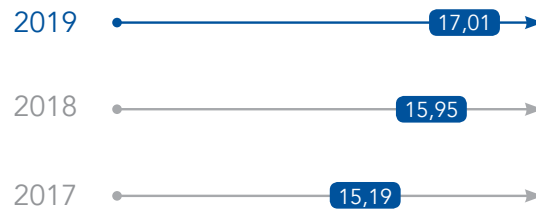
PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

Dana pihak ketiga BRI mengalami peningkatan menjadi Rp1.020,9 triliun pada akhir Desember 2019 dibanding akhir tahun sebelumnya yang tercapai Rp944,27 triliun. Secara persentase pertumbuhan, DPK BRI dapat tumbuh di atas rata-rata industri yaitu sebesar 8,1% (yoy). Sedang DPK bank umum bertumbuh 6,6% (yoy) atau naik menjadi Rp6000,9 triliun. Sejalan dengan peningkatan DPK, pangsa DPK BRI terhadap DPK bank umum bertambah menjadi 17,01%.

PERTUMBUHAN DPK BRI VS INDUSTRI (%)



PANGSA PASAR DPK BRI (%)



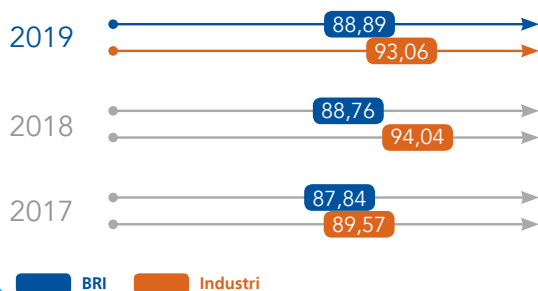
Likuiditas

Hingga Desember 2019, kondisi likuiditas BRI yang tercermin dari LDR dapat dijaga di level cukup baik yaitu 88,89%, atau meningkat sedikit dibanding tahun 2018 yang mencapai 88,76%. Level LDR BRI tersebut jauh lebih baik dibanding level LDR bank umum yang mencapai 93,06%.

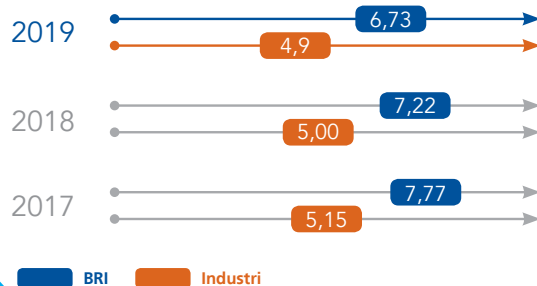
Profitabilitas

Selama tahun 2019, profitabilitas BRI dan bank umum yang terefleksi dari Pendapatan Bunga Bersih (NIM) sama-sama tengah mengalami tekanan. NIM BRI dan bank umum masing-masing turun menjadi 6,73% dan 4,9%, dari sebelumnya 7,22% dan 5% pada tahun 2018. Dengan demikian BRI berhasil mempertahankan level NIM di atas rata-rata NIM bank umum ditahun 2019.

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) BRI VS INDUSTRI (%)



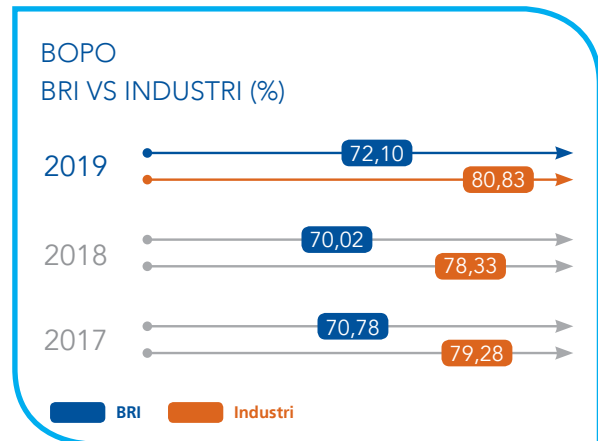
NET INTEREST MARGIN (NIM) BRI VS INDUSTRI (%)



TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN & BRI

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Dari sisi efisiensi yang tercermin dari indikator rasio BOPO, BRI mampu mempertahankannya di level rendah yaitu 72,10% di akhir 2019. Sedangkan BOPO industri atau bank umum justru menunjukkan peningkatan dari 78,33% pada tahun 2018 menjadi 80,83%.



Proyeksi Kinerja Perbankan Nasional Tahun 2020

Pada tahun 2020, dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, kinerja perbankan nasional diyakini masih dapat tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan kredit dan DPK tumbuh moderat. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga, cukupnya likuiditas, dan pelonggaran kebijakan makprudensial.

	2018		2019		2020 Proyeksi	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK	10%-12%	8%	12%-14%	8%-10%	14%	10%-12%
BI	10%-12%	9%-11%	10%-12%	8%	10% - 12%	8%-10%
LPS	10%-12%	10%-12%	10,5%	7,4%	11,5%	8,4%

BRI mendukung sepenuhnya arah dan bauran kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan pada tahun 2020. Seperti kebijakan transformasi sektor ekonomi yang difokuskan pada sejumlah industri manufaktur, pariwisata, maupun UMKM. Pesatnya arus digitalisasi juga memberikan peluang bagi industri perbankan Indonesia. Inovasi digital mampu memperkuat hubungan antar agen ekonomi dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar. Digitalisasi ekonomi dan keuangan membuka potensi inklusi ekonomi dan keuangan.

Perbankan sebagai poros sistem keuangan juga terus bertransformasi digital secara *end-to-end*. Sehingga dapat memperluas penggunaan aplikasi digital dalam penyediaan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat, termasuk dalam hal sistem pembayaran ritel serta membuka peluang pembiayaan UMKM dalam skala yang lebih luas.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

RENCANA STRATEGIS BANK

RENCANA JANGKA PENDEK BRI TAHUN 2020

BRI menetapkan tema tahunan dalam rencana perusahaan di tahun 2020 yaitu menjadi *Integrated Financial Solution*. Untuk mewujudkan tema tersebut BRI ingin memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah dengan menawarkan *experience* yang memuaskan bukan hanya untuk produk-perbankan konvensional namun juga produk yang dimiliki perusahaan anak. Pengembangan teknologi yang dilakukan juga menjadi landasan utama dalam memberikan layanan terbaik ditambah dengan transformasi *digital* serta *data analytics* diharapkan mampu mendukung pencapaian target jangka panjang yaitu menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to the Best Talent*.

Dalam jangka pendek, BRI menyusun target strategis antara lain:

- Fokus pada *fee-based Income*
Pendapatan berbasis fee menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjadi fokus BRI di 2020. Pemanfaatan *value chain* dan *transaction banking* dari segmen korporasi dan UKM serta implementasi produk *digital banking* diharapkan dapat meningkatkan *fee income*. Integrasi bisnis dengan Anak Perusahaan juga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan *fee-based income* di BRI.
- Pertumbuhan aset produktif yang fokus pada segmen UMKM
Rencana ekspansi kredit BRI difokuskan pada segmen Mikro, Kecil dan Ritel, namun tetap memperhatikan bisnis menengah dan korporasi yang dapat memberikan *trickle down* bisnis ke segmen UKM. Segmen ini juga diharapkan mampu mendukung program inklusi keuangan sehingga menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh produk perbankan.
- Pertumbuhan dana murah (CASA)
Perbaikan kapasitas layanan yang mendukung kenyamanan bertransaksi nasabah diharapkan mampu mendorong penghimpunan dana murah. Rejuvenasi produk yang berdasarkan pada *customer needs* juga dikembangkan khususnya yang menyasar nasabah millennial yang merupakan *tech savvy* dan

masyarakat yang belum memanfaatkan jasa layanan perbankan sehingga target CASA dapat dicapai pada rentang 62%-64%.

- Perbaikan kualitas aset
Kualitas kredit akan terus diperbaiki dengan cara mempertahankan kualitas kredit segmen UMKM. Segmen korporasi menjadi fokus utama dimana upaya restrukturisasi dan perbaikan kualitas kredit akan diupayakan semaksimal mungkin sehingga rasio NPL tetap terjaga.
- Peningkatan kapabilitas operasional
BRI meningkatkan investasi di bidang IT dan non-IT untuk memberikan *service excellence* sehingga nasabah memiliki *experience* bertransaksi yang *seamless*. Integrasi dengan produk-produk Anak Perusahaan untuk memberikan *one-stop service* juga menjadi hal yang dapat diselaraskan dengan peningkatan kapabilitas operasional.

Program Jangka Pendek tersebut merupakan bagian dari *Corporate Plan* 2018-2022 yang berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI serta faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut, antara lain:

- Pengembangan sektor pariwisata dengan 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dimana anggaran yang besar untuk infrastruktur dan turunannya akan menjadi peluang bisnis bagi industri perbankan.
- Pelemahan Ekonomi akibat *trade war* AS dan China dapat memberikan dampak negatif terhadap industri perbankan karena berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan NPL perbankan.
- Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi millennial yang akrab dengan teknologi digital.
- Perubahan preferensi nasabah yang berpengaruh kepada pertumbuhan nasabah yang *digitally savvy* yaitu perubahan perilaku para nasabah yang lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan hemat waktu.

RENCANA STRATEGIS BANK

RENCANA JANGKA MENENGAH

Recana jangka menengah BRI merupakan *milestone* untuk pencapaian visi dan misi bank BRI ke depan. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, BRI juga menetapkan tema-tema tahunan agar strategi yang dilakukan dapat terfokus untuk menjapai target jangka panjang. BRI juga fokus pada *sustainability finance* dimana BRI tidak hanya tumbuh tetapi juga peduli pada keberlanjutan usaha serta lingkungan.

Dalam jangka menengah BRI fokus pada beberapa hal berikut:

- Pertumbuhan simpanan yang fokus pada CASA
 Perbaikan kualitas operasional dan reliabilitas sistem di BRI serta rejuvinasi produk yang fokus pada *customer centric* dengan memperhatikan *customer journey* diharapkan mampu meningkatkan loyalitas nasabah untuk terus bertransaksi di BRI. Sehingga, penghimpunan dana murah dan jumlah transaksi akan meningkat yang outputnya adalah peningkatan profitabilitas BRI.
- Fokus pada segmen UMKM khususnya bisnis Mikro
 Kedepannya BRI akan terus fokus pada segmen UMKM. Jaringan unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia akan menjadi kekuatan dalam peningkatan market share di segmen ini. BRI menargetkan komposisi kredit mikro mencapai 40% di tahun 2022. Bisnis di segmen menengah dan korporasi akan mendukung melalui pengembangan *value chain* dan *transaction banking* yang terintegrasi dengan segmen UMKM.
 Pertumbuhan pendapatan berbasis *fee*
 Pertumbuhan pendapatan *fee income* akan difokuskan pada kegiatan *transaction banking*, transaksi *e-channel*, *e-banking* dan *fee* dari *bancassurance*. Transaksi-transaksi tersebut akan menjadi pendorong pendapatan BRI selain pendapatan bunga.
- Perbaikan kualitas aset
 Kualitas kredit UMKM diharapkan terus terjaga pada rasio yang sehat dimana perbaikan kualitas kredit segmen korporasi diharapkan dapat menurunkan tingkat NPL dibawah industri perbankan.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

RENCANA STRATEGIS BANK

RENCANA JANGKA PANJANG

Rencana Strategis Jangka Panjang

Dalam penyusunan Corporate Plan 2018-2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, penyusunan Rencana Jangka Panjang akan menjadi *guideline* proses transformasi BRI. Sampai dengan Tahun 2022, BRI memiliki aspirasi untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to The Best Talent*.

Fokus Bisnis 2018-2022

Mikro	Konsumer	Ritel & Menengah	Korporasi	Perusahaan Anak
Mempertahankan & menumbuhkan <i>market share</i> pada segmen mikro	Tetap menjadi yang terdepan dalam <i>Salary Based Loan</i> sekaligus menduduki peringkat 3 besar di kategori lain	Menjadi bank yang terdepan di segmen Ritel dan Menengah di Indonesia	Peningkatan profitabilitas segmen korporasi	Peningkatan kontribusi Perusahaan Anak

Rencana BRI tersebut akan diimplementasikan dalam 3 *waves of transformation* sebagai berikut:



BANK BRI UNTUK INDONESIA

RINGKASAN

BRI memiliki 54 Rumah Kreatif BUMN (RKB) di seluruh Indonesia dan 1 RKB Teras Kapal dengan jumlah anggota RKB sebanyak **329.969** orang di 2019.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) melalui BRI mencapai **Rp13,39** triliun di 2019, kepada **3,76** juta KPM.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) melalui BRI mencapai **Rp4,84** triliun di 2019, kepada **5,44** juta KPM.



BRI membantu pelaksanaan pembagian Kartu Tani kepada **3,25** juta petani dan bekerja sama dengan 6.109 Kios Pupuk Lengkap.

Saat ini dari **45.857** BUMDes di seluruh Indonesia, BRI telah mengakuisisi **22.654** rekening BUMDes

Plafon penyaluran KUR BRI dari tahun 2015 hingga Desember 2019 mencapai **Rp323,4** triliun dan telah disalurkan kepada **16,6** juta debitur.

Pelaksanaan BRIINCUBATOR dilakukan di 5 Kota RKB dengan total Peserta lebih dari **500** UMKM

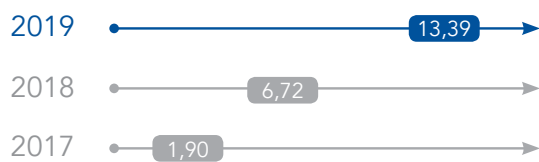




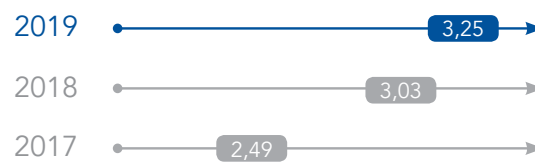
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BANK BRI UNTUK INDONESIA

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BRI (RP TRILIUN)



KARTU TANI (Dalam juta)



BRI berkomitmen dalam menyukseskan program pemerintah sebagai *agent of development* sehingga BRI berinvestasi pada kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Hal ini merupakan aspek yang sama pentingnya dengan berinvestasi pada masa depan bisnis perusahaan.

Program-program yang dilakukan, fokus kepada akses terhadap Pengentasan Kemiskinan (Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan Masyarakat Desa (melalui BUMDes), Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kewirausahaan Pertanian), dan akses terhadap Inklusi Keuangan, serta kegiatan sosial lainnya.

BRI berperan serta melalui program-program sebagai berikut:

Program Bansos Non Tunai PKH dan BPNT

Pada tahun 2019, BRI menjadi salah satu BUMN yang ditunjuk menyalurkan program Bantuan Sosial Non Tunai. Program Keluarga Harapan (PKH) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan mekanisme distribusi sebagai berikut:

Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistem perbankan, untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpanan.

Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di mana pencairannya melalui agen bank dan *e-channel* bank sebagai penyalur bantuan. Dalam hal ini BRI bersama HIMBARA bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Adapun wilayah penyaluran BRI telah tersebar di 34 Provinsi, 265 Kabupaten/Kota, 3.470 Kecamatan dan 32.931 Desa. Dalam mendukung program ini BRI telah menyediakan infrastruktur jaringan berupa kartu ATM (KKS) sebanyak 5,5 juta, jaringan BRIlat sebanyak 408 titik serta Agen BRILink. Program Bansos dilayani oleh 240 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut BRI turut berperan dalam peningkatan inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Program Kewirausahaan Pertanian

Program Kewirausahaan Pertanian merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Program ini bertujuan untuk mendorong petani dalam skala ekonomi tertentu agar berkelompok menjadi wirausaha. Pemerintah memberikan dukungan melalui sarana prasarana pertanian modern.

Peran BRI dalam mendukung program tersebut, sebagai berikut:

- Ikut membina Perusahaan *off taker* hasil petani yaitu PT Mitra Desa Bersama (MDB) Cisuka.
- Membagikan Kartu Tani kepada 9.436 petani yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Cisayong, Sukahening, Sukaratu dan Jamanis.
- Memberikan kredit mikro kepada 2.505 Petani dengan nominal *outstanding* sebesar Rp56 miliar.

BANK BRI UNTUK INDONESIA

Adapun enam langkah Kewirausahaan Pertanian adalah sebagai berikut:

Modernisasi Proses Produksi

Mengubah proses pertanian dari tradisional menjadi modern

**Penguatan Petani**

Petani dalam skala ekonomi tertentu yang layak dikembangkan tidak lagi bekerja secara individu namun berkelompok

**Penguatan Kelompok**

Jika dimungkinkan kelompok menjadi badan usaha atau bahkan menjadi badan hukum

**Penguatan Kelembagaan**

Lembaga (Badan Usaha/ Badan Hukum) menjadi offtaker hasil petani

**Inklusi Keuangan**

Memberikan akses kepada petani terhadap layanan perbankan

**Kesejahteraan Petani**

Ekosistem ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu ke hilir

**Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) & BUMN Shop**

BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam hal BUMDes, Bank BRI bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan BUMDes dengan azas *simbiosis mutualisme* meliputi:

- Memberikan edukasi literasi keuangan
- Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan
- Melakukan pendampingan dan sosialisasi tata cara pendirian BUMDes
- Menjadikan BUMDes sebagai Agen BRILink

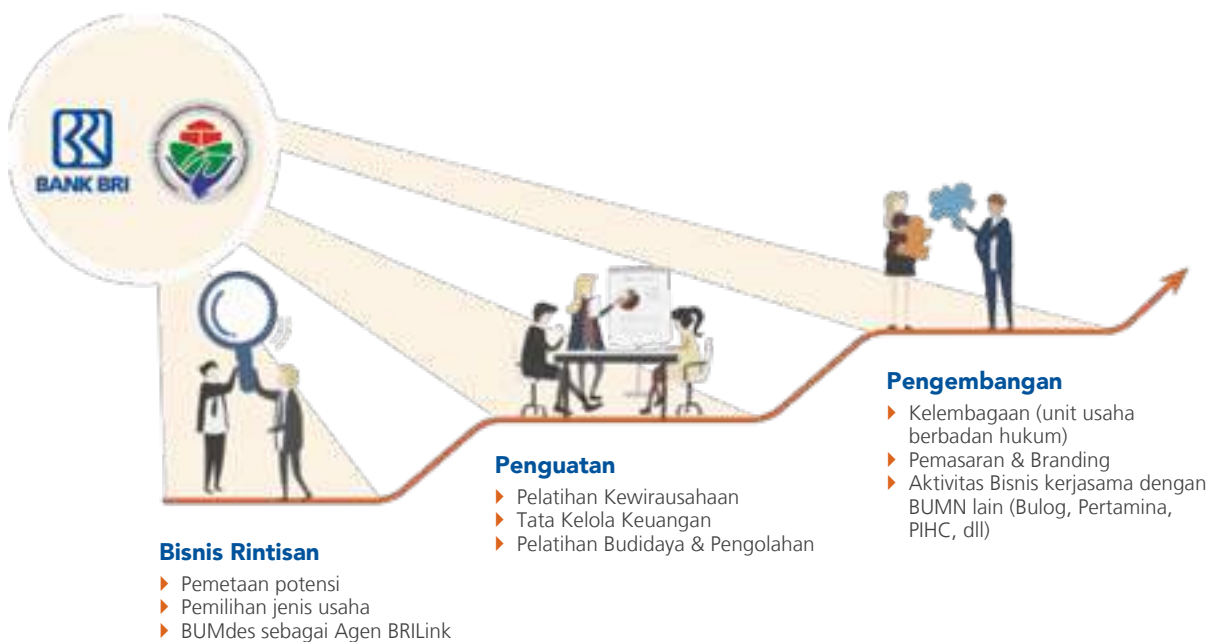


ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BANK BRI UNTUK INDONESIA

Kerjasama ini secara efektif dimulai sejak Januari 2017 dan telah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2017 rekening BUMDes yang terakuisisi sebanyak 7.153 rekening bertambah menjadi 17.545 rekening pada tahun 2018. Saat ini jumlah rekening BUMDes 2019 sebanyak 22.654. Adapun BRILink BUMDes mencapai 8.662 di tahun 2019 meningkat dari 3.020 di tahun 2018 dan 1.319 di tahun 2017.

Adapun pola pendampingan BRI pada BUMDes dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Selain itu BRILink BUMDes juga dapat meningkatkan literasi keuangan desa. Sebagai contoh, pendirian BUMN Shop. BUMN Shop yang merupakan sinergi BUMN dalam usaha peningkatan ekonomi Desa melalui BUMDes, dimana BUMDes akan dijadikan Agen Bank, Agen RPK Bulog, Pertashop – Pertamina, Pupuk PIHC, dan Wi-fi Corner Telkom.

Sebagai wujud pemberdayaan BRI kepada Masyarakat Desa, BRI memberikan bantuan kepada BUMDes dengan membuat toko ritel modern yang dikelola BUMDes dengan nama BUMN Shop.

BRI telah mendirikan 9 BUMN Shop di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan 2 BUMN Shop di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain memberikan nilai tambah secara bisnis dan pendapatan kepada BUMDes, kehadiran BUMN Shop juga mempunyai peran sosial untuk mengurangi masalah pengangguran di Desa

dengan membuka lapangan pekerjaan. Dari 11 BUMN Shop tersebut saat ini telah menyerap 32 orang pegawai yang berasal dari desa setempat (putra daerah asli).

Program Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial ini merupakan Proyek Sinergi BUMN yang memberikan manfaat kepastian lahan garapan dan hak garap kepada petani sekitar hutan, akses perbankan melalui pendanaan KUR dari Bank, dukungan subsidi sarana produksi pertanian dan pembinaan pengelolaan lahan hutan yang lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sampai tahun 2019, Pemerintah akan mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial, dalam bentuk lima skema yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

BANK BRI UNTUK INDONESIA

Bank BRI turut mendukung Program Perhutanan Sosial tersebut melalui penyaluran dana KUR sebesar Rp 43 miliar kepada 2.221 petani atau 100% petani penerima SK Perhutanan Sosial.

Selain itu, BRI juga turut serta memberikan bantuan sarana alat produksi seperti traktor tangan, perontok gabah, pemipil jagung, alat kemas, tandon dan pompa air. Pemberian bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan biaya beban usaha tani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi petani. Salah satunya bantuan Alat Penyulingan Minyak Kayu Putih ini diberikan kepada Kelompok Tani Hutan di Desa Wonoharjo, Kec. Kemusu, Boyolali. Kelompok ini beranggotakan 404 petani dan mengelola lahan kawasan Program Perhutanan Sosial seluas 433 ha. Melalui penambahan alat penyulingan minyak kayu putih ini, petani hutan dapat lebih produktif usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan lebih sejahtera.

Rumah Kreatif BUMN (RKB)

Rumah Kreatif BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Rumah Kreatif BUMN akan diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM. Saat ini jumlah RKB BRI sebanyak 54 unit, RKB yang terakhir dibangun adalah RKB Bakauheni di pelabuhan Eksekutif Bakauheni, Lampung.

Tujuan utama dari Rumah Kreatif BUMN adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM sehingga dapat terwujud UKM Indonesia yang berkualitas melalui Go Modern (adalah pelatihan untuk mempersiapkan dan membina UKM dalam peningkatan kualitas produk, branding dan Packaging), Go Digital (adalah pelatihan lanjutan dari Modul Go Modern, berisi materi terkait penggunaan aplikasi digital dan otomasi dalam proses bisnis dan pemasaran), Go Online (adalah pelatihan mengenai perluasan akses pasar secara online melalui market place yang sudah disediakan dengan Blanja.com, atau e-commerce lainnya).

Untuk mendukung learning material dan knowledge management terhadap pelatihan di semua RKB, maka dilakukan standarisasi kurikulum pelatihan RKB juga

bekerjasama/ partnership dengan berbagai instansi dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan anggota RKB diharapkan membentuk komunitas sesuai bidang usahanya untuk lebih me-empowering usahanya.

Ke depan, para UMKM anggota RKB akan disertifikasi sesuai dengan tingkatan pelatihan di RKB, yakni Sertifikat Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Pada Desember 2019, terdapat anggota RKB sebanyak 329.969 pengusaha UMKM dengan jumlah pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 4.133 kali.

RKB	2017	2018	2019
Jumlah RKB	52	53	54
Jumlah Anggota	286.330	302.942	329.969
Pelatihan	908	2.220	4.133

Keterlibatan BRI dalam program RKB mendapatkan apresiasi dari kementerian BUMN. Pada tanggal 7 Oktober 2019, BRI mendapatkan apresiasi BUMN Awards untuk RKB Terbaik Kategori C (Remote Area).

Kartu Tani

Kartu Tani merupakan kartu debit co-branding antara Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kartu ini diantaranya berfungsi sebagai identitas petani, membaca kuota pupuk bersubsidi, transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap, dan transaksi perbankan melalui electronic channel.

Kartu Tani BRI pertama kali diinisiasi di provinsi Jawa Tengah pada 4 Maret 2015. Kemudian pada 20 Februari 2017, Menteri Pertanian bersama dengan Menteri BUMN menginstruksikan Bank HIMBARA untuk melaksanakan uji coba program Kartu Tani di Pulau Jawa. BRI mendapat tugas membagi Kartu Tani di 19 provinsi antara lain Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya), Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan (14 kabupaten/kota), Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (5 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BANK BRI UNTUK INDONESIA

Tahun Anggaran 2018, Kartu Tani diberikan kepada Petani yang tergabung di kelompok tani dan melakukan usaha tani dengan luasan lahan maksimal 2 Ha untuk sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perternakan serta maksimal 1 Ha untuk sektor Perikanan Budidaya. Petani bersama Kelompok tani wajib membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi) yang akan diunggah di sistem E-RDKK Kementerian Pertanian oleh Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan. Selanjutnya Bank akan membuka rekening dan menerbitkan Kartu Tani bagi Petani yang sudah terdaftar di E-RDKK Kementan.

Setiap transaksi pembelian pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani dapat dimonitor oleh pemerintah secara real-time online melalui dashboard yang disediakan BRI, sehingga pemerintah dapat memastikan penyaluran pupuk bersubsidi telah tepat sasaran *by name by address*. Selain itu dashboard monitoring membantu produsen pupuk dalam memperoleh data sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi dan data sumber penagihan subsidi biaya produksi pupuk ke pemerintah. BRI juga memanfaatkan data petani penerima Kartu Tani sebagai pipeline pinjaman untuk meningkatkan skala usaha budidaya petani.

Penggunaan Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap yang juga berperan sebagai agen Lakupandai, merupakan bentuk literasi dan inklusi keuangan bagi ekosistem pertanian Indonesia. Dengan adanya Kartu Tani, Petani mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga kegiatan budidaya tidak terganggu. Selain itu petani yang datanya sudah terdaftar di sistem berkesempatan mendapatkan manfaat tambahan seperti bantuan sarana produksi pertanian lainnya, penyerapan hasil panen dari perusahaan off-taker, pendaftaran asuransi pertanian, dan pembiayaan dari perbankan.

Sampai dengan 2019 BRI telah menyerahkan 3.25 juta Kartu Tani kepada Petani penerima Pupuk Subsidi dan sebanyak 6.109 Kios Pupuk Lengkap telah menjadi agen BRILink.

BRIncubator

BRIncubator adalah program pengembangan atau kegiatan kompetisi antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang potensial untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM untuk naik kelas

termasuk secara digital dan fokus pada validasi ekspor (*export validation*).

BRIncubator pertama dilaksanakan pada tahun 2018 di 5 Kota, yaitu Padang, Bandung, Solo, Malang, dan Makassar dengan peserta sebanyak 500 UMKM yang merupakan anggota Rumah Kreatif BUMN BRI.

Pada tahun 2019 BRIncubator kedua dilaksanakan di 5 Kota, yaitu Jakarta Pusat, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo dan Gianyar dengan total peserta sebanyak 500 UMKM yang merupakan anggota Rumah Kreatif BUMN BRI yang kemudian diseleksi menjadi 250 UMKM untuk mengikuti proses BRIncubator yang terdiri dari Workshop, Coaching dan Mentoring oleh pengajar bersertifikasi nasional. Selanjutnya UMKM tersebut diberikan bimbingan dan pendampingan usaha oleh mentor selama 6 bulan dari Juni s.d. Desember 2019 dengan perbandingan maksimal 5 UMKM didampingi oleh 1 mentor, sehingga proses pendampingan usaha dapat berjalan dengan maksimal.

Pada akhir pelaksanaan BRIncubator terpilih 3 UMKM terbaik di masing-masing kota yang selanjutnya para UMKM terbaik tersebut mendapatkan hadiah uang tunai untuk pengembangan usahanya dan terus mendapatkan pendampingan dari Rumah Kreatif BUMN agar Go Global dan siap memasuki pasar ekspor. Berikutnya, program BRIncubator akan diperluas hingga menjangkau lebih banyak peserta dan kota di seluruh wilayah Indonesia.

Literasi & Inklusi Keuangan

Kegiatan inklusi dan literasi keuangan adalah kegiatan berupa sosialisasi ataupun edukasi terkait pengenalan berwirausaha, pengembangan usaha, dan produk atau layanan perbankan BRI. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabungan Inklusi Keuangan (Simpel)

Program Inklusi Keuangan yang dilakukan BRI melalui Tabungan Simpel terus mendapatkan tanggapan positif dari pelajar di seluruh Indonesia. Tabungan Simpel juga merupakan sarana penyaluran dana Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah rekening menjadi 22,6 juta rekening, dibanding tahun 2018 sebesar 20,39

BANK BRI UNTUK INDONESIA

juta rekening. Tercatat pada tahun 2019, saldo tabungan Simpanan Pelajar sebesar Rp 4,6 Triliun.

Atas partisipasi BRI dalam menyukseskan program Inklusi Keuangan, OJK memberi penghargaan kepada BRI sebagai Bank Terbaik Pendukung Program Pemerintah melalui Simpel dua tahun berturut-turut pada kegiatan FinExpo tahun 2018 dan 2019.

Enhancement Go Global

Enhancement Go Global adalah pelatihan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM terpilih agar mampu memasarkan produknya secara global. BRI bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) mengadakan kegiatan pelatihan ekspor ini. Kegiatan Enhancement Go Global yang telah dilakukan di 2019 adalah sebagai berikut

No	Tempat	Pelaksanaan	Peserta
1	Malang	23-25 April 2019	30
2	Solo	10-12 September 2019	30
3	Makassar	23-25 Oktober 2019	30
4	Bukit Tinggi	5-7 November 2019	30
5	Bandung	12-14 November 2019	30

Clustering UMKM

Penyusunan perencanaan *clustering* debitur UMKM BRI guna membantu nasabah dalam mengakses pasar, berpromosi, dan mencari pembeli. Selain itu, tujuan dari pembentukan *clustering* UMKM adalah juga untuk *financial close system*, dimungkinkan adanya *off taker/avalist*, serta pembinaan dan pengembangan yang lebih fokus sesuai segmen. BRI membagi *clustering* UMKM berdasarkan sektor ekonomi dan atau komoditas, wilayah, kesamaan usaha, serta latarbelakang pelaku UMKM.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

STRUKTUR BISNIS

BISNIS MIKRO

- BISNIS MIKRO
- LAYANAN BRILINK
- BISNIS PROGRAM

Bisnis Mikro dan Bisnis Program ditujukan untuk melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan nasabah individual dan pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat.

BISNIS RITEL

- BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL KOMERSIAL & MENENGAH
- BISNIS PINJAMAN KONSUMER
- BISNIS SIMPANAN RITEL
- BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain melalui produk dan layanan perbankan konsumen dan komersial.

BISNIS KORPORASI

- BISNIS KORPORASI BUMN
- BISNIS DANA INSTITUSI & *TRANSACTION BANKING*
- BISNIS KORPORASI NON BUMN
- BISNIS SINDIKASI & JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
- BISNIS INTERNASIONAL
- BISNIS TREASURY
- BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Segmen Bisnis Korporasi BRI melayani korporasi besar dan institusi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN yang memberikan *trickle down business* bagi segmen UMKM, dengan menyediakan rangkaian lengkap produk kredit dan simpanan serta jasa perbankan meliputi layanan perbankan internasional, treasury dan jasa penunjang pasar modal. Selain itu segmen bisnis ini melakukan pinjaman sindikasi dan pemberian fasilitas *limit committed* dan *uncommitted* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam negeri.

BISNIS ENTITAS ANAK

- PT BANK BRISYARIAH – BRISYARIAH
- PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK – BRI AGRO
- PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA – BRI FINANCE
- PT ASURANSI BRI LIFE – BRI LIFE
- BRI REMITTANCE CO. LTD. – BRI REMITTANCE
- PT BRI VENTURA INVESTAMA – BRI VENTURE
- PT DANAREKSA SEKURITAS
- PT BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR – BRINS

Aktivitas bisnis Entitas Anak meliputi perbankan konvensional dan syariah, layanan pembiayaan, layanan remitansi, asuransi jiwa, modal ventura dan sekuritas.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS MIKRO

Direktorat Bisnis Mikro

Sebagai bagian dari pencapaian strategi jangka Panjang BRI yaitu meningkatkan komposisi kredit Mikro menjadi 40% di tahun 2022, maka selama tahun 2019 Direktur Bisnis Mikro memastikan tercapainya sasaran kinerja bisnis mikro berupa peningkatan *volume* bisnis segmen Mikro, terjaganya kualitas kredit Mikro serta terlaksananya implementasi inisiatif strategis untuk segmen Mikro sehingga tercapai profitabilitas yang berkelanjutan.

RINGKASAN

Outstanding Pinjaman Bisnis Mikro mencapai

Rp329,54 triliun

meningkat **13,00%**

dibanding tahun 2018 sebesar Rp291,62 triliun.

Simpanan Bisnis Mikro mencapai

Rp296,56 triliun

meningkat **9,17%**

dibanding tahun 2018 sebesar Rp271,65 triliun.

Dana Murah (CASA) Bisnis Mikro tercatat sebesar 84,6% dari total Simpanan Mikro.

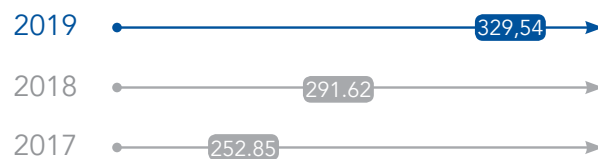
Laba Bisnis Mikro mencapai

Rp18,64 triliun

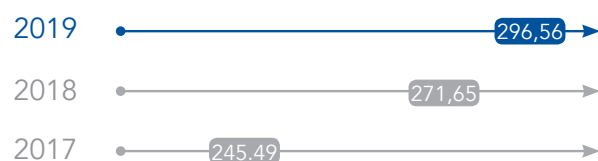
meningkat **8,54%**

dibanding tahun 2018 sebesar Rp17,17 triliun.

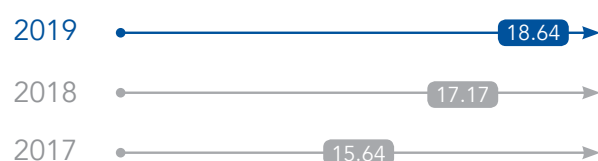
Pinjaman Bisnis Mikro
(Rp Triliun)



Simpanan Bisnis Mikro
(Rp TRILIUN)



Laba Bisnis Mikro
(Rp TRILIUN)



BISNIS MIKRO

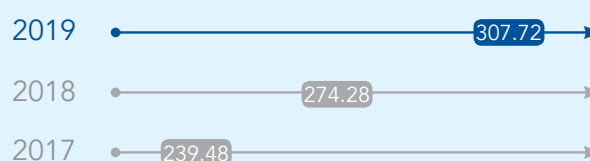
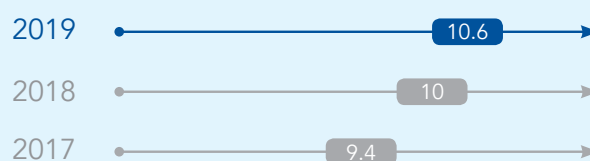
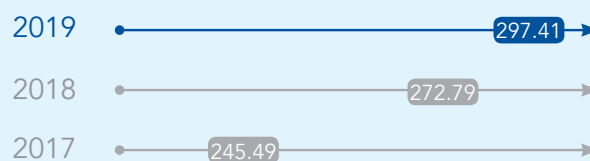
BISNIS MIKRO (INDIVIDUAL)

RINGKASAN

Kredit Mikro mencapai
Rp307,72 triliun
meningkat **12,19%**
dibanding tahun 2018
sebesar Rp274,28 triliun.

Kredit Mikro tersalurkan
kepada **10,6** juta
pengusaha mikro di seluruh
Indonesia.

Simpanan Mikro mencapai
Rp297,41 triliun
meningkat **9,02%**
dibanding tahun 2018
sebesar Rp272,79 triliun.

Kredit Mikro
(RP TRILIUN)Debitur Mikro
(RP TRILIUN)Simpanan Mikro
(RP TRILIUN)

BRI berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro di Indonesia melalui pembiayaan Bisnis Mikro. Bisnis Mikro BRI turut pula membantu dalam mensukseskan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, serta pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, Kredit Mikro BRI mencapai **Rp307,72 triliun** pada tahun 2019 atau tumbuh **12,19%** (yoy) dibanding tahun 2018 yang sebesar **Rp274,28 triliun**. Kredit Mikro BRI tersebut disalurkan kepada 10,6 juta pengusaha mikro di seluruh Indonesia.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS MIKRO

PROGRAM & STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2019

Segmen mikro senantiasa menjadi pilar utama bisnis kredit BRI karena potensi pembiayaannya yang masih cukup besar di Indonesia. Selain memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melayani segmen ini, BRI juga meyakini Bisnis Mikro sudah teruji ketahanannya, bahkan dikondisi siklus ekonomi yang kurang kondusif sekali pun. BRI telah melakukan transformasi digital diseluruh proses Bisnis Mikro guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan upaya BRI memujudkan visi menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia*. Oleh karena itu, BRI telah melakukan inisiatif strategis BRIVOLUTION melalui *re-engineering* proses bisnis pinjaman melalui implementasi BRISPOT di segmen Bisnis Mikro.

BRISPOT Mikro telah dijalankan secara terencana dengan metode pengembangan yang *agile* dan mengedepankan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dimulai dari fase *strategic assessment, design clinic, prototyping, continuous interaction*, uji coba sampai akhirnya dilaksanakan *roll out* secara nasional yang perkembangannya senantiasa dipantau oleh *Steering Committee*.

Beberapa strategi BRI untuk meningkatkan Bisnis Mikro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan operasional yang bersumber dari pendapatan bunga maupun non bunga melalui:
 - a. Kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka penjualan produk asuransi kerugian kepada *existing customer* dan *new customer* untuk meningkatkan *Fee Based Income (FBI)*.
 - b. Melakukan *redesign* produk tabungan Simpedes sesuai kebutuhan pasar untuk menambah jumlah nasabah dan volume simpanan.
 - c. Melakukan *review* kebijakan penanganan kualitas kredit mikro dan peningkatan *recovery*.
 - d. Melakukan pengembangan produk pinjaman Kupedes Ekstra Cepat (KECE) dengan target market pengusaha mikro yang membutuhkan pinjaman maksimal Rp5 juta.
2. Melakukan penyempurnaan bisnis proses yang efektif dan efisien dengan cara :
 - a. Melakukan pengembangan bisnis model serta penyempurnaan proses bisnis untuk layanan fitur produk pinjaman dan simpanan.
 - b. Melakukan *review* dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung penyederhanaan proses bisnis.
 - c. Melakukan optimalisasi bisnis baik dari *existing customer* maupun *non existing customer* melalui konsep *integrated marketing* dan *value chain*.
 - d. Meningkatkan kapabilitas dan pemahaman tenaga pemasar dalam penguasaan produk dan layanan jasa keuangan.
3. Melakukan pemasaran secara agresif yang di dukung dengan program pemasaran yang tepat sasaran melalui Simpedes Hadiah Langsung, Aktivasi Rekening Dormant, Pasar Ramadhan Simpedes dan Pesta Rakyat Simpedes.
4. Melakukan peningkatan kapabilitas masyarakat dan pengusaha UMKM melalui :
 - a. Program inkubasi (pelatihan/edukasi, pendampingan dan pembiayaan) kepada pengusaha UMKM dan *start-up* baik kepada nasabah *existing* maupun masyarakat umum.
 - b. Pengembangan Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai media/wadah dalam rangka pelatihan, pendampingan serta kegiatan produktif lainnya.
 - c. Mendorong terciptanya komunitas UMKM binaan BRI yang berorientasi ekspor melalui *platform digital* BRI Indonesia Mall sebagai *partner place* untuk UMKM.

Implementasi BRISPOT di segmen bisnis Mikro terbukti dapat mempercepat waktu proses pelayanan pinjaman dari sebelumnya rata-rata 5 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 hari. Dari aspek produktivitas, *re-engineering business process* tersebut mampu meningkatkan produktivitas per Mantri sekitar 20% karena Mantri mampu melayani nasabah lebih banyak dan lebih cepat. Selain itu, BRISPOT Mikro juga telah dilengkapi dengan fitur mitigasi risiko terbaik di kelasnya, sehingga monitoring nasabah kredit mikro dapat dilakukan dengan lebih baik.

BISNIS MIKRO

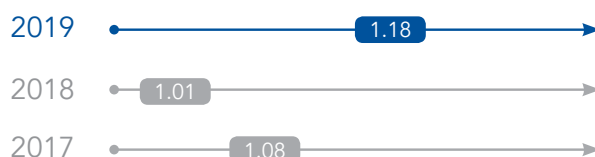
KINERJA BISNIS MIKRO TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Bisnis Mikro mencatat pencapaian kinerja positif melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang sesuai.

Kinerja Pinjaman Mikro

Kredit Mikro BRI mencapai **Rp307,72 triliun** di tahun 2019 atau tumbuh **12,19% (yoy)** dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar **Rp274,28 triliun**. Jumlah debitur juga menunjukkan peningkatan dari sebelumnya 9,9 juta debitur menjadi 10,6 juta debitur. Pertumbuhan kredit mikro tersebut tetap dapat diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga. Tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) kredit mikro BRI tercatat tetap pada kisaran 1% dalam tiga tahun terakhir.

NPL Bisnis Mikro (%)



Kinerja Simpanan Mikro

Dana pihak ketiga (DPK) Bisnis Mikro tercatat sebesar **Rp297,41 triliun** di tahun 2019, meningkat **9,02%** dari tahun 2018 sebesar Rp272,79 triliun. Sedangkan porsi CASA Bisnis Mikro tercatat tetap mendominasi, sebesar **84,42%** dari total DPK Bisnis Mikro di tahun 2019.

Dari sisi operasional, dengan 7.568 outlet mikro yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI mampu melayani kebutuhan produk dan layanan perbankan nasabah mikro. Bahkan, dengan melihat kebutuhan nasabah, BRI telah menambah 1 Teras Kapal untuk melayani nasabah di wilayah Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sehingga secara total jaringan layanan mikro BRI terdiri dari 5.382 BRI Unit, 2.049 Teras BRI, 133 Teras Mobile (38 diantaranya berupa kendaraan 4WD untuk menjangkau nasabah di wilayah pegunungan), dan 4 Teras Kapal untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat di kawasan pesisir. Bahkan, selain memberikan layanan reguler, Teras BRI/Mobile/Kapal telah berperan memulihkan layanan perbankan di daerah yang mengalami bencana selama tahun 2019.

Dalam strategi pengembangan layanan, selain melalui optimalisasi jaringan kantor yang telah dimiliki BRI, BRI juga tetap konsisten mengembangkan jaringan Agen BRILink. Melalui Agen BRILink, yang per Desember 2019 telah mencapai 422.160 agen bertambah 20.610 agen dari tahun sebelumnya sebanyak 401.550 agen, layanan perbankan BRI akan semakin mudah diakses oleh para nasabah-nya, sehingga diharapkan akan semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia.





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS MIKRO

Outlet	2017	2018	2019
BRI Unit	5.382	5.381	5.382
Teras BRI/Teras Kantor	2.536	2.069	2.049
Teras Mobile/Teras Keliling	635	133	133
Teras Kapal	3	3	4
Total	8.556	7.586	7.568
Agen BRILink	279.750	401.550	422.160

INOVASI PRODUK PINJAMAN (KREDIT EKSTRA CEPAT/KECE)

Menangkap potensi pembiayaan dengan nominal yang tidak besar, jangka waktu yang pendek, serta kemudahan mendapatkan pinjaman, BRI melakukan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Produk pinjaman KECE merupakan pinjaman mikro dengan plafond sampai dengan Rp5 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal 6 bulan. Persyaratan yang diberikan mudah, serta tidak memerlukan agunan dengan angsuran yang fleksibel (harian dan mingguan).

INOVASI PRODUK SIMPANAN (TEMAN SIMPEDES)

Merupakan fasilitas tambahan dari rekening tabungan simpedes berupa wadah terkunci yang digunakan nasabah sebagai sarana menabung, yang hanya bisa dibuka menggunakan *Universal Key* yang dipegang oleh Agen BRILink. Uang yang terkumpul di Teman Simpedes tersebut kemudian disetorkan secara rutin (bulanan) ke rekening tabungan BRI Simpedes nasabah melalui Agen BRILink.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Keberadaan Bisnis Mikro BRI juga merupakan dukungan BRI dalam menyukseskan program pemerintah, baik dalam hal peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Untuk meningkatkan literasi dan Inklusi keuangan, Bisnis Mikro BRI telah memasarkan produk *Basic Saving Account* (BSA) untuk masyarakat. Produk dimaksud adalah Tabunganku yang meningkat menjadi 8,5

juta rekening dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,6 juta rekening dan tabungan Simpanan Pelajar yang bertambah menjadi 22,9 juta rekening dari sebelumnya 16,45 juta rekening di tahun 2018.

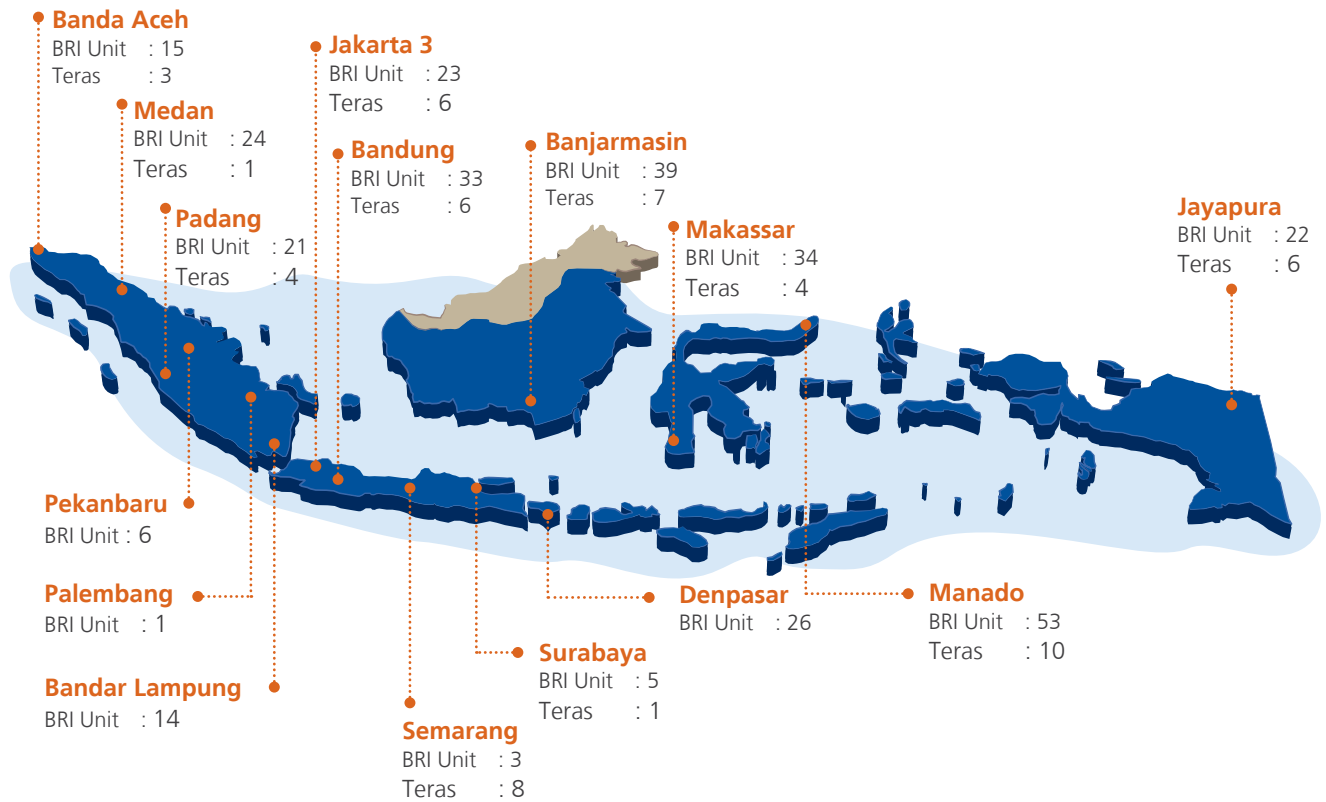
Sedangkan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah 3T, BRI menyediakan layanan Unit Kerja Operasi (UKO) Mikro *Remote Area*. Kriteria-kriteria UKO BRI adalah:

- Jarak antara Kanca Induk dengan UKO terbilang jauh dengan waktu tempuh ≥ 2 jam perjalanan.
- Akses ke lokasi UKO sulit seperti harus melewati wilayah perairan, perbukitan, hutan, dan lain sebagainya.
- Belum memadainya transportasi umum seperti tidak setiap waktu ada dan beroperasi. Sampai dengan tahun 2019, BRI telah memiliki 375 unit kerja *remote area* yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, BRI juga melayani nasabah di *remote area* melalui layanan Teras Kapal yang dilengkapi fasilitas layanan perbankan digital berbasis satelit (BRIsat). Bahkan pada tahun 2019, BRI telah menambah 1 Teras Kapal, yaitu Teras BRI Kapal Bahtera Seva IV untuk dioperasikan di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal bank tersebut akan beroperasi di Pulau Tarempa, Bayat, Lingai, Telaga Besar, Keramut dan Letung. Sehingga saat ini, secara total BRI telah memiliki 4 Teras Kapal yang melayani wilayah Kepulauan Seribu, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Halmahera Selatan dan Kepulauan Anambas.

Namun layanan Teras Kapal tidak hanya mencari basis nasabah baru, melainkan juga memiliki tujuan sosial. Salah satunya seperti dilakukan Teras Kapal Bahtera Seva III, dimana BRI memberi layanan rumah kreatif untuk melayani nasabah dari kalangan usaha mikro.

UKO Mikro Remote Area tahun 2018



Rute Operasional Teras Kapal BRI





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS MIKRO

STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2020

Target Bisnis Mikro BRI untuk tahun 2020 adalah memperkuat dan mempertahankan posisi BRI sebagai *market leader* di bisnis mikro di Indonesia. BRI menyadari kompetisi di bisnis mikro semakin ketat dimana persaingan tidak saja dilakukan dengan perbankan lainnya, namun juga dengan *fintech company* berupa *peer to peer lending* yang berbasis teknologi.

BRI optimis untuk mencapai target jangka panjang BRI berupa komposisi kredit mikro sebesar 40% dari total kredit. Hal ini didukung oleh pengalaman BRI selama puluhan tahun dalam melayani segmen mikro, ribuan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, proses bisnis yang semakin baik didukung dengan kapabilitas digital yang handal serta sumber daya manusia yang mumpuni dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, strategi Bisnis Mikro BRI di tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pola kerja Mantri.
2. Rejuvenasi produk *asset liabilitis*.
3. Pengembangan produk dan layanan baru untuk segmen baru.
4. Peningkatan kapabilitas SDM.
5. *Enhancement* BRISPOT (*Fitur collection, Credit Scoring*).
6. Membangun *customer based* masa depan melalui optimalisasi fungsi *social entrepreneurship* dan inkubasi.
7. Penguatan *management information system* (MIS).
8. Menjalankan strategi inisiatif “*Road to Micro-Business Sustainable Growth*” yang terbagi menjadi 4 (empat) inisiatif sebagai berikut:
 - a. Inisiatif Produk
 - b. Inisiatif Proses Bisnis
 - c. Inisiatif SDM Mikro
 - d. Inisiatif Pemberdayaan

LAYANAN BRILINK

RINGKASAN

Jumlah Agen BRILink mencapai **422.160** Agen bertambah 20.610 Agen dibanding tahun 2018 sebanyak 401.550 Agen.

Volume transaksi Finansial BRILink mencapai **Rp672,61** triliun meningkat 31,19% dibanding tahun 2018 sebesar Rp512,69 triliun.

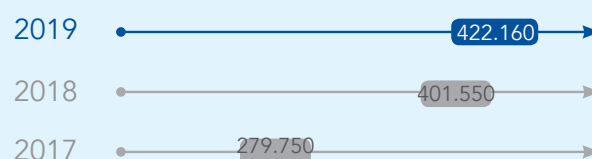
Fee Based Income BRILink mencapai **Rp788,71** miliar meningkat 75,73% dibanding tahun 2018 sebesar Rp448,82 miliar.

CASA BRILink mencapai **Rp8,43** triliun meningkat 53,23% dibanding 2018 sebesar Rp5,5 triliun

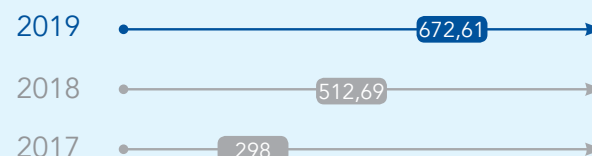
Jumlah transaksi BRILink mencapai **521,32** juta transaksi, meningkat 37,65% dibanding 2018 sebesar 378,72 juta transaksi.

Mendukung program Pemerintah antara lain inklusi keuangan di daerah 3T, Penyaluran Kartu Tani, Sinergi Agen BRILink dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Program Penyaluran BPNT.

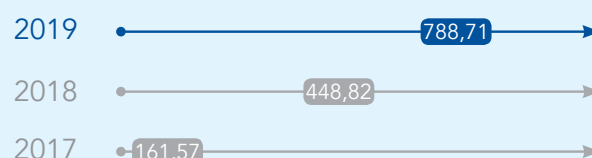
Jumlah Agen BRILink



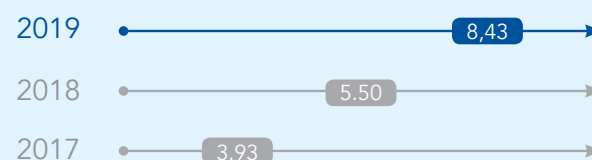
Volume Transaksi BRILink (Rp Triliun)



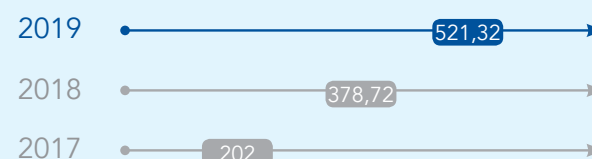
Fee Based Income BRILink (Rp Miliar)



CASA BRILink (Rp Triliun)



Jumlah Transaksi BRILink (Rp Juta)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

LAYANAN BRILINK

BRILINK

BRILink merupakan layanan *branchless banking* BRI untuk melayani masyarakat bertransaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital). BRI bekerja sama dengan nasabahnya untuk menjadi Agen yang dapat melayani transaksi perbankan secara *online* dengan menggunakan berbagai *device* seperti *Electronic Data Capture* (EDC) maupun ponsel pintar. Melalui BRILink, BRI terus mendorong peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat *unbankable* di sekitarnya selain itu BRILink juga telah meningkatkan tambahan pendapatan dan omzet usaha para Agen BRILink. Hal tersebut membuktikan komitmen BRI menjadikan BRILink sebagai *One Stop Financial Solution* yang menunjang inklusi keuangan.

BRILink yang diluncurkan sejak 2014 ini perkembangannya melesat baik dari sisi jumlah agen maupun transaksinya. Peningkatan pesat kinerja BRILink membuktikan BRI fokus dalam mengawal bisnis keagenan. Adanya *Sharing Fee* yang saling menguntungkan dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada layanan keuangan Agen BRILink turut mendukung perkembangan kinerja bisnis BRILink.

STRATEGI BRILINK TAHUN 2019

Untuk tahun 2019, maka tujuan BRILink adalah optimalisasi potensi bisnis dari BRILink, sehingga strategi yang diambil adalah:

1. BRI memperluas jangkauan Agen BRILink ke lebih banyak lapisan masyarakat terutama segmen mikro. BRI juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat *unbankable* di sekitarnya.
2. Meningkatkan peranan Agen BRILink sebagai *pipeline* untuk bisnis mikro BRI, seperti peranan sebagai referral pinjaman maupun simpanan mikro
3. Meningkatkan *fee-based income* dari Agen BRILink, misalnya peningkatan transaksi perbankan melalui agen ataupun *cross selling* berupa pemasaran Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan & Meninggal Dunia (AMKKM)
4. Bekerjasama dengan institusi lainnya seperti *startup company* untuk pengembangan fitur seperti pengembangan pulsa dengan denominasi kecil Artajasa, Belanja elektronik Dinomarket, dan General Trading Bukalapak dan Pembayaran transaksi Tokopedia

Selain itu BRILink juga semakin mengembangkan operasional proses bisnisnya di 2019, melalui:

1. Penyempurnaan pembukaan rekening Tabungan BSA, sehingga proses menjadi lebih sederhana dan cepat.
2. Mengembangkan aplikasi dan tata kelola EDC Android BRILink
3. Mengembangkan layanan yang bersinergi dengan BUMN dan pemerintah, yaitu Pegadaian, Asuransi (Rumah, tempat usaha, CIS, CIT dan Lentera Mikro) dan Link Aja

KINERJA BRILINK TAHUN 2019

BRILink terus tumbuh baik dari jumlah agen maupun transaksi. Tahun 2019, tercatat jumlah agen mencapai 422.160 Agen. Di antara jumlah agen BRILink tersebut, sebanyak 123.295 agen menggunakan perangkat EDC dan 298.865 agen menggunakan perangkat *mobile phone*. Jumlah transaksi finansial mencapai 521 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp672,61 triliun. Peningkatan profitabilitas BRILink ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan FBI yang mencapai Rp789 miliar. Selain itu, BRILink juga meningkatkan perolehan CASA sebesar Rp8,4 triliun. BRILink juga turut memasarkan Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan & Meninggal Dunia (AMKKM) dengan premi hanya Rp 50.000 per tahun.

LAYANAN BRILINK

STRATEGI PENGEMBANGAN BRILINK TAHUN 2020

Untuk tahun 2020, BRILink akan terus melanjutkan strategi perluasan *delivery channel* dengan fokus terhadap kualitas Agen BRILink dengan memanfaatkan teknologi BRIsat. Sehingga dapat menjangkau daerah yang belum didukung layanan provider dan akan dilakukan standarisasi perangkat Agen berbasis Android.

Dengan kemudahan dalam pembukaan rekening simpanan dan *referral* pinjaman pada Aplikasi BRILink, Agen BRILink sebagai solusi ekosistem finansial mikro dapat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran yang lengkap bagi masyarakat mikro. BRI berkomitmen terus meningkatkan *availability* layanan perbankan dan keuangan dengan *coverage* desa sebesar 69,18% dari total desa di Indonesia. Selanjutnya, BRILink juga akan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menambah fitur produk dan memaksimalkan kolaborasi kerjasama dengan *Startup* yang memiliki layanan dan produk bernilai jual serta dibutuhkan masyarakat seiring penetrasi bisnis digital. Dalam standarisasi perangkat Agen berbasis android akan dilakukan implementasi standar perangkat baru EDC Android

DUKUNGAN BRILINK TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRILink turut berperan serta dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan inklusi, literasi keuangan dan pemerataan ekonomi masyarakat antara lain sebagai berikut:

- **Kementerian Pertanian**
Dalam penyaluran Kartu Tani, Agen BRILink dipercaya sebagai penyalur pupuk bersubsidi dan transaksi perbankan lain menggunakan Kartu Tani. Penggunaan Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap, juga berperan sebagai agen Laku Pandai. Selama tahun 2019 BRI telah menyalurkan 3.246.109 Kartu Tani kepada seluruh petani di Indonesia. Penyaluran Kartu Tani dibarengi dengan pemberdayaan kios pupuk penyalur pupuk bersubsidi, sebagai Agen BRILink sehingga dapat melayani transaksi perbankan lain menggunakan Kartu Tani. Pada tahun 2019, ada sebanyak 6.152 Agen Kios Pupuk Lengkap.
- **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**
Sebagai upaya menghadirkan *One Stop Services* di Desa, BRI bersinergi dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Salah satu yang dilakukan yaitu menjadikan BUMDES sebagai Agen BRILink. Pada tahun 2019 sebanyak 9.252 Bumdes telah dijadikan Agen BRILink.
- **Kementerian Sosial**
Sebagai *Agent of Development*, BRI diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan secara non tunai dimana pencairannya dapat dilakukan melalui Agen BRILink sebagai penyalur bantuan. Selama tahun 2019, terdapat 57.303 Agen BRILink telah membantu penyaluran BPNT.
- **Inklusi Keuangan**
BRILink berupaya mewujudkan inklusi keuangan berbasis teknologi digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan BRIsat pada 406 agen BRILink di pedalaman. Sampai dengan tahun 2019 BRILink telah menjangkau 51.661 desa atau 69,18% dari total desa di Indonesia. Dengan terbukanya akses keuangan yang lebih luas, pelaku usaha mikro dapat mengakses layanan perbankan sampai ke pelosok desa. BRILink turut pula mendorong masyarakat sekitar untuk menabung melalui Teman Simpedes.
- **Dukungan terhadap perekonomian**
BRILink mendorong perekonomian masyarakat sekitar dengan me-*referral* pinjaman BRI, yaitu KUR dan Kupedes kepada UMKM untuk kredit modal kerja dan kredit investasi.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PROGRAM

RINGKASAN

Outstanding Pinjaman Bisnis Program mencapai

Rp21,81 triliun

meningkat **25,82%**

dibanding tahun 2018 sebesar Rp17,34 triliun.

Outstanding Kredit Pangan mencapai

Rp4,70 triliun

meningkat **26,29%** dibanding 2018

sebesar Rp3,72 triliun. Sedangkan penyaluran kredit resi gudang subsidi mencapai Rp14,75 miliar.

Pada tahun 2019, BRI telah

menyalurkan KUR sebesar **Rp87,89** triliun kepada 4,07 juta debitur

meningkat sebesar **9,73%** dari Rp80,18 triliun di tahun 2018.

BRI senantiasa berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, pemerataan pembangunan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberian layanan perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

BRI merupakan salah satu bank penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan manfaat antara lain mempercepat pengembangan usaha sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pembiayaan sesuai dengan program Nawacita.

Salah satu indikator keberhasilan penyaluran kredit kepada sektor UMKM adalah adanya peningkatan skala usaha dari debitur tersebut, yang oleh bank diukur melalui adanya penambahan fasilitas kredit yang mencerminkan perkembangan skala usaha.

PRODUK DAN JASA BISNIS PROGRAM

BRI selalu berupaya dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung berbagai kalangan. Dalam pelaksanaannya, BRI memberikan pelayanan melalui produk dan jasa sebagai berikut:

- **KUR Mikro**
KUR Mikro bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro yang bergerak di sektor produktif (non-perdagangan) maupun non produktif (perdagangan). Skema pinjaman KUR Mikro terdiri dari modal kerja dan kredit investasi dengan penjaminan kredit yang disediakan untuk pengembangan usaha mikro. Target nasabah meliputi pemilik bisnis perseorangan dengan maksimum plafond kredit sebesar Rp25 juta. Pinjaman ini disubsidi pemerintah dan dijamin oleh asuransi kerugian kredit dari perusahaan asuransi BUMN.
- **KUR Kecil**
KUR Kecil memberikan layanan sama dengan KUR Mikro namun untuk pengusaha dengan skala usaha yang lebih besar, dengan maksimum plafond sebesar Rp500 juta.

BISNIS PROGRAM

- **KUR TKI**
 KUR TKI merupakan program bantuan pemerintah untuk TKI yang memiliki usaha sampingan di lokasi domisili asal TKI tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup TKI serta menyediakan lapangan kerja sebagai persiapan menjelang masa tidak produktif bekerja di luar negeri.
- **Kredit Pangan**
 Kredit Pangan bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan dan kemaritiman serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia, BRI memberikan produk Kredit Pangan untuk mengakomodir pengembangan bisnis dalam kebutuhan pangan dilapangan serta untuk penguatan sektor produksi.
- **Kredit Resi Gudang**
 Kredit Resi Gudang merupakan program pinjaman untuk membantu petani yang memiliki persediaan yang dapat dijaminkan dalam jangka pendek.
- **Pinjaman Kemitraan**
 Pinjaman Kemitraan merupakan pinjaman dengan suku bunga lunak yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat *unbanked* yang memiliki usaha produktif dan potensi pengembangan. Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada mitra binaan penerima pinjaman kemitraan.
- **Kartu Tani**
 Kartu Tani merupakan kartu multi fungsi yang berguna sebagai kartu identitas serta kartu layanan keuangan. Para petani yang telah memiliki kartu tani yang telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL).

SEKTOR INDUSTRI BISNIS PROGRAM

BRI berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI kepada pemerintah untuk menyalurkan ke Sektor Produksi (Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Jasa).



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PROGRAM



STRATEGI BISNIS PROGRAM TAHUN 2019

Strategi pengembangan Bisnis Program selama tahun 2019 antara lain:

- Mengembangkan program pemasaran berbasis komoditi pertanian.
- Pengembangan/evaluasi kapabilitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui program *in house training* dan *workshop*.
- Optimalisasi *value chain* internal dan eksternal dengan melakukan penyelarasan potensi *trickle down business*.
- Menjalankan program pemasaran tematik penyaluran kredit pangan.

KINERJA BISNIS PROGRAM TAHUN 2019

Pada tahun 2019, *outstanding* pinjaman Bisnis Program sebesar **Rp21,81** triliun **meningkat 25,78%** dari tahun 2018 sebesar Rp17,34 triliun. Pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keberhasilan Penyaluran KUR

BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp87,89 triliun kepada 4,07 juta debitur pada 2019. Sejak tahun 2015 total penyaluran KUR BRI mencapai Rp323,344triliun kepada 16,64 juta debitur. Hal ini sebagai bukti keseriusan BRI dalam mengembangkan sektor UMKM Indonesia.

BISNIS PROGRAM

Pencapaian tersebut merupakan dukungan dari strategi yang dijalankan antara lain, tersedianya tenaga pemasar khusus KUR yaitu Mantri untuk KUR Mikro dan RM Pangan untuk KUR Kecil, serta implementasi BRISpot. Penyaluran KUR tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian pemberian kredit sehingga kualitas kredit tetap terjaga.

2. Outstanding Kredit Pangan dan Resi Gudang

Outstanding Kredit Pangan tahun 2019 tumbuh sebesar Rp4,70 triliun atau meningkat 26,29% dari tahun 2018 sebesar Rp3,72 triliun. Sedangkan penyaluran Kredit Resi Gudang subsidi mencapai Rp14,75 miliar.

3. Terjaganya Kualitas Aset

BRI senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kualitas pinjaman. Hal ini terlihat dari tingkat NPL Pinjaman Bisnis Program yang terjaga di kisaran 1% selama tiga tahun terakhir.

BRI juga berhasil mencapai komitmennya dalam rangka fokus melakukan penetrasi dan pengembangan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tercermin dari peningkatan fasilitas kredit debitur atau biasa disebut “naik kelas” sebagai salah satu indikator keberhasilan penyaluran kredit di segmen UMKM. Penambahan fasilitas kredit diasumsikan sebagai peningkatan skala usaha dari debitur. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 378.588 debitur KUR Mikro (plafond sampai dengan Rp25 juta) meningkat menjadi debitur Kupedes (plafond sampai dengan Rp250 juta).

STRATEGI & PENGEMBANGAN BISNIS PROGRAM TAHUN 2020

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnis program di tahun 2020, terdapat beberapa strategi dan pengembangan, antara lain:

1. Akselerasi KUR Kecil

Penetapan sebaran alokasi, model bisnis dan integrasi monitoring penyaluran KUR dengan program pemberdayaan UMKM

2. BRISPOT KUR Kecil

Utilisasi BRISPOT KUR Kecil tahun 2020 untuk mengakselerasi proses prakarsa dan putusan.

3. Klaster

Pembentukan Klaster melalui pemanfaatan RKB dan Kewirausahaan Pertanian. UMKM Naik Kelas Yang berasal dari Pinjaman Kemitraan naik kelas, Mekaar naik kelas dan KUR Mikro naik kelas.

4. BRIncubator

Meningkatkan kualitas literasi melalui program inkubasi (BRIncubator) yang lebih terintegrasi.

5. Potensi Customer Base

Menjadikan inisiatif program Pemerintah/ Kementerian/ lembaga (Bansos, KWP, Perhutanan Sosial, Kartu Tani, KUSUKA, BUMDES, Desmigratif, RKB) sebagai potensi *customer base* segmen mikro masa depan.

6. Dashboard Monitoring

Pengembangan dashboard monitoring ukuran keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan pemberdayaan UMKM.

7. Mobile Apps UMKM Smart

Digitalisasi pemberdayaan UMKM yang dilengkapi dengan self assessment, modul pelatihan, kalender inkubasi serta *report & tracking*.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS RITEL

RINGKASAN

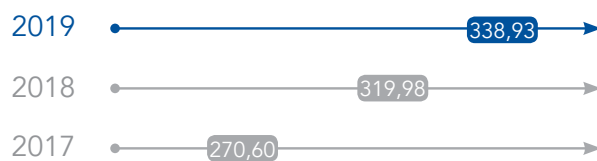
Outstanding Bisnis Pinjaman Ritel mencapai **Rp338,93 triliun**, meningkat 5,92% dibanding tahun 2018 sebesar Rp319,98 triliun.

Simpanan Bisnis Ritel mencapai **Rp374,45 triliun**, meningkat **9,7%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp341,33 triliun

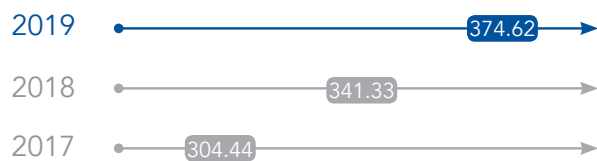
Fee Based Income Bisnis Ritel mencapai **Rp8,19 triliun**, meningkat **20,69%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp6,79 triliun

Profitabilitas Bisnis Ritel mencapai **Rp11,41 triliun**, meningkat **7,43%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp10,62 triliun

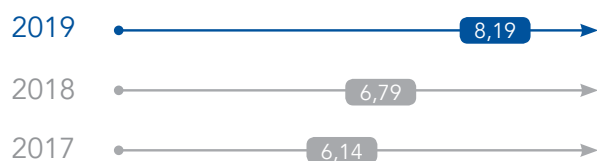
PINJAMAN BISNIS RITEL (Rp Triliun)



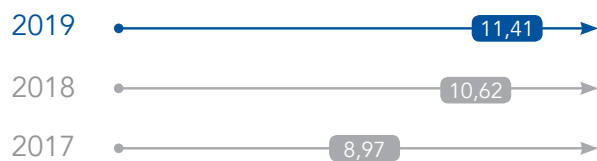
SIMPANAN BISNIS RITEL (Rp Triliun)



FEE BASED INCOME BISNIS RITEL (Rp Triliun)



LABA BISNIS RITEL (Rp Triliun)



BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL DAN MENENGAH

Direktorat Bisnis Kecil, Ritel & Menengah

Sebagai salah satu segmen andalan BRI, maka Direktorat Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah terus fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas, didukung dengan berbagai strategi bisnis yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, seperti pengembangan produk Kredit Dinamis, kerjasama dengan *fintech*, optimalisasi *trickle down business* maupun *early warning system* untuk memastikan peningkatan kualitas kredit. Keberhasilan implementasi strategi tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit kecil, ritel, & menengah serta tercapainya profitabilitas untuk segmen ini.

RINGKASAN

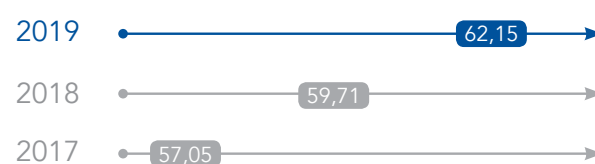
Outstanding Pinjaman Kecil, Ritel dan Menengah mencapai

Rp **198,42** triliun,
meningkat **4,91%** dibandingkan
tahun 2018 sebesar Rp189,13 triliun.

PINJAMAN KECIL, RITEL DAN MENENGAH (Rp Triliun)



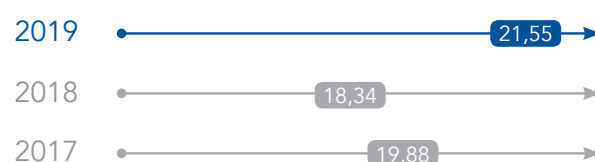
PINJAMAN KECIL (Rp Triliun)



PINJAMAN RITEL (Rp Triliun)



PINJAMAN MENENGAH (Rp Triliun)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PRODUK BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH

BRI melalui Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah antara lain:

1. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha dalam rangka proses produksi atau tambahan modal kerja. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis debitur; dan *New Account Sweep*.

2. Kredit Investasi

Fasilitas kredit produktif dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, atau penggantian biaya perolehan (*refinancing*) barang modal. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.

3. Kredit Mitra/Supply Chain Financing

- KMK *Pre-Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
- KMK *Post Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai pengambilalihan piutang atas tagihan penyelesaian proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
- KMK Distributor (*Distributor Financing*) adalah fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/agen, khusus untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
- Kredit Investasi Mitra adalah fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, termasuk *refinancing* aktiva tetap dalam rangka mendukung operasional bisnis mitra Perusahaan Inti rekanan BRI.

Produk-produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan antara lain:

- Suku bunga dan biaya kredit menarik.
- Relaksasi agunan dan Sharing Dana Sendiri.
- Operasionalisasi secara digital melalui Modul *Supply Chain* pada *Cash Management System* BRI.

4. Kredit Dinamis

Kredit Dinamis adalah Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi dengan fitur berupa insentif suku bunga kredit yang berubah dinamis secara otomatis setiap bulan, berdasarkan penyaluran transaksi keuangan dan *performance* Giro BRI debitur pada bulan sebelumnya. Keunggulannya memiliki suku bunga kredit yang lebih menarik dibanding kredit konvensional dan *New Account Sweep*.

5. Kredit Ritel Dengan Pola Angsuran Tetap

Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen ritel dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap. Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:

- Jangka waktu kredit hingga 5 tahun.
- Maksimal angsuran adalah 80% dari RPC.

6. Bank Garansi Online

Bank Garansi (BG) *online* adalah fitur pengajuan Bank Garansi serta monitoring Bank Garansi BRI secara *online* dan digital pada *Cash Management System* BRI. Produk ini memiliki keunggulan, yaitu:

- Pengajuan Bank Garansi secara *online* dan digital melalui CMS BRI, tanpa perlu datang langsung ke unit kerja BRI.
- *Bouwheer* dapat melakukan konfirmasi dan monitoring keabsahan dan jatuh tempo Bank Garansi melalui CMS BRI tanpa perlu konfirmasi manual ke unit kerja BRI.

7. KMK Accepted Invoice BPJS Kesehatan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Faskes untuk pengambilalihan tagihan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan *invoice* yang telah disetujui. Keunggulannya sebagai berikut:

- Pembiayaan sebesar 100% dari nilai *Invoice*.
- Tanpa agunan tambahan.

8. Invoice Financing melalui Platform Investree (Fintech Peer To Peer Lending)

BRI melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology* (fintech) antara lain dalam penyaluran *invoice financing* dengan skema kerjasama yang dilakukan melalui *platform online*

PRODUK BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH

di <https://www.investree.id>. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya:

- Prosedur pelayanan kredit secara digital dan cepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Biaya kredit relatif murah
- Tanpa agunan tambahan

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH TAHUN 2019

Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel dan Menengah memiliki sejumlah strategi dan program dalam upaya mencapai target yang ditentukan. Strategi yang dijalankan telah memperhitungkan banyak faktor seperti kondisi ekonomi, target pasar, maupun peluang bisnis. Sepanjang tahun 2019, strategi dan program yang telah dijalankan Bisnis Pinjaman Ritel dan Menengah adalah sebagai berikut:

- *Clustering*. Penetrasi bisnis melalui pendekatan komunitas bisnis.
- *Scale Up*. Meningkatkan kapasitas debitur melalui fungsi *advisor business* RM.
- *Partnership*. Optimalisasi kerjasama penyaluran kredit dengan berbagai Fintech *peer-to-peer lending*.
- Optimalisasi penggunaan BRISpot Ritel sebagai bentuk simplifikasi proses bisnis dan meningkatkan produktifitas pinjaman segmen kecil.
- Optimalisasi *Loan Portofolio Guidelines* sebagai panduan dalam penyaluran kredit yang sehat dan secara spesifik

disesuaikan dengan potensi dan risiko di masing-masing wilayah kerja BRI.

- Optimalisasi *Early Warning System* dalam rangka mendukung aktivitas monitoring RM sehingga lebih cepat mengetahui dan mengatasi gejala debitur yang berpotensi *default*.
- Pelaksanaan Forum *Pipeline Management* secara rutin di seluruh unit kerja dalam rangka menciptakan ekspansi dan pertumbuhan kredit yang terencana dan terarah, yang didukung dengan *New Mapping Model* untuk mendukung *pipeline management*.
- Optimalisasi *Supply Chain Financing* kepada Perusahaan Inti utama rekanan BRI serta Pelaksanaan Program Pemasaran secara tematik per wilayah.
- Fokus terhadap *Value Chain Business* (VCB) Divisi Bisnis Korporasi: aktivitas proses akuisisi hingga realisasi secara intensif terhadap debitur hasil TDB.
- Implementasi BRISpot Ritel secara bertahap dimana pelayanan, prakarsa dan putusan kredit dilakukan secara digital dengan *gadget* sehingga menciptakan *Service Level Agreement* (SLA) yang lebih cepat dan *paperless*.
- Bekerjasama dengan perusahaan asuransi terkait mekanisme *transfer risk* pinjaman segmen kecil dan ritel.
- Pengembangan *Aplikasi Monitoring KMK/WA* sebagai salah satu *tools* untuk melakukan *monitoring* pencairan kredit sesuai dengan

termin dan ketentuan yang berlaku.

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar (RM & BM) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- Pengembangan pasar bisnis kecil dengan pendekatan *One Market One Branch*. RM menjadi PIC (*Person in Charge*) dalam akuisisi pedagang pasar.
- Melakukan pengembangan sistem *Skoring* UMKM Naik Kelas yang berkolaborasi dengan LPEM-FEB UI.

KINERJA BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH TAHUN 2019

Pada tahun 2019, BRI melakukan pemisahan pengelolaan Bisnis Pinjaman Ritel Komersial menjadi Bisnis Pinjaman Kecil dan Bisnis Pinjaman Ritel. Hasil pemisahan tersebut mendefinisikan Bisnis Pinjaman Kecil adalah kredit dengan *plafond* diatas Rp250 juta hingga Rp1 Miliar, sementara Bisnis Pinjaman Ritel adalah kredit dengan *plafon* diatas Rp1 Miliar hingga Rp25 miliar dan Bisnis Pinjaman Menengah yaitu kredit dengan *plafon* diatas Rp25 miliar hingga Rp200 miliar. Adapun kinerja Bisnis Pinjaman Ritel dan Menengah di sepanjang tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Bisnis Pinjaman Kecil

Hingga akhir tahun 2019, kinerja segmen Bisnis Kecil BRI menunjukkan pertumbuhan positif yaitu mencapai Rp62,15 triliun atau tumbuh 4,09% dibandingkan posisi akhir tahun 2018 yang sebesar Rp59,71 triliun.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PRODUK BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH

Bisnis Pinjaman Ritel

Bisnis Pinjaman Ritel mencapai Rp114,72 triliun, dengan peningkatan sebesar 3,27% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp111,08 triliun.

Bisnis Pinjaman Menengah

Bisnis Pinjaman Menengah mencapai Rp21,55 triliun, dengan peningkatan sebesar 17,48% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp18,34 triliun.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Melalui pembiayaan pada segmen Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel & Menengah, BRI turut serta mendukung program pemerintah terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengusaha dan meningkatkan akses pengusaha-pengusaha kecil, ritel dan menengah kepada kebutuhan tambahan modal usaha, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

BRI melalui segmen Bisnis Pinjaman Ritel dan Menengah telah mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan jumlah pengusaha kelas menengah. Selain itu, turut meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KECIL, RITEL & MENENGAH TAHUN 2020

Pada tahun 2020, pertumbuhan Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel dan Menengah akan didukung dengan strategi bisnis yang berbasis digital guna bertumbuh lebih dinamis. Adapun strategi Bisnis Pinjaman Kecil, Ritel & Menengah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi *Platform Digital Loan Invoice Financing*.
- Pengembangan sistem notifikasi *point to point* bagi RM pada Aplikasi BRISpot Ritel untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Pengembangan aplikasi *Sales Planning System* dalam bisnis proses kredit menengah.
- Optimalisasi penggunaan BRISpot Ritel untuk meningkatkan produktifitas pinjaman Ritel Komersial.
- Menjalankan aktivitas program pemasaran Bisnis Pinjaman Ritel & Menengah disesuaikan dengan kondisi persaingan bisnis.
- Optimalisasi *value chain business* khususnya dengan nasabah Korporasi potensial.
- Disiplin implementasi forum *pipeline management* dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit yang berkualitas.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar (RM & BM) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan kerjasama *partnership* dengan perusahaan *peer to peer lending*.
- *Clustering* komoditas pertanian.
- Implementasi Fitur SMS *dunning* kepada nasabah segmen Kecil
- Produk/*scheme initiatives/customized* percepatan pemberian kredit untuk debitur dengan *invoices* BRI

BISNIS PINJAMAN KONSUMER, SIMPANAN RITEL, DAN JASA PERBANKAN RITEL

Direktorat Konsumer

Dengan melihat potensi bisnis *consumer* yang sangat besar di Indonesia, maka pengembangan bisnis consumer merupakan hal prioritas bagi BRI. Bisnis *consumer* tidak saja terkait dengan pemberian pinjaman kredit *consumer* seperti KPR, KKB, *payroll loan* ataupun Kartu Kredit serta penghimpunan dana simpanan nasabah retail namun juga menangkap potensi transaksi *retail payment* yang saat ini semakin berkembang. Untuk itu, Direktur Konsumer senantiasa memastikan tercapainya profitabilitas untuk bisnis segmen Konsumer, peningkatan volume bisnis segmen Konsumer, peningkatan volume transaksi *retail payment* serta peningkatan kualitas kredit Konsumer.

BISNIS PINJAMAN KONSUMER

RINGKASAN

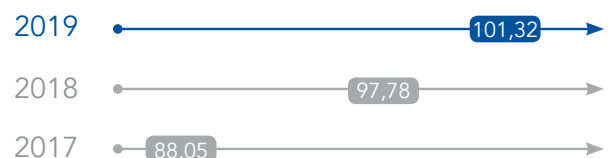
Outstanding Kredit BRIGuna mencapai **Rp101,32** triliun, meningkat **3,61%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp97,78 triliun

Outstanding KPR mencapai **Rp32,32** triliun, meningkat **19,18%** dibanding di tahun 2018 sebesar Rp27,12 triliun

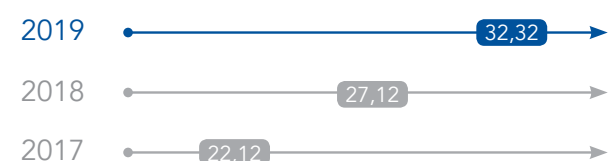
Outstanding KKB mencapai **Rp4,14** triliun, meningkat **12,70%** dibanding di tahun 2018 sebesar Rp3,67 triliun

Outstanding Kartu Kredit mencapai **Rp2,68** triliun, meningkat **22,91%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp2,18 triliun

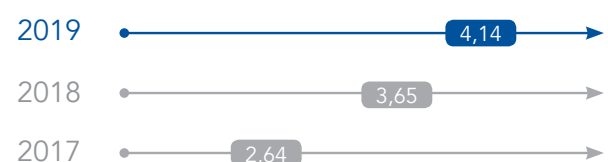
BRIGuna (Rp Triliun)



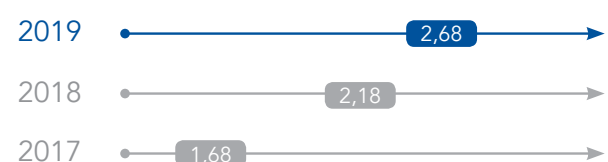
KPR (Rp Triliun)



KKB (Rp Triliun)



Kartu Kredit (Rp Triliun)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PINJAMAN KONSUMER

PRODUK BISNIS PINJAMAN KONSUMER

Bisnis Pinjaman Konsumer BRI menyediakan produk yang memudahkan nasabah individu memiliki rumah, kendaraan, dan berbagai kebutuhan akan barang konsumsi lainnya. Pinjaman Konsumer BRI menawarkan suku bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Produk-produk Pinjaman Konsumer BRI adalah sebagai berikut:

1. BRIGuna

Merupakan kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen nasabah berpenghasilan tetap. BRIGuna tersedia dalam lima pilihan, yaitu BRIGuna Karya, BRIGuna Purna, BRIGuna Umum, BRIGuna Pendidikan, dan BRIGuna Talangan.

Briguna Karya adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan atau KTA dari Bank BRI yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji). Briguna Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

Briguna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (uang pensiun). Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

Briguna Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

Briguna Pendidikan merupakan Briguna khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah memiliki upah atau penghasilan tetap.

2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

KPR merupakan kredit konsumtif perumahan baik untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan obyek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Terdapat beberapa jenis KPR yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah, yaitu:

- KPR Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI adalah KPR Reguler BRI Non Subsidi yang telah disesuaikan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada ASN, TNI, dan POLRI.
- KPR Subsidi (KPRS) dan KPR Guru & Tenaga Kependidikan, merupakan program pemberian fasilitas KPP dan KPR Sejahtera (FLPP) dari Bank BRI kepada kalangan guru dan tenaga kependidikan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan di antaranya bebas administrasi dan biaya provisi serta suku bunga yang kompetitif.
- KPRS ASRI, merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk di dalamnya ASN, TNI dan POLRI dengan batasan gaji pokok maksimal Rp4 juta. Produk KPRS ASRI mempunyai sejumlah keunggulan antara lain suku bunga kompetitif, bebas administrasi dan biaya provisi, uang muka minimal sesuai ketentuan *Loan to Value* (LTV), dan tenor maksimal 20 tahun atau mencapai usia pensiun.
- KPRS atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan Program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada MBR dengan batasan gaji pokok maksimal sebesar Rp4 juta.
- Program-program KPR *seasonal* seperti KPR HOKI, KPR Lebaran, KPR Merdeka dan KPR HUT.

3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB merupakan kredit dalam rangka pembiayaan kendaraan roda dua, roda dua premium dan roda empat yang dilakukan melalui pola langsung maupun pola kerjasama.

BISNIS PINJAMAN KONSUMER

4. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan kredit tanpa agunan berbasis kartu yang memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi di *merchant-merchant* yang bekerja sama.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2019

Untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar dari tiap produk Pinjaman Konsumer, BRI telah mengimplementasikan sejumlah strategi sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

BRIGuna

- Pengembangan *system collection support* kredit konsumer.
- Program pemasaran tematik BRIGuna dengan beragam promo menarik seperti BRIGuna Awal Tahun, BRIGuna HOKI, BRIGuna Ramadhan, BRIGuna Ajaran Baru, BRIGuna Purna “Sembako”, dan BRIGuna Merdeka.
- Program pemasaran BRIGuna BUMN dan Instansi lainnya serta BRIGuna Milenial.

KPR dan KKB

- Program pemasaran *seasonal* dan tematik untuk KPR dan KKB.
- Program pemasaran HOP (*Home Ownership Program*) dan COP (*Car Ownership Program*) Kawan dan Non Kawan.
- Digitalisasi proses kredit KPR dengan pemanfaatan aplikasi BRISpot Konsumer dan implementasi sentralisasi CLF (*Consumer Loan Factory*).

Kartu Kredit

- Mengembangkan dan fokus akuisisi dengan *cross selling*.
- Mengoptimalkan nasabah *trickle down business* (*value chain* dan *corporate sales*).
- Meningkatkan kerjasama dengan sejumlah perusahaan/Instansi potensial untuk *Business Card*.
- Meningkatkan kerjasama dengan banyak *merchant* baik yang *offline* maupun online (*e-commerce*).

KINERJA BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, kinerja Bisnis Pinjaman Konsumer BRI mengalami pertumbuhan positif seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Penerapan strategi bisnis yang tepat sasaran juga sangat membantu BRI meningkatkan kinerja bisnis tersebut. Dari waktu ke waktu, nasabah dan calon nasabah BRI antusias menggunakan produk BRI ini. Ada pun kinerja dari Bisnis Pinjaman Konsumer BRI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BRIGuna

Outstanding Kredit BRIGuna mencapai Rp101,32 triliun di tahun 2019, meningkat 3,61% dibanding tahun 2018 sebesar Rp97,78 triliun.

KPR

Outstanding KPR mencapai Rp32,32 triliun di tahun 2019, meningkat 19,18% dibanding di tahun 2018 sebesar Rp27,12 triliun

KKB

Outstanding KKB mencapai Rp4,14 triliun di tahun 2019 meningkat 12,70% dibanding di tahun 2018 sebesar Rp3,67 triliun

Kartu Kredit BRI

Outstanding kartu kredit BRI mencapai Rp2,78 triliun di tahun 2019, meningkat 27,52% dibanding tahun 2018 sebesar Rp2,18 triliun. Begitu juga halnya dengan nilai transaksi dan jumlah kartu kredit yang masing-masing mencapai Rp9,75 triliun dan 1,97 juta kartu kredit pada tahun 2019, atau tumbuh 30,52% dan 17,01% (yoy).



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PINJAMAN KONSUMER

Kartu Kredit	2017	2018	2019	Δ yoy (%)
Outstanding Kartu Kredit (Rp Triliun)	1,67	2,18	2,78	27,52
Nilai Transaksi (Rp Triliun)	6,29	7,47	9,75	30,52
Fee Based Income (Rp Miliar)	180,61	257,74	338,23	31,23
Jumlah Kartu Kredit (Juta)	1,38	1,68	1,97	17,26
Akuisisi Kartu Kredit Baru (Juta)	0,11	0,16	0,16	1,03

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI senantiasa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program Pemerintah adalah mengatasi kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan perumahan (*backlog*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan perumahan dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). BRI turut mendukung langkah tersebut dengan menyalurkan kredit FLPP ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN KONSUMER TAHUN 2020

Secara keseluruhan, BRI berencana menerapkan sejumlah strategi untuk pengembangan Bisnis Pinjaman Konsumer pada tahun 2020. Strategi tersebut antara lain:

BRIGuna

- Optimalisasi bisnis proses berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas tenaga pemasar.
- Optimalisasi nasabah *payroll* BRI
- Perluasan pangsa pasar baru di luar ASN, TNI, dan POLRI

KPR dan KKB

- Melakukan transformasi sistem *collection* KPR dan KKB.
- Intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pada PKS *Developer* dan *Dealer* serta *multifinance* melalui BRISpot Konsumer.

- Optimalisasi *Leads Management* pada BRISpot.
- Mensinergikan operasional KKB BRI dengan BRIFinance.
- Pengembangan KKB Smart.
- Melanjutkan program *seasonal* dan taktikal dengan meningkatkan *customer experience* untuk KPR dan KKB.
- Mengemas program pemasaran lebih menarik untuk nasabah yang ingin menggunakan produk dan layanan FLPP, HOP dan COP, pembiayaan kendaraan mobil listrik, dan BRIPintar.
- Kerjasama dengan jasa layanan *Fronting* seperti rumah.com, *Loan Market*, JITU, dan Semen Indonesia.

Kartu Kredit

- Optimalisasi *leads management database*.
- Optimalisasi akuisisi *database merchant/partner* kerjasama.
- Akuisisi *database indicative income* dengan *digital signature*.
- Kartu Kredit Pemerintah untuk Satuan Kerja LN dan APBD.
- *Corporate card* untuk *distributor financing*.
- *Cobrading* Traveloka *Pay Later*, program *Affinity Card (Goes To University)*, dan program *Syariah Card*.
- Akuisisi *merchant* dan nasabah untuk *digital lending* Ceria.

BISNIS SIMPANAN RITEL

RINGKASAN

Simpanan Bisnis Ritel mencapai **Rp374,45** triliun, meningkat **9,7%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp341,33 triliun

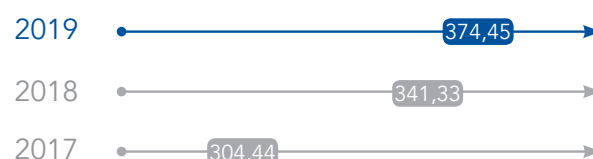
CASA Bisnis Ritel mencapai **Rp219,44** triliun, meningkat **5,54%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp207,92 triliun atau **58,57%** dari total DPK

Giro mencapai **Rp64,71** triliun, meningkat **9,31%** dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp59,20 triliun

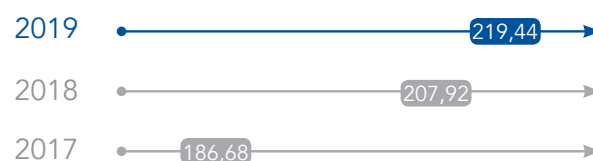
Tabungan mencapai **Rp154,73** triliun, meningkat **4,04%** dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp148,72 triliun

Deposito mencapai **Rp155,19** triliun, meningkat **16,32%** dibanding tahun 2018 sebesar Rp133,42 triliun

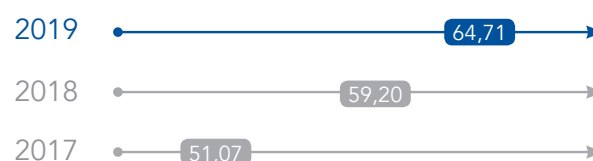
Simpanan Bisnis Ritel (Rp Triliun)



CASA (Rp Triliun)



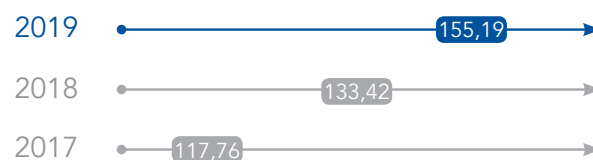
Giro (Rp Triliun)



Tabungan (Rp Triliun)



Deposito (Rp Triliun)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS SIMPANAN RITEL

PRODUK BISNIS SIMPANAN RITEL

BRI memiliki produk Simpanan Ritel yang beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah. Pada tahun 2019, produk Simpanan Ritel antara lain:

Tabungan BRI BritAma

Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dimana penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang semakin memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selain itu, Tabungan ini memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri yang diberikan secara gratis kepada nasabah.

Sejalan dalam kebutuhan nasabah yang semakin beragam, BRI terus mengembangkan Tabungan BRI BritAma dalam berbagai jenis varian sebagai berikut:

- **BritAma Bisnis**
Produk tabungan BRI yang diutamakan untuk berbisnis dengan memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah.
- **BritAma Edisi Khusus Anak Muda**
Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
- **BritAma Rencana**
Tabungan investasi dalam mata uang rupiah dengan setoran tetap bulanan dengan jangka waktu tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.
- **BritAma Valas**
Tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis *currency* meliputi USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR dan GBP.

Tabungan BRI Junio

Produk Tabungan BRI Junio dikhususkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung dan memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas *e-Banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik. Para orang tua tidak perlu khawatir dengan adanya berbagai fasilitas transaksi, karena transaksi anak dapat tetap dimonitor melalui SMS Notifikasi yang dikirim ke nomor *handphone* orang tua.

Tabungan BRI SiMuda

Tabungan BRI SiMuda merupakan tabungan yang ditujukan kepada perorangan khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda pada kelompok usia 18-30 tahun. Produk ini dilengkapi dengan fitur asuransi dan/atau produk investasi. Tabungan BRI SiMuda dilengkapi dengan dua fitur yaitu SiMuda RumahKu yang digunakan untuk menabung DP KPR Rumah dan SiMuda InvestasiKu yang dapat digunakan oleh nasabah untuk berinvestasi Reksadana. Produk Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi premi gratis pada tahun pertama.

Tabungan Haji

Produk Tabungan Haji ditujukan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci. Nasabah dapat melakukan setoran Tabungan Haji di seluruh Unit Kerja BRI. Tabungan ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa gratis yang dapat memberikan kenyamanan kepada nasabah.

Giro BRI

Produk Giro BRI memiliki fitur *Mass Debet*, *Account Sweep* hingga fasilitas *Salary crediting* yang memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji kepada pekerja secara efektif dan efisien.

Giro BRI menyediakan beragam pilihan mata uang di antaranya IDR, USD, SGD, AUD, CNY, JPY, EUR, GBP, SAR, NOK, AED dan HKD. Untuk kemudahan transaksi, selain Cek dan Giro Bilyet, BRI memberikan fasilitas kartu Debit, IBBiZ (*Internet Banking Bisnis*) atau CMS (*Cash Management System*) yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah.

BISNIS SIMPANAN RITEL

Untuk memudahkan para nasabah yang membutuhkan fasilitas penerimaan setoran atau pembayaran, BRI menawarkan fasilitas BRIVA (BRI *Virtual Account*) yang juga menargetkan pasar perdagangan digital. BRIVA memperluas sayap melalui kerjasama dengan berbagai *fintech* dan *e-commerce* ternama di antaranya Tokopedia, tiket.com dan berbagai *platform* digital lainnya.

DEPOBRI (Deposito BRI)

Deposito BRI sebagai pilihan investasi bagi nasabah tersedia dalam berbagai pilihan mata uang, baik Rupiah maupun valas dengan suku bunga yang kompetitif. Produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan produk tabungan. Untuk kemudahan pembukaan rekening, nasabah diberikan pilihan pembukaan melalui unit kerja BRI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia atau melalui Internet Banking. Dengan setoran awal yang terjangkau, nasabah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih mekanisme pemberian bunga, baik langsung diberikan melalui rekening atau ingin ditambahkan ke dalam komponen pokok deposito (*add on*).

BRI telah mengembangkan produk Deposito *Scriptless* untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang memiliki banyak *bilyet*. Deposito *Scriptless* merupakan deposito yang bukti penempatan dananya berupa *email* notifikasi agar para nasabah dapat mengelola rekening depositonya lebih efektif dan efisien.

PROGRAM & STRATEGI BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2019

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 2019 difokuskan pada perolehan dana murah (CASA), yaitu Giro dan Tabungan. Aktivitas pemasaran dilakukan dengan berpedoman pada tiga pilar strategi, yaitu akuisisi, retensi, dan *maintenance*. Sejalan dengan hal tersebut, BRI juga telah melaksanakan berbagai program, baik di tingkat lokal (inisiasi dari masing-masing unit kerja) maupun program nasional. Program yang dijalankan selama tahun 2019 menyasar kepada tiga segmen utama yaitu, *millennials*, *women*, dan *netizen*. Adapun beberapa program yang dijalankan antara lain:

1. BritAma Bebas Bayar
 2. The Champion (Junio *Gamification*)
 3. BritAma Rencana
 4. BRI Poin Reward
 5. BritAma Hot Deal
 6. BritAma Rencana
 7. *Valas Goes To*
 8. *Acquisition* melalui Aplikasi BRI^{mo}
- Selain program pemasaran, upaya perolehan dana murah juga dilakukan melalui aktivitas *cross selling* khususnya dengan nasabah pinjaman ritel, menengah, dan konsumen.

KINERJA BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, implementasi strategi bisnis berjalan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja Simpanan Ritel BRI. Pada tahun 2019, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp374,45 triliun, meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp341,33 triliun. Dana Murah atau CASA BRI mencapai Rp219,44 triliun atau meningkat 5,54% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp207,92 triliun, dengan komposisi terhadap total DPK mencapai 58,58%.

Pada periode yang sama, Giro BRI mencapai Rp64,71 triliun, meningkat 9,75% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp59,20 triliun. Sementara Tabungan mencapai Rp154,73 triliun, meningkat 4,04% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp148,72 triliun, dan Deposito mencapai Rp155,19 triliun, meningkat 16,32% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp133,42 triliun

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu ditunjukkan antara lain melalui produk Tabungan BRI SiMuda yang mendukung program OJK untuk melaksanakan literasi keuangan serta memberikan edukasi dalam mengenalkan instrumen asuransi dan investasi reksa dana kepada pemuda.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Selama tahun 2019, BRI bekerjasama dengan *Young On Top* untuk meraih pasar di kalangan anak muda terutama mahasiswa dengan melakukan *road show* bertemakan sukses di usia muda. *Road show* yang mengusung produk Tabungan BRI SiMuda ini sendiri diselenggarakan di 4 kota, yaitu Bandung, Malang, Surabaya, dan Semarang.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2020

BRI terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan perolehan dana dengan berfokus pada CASA. Hal ini sejalan dengan tujuan utama bisnis simpanan ritel di tahun 2020 yaitu menjadi *CASA leader* melalui produk BritAma, optimalisasi rekening operasional dan transaksi untuk meningkatkan *market share*, mendorong aktivitas *cross selling* dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, serta memperluas kerjasama dengan beberapa *corporate partner* yang menghasilkan potensi *pipeline* untuk *new customer*.

Untuk mencapai strategi tersebut, BRI melakukan beberapa inovasi pada *business process*, *development product* dan organisasi demi mendukung pencapaian bisnis yang meliputi:

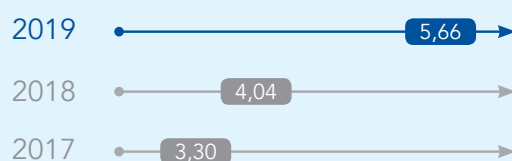
1. *Re-engineering Bussniness Process* dengan melakukan pengembangan akuisisi yang dilakukan melalui *platform digital*.
2. Mencapai *CASA Leadership* di semua segmen dengan melakukan akuisisi *payroll* pada nasabah inti kerjasama serta program *loyalty* bagi nasabah *affluent* dan *mass* melalui BRI Poin.
3. Rejuvenasi Produk Simpanan dan jasa untuk meningkatkan *Fee Based Income*.
4. Solusi terintegrasi melalui kegiatan *cross selling product* BRI.
5. Optimalisasi organisasi yang berbasis kinerja.

BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

RINGKASAN

Fee Based Income Bisnis Jasa Perbankan Ritel mencapai **Rp5,66** triliun meningkat **40,22%** dibanding 2018 sebesar Rp4,04 triliun.

Fee Based Income Jasa Perbankan Ritel
(RP TRILIUN)



Jumlah transaksi internet banking mencapai **Rp1,17** miliar meningkat **103,4%** dibanding 2018 sebesar 574,9 juta.

Jumlah Transaksi Internet Banking 2019
(Dalam Juta)



PRODUK BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

BRI telah menyediakan beragam produk Jasa Perbankan Ritel yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pada tahun 2019, produk yang ditawarkan Bisnis Jasa Perbankan Ritel antara lain:

Internet Banking BRI

Merupakan salah satu fasilitas perbankan yang dapat dipergunakan untuk mengakses rekening simpanan melalui jaringan internet. Internet banking BRI memiliki beragam keunggulan, yaitu mudah dimengerti dan digunakan, memudahkan nasabah saat melakukan transaksi perbankan di setiap saat, aman saat melakukan transaksi perbankan, cukup menggunakan m-Token dan nasabah tidak perlu membawa perangkat tambahan.

Mobile Banking BRI

Layanan e-banking BRI yang satu ini dapat digunakan untuk mengakses rekening simpanan nasabah melalui ponsel. SMS banking BRI akan melayani kebutuhan transaksi perbankan nasabah dengan dua jenis layanan, yakni berbasis menu dan *plain text*. SMS berbasis menu yaitu layanan SMS Banking yang menggunakan menu sebagai perintah transaksinya. Sementara *plain text* merupakan layanan SMS Banking dengan mengirimkan perintah transaksi yang akan dilakukan ke nomor 3300.

BRIZZI

Merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lainnya yang disediakan oleh penyedia barang atau jasa. Semua transaksi BRIZZI dapat dilakukan di seluruh *merchant* dengan menggunakan mesin EDC BRI. Isi ulang (*top up*) BRIZZI saat ini juga mudah dan dapat dilakukan di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan BRI, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Yomart, dan lain-lain. Selain itu, kartu BRIZZI juga dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran jalan tol, KRL, parkir, maupun transportasi umum lainnya seperti Transjakarta.

BRIimo

BRIimo merupakan aplikasi keuangan digital BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi dengan *user interface* dan *user experience* (UI/UX). Fitur-fitur menarik lainnya seperti



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

online opening account, tarik tunai tanpa kartu, alias rekening, info promo, *login* dengan *fingerprint / face id*, dan mutasi rekening sampai dengan 12 bulan.

Produk Investasi

BRI memiliki beragam produk investasi untuk memudahkan pilihan bagi nasabah yang ingin meningkatkan nilai aset yang dimilikinya. Produk investasi BRI yaitu Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, SBN yang diritelkan Valas (INDON & INDOIS), SBN yang diritelkan Rupiah, Swap Deposit, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Selain produk investasi tersebut, BRI bekerja sama dengan Manajer Investasi terpercaya dan terkemuka yang memiliki beragam varian produk reksa dana, antara lain reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan terproteksi.

BRI memiliki produk investasi bancaassurance dengan selling point tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Portofolio nasabah Bancassurance BRI terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen mikro, ritel, dan prioritas.

Layanan BRI Prioritas memberikan pelayanan dan jasa perbankan bagi Pribadi Terpilih BRI Prioritas, yang tidak hanya mencakup pelayanan dan jasa perbankan secara umum, namun juga jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*bancassurance*), serta perencanaan dana pensiun.

PROGRAM & STRATEGI BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2019

Melihat potensi pengguna produk digital di Indonesia yang masih besar, BRI terus berinovasi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah melalui layanan digital. Untuk itu BRI telah melakukan transformasi secara bertahap pada proses sistem dan *database* agar meningkatkan reliabilitas dan efisiensi dari transaksi digital.

Salah satu produk jasa perbankan ritel yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah yaitu BRImo.

Implementasi produk BRImo dilakukan dengan tetap mengedepankan *user interface* dan *user experience* yang lebih baik. Proses ini melewati beberapa tahap seperti fase *strategic assessment*, *design clinic*, *prototyping*, *continuous iteration*, uji coba sampai akhirnya dilaksanakan *roll out* secara nasional.

Dengan hadirnya BRImo, maka nasabah tidak perlu lagi melakukan transaksi perbankan dengan cara datang ke unit kerja atau perangkat *e-channel*.

KINERJA BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2019

BRImo

Hingga tahun 2019, transaksi Internet Banking (termasuk BRImo) tumbuh sebesar 107,48% (yoy) dari 574,33 juta transaksi di tahun 2018 menjadi 1,19 milyar di tahun 2019. Sedangkan jumlah nominal atas seluruh transaksi BRImo tumbuh sebesar 38,42% (yoy), dari Rp664,60 triliun di tahun 2018 menjadi Rp919,94 triliun di tahun 2019.

Dari aspek produktivitas, pengguna Internet Banking/ BRImo tumbuh sebesar 56,90% (yoy) dari 12,60 juta pengguna di tahun 2018 menjadi 19,76 juta di tahun 2019. BRImo siap bersaing dengan produk perbankan serupa, hal ini terlihat dari penilaian *top brand index* BRImo yang semakin naik dan terus membaik setiap tahunnya.

BRIZZI

Pengguna uang elektronik setiap tahunnya semakin tinggi sejalan dengan preferensi masyarakat terhadap uang digital yang terus menguat serta didukung integrasi UE dalam ekosistem digital yang meluas. BRI telah berinovasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan perluasan kerjasama uang elektronik dengan instansi (*co-branding*) serta akseptasi pada jalur transportasi darat dan laut. Jumlah kartu BRIZZI tumbuh sebesar 31,25% (yoy), dari 12,76 juta di tahun 2018 menjadi 16,80 juta di tahun 2019.

BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Kartu Debit & Uang Elektronik	2017	2018	2019	Δ yoy (%)
Kartu Brizzi (juta)	8.7	12.8	16.8	31.25%
Volume Brizzi (Rp Triliun)	0.8	5.8	15.6	168.97%
Kartu Debit BRI (juta)	56.2	44.6	55.6	24.57%

Internet Banking & Mobile Banking BRI

Kinerja e-banking BRI sepanjang 2019 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang 2019 jumlah pengguna Internet Banking BRI naik 54,76% dari 19,5 juta menjadi 26,2 juta, sementara transaksinya meningkat sangat signifikan yaitu 103,41% dari 574,9 juta di 2018 menjadi 1,17 miliar di 2019.

Pada periode yang sama, pengguna Mobile Banking BRI naik 15,42% dari 22,7 juta di 2018 menjadi 26,2 juta di 2019. Jumlah Transaksi Mobile Banking juga tumbuh *double digit*, yaitu 16,66% dari 317,6 juta menjadi 370,5 juta.

E-banking	2017	2018	2019	Δ yoy (%)
Pengguna Mobile Banking (juta)	18.5	22.7	26.2	15.42%
Transaksi Mobile Banking (juta)	277.4	317.6	370.5	16.66%
Pengguna Internet Banking (juta)	8.0	12.6	19.5	54.76%
Transaksi Internet Banking (juta)	311.5	574.9	1169.4	103.41%

Produk Investasi

Kinerja Layanan Prioritas juga menunjukkan pertumbuhan positif. *Asset Under Management* (AUM) Nasabah BRI Prioritas tumbuh sebesar 18,35% dari Rp97,77 triliun di tahun 2018 menjadi Rp115,71 triliun di tahun 2019. Jumlah Dana Pihak Ketiga Nasabah BRI Prioritas tumbuh sebesar 17,30% dari Rp86,68 triliun pada 2018 menjadi Rp101,68 triliun pada 2019. Begitu pula dengan jumlah Nasabah BRI Prioritas yang meningkat 15,25% dari 61.054 nasabah menjadi 70.364 nasabah di tahun 2018.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen penuh mendukung program Pemerintah termasuk yang terkait dengan peningkatan literasi keuangan dan penyediaan alat pembayaran elektronik. Dukungan BRI terhadap peningkatan penggunaan alat pembayaran elektronik diantaranya dilakukan melalui BRI Mo yang merupakan aplikasi keuangan digital berbasis data internet dan kartu BRIZZI yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran seperti jalan tol, belanja, dan lain sebagainya.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

STRATEGI BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2020

Beberapa strategi yang akan dilakukan di tahun 2020 sekaligus mendukung tema BRI tahun 2020 yaitu *integrated financial solutions* adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pertumbuhan *fee based income*.
2. Meningkatkan *service excellence* terutama pada peningkatan reliabilitas dan koneksi jaringan sistem dengan pengelolaan *database* yang lebih baik.
3. Fokus peningkatan pengguna kartu debit dan fitur SMS notifikasi, serta sekaligus *bundling* dengan peningkatan jumlah pengguna BRI^{mo} sebagai *super-apps*.
4. Fokus akuisisi *merchant* sesuai target sebelumnya (Millennial, Women, and Netizen).
5. Perluasan kerjasama dengan *merchants e-commerce*.
6. Ekosistem transaksi melalui produk-produk BRI.
7. Perluasan akseptasi BRIZZI.



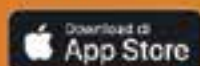
Seru Abis Bisa Cek Mutasi Rekening s.d 12 Bulan



Dapetin detail mutasi rekening selama setahun dengan aplikasi BRI mo. Serunya bisa cek transaksi sampai dengan 12 bulan terakhir hanya dengan hapemu.

#Loginkeseruanmu

Download Sekarang



atau
Scan QR





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

BRIMO

BRI^{mo}

Aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh Nasabah maupun Non Nasabah BRI tanpa perlu datang ke cabang (*Branchless*) dengan pilihan sumber dana Giro dan Tabungan untuk setiap fitur-fiturnya.



Digital Banking BRI ini telah menembus

2,2 juta orang pengguna setahun setelah diluncurkan.

Pada 2019, transaksi di BRI^{mo} mencapai 51 juta kali dengan sales volume mencapai Rp32 triliun.

Product Vision



Product

Upaya Rejuvenasi / Peremajaan Produk Tabungan dan fitur transaksi via BRI Mobile Memberikan *New Experiences* bagi nasabah BRI Eksisting dan Baru.



Innovation

Melakukan *Digital Attacker Product* Perbankan Inovasi merupakan urgensi dari dilakukannya Pengembangan New BRI Mobile



Application

Aplikasi mobile yang sesuai dengan era digitalisasi. *User experience* dan *User Interface* yang sama untuk aplikasi perbankan demi kenyamanan nasabah. Aplikasi yang dapat mengakses seluruh layanan perbankan dengan pilihan *source of fund* yang berbeda



Award

Menjadi The Best Mobile Application in South East Asia

BISNIS KORPORASI

RINGKASAN

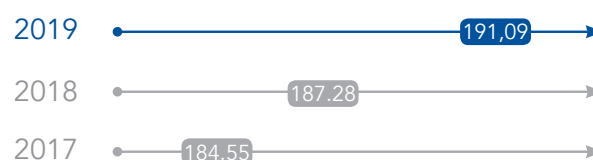
Outstanding Kredit Bisnis Korporasi mencapai **Rp191,09** triliun, meningkat **2,04%** dibanding 2018 sebesar Rp187,28 triliun

Simpanan Bisnis Korporasi mencapai **Rp298,73** triliun, meningkat **4,8%** dibanding 2018 sebesar Rp285,05 triliun

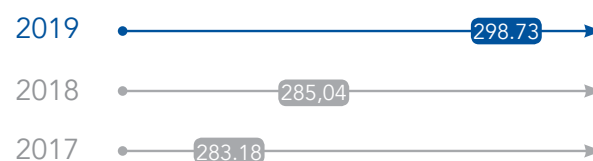
Fee Based Income Bisnis Korporasi mencapai **Rp2,74** triliun, meningkat **16,76%** dibanding 2018 sebesar Rp2,36 triliun

Profitabilitas Bisnis Korporasi terjaga pada **Rp500,99** miliar.

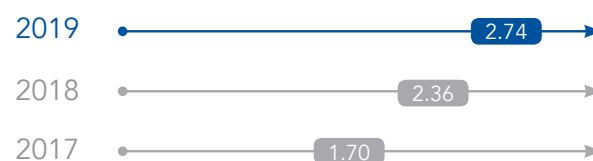
KREDIT KORPORASI (Rp TRILIUN)



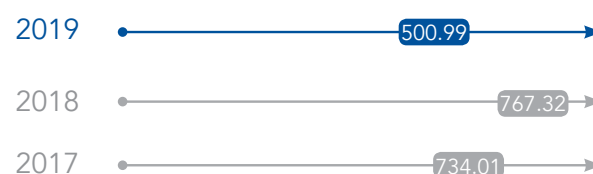
SIMPANAN KORPORASI (Rp Triliun)



FEE BASED INCOME KORPORASI (Rp Triliun)



PROFITABILITAS KORPORASI (Rp Miliar)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PINJAMAN KORPORASI BUMN, DANA INSTITUSI, DAN TRANSACTION BANKING

Direktorat Hubungan Kelembagaan & BUMN

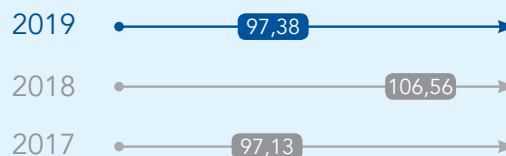
Pengembangan Bisnis Kelembagaan dan BUMN diprioritaskan pada peningkatan profitabilitas dari masing-masing nasabah BRI, tidak saja dari sisi pemberian kredit maupun produk simpanan, namun juga dari sisi dukungan kepada nasabah akan kebutuhan *transaction banking*. Untuk itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN mempunyai sasaran berupa peningkatan volume bisnis Hubungan Kelembagaan & BUMN, peningkatan volume transaction banking serta peningkatan kualitas kredit nasabah BUMN.

BISNIS PINJAMAN KORPORASI BUMN

RINGKASAN

Outstanding kredit Bisnis Korporasi BUMN sebesar **Rp97,38 triliun**, atau menurun **3,98%** dari tahun 2018 yang sebesar Rp106,56 triliun

Kredit Korporasi BUMN
(Rp Triliun)



PRODUK DAN LAYANAN BISNIS KORPORASI BUMN

Lingkup produk dan layanan Bisnis Korporasi BUMN adalah menciptakan, mengembangkan, memasarkan dan memonitor bisnis kepada BUMN khususnya pada sektor infrastruktur dan jasa, melalui Pemberian Fasilitas Pinjaman, Pengelolaan Dana Nasabah dan Pelayanan Jasa Perbankan untuk perolehan *Fee-Based Income*.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2019

Pengembangan strategi bisnis Korporasi BUMN difokuskan pada usaha yang memberikan peluang *Value Chain* dan *cross-selling* untuk pengembangan bagi perusahaan perusahaan BUMN yang menjadi tulang punggung *Master Plan* Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mencakup infrastruktur, energi, logistik dan transportasi serta mendukung pengembangan perekonomian nasional.

Strategi bisnis Korporasi BUMN diantaranya adalah melakukan *market development*, dan *market penetration* dengan mengoptimalkan aliansi dengan bank lain dalam bentuk pembiayaan sindikasi dan *club deal*. Selain itu, Korporasi BUMN juga mengembangkan layanan perbankan lainnya seperti *cash management*, *Host-to-Host*, BRIVA, Payroll, *Corporate Card*, *Cash Card*, dll.

BISNIS KORPORASI BUMN

Sedangkan strategi terkait *market penetration* dilakukan melalui *closed system financing* dengan mengidentifikasi potensi bisnis baru. Optimalisasi *integrated marketing* dan *trickle down business* juga tetap menjadi fokus untuk membantu kinerja sektor UMKM. Optimalisasi *integrated marketing* dan *trickle down business* adalah pemberian fasilitas kredit dengan skema khusus, pemberian fasilitas kredit kepada *vendor*, sub-kontraktor, *supplier*, distributor, mitra binaan, serta kredit konsumen dan Kredit Briguna kepada karyawan yang bekerja di perusahaan BUMN yang menjadi nasabah Bisnis Korporasi BUMN.

KINERJA BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, *Outstanding* kredit Bisnis Korporasi BUMN mencapai Rp97,38 triliun, atau sedikit menurun 3.98% dari tahun 2018 yang sebesar Rp101,42 triliun, seiring fokus BRI pada pertumbuhan segmen mikro.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, BUMN terlibat dalam pengerjaan proyek mulai dari pembiayaan sampai pelaksanaan teknis. BRI sebagai salah satu BUMN di sektor jasa keuangan, memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut melalui pembiayaan sindikasi maupun skema lainnya. Selain itu BRI juga ikut serta dalam pembiayaan terhadap BUMN untuk mendukung transaksi-transaksi ekspor dan impor dalam mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Selama tahun 2019, Divisi BUMN memberikan dukungan terhadap program pemerintah yaitu sbb. :

- Pembiayaan kepada sektor infrastruktur yang termasuk Proyek Strategis Nasional diantaranya pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.
- Pembiayaan kepada sektor energi yaitu pemberian kredit melalui PLN dalam rangka penyelesaian proyek 35.000 MW.
- Pembiayaan kepada sektor transportasi yaitu pemberian kredit melalui KAI dalam rangka pembangunan LRT Jabodebek.

Selain itu BRI juga ikut serta dalam pembiayaan terhadap BUMN untuk mendukung transaksi-transaksi ekspor dan impor dalam mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2020

Di tahun 2020 pengembangan bisnis korporasi akan difokuskan pada penyaluran kredit yang berkualitas, perbaikan kualitas kredit dan optimalisasi profitabilitas bisnis.

Strategi Terkait Pengembangan Bisnis Korporasi BUMN di tahun 2020, yaitu:

1. Fokus pada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.
2. Melakukan ekspansi terutama fokus pada intensifikasi *existing* debitur.
3. Meningkatkan *share of wallet* nasabah melalui penyediaan *integrated banking solution* kepada nasabah melalui pengembangan *transaction banking* sebagai sumber *fee based income*.
4. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kompetensi SDM yang handal untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap melakukan manajemen profitabilitas atas setiap *account*.
5. Pengembangan *value chain* untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis segmen Ritel dan Menengah.



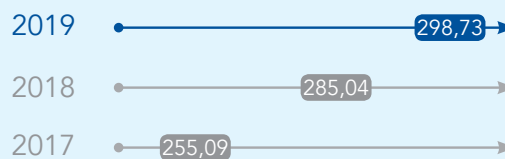
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

RINGKASAN

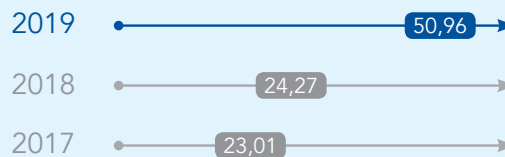
Simpanan Institusi mencapai
Rp298,73 triliun,
meningkat **4,8%** dibanding 2018
sebesar Rp285,04 miliar.

Simpanan Dana Institusi
(Rp Triliun)



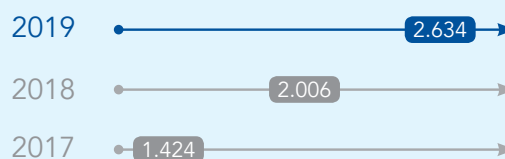
Fee Based Income Transaction Banking
mencapai **Rp50,96** miliar
meningkat **110%** dibanding 2018
sebesar Rp24,27 miliar.

Fee Base Income Bisnis Sindikasi dan Jasa
Lembaga Keuangan Non Bank
(Rp Miliar)



Volume transaksi *Cash Management System* (CMS) mencapai
Rp2.634 triliun,
meningkat **31,3%** dibanding 2018
sebesar Rp2.006 triliun.

Volume transaksi *Cash Management System*
(Rp Triliun)



PRODUK DAN LAYANAN BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

Bisnis Dana Institusi

Bisnis Dana Institusi menyediakan layanan pengelolaan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemberian fasilitas simpanan, *Cash Management System* (CMS), dan pelayanan jasa perbankan yang berbasis *digital banking*. Adapun segmen Bisnis Dana Institusi antara lain melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah, Badan Layanan Umum, TNI, POLRI, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi.

BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

Bisnis Transaction Banking

Bisnis *Transaction Banking* (TRB) merupakan salah satu pilar pertumbuhan BRI ke depan, terutama dalam mengakselerasi penghimpunan dana dan peningkatan perolehan *Fee Based Income* (FBI). Segmen utama Bisnis TRB adalah perusahaan/instansi yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan yang kompleks, tetapi dapat dikelola oleh perusahaan/instansi itu sendiri.

Produk dan jasa Bisnis TRB antara lain aplikasi CMS BRI yang merupakan solusi layanan keuangan perbankan berbasis internet. Nasabah sangat mudah mengaksesnya karena *mobile*, *user friendly* dan *real time* dengan perangkat dan fitur keamanan yang memadai. Selain itu, CMS BRI juga dilengkapi dengan fitur transaksi yang mendukung kebutuhan transaksi keuangan pada umumnya atau dapat disesuaikan (*customized*) terhadap kebutuhan nasabah.

Pasca reorganisasi pada Juli 2017, Bisnis TRB mengelola produk dan jasa lainnya terkait segmen korporasi seperti *Supply Chain Financing*, *Trade Finance*, dan *Host to host* berkolaborasi dengan Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Institusi, Divisi Bisnis Ritel dan Menengah, serta Divisi Bisnis Internasional.

STRATEGI BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2019

Bisnis Dana Institusi

Strategi Bisnis Dana Institusi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan produk sesuai kebutuhan nasabah (*customer centric*) yang berbasis digital banking terutama pada area sistem rekonsiliasi, *complain handling*, dan sistem peringatan dini sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi pemerintah.
2. Peningkatan integrasi sistem penyaluran beasiswa dengan LPDP, Uang Ganti Rugi (UGR) dengan LMAN.
3. Peningkatan integrasi sistem Program Indonesia Pintar dengan Kemendikbud dan Kemenag.
4. Peningkatan sistem pembayaran pensiun dengan Taspen dan ASABRI.

5. Pengembangan *re-engineering* Pajak Daerah Online yang mencakup PBB *Online*, *Etax* DKI, BPHTB dan pajak lainnya Pemprov DKI.
6. Peningkatan sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan cakupan bidang *transaction banking*, keuangan dan permodalan, teknologi informasi, dan bidang *capacity building*.
7. Memberikan layanan yang terbaik melalui *marketing communication* yang efektif dan *one stop service*.

Bisnis Transaction Banking

Strategi Bisnis TRB pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Menerapkan strategi IMFIX (*Improve, Maintain, Focus, Increase, dan Expand*). **Improve**, memperkuat produk dan pelayanan baik nasabah internal maupun eksternal dalam menyediakan *integrated financial solution*. **Maintain**, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan nasabah melalui peningkatan kompetensi RM. **Focus**, menekankan perhatian pada segmen nasabah yang membawa keuntungan maksimum seperti segmen industri/manufaktur, *wholesale*, *services* berskala besar dan instansi utama pemerintah. **Increase**, meningkatkan kegiatan transaksional untuk nasabah-nasabah *existing* dengan mengeksplorasi potensi bisnis dari *value chain*-nya. **Expand**, melakukan upaya perluasan bisnis untuk menjaring calon-calon nasabah dengan menggunakan *network & influence* perusahaan.
- Fokus perluasan pangsa pasar melalui ekstensifikasi *customer base* dengan memperkuat kapabilitas TRB, baik melalui *enhancement* CMS *end-to-end*, *Supply Chain Financing*, maupun *Trade Finance Services*.
- Penyediaan *fully integrated banking services* melalui *platform* ekosistem bisnis nasabah korporasi dengan *Corporate Billing Management* (CBM), dan optimalisasi *coverage model* (pemetaan RM, desain *client service team* berdasar segmen dan *product specialist*).



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

KINERJA BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2019

Bisnis Dana Institusi

Pada tahun 2019, Bisnis Dana Institusi berhasil menghimpun dana dengan capaian sebesar Rp298,73 triliun atau menurun 4,8% dari tahun 2018 yang sebesar Rp285,04 triliun.

Bisnis Transaction Banking

Selama tahun 2019, performa CMS BRI dari segi jumlah *client*, frekuensi transaksi, volume transaksi, dan FBI menunjukkan peningkatan. Jumlah *client* pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,8% menjadi sebesar 23.970 *client*, frekuensi transaksi meningkat sebesar 22,3% menjadi 57,4 juta transaksi, volume transaksi juga mengalami kenaikan sebesar 31,3% menjadi sebesar Rp 2.634 triliun. Kinerja tersebut dipicu oleh volume transaksi nasabah segmen korporasi yang memiliki presentase sebesar 68,5%, meskipun dengan jumlah klien sebanyak 4.493 *client* atau hanya 18,7% dari total jumlah klien CMS BRI.

Perolehan profitabilitas Bisnis TRB tercermin dari FBI produk CMS dalam tiga tahun terakhir. Perolehan fee based income untuk produk CMS selama tiga tahun terakhir sebesar Rp23 milyar (2017), Rp 24,3 milyar (2018) dan Rp 50,9 milyar (2019). Profitabilitas CMS BRI meningkat signifikan, hal tersebut terlihat dari kenaikan fee based secara berturut-turut pada tahun 2018 sebesar 5,5%, dan pada 2019 naik sebesar 109,8%.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui Bisnis Dana Institusi mengelola dana-dana yang bersumber dari APBN dengan dukungan teknologi digital. Hal itu sejalan dengan program Pemerintah dalam meningkatkan *cashless society* untuk mendukung peningkatan efisiensi ekonomi. Kerjasama yang dilakukan BRI dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah selama tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

- Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendukung program bantuan pemerintah untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing – masing kepada 3.835 SD dengan total bantuan Rp423 miliar, 330 SMP dengan total bantuan Rp664 miliar, dan 9.455 SMK dengan total bantuan Rp2,39 triliun.
- Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penyaluran bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 10,36 juta siswa SD dengan total bantuan sebesar Rp4,21 triliun dan 4,56 juta siswa SMP dengan total bantuan sebesar Rp2,71 triliun.
- Bersama Kementerian Agama mendukung program bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar kepada 10,3 juta siswa SD, 4,5 juta siswa SMP, dan 853 ribu siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Bersama Kementerian dan Lembaga/Instansi Pemerintah mendukung pembayaran Penerimaan Negara yang berbasis digital banking.
- Bekerjasama dengan Badan Layanan Umum untuk penyaluran dana bantuan Pemerintah kepada para penerima bantuan.

STRATEGI BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING TAHUN 2020

Bisnis Dana Institusi

Kompetisi perolehan Dana Pihak Ketiga Institusi semakin ketat dari tahun ke tahun. Untuk itu BRI telah menyiapkan sejumlah strategi tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan komposisi CASA melalui *closed payment system* berbasis *digital banking*. Fitur produk perbankan dan anak perusahaan juga diselaraskan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga, serta pengelolaan penyaluran APBN Kementerian hingga satuan kerja (satker) daerah.
- Bisnis Institusi akan berfokus pada peningkatan utilisasi dan optimalisasi penggunaan *Dashboard Value Chain* dan *Account Planning*. Sebab hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas segmen korporasi dan membentuk bisnis *value chain* yang baru.

BISNIS DANA INSTITUSI & TRANSACTION BANKING

- BRI akan meningkatkan pengembangan *platform* kerjasama dengan beberapa institusi agar dapat mendukung profitabilitas perusahaan dari sisi FBI.
- Bisnis Institusi BRI akan menerapkan beberapa program kerja antara lain Smart Sim, Aplikasi Digital-Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Kartu Pintar NPWP dengan *Platform* Kartin1 (Kartin One), Pengembangan sistem pembayaran SPP *online* untuk Universitas kelolaan Bisnis Institusi, Pengembangan sistem pembayaran PNPB *online*, Pengembangan Aplikasi Pembayaran Pensiun (Digitalisasi), Pengembangan Aplikasi KTA/e-KTA, dan Pengembangan Aplikasi Penyaluran Gaji (Digitalisasi).

Bisnis Transaction Banking

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang sesuai, Bisnis TRB mencatat pencapaian kinerja yang positif sepanjang Tahun 2019, terutama dalam hal pencapaian FBI. Untuk melanjutkan tren positif tersebut, diperlukan strategi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa strategi yang akan dilakukan di Tahun 2020, sekaligus mendukung tema BRI Tahun 2020 yaitu *Integrated Financial Solutions*, adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi nasabah segmen korporasi melalui *platform* CMS *end to end* (BRICaMS).
- Fokus peningkatan FBI transaction banking dengan meningkatkan utilitas fitur *cash management*.
- Meningkatkan transaksi nasabah dalam satu ekosistem bisnis melalui *platform* *Corporate Billing Management* (CBM).
- Memperkuat dan memperluas kapasitas *Transaction Relationship Manager* menjadi *Transaction Product Specialist*.
- Akuisisi *new customer* potensial dari bisnis *trade finance* nasabah korporasi dan memperkuat *trade finance product*.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS PINJAMAN KORPORASI NON-BUMN

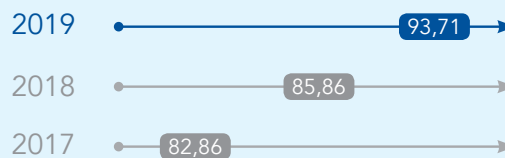
Direktorat Corporate Banking

Bisnis *Corporate Banking* non BUMN mempunyai tujuan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan perbankan nasabah Korporasi BRI atau memberikan *integrated financial solution* kepada para nasabah korporasinya. Untuk itu, SEVP Corporate Banking akan memastikan tercapainya profitabilitas untuk segmen Korporasi, peningkatan volume bisnis Korporasi serta peningkatan kualitas kredit segmen Korporasi. Bahkan, diharapkan agar bisnis korporasi non soe dapat memberikan *trickle down business* kepada segmen UMKM sehingga semakin meningkatkan kesinambungan antar segmen bisnis di BRI.

RINGKASAN

Outstanding Kredit Korporasi Non BUMN mencapai **Rp93,71 triliun**, meningkat **9,14%** dibanding 2018 sebesar Rp85,86 triliun.

Kredit Korporasi Non BUMN (Rp Triliun)



PRODUK DAN LAYANAN BISNIS KORPORASI NON BUMN

Bisnis Korporasi Non BUMN BRI terus berkembang dan menjadi salah satu segmen yang mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan *competitive position* BRI. Setiap pemberian kredit kepada Korporasi Non BUMN harus memiliki peluang *value chain business* dan *cross-selling* sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan Bisnis Ritel, Kecil dan Menengah, serta Bisnis Konsumer BRI.

Segmen Bisnis Korporasi Non BUMN BRI terdiri dari sub-segmen agribisnis dan korporasi. Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada UMKM. Sementara untuk sektor non-agribisnis, penyaluran kredit cukup bervariasi ke beberapa sektor, antara lain energi, transportasi dan industri pengolahan.

BISNIS KORPORASI NON-BUMN

STRATEGI BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2019

Strategi Bisnis Korporasi Non BumN tahun 2019 akan difokuskan untuk menjaga pertumbuhan portfolio kredit yang sehat dengan fokus pada penyaluran kredit di sektor-sektor unggulan dan mengoptimalkan fasilitas yang masih dimiliki oleh debitur eksisting.

- **Mengembangkan *Integrated Banking Solution***
 Mengembangkan *Client Service Team* (CST) kepada nasabah korporasi untuk meningkatkan pemberian fasilitas selain kredit, antara lain fasilitas *Forex Line* dan *Trade finance*. Peran RM sebagai *financial advisor* juga ditingkatkan melalui program Pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- **Mengoptimalkan *Value Chain Business***
 Mengidentifikasi potensi bisnis nasabah melalui aplikasi *Dashboard Account Planning* dan mengembangkan produk-produk unggulan seperti *supply chain financing* dan *distributor financing*.

KINERJA BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, *Outstanding* kredit Bisnis Korporasi BUMN mencapai Rp93,71 triliun, atau meningkat 9,14% dari tahun 2018 yang sebesar Rp85,86 triliun.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui segmen bisnis Korporasi Non BUMN telah mendukung program pemerintah terutama dalam membiayai sektor usaha produktif berorientasi ekspor seperti komoditas kelapa sawit, dan turut membiayai usaha korporasi yang terkait dengan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan transportasi untuk mendukung program pemerintah.

STRATEGI BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2020

Pertumbuhan Bisnis Korporasi Non BUMN akan dijaga pada level yang moderat dengan fokus kepada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.

- **Memperbaiki kualitas kredit**
 Upaya perbaikan kualitas kredit akan terus dilakukan antara lain dengan menyusun *exit strategy* bagi debitur yang bermasalah, penyempurnaan sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran kredit serta peningkatan kompetensi SDM.
- **Meningkatkan Profitabilitas Bisnis**
 Peningkatan profitabilitas bisnis akan difokuskan dengan terus meningkatkan transaksi bisnis nasabah melalui BRI dengan mengembangkan sistem layanan yang terintegrasi. Selain itu, BRI juga mengimplementasikan manajemen profitabilitas pada setiap nasabah.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

RINGKASAN

Fee Based Income Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank BRI mencapai **Rp 195,33 miliar**, meningkat **6,62%** dibanding 2018 sebesar Rp 183,21 miliar

Fee Base Income Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

(Rp Miliar)



PRODUK DAN LAYANAN BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank ini memiliki dua lini utama yaitu bisnis jasa sindikasi dan pemberian fasilitas limit terutama *uncommitted line* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam negeri.

Bisnis pembiayaan sindikasi ditujukan untuk nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan lebih dari satu kreditur. Sindikasi BRI telah berpengalaman dalam menangani kredit sindikasi dari berbagai sektor bisnis seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, oil & gas, perdagangan/hotel/restoran, perkebunan, pertambangan dan properti yang meliputi jasa *arranger*, *facility agent*, *escrow agent*, dan *security agent*.

Sementara itu, Bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank meliputi *security line*, *foreign exchange line*, *trade finance line*, fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *intraday*, Bank Garansi dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan khususnya untuk IKNB yang menjadi target penyaluran kredit BRI meliputi perusahaan pembiayaan (*multifinance*), asuransi, sekuritas, lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan nonbank lain.

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK TAHUN 2019

Pada tahun 2019, BRI melalui Bisnis Sindikasi masih memprioritaskan penyaluran kredit terutama infrastruktur dan kelistrikan. Selain hal tersebut Sindikasi BRI aktif bekerjasama dengan Bank Himbara, Lembaga Pembiayaan, Bank Swasta Nasional dan Bank Pembangunan

Daerah (BPD) untuk memperbanyak *Partner Base* dan *Customer Base*. Sementara itu, pada Bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank prioritas pemberian fasilitas diutamakan kepada Perusahaan Asuransi untuk Fasilitas penjaminan dan Kontra Bank Garansi, Fasilitas *Intraday* untuk Perusahaan Sekuritas dan *Security Line* untuk meningkatkan pendapatan FBI dan pendapatan bunga non pinjaman, serta memperluas hubungan kemitraan dengan mitra strategis untuk mengoptimalkan peluang bisnis, terutama yang memberi *value chain business* bagi segmen bisnis BRI lainnya.

KINERJA BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank menghasilkan FBI sebesar Rp195,33 miliar atau meningkat

BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

6,62% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp183,21 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan strategi BRI untuk menyesuaikan komposisi kredit untuk mikro dan korporasi tanpa mengurangi layanan yang diberikan oleh BRI kepada mitra dan nasabahnya.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Melalui kegiatan sindikasi dengan perbankan lain dalam beberapa proyek infrastruktur, BRI telah mendukung terlaksananya program-program Pemerintah sebagaimana termuat dalam program Nawacita.

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK TAHUN 2020

Di tahun 2020, strategi penguatan Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank akan dilakukan melalui kerjasama dan sinergi bersama baik itu dengan sesama bank BUMN, bank swasta nasional, bank asing, entitas anak BRI, maupun bank anggota Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Peningkatan kerjasama ini difokuskan untuk memacu pertumbuhan FBI.

Sementara untuk pengembangan Bisnis IKNB, BRI akan meningkatkan limit dan utilisasi limit fasilitas *existing*, dan perusahaan-perusahaan sekuritas serta asuransi potensial. Selain itu, melalui optimalisasi rantai nilai atas nasabah IKNB BRI. Sejalan dengan hal tersebut, BRI akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan implementasi digitalisasi yang dapat mempersingkat proses bisnis.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS INTERNASIONAL, TREASURY, DAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Direktorat Treasury & Global Services

Dengan semakin berkembangnya bisnis perbankan, kebutuhan akan layanan perbankan di luar produk kredit dan simpanan semakin bertambah, dan hal ini menjadi kesempatan bagi bank untuk menangkap peluang pendapatan lainnya diluar pendapatan bunga kredit. SEVP *Treasury & Global Services* akan memastikan peningkatan transaksi dan volume bisnis *Treasury & Global Services* untuk mendukung pencapaian profitabilitas bisnis *Treasury & Global Services*.

BISNIS INTERNASIONAL

RINGKASAN

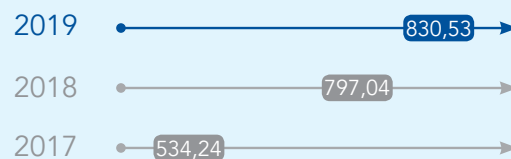
Total Pendapatan Bisnis Internasional mencapai **Rp2,02 triliun**, meningkat **26,55%** dibanding 2018 sebesar Rp1,59 triliun.

Fee Base Income Bisnis Internasional
(Rp Triliun)



Volume Transaksi *Trade Finance* mencapai **Rp830,53 triliun**, meningkat **4,2%** dibanding 2018 sebesar Rp797,04 miliar.

Volume Transaksi *Trade Finance*
(Rp Triliun)



PRODUK DAN LAYANAN BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Internasional BRI melayani berbagai kebutuhan nasabah akan produk atau jasa di bidang *Trade Finance*, bisnis Bank Koresponden, bisnis Remitansi, dan bisnis *Money Changer*. Layanan Bisnis Internasional BRI didukung pula oleh kehadiran Unit Kerja Luar Negeri yang berada di New York, Cayman Islands, Singapura, Hong Kong dan Timor-Leste. Selain itu, BRI juga memiliki *Remittance Representative* untuk meningkatkan layanan bisnis Remitansi di Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

BISNIS INTERNASIONAL

- **Dukungan dari Pekerja yang Profesional dan Tersertifikasi**

Bisnis Internasional BRI didukung pekerja yang profesional di bidang produk dan jasa bisnis internasional serta bersertifikasi internasional, antara lain *Certified Documentary Credit Specialist* (CDCS), *Certified Specialist for Demand Guarantee* (CSDG), dan *Certified International Trade Finance* (CITF) yang diterbitkan oleh The London Institute of Banking & Finance yang bekerja sama dengan *International Chamber of Commerce* (ICC) dan terus diperbaharui berkala. Hal ini menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk menjadi rekan bisnis perdagangan terpercaya dan bisa diandalkan guna menyediakan layanan bisnis internasional yang terbaik dan sejalan dengan perkembangan bisnis nasabah.

- **Dukungan Counterparts dan Unit Kerja**

Bisnis Internasional BRI didukung oleh lebih dari 1.300 Bank Koresponden di seluruh dunia dengan 17 mata uang, bekerjasama dengan lebih dari 71 *Remittance Company*, serta dukungan Unit Kerja seluruh Indonesia.

Untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah akan mata uang asing, BRI juga menyediakan layanan jual beli mata uang asing dalam 22 jenis mata uang, melalui layanan yang tersedia unit kerja operasional di seluruh Indonesia yang telah terkoneksi real time online.

- **Trade Finance Solution**

BRI *Trade Solution* sebagai bentuk integrasi layanan perdagangan internasional maupun domestik diklasifikasikan menjadi *Trade Product*, *Trade Services*, dan *Trade Finance*.

- **Peningkatan Daya Saing**

- Meningkatkan keahlian, dan kapabilitas pekerja terkait Bisnis Internasional.
- Meningkatkan Eksistensi dan Jaringan BRI di Luar Negeri.
- Meningkatkan *Brand Awareness* Bisnis Internasional BRI.

- **Pengembangan Produk**

- Pengembangan layanan *Bundling* Produk *Trade Finance* kepada nasabah inti.
- Melakukan Inovasi Produk *Trade Finance* sesuai dengan perkembangan pasar.

- **Peningkatan Efisiensi Proses Bisnis**

- Melakukan otomasi operasional transaksi *Correspondent Banking*.
- Meningkatkan performa sistem Bisnis Internasional.

- **Peningkatan Kualitas Layanan Nasabah**

- Mengoptimalkan *digital banking* dalam pelayanan *Trade Finance*.
- Pemberian *reward program* untuk pekerja, *counterpart* dan nasabah.

- **Optimalisasi Organisasi Bisnis Internasional**

- Klasifikasi unit kerja berdasarkan potensi sebagai dasar penetapan KPI.
- *Mapping* fungsi *Relationship Manager* dan efektivitas *monitoring* unit kerja luar negeri.

KINERJA BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2019

Pencapaian Bisnis Tahun 2019

Pendapatan Bisnis Internasional mencetak kinerja yang sangat baik. Hingga akhir tahun 2019, pendapatan menjadi Rp2,02 triliun, atau tumbuh 26,55% (yoy) dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp1,59 triliun. Kinerja ini tidak terlepas dari pencapaian strategi bisnis tahun 2019, sebagai berikut:

STRATEGI BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2019

Bisnis Internasional BRI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah yang dinamis. Bisnis Internasional BRI juga berkomitmen meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan melalui peningkatan volume transaksi. Baik *Trade Finance*, *Remittance*, *Money Changer* maupun transaksi bank koresponden. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan bisnis internasional BRI di tahun 2019 memiliki tema "*Modernization International Business Services*" dengan strategi sebagai berikut:



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS INTERNASIONAL

1. Volume transaksi *Trade Finance* sebesar Rp967,77 triliun, atau meningkat 21,42% dari sebelumnya Rp797,04 triliun di Desember 2018.
2. Volume transaksi *Money Changer* sebesar Rp23,52 triliun, atau meningkat 25,10% dari sebelumnya Rp18,80 triliun di Desember 2018.
3. *Fee Based Income* (FBI) transaksi Remitansi mencapai Rp146,1 miliar, atau meningkat 18% (yoy) dari sebelumnya Rp123,7 miliar di Desember 2018.
4. Bisnis Bank Koresponden mencetak kenaikan pendapatan sebesar 54,33% dari Rp171,61 miliar pada Desember 2018 menjadi Rp264,85 miliar pada Desember 2019.

Pencapaian Lainnya tahun 2019

1. BRI telah ikut bergabung dengan member SWIFT GPI
2. Melakukan akuisisi *Counterpart Remittance* kerjasama baru sebanyak 12 *Counterpart*, sehingga secara keseluruhan BRI telah bekerjasama dengan total 71 *Counterpart* Pengiriman uang.
3. Peningkatan *market share incoming* TKI dari 17,80% menjadi 18,71% pada tahun 2019.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

- Memberikan literasi keuangan kepada calon pekerja migran pra-keberangkatan sekaligus pembuatan rekening BRI sebagai tabungan.
- Menjadi penyedia tunggal *Banknotes* SAR untuk calon Jamaah Haji tahun 2019. BRI telah mendistribusikan *living cost* haji selama enam tahun berturut-turut untuk seluruh embarkasi haji Indonesia sejak tahun 2014.
- BRI bersinergi dengan Pemerintah melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Impor (PPEI) - Dirjen Pengembangan Ekspor Impor - Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada UMKM untuk menumbuhkan eksportir-eksportir baru pada enam kota di tahun 2019.
- Guna mendorong kegiatan ekspor BRI menyelenggarakan *Business Matchmaking* dengan menghadirkan *buyers* potensial dari Luar Negeri untuk dipertemukan dengan nasabah UMKM potensi ekspor.

STRATEGI BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Bisnis Internasional BRI fokus untuk menjadi *Top Three Cross Border Payment Solution provider*. Oleh karena itu strategi yang disusun BRI untuk Bisnis Internasional pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bidang Trade Finance

Pengembangan aplikasi *Market Insight* dan data *stream trade finance* BRI sebagai tools untuk melakukan analisa produk dan pemasaran *Trade Finance*.

Bidang Correspondent Banking

1. Melakukan kajian ekspansi bisnis ke beberapa negara Asia lainnya guna memperluas jaringan bisnis internasional sehingga menghasilkan value yang lebih bagi perusahaan.
2. Otomatisasi transaksi *correspondent banking* menggunakan aplikasi Track Processing System (TPS) *imaging*.

Bidang Remitansi

Memperluas kerjasama pengiriman dana dengan mitra *Counterpart*, Bank lokal, Bank Syariah, maupun BPD.

Bidang Money Changer

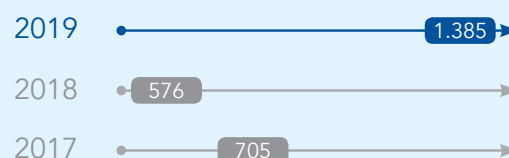
1. BRI menjadi *market leader* dalam transaksi penjualan *Banknotes* SAR (Saudi Arabian Real).
2. Pengembangan layanan Bisnis *Money Changer*.
3. Memperluas kerjasama *business to business* dengan mitra *wholesale money changer*, Bank lokal, Bank Syariah, BPD, maupun *Tour Travel* dan KBIH, serta menambah gerai *money changer* di bandara internasional dan *tourism site* lainnya.

BISNIS TREASURY

RINGKASAN

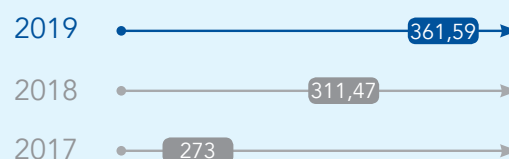
Keuntungan Capital Gain mencapai **Rp1,38** triliun, meningkat **140,5%** dibanding 2018 sebesar Rp 576 miliar.

Capital Gain (Rp Miliar)



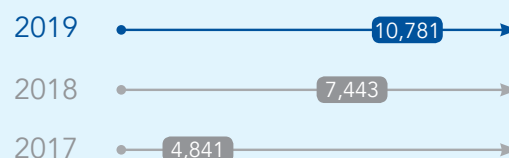
Aset Produktif selain kredit dan penyertaan mencapai **Rp361,59** triliun, meningkat **33,03%** dibanding 2018 sebesar **Rp311,47** triliun.

Aset Produktif Non Loan (Rp Triliun)

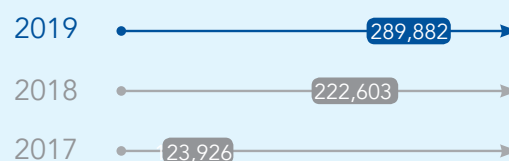


Volume transaksi obligasi BRI mencapai **Rp289,88** triliun, meningkat **30,22%** dibanding 2018 sebesar Rp222,6 triliun, dengan frekuensi transaksi meningkat sebesar **44,85%**.

Frekuensi Transaksi Obligasi (Rp Miliar)



Volume Transaksi Obligasi (Rp Miliar)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS TREASURY

JASA LAYANAN BISNIS TREASURY

Bisnis *Treasury* meliputi bisnis dengan *counterparty* yang mencakup transaksi valuta asing, *marketable securities*, maupun transaksi derivatif. Bisnis *Treasury* BRI diperkuat dengan 19 jaringan regional (Bisnis Internasional & *Treasury* Kantor wilayah BRI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

STRATEGI BISNIS TREASURY TAHUN 2019

Strategi Bisnis *Treasury* tahun 2019 difokuskan pada:

- Menerapkan *active portfolio management* dengan mengoptimalkan eksekusi likuiditas *switching low yield asset to high yield asset* dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- Melakukan pendalaman pasar keuangan dengan perluasan basis nasabah Finansial institution baik Bank maupun industri keuangan non Bank seperti perusahaan Asuransi, Aset Manajemen dan Dana Pensiun.
- Dari sisi pengembangan teknologi, Bisnis *Treasury* mengimplementasi *BRlex Client* yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan nasabah serta *BRI Swap Deposit* merupakan suatu produk dari BRI untuk memenuhi kebutuhan alternatif investasi nasabah.

KINERJA BISNIS TREASURY TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Bisnis *Treasury* mencatat kinerja yang positif sejalan dengan pengelolaan *Portfolio Banking* dan *Trading Book* yang optimal serta fokus terhadap pelayanan nasabah. Secara garis besar, pertumbuhan transaksi *Treasury* selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Volume transaksi *marketable securities* di pasar primer meningkat 25.06%, di pasar sekunder meningkat 56.88%.
- Volume transaksi *foreign exchange* untuk keperluan *client* (ritel) hingga 2019 meningkat 18.41%.
- Frekuensi transaksi *foreign exchange* untuk keperluan *client* (ritel) hingga 2019 meningkat 55.57%.
- Aktiva produktif selain kredit dan penyertaan mencapai Rp361,59 triliun, meningkat 33,03% dibanding tahun 2018 sebesar Rp311,47 triliun.
- Pada tahun 2019 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah menerbitkan instrumen surat utang atau obligasi pada 7 November 2019 sebesar Rp 5 Triliun yang merupakan Penerbitan Umum Berkelanjutan III tahap I tahun 2019 dalam 3 seri yaitu Seri A 1 tahun, Seri B 3 tahun dan Seri C 5 tahun. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 PUB BRI adalah obligasi korporasi yang ditawarkan kepada semua segmen investor baik institusi maupun ritel. Pada tahap I ini, dalam rangka memperdalam literasi keuangan maka PUB tersebut kami tawarkan juga kepada Investor ritel dengan minimum pembelian 50jt dan kelipatannya. Penerbitan ini juga bertujuan untuk memperbesar basis investor dalam negeri, menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor ritel, dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. BRI berhasil menarik minat investor cukup signifikan dengan mencatatkan permintaan sebesar IDR 6.9 Triliun oversubscribe sebanyak 1.38 kali, melebihi target yang diharapkan sebesar IDR 5 Triliun. Pada Seri A yang ditawarkan sebesar IDR 1.125 Miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, Seri B IDR 2.934 Miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun dan Seri C IDR 2.844 Miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI sebagai Dealer Utama, aktif dalam kegiatan inklusi pasar keuangan dengan melakukan pengelolaan portofolio optimal dan perluasan basis nasabah antara lain bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan aset manajemen.

BRI juga aktif melakukan kuota harga jual-beli surat berharga dan transaksi *Treasury* lainnya yang kompetitif dan *up to date*. Luasnya jaringan pemasaran baik unit kerja di dalam negeri maupun luar negeri menjadi nilai tambah BRI dalam

BISNIS TREASURY

kegiatan tersebut. Pencapaian ini menunjukkan BRI aktif mendukung pemerintah dalam membangun perekonomian nasional dan dukungan ini akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Aktifitas-aktifitas ini berhasil membawa BRI menjadi salah satu Dealer Utama terbaik yang dinobatkan Kemenkeu. Selain itu, BRI juga berhasil menjadi Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik Transaksi *Repurchase Agreement* Sesuai GMRA yang dinobatkan Bank Indonesia.

Penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2019

- Dealer Utama SUN Dengan Kinerja Terbaik 2018
- Mitra Distribusi SUN Ritel Terbaik Tahun 2018
- Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik - Kelompok Transaksi *Repurchase Agreement* sesuai GMRA (Global Master *Repurchase Agreement*).

STRATEGI DAN RENCANA KERJA BISNIS TREASURY TAHUN 2020

Bisnis *Treasury* masih akan berfokus pada keseimbangan portofolio guna mendukung kinerja Bank di tahun mendatang. Untuk itu, strategi yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Menerapkan *active portfolio management* dengan mengoptimalkan eksekusi likuiditas *switching low yield asset to high yield asset* dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- Memperkuat struktur pendanaan yang kuat dengan melakukan diversifikasi *funding* non DPK. Aktivitas ini guna mendukung pertumbuhan kredit BRI dan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- Pendalaman pasar keuangan dengan menambah counterparts baru, memperbesar customer base, dan sinergi dengan seluruh perusahaan grup BRI.
- Optimalisasi *flow* transaksi *Treasury* melalui upaya intensifikasi *anchor client*, baik BUMN, non BUMN, maupun institusi pemerintah.
- Dalam memenuhi kebutuhan nasabah *Treasury* akan melakukan peningkatan transaksi dan pengembangan beberapa produk antara lain Produk *Hedging* Syariah atas nilai tukar, *Forward Rate Agreement*, dan Bonds Option.
- Berperan sebagai *Market Maker* dengan tetap aktif melakukan kuotasi harga yang kompetitif dan *up to date* sehingga berdampak pada peningkatan transaksi *Treasury*.



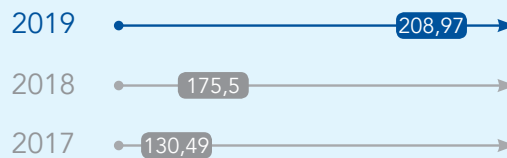
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

RINGKASAN

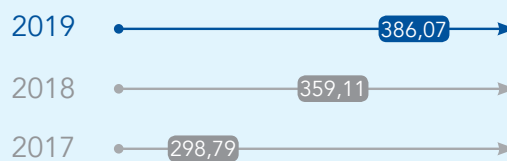
Fee based income jasa Penunjang Pasar Modal pada 2019 mencapai **Rp208,97** miliar, meningkat **19,07%** dibanding 2018 sebesar Rp175,5 miliar.

Fee based income Jasa Penunjang Pasar Modal
(Rp Miliar)



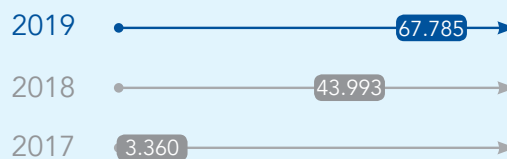
Aset kelolaan Kustodian mencapai **Rp386,07** triliun, meningkat **7,5%** dibanding 2018 sebesar Rp359,11 Triliun.

Aset Kelolaan Kustodian
(Rp Triliun)



Jumlah giro Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terdaftar sebanyak **67.785** rekening, meningkat **54,08%** dibanding 2018 sebesar 43.993 rekening.

Jumlah Giro Rekening
(Rekening)



BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

STRATEGI BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2019

BRI telah mengembangkan bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal sebagai salah satu bagian memperdalam pasar keuangan serta meningkatkan *fee based income*. Strategi bisnis yang telah dilakukan pada tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengembangan aplikasi *front-end* untuk memenuhi kebutuhan nasabah kustodi.
- Melakukan integrasi sistem *core custody* dengan *Core Banking* (BRINETs), dan aplikasi *depository* (C-BEST, BI-SSSS, dan Euroclear).
- Pengembangan sistem khusus Efek Beragunan Aset (EBA).
- Pengembangan produk (EBA, Reksa Dana USD, Reksa Dana Penyertaan Terbatas).
- Melakukan pemasaran produk DPLK kepada Pekerja Migran Indonesia bekerjasama dengan BNP2TKI, Agen BRILink dan TNI/Polri.
- Melaksanakan Program akuisisi DPLK korporat dengan tambahan benefit asuransi.
- Melakukan *upgrade* Sistem DPLK (Front End sampai dengan Back End System).
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh customer Jasa Penunjang Pasar Modal.

KINERJA BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, BRI terus meningkatkan kinerja Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal sebagai bagian dari upaya merealisasikan aspirasi menjadi *The Most Valuable Bank* in South East Asia. Pencapaian kinerja finansial dan non finansial dari Bisnis ini sesuai dengan yang ditargetkan.

Total *Fee Based Income* (FBI) pada 2019 sebesar Rp208.97 miliar, atau meningkat 19.07% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp175.5 miliar. Secara rinci, perolehan FBI disumbang dari FBI DPLK sebesar Rp75 miliar, FBI Kustodian Rp113.7 miliar, dan FBI Wali Amanat Rp11.7 miliar.

Keterangan Rincian Fee Based Jasa Penunjang Pasar Modal (dalam miliar rupiah)	2017	2018	2019	Pertumbuhan
				2018-2019
Fee Based Income DPLK	46.87	60.13	75.09	24.87%
Fee Based Income Kustodian	71.51	98.34	113.726	15.65%
Fee Based Income Trust	3.91	6.35	8.423	32.65%
Fee Based Income Wali Amanat	8.2	10.68	11.738	9.91%
Total Fee Based Income	130.49	175.5	208.97	19.07%

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Layanan Jasa Penunjang Pasar Modal meliputi Jasa Wali Amanat, Kustodian, Trust, Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) baik untuk nasabah korporasi maupun nasabah ritel.

Keterangan	2017	2018	2019	Pertumbuhan
				2018-2019
Aset Kelolaan Kustodian	298,79	359,11	386,07	7,5%
Aset Kelolaan DPLK	8,79	11,11	13,27	19,44%



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Kinerja DPLK BRI yang mulai beroperasi sejak tahun 2006 terus bertumbuh sepanjang tahun 2019. Hal itu terlihat dari peningkatan aset kelolaan sebesar 19,44% menjadi Rp13,27 triliun. Peningkatan ini disebabkan antara lain naiknya kepesertaan DPLK BRI. Sementara Fee Based Income (FBI) DPLK sebesar Rp75,09 miliar, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp60,13 miliar. Kinerja investasi DPLK BRI mencatatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) masing-masing paket investasi menghasilkan imbal hasil sebesar 7,56% untuk DPLK BRI Pasar Uang, 8,14% untuk DPLK BRI Pendapatan Tetap, -2,80% untuk DPLK BRI Saham, 7,74% untuk DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan 6,66% untuk DPLK BRI Berimbang Syariah.

Kustodian

BRI merupakan Bank Kustodian pertama yang mengelola Efek Beragun Aset di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, aset kelolaan kustodian BRI sebesar Rp386,07 triliun, meningkat 7,5% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp359,11 triliun. Dari pengelolaan aset tersebut, Kustodian BRI memperoleh *fee based income* sebesar Rp113,72 miliar, atau naik 15,65% dari tahun 2018 yang sebesar Rp98,34 miliar.

Trust

Bisnis Trustee BRI menghasilkan *fee based income* sebesar Rp8,42 miliar, meningkat turun 32,65% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp6,35 miliar.

Wali Amanat

Fee based income yang dihasilkan dari bisnis Wali Amanat sebesar Rp11,73 miliar, meningkat 9,91% dari tahun 2018 yang sebesar Rp10,68 miliar.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

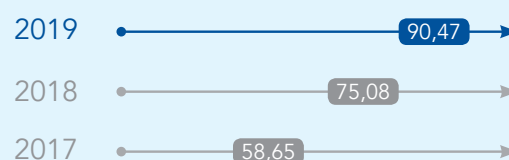
BRI turut berkontribusi dalam memajukan pasar modal di Indonesia antara lain dengan menyediakan layanan Giro Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal. Pada tahun 2019 jumlah RDN yang baru bertambah sebanyak 23.792 rekening, sehingga jumlah RDN yang terdaftar menjadi sebanyak 67.785 rekening, meningkat 154,08% dibandingkan tahun 2018 sebanyak 43.993 rekening. Peningkatan jumlah rekening merupakan hasil dari perluasan kerja sama yang dilakukan BRI dengan perusahaan-perusahaan efek.

BISNIS ENTITAS ANAK

RINGKASAN

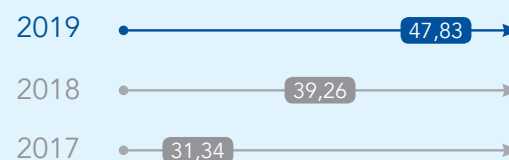
Aset Entitas Anak mencapai **Rp90,47** triliun, meningkat **20,50%** dibanding 2018 sebesar Rp75,08 triliun.

Aset Entitas Anak
(Dalam Triliun)



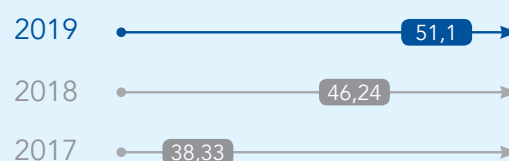
Outstanding Kredit, Piutang dan Pembiayaan Syariah Entitas Anak mencapai **Rp47,83** triliun, meningkat **21,83%** dibanding 2018 sebesar Rp39,26 triliun.

Kredit, Piutang & Pembiayaan Syariah Entitas Anak
(Rp Triliun)



Simpanan Entitas Anak mencapai **Rp51,1** triliun, meningkat **10,53%** dibanding 2018 sebesar Rp46,24 triliun.

Simpanan Entitas Anak
(Rp Triliun)





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS ENTITAS ANAK

BRI adalah induk usaha dari kelompok perusahaan jasa keuangan yang terdiri dari:

1. PT Bank BRISyariah Tbk (BRISyariah)
2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
3. BRI Remittance Co. Ltd Hong Kong (BRI Remittance)
4. PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
5. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
6. PT Danareksa Sekuritas
7. PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
8. PT Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS)

Pada September 2019, BRI telah melakukan pembelian saham PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) dari Dana Pensiun BRI dengan nilai sebesar Rp 1,04 triliun . BRINS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi umum. Setelah proses akuisisi maka komposisi pemegang saham BRINS adalah BRI sebesar 90% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI sebesar 10%. Selain potensi sinergi di dalam BRI Group, pengambilalihan saham tersebut diharapkan semakin melengkapi layanan keuangan yang dapat diberikan oleh BRI Group. Dengan demikian, BRI Group dapat memberikan layanan keuangan yang lengkap, beragam dan terintegrasi (*integrated financial solution*) bagi nasabah.



PT BANK SYARIAH TBK (BRISYARIAH)

RINGKASAN KINERJA BRISYARIAH TAHUN 2017 – 2019

Total Aset

2017	2018	2019	Growth
Rp31,54 triliun	Rp37,92 triliun	Rp43,16 triliun	13,81%

Total Pembiayaan

2017	2018	2019	Growth
Rp19,01 triliun	Rp21,86 triliun	Rp27,38 triliun	25,25%

Total Dana Pihak Ketiga

2017	2018	2019	Growth
Rp26,36 triliun	Rp28,86 triliun	Rp34,14 triliun	18,29%

Profil Perusahaan

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk (selanjutnya disebut BRI Syariah) dimulai dengan akuisisi Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008, BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

BRI Syariah berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan Syariah yang terbaik untuk berbagai segmen masyarakat. Basis nasabah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi tersebut dan peningkatan transparansi praktek tata kelola perusahaan yang baik, BRI Syariah melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melakukan penawaran umum saham perdana.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BISNIS ENTITAS ANAK

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BRIsyariah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama Independen	Parman Nataatmadja*
Komisaris Independen	Eko Suwardi
Komisaris Independen	Ernie Tisnawati Sule*
Komisaris	Sutanto
Direksi	
Direktur Utama	Ngatari*
Direktur	Fahmi Subandi
Direktur	Yana Soeprianan*
Direktur	Kokok Alun Akbar
Direktur	Firdy Arnaldy
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua DPS	KH. Didin Hafidhuddin
Anggota DPS	M. Gunawan Yasni

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRIsyariah membukukan total aset sebesar Rp43,16 triliun meningkat Rp5,24 triliun atau 13,81% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp37,92 triliun. Sebagian besar aset merupakan aset produktif pembiayaan. Komposisi aset produktif terhadap total aset pada 2019 mencapai 95,63%. BRIsyariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun 2019 sebesar Rp34,14 triliun, tumbuh 18,29% dari tahun 2018 yang sebesar Rp28,86 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 29 April: Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan *Al Rajhi* mengenai pengadaan platform solusi pembayaran ke Arab Saudi melalui *Islamic Payment Gateway* yang terhubung langsung ke Al Rajhi
- 29 April: RUPST yang memutuskan pengangkatan manajemen baru
- 23 Agustus: BRIsyariah meluncurkan BRIS Pay. Alat pembayaran berbasis QR Code yang terhubung dengan BRIS Online
- 27 Agustus: BRIsyariah meraih penghargaan sebagai unit pengumpul zakat terbaik versi BAZNAS
- 18 September: Penandatanganan kerjasama dengan Paytren untuk peningkatan layanan keuangan digital di Indonesia
- 3 Oktober: Penandatanganan kerjasama dengan pengembang perumahan Alam Sutera untuk menggenjot pertumbuhan pembiayaan di segmen konsumen
- 30 Oktober: Penandatanganan kerjasama layanan keuangan syariah dengan PT PLN (Persero).
- 7 November: Penandatanganan kerjasama dengan PT Pegadaian untuk mempermudah masyarakat berhaji
- 11 November: Pembukaan Kantor Cabang Pembantu secara sharing office dalam rangka implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh
- 14 November: BRIsyariah gandeng BEKRAF untuk memperluas penyaluran pembiayaan mikro kepada pelaku industri kreatif nasional

BISNIS ENTITAS ANAK

- 17 November: BRIsyariah meluncurkan i-Kuma, sebuah aplikasi untuk mempercepat proses pembiayaan mikro
 - 17 November: Penandatanganan nota kesepahaman dengan Tokopedia dalam hal penyediaan *on boarding account*
 - 19 November: BRIsyariah menerima penghargaan sebagai bank syariah terbaik penyalur pembiayaan UMKM dalam Anugerah Syariah Republika 2019.
 - 25 November: BRIsyariah menyelenggarakan public expose untuk pertama kalinya sebagai perusahaan terbuka
 - 10 Desember: Penandatanganan kerjasama dengan LAZISMU untuk memudahkan masyarakat membayar zakat, infak, sodaqoh serta wakaf
 - 12 Desember: Penandatanganan nota kesepahaman dengan Investree. BRIsyariah adalah bank syariah pertama yang menjajaki kerjasama dengan fintech market place lending.
 - 15 Desember: BRIsyariah bersama bank-bank syariah lainnya menandatangani kerjasama dengan Muhammadiyah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia
 - 19 Desember: Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR
2. Peningkatan efisiensi operasional, antara lain melalui pengoptimalan proses untuk aktivitas di *front, middle, dan back office*
 3. Peningkatan keterlibatan pelanggan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membangun *targeted relationship* dengan komunitas mikro yang potensial.
 - b. Meningkatkan kesadaran nasabah terkait layanan BRIsyariah melalui jaringan BRI, termasuk online channels BRI.
 4. Peningkatan layanan dan aksesibilitas pelanggan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Akselerasi melalui jaringan Kantor BRI tertentu dalam rangka penawaran produk.
 - b. Memperluas jaringan KLS dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis.
 - c. Meningkatkan *customer experience* melalui modernisasi *Information Technology*.
 5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, antara lain melalui Evaluasi Budaya Kerja Perusahaan saat ini, *alignment* Budaya Kerja BRIsyariah dengan Budaya BRI, dan mengimplementasikan adaptasi Budaya Kerja

BRIsyariah juga akan menangkap peluang industri halal yang diproyeksikan semakin meningkat di masa mendatang. Selain itu, BRIsyariah bersama BRI secara bertahap melakukan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2020.

Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2020

Strategi pengembangan bisnis BRIsyariah tahun 2020 merupakan bagian dari strategi jangka Panjang BRIsyariah 2020-2023, yang antara lain terdiri dari:

1. Perbaikan pada produk yang ditawarkan, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menciptakan produk untuk melengkapi ekosistem Haji/Umrah.
 - b. Menjalin kerja sama dengan biro perjalanan ibadah terpercaya.
 - c. Mengembangkan produk pembiayaan halal.
 - d. Inovasi produk pembiayaan Komersial, SME, Linkage dan Mikro
 - e. Mengembangkan *Value Chain & Trickle Down Effect*



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI Agro)

RINGKASAN KINERJA BRISYARIAH TAHUN 2017 – 2019

Total Aset

2017	2018	2019	Growth
Rp16,32 triliun	Rp23,31 triliun	Rp27,15 triliun	16,47%

Total Kredit

2017	2018	2019	Growth
Rp10,98 triliun	Rp15,67 triliun	Rp19,37 triliun	23,62%

Total Dana Pihak Ketiga

2017	2018	2019	Growth
Rp12,42 triliun	Rp18,06 triliun	Rp21,15 triliun	17,11%

Profil Perusahaan

BRI Agro didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) pada tanggal 27 September 1989, dengan nama Bank AGRO yang punya peran penting dan strategis dalam perkembangan sektor agrobisnis di Indonesia. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan agrobisnis, sejak berdiri hingga saat ini portofolio kredit Bank AGRO sebagian besar (antara 50% - 70%) disalurkan di sektor agrobisnis, baik on farm maupun off farm. Bank AGRO didirikan dengan Akta Notaris Rd. Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989. Pada tanggal 11 Desember 1989 memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/Upps/PSbD tanggal 26 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Pada tahun 2003, Bank AGRO menjadi Perusahaan Publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga Tbk, dan pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2007, saham Bank AGRO dengan kode AGRO sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2006, Bank AGRO meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Pada tanggal 3 Maret 2011 ditandatangani Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan Dapenbun di Jakarta. BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk. Sebagai wujud komitmen bersama dalam sinergi bersama BRI, pada tahun 2012 bersamaan dengan ulang tahun ke-23, Bank AGRO berganti nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, dengan nama komersial BRI Agro.

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI Agro)

BRI Agro semakin mantap melangkah bersama BRI untuk melayani dengan sepenuh hati. Untuk menunjukkan keseriusannya, Perseroan terus melakukan sinergi dengan BRI. Seluruh nasabah Perseroan dapat menggunakan kartu ATM Perseroan secara gratis untuk segala transaksi di seluruh jaringan ATM BRI yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tanpa melupakan fokus awal Perseroan, sektor agrobisnis tetap menjadi pilar utama bisnis Perseroan, tetapi Perseroan juga terus berbenah untuk menyediakan layanan yang lebih lengkap dan prima bagi nasabah. Tabungan, Deposito, dan Giro serta program berhadiah hadir untuk menjawab kebutuhan simpanan dan investasi nasabah, sedangkan fasilitas kredit Perseroan di antaranya untuk segmen ritel, segmen menengah, maupun segmen consumer, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha nasabah.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Agro sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Plt Komisaris Utama & Independen	Anna Maria Tjiadarma
Komisaris Independen	A. Y. Soepadmo
Komisaris	I. B. K. Suamba Manuaba *)
Direksi	
Plt Direktur Utama	Ebeneser Girsang
Direktur Kepatuhan	Harry Prayudi
Direktur Bisnis	Sigit Murtiyoso
Direktur Operasional dan Keuangan	Ernawan

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRI Agro membukukan total aset sebesar Rp27,15 triliun meningkat 16,47% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp23,31 triliun. BRI Agro berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun 2019 sebesar Rp21,15 triliun, tumbuh 17,11% dari tahun 2018 yang sebesar Rp18,06 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 23 Februari: Launching PINANG di Solo
- 28 Maret: RUPS Tahunan di Kantor Pusat BRI Agro Lt. 3
- 15 April: Penandatanganan Kerjasama dengan DAPENBUN di Kantor Pusat BRI Agro Lantai 3
- 23 Mei: Penandatanganan kerjasama dengan Lion Air di Kantor Pusat Lion Air
- 27 Mei: RUPS LB di Kantor Pusat BRI Agro Lt. 3
- 26 Juni: RUPS LB di Kantor Pusat BRI Agro Lantai 3
- 19 Agustus: Investor Gathering - Company Update di Hotel Ritz Carlton Jakarta
- 21 Agustus: Media Gathering di Jakarta
- 8 September: Launching "KEJUTAN POIN AGROTAMA" dan Acara Opening AGROLYMPIC ke 30
- 23 Oktober: CSR MANGROVE "Peduli Lingkungan " di Pantai Sederhana Muara Gembong - Bekasi
- 27 Oktober: Jalan sehat dalam acara "Family Day 2019" di Corporate University
- 27 Oktober: Launching Produk Internet Banking, Website & Virtual Account di Corporate University
- 30 Oktober: Penandatanganan Kerjasama dengan AYO KITA
- 27 November: RUPSLB BRI di Kantor Pusat BRI Agro Lantai 3



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI Agro)

Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2020

Pilar pertama BRI Agro adalah *Traditional Business Model*, yang akan ditempuh dengan penguatan model bisnis tradisional melalui peningkatan keunggulan bisnis BRI Agro yang saat ini fokus pada agribisnis. Penguatan juga dilakukan untuk penyaluran kredit pada segmen ritel dan segmen consumer serta penghimpunan dana murah untuk meningkatkan porsi CASA.

Pilar kedua BRI Agro adalah spesialisasi sektor secara menyeluruh, melalui penyesuaian produk dengan kebutuhan nasabah/debitur. Penyesuaian juga dilakukan dalam skoring dan manajemen risiko yang sesuai dengan fokus bisnis perseroan. Pengembangan SDM adalah hal yang utama dalam pilar kedua, yang akan fokus pada spesialisasi dalam bisnis yang akan dimasuki oleh Perseroan.

Pilar ketiga BRI Agro adalah bermitra dengan perusahaan dan *business agent*, melalui pengembangan digital *ecosystem platform* untuk sektor agribisnis. Melalui kemitraan ini, nasabah dan masyarakat yang bergerak di sektor agribisnis akan lebih mudah dalam mencari bertransaksi serta memperoleh penawaran produk-produk BRI Agro.

Pilar keempat BRI Agro adalah *digital attacker*. Sebagai Entitas Anak BRI yang didukung penuh oleh induk untuk menghadapi ekosistem *fintech*, BRI Agro meluncurkan PINANG yang menjadi salah satu produk unggulan BRI Agro pada tanggal 23 Februari 2019. Ke depan PINANG diharapkan dapat memperbesar porsi penyaluran kredit BRI Agro untuk segmen bisnis konsumen. Sampai dengan akhir tahun 2019, total disbursement PINANG mencapai Rp30,6 miliar dengan total 7.331 debitur.



BRI REMITTANCE COMPANY LTD. (BRI REMITTANCE)

RINGKASAN KINERJA BRI REMITTANCE TAHUN 2017 – 2019

Total Aset

2017	2018	2019	Growth
Rp8,96 miliar	Rp7,50 miliar	Rp7,07 miliar	(5,73%)

Nominal Transaksi

2017	2018	2019	Growth
Rp508,03 miliar	Rp384,97 miliar	Rp531,74 miliar	38,12%

Jumlah Transaksi

2017	2018	2019	Growth
96.309	103.680	127.590	23,06%

Profil Perusahaan

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer dan Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong (BRI Remittance).

Sesuai dengan License No. 12-08-00742 yang diperoleh dari Hong Kong Customs & Excise Department, BRI Remittance adalah badan usaha yang diijinkan melaksanakan bisnis dalam kriteria *money service (money service operator)* secara khusus yaitu bidang bisnis remitansi (pengiriman uang) dari Hong Kong ke Indonesia. BRI Remittance Company saat ini melayani kebutuhan transaksi keuangan (menabung dan pengiriman uang) nasabah BRI yang berdomisili di Hong Kong.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BRI REMITTANCE COMPANY LTD. (BRI REMITTANCE)

Sampai dengan saat ini BRI Remittance memiliki 4 kantor Cabang operasional dan 1 kantor back office yang tersebar di berbagai wilayah potensial di Hong Kong sebagai berikut:

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat
1.	Causeway Bay (Main Branch)	Shop 3 G/F, Bawview Mansion 24 – 36 Causeway Road, Causeway Bay - Hong Kong
2.	Yuen Long	Shop 25 1/F Hop Yick Commercial centre 33 Hop Choi Street Yuen Long – New Territories
3.	Tsuen Wan	Shop 214 2/F Lik Sang Plaza, 269 Castle Peak Road, Tsuen Wan
4.	Mong Kok	G/F 137 Sai Yee Street Mongkok – Kowloon
5.	Causeway Bay (Back Office)	Room 22 G/F Bayview Mansion 11-33 Morreton Terrace, Causeway Bay – Hong Kong

Susunan Manajemen BRI Remittance

BRI Remittance Hong Kong dipimpin oleh 1 (satu) orang *Executive Director* dan 1 (satu) orang *Non-Executive Director*, yaitu:

Jabatan	Nama
Manajemen Eksekutif	
Direktur Eksekutif	Gigieh Perkasa
Direktur Non-Eksekutif	Roby Firmansjah Sastraatmadja

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Total Aset BRI Remittance tahun 2019 sebesar HKD 3.965.161. Jumlah Transaksi remitansi di BRI Remittance adalah sebesar 127.590, meningkat sebesar 23,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar 103,680 transaksi.

Untuk Nilai Transaksi Remittance di BRI Remittance adalah sebesar HKD 298.264.838. Nilai tersebut mengalami peningkatan 38,12% dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar HKD 215,942,836.

Peristiwa Penting dan Strategi Tahun 2019

- Pembuatan *Disaster Recovery Centre* yang ditempatkan di luar Pulau Hong Kong untukantisipasi situasi yang belum kondusif di Hong Kong, terkait aksi demonstrasi massal sejak Juni 2019.
- Pemasangan *cash vault* (brankas) dengan kapasitas lebih besar dan terhubung langsung dengan *server security service provider* sehingga transaksi terkait cash akan lebih aman.
- Pembuatan modul Integrated Management Information System sehingga semakin mendukung pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*
- Penyediaan fungsi *incoming remittance*, sehingga memungkinkan nasabah melakukan penarikan uang dari saldo rupiah tabungannya untuk ditarik dalam mata uang Hong Kong Dollar, sehingga hal ini dapat mengatasi keterbatasan ketersediaan mesin ATM yang beroperasi di Hong Kong.
- Penggantian *core system* BRI Remittance, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara *real time* dan mendukung pengembangan BRI Remittance *mobile apps*.

BRI REMITTANCE COMPANY LTD. (BRI REMITTANCE)

Strategi Pengembangan Tahun 2020

Di tahun 2020, BRI Remittance akan fokus pada peningkatan transaksi remittance dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan ekspansi kerjasama *remittance* ke beberapa koridor negara lain
- b. Menyelesaikan penggantian *core system* secara keseluruhan.
- c. Fokus pada pemasaran menggunakan *mobile apps*
- d. Mencari sumber pendapatan dari layanan *non remittance*.
- e. Melaksanakan *cross selling* produk Perusahaan Induk.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

RINGKASAN KINERJA BRI LIFE TAHUN 2017 – 2019

Total Aset

2017	2018	2019	Growth
Rp8,16 triliun	Rp9,36 triliun	Rp11,22 triliun	19,87%

Ekuitas

2017	2018	2019	Growth
Rp2,2 triliun	Rp2,23 triliun	Rp2,63 triliun	17,94%

Pendapatan Premi

2017	2018	2019	Growth
Rp3,93 triliun	Rp4,39 triliun	Rp5,01 triliun	14,12%

Profil Perusahaan

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) yang semula bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) didirikan oleh Dana Pensiun BRI pada tanggal 28 Oktober 1987 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

Pada akhir Desember 2015, telah dilakukan akuisisi atas PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) oleh BRI sebesar 91% dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life). Pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHUAH.01.03-0000524 tanggal 06 Januari 2016.

Pada tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Akta Notaris Nomor 31, terdapat perubahan Perseroan dimana sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera berubah menjadi PT Asuransi BRI Life. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa PT Asuransi BRI Life merupakan anak perusahaan BRI. Perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan akta ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU0004875. AH.01.02 tanggal 27 Februari 2017.

PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Kiprah BRI Life semakin dikenal luas sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang telah melayani lebih dari 9,2 juta nasabah melalui program-program asuransi unggulan yang bermanfaat dan menguntungkan. BRI Life juga didukung dengan beragam produk asuransi BRI Life yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi produk: AJK, Individu, Korporasi, Syariah, Bancassurance dan Mikro.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BRI Life sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Tri Wintarto
Wakil Komisaris Utama	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati
Komisaris Independen	Eko Wahyu Andriastono
Komisaris Independen	M. Ridwan Rizqi R. Nasution
Komisaris Independen	Mulabasa Hutabarat
Komisaris	Siswarin Dwi Hendarsapti
Direksi	
Direktur Utama	Gatot M. Trisnadi
Direktur	Khairi Setiawan
Direktur	Dany Cahya Rukmana
Direktur	Anik Hidayati
Direktur	Ansar Arifin
Direktur	Sugeng Sudibyo
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua DPS	K. H. Dr. Mohammad Hidayat
Anggota DPS	Ir. H. Agus Haryadi, AAALJ, FIIS
Anggota DPS	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRI Life membukukan total aset sebesar Rp11,22 triliun meningkat 19,87% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp9,36 triliun. Pendapatan Premi BRI Life pada tahun 2019 sebesar Rp5,01 triliun, tumbuh 14,12% dari tahun 2018 yang sebesar Rp4,39 triliun.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 29 Maret: penghargaan "Top 10 Most Trusted Insurance Company" Indonesia Insurance Innovation Award 2019 (*Customer Choice*).
- 26 April: penghargaan "Indonesia Financial Top Leader Award 2019" Smart Leader for Financial Industry dari Warta Ekonomi. BRI Life menjadi The Best Financial Top Leader 2019 pada kategori perusahaan asuransi jiwa.
- 18 Juli: Menerima penghargaan sebagai Asuransi Jiwa Terbaik untuk kategori aset di atas 5-10 Triliun dari Majalah Investor
- 23 Juli: Menerima penghargaan Best Life Insurance 2019 (Peringkat Pertama) pada acara Insurance Award 2019 dari Majalah Media Asuransi untuk kategori perusahaan asuransi di kelompok Rp. 1,25 Triliun – Rp. 4 Triliun.
- 25 Juli: Meraih 2 (dua) penghargaan dari Majalah Infobank dalam acara Insurance Award 2019; untuk Kinerja Keuangan Tahun 2018 serta penghargaan Golden Trophy karena predikat "Sangat Bagus" kategori Perusahaan Asuransi Jiwa "Berpremi Bruto Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun", yang telah diraih selama 5 tahun berturut-turut.
- 26 Juli: Meraih penghargaan sebagai "Perusahaan Asuransi Inovatif dalam Pengembangan Bancassurance dan Produk Link Berbasis Syariah" kategori asuransi jiwa diraih BRI Life dari Majalah Warta.
- 26 Agustus: Top Business dengan kategori Top Life Insurance 2019 dan Top CEO Life Insurance 2019.

Top Insurance adalah kegiatan tahunan pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang memiliki kinerja keuangan, produk, dan layanan terbaik, serta memiliki prospek bisnis yang baik dan berkontribusi tinggi dalam pembangunan nasional.

- 25 Oktober: BRI Life mendapat predikat "Sangat Bagus" dalam rating Sharia Finance tahunan versi Majalah Infobank.
- 21 November: penghargaan dalam "30 Insurance Market Leader Award 2019" yang diselenggarakan Media Asuransi dalam acara Market Leader 2019.
- 27 November: penghargaan The Winner of TOP Digital Awards 2019 kategori TOP DIGITAL Implementation 2019 on Insurance Sector # Level Star 4 dan TOP Leader on Digital Implementation 2019 yang diberikan kepada Gatot M. Trisnadi selaku Direktur Utama PT. Asuransi BRI Life. TOP DIGITAL merupakan penghargaan bidang TI TELCO/ Teknologi Digital yang terbesar di Indonesia.
- 5 Desember: penghargaan "RRI Financial Award 2019" untuk kategori asuransi jiwa ber-aset < 10 T dengan predikat Millennial's Admirable Brand in Brand Image dari RRI Bersama Iconomics.
- 11 Desember: penghargaan dari Majalah The Finance dalam acara Top 20 Financial Institution 2019 & The best CFO in Financial Institution 2019.
- 11 Desember: BRI Life kembali meraih penghargaan dengan

predikat TRUSTED dari Majalah SWA bekerja sama dengan *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* serta SWANETWORK.

Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2020

Strategi Tahun 2020 adalah secara agresif melakukan *push refferal* melalui utilisasi *Big Data Analytic* dan penjualan produk baik model Referensi dan Distribusi yang dilakukan melalui Bank *Staff Selling* dan *Bancassurance Financial Advisor* untuk lini bisnis *Bancassurance* khususnya produk asuransi mikro.

Disisi lain BRI Life mewujudkan cita cita Bank BRI untuk mewujudkan *One Stop Financial Solution* bagi nasabah BRI melauai pengembangan teknologi melalui pengembangan *core system* dan surrounding nya dalam upaya untuk meningkatkan layanan nasabah dan integrasi dengan teknologi yang dimiliki Bank BRI.



PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

RINGKASAN KINERJA BRI FINANCE TAHUN 2017 – 2019

Total Aset

2017	2018	2019	Growth
Rp2,61 triliun	Rp3,63 triliun	Rp4,60 triliun	26,72%

Pembiayaan

2017	2018	2019	Growth
Rp2,48 triliun	Rp3,40 triliun	Rp4,19 triliun	23,23%

Pendanaan

2017	2018	2019	Growth
Rp1,88 triliun	Rp2,71 triliun	Rp3,56 triliun	31,36%

Profil Perusahaan

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang multifinance, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,78%. Pada mulanya BRI Finance berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nama perusahaan PT Sari Usaha Leasing. PT. Sari Usaha Leasing adalah salah satu perusahaan perintis untuk industri pembiayaan di Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-465/KM.11/1983.

Di tahun 1991, BRI Finance mendapatkan izin usaha untuk menjalankan bisnis multi-finance sehingga melakukan penamaan ulang menjadi PT Sanwa-BRI Finance. Seiring dengan terjadinya proses merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Jepang menjadi The UFJ Bank Ltd, Jepang, nama BRI Finance disesuaikan menjadi PT UFJ-BRI Finance di tahun 2002 dan menjadi PT BTMU-BRI Finance di tahun 2008.

Pada 30 September 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham BRI Finance dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jepang. Kepemilikan saham Perusahaan resmi dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia sebesar 1%. Seiring dengan peralihan saham, PT BTMU-BRI Finance mengubah namanya PT BRI Multifinance Indonesia dengan merk dagang BRI Finance. Perubahan ini menjadikan BRI Finance sebagai bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia. Pada tanggal 13 Agustus 2019, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan penambahan



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) kepada BRI Finance sehingga terjadi peningkatan kepemilikan saham dari sebesar 99,6% menjadi sebesar 99,78% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 0,22%.

BRI Finance memfokuskan bisnis di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi. Dari sisi geografi, BRI Finance melakukan bisnis secara menyeluruh dan mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan tidak terpaku pada merek, tipe, area atau industri tertentu.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRI Finance sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	I Komang Sudiarsa
Komisaris Independen	Boyke Budiono
Komisaris	Ngalim Sawega
Direksi	
Direktur Utama	Wisto Prihadi
Direktur	Handayatni Ariefiana Harjanti
Direktur	Achmad Chairul Ganie
Direktur	Willy Halim Sugiardi

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRI Finance membukukan total aset sebesar Rp4,60 triliun meningkat 26,72% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp3,63 triliun. Penyaluran pembiayaan BRI Finance pada tahun 2019 sebesar Rp4,19 triliun, tumbuh 23,23% dari tahun 2018 yang sebesar Rp3,40 triliun. Pendanaan BRI Finance pada tahun 2019 sebesar Rp3,56 triliun, tumbuh 31,36% dari tahun 2018 yang sebesar Rp2,71 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- Melakukan peningkatan status 5 Kantor Pemasaran menjadi kantor Cabang yang berlokasi di Tangerang Selatan, Denpasar, Semarang, Pekanbaru* dan Balikpapan*.
Membuka 5 Kantor Pemasaran baru yang berlokasi di Pontianak*, Bogor*, Padang*, Manado*, Kelapa Gading*.
- Dengan penambahan unit kerja baru, maka BRI Finance akan memiliki 1 Kantor Pusat (Jakarta), 10 Kantor Cabang (Bandung, Bekasi, Denpasar, Makassar, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya, Tangerang Selatan, Medan) serta 15 Kantor Pemasaran. (*dalam proses perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan)
- Agustus 2019: melakukan Peningkatan Modal Dasar menjadi sebesar Rp1 triliun dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor melalui penambahan penyertaan modal Bank BRI pada BRI Finance sebesar Rp100 miliar sehingga Modal Ditempatkan dan Modal Disetor BRI Finance menjadi sebesar Rp255 miliar.
- 13 Desember: Penerbitan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mendapat rating AA- dari PEFINDO

PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

Strategi Pengembangan Tahun 2020

Pada tahun 2020, BRI Finance akan melanjutkan pengembangan bisnis di tahun 2019 melalui pengembangan proses bisnis secara digital. Pengembangan akan dilakukan melalui sinergi bersama BRI dengan optimalisasi BRISpot konsumen serta pengembangan aplikasi *mobile* MOBRIF sebagai *referral* dan *lead generation*. Strategis insiatif yang akan dijalankan oleh BRI Finance antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan *distribution network* di kota – kota prioritas,
2. Menyusun sistem *sales performance monitoring*,
3. Mambangun kemitraan bersama perusahaan *fintech* dan *e-channel* BRI,
4. Meluncurkan *joint marketing campaign* dengan BRI untuk *brand building*.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



PT DANAREKSA SEKURITAS

RINGKASAN KINERJA TAHUN 2018 – 2019

Total Aset

2018	2019	Growth
Rp860,65 miliar	Rp1,08 triliun	25,78%

Pendapatan Usaha

2018	2019	Growth
Rp193,85 miliar	Rp202,59 miliar	4,51%

Nilai Transaksi *Equity Brokerage*

2018	2019	Growth
Rp41,26 triliun	Rp51,91 triliun	25,81%

Profil Perusahaan

PT Danareksa Sekuritas (Danareksa) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 25 tanggal 1 Juli 1992. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7248.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 September 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 5392 tanggal 27 Oktober 1992.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup usaha Danareksa adalah sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan kegiatan usaha penunjang yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan memperoleh izin usaha dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 sebagai Perantara Pedagang Efek dan Surat Keputusan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 sebagai Penjamin Emisi Efek.

Sebagai bagian dari izin usaha yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) MTN, NCD, *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, GMTN, *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

Pada tanggal 21 Desember 2018, BRI melakukan akuisisi saham PT Danareksa Sekuritas dari PT Danareksa (Persero) sebanyak 67,00%. Dengan demikian sejak saat itu BRI menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Danareksa Sekuritas. Perubahan susunan Pemegang Saham ini sebagaimana dituangkan dalam akta notaris Masjuki, S.H.,

PT DANAREKSA SEKURITAS

pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., No. 52 tanggal 21 Desember 2018 yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0279737 tanggal 26 Desember 2018.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi Danareksa Sekuritas sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris	Soehandjono
Direksi	
Plt. Direktur Utama	Budi Susanto
Direktur	Boumediene Sihombing
Direktur	Santi Suryandari

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, Danareksa Sekuritas membukukan total aset sebesar Rp1,08 triliun meningkat 25,78% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp860,65 miliar. Pendapatan Usaha Danareksa Sekuritas di tahun 2019 tercatat sebesar Rp202,59 miliar, tumbuh 4,51% dari tahun 2018 yang sebesar Rp193,85 miliar. Nilai transaksi equity brokerage di tahun 2019 tercatat sebesar Rp51,91 triliun, tumbuh 25,81% dari tahun 2018 yang sebesar Rp41,26 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 15 Maret: RUPS Tahunan Danareksa Sekuritas
- 2 September : Menempati Kantor Baru di Gedung BRI II Lantai 23
- 12 November : Pengangkatan Soehandjono sebagai Komisaris Perseroan

Strategi Pengembangan Tahun 2020

Danareksa Sekuritas memiliki target-target utama dalam hal strategis salah satunya yaitu untuk menjadi pemain utama dalam bisnis penjaminan emisi, dimana Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dalam transaksi IPO/ penawaran umum.

Danareksa Sekuritas juga akan memperkuat posisi sebagai penasihat keuangan (*financial advisory*) dalam hal menjadi pilihan utama bagi BUMN dan afiliasi serta perusahaan swasta untuk bersaing dengan konsultan asing.

Dari sisi brokering/ perantara perdagangan efek, Danareksa Sekuritas menargetkan peningkatan nilai perdagangan saham melalui penguatan jaringan nasabah ritel dan institusi. Sebagai bentuk komitmen untuk memasyarakatkan pasar modal Indonesia bersama dengan OJK dan BEI, Danareksa berupaya untuk memperluas jaringan investor ritel/ individu melalui media online trading seiring dengan berkembangnya era digital secara global yang akan didukung dengan infrastruktur sistem informasi yang solid dan mumpuni.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



PT BRI VENTURA INVESTAMA

RINGKASAN KINERJA TAHUN 2018 – 2019

Total Aset		
2018	2019	Growth
Rp7,2 miliar	Rp1,51 triliun	20.872,22%
Total Investasi		
2018	2019	Growth
-	Rp278,11 miliar	100%
Pendapatan Usaha		
2018	2019	Growth
Rp1,27 miliar	Rp0,77 miliar	(39,37%)

Profil Perusahaan

PT. BRI Ventura Investama (BRI Ventures) adalah entitas anak usaha BRI yang bergerak di bidang Modal Ventura, kepemilikan saham BRI adalah sebesar 99.97% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. Sementara 0.03% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI

BRI Ventures (dahulu PT. Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura) diresmikan pada tanggal 21 Februari 1998 di Kupang – NTT dengan mengantongi ijin usaha modal ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 75/KMK.05/1998 yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1998. Pendiri perusahaan adalah PT. Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak

usaha PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dalam rangka pengembangan usaha modal ventura bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia yang menjadi perhatian PT BPUI maka PT. BAV bersinergi dengan perbankan nasional dan pemerintah daerah NTT secara pribadi melalui penempatan saham.

Pada tanggal 20 Desember 2018, BRI mengakuisisi saham milik PT. BAV sebanyak 97,61%. Dengan demikian sejak saat itu BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dari BRI Ventures. BRI Ventures eksisting mempekerjakan 8 orang karyawan di Kupang, NTT untuk aktivitas pembiayaan usaha produktif, dan menambah 9 orang karyawan di Jakarta untuk aktivitas investasi. Dengan masuknya BRI,

fokus perseroan bergeser menjadi Corporate Venture Capital bagi BRI Group.

BRI Ventures akan berinvestasi di perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, dengan potensi pasar yang luas, manajemen risiko yang solid serta *founder* yang memiliki pengertian yang cukup dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini selaras dengan strategi BRI Group dalam mengembangkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna (*customer-centric*). BRI Ventures akan melakukan investasi pada perusahaan teknologi baik di dalam lingkup jasa keuangan ("*Fintech*") maupun sektor bisnis lainnya ("*Non-Fintech*").

PT BRI VENTURA INVESTAMA

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRI Ventura Investama sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Hadi Susanto
Komisaris	I Nyoman Sugiri Yasa
Direksi	
Direktur Utama	Nicko Widjaja

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRI Ventures membukukan total aset sebesar Rp1,51 triliun meningkat signifikan dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp7,2 miliar. Pendapatan Usaha BRI Ventures di tahun 2019 tercatat sebesar Rp776 juta, lebih rendah 39,37% dari tahun 2018 yang sebesar Rp1,27 miliar.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 29 Maret : Tambahan Modal Tahap I oleh BRI sebesar Rp200 miliar
- 10 Juli 2019 : Pengangkatan Sdr. Nicko Widjaja sebagai Direktur Utama
- 26 Juli : Tambahan Modal Tahap II oleh BRI sebesar Rp800 miliar
- 31 Juli : Penyertaan Saham Tahap I kepada PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
- 7 Oktober : Menempati Kantor Baru di Prosperity Tower SCBD
- 20 Desember : Penyertaan Saham Tahap II kepada PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
- 31 Desember : Tambahan Modal Tahap III oleh BRI sebesar Rp500 miliar

Strategi Pengembangan Tahun 2020

BRI Ventures akan menjadi salah satu elemen BRI Group untuk meningkatkan laju pertumbuhan bisnis (sebagai *engine of growth*) melalui aktivitas investasi ke perusahaan inovatif yang dapat membawa pertumbuhan dan model bisnis baru. Dimana tahun 2019 adalah persiapan membangun kapabilitas dalam rangka menjadikan BRI Ventures sebagai Corporate Venture Capital dari BRI Group.

Untuk tahun 2020, ada 3 fokus strategi utama dari BRI Ventures. Pertama, membangun brand yang kuat agar dikenal oleh pasar baik di dalam maupun regional. Kedua, melakukan investasi kepada perusahaan teknologi (high-growth startups) yang berpotensi untuk memberikan dampak positif terhadap BRI baik secara finansial maupun sinergi. Terakhir, menyiapkan Dana Ventura untuk mengelola dana investasi pihak ketiga, serta menyiapkan fleksibilitas investasi ke sektor non-fintech.

Fokus investasi BRI Ventures kepada startup dalam fase pertumbuhan, yaitu perusahaan rintisan yang sudah memiliki produk dan *revenue* yang bertumbuh pesat. Sedangkan, area investasi BRI Ventures adalah kepada perusahaan inovatif yang berpotensi meningkatkan kapabilitas, berdampak positif terhadap bisnis, dan membuka akses untuk ekosistem baru bagi Bank BRI dan grup usaha. Ada tiga segmen investasi, yaitu *fintech (payment, lending, remittance)*, *fintech enabler (insurance, wealth management)*, dan *beyond fintech*.

Sejalan dengan *Digital Value Roadmap* BRI untuk masuk ke ekosistem di luar *financial services*, BRI Ventures telah mengidentifikasi pilar-pilar ekosistem yang akan menjadi fokus. Melalui investasi ke perusahaan rintisan, dengan fokus utama tahun depan adalah *Retail* dan *Creative Industry*. Untuk mewujudkan ini, BRI Ventures sedang menyiapkan Dana Ventura baik di dalam ataupun di luar negeri.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



PT BRI ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (BRINS)

RINGKASAN KINERJA BRINS TAHUN 2018 – 2019

Total Aset		
2018	2019	Growth
Rp2,39 triliun	Rp2,65 triliun	10,87%
Premi Bruto		
2018	2019	Growth
Rp1,45 triliun	Rp1,69 triliun	16,55%
Ekuitas		
2018	2019	Growth
Rp712,83 miliar	Rp805,78 miliar	13,04%

Profil Perusahaan

PT BRI Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi Entitas Anak BRI efektif tanggal 26 September 2019.

PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur didirikan oleh BRI Dapen pada tanggal 17 April 1989 berdasarkan Akta Notaris Muhaini Salim SH, di Jakarta No. 121 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 3 Mei 1989 No. C2.4160.HT.01.01 tahun 1989.

Sejak tahun 2011, BRINS fokus mengembangkan sistem online. Kehadiran Aplikasi Asuransi Agunan Kredit Online (A3KOL) dan Asuransi Uang Online (AUO), salah satu cermin bahwa BRINS selalu berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Perusahaan yang dulu dikenal dengan sebutan asuransi BSAM ini pada tahun 2015 bertransformasi dengan perubahan logo, serta nama perusahaan menjadi BRINS General Insurance. Dengan adanya perubahan nama, dilakukan revolusi nilai-nilai budaya perusahaan yang diambil dari kata BRINS.

Peningkatan pelayanan terus dikembangkan, diantaranya melalui SDM yang kompeten dengan peluncuran program MDP (Management Development Program) pada tahun 2015, fasilitas call center, serta kegiatan pemasaran melalui e-commerce.

Jumlah jaringan kerja Perusahaan saat ini berjumlah 89 kantor. Jaringan kerja konvensional terdiri dari 22 Kantor Cabang, 8 Kantor *Marketing Representative Office* (MRO) dan 45 *Marketing Channel*. Sementara Jaringan Syariah terdiri dari 1 Kantor Cabang, 2 *Representative Office Sharia* (ROS) dan 11 *Marketing Office Sharia* (MOS).

Jenis Asuransi yang ditawarkan mencakup asuransi Kebakaran, Kendaraan Bermotor, Hole in One, Konstruksi, Pesawat, BRINS Medika, Oil & Gas, BRINS Asri, Kecelakaan Diri, Pengangkutan, Uang, Travel, Kapal Laut, Satelit, BRINS Oto. Adapun produk unggulan BRINS yaitu Asuransi Agunan Kredit.

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris, dan Direksi BRINS sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Independen	Iman Sundoro
Komisaris Independen	Alfonso Napitupulu
Direksi	
Direktur Utama	Tri Wintarto
Direktur Teknik	Ade Zulfikar
Direktur Kepatuhan	Adi Setyanto
Direktur Marketing	Achmad Chumaidi
Direktur Operasional	Sutarno

Tinjauan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Per 31 Desember 2019, BRINS membukukan total aset sebesar Rp2,65 triliun meningkat 10,87% dibanding 31 Desember 2018 senilai Rp2,39 miliar. Premi bruto BRINS di tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,69 triliun, tumbuh 16,55% dari tahun 2018 yang sebesar Rp1,45 triliun.

Peristiwa Penting Tahun 2019

- 29 Maret: Penghargaan dari Gatra - Indonesia Insurance Innovation Award 2019 - "As The Best Financial Performance (Asset Between 1,5 - 4 Trillion) di Jakarta
- 3 Mei: BRINS mengadakan pelatihan Asuransi Mikro dengan tema UMKM Goes Digital di Jakarta
- Juli 2019: Penghargaan dari Infobank - Asuransi Berpredikat "SANGAT BAGUS" atas Kinerja Keuangan 2018
- 18 Juli: Penghargaan Investor Awards - Best Insurance 2019 kategori Asuransi Umum Aset diatas Rp1 Triliun - Rp5 Triliun
- 23 Juli: Penghargaan dari Media Asuransi - Best General Insurance 2019 kategori ekuitas Rp500 Miliar-Rp1,5 Triliun
- 25 Juli: Penghargaan dari Economic Review - Indonesia Good Corporate Governance Award 2019 The BIG 10 Indonesia GCG Implementation 2019
- 25 Juli: Infobank - 20th Insurance Award 2019 Kinerja Keuangan 2018 - Predikat Sangat Bagus
- 22 Agustus: Investor - Best Syariah 2019 Kategori Asuransi Umum Syariah Aset di Atas Rp50 Miliar - Rp100 Miliar
- 22 Agustus: Penyerahan Klaim Hole in One Friendly Golf Tournament Kantor Pusat BRINS



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PT BRI ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (BRINS)

- 23 Agustus: Penghargaan dari Indonesia Good Corporate Governance Award 2019 - The BIG 10 Indonesia GCG Implentation 2019
- 28 Agustus: Penghargaan Top Insurance 2019 - Top CEO General Insurance 2019 serta Top Insurance 2019 - Top General Insurance 2019 Aset Rp. 1-2.5 Triliun
- 13 September: Kontributor premi asuransi terbesar tahun 2018-2019 -Peringkat IV Konsorsium Asuransi Riskiko Khusus (KARK)
- 13 September: Piagam Penghargaan Konsorsium Asuransi Risiko Khusus KARK Kontibutor Premi Terbesar Tahun 2018 – 2019
- 26 September: Perubahan kepemilikan BRINS dari Dapen BRI ke PT. BRI dan Penandatanganan Akta Akuisisi Saham
- 15 Oktober: Penandatanganan PKS Penutupan Asuransi Modal Kerja Linkage Executing PT. Bahana Artha Ventura dan BRINS
- 16-19 Oktober: Pelaksanaan 25th Indonesia Rendesvouz 2019, AAUI - Denpasar
- 25 Oktober: Penghargaan dari Infobank – Asuransi Syariah berpredikat “ Sangat Bagus ” atas kinerja keuangan selama tahun 2018
- 25 Oktober: Penghargaan dari Infobank – 8 th Infobank Sharia Finance Award 2019 Predikat “Excellent”
- 3. Pengembangan *Distribution Channel* diantaranya optimalisasi aplikasi BRINS Mobile, pengembangan *website* BRINS untuk lebih interaktif dalam memproses bisnis serta sebagai jalur pemasaran
- 4. Peningkatan pelayanan kepada tertanggung melalui pengembangan *Call Center*, pembukaan/ peningkatan status jaringan pemasaran dan penyempurnaan proses bisnis pemasaran
- 5. Pengembangan *CGISS Web Service*
- 6. Pembuatan dan pengembangan sistem penunjang diluar *Care System*, seperti *E-budgeting*, *Asset Management*, *Warehouse Management System*, *Risk Management and Compliance System* dan pengembangan portal BRINS

Strategi Pengembangan Tahun 2020

Sesuai dengan Visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan asuransi umum terkemuka, yang mampu memberikan rasa aman dan manfaat optimal kepada semua pihak yang berkepentingan (*stake holder*), BRINS menetapkan beberapa strategi di tahun 2019 dalam pencapaian visi perusahaan yaitu:

1. Perluasan dan Optimalisasi jaringan kerjasama Resiprokal bisnis
2. Perluasan implementasi sistem B2B seperti A3KOL, AUO pada market diluar *Captive Group*

Kemudahan Miliki Kendaraan Impian dengan **KKB HUT BRI**

124



Biaya adm
mulai *
Rp **124**
ribu

Bunga *
mulai
1,24%

Gratis voucher
belanja senilai *
Rp **1,24**
juta

Segera ajukan KKB di Kantor Cabang Bank BRI seluruh Indonesia
Periode hingga Desember 2019

Info lebih lanjut kunjungi promo.bri.co.id

*Syarat & ketentuan berlaku

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 
CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id |  BANK BRI |  @promo_BRI

KKB  **BRI**
Solusi Kendara Keluarga



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai peran sentral dalam *corporate development* dan strategi BRI secara keseluruhan serta manajemen aset dan liabilitas yang optimal. Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Keuangan Perusahaan yang reliable untuk senantiasa dengan mudah dilakukan monitoring kinerja serta manajemen aset dan liabilitas BRI yang baik akan sangat mendukung pencapaian strategi perusahaan.

Laba bersih BRI

meningkat menjadi

Rp **34,41** triliun

ROA **3,50%*** dan ROE

19,41%*

CAR sebesar **22,55%***

menjadi pendukung
pengembangan bisnis
selama 2019.

*) Bank saja



Bab Tinjauan Keuangan ini mengulas analisis dan pembahasan kinerja keuangan BRI selama tahun 2019. Penyusunan dan penyajiannya disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

TINJAUAN KEUANGAN

Pada 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (PPJBSB) dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1,04 triliun dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 pada 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham BRINS dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

Rp juta

Ringkasan Aset	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi	
		(%)		(%)		(%)	
Kas	24.798.037	2,20	27.421.625	2,11	30.219.214	2,13	10,20
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	5,16	71.159.442	5,49	71.416.449	5,04	0,36
Giro pada Bank lain serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	61.289.274	5,44	99.695.406	7,69	127.092.463	8,97	27,48
Efek-Efek, Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih, serta Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali – neto	215.604.217	19,12	226.280.828	17,45	252.166.938	17,80	11,44
Obligasi Rekapitalasi Pemerintah	3.317.840	0,29	1.505.273	0,12	1.130.306	0,08	(24,91)
Tagihan Derivatif	162.912	0,01	485.810	0,04	210.396	0,01	(56,69)
Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan	739.336.520	65,58	838.141.014	64,63	907.387.666	64,05	8,26
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan -/-	(30.104.137)	(2,67)	(35.303.266)	(2,72)	(39.196.369)	(2,77)	11,03
Tagihan Akseptasi	5.693.425	0,50	11.643.003	0,90	9.346.063	0,66	(19,73)
Penyertaan Saham - neto	83.100	0,01	460.096	0,04	745.304	0,05	61,99
Aset Tetap - neto	24.752.035	2,20	26.914.859	2,08	31.432.629	2,22	16,79
Aset Pajak Tangguhan - neto	3.286.732	0,29	5.114.653	0,39	4.541.298	0,32	(11,21)
Aset Lain-lain - neto	21.072.055	1,87	23.379.549	1,80	20.266.482	1,43	(13,32)
Total Aset	1.127.447.489	100,00	1.296.898.292	100,00	1.416.758.400	100,00	9,24



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Total aset BRI mencapai Rp1.416,76 triliun di akhir tahun 2019, atau tumbuh 9,24% dari tahun 2018 yang sebesar Rp1.296,89 triliun. Peningkatan tersebut terutama dari kredit yang merupakan elemen mayoritas dari total aset. Kredit yang diberikan BRI tumbuh 8,26% menjadi Rp907,39 triliun, atau komposisinya menjadi 64,05% dari total aset.

Kas dan Giro Pada Bank Indonesia

Posisi kas BRI pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp30,22 triliun, meningkat 10,20% dibandingkan akhir tahun 2018 yang sebesar Rp27,42 triliun. Peningkatan kas ini antara lain karena adanya kebutuhan dan menjaga likuiditas BRI tetap memadai. Sedangkan saldo Giro pada Bank Indonesia (BI) mencapai Rp71,42 triliun di tahun 2019, atau naik 0,36% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp71,16 triliun. Pada tahun 2019, level GWM Primer Rupiah dan mata uang asing tercatat masing-masing 6,57% (bank saja) dan 7,91% (bank saja).

Giro pada Bank Lain serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank lain serta Penempatan pada BI dan Bank lain naik 27,48% pada tahun 2019 menjadi Rp127,09 triliun dari Rp99,70 triliun pada tahun 2018. Peningkatan tersebut dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh BRI.

Efek-efek, Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih, serta Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek, Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih, serta Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali BRI naik 11,44% dari Rp226,28 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp252,17 triliun pada tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama dalam rangka diversifikasi aset produktif yang dimiliki oleh BRI.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder. Pada tahun 2019, jumlah Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah BRI turun 24,91% dari Rp1,51 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1,13 triliun.

Rp juta

Kategori	Tenor	2017	2018	2019
Tersedia untuk dijual	2018-2020	717.840	30.273	30.306
Dimiliki hingga jatuh tempo	2018-2020	2.600.000	1.475.000	1.100.000
Total		3.317.840	1.505.273	1.130.306

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan

Penyaluran Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan BRI pada tahun 2019 mencapai Rp907,39 triliun atau naik 8,26% dari tahun 2018 yang sebesar Rp838,14 triliun. Peningkatan Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan ini terjadi hampir di semua segmen. Segmen mikro naik 13,00% menjadi Rp329,54 triliun. Demikian juga halnya dengan segmen ritel dan korporasi yang masing-masing menunjukkan peningkatan.

Peningkatan Kredit yang Diberikan BRI di tahun 2019 tak terlepas dari adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Plafon KUR BRI dari 2019 mencapai Rp87,97 triliun (bank saja) dengan *outstanding* sebesar Rp86,40 triliun (bank saja), atau masing-masing tumbuh 10,03% (bank saja) dan 11,07% (bank saja). Pada 2018, plafon dan *outstanding* KUR BRI masih sebesar Rp79,95 triliun (bank saja) dan Rp77,79 triliun (bank saja). Peningkatan KUR BRI di tahun 2019 terutama didukung dari KUR Mikro, dimana porsi plafon dan *outstanding* KUR Mikro BRI masing-masing mencapai 8,34% (bank saja) dan 7,89% (bank saja). Kesuksesan program penyaluran KUR BRI merupakan hasil dari komitmen penuh BRI dalam memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

TINJAUAN KEUANGAN

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan

Berdasarkan Mata Uang
Rp juta

Keterangan	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Mikro	252.850.654	291.615.908	329.535.811	13,00
Rupiah	252.850.654	291.615.908	329.535.811	13,00
Valas	0	0	0	0,00
Ritel	287.436.229	330.575.724	358.299.160	8,39
Rupiah	276.062.883	316.026.654	342.389.994	8,34
Valas	11.373.346	14.549.070	15.909.166	9,35
Korporasi	178.695.785	192.361.135	189.596.222	(1,44)
Rupiah	118.598.989	122.254.317	122.748.328	0,40
Valas	60.096.796	70.106.818	66.847.894	(4,65)
Total Kredit yang Diberikan	718.982.668	814.552.767	877.431.193	7,72
Rupiah	647.512.526	729.896.879	794.674.133	8,87
Valas	71.470.142	84.655.888	82.757.060	(2,24)
Total Piutang dan Pembiayaan Syariah	17.864.869	20.178.401	25.766.197	27,69
Piutang Sewa Pembiayaan	2.488.983	3.409.846	4.190.276	22,89
Total Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan	739.336.520	838.141.014	907.387.666	8,26
CKPN	30.104.137	35.303.266	39.196.369	11,03
Total Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan dikurangi CKPN	709.232.383	802.837.748	868.191.297	8,14



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan

Berdasarkan Segmen Operasi
Rp juta

Keterangan	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Ritel	287.436.229	330.575.724	358.299.160	8,39
Mikro	252.850.654	291.615.908	329.535.811	13,00
Korporasi	178.695.785	192.361.135	189.596.222	(1,44)
Piutang dan Pembiayaan Syariah	17.864.869	20.178.401	25.766.197	27,69
Piutang Sewa Pembiayaan	2.488.983	3.409.846	4.190.276	22,89
Total Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan	739.336.520	838.141.014	907.387.666	8,26
CKPN	30.104.137	35.303.266	39.196.369	11,03
Total Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan dikurangi CKPN	709.232.383	802.877.748	868.191.297	8,14

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan

Berdasarkan Jenis Penggunaan
Rp juta

Keterangan	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Kupedes	239.446.222	274.265.895	307.717.342	12,20
Modal Kerja	206.806.224	239.061.282	239.200.458	0,06
Konsumsi	115.320.021	131.665.922	141.624.147	7,56
Investasi	126.173.046	139.994.286	147.317.788	5,23
Program	15.132.136	19.794.242	35.139.821	77,53
Sindikasi	16.066.562	9.737.048	6.408.790	(34,18)
Karyawan Kunci	38.457	34.092	22.847	(32,98)
Piutang dan Pembiayaan Syariah	17.864.869	20.178.401	25.766.197	27,69
Piutang Sewa Pembiayaan	2.488.983	3.409.846	4.190.276	22,89
Total Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan	739.336.520	838.141.014	907.387.666	8,26
CKPN	30.104.137	35.303.266	39.196.369	11,03
Total Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan dikurangi CKPN	709.232.383	802.877.748	868.191.297	8,14

TINJAUAN KEUANGAN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai aset produktif. Perhitungan penilaian CKPN kredit menggunakan pendekatan secara *individual impairment* dan *collective impairment*. Metode *individual impairment* digunakan untuk kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan yaitu Rp5 miliar ke atas dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Sedangkan *collective impairment* untuk kredit yang memiliki nilai di bawah Rp5 miliar serta kredit dengan nilai Rp5 miliar ke atas tetapi tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

CKPN BRI pada tahun 2019 sebesar Rp39,20 triliun, naik 11,03% dari tahun 2018 sebesar Rp35,30 triliun. Posisi CKPN ini merupakan kebijakan BRI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakomodasi tekanan terhadap kualitas aset. Baik itu tekanan dari perekonomian domestik maupun internasional. Dengan peningkatan CKPN ini, Rasio Penutupan Atas Kredit Bermasalah (NPL Coverage Ratio) tetap terjaga pada kisaran 166,59% (bank saja) di tahun 2019.

Dalam melakukan mitigasi risiko kredit, selain membentuk CKPN yang memadai, BRI juga memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit. BRI memperhitungkan agunan sebagai arus kas masa datang apabila kredit tersebut *collateral dependent*

atau pelunasan kredit berasal dari agunan atau pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas peningkatan agunan. Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah di antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala. BRI telah memiliki prosedur untuk memastikan eksekusi agunan, jaminan atau asuransi kredit dilakukan pada nilai yang wajar. Metodologi perhitungan CKPN yang lebih detil dibahas di bagian Manajemen Risiko.

Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali (Pendapatan Recovery)

Hingga tahun 2019, BRI melakukan penghapusan aset kredit sebesar Rp17,01 triliun (bank saja), naik 39,63% (bank saja) dibanding pada 2018 sebesar Rp12,18 triliun (bank saja). Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir setelah BRI melakukan restrukturisasi kredit dan usaha penyelesaian lainnya namun nasabah tetap tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap BRI karena prospek usahanya sudah sangat terbatas atau tidak ada.

Penghapusan aset kredit sebagian besar terjadi di segmen mikro dan ritel sesuai dengan komposisi *outstanding* keduanya lebih dari 70% total kredit BRI. Pendapatan *recovery* yang dihasilkan sebesar Rp7 triliun (bank saja) pada tahun

2019, naik 12,85% (bank saja) dari pada 2018 sebesar Rp6,20 triliun (bank saja), atau mencapai *recovery rate* sebesar 41,14%. Rincian Pendapatan *Recovery* dibahas pada bagian Laporan Laba Rugi.

Penyertaan Saham

Hingga tahun 2019, penyertaan saham BRI sebesar Rp745,77 miliar, tumbuh sebesar 62,09% dibanding tahun 2018 sebesar Rp460,10 miliar. Peningkatan ini terjadi karena BRI melakukan tambahan investasi di PT. Fintek Karya Nusantara sebesar Rp250,00 miliar (bank saja).



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Penyertaan Saham Rp juta

Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Investasi		
			2017	2018	2019
PT Danareksa Invesment Management	Perusahaan Efek	35.00	-	372,271	377.770
PT. Fintek Karya Nusantara	Perusahaan Finansial Teknologi	20,00	-	-	250.000
PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	35.00	71,382	72,607	74.205
PT Pemeringkatan Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	7.97	7,978	7,978	7.978
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17.50	-	3,500	3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan Surat Berharga	4.30	1,275	1,275	1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia	Lembaga Kliring	2.00	1,000	1,000	1.000
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non Bank	8.00	536	536	536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan Kesehatan	1.68	220	220	220
PT Menara Proteksi Indonesia	Properti	2.00	200	200	200
Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek	0.87	135	135	135
BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1.50	77	77	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3.00	77	77	77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1.50	66	66	66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana Olahraga	0.64	50	50	50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8.33	50	50	50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1.75	35	35	35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana Olahraga	0.24	25	25	25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1.13	23	23	23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non Bank	0.03	20	20	20
PT. Danareksa Finance	Lembaga Keuangan	0.01	1	1	1
Total			83,150	460,146	745.354
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			(50)	(50)	(50)
Total Neto			83,100	460,096	745.304

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

TINJAUAN KEUANGAN

Pada tahun 2019, BRI telah menerima dividen tunai dari PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia sebesar Rp362 juta. Selain itu, BRI Agro (entitas anak) juga telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT. Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp6 juta, Rp6 juta, dan Rp12 juta. Sedangkan pada PT. Danareksa Sekuritas (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp857 juta.

Hingga tahun 2019, jumlah cadangan kerugian nilai atas penyertaan saham yang dibentuk sebesar Rp50 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham yang dibentuk telah memadai.

Aset Tetap

Pada tahun 2019, jumlah aset tetap BRI mencapai Rp31,43 triliun, naik 16,79% dibanding tahun 2018 sebesar Rp26,91 triliun. Peningkatan ini karena adanya penambahan terutama dari nilai hak atas tanah, komputer dan mesin, serta nilai bangunan.

Rp juta

Keterangan	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Hak atas Tanah	16.134.127	17.300.589	21.123.088	22,09
Bangunan	3.675.421	4.959.992	4.951.375	(0,17)
Kendaraan Bermotor	2.204.637	2.284.879	2.378.102	4,08
Komputer dan Mesin	7.097.817	8.286.786	9.660.755	16,58
Perlengkapan Kantor	1.593.957	1.808.142	1.980.108	9,51
Aset Tetap Museum	184	184	184	0,00
Satelit	3.284.664	3.284.664	3.284.664	0,00
Aset dalam penyelesaian	-	-	697.405	-
Total Biaya Perolehan	33.990.807	37.925.236	44.075.680	16,22
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.529.321	1.785.676	2.041.008	14,30
Kendaraan Bermotor	1.705.407	1.955.595	2.115.204	8,16
Komputer dan Mesin	4.607.771	5.516.494	6.379.234	15,64
Perlengkapan Kantor	1.268.536	1.405.897	1.541.912	9,67
Satelit	127.737	346.715	565.693	63,16
Total Akumulasi Penyusutan	9.238.772	11.010.377	12.643.051	14,83
Nilai Buku Neto	24.752.035	26.914.859	31.432.629	16,79

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

Sebagai bagian dari program revaluasi aset tetap yang dilakukan BRI pada tahun 2016. Pada tahun 2019, BRI kembali melakukan kegiatan revaluasi aset tetap. Dari hasil revaluasi aset tersebut terdapat kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp3,27 triliun.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Aset Lain-lain

Aset lain-lain BRI hingga tahun 2019 sebesar Rp20,26 triliun, turun 13,32% dibanding tahun 2018 sebesar Rp23,38 triliun. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan komponen tagihan atas penyaluran bantuan sosial pemerintah yang turun menjadi Rp61,87 miliar. Sedangkan komponen aset lain-lain yang mengalami peningkatan terbesar adalah tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR generasi II menjadi Rp1,95 triliun.

LIABILITAS

Pada tahun 2019, total liabilitas BRI mencapai Rp1.207,97 triliun, naik 8,67% dibanding tahun 2018 sebesar Rp1.111,62 triliun. Peningkatan liabilitas ini terutama didorong oleh naiknya pertumbuhan Simpanan Nasabah menjadi Rp1.021,20 triliun, atau naik 8,15% dari tahun 2018 yang sebesar Rp944,27 triliun.

Rp juta

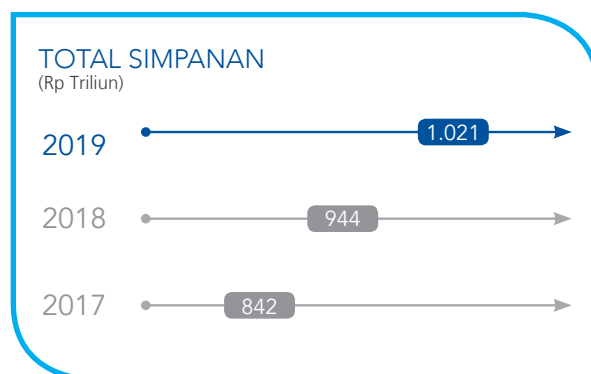
Ringkasan Liabilitas	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi	
		(%)		(%)		(%)	
Liabilitas Segera	6.584.201	0,69	8.462.958	0,76	7.549.312	0,62	(10,80)
Simpanan Nasabah	841.656.450	87,72	944.268.737	84,95	1.021.196.659	84,54	8,15
Giro, Giro <i>Wadiah</i> , dan Giro <i>Mudharabah</i>	147.435.604	15,37	180.669.095	16,25	174.927.804	14,48	(3,18)
Tabungan, Tabungan <i>Wadiah</i> , dan Tabungan <i>Mudharabah</i>	349.440.873	36,42	387.179.625	34,83	414.332.525	34,30	7,01
Deposito Berjangka dan Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>	344.779.973	35,94	376.420.017	33,86	431.936.330	35,76	14,75
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	5.593.367	0,58	9.131.158	0,82	17.969.829	1,49	96,80
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	12.136.684	1,26	37.379.394	3,36	49.902.938	4,13	33,50
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.619.658	3,19	31.190.216	2,81	86.622.326	3,20	23,83
Pinjaman yang Diterima	29.408.694	3,07	40.457.429	3,64	30.921.771	2,56	(23,57)
Liabilitas Lain-lain	33.440.657	3,49	40.733.069	3,66	41.811.669	3,46	2,65
Total Liabilitas	959.439.711	100,00	1.111.622.961	100,00	1.207.974.504	100,00	8,67

Jumlah simpanan nasabah BRI yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun ini terutama ditopang kenaikan deposito berjangka dan tabungan masing-masing sebesar 14,75% dan 7,01%, atau menjadi Rp431,94 triliun dan Rp414,33 triliun. Sementara produk giro turun 3,18% menjadi Rp174,93 triliun.

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

Simpanan Nasabah	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Giro	145.529.168	178.097.981	168.826.135	(5,21)
Giro Wadiah	1.766.901	2.277.850	2.020.866	(11,28)
Giro Mudharabah	139.535	293.264	4.080.803	1.291,51
Tabungan	343.420.737	379.918.705	405.355.483	6,70
Tabungan Wadiah	4.749.652	5.601.811	6.951.688	24,10
Tabungan Mudharabah	1.270.484	1.659.109	2.025.354	22,07
Deposito Berjangka	326.417.937	357.413.513	413.223.653	15,62
Deposito Berjangka Mudharabah	18.362.036	19.006.504	18.712.677	(1,55)
Total Simpanan Nasabah	841.656.450	944.268.737	1.021.196.659	8,15
Komposisi Giro dan Tabungan/ CASA	59,04%	60,14%	57,70%	
Komposisi Deposito Berjangka	40,96%	39,86%	42,30%	



Struktur simpanan nasabah terdiri dari perolehan dana murah, giro dan tabungan (CASA) sebesar 57,70% dan deposito berjangka sebesar 42,30%. Penghimpunan CASA yang lebih tinggi dibanding Deposito Berjangka sejalan dengan kebijakan BRI untuk menekan biaya dana. Perolehan dana murah ditopang oleh keberadaan 9.234 unit kerja (bank saja) BRI yang tersebar hingga ke pelosok Nusantara. Selain itu, juga adanya keberadaan agen BRILink yang sebanyak 422.160 agen (bank saja).

Liabilitas Segera

Liabilitas Segera antara lain terdiri dari kewajiban BRI sebagai bank penerbit kartu ATM dan Kartu Kredit, kiriman uang, dana setoran cek, titipan deposito, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BRI, dan penampungan bantuan sosial. Liabilitas Segera pada tahun 2019 sebesar Rp7,55 triliun, turun 10,80% dibanding tahun 2018 sebesar Rp8,46 triliun. Komponen Liabilitas Segera yang mengalami penurunan dan peningkatan terbesar masing-masing adalah penampungan dana bantuan sosial dan titipan kerjasama pihak ketiga.

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Simpanan dari bank Lain dan lembaga keuangan lainnya digunakan sebagai salah satu fasilitas pendanaan jangka pendek antar bank (*interbank call money*) dan bagian dari strategi manajemen likuiditas. Simpanan yang masuk dalam pos ini yaitu giro, tabungan, deposito berjangka, *interbank call money*, dan *deposit on call*.

Pada tahun 2019, pos ini mencapai Rp18,00 triliun, tumbuh 96,80% dibanding tahun 2018 sebesar Rp9,13 triliun.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Pada tahun 2019, jumlah efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mencapai Rp49,90 triliun, naik 33,50% dibanding tahun 2018 sebesar Rp37,38 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan strategy diversifikasi *funding* selain Dana Pihak Ketiga.

Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2019, jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp30,92 triliun, turun 23,57% dibanding tahun 2018 yang masih sebesar Rp40,46 triliun. Pinjaman yang diterima antara lain berasal dari pihak sebagai berikut:

Couterparty	Nominal	Jatuh Tempo
China Development Bank Corporation	10.764.693	16 September 2025
Sindikasi Club Loan	7.820.465	30 September 2020 19 Desember 2021 19 Desember 2022
BNP Paribas	609.433	3 Februari 2025
Pinjaman Lain-Lain	11.727.180	
Total	30.921.771	

1. *Outstanding* pinjaman dari China Development Bank Corporation yang sebesar Rp10,76 triliun hingga tahun 2019 ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang. Tenor pinjaman adalah 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025, serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.
2. *Outstanding* pinjaman dari Sindikasi Club Loan yang sebesar Rp7,82 triliun hingga tahun 2019 ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Besaran angsuran pinjaman yang masih harus diselesaikan BRI berikut dengan tanggal jatuh temponya adalah USD70 juta pada 30 September 2020, USD235 juta pada 19 Desember 2021, dan USD265 juta pada 19 Desember 2022.

Surat Berharga yang diterbitkan

Pada akhir tahun 2019, surat berharga yang diterbitkan mencapai Rp38,62 triliun, naik 23,83% dibanding tahun 2018 sebesar Rp31,19 triliun. Surat berharga yang diterbitkan BRI pada tahun 2019 adalah *Sustainability Bond* BRI pada 28 Maret 2019, dengan nilai nominal sebesar USD500 juta dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024. *Sustainability Bond* BRI Tahun 2019 memperoleh rating Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

Liabilitas Lain-lain

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, liabilitas imbalan kerja, pinjaman dan surat berharga subordinasi, serta liabilitas lain-lain. Pada tahun 2019, liabilitas lain-lainnya mencapai Rp41,81 triliun, naik 2,65% dibanding tahun 2018 sebesar Rp40,73 triliun. Peningkatan ini terutama karena naiknya liabilitas lain-lain dan utang pajak.

EKUITAS

BRI mencatat ekuitas sebesar Rp208,78 triliun, naik 12,69% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp185,28 triliun. Peningkatan ekuitas disebabkan naiknya surplus revaluasi aset tetap, keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek

TINJAUAN KEUANGAN

dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, dan saldo laba dibanding tahun 2018 masing-masing menjadi Rp17,10 triliun, Rp715,77 miliar, dan Rp181,33 triliun. Disisi lain BRI membayar dividen sebesar 50% dari laba tahun 2018.

Rp juta

Ringkasan Ekuitas	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Modal saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	0,00
Tambahan modal disetor saham	2.773.858	2.692.663	2.900.994	7,74
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	13.824.692	13.824.692	17.099.207	23,69
Selisih Kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	54.199	49.850	(14.970)	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	1.813.625	(2.070.378)	715.770	-
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	706.403	1.154.343	189.519	(83,58)
Modal saham diperoleh kembali (saham <i>treasury</i>)	(2.418.948)	(2.418.948)	(2.106.014)	(12,94)
Opsi saham	-	10.971	22.409	104,26
Cadangan kompensasi atas saham bonus	-	426.670	21.796	(94,89)
Ekuitas <i>merging entity</i>	443.016	-	-	-
Total Saldo Laba	143.827.697	163.130.389	181.327.431	11,15
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	167.191.833	182.967.543	206.323.433	12,77
Kepentingan Non Pengendali	815.945	2.307.788	2.460.903	6,63
Total Ekuitas	168.007.778	185.275.331	208.784.336	12,69

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang pada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja/*Management and Employee Stock Ownership Program* (MESOP). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp34,41 triliun di tahun 2019, meningkat 6,15% dibanding tahun 2018 sebesar Rp32,42 triliun. Peningkatan laba tak lepas dari naiknya pendapatan bunga dan bagi hasil serta kenaikan pendapatan operasional lainnya di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Laba Rugi
Rp juta

Komponen	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018-2019 (%)
Pendapatan Bunga	100.080.250	108.458.358	118.379.729	9,15
Pendapatan Syariah	2.819.042	3.124.446	3.376.547	8,07
Dikurangi: Beban Bunga dan Syariah	(29.893.805)	(33.917.032)	(40.048.971)	18,08
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	73.005.487	77.665.772	81.707.305	5,20
Pendapatan premi	3.788.965	4.178.213	5.373.757	28,61
Biaya klaim	(3.403.551)	(3.232.491)	(4.363.029)	34,97
Pendapatan premi - neto	385.414	945.722	1.010.728	6,87
Pendapatan Operasional lainnya	19.091.067	23.425.430	28.521.027	21,75
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian Penurunan Nilai atas aset keuangan – neto	(16.994.115)	(17.792.693)	(21.556.996)	21,16
Beban (Pembalikan) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi – neto	(1.239)	912	(608.271)	-
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto	(239.132)	(528.982)	(331.700)	(7,29)
Dikurangi: Beban Operasional Lainnya	(38.441.648)	(41.990.284)	(45.310.161)	7,91
Laba Operasional	36.805.834	41.725.877	43.431.932	4,09
(Beban) Pendapatan Non Operasional - neto	216.323	27.817	(67.880)	-
Laba sebelum beban pajak	37.022.157	41.753.694	43.364.053	3,86
Beban Pajak	(7.977.823)	(9.335.208)	(8.950.228)	(4,12)
Laba Bersih	29.044.334	32.418.486	34.413.825	6,15

TINJAUAN KEUANGAN

Pendapatan serta Beban Bunga dan Syariah

Pos Pendapatan merupakan kontributor utama untuk meningkatkan profitabilitas Perseroan. Pendapatan BRI sebagian besar dikontribusi dari pendapatan bunga dan syariah yang berasal dari penyaluran kredit yang diterima, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan maupun aset non kredit lainnya. Sementara beban bunga dan syariah pertumbuhannya sejalan dengan penghimpunan dana yang dilakukan BRI.

Pendapatan Bunga dan Syariah

Total pendapatan bunga dan syariah naik 9,12% pada tahun 2019, dari Rp111,58 triliun di tahun 2018 menjadi Rp121,76 triliun.

Rp juta

Komponen	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	
		(%)		(%)		(%)	
Kredit yang diberikan	88.108.116	85,63	96.224.941	86,24	104.766.326	86,05	8,88
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	78.020	0,08	100.364	0,09	75.694	0,06	(24,58)
Efek-efek	8.968.586	8,72	9.082.912	8,14	9.600.291	7,88	5,70
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.144.862	1,11	1.113.603	1,00	1.814.686	1,49	62,96
Giro pada Bank Indonesia	158.770	0,15	100.677	0,09	249	0,00	(99,75)
Lain-lain	1.621.896	1,58	1.835.861	1,65	2.122.484	1,74	15,61
Pendapatan Syariah	2.819.042	2,74	3.124.446	2,80	3.376.547	2,77	8,07
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	102.899.292	100,00	111.582.804	100,00	121.756.276	100,00	9,12

Beban Bunga dan Syariah

Searah dengan peningkatan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun selama tahun 2019 serta dampak dari kenaikan BI7DRR sebanyak 175 bps yang dimulai sejak Mei 2018, total beban bunga dan syariah BRI naik dari Rp33,92 triliun di tahun 2018 menjadi Rp40,05 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipacu dari kenaikan beban bunga deposito berjangka menjadi Rp22,04 triliun, dari tahun 2018 yang sebesar Rp17,96 triliun. Sedangkan komponen yang mengalami penyesuaian terbesar ialah pinjaman yang diterima menjadi Rp1,44 triliun, atau menurun dari posisi di tahun 2018 yang sebesar Rp1,57 triliun.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

Komponen	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	
		(%)		(%)		(%)	
Deposito Berjangka	16.429.538	54,96	17.957.244	52,94	22.037.730	55,03	22,72
Tabungan	2.703.451	9,04	3.014.237	8,89	3.173.253	7,92	5,28
Giro	2.102.010	7,03	2.636.745	7,77	3.446.824	8,61	30,72
Simpanan dari Bank lain dan Laporan Keuangan lainnya	576.919	1,93	814.364	2,40	1.187.757	2,97	45,85
Surat berharga yang diterbitkan	2.226.531	7,45	2.378.334	7,01	2.480.591	6,19	4,30
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	533.985	1,79	1.057.039	3,12	942.983	2,35	(10,79)
Pinjaman yang diterima	1.050.731	3,51	1.570.122	4,63	1.439.455	3,59	(8,32)
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	-	45.965	0,11	-
Lain-lain	3.029.049	10,13	3.113.310	9,18	3.917.280	9,78	25,82
Beban Syariah	1.241.591	4,15	1.375.637	4,06	1.377.133	3,44	0,11
Total Beban Bunga dan Syariah	29.893.805	100,00	33.917.032	100,00	40.048.971	100,00	18,08

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Ketatnya likuiditas sedikit banyak mempengaruhi pendapatan bunga dan syariah - bersih BRI selama tahun 2019. Pencapaiannya tercatat sebesar Rp81,71 triliun atau tumbuh moderat 5,20% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp77,67 triliun. Meski demikian, pertumbuhan tersebut lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan Industri yang cenderung menurun.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini antara lain terdiri dari *Fee Based Income* (provisi dan komisi lainnya), penerimaan kembali atas aset yang telah dihapusbukukan, keuntungan transaksi mata uang asing dan keuntungan hasil penjualan dan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah.

Pada tahun 2019, pendapatan operasional lainnya mencapai Rp28,52 triliun, naik 21,75% dibanding tahun 2018 sebesar Rp23,43 triliun. Peningkatan terutama disebabkan meningkatnya *Fee Based Income* dan keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah.

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

Komponen	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	
		(%)		(%)		(%)	
<i>Fee Based Income</i>	10.442.240	54,70	12.018.941	51,31	14.505.762	50,86	20,69
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5.050.713	26,46	6.209.435	26,51	7.065.981	24,77	13,79
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	50.915	0,27	338.097	1,44	162.878	0,57	(51,83)
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah - neto	784.667	4,11	534.952	2,28	1.839.341	6,45	243,83
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	183.974	0,96	951.009	4,06	154.157	0,54	(83,79)
Lain-lain	2.578.558	13,51	3.372.996	14,40	4.792.909	16,80	42,10
Total Pendapatan Operasional Lainnya	19.091.067	100,00	23.425.430	100,00	28.521.027	100,00	21,75

Rp juta

Komponen	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	
		(%)		(%)		(%)	
Jasa Administrasi Simpanan	3.778.315	36,18	3.841.412	31,96	4.023.542	27,74	4,74
Jasa Transaksi Non E- Channel	655.099	6,27	768.884	6,40	814.635	5,62	5,95
Jasa Transaksi E-Channel dan E-Banking	2.760.110	26,43	3.267.891	27,19	4.912.839	33,87	53,54
Jasa CMS	23.015	0,22	24.271	0,20	50.922	0,35	109,81
Jasa Perkreditan	1.496.012	14,33	1.683.441	14,01	1.674.155	11,54	(0,55)
Jasa Trade Finance	791.659	7,58	1.265.042	10,53	1.602.887	11,05	26,71
Jasa Transaksi Bisnis Internasional	147.750	1,41	179.960	1,50	231.998	1,60	28,92
Jasa Kartu Kredit	222.080	2,13	250.878	2,09	333.002	2,30	6,44
Jasa Investment Services	141.345	1,35	201.693	1,68	239.381	1,65	18,69
Jasa Produk Asuransi	254.970	2,44	373.594	3,11	362.052	2,50	(3,09)
Jasa Lainnya	172.056	1,65	161.874	1,35	260.349	1,79	60,83
Total	10.442.410	100,00	12.018.940	100,00	14.505.762	100,00	20,69



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Didominasi jasa transaksi *e-channel* dan *e-banking* tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp4,91 triliun, tumbuh 50,34% dari tahun 2018 sebesar Rp3,27 triliun, hasil dari optimalisasi layanan Agen BRILink dan semakin meningkatnya penggunaan jaringan *e-channel* BRI oleh nasabah. Untuk jasa Trade Finance yang tumbuh sebesar 26,71% pada tahun 2019 atau sebesar Rp1,60 triliun dimana pada tahun 2018 sebesar Rp1,27 triliun yang menunjukkan keberhasilan strategi BRI untuk meningkatkan penggunaan layanan perbankan BRI oleh nasabah korporasi BRI.

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan (Pendapatan Recovery)

Pendapatan *recovery* tercatat sebesar Rp7,07 triliun, naik 13,79% dibanding tahun 2018 sebesar Rp6,21 triliun. Peningkatan pendapatan *recovery* yang cukup baik menunjukkan keberhasilan BRI dalam percepatan penyelesaian lelang serta penagihan untuk kredit yang telah dihapusbukukan.

Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional Lainnya terdiri dari tenaga kerja dan tunjangan, umum dan administrasi, kerugian transaksi mata uang asing, provisi dan komisi lainnya, dan lain-lain. Pada tahun 2019, total beban operasional lainnya tercatat sebesar Rp45,31 triliun, naik 7,91% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp41,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan biaya tenaga kerja dan tunjangan menjadi Rp24,24 triliun, atau naik 8,12% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp22,42 triliun. Sehingga porsi terhadap total beban operasional lainnya meningkat dari 53,40% di tahun 2018 menjadi 53,51%. Peningkatan biaya tenaga kerja sejalan dengan penerapan kebijakan pemberian insentif yang lebih menarik kepada tenaga pemasar BRI, yang dikaitkan dengan kinerja dari masing-masing pekerja BRI tersebut.

Rp juta

Komponen	2017		2018		2019		Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	Posisi	Porsi	
		(%)		(%)		(%)	
Tenaga Kerja dan Tunjangan	20.352.004	52,94	22.423.271	53,40	24.243.276	53,51	8,12
Umum dan Administrasi	13.146.944	34,20	14.364.278	34,21	15.630.067	34,50	8,81
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah - neto	-	-	-	-	81.898	0,18	-
Lain-lain	4.942.700	12,86	5.202.735	12,39	5.354.920	11,82	2,93
Total Beban Operasional Lainnya	38.441.648	100,00	41.990.284	100,00	45.310.161	100,00	7,91

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - neto

Pembentukan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tercatat sebesar Rp21,56 triliun, naik 21,16% dibanding tahun 2018 sebesar Rp17,79 triliun. Peningkatan biaya provisi tersebut merupakan strategi BRI untuk menjaga pencadangan yang cukup untuk meng-cover kualitas kredit BRI. Hal ini dapat dilihat dari NPL Rasio yang berada pada 2,80% pada tahun 2019.

TINJAUAN KEUANGAN

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2019, beban pajak penghasilan sebesar Rp8,95 triliun, turun 4,12% dibanding tahun 2018 sebesar Rp9,34 triliun. Tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada BRI adalah sebesar 20%. BRI mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta dimiliki lebih dari 300 orang yang masing-masingnya hanya boleh memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%. BRI telah melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Laba Bersih

Perolehan Laba bersih BRI tercatat sebesar Rp34,41 triliun, naik 6,15% dibanding tahun 2018 sebesar Rp32,42 triliun. Konsisten ekspansi bisnis di segmen

UMKM dan kemampuan meningkatkan *Fee Based Income* membuat BRI mampu mempertahankan pencapaian laba bersih pada tahun 2019.

Penghasilan Komprehensif

BRI mencatatkan penghasilan komprehensif sebesar Rp5,08 triliun pada tahun 2019, membaik dibanding tahun 2018 yang membukukan kerugian komprehensif sebesar Rp3,48 triliun. Penghasilan komprehensif yang positif ini terjadi karena adanya surplus revaluasi aset tetap dan keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek.

Total Laba Komprehensif

Pada tahun 2019, total laba komprehensif tercatat sebesar Rp39,50 triliun, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp28,94 triliun. Selain karena kenaikan laba bersih, peningkatan ini disebabkan meningkatnya penghasilan komprehensif BRI.

Rp juta

Penghasilan Komprehensif Lainnya	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	61.655	601.819	(1.291.782)	-
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(15.414)	(150.455)	322.945	-
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	3.316.985	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	30.709	(4.349)	(64.820)	1.390,46
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2.286.250	(5.141.381)	3.696.914	-
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(527.459)	1.216.705	(895.470)	-
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan – Setelah Pajak	1.835.741	(3.477.661)	5.084.772	-
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	30.880.790	28.940.825	39.498.597	36,48



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Rp juta

Deskripsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan 2018 - 2019 (%)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi	39.299.109	57.262.380	44.583.079	(22.14)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi	(30.995.996)	(26.999.124)	(5.188.442)	(80.78)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan	(10.847.132)	(1.071.548)	(18.085.105)	1.587,76
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(2.544.019)	29.191.708	21.309.532	(27,00)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(427)	(52.076)	(160.251)	207,73
Kas dan Setara Kas awal periode/tahun	188.954.879	186.617.516	215.757.148	15,61
Kas dan Setara Kas akhir periode/tahun	186.410.433	215.757.148	236.906.429	9,80

Posisi Kas dan Setara Kas BRI akhir tahun 2019 sebesar Rp236,91 triliun, naik 9,80% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp215,76 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi mengalami penurunan.

Arus Kas Dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2019, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi tercatat Rp48,91 triliun. Jumlah kas dari operasi (sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi) sebesar Rp59,73 triliun, naik dibanding tahun 2018 sebesar Rp44,06 triliun.

Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp5,19 triliun. Penurunan ini disebabkan kenaikan dari Efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo di tahun 2019 sebesar Rp1,27 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar Rp25,19 triliun.

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2019, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan Pendanaan sebesar Rp22,41 triliun, naik dibanding tahun 2018 sebesar Rp1,15 triliun. Peningkatan pengeluaran kas untuk pendanaan terutama disebabkan pembayaran pinjaman yang diterima.

RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan berikut dihitung dari kinerja keuangan entitas induk.

(%)

Uraian	2017	2018	2019
1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	22,96	21,21	22,55
2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,38	1,41	1,74
3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,59	1,62	1,98
4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,11	3,26	3,36
5 NPL Gross	2,10	2,16	2,62

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian	2017	2018	2019
6 NPL Net*	0,88	0,92	1,04
7 Return on Asset (ROA)	3,69	3,68	3,50
8 Return on Equity (ROE)	20,03	20,49	19,41
9 Net Interest Margin (NIM)	7,93	7,45	6,98
10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69,14	68,40	70,10
11 Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,13	88,96	88,64
Kepatuhan (Compliance)			
1 a. Persentase pelanggaran BMPK			
i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
b. Persentase pelampauan BMPK			
i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
2 Giro Wajib Minimum (GWM)			
a. GWM Utama Rupiah	6,52	7,16	6,57
b. GWM Valuta Asing	8,15	8,01	7,91
3 Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	4,22	3,73	1,91

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam membayar utang dapat dilihat dari berbagai rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

- Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (*loan to deposit ratio* atau LDR). Hingga tahun 2019, LDR BRI tercatat sebesar 88,64% (bank saja), sedikit membaik dari tahun 2018 sebesar 88,96% (bank saja). Rasio LDR ini menunjukkan BRI masih mampu menjaga posisi likuiditas terkait dengan strategi ekspansi bisnis yang dilakukannya di tengah ketatnya likuiditas perbankan.

- Rasio Intermediari Makroprudensial (RIM)**

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, diharapkan RIM perbankan sebesar 84% sampai 94%. Dalam perhitungan RIM, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh KSEI dan tidak dimiliki oleh bank minimal 2 bulan sebelum tanggal laporan dan obligasi korporasi yang dimiliki. Perhitungan RIM disempurnakan juga dengan PBI nomor 21/12/PBI/2019 yang berlaku pada 2 Desember 2019 dengan memperhitungkan *offshore loan* sebagai komponen pendanaan, rasio RIM BRI sebesar 85,31% (bank saja) menurun dibanding RIM tahun 2018 sebesar 88,51%.

- Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan rasio antara *high quality liquid asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 hari kedepan. Pada tahun 2019, LCR BRI sebesar 255,37% (bank saja). Dengan pencapaian LCR tersebut, BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas jauh diatas batas minimal sebesar 100%.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rasio Profitabilitas

Di industri perbankan, rasio profitabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (*Return on Assets* atau ROA), imbal hasil terhadap ekuitas (*Return on Equity* atau ROE) dan margin pendapatan bunga bersih (NIM). BRI mampu membukukan kinerja profitabilitas positif selama tahun 2019.

RASIO RENTABILITAS (%) (BANK SAJA)

	2017	2018	2019
ROA	3,69	3,68	3,50
ROE	20,03	20,49	19,41
NIM	7,93	7,45	6,98

- Return On Assets (ROA)**

Return on Assets (ROA) BRI sebesar 3,50% (bank saja) di tahun 2019, atau ada sedikit menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,68% (bank saja). Salah satu penyebab adanya penyesuaian akibat pertumbuhan margin bunga tengah melemah karena dampak kenaikan suku bunga acuan tahun 2018.

- Return on Equity (ROE)**

Pada tahun 2019, *Return on Equity* (ROE) BRI sebesar 19,41% (bank saja), atau menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 20,49% (bank saja). Selain adanya kenaikan biaya dana karena kenaikan suku bunga acuan yang membuat margin bunga cenderung tumbuh terbatas, penurunan ROE juga dikarenakan pertumbuhan ekuitas cenderung meninggi yang antara lain disebabkan revaluasi aset dan kenaikan OCI (*Other Comprehensive Income*).

- Net Interest Margin (NIM)**

Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) BRI pada tahun 2019 sebesar 6,98% (bank saja) atau lebih rendah dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,45% (bank saja). Penurunan NIM terutama disebabkan naiknya beban bunga.

Rasio Efisiensi

- Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)**

Pada tahun 2019, Rasio Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) BRI sebesar 70,10% (bank saja), naik sedikit dari tahun 2018 yang sebesar 68,40% (bank saja). Kenaikan BOPO disebabkan strategi BRI dalam menyediakan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi dampak kondisi makro ekonomi terhadap kualitas kredit BRI.

RASIO EFISIENSI (%) (BANK SAJA)

	2017	2018	2019
BOPO	69,14	68,40	70,10

Rasio Modal - *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio kecukupan permodalan (CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk memitigasi risiko. Pada tahun 2019, CAR BRI tercatat sebesar 22,55% (bank saja), meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 21,21% (bank saja). Rasio CAR tersebut masih jauh diatas rasio minimal yang harus dijaga BRI sebesar 14,75%, dengan sudah memperhitungkan implementasi Basel 3. Dengan rasio kecukupan modal yang masih tinggi tersebut, BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta pengimplementasian Basel 3.

Rasio Kepatuhan

- Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

Pada tahun 2019, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)**

Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah terhadap modal. Pada tahun 2019, rasio PDN sebesar 1,91% (bank saja), turun dari tahun 2018 sebesar 3,73% (bank saja). Angka PDN tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, yaitu sebesar 20% dari modal.

TINJAUAN KEUANGAN

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kolektabilitas piutang dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau *Non-Performing Loan* (NPL). Kolektabilitas kredit yang direpresentasikan dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2019 sebesar 2,80%, sedikit meningkat dari tahun 2018 sebesar 2,27% namun masih di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5%. BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas asetnya.

Kolektabilitas Kredit Tahun 2017-2019

Rp juta

	2017	2018	2019
Kredit	733.730.018	838.141.014	907.387.666
Lancar	686.493.414	787.819.278	845.970.996
Dalam Perhatian Khusus	30.784.125	31.173.877	35.981.286
Kurang Lancar	2.995.624	2.479.185	4.424.973
Diragukan	4.229.123	2.380.777	3.420.007
Macet	9.227.733	14.165.839	17.561.875
NPL	16.452.479	19.025.801	25.406.855
NPL (%)	2,24	2,27	2,80

TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI DERIVATIF

BRI melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Dalam hal ini, BRI tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Transaksi spot dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah.

Sepanjang tahun 2019, BRI melakukan transaksi spot dan transaksi derivatif dalam bentuk swap mata uang dan suku bunga, swap suku bunga, Option, Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing, Swap mata uang asing, pembelian dan penjualan spot mata uang asing. Secara rinci transaksi spot dan derivatif yang dilakukan BRI termuat dalam tabel berikut:

Rp juta

Transaksi	Tagihan Derivatif			Liabilitas Derivatif		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Swap mata uang dan suku bunga	64.708	25.671	3.151	115.981	67.944	32.338
Swap suku bunga	60.475	69.307	19.264	54.261	91.211	74.114
Option mata uang	10.218	23.951	9.092	11.341	20.774	31.424
Option saham	16.984	16.468	17.306	-	-	-
Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing	6.883	72.275	21.975	15.156	94.922	21.943
Swap mata uang asing	2.740	276.071	139.081	3.334	56.195	34.341
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	904	2.067	527	785	1.297	445
Total	162.912	485.810	210.396	200.858	332.343	184.605



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang *inherent* dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Hingga tahun 2019, BRI memiliki CAR sebesar 22,77%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menyebutkan bahwa profil risiko level 2 (*satisfactory*) memiliki minimal CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Diluar ketentuan minimal CAR tersebut, sebagai bagian dari penerapan Basel 3, BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang terdiri dari:

1. *Capital conservation buffer* sebesar 2,50% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. *Countercyclical Buffer* sebesar 0,00% dari ATMR.
3. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik sebesar 2,50% dari ATMR.

Sehingga total CAR minimum BRI berada di level 11,76%-13,32% maka CAR BRI pada tahun 2019 yang sebesar 22,77% telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, hingga tahun 2019, BRI memiliki modal inti (Tier-1) sebesar Rp197,22 triliun dan Modal Pelengkap (Tier-2) sebesar Rp10,16 triliun. Sedangkan rasio Tier-1 mencapai 21,65% atau diatas ketentuan minimal rasio Tier-1 sebesar 6%. Tier-1 BRI terdiri dari CET-1 karena sumber utama modal BRI adalah laba ditahan. Oleh karena itu Rasio CET-1 BRI sebesar 21,65%, atau jauh diatas ketentuan minimum sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

Rp juta

Komponen	Konsolidasian		
	2017	2018	2019
Modal Inti (Tier 1)	154.668.699	172.358.004	197.219.352
Modal Inti Utama (CET 1)	154.668.699	172.358.004	197.219.352
Modal Pelengkap (Tier 2)	7.083.240	10.029.307	10.160.078
Total Modal Tersedia	161.751.939	182.387.311	207.379.430
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	566.659.194	690.764.915	726.179.371
ATMR untuk Risiko Pasar	6.889.063	11.229.322	14.004.256
ATMR untuk Risiko Operasional	130.967.728	152.229.031	170.666.840
Total ATMR	704.515.985	854.223.268	910.850.467
Rasio CAR	22,96%	21,35%	22,77%
Rasio CET 1	21,95%	20,18%	21,65%
Rasio Tier 1	21,95%	20,18%	21,65%
Rasio Tier 2	1,01%	1,17%	1,12%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00%	9,00%	9,00%

TINJAUAN KEUANGAN

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2019, BRI melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak untuk investasi barang modal, yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019, yaitu:

Rp juta

Objek	Nilai
Managed Service CRM EBB tahun 2019 dan Replacement perangkat pendukungnya	399.299
Pengadaan sewa kendaraan roda 4 untuk operasional unit kerja mikro BRI	110.453
Managed Service VSAT Remote Terminal dan perangkat pendukungnya untuk integrasi fase 2B (zona 5)	67.004
Managed Service VSAT Remote Terminal dan perangkat pendukungnya untuk integrasi fase 2B (zona 2, 3 dan 4)	211.104
Managed Service Offsite Data Center (ODC), Data Center (DC) GTI Ragunan & Tabanan tahap I	149.500
Pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto paket II	845.950
Pengadaan <i>Cash Recycling Machine</i> (CRM)	92.400
Pengadaan <i>upgrade server</i> di DC GTI Ragunan & Tabanan	69.027
Pengadaan jasa kontraktor Pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto paket I	112.900
Pengadaan sewa saluran komunikasi	275.895

Sumber pendanaan dari ikatan material tersebut seluruhnya berasal dari dana internal Perseroan. Adapun denominasi mata uang yang digunakan adalah dalam bentuk Rupiah, sehingga BRI tidak melakukan perlindungan risiko kurs.

Rp juta

Belanja Barang Modal	Konsolidasi		
	2017	2018	2019
Tanah dan Bangunan	957.857	2.555.168	3.671.296
Meubelair dan Inventaris	125.049	248.210	283.389
Kendaraan	84.034	88.353	115.754
Komputer dan Perangkat Lunak	750.309	1.243.266	1.413.248
Satelit dalam Pengembangan	183.877	-	-
Aset dalam penyelesaian	-	-	790.347
Total	2.101.126	4.134.997	6.536.905



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

KEBIJAKAN LINDUNG NILAI

BRI telah menerapkan prinsip lindung nilai sebagai upaya meminimalkan risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

Kebijakan Umum

Transaksi Lindung Nilai (*hedging*) meliputi transaksi yang dilakukan dalam rangka melindungi nilai aset keuangan, kewajiban keuangan, pendapatan dan biaya serta arus kas baik secara *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dari risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar untuk posisi *Banking Book* dan *Trading Book*.

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif tindak lanjut dan mitigasi risiko apabila terjadi pelampauan limit moderate pada parameter Profil Risiko Pasar.
2. Transaksi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi perubahan kondisi ekonomi makro yang dianggap dapat menimbulkan kerugian, yang ditunjukkan antara lain oleh tren perubahan variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar.
3. BRI dilarang memelihara posisi atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan oleh pihak terkait.
4. BRI wajib meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada bank lain yang bukan pihak terkait.

Teknik Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan baik secara makro (*macro hedging*) atau mikro (*micro hedging*).

- **Macro Hedging**
Teknik ini digunakan untuk memitigasi dampak risiko ekonomi terhadap seluruh portofolio BRI. *Macro hedging* dilakukan melalui usulan Divisi *Assets and Liabilities Management* untuk diputus oleh ALCO.
- **Micro Hedging**
Micro hedging dilakukan BRI pada level transaksi secara individual. Transaksi ini dapat dilakukan sendiri oleh Divisi *Treasury* tanpa usulan divisi bisnis pengelola portofolio terkait, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta kemampuan untuk kontrol atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak berdasarkan prinsip syariah) dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Pada tahun 2019, jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp1,96 miliar. Jumlah liabilitas komitmen sebesar Rp172,82 triliun pada tahun 2019, meningkat 6,67% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan dikarenakan naiknya fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, serta penjualan spot dan mata uang asing. Dalam periode yang sama, liabilitas kontinjensi meningkat sebesar 0,37% yang dipengaruhi oleh peningkatan pada Standby L/C.

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

Deskripsi	2017	2018	2019
Komitmen			
Tagihan Komitmen	4.038.459	20.200.385	7.002.503
Pembelian Spot dan Mata Uang Asing	4.038.459	20.200.385	7.002.503
Liabilitas Komitmen	129.159.708	162.020.432	172.819.931
Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	107.073.032	130.854.091	131.345.694
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.980.671	8.693.691	6.459.482
Penjualan Spot dan Mata Uang Asing	13.000.508	22.407.320	34.869.211
Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	105.497	65.330	145.544
Komitmen - Neto	(125.121.249)	(141.820.047)	(165.817.428)
Kontijensi			
Tagihan Kontijensi	70.905	112.273	126.871
Tagihan Bunga dalam Penyelesaian	70.905	112.273	126.871
Liabilitas Kontijensi	34.030.380	44.886.051	45.051.364
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			
Standby L/C	10.841.726	13.535.519	15.848.438
Garansi Bank	23.188.654	31.350.532	29.202.927
Kontijensi - Neto	(33.959.475)	(44.773.777)	(44.924.493)

SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH

Secara umum Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, serta komponen profit margin dari penyaluran kredit. Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Untuk itu, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR). Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun demikian, Bank Indonesia menyerahkan klasifikasi kredit tersebut sesuai dengan kriteria internal bank.

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
TMT Desember 2019	9,95%	9,90%	17,25%	9,90%	12,00%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website www.bri.co.id.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

PENCAPAIAN DAN TARGET 2019

Rp miliar

No	Belanja Modal	2019		
		Target	Realisasi	Pencapaian
				(%)
1	Aset	1.350.666,4	1.343.077,9	99,4
2	Kredit	900.246,7	859.558,3	95,5
3	Simpanan	996.268,4	969.750,0	97,3
4	Laba Bersih	36.115,4	34.028,7	94,2
5	FBI	13.332,4	14.293,4	107,2
6	LDR	90,36%	88,64%	101,9
7	NPL Gross	2,16%	2,62%	82,4
8	NPL Nett	1,17%	1,04%	112,3
9	NIM	7,16%	6,98%	97,5
10	CER	42,72%	40,26%	106,1
11	CAR	21,22%	22,55%	106,3
12	Pertumbuhan Market Cap BBRI dibanding Jakfin	15,2%	20,2%	132,7

Terkait dengan pencapaian target BRI untuk tahun 2019, terdapat 6 (enam) indikator kinerja, yaitu FBI, LDR (Likuiditas), NPL Nett (Kualitas Aset), CER (Efisiensi), CAR (Permodalan) dan Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (Market Cap), mencapai atau bahkan melampaui targetnya. Sementara indikator lainnya Total Aset, Kredit, Simpanan, Laba Bersih, NPL Gross, Net Interst Margin (NIM), dan CAR tidak memberikan pencapaian penuh, tetapi menunjukkan selisih yang tidak jauh dibanding target, dan jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan, BRI secara konsisten mampu tumbuh lebih tinggi. Hal ini terlihat dari pangsa pasar kredit dan simpanan BRI yang terus meningkat masing-masing menjadi 15,30% dan 16,16% pada akhir tahun 2019 dari sebelumnya 15,09% dan 15,95% pada akhir tahun 2018.

TARGET 2020

Pada tahun 2020, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2019 yang diperkirakan tumbuh maksimal 5,1%. Beberapa sentimen positif yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 antara lain kurs Rupiah diperkirakan stabil sesuai dengan fundamentalnya, inflasi terkendali di kisaran sasaran 3,0±1%, kondisi NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing, pelonggaran kebijakan moneter negara maju yang akan berdampak positif, serta likuiditas di pasar uang dan perbankan Indonesia yang tetap memadai.

Dari sisi internal, business process re-engineering seperti digitasi proses penyaluran kredit, yang telah dimulai dari segmen mikro dan telah diimplementasikan pada segmen lain seperti segmen consumer maupun segmen komersial diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis BRI.

Oleh karena itu, target finansial BRI yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Kredit 10% - 11%
- Posisi LDR dijaga pada level 90% +/-2%
- Pertumbuhan fee income 12% - 14%
- Pertumbuhan Biaya Operasional 8%-10%
- Rasio kecukupan modal dijaga diatas kebutuhan minimum

TINJAUAN KEUANGAN

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL PERIODE LAPORAN

Tida ada transaksi material setelah tanggal periode pelaporan.

PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global di proyeksi kembali bertumbuh pada 2020. IMF memprakirakan ekonomi dunia 2020 tumbuh 3,4%, atau lebih baik dibandingkan 2019 yang diprediksi mencapai 3,0%. Sinyal positif dimaksud antara lain meredanya ketegangan perdagangan dunia, berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif, penyelesaian *Brexit* yang *orderly*, serta stabilnya kondisi ekonomi negara berkembang yang mengalami tekanan.

Sedangkan Otoritas fiskal dan moneter Indonesia memperkirakan perekonomian nasional meningkat dalam rentang 5,1-5,5% pada tahun 2020. Beberapa sentimen positif yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 antara lain kurs Rupiah diperkirakan stabil sesuai dengan fundamentalnya, inflasi terkendali di kisaran sasaran 3,0±1%, kondisi NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing, pelonggaran kebijakan moneter negara maju berdampak positif, serta likuiditas di pasar uang dan perbankan Indonesia tetap memadai.

Prospek Industri Perbankan

Dengan proyeksi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di 2020, kinerja perbankan nasional diyakini masih dapat tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan kredit dan DPK tumbuh moderat. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga, cukupnya likuiditas, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Proyeksi 2020		
	Kredit	DPK
OJK	9,5%	
BI	10,00% - 12,00%	8,00% - 10,00%
LPS	11,50%	8,4%

Prospek Usaha BRI

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2020 yang diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2019, diharapkan berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Dukungan dari kondisi makro disertai dengan perbaikan proses bisnis internal BRI diharapkan akan menunjang ekspansi bisnis BRI.

- Bisnis Mikro**

Untuk memaksimalkan potensi bisnis di segmen Mikro, salah satunya adalah dengan mengelola produk KUR agar dapat menjadi pipeline kredit Mikro komersial, yaitu Kupedes. Optimisme tersebut ditunjang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro seperti terlihat dari peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI dari Rp79,74 triliun di tahun 2018, menjadi Rp86,97 triliun di tahun 2019. Hal ini merupakan peluang bagi BRI untuk menjaga pertumbuhan kredit Mikro yang memiliki keunggulan dan terbukti menjadi pemimpin pasar pinjaman Mikro melalui Kupedes dan KUR. Selain itu, BRI terus melakukan inovasi produk untuk melayani segmen *sub-micro* di Indonesia



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

- **Bisnis Konsumer**

Potensi di segmen Konsumer akan dimaksimalkan dengan produk unggulan Briguna, yaitu pinjaman untuk segmen pekerja berpenghasilan tetap, serta KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah melalui optimasi cross-sell dengan segmen Korporasi dan BUMN.

- **Dana Murah**

Peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapkan akan diimbangi dengan kemampuan BRI dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Dengan meningkatnya porsi APBN untuk subsidi non energi dan pos transfer dana ke daerah, diharapkan akan menyumbang pada pertumbuhan Simpanan di segmen Mikro seperti yang terlihat pada 2 tahun sebelumnya.

- **Operasional Bisnis**

Dengan inisiatif *business process re-engineering*, BRI akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan membatasi pembukaan unit kerja operasional dan rekrutmen pegawai. Sehingga untuk mempertahankan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, BRI akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, optimalisasi BRISpot, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun Big Data dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem prakarsa dan putusan kredit.

- **Kualitas Aset**

Untuk kualitas kredit, BRI masih akan melakukan strategi menjaga tingkat rasio NPL (Non-Performing Loan) tahun 2019 dikisaran 2,0% sampai dengan 2,2% dengan memaksimalkan penyelesaian kredit melalui intensifikasi kerjasama dengan kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi agunan.

Saat ini BRI merupakan sebuah grup keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap. Mulai dari layanan perbankan konvensional maupun syariah, asuransi, multifinance, capital market maupun venture capital. Hal ini merupakan komitmen BRI terhadap pilar terakhir dari Corporate Plan BRI periode 2018 – 2022 yaitu peningkatan kontribusi perusahaan

anak dalam rangka mewujudkan *integrated financial solution*.

ASPEK PEMASARAN

Aspek pemasaran merupakan factor penting yang mendorong keberhasilan kinerja BRI. Dengan strategi pemasaran yang tepat BRI mampu memetakan pangsa pasar dan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Aktivitas komunikasi pemasaran Sektor Bisnis Konsumer, Sektor Retail dan Sektor Wholesale (Mikro, Komersial & Korporasi) dikelola oleh Divisi Marketing Communication (MCM). Sebagai Divisi yang bertanggung jawab terhadap aktifitas komunikasi pemasaran produk-produk Bank BRI, Divisi *Marketing Communication* bertugas untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *activation* dari produk, jasa, dan layanan serta program yang dimiliki oleh Bank BRI baik kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) maupun calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*).

Dengan diterapkannya strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (*Integrated Marketing Communication*) dengan menggunakan media yang efektif & efisien maka akan tercapai *awareness* yang optimal serta positioning yang tepat, dan relevan untuk masing-masing *target market audience* di tiap segmen sehingga dapat meningkatkan *brand value* bagi Bank BRI.

Sebagai Bank terbesar dan tersebar di Indonesia, Bank BRI selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan didukung oleh inovasi-inovasi. Beragam program pemasaran dan promosi produk yang dilakukan berdasarkan kesesuaian segmentasi dan preferensi Nasabah. Untuk mengkomunikasikan seluruh aktivitas komunikasi, Bank BRI memaksimalkan media komunikasi seperti *above the line*, *below the line*, Media OOH serta didukung media digital melalui Social Media Bank BRI. Adapun social media asset yang dimiliki oleh Bank BRI yaitu Instagram (@bankbri_id), Twitter (@promo_BRI, @BANKBRI_ID, @KontakBRI) dan Facebook (Bank BRI) dan Youtube (Bank BRI) dengan jumlah followers total 1.254.473 (12 Desember 2019).

Beragam aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 untuk Nasabah Bank BRI adalah sebagai berikut :

TINJAUAN KEUANGAN

Peluncuran Produk Baru

Bank BRI melakukan *relaunching* produk *Mobile Banking* yaitu BRIimo

Dalam rangka Journey Bank BRI di tahun 2019 yaitu *Leading Consumer Banking*, Bank BRI berinovasi membuat aplikasi keuangan digital terbaru bernama BRIimo. BRIimo merupakan Platform Digital produk-produk transaksi keuangan BRI (*Internet Banking* dan *Mobile Banking*) berbasis data yang dapat diakses oleh nasabah maupun nonnasabah BRI menggunakan satu *user id* dengan mekanisme *Single Log On*.

Nasabah eksisting pengguna *Internet Banking* BRI dapat langsung *login* menggunakan User ID-nya, sedangkan nasabah yang belum memiliki *User Internet Banking* BRI dapat terlebih dahulu melakukan registrasi melalui aplikasi untuk dapat membuka rekening baru. *User Interface* (Tampilan) dan *User Experience* (pengalaman transaksi) yang sama untuk fitur-fitur kekinian dan millennial yang juga menjadi keunggulan aplikasi BRIimo seperti berikut ini:

1. **Login** menggunakan *finger print / Face ID*
2. Pembukaan Rekening melalui Aplikasi
3. Tarik Tunai Tanpa Kartu
4. Alias Pengganti Nomor Rekening
5. Mutasi Rekening s/d satu Tahun
6. *Request* kartu *by Apps*
7. Informasi Promo *ter-update*
8. Fitur Pembelian/Pembayaran lainnya

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Aplikasi BRIimo, layanan Bank BRI dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui HP.

Pesta Rakyat Simpedes di 100 kota di seluruh Indonesia

Sebagai Bank BUMN yang fokus untuk mendukung kegiatan UMKM di Indonesia, Bank BRI mempersembahkan *roadshow campaign* Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang dilakukan di 100 kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness*, retensi, *loyalty* dan bisnis produk Tabungan BRI Simpedes. Selain itu, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah Tabungan BRI Simpedes, sebagai media untuk melakukan rejuvenasi Tabungan BRI Simpedes dengan pendekatan kepada generasi Millennials, serta sebagai media literasi dan

sosialisasi keunggulan produk dan jasa keuangan mikro BRI kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. PRS pada tahun ini memiliki konsep rangkaian kegiatan yang disebut 6P yaitu Pawai, Pasar, Panggung hiburan, Panen hadiah, Pojok X'sis, dan BRI Peduli.

Pawai adalah arak-arakan dengan memasukkan unsur kemeriahan kebudayaan setempat dengan kreatifitas yang dapat melibatkan seluruh masyarakat dengan target market Simpedes, seperti artis pendukung acara, hadiah Simpedes, pawai komunitas setempat (kendaraan, kostum).

Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dan menumbuhkan *awareness* masyarakat tentang acara PRS dan Tabungan BRI Simpedes.

Pasar adalah Bazaar usaha unggulan wilayah yang melibatkan nasabah BRI sebagai ajang promosi dan edukasi serta nonnasabah BRI (memiliki produk unggulan yang sedang *booming*) untuk dilakukan akuisisi. Untuk meningkatkan *usage* e-banking dan transaksi nontunai melalui BRIlink.

Panggung hiburan adalah Penyediaan hiburan melalui aktifitas lomba yang melibatkan seluruh segmen masyarakat serta menampilkan artis (lokal dan atau nasional) dan akan diselengi kuis dan lomba dengan hadiah Tabungan BRI Simpedes.

Panen hadiah adalah Puncak acara dari kegiatan PRS berupa Undian Hadiah Simpedes (Panen Hadiah Simpedes).

Pojok X'sis adalah Penyediaan area untuk X'Sis bagi generasi Millennial sesuai dengan gaya hidup masa kini dengan kegiatan seperti kompetisi game (E-Sports), fotobooth untuk selfie, dan digital banking experience.

Peduli adalah kegiatan sosial yang diperuntukkan kepada nasabah mikro Simpedes dan Kupedes seperti pengobatan gratis, donor darah, sunatan massal untuk meningkatkan *corporate image* BankBRI.

Event/Aktivasi Produk BRI

BRI sepanjang tahun 2019 melakukan berbagai event/aktivasi produk BRI antara lain sebagai berikut:

a. Music



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Tahun 2019, Bank BRI memanjakan Milenial dengan berbagai macam acara musik baik dalam Negeri maupun Manca negara antara lain Maroon 5 Concert, Konser Yovie Widianto 2019, Launching Album Slank, Soundernaline, Addie MS Charity Orchestra, Makassar Jazz Festival, La La Love, Britama Inspirasi Cinta Bandung, Papandayan Jazz Fest, Batik Music Festival, BRIOnly with NOAH.

Nasabah BRI dapat menikmati berbagai *benefit* dan *privilege* bagi pemegang kartu Bank BRI (Kartu Kredit BRI, Debit BRI, BRI Prioritas, dan E-Pay) dimana BRI memberikan berbagai kemudahan dan keistimewaan bagi Nasabah seperti promo diskon pembelian, promo penukaran BRI Poin, jalur masuk VIP tanpa antrian serta *games* dan hadiah menarik lainnya di *Booth* Bank BRI.

b. Food

Bagi pecinta kuliner, Bank BRI memanjakan dengan berbagai promo yang ditawarkan untuk Nasabah Bank BRI khususnya pemegang Kartu Kredit BRI dan Kartu Debit BRI di berbagai restoran ternama di Seluruh Indonesia. Antara lain Pizza Hut, McD, Waroeng Kita, Excelso, Tous Les Jours, Liberica, Kobeshi, Shabu-shabu House, Bakso Boedjangan, Fish Wow Cheesee, Ayam Karmila, Upnormal. Bank BRI juga mengadakan *event* bagi pecinta kuliner seperti Festival Kuliner Ramadhan, Pasar Nusantara dan Pasar Tiban.

c. Travel

Tren berlibur yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dimanfaatkan oleh Bank BRI dengan program promosi menawarkan tiket pesawat dan paket liburan bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan *travel agent* seperti Umrah *Travel Fair*, *Launching Traveloka Pay later* bersama Kartu Kredit BRI, KAI *Travel Fair*. Penawaran yang diberikan berupa harga spesial. Untuk pemesanan hotel dan paket wisata, Bank BRI bekerjasama dengan Accor Hotel Group, Traveloka, Tiket.com, airy room, zenroom dan Agoda dengan penawaran diskon dan harga spesial.

d. Sport

Dalam rangka mendukung olah raga baik nasional maupun internasional, Bank BRI mewujudkan dukungannya pada berbagai *event* olah raga yang

berlangsung selama tahun 2019. Diantaranya Mandeh *RUN*, Kartini *RUN*, *Paper RUN* 2019 Sinarmas, *Tournament* Damai Indah Golf, BRI Independen *RUN*, Sportartcular, Houbi Trampoline Championship, *Tournament* Indonesia Open 2019, *FUN RUN* Jati luhur, BRILian *Run* 2019 dan Indonesia *Masters*.

e. Fashion

Tahun 2019, berbagai acara peragaan busana di gelar antara lain Kain Tenun Sika, Tulola *Festive National*, *Fashion Show Christmas Golden Night* by Sapto Djojokartiko (*Galleries Lafayette*) dan *Beauty Soiree*. Bank BRI juga memberikan kemudahan bagi nasabah berupa program diskon, program cicilan 0% dan program penukaran poin untuk beberapa *merchant* produk-produk fashion seperti *shopping at* Seibu, Nike *factory Store* dan Levis.

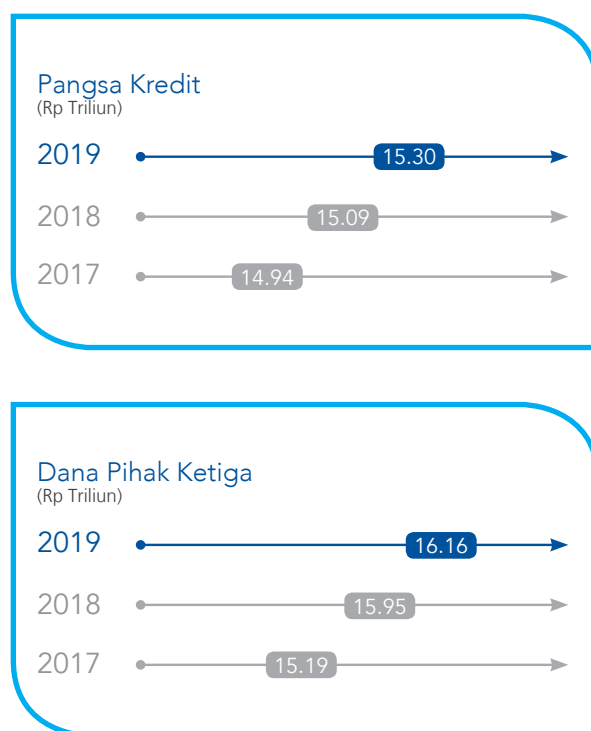
f. E-Commerce

Berbagai program menarik yang ditawarkan untuk berbelanja dan bertransaksi di *e-commerce* dalam bentuk diskon atau *cash back* dengan menggunakan kartu kredit BRI. Antara lain di beberapa *merchant* seperti tokopedia, dinomarket.com, brishoponline.com, blanja.com, shopee, dana, cashbac, jd.id dan blibli.com.

Pangsa Pasar BRI (Bank Saja)

Pangsa pasar BRI dalam hal aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap industri terus menunjukkan peningkatan. Berikut pangsa pasar BRI dalam tiga tahun terakhir.

TINJAUAN KEUANGAN



Strategi Pemasaran 2020

Dalam rangka meningkatkan bisnis Bank BRI baik dari sisi pendapatan, simpanan maupun pinjaman, diperlukan dukungan aktifitas pemasaran yang terintegrasi antara produk, jasa dan layanan Bank BRI. Strategi pemasaran terintegrasi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dari produk, jasa serta program yang dimiliki oleh Bank BRI, namun juga diperlukan untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *activation* kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) dan calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*) agar bisnis Bank BRI dapat tetap berkembang dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi Bank BRI di tahun 2022 menjadi *"The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to The Best Talent"*, Bank BRI mempersiapkan tema strategi tahun 2020 adalah *"Integrated Financial Solution"*. Strategi pemasaran Bank BRI di tahun 2020 ini akan lebih difokuskan kepada penyediaan layanan dan solusi keuangan terintegrasi (*end to end financial solution*) sesuai pada kebutuhan dan *life journey* nasabah, penyediaan pengalaman bertransaksi finansial yang *seamless across all channel* serta peningkatan

kapabilitas mengelola kebutuhan nasabah. Melalui strategi tersebut maka diharapkan dapat terjadi peningkatan customer experience di seluruh channel BRI baik digital maupun unit kerja operasional serta peningkatan *cross selling* produk dan layanan BRI beserta perusahaan anak dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI Group, *data analytics* dan *digital marketing*.

Dengan tema *"Integrated Financial Solution"* diharapkan dapat meningkatkan proporsi pendapatan Bank BRI dari sisi *Fee Base Income* serta peningkatan Dana Murah melalui produk-produk yang menghasilkan transaksi. Selain itu, pengaruh dari perkembangan teknologi serta masyarakat khususnya generasi milenial dan post milenial yang memiliki habit *"consumerism as life"* juga memerlukan pendekatan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara dinamis dan dikomunikasikan melalui saluran komunikasi yang lebih fleksibel, personal dan mudah diakses seperti penggunaan saluran komunikasi digital karena generasi ini sangat berpotensi menjadi nasabah masa depan Bank BRI.

Bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan *core business* BRI yang harus dipertahankan dan diperkuat. Dengan arah transformasi perusahaan menjadi *"go smaller, go shorter, go faster"*, maka diharapkan *core business* BRI dapat berkembang dengan lebih cepat. Bisnis BRI semakin berkembang dengan didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki Unit Kerja yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan human capital yang handal, market share terbesar, pertumbuhan KUR yang tinggi, produk, jasa & layanan yang unggul, loyalitas nasabah yang kuat serta jumlah Agen BRILink yang besar & tersebar.

Adapun untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menciptakan end to end financial solution yang dapat memberikan experience bagi nasabah dengan dibangunnya *Super Apps* sehingga nantinya nasabah dapat mengakses semua produk BRI yang dibutuhkan dalam satu aplikasi.
2. *Business process re-engineering* melalui program kerja *road to digitalization*, *big data insight* dan *enhancement BRISpot*.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

3. Peningkatan market share simpanan dan pinjaman melalui program kerja optimalisasi (referral dan edukasi finansial), melalui teknologi aplikasi digital, peningkatan produktivitas Agen BRILink, kerjasama dengan fintech serta kegiatan literasi & inklusi kepada masyarakat *unbankable*.
4. Peningkatan CASA melalui program kerja *pipeline management system*, program akuisisi dan pemasaran khusus di kantong dana serta menerapkan cash pick up bagi pedagang pasar melalui Agen BRILink maupun kerjasama dengan pihak ketiga melalui aplikasi sehingga akan lebih memudahkan nasabah.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Dalam memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, BRI memerhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor *sustainable* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun ke depan. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Jumlah Dividen yang Dibagikan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2019, BRI telah membagikan dividen sebesar Rp16,18 triliun atau 50% dari Laba Bersih Bank BRI tahun 2018 sebesar Rp32,35 Triliun. Pemegang saham menyetujui peningkatan rasio pembayaran dividen dari 45% dari laba bersih pada tahun 2017 menjadi 50% dari laba bersih pada tahun 2018. Jumlah dividen tunai per saham sebesar Rp131,14 dan dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2019 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019.

Tabel Pembayaran Dividen BRI

Keterangan	2017	2018	2019
Jumlah Dividen (miliar Rupiah)	10,478,31	13.048,44	16.175,57
Dividen per Lembar Saham (Rupiah)	428,61	106,75	131,14
Rasio Dividen	40% dari laba bersih tahun 2016	45% dari laba bersih tahun 2017	50% dari laba bersih tahun 2018
Tanggal Pengumuman	15 Maret 2017	22 Maret 2018	15 Mei 2019
Tanggal Pembayaran	13 April 2017	25 April 2018	13 Juni 2019

KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Seiring dengan pertumbuhan usaha BRI telah berkontribusi bagi negara baik secara tidak langsung maupun langsung. Kontribusi tidak langsung yang telah diberikan BRI adalah turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit maupun layanan perbankan lainnya. BRI juga turut terlibat dalam berbagai program pemerintah terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan antara lain penyaluran KUR dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, BRI turut menjaga kedaulatan bangsa dengan memberi layanan perbankan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) yang didukung teknologi satelit BRISat.

TINJAUAN KEUANGAN

Adapun kontribusi langsung BRI bagi negara adalah dalam bentuk setoran pajak serta pembayaran dividen kepada Pemerintah RI sebagai pemegang saham utama BRI. Berikut kontribusi Pajak dan dividen yang telah dilakukan BRI selama 2017 hingga 2019:

Kontribusi Pajak dan Dividen

Rp juta

No.	Jenis Pajak	2017	2018	2019
1	Pph Pasal 21	834.583	1.319.719	1.893.956
2	Pph Pasal 22	20.789	19.541	32.087
3	Pph Pasal 23	133.348	170.931	210.712
4	Pph Pasal 26	959.794	1.102.587	1.242.532
5	Pph Final Pasal 4 Ayast (2)	3.904.048	4.197.500	5.329.602
	Sub Jumlah Pajak Potput	5.852.561	6.810.278	8.708.889
6	PPN & Bea Materai	108.370	156.647	102.185
7	PPh Badan (Corporate Tax)	9.064.649	9.845.709	8.751.799
8	Dividen	6.000.477	7.472.281	9.179.798
	Jumlah Pajak + Dividen	21.026.058	24.284.915	26.742.671

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan manajemen, BRI memberikan bonus berupa program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan. Sesuai dengan putusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., BRI memberikan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pekerja BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Di tahun 2019, sesuai dengan Putusan RUPS tanggal tgl 23 Maret 2016, BRI memberikan bonus berupa program kepemilikan saham oleh karyawan tahap I (Employee Stock Option Plan/ESOP tahap I). Bonus berupa ESOP tersebut telah dilimpahkan kepada masing-masing Pekerja yang dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019 dalam bentuk



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Script Saham dengan total sebanyak 143.415.500 lembar saham. Pelimpahan saham treasury untuk ESOP dimaksud telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Mei 2019.

PENGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

BRI melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering atau IPO) pada 10 November 2003. Sesuai dengan penjelasan pada prospektus IPO, perincian penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yakni sebesar Rp1,47 triliun adalah sebagai berikut:

Total Perolehan Dana	Rencana Penggunaan Dana	Rincian Penggunaan Dana	Total Penggunaan Dana	Saldo Dana
Rp 1,47 triliun	Sekitar 60% digunakan untuk pengembangan Core Banking dan IT System	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 883,27 miliar	Rp 1,47 triliun atau 100% dari rencana penggunaan dana	Nihil
	Sekitar 30% digunakan untuk ekspansi jaringan kerja	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 441,63 miliar		
	Sekitar 10% digunakan untuk riset dan pengembangan produk	Per 31 Desember 2009 dana yang digunakan sebesar Rp 147,21 miliar		

Selama periode penggunaan dana penawaran umum tahun 2004-2009, tidak melakukan perubahan rencana penggunaan dana.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

BRI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam kegiatan normal usaha. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Tabel berikut menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Piutang dan pembiayaan Syariah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, dan Kredit yang diberikan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Adhimix Precast Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Asuransi atas aset tetap

TINJAUAN KEUANGAN

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Asuransi Jiwasraya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, dan Tagihan Derivatif
PT Barata Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan, dan Efek-efek
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Efek-efek
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek dan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT BTN Unit Usaha Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain
PT Citra Waspphutowa	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Eltran Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Tagihan akseptasi
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Tagihan akseptasi
PT Kaltim Industrial Estate	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
PT Gendhis Multi Manis	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Rekayasa Industri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Indonesia Asahan Aluminium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Kimia Farma Apotek Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih Tagihan derivatif aset dan Liabilitas Derivatif
PT Pertamina EP Cepu (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan derivatif aset
PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan derivatif aset
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Tagihan derivatif aset
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan

TINJAUAN KEUANGAN

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Semen Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
Yayasan Pendidikan Telkom	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah

TRANSAKSI SIGNIFIKAN

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Rp juta

ASET	2018	2019
Giro pada bank lain		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.270	109.226
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.291	48.885
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.809	1.322
PT Bank Syariah Mandiri	44	206
PT Bank BNI Syariah	3	5
	92.417	159.644
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.200.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	650.200	915.962
PT Mandiri Utama Finance	200.000	-
PT BNI Multifinance	100.000	-
PT Sarana Multigriya Finansial	100.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	36.000	80.250
PT BTN Syariah	30.200	21.150
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29.500	624.900
PT Bank BNI Syariah	2.000	5.250
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000	537.975
	2.349.900	2.185.487
Efek-Efek		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	141.668.852	151.018.159



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

ASET	2018	2019
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.905.291	1.514.200
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.685.747	1.534.635
PT Pupuk Indonesia (Persero)	990.581	985.264
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	982.849	1.970.887
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	912.628	1.570.327
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	707.878	944.869
PT Pegadaian (Persero)	634.129	653.811
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	426.530	816.807
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	388.149	0.000
PT Pertamina (Persero)	-	769.730
Lain-lain	3.717.873	5.693.934
	154.020.507	167.472.623
Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih		
PT Pertamina (Persero)	2.429.223	3.684.409
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.000.000	1.636.261
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	801.173	632.850
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	665.197	0.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	497.832	1.397.528
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	122.201	1.084.203
PT Waskita Beton Precast Tbk	69.447	153.922
PT Angkasa Pura I (Persero)	58.105	0.000
PT Wijaya Karya Beton Tbk	51.060	0.000
PT Aerotrans Services Indonesia	39.009	0.000
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	43.301
PT Dirgantara Indonesia	-	4.003.016
PT Pertamina Lubricants	-	557.815
PT Pertamina Patra Niaga	-	32.877
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	-	32.852
Lainnya	125.408	658.230
	6.858.655	13.917.264
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	1.505.273	1.130.306
Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali		
PT Asuransi Jiwasraya	1.149.156	879.052
PT Bank Mandiri Taspen	102.213	-
	1.251.369	879.052

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

ASET	2018	2019
Tagihan Derivatif		
PT Pertamina (Persero)	-	9.150
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	3.478
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	-	333
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	42
	-	13.003
Liabilitas Derivatif		
PT Pertamina (Persero)	-	5.765
PT Pertamina EP Cepu (Persero)	-	559
	-	6.324
Kredit yang Diberikan		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23.616.099	25.998.611
Perum BULOG	16.316.937	14.919.169
PT Pertamina (Persero)	11.575.627	7.797.013
PT Pupuk Kalimantan Timur	3.032.393	-
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.897.733	-
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.893.383	-
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2.804.944	1.886.099
PT Trans Jabar Tol	2.438.362	2.141.861
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	2.338.069	2.881.119
PT Petrokimia Gresik	2.222.289	1.858.161
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-
PT Pegadaian (Persero)	-	2.751.793
PT Cimanggis Cibitung Tollways	-	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	2.122.094
PT Kereta Api Indonesia	-	1.795.405
Lain-Lain	40.651.278	36.598.482
	110.787.114	102.749.807
Piutang dan Pembiayaan Syariah		
PT Waskita Beton Precast Tbk	512.000	512.000
PT Pegadaian (Persero)	400.000	700.000
PT Adhimix Precast Indonesia	314.043	175.514
PT Angkasa Pura I (Persero)	229.824	1.000.000
PT Citra Waspphutowa	213.515	248.537
PT Kimia Farma (Persero)	110.000	300.000
PT Kimia Farma Trading and Distribusi	100.000	-
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	92.410	-



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

ASET	2018	2019
PT Prima Armada Raya	85.798	113.058
Yayasan Pendidikan Telkom	85.370	-
Karyawan Kunci	9.946	8.126
Semen Indonesia	-	382.979
PT Kimia Farma Apotek	-	95.000
PT Koperasi Telkom	-	82.527
Lain-Lain	285.525	581.114
	2.438.431	4.198.855
Piutang Sewa Pembiayaan		
PT Hakaaston	42.937	33.474
PT Utama Karya Infrastruktur	23.456	13.644
PT Utama Karya	40.804	27.305
PT Waskita Adhi Sejahtera	5.000	-
PT Brantas Abipraya (Persero)	56	-
PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera	-	1.635
	112.253	76.058
Tagihan Akseptasi		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	716.140	0
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	421.000	209.586
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	173.595	-
PT Pertamina (Persero)	57.812	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	51.003	191.130
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	12.031	114.745
PT Pertamina Patra Niaga	11.326	294.920
PT Len Industri (Persero)	7.975	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	7.953	-
PT Len Railways System	7.593	-
PT Indonesia Asahan Aluminium	-	6.953
PT Pindad	-	86.794
PT Barata Indonesia (Persero)	-	14.042
PT Kaltim Industrial Estate	-	7.948
PT Wijaya Karya Industri Energy	-	3.421
PT Rekayasa Industri	-	13.320
Lainnya	11.265	1.495
	1.477.693	944.354
Penyertaan Saham		
PT Danareksa Investment Management	372.271	379.361

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

ASET	2018	2019
PT Bahana Artha Ventura	72.607	74.126
	444.878	453.487
Total Aset Dari Pihak-Pihak Berelasi	281.226.237	287.556.620
Total Aset Konsolidasian	1.296.898.292	1.416.059.513
Persentase Total Aset Dari Pihak-Pihak Berelasi	21,68%	20,31%

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada September 2019 dan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rp juta

LIABILITAS	2018	2019
Giro		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	53.016.669	48.339.192
Karyawan Kunci	26.672	3.175
Lain-Lain	1.435	-
	53.044.776	48.342.367
Tabungan		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	89.093	31.892
Karyawan Kunci	167.112	169.408
Lain-Lain	44.581	-
	300.786	201.300
Deposito Berjangka		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	85.832.772	89.095.529
Karyawan Kunci	157.555	138.836
Lain-Lain	1.878.913	-
	87.869.240	89.234.365
Simpanan dari Bank Lain & Lembaga Keuangan Lain		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.251.129	748.501
Efek-Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.934.600	-
Liabilitas Akseptasi		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.477.693	-
Pinjaman yang Diterima		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	454.595	-
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	777.979
	454.595	777.979
Kompensasi Kepada Manajemen Karyawan Kunci		
Nilai Kini Kewajiban Pensiun Imbalan Pasti	366.707	478.745



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

LIABILITAS	2018	2019
Nilai Kini Kewajiban Pemutusan Hubungan Kerja	129.433	42.141
Nilai Kini Kewajiban Tunjangan Hari Tua	92.444	100.676
Nilai Kini Kewajiban Cuti Besar	54.069	61.234
Nilai Kini Kewajiban Penghargaan Tanda Jasa	42.492	47.988
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	11.523	-
	696.668	730.784
Total Liabilitas Kepada Pihak-Pihak Berelasi	147.029.487	140.979.722
Total Liabilitas Konsolidasian	1.111.622.961	1.208.069.362
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	13,23%	11,67%

Rp juta

KOMITMEN & KONTIJENSI PADA REKENING ADMINISTRATIF	2018	2019
Garansi yang Diberikan		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.479.242	4.520.182
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.361.314	943.880
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2.333.382	2.733.225
PT Pertamina (Persero)	1.922.168	2.075.352
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.254.834	857.493
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.178.058	2.436.348
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.003.360	619.287
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	882.663	1.742.053
PT Pertamina Hulu Rokan	719.000	694.125
PT Telekomunikasi Selular Tbk	519.702	-
PT Pindad (Persero)	332.037	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	631.443
Lain-Lain	5.061.296	7.171.638
	21.047.056	24.425.026

Rp juta

	2018	2019
L/C yang Tidak Dapat Diberikan yang Masih Berjalan Dalam Rangka Impor		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.263.630	172.709
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	748.692	192.681

TINJAUAN KEUANGAN

Rp juta

	2018	2019
PT Pindad (Persero)	542.655	468.509
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	426.691	425.826
Kementerian Pertahanan	409.729	
PT Pupuk Kalimantan Timur	260.822	
PT Pertamina (Persero)	196.051	285.603
PT Perkebunan Nusantara XI	190.210	
PT Petrokimia Gresik	168.222	173.668
PT Pembangunan Jawa-Bali	123.510	
Pekas Bialugri		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk		342.867
Perum Bulog		
PT Indonesia Asahan Aluminium		529.539
PT Barata Indonesia (Persero)		
PT Gendhis Multi Manis		157.469
PT Geo Dipa Energi (Persero)		93.417
Lain-Lain	755.917	543.034
	5.086.129	3.385.322
Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi		
Gaji dan Tunjangan Direksi	362.081	89.004
Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris	128.603	27.732
	490.684	116.736
Tantiem, Bonus dan Insentif Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan Kunci		
Tantiem Direksi	268.226	309.717
Tantiem Dewan Komisaris	99.290	110.152
Bonus dan Insentif Karyawan Kunci	40.088	116.674
	407.604	536.543



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada September 2019 dan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rp juta

	2018	2019
ASET		
Giro Pada Bank Lain	0,007	0,009%
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0,181	0,147
Efek-Efek	11,876	11,677
Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih	0,529	0,064
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,116	0,044
Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	0,096	0,061
Kredit yang Diberikan	8,542	6,716
Piutang dan Pembiayaan Syariah	0,188	0,293
Tagihan Akseptasi	0,114	0,001
Penyertaan Saham	0,034	0,000
Total	21,683%	19,012%

Rp juta

	2018	2019
LIABILITAS		
Giro	4,772	4,727%
Tabungan	0,027	0,024
Deposito Berjangka	7,905	8,651
Simpanan Dari Bank Lain & Lembaga Keuangan Lainnya	0,113	0,012
Efek-Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	0,174	0,000
Liabilitas Akseptasi	0,133	0,078
Pinjaman yang diterima	0,041	0,089
Kompensasi Kepada Manajemen Karyawan Kunci	0,063	0,058
Total	13,228%	13,639%

TINJAUAN KEUANGAN

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Investasi

Selama pada tahun 2019, BRI telah melakukan investasi sebesar Rp5,05 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembelian tanah sebesar Rp3,72 triliun, penambahan bangunan senilai Rp223,42 miliar, penambahan kendaraan bermotor sebesar Rp85,29 miliar, komputer dan mesin sebesar Rp896,54 triliun, dan perlengkapan kantor sebesar Rp129,44 miliar.

Ekspansi

Selama tahun 2019, BRI terus berekspansi terutama pada jaringan *electronic channel* (*e-channel*). Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan akses keuangan dan literasi keuangan termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). *E-channel* yang ditambah dan diperluas BRI adalah ATM Setor Tarik Tunai (*Cash Recycle Machine* atau CRM) sebanyak 600 CRM dari awal hingga tahun 2019. Sehingga jumlahnya dari sebelumnya 2.609 CRM di tahun 2018 menjadi 3.209 CRM pada tahun 2019.

Divestasi

Selama tahun 2019, BRI baik secara individu maupun konsolidasi tidak melakukan kegiatan divestasi.

Akuisisi

Pada 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (PPJBSB) dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1,04 triliun dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham BRINS dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Restrukturisasi Utang dan/atau Restrukturisasi Modal

Pada tahun 2019, BRI tidak melakukan restrukturisasi utang maupun restrukturisasi modal.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum		Penyusunan Kebijakan internal terkait BMPK di BRI
2	Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 20/4/PADG/2018 Tanggal 5 April 2018	Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	Pokok pengaturan yang berubah dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait kewajiban Peserta untuk menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana; 2. Pengaturan mengenai mekanisme antrean dan penggunaan FLI untuk pelaksanaan setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS; 3. Pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam Pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum dalam Sistem BI-RTGS dilakukan secara tersentralisasi; 4. Penyempurnaan pengaturan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan serta harmonisasi dengan ketentuan penyelenggaraan sistem lain di Bank Indonesia seperti BI-SSSS, Sistem BI-ETP, dan SKNBI antara lain: • batas waktu kewajiban pelaksanaan security audit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta Sistem BI-RTGS; • kewajiban untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara. Hal ini ditujukan agar Peserta berkomitmen mengikuti uji coba untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran.	1. BRI harus menyusun prosedur baru tentang penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS 2. BRI wajib melakukan security audit paling lambat 6 bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal peserta sistem BI-RTGS 3. BRI wajib untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara
3	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/15/PADG/2018 Tanggal 30 Juli 2018	Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)	1. Latar belakang penerbitan PADG tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem BI-RTGS antara lain untuk mengatur mengenai kewajiban penyediaan dana pada saat pengiriman instruksi setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS, mekanisme antrean, dan penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum maka pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam penyelenggaraan BI-RTGS, dilakukan secara tersentralisasi. 2. Pokok pengaturan yang berubah dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement adalah sebagai berikut: • Pengaturan terkait kewajiban Peserta untuk menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana; • Pengaturan mengenai mekanisme antrean dan penggunaan FLI untuk pelaksanaan setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS; • Pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam Pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum dalam Sistem BI-RTGS dilakukan secara tersentralisasi;	1. BRI wajib memenuhi ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam PADG dimaksud 2. BRI wajib melakukan security audit paling lambat 6 bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal peserta sistem BI-RTGS 3. BRI wajib untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
			- Penyempurnaan pengaturan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan serta harmonisasi dengan ketentuan penyelenggaraan sistem lain di Bank Indonesia seperti BI-SSSS, Sistem BI-ETP, dan SKNBI antara lain: - batas waktu kewajiban pelaksanaan security audit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta Sistem BI-RTGS; - kewajiban untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara. Hal ini ditujukan agar Peserta berkomitmen mengikuti uji coba untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. 3. PADG Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali ketentuan mengenai: - instruksi setelmen dana; - grup prioritas; - mekanisme antrean; dan - fasilitas pengelolaan likuiditas	
4	Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018	Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini diterbitkan dalam rangka penyalarsan terhadap kebijakan perizinan terpadu oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/13/PBI/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PBI PPTBU). - PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mengatur kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain persyaratan dan tata cara menjadi Peserta, perubahan data kepesertaan, status kepesertaan, dan perubahan status kepesertaan dalam SKNBI. - Selain itu, dalam rangka penyalarsan terhadap kebijakan perizinan terpadu sebagaimana angka 1, terdapat penyesuaian pengaturan penyampaian permohonan dan informasi mengenai kepesertaan SKNBI sebagai berikut: - Penyampaian permohonan dan informasi ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran untuk: - Permohonan menjadi Peserta yang diajukan oleh Bank yang baru didirikan atau Bank sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar sebagaimana PBI PPTBU; - Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI dan perubahan status kepesertaan sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar serta perubahan data kepesertaan yang mempengaruhi data Peserta di Bank Indonesia; dan - Penyampaian informasi mengenai perubahan alamat dan Pimpinan Peserta. - Permohonan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran untuk: - Permohonan menjadi Peserta yang diajukan oleh Bank selain sebagaimana dimaksud dalam butir a.i) dan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, perubahan data kepesertaan; dan - Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI selain sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii).	Sebagai peserta kliring nasional BRI wajib mengikuti ketentuan baru dimaksud dan melaporkan laporan-laporan yang diatur pada PADG BRI No. 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
			4. PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mencabut ketentuan Bab III huruf A sampai dengan huruf G Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016. 5. Ketentuan dalam PADG Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	
5	POJK Nomor 34/POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018	Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	1. Pihak Utama di BRI yang tunduk pada ketentuan dalam POJK ini meliputi: - Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP (adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian); - anggota Direksi; - anggota Dewan Komisaris; dan - Pejabat Eksekutif (pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank); 2. BRI wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi dan disampaikan pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku (28 Februari 2019). Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili, BRI dapat menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu. 3. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi telah disampaikan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor B.21-KPT/BNP/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. 4. Selanjutnya, BRI juga wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham mengenai status Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus yang dilakukan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.	1. BRI wajib melakukan pengkinian data pihak utama dan menyampaikan ke OJK paling lambat 1 bulan sejak ketentuan ini berlaku 2. BRI juga wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham mengenai status Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus yang dilakukan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tanggal 19 Februari 2019	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk	1. Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk baik untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah penyimpan 2. Pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi treasury dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran 3. Sertifikat kompetensi profesi treasury dimaksud, digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran. 4. Bank dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk (PPE EBUS) wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 5. Laporan kegiatan berkala wajib disampaikan secara bulanan paling lambat setiap hari kerja ke-12 (dua belas) bulan berikutnya. 6. Laporan insidental wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.	Dampak dari POJK tersebut bagi BRI adalah: 1. Menyusun ketentuan internal dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk 2. Membuat prosedur dan mekanisme pengawasan dalam menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk 3. Memastikan sertifikat kompetensi profesi treasury dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran bagi Pekerja BRI yang ditunjuk

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
7	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/7/PBI/2019 tanggal 15 Mei 2019	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 20/10/PBI/2018 Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward	- Seluruh Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) wajib memiliki Underlying Transaksi. - Kewajiban kepemilikan Underlying Transaksi dikecualikan untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing. - Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung atau dibuktikan dengan dokumen Underlying transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung. - Dokumen Underlying Transaksi wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF. - Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen Underlying transaksi valas terhadap Rupiah. - Sebagaimana diatur pada PBI tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui: - dokumen tambahan; - data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan - rekam jejak Nasabah atau Pihak Asing. - Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan: - dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; dan/atau - dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.	- Mengubah batas waktu pemrosesan pengiriman DKE Transfer Dana melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; - Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen; - Pengiriman DKE Pembayaran melalui Layanan Pembayaran Reguler wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; dan - Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Pembayaran Reguler yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
8	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/11/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019	Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	- Cakupan pengaturan PADG Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini meliputi: - ketentuan umum; - batas nilai nominal transaksi melalui sistem BI-RTGS; - batas nilai nominal transaksi melalui SKNBI; - pengumuman; dan ketentuan penutup. - Dalam PADG ini menyempurnakan ketentuan mengenai batas nilai nominal maksimal transaksi melalui SKNBI, yaitu: - Maksimal Rp 1 miliar untuk Layanan Transfer Dana; - Maksimal Rp 500 juta untuk Layanan Kliring Warkat Debit; - Maksimal Rp 1 miliar untuk Layanan Pembayaran Reguler; - Maksimal Rp 500 juta untuk Layanan Penagihan Reguler. - Seluruh peserta sistem BI-RTGS dan SKNBI harus mengumumkan batas nilai nominal transaksi yang diproses melalui sistem BI-RTGS dan SKNBI kepada nasabah. Pengumuman dilakukan dengan menempatkan informasi tersebut pada setiap kantor dan pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah. - PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Dampak dari PADG tersebut bagi BRI adalah: - BRI akan mengubah batas maksimal nilai nominal transaksi melalui layanan SKNBI untuk layanan transfer dana yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per DKE transfer dana; dan - BRI akan mengubah batas maksimal nilai nominal transaksi melalui layanan SKNBI untuk layanan transfer dana yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per rincian DKE pembayaran.
9	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/10/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019	Standar Layanan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Cakupan pengaturan PADG Standar Layanan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini meliputi: - ketentuan umum; - standar layanan nasabah dalam layanan transfer dana, tata cara pengisian perintah transfer dana, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; - standar layanan nasabah dalam layanan kliring warkat debit, tata cara pengisian perintah transfer dana debit, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; - standar layanan nasabah dalam layanan pembayaran reguler, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; - standar layanan nasabah dalam layanan penagihan reguler, tata cara pengisian perintah transfer debit, tanggung jawab peserta pengirim, tanggung jawab peserta penerima; - tata cara penerapan sanksi administratif; - ketentuan penutup.	Dampak dari PADG tersebut maka BRI harus melakukan hal-hal sbb: - Mengubah batas waktu pemrosesan pengiriman DKE Transfer Dana melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; - Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Transfer Dana yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen; - Pengiriman DKE Pembayaran melalui Layanan Pembayaran Reguler wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak Peserta menerima perintah transfer dana; dan - Mengubah batas waktu pemrosesan penerusan dana kepada Nasabah Penerima melalui Layanan Pembayaran Reguler yang awalnya dilakukan paling lama 2 (dua) jam menjadi wajib dilakukan paling lama 1 (satu) jam sejak setelmen.

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019.	Tata Kelola Dana Pensiun	1. Terdapat perluasan definisi dari Dana Pensiun yakni Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. 2. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 3. Pengaturan atas jumlah, komposisi, kriteria dan indenpendensi pengurus diatur dengan lebih jelas yakni untuk pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota yang disesuaikan dengan kompleksitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan memenuhi kriteria serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut. 4. Mayoritas Pengurus DPPK dan Mayoritas Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama pengurus dan Dewan Pengawas serta memiliki benturan kepentingan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun. 5. . Pengaturan atas jumlah, komposisi, kriteria dan indenpendensi pengurus diatur dengan lebih jelas yakni untuk Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota 6. Dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Dana Pensiun wajib membentuk fungsi sebagai berikut: α. Audit Internal; β. Manajemen Risiko; dan γ. Kepatuhan. Pembentukan fungsi tersebut bagi DPPK dilakukan oleh pengurus dan bagi DPLK dilakukan oleh Pelaksana Tugas Pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada pendiri DPLK. 7. Dana pensiun wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang didasarkan pada Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 8. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa: α. Peringatan tertulis; β. Penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola; dan/atau γ. Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengurus DPPK 9. Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan/atau DPS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun tersebut mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan yakni diundangkan di tanggal 12 Juni 2019 dan mulai berlaku efektif di tanggal 12 Desember 2019.	Dana Pensiun BRI wajib menyusun Pedoman Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 30 Agustus 2019	Pengelolaan Uang Rupiah	Materi pokok yang diatur di dalam PBI tentang Pengelolaan Uang Rupiah meliputi: 1. Macam Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam, termasuk Uang Rupiah Khusus (URK); 2. Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah, pecahan Uang Rupiah, ciri Uang Rupiah, desain Uang Rupiah, dan bahan baku Uang Rupiah; 3. Bank Indonesia melakukan perencanaan Uang Rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor yang mempengaruhi; 4. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah, termasuk Uang Rupiah Khusus dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa; 5. Kewajiban penyampaian laporan oleh Bank dan PJPUR kepada Bank Indonesia; 6. Bank Indonesia melakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung kepada Bank dan PJPUR, serta peman-tauan terhadap Bank pengelola kas titipan; 7. Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah, serta kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah palsu dan/atau instansi berwenang dalam rangka mendukung penanggulangan Uang Rupiah palsu; 8. 8. Pengenaan sanksi administratif kepada Bank dan PJPUR.	BRI wajib membuat ketentuan internal tentang penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, baik berkala dan laporan incidental, maka agar dibuat ketentuan yang mengatur terkait Unit Kerja yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan dan koreksi laporan apabila ada koreksi
12	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No 35/POJK.05/2018 Tahun 2018	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	Substansi POJK ini mencakup antara lain sbb: 1. Kegiatan Usaha Pembiayaan 2. Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor 3. Kerja Sama Pembiayaan 4. Strategi Anti Fraud 5. Sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama 6. Penyertaan 7. Pendanaan 8. Larangan 9. Rasio Utang Pembiayaan 10. Ekuitas 11. Tingkat Kesehatan Keuangan 12. Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan dan Pelayaran 13. Penyampaian Laporan Berkala Sanksi	Dampak bagi BRI adalah, BRI akan menyusun ketentuan internal yang mengatur mengenai Pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan POJK dimaksud

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
13	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019	Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	Substansi POJK ini mencakup antara lain sbb: 1. Ketentuan Umum 2. Aktivitas Bank Dalam Sekuritisasi Aset 3. Batas Maksimum Pemberian Fasilitas 4. Pelaporan 5. Sanksi	Dampak bagi BRI antara lain: 1. BRI akan mengajukan izin untuk aktivitas sekuritisasi aset kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila dikemudian hari BRI akan melakukan kegiatan sekuritisasi aset. 2. BRI akan membuat pedoman Manajemen Risiko terkait Prinsip Kehati-hatian Aktivitas Sekuritisasi Aset dan dibuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Kredit atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah apabila akan melakukan kegiatan Sekuritisasi Aset Kredit Kepemilikan Rumah. 3. BRI akan membuat perjanjian terkait masing-masing kegiatan Aktivitas Sekuritisasi Aset.
14	POJK Nomor RI Nomor : 16/POJK.05/2019	Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Substansi POJK ini mencakup antara lain: 1. Struktur Organisasi Perusahaan PNM 2. Batas rasio produktivitas Perusahaan 3. Pemenuhan Tingkat Kesehatan Keuangan 4. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 5. Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif 6. Kepatuhan pelaporan Laporan Tahunan 7. Penerapan Strategi Anti Fraud 8. Larangan-larangan Perusahaan PNM	Dampak POJK tersebut bagi BRI yaitu BRI akan menyusun prosedur monitoring terhadap perusahaan PNM sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada POJK Nomor : 16/POJK.05/2019
15	Analisa Dampak Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 45 Tahun 2019	Barang Dilarang Ekspor	Pada Peraturan Menteri ini telah ditetapkan barang dilarang ekspor ke dalam 4 (empat) bidang usaha, yaitu sebagai berikut: 1. Bidang Pertanian : Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip, dan lain-lain. 2. Bidang Kehutanan : Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut; bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu, dan lain-lain. 3. Bidang Pertambangan : Pasir alam dari segala jenis; Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas; Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang; Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 4. Cagar Budaya : Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, palaeontologi, etnografi atau numismatika; dan barang antik yang umumnya melebihi 100 tahun.	Akan dilakukan penyesuaian ketentuan Loan Portfolio Guidelines (LPG) Tahun 2018 khususnya terkait dengan list barang dilarang ekspor.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
16	Analisa Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Pokok Pengaturan dalam PERMA antara lain sebagai berikut: I. Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini disusun untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara eksekusi. α. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana β. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500 juta. γ. Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institut penggugat.	BRI akan melakukan penyesuaian terkait syarat gugatan sederhana
17	Analisa Dampak Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2019	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	Pokok Pengaturan dalam Permen Agraria antara lain sebagai berikut: I. Latar Belakang Peraturan ini dibuat sebagai landasan hukum untuk meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi secara elektronik. II. Terkait mekanisme pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik diatur hal-hal sebagai berikut: α. Pengguna Terdaftar mengajukan permohonan layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el yang disediakan oleh Kementerian. β. Pemohon membuat Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data Dokumen Elektronik yang diajukan dalam bentuk Dokumen Elektronik (format terlampir). γ. Persyaratan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitur. d. Asli dokumen persyaratan permohonan wajib disimpan oleh pemohon. δ. Dalam hal permohonan layanan berupa pendaftaran Hak Tanggungan, persyaratan permohonan yang berupa APHT disampaikan oleh PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Sistem HT-el. ε. Permohonan layanan yang telah diterima oleh Sistem HT-el diberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem paling sedikit memuat: 1. Nomor berkas pendaftaran permohonan; 2. Tanggal pendaftaran permohonan; 3. Nama pemohon; dan 4. Kode pembayaran biaya layanan.	BRI akan dilakukan penyesuaian ketentuan tentang agunan kredit beserta perubahannya serta melakukan penyusunan Juknis (Petunjuk Teknis) dan hal-hal yang dilarang dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2019

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
			φ. Setelah mendapat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir f diatas, pemohon melakukan pembayaran biaya melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Jika dalam batas waktu belum melakukan pembayaran maka permohonan dinyatakan batal. γ. f. Permohonan diproses setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem elektronik. Jika tidak terkonfirmasi oleh sistem, pemohon dapat melakukan konfirmasi secara langsung ke Kantor Pertanahan atau Layanan Pengaduan. III. Terkait pencatatan Hak Tanggungan diatur hal-hal sebagai berikut: α. Layanan Hak Tanggungan diproses dengan melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh Kepala Kantor Pertanahan. β. Pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dapat dilakukan oleh Kreditor dengan mencetak catatan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el. Kreditor melekatkan hasil cetakan catatan sebagaimana dimaksud butir b diatas, pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Tanggungan.	



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
18	Analisa Dampak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 11/PRT/M/2019	Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah	I. Latar Belakang Peraturan ini dibuat sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sistem PPJB yang terdiri dari Pemasaran dan PPJB. Sistem PPJB berlaku untuk Rumah Umum Milik dan Rumah Komersial berbentuk Rumah Tunggal, Rumah Deret, dan Rumah Susun. Pelaku Pembangunan dalam Sistem PPJB terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum. 1. Terkait pemasaran diatur hal-hal sebagai berikut: - Pelaku Pembangunan dapat melakukan pemasaran Rumah Tunggal atau Rumah Deret pada saat dalam tahap proses pembangunan atau sebelum pembangunan dilaksanakan. - Pelaku Pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan Agen Pemasaran atau Penjualan untuk melakukan Pemasaran. - Pelaku Pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan Agen Pemasaran atau penjualan. - Pemasaran harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada. Informasi Pemasaran kepada masyarakat memuat paling sedikit: · nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota; · nomor sertifikat hak atas tanah atas nama Pelaku Pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan; · surat dukungan dari bank/bukan bank; · nomor dan tanggal pengesahan untuk Pelaku Pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk Pelaku Pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pembangunan; · nomor dan tanggal penerbitan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan; · rencana tapak perumahan atau Rumah Susun;	BRI akan melakukan penyesuaian dengan ketentuan tersebut

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
			· spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah Sarusun; · harga jual Rumah atau Sarusun; · informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum yang dijanjikan oleh Pelaku Pembangunan; dan · informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah Susun.	
2.			Terkait PPJB diatur hal-hal sebagai berikut: PPJB dilakukan setelah Pelaku Pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas: α. status kepemilikan tanah (dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB); β. hal yang diperjanjikan, paling sedikit terdiri atas: · kondisi rumah; · prasarana, sarana, dan utilitas umum; · penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; · status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan γ. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan (disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB); δ. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan (dibuktikan dengan terbangunnya prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase, lokasi pembangunan sarana sesuai peruntukan; dan surat pernyataan Pelaku Pembangunan mengenai tersedianya utilitas umum berupa sumber listrik dan sumber air); ε. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk rumah susun (dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pelaku Pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama); φ. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: · untuk Rumah Tunggal atau Rumah Deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan; atau untuk Rumah Susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah Susun yang sedang dipasarkan.	



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN KEUANGAN

NO	PERATURAN	PERIHAL	KETERANGAN	DAMPAK BAGI BRI
19	Hasil Analisa Dampak atas PBI Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/8/PBI/2018	Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Pokok Pengaturan dalam PBI antara lain sebagai berikut: I. Latar Belakang 1. bahwa dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga maka diperlukan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif melalui relaksasi kebijakan khususnya terkait rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor; 2. bahwa sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan upaya mendorong ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) diperlukan dukungan bank sentral melalui kebijakan rasio loan to value, rasio financing to value, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi properti berwawasan lingkungan dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; Tata cara penilaian agunan diatur sebagai berikut: α. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan β. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen	Dampak dari terbitnya PBI tersebut maka BRI akan melakukan penyesuaian ketentuan internal megancu pada PBI Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/8/PBI/2018

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan Terhadap BRI
1	ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"	Mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim
2	ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"	Mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim
3	PSAK No. 24 (Amandemen 2018), "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"	Memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada saat awal pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK No. 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlibat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak atas aset berubah.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim

TINJAUAN KEUANGAN

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Ancaman kelangsungan usaha BRI bisa bersumber dari potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi. Untuk mengantisipasi dampak dari potensi gangguan tersebut, Direksi BRI mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang diatur dalam Surat Edaran BRI NOSE: S.26-DIR/DMR/12/2016. Tujuan kebijakan BCM antara lain melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan stakeholders lainnya yang berada di lingkungan Unit Kerja Operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha).

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER Plan) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritis. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER Plan dan BC Plan dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge, dan POJK Nomor 14/PONK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, BRI sebagai salah satu Bank Sistemik telah menyusun Dokumen Rencana aksi (*Recovery Plan*).

Rencana aksi merupakan tahapan rencana yang akan dilakukan apabila Bank Sistemik mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Oleh karenanya Rencana Aksi yang disusun BRI telah memuat skenario yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan dan/atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha BRI.

Dokumen Rencana Aksi BRI telah memuat hal-hal yang ditetapkan di dalam POJK Rencana Aksi meliputi skenario dan opsi-opsi pemulihan yang akan dilaksanakan BRI berdasarkan indikator yang mencakup aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek rentabilitas, dan aspek kualitas aset.

Pada tahun 2019, BRI telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap Rencana Aksi BRI sebagai tindak lanjut pemenuhan kewajiban sesuai POJK Rencana Aksi. Perubahan *trigger level* permodalan (CAR) BRI menjadi 14,75% hingga kurang 15,5%. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) BRI yang berlaku pada tahun 2019 sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang KPMM Bank Umum.

Dokumen Rencana Aksi yang telah dikinikan sudah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan OJK.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Direktorat Human Capital

Saat ini dengan jumlah pekerja BRI mencapai lebih dari 120ribu, pengelolaan *human capital* yang tepat menjadi salah satu *factor critical* dalam upaya pengembangan bisnis BRI ke depan. Untuk itu, Direktorat Human Capital mempunyai sasaran untuk meningkatkan *employee engagement* melalui pengelolaan *culture transformation* untuk dapat semakin meningkatkan *employee productivity*.



HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Pengembangan *human capital* BRI diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang terampil di bidang layanan digital, khususnya digital banking. Proses kerja pun secara bertahap mengalami digitalisasi untuk meraih efisiensi yang lebih tinggi dan kenyamanan kerja yang lebih baik.

Human Capital BRI, dalam hal ini Pekerja dan seluruh insan BRI, merupakan aset utama Perusahaan untuk bersama-sama mewujudkan visi Perusahaan menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to the Best Talent* di tahun 2022.

BRI berkomitmen untuk selalu mengembangkan human capital agar senantiasa menjadi tulang punggung usaha yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu selaras dengan dinamika era digital saat ini, BRI senantiasa melakukan transformasi baik dari sisi bisnis maupun pengelolaan *human capital*. Peningkatan kompetensi Pekerja baik *hard competency* maupun *soft competency* merupakan prioritas utama yang dilakukan BRI dalam mempersiapkan Brilian Leader.

Secara garis besar, untuk mewujudkan perjalanan digitalisasi BRI, seluruh layanan kepada Pekerja telah diberikan melalui media berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat. Wujud komitmen BRI dalam mengembangkan *human capital* ini telah dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015. Hal ini memastikan bahwa sistem pengelolaan data, komunikasi, serta pembayaran kompensasi dan benefit human capital telah berjalan sesuai dengan manajemen mutu yang baik.

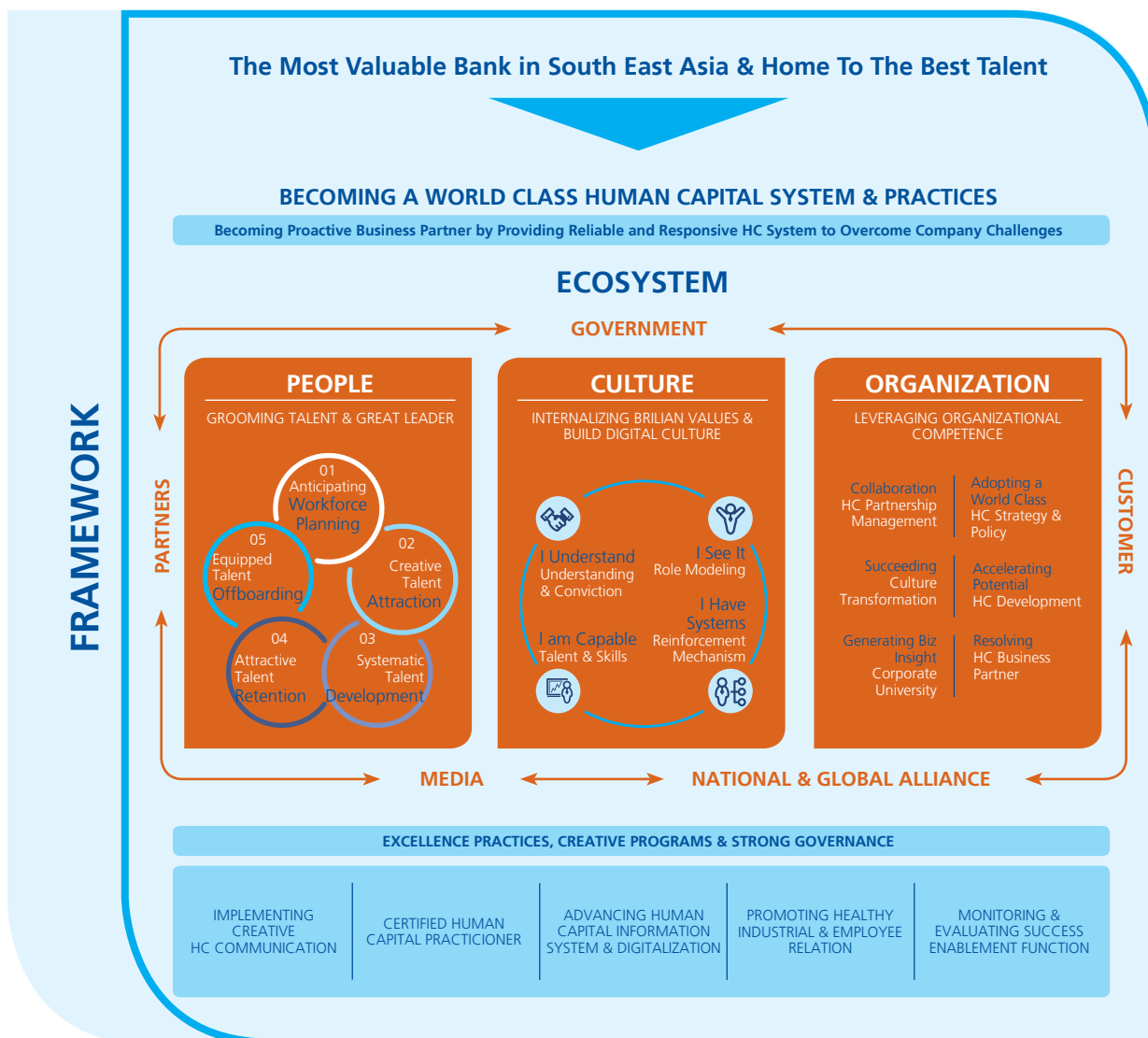


ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan, maka visi pengelolaan *human capital* BRI adalah *becoming a world class human capital system & practices*. Adapun kerangka strategi pengelolaan *human capital* di BRI sebagai berikut:



PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL 2019

PEOPLE - GROOMING TALENT & GREAT LEADER

Strategic Workforce Planning

Dampak adanya revolusi industri 4.0 membuat setiap perusahaan harus menghadapi kondisi yang *disruptive* dan penuh ketidakpastian. Sebagai persiapan menghadapi masa depan dan untuk menjadi pemenang di persaingan global, BRI mendesain kembali *strategic workforce planning*.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Perencanaan *human capital* di BRI dilakukan dengan mengintegrasikan rencana bisnis Perusahaan dan rencana kebutuhan *human capital* sehingga didapatkan rumusan dengan hasil yang akurat untuk menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal (*right people, right skills, right place, right time, right cost*). Perencanaan dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan analisis data ilmiah dalam mengambil keputusan.

Creative Talent Attraction

Dalam rangka menarik perhatian generasi millennial dan generasi z dalam *talent war*, BRI senantiasa melakukan inovasi dalam bidang rekrutmen untuk mendapatkan talent-talent terbaik.

Proses rekrutmen dilakukan melalui kerja sama antara BRI dengan lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia dalam bentuk partisipasi pada *job fair* maupun *campus hiring* serta *outreach recruitment program*. Selain itu, sejak tahun 2013 pun BRI telah meluncurkan aplikasi *e-recruitment* yang bertujuan untuk memperluas cakupan penjangkaran kandidat-kandidat Pekerja terbaik di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari BUMN, BRI juga terlibat aktif dalam program perekrutan bersama yang dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Systematic Talent Development

Dalam rangka mempersiapkan talent specialist, maka BRI harus terus mempersiapkan program-program untuk peningkatan kompetensi Pekerja. BRI selalu berusaha mengembangkan kompetensi Pekerja yang

bersifat *hard competency* maupun *soft competency*. Pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Pekerja dalam kerangka *70-20-10 model for learning development*.

Selain itu, BRI juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja dalam pengembangan karir. Hal ini dilakukan dengan cara menambah jenis kewenangan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari level saat ini (*job enrichment*) atau dengan cara menambah jumlah tugas dan tanggung jawab Pekerja di level yang sama di luar tugas dan tanggung jawab saat ini (*job enlargement*).

Program pengembangan karir juga dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunity*, dimana setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan Perusahaan, *job family* jabatan yang dituju, kemampuan Pekerja (*capability*), predikat kinerja, *talent classification*, ketersediaan jabatan, dan persyaratan lainnya.

Attractive Talent Retention

Salah satu kunci untuk memenangkan persaingan dalam merebut dan mempertahankan Pekerja terbaik (*talent war*) di Perusahaan adalah melalui sistem pengelolaan remunerasi yang baik. Selain dapat mempertahankan Pekerja dengan kinerja unggul di Perusahaan, sistem remunerasi yang baik juga dapat mengundang kandidat talent terbaik di luar Perusahaan untuk bergabung, dan

memelihara motivasi Pekerja agar selalu memberikan kinerja unggul yang konsisten. Oleh karena itu, pengelolaan sistem remunerasi di BRI dilaksanakan dengan asas adil secara internal tetapi tetap kompetitif secara eksternal, sejalan dengan strategi Perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penerapan strategi remunerasi di BRI dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, *prevalent practices* industri, dan kemampuan Perusahaan agar dapat mengakomodasi perubahan demografi Pekerja serta pengelolaan biaya tenaga kerja.

Secara umum, implementasi sistem remunerasi BRI meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), tunjangan cuti tahunan, dan tunjangan cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 6 tahunan. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi Pekerja dan anggota keluarganya, yang meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, persalinan, rawat gigi, *general medical check up*, tunjangan penggantian kacamata serta program kesehatan pensiunan.

BRI juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel kepada Pekerja di antaranya tunjangan kemahalan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan tertentu, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, serta program *long term incentive* dalam bentuk kepemilikan saham



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

oleh Pekerja. Sedangkan untuk menunjang kedinasan, BRI memberikan fasilitas kedinasan meliputi *lumpsum* sewa rumah, rumah dinas, dan kendaraan dinas sewa.

Smooth Landing Offboarding

Perbankan dan jasa keuangan merupakan industri berbasis kepercayaan di mana setiap aspek dalam bisnis ini diatur secara ketat (*highly regulated*) dalam setiap aspeknya. Dalam aspek pengelolaan *human capital*, Perusahaan senantiasa memastikan seluruh ketentuan hubungan ketenagakerjaan yang diberlakukan telah sesuai dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Beberapa jenis PHK yang berlaku di BRI di antaranya adalah:

1. Atas Permintaan Sendiri
2. Tidak Cakap
3. Kelebihan Tenaga Kerja
4. Mencapai Usia Pensiun
5. Ditahan Pihak Yang Berwajib
6. Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan
7. Dikenakan Hukuman Disiplin
8. Alasan Kesehatan
9. Meninggal Dunia

Adapun rincian data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi selama tahun 2019 di BRI adalah sebagai berikut:

Jenis PHK	Pria	Wanita
Mencapai Usia Pensiun	607	224
Alasan Kesehatan	9	1
Atas Permintaan Sendiri	860	545
Meninggal Dunia	95	11
Lain-lain	254	62
Subtotal	1.825	843
Jumlah	2.668	

PROGRAM PENSIUN

Untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, BRI menyiapkan program pemberian *benefit* setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
- Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
- Program Tunjangan Hari Tua (THT)
- Program Jaminan Hari Tua (JHT)
- Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
- Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens) dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan BPJS Kesehatan

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini berlaku, selama pensiun Pekerja masih terlindungi oleh program pemeliharaan kesehatan Prosens dan BPJS Kesehatan.

BUDAYA KERJA

Internalizing Brilian Values & Build Digital Culture

Setiap program culture harus memiliki 3 tujuan, yaitu *vision*, *employee value proposition* dan *core values*.

Corporate culture merupakan salah satu pondasi pilar untuk mendukung pencapaian aspirasi Perusahaan dan menjawab tantangan bisnis jangka panjang. Budaya Kerja dibentuk untuk dapat menjadi pijakan Perusahaan dan sebagai panduan seluruh insan BRI dalam berperilaku dan bertindak, serta memiliki *value* dalam mendukung kinerja Perusahaan.

Implementasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI dirumuskan dalam:

- Lima nilai pokok (*core values*) Budaya Kerja yang disebut dengan BRILiaN. Nilai-nilai pokok merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi Pekerja dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama Pekerja serta pihak eksternal lainnya;
- Sepuluh sikap perilaku utama insan BRI; dan
- Dua puluh tindakan budaya kerja insan BRI.

Core Values Budaya Kerja

Untuk mencapai Budaya Kerja yang terinternalisasi dengan baik maka dibutuhkan perilaku (*behavior*), simbol, dan sistem. Oleh karena itu BRI menggagas lima nilai inti (*core value*) budaya kerja Perusahaan sebagai berikut:

1. Integrity	<i>Integrity</i> yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai <i>integrity</i> adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.
2. Professionalism	<i>Professionalism</i> yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai <i>professionalism</i> adalah <i>continous learner</i> dan <i>fairness</i> .
3. Trust	<i>Trust</i> yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai <i>trust</i> adalah saling menghargai dan mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri.
4. Innovation	<i>Innovation</i> yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai <i>innovation</i> adalah visioner dan pionir perubahan.
5. Customer Centric	<i>Customer Centric</i> yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai <i>customer centric</i> adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan <i>collaborative</i> .



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Ruang lingkup Revitalisasi Budaya Kerja meliputi:



Program Revitalisasi Budaya Kerja terdiri dari dua program, yaitu:

1. Program Internalisasi Budaya Kerja; dan
2. Program Eksternalisasi Budaya Kerja.

Program Internalisasi Budaya Kerja

Beberapa program Internalisasi Budaya Kerja BRI yang telah dibentuk di antaranya adalah:

Forum Peningkatan Kinerja (FPK)	Merupakan forum yang dibentuk sebagai wadah agar Pekerja dapat berpartisipasi aktif dalam penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap Unit Kerja dalam rangka pencapaian target Unit Kerja.
Focus Group Discussion (FGD)	Merupakan forum diskusi yang diselenggarakan dengan pihak internal maupun eksternal sebagai rangkaian dari kegiatan FPK. Forum ini merupakan mekanisme formal untuk meningkatkan budaya keterbukaan dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja. Pembahasan dalam <i>FGD</i> antara lain meliputi kualitas layanan, permasalahan, kritik dan saran, serta solusi di suatu Unit Kerja.
SportArtcular	Merupakan kegiatan olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh Perusahaan berkolaborasi dengan seluruh BRI Community dalam rangka menyambut HUT BRI.
Family Gathering (FG)	Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk penyegaran (<i>refreshing</i>) bagi Pekerja dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk menerapkan prinsip mengenal Pekerja (<i>Know Your Employee</i>).
Change Agent Forum (CAF)	Merupakan forum yang diselenggarakan di Unit Kerja BRI dalam rangka menciptakan, menyusun, mengembangkan serta evaluasi dan <i>monitoring</i> program-program Budaya Kerja BRI.
The Best Change Agent	Merupakan sebuah program penghargaan kepada <i>Change Agent</i> terbaik yang dipilih melalui proses seleksi dengan kriteria tertentu.
Program Pendampingan Pekerja Baru (BRILiaN Rookie Program)	Merupakan program pendampingan kepada Pekerja baru di suatu Unit Kerja selama 1 (satu) tahun dengan didukung buku pedoman yang telah disiapkan bertujuan untuk membantu proses penyesuaian Pekerja baru.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

BRI Excellence Award (BEA)	Merupakan program penghargaan kepada Pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten memiliki kinerja, budaya dan inovasi terbaik pada Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencari talenta terbaik, serta mendorong munculnya budaya-budaya positif untuk mendukung daya saing Perusahaan.
Forum BRI Millennials (BRIShine)	Merupakan program internalisasi budaya kerja yang ditujukan kepada Pekerja <i>millennials</i> BRI berupa forum diskusi untuk membahas kondisi Perusahaan atau perbankan terkini dengan suasana yang santai.

Program Eksternalisasi Budaya Kerja

Program Eksternalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya:

BRI Communities	BRI Communities (BRIComm) telah dibentuk dan disahkan oleh Direktur Utama BRI pada tanggal 25 April 2018 pada acara BRILiaN Shine. BRI Communities merupakan kumpulan komunitas yang dibentuk oleh Pekerja BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan yang sama. Saat ini BRI telah memiliki 23 komunitas yang mencakup berbagai aktivitas, beberapa diantaranya adalah komunitas sepeda, fotografi, basket, golf, lari, <i>band</i> , <i>dance</i> , tenis dan lainnya.
Bussines Gathering	Merupakan kegiatan <i>relationship</i> yang dilakukan oleh Pekerja BRI dengan nasabah maupun komunitas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah BRI.
Kegiatan Sosial (BRI Peduli)	Merupakan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan.
Kegiatan Keagamaan	Merupakan kegiatan keagamaan yang dikelola oleh Badan Pengurus Kerohanian BRI.

Monitoring Implementasi Budaya Kerja Perusahaan

Pelaksanaan Budaya Kerja BRI mampu menghasilkan peningkatan kualitas pengelolaan *human capital* yang tercermin dari naiknya tolak ukur berikut ini:

1. Nilai *Corporate Value Self Assessment* (CVSA) yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan nilai-nilai Budaya Perusahaan oleh seluruh Insan BRI dan dilaporkan secara *real time on line* oleh *Change Agent* (CA) yang telah ditetapkan di masing-masing Unit Kerja.
2. Nilai *BRI Internal Service Survey* (BISS) yang merupakan hasil survei atau input dari nasabah, baik internal maupun eksternal kepada masing-masing Unit Kerja BRI perihal Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
3. Nilai *Corporate Culture Index* (CCI) yang menunjukkan rasio antara kinerja Unit Kerja dengan nilai CVSA dan BISS. Nilai CCI merupakan index pengukuran untuk mengidentifikasi keterkaitan antara besaran kinerja Perusahaan dibanding dengan budaya organisasi.

Budaya Inovasi dengan BRI Excellence Award (BEA)

BRI Excellence Award (BEA) merupakan ajang yang secara berkala diselenggarakan BRI untuk meningkatkan budaya *engagement* dan daya saing inovasi. Penghargaan kepada Pekerja dan Unit Kerja yang konsisten berprestasi merupakan hal yang penting untuk senantiasa diberikan.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

ORGANISASI

Leveraging Organizational Competence

Untuk meningkatkan produktivitas Pekerja perlu didukung oleh pengelolaan human capital yang berstandar internasional. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2019 BRI telah mengesahkan model organisasi terbaru dalam mengelola human capital yang terdiri Divisi Human Strategy & Policy, Human Capital Business Partner, Human Capital Development, Human Capital Partnership Management dan BRI Corporate University.

Advancing Human Capital Information System & Digitalization

BRI telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola *human capital* berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dalam proses pengelolaan *Human Capital*, mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Prinsip pengelolaan SIM bersifat *dual control* agar dapat menghasilkan data/ informasi yang akurat dan komprehensif. Adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Strategic Planning & Analytics*
- b. *Talent Attraction*
- c. *Talent Development*
- d. *Talent Retention*
- e. *Talent Offboarding*

BRI telah meluncurkan layanan *chatbot* di aplikasi Telegram yang diberi nama BRIGITA. Melalui BRIGITA, seluruh Pekerja BRI dapat mengajukan pertanyaan terkait sumber daya manusia yang akan dibalas secara realtime.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan *human capital*, pengembangan sistem TI terus dilakukan yang mengarah kepada otomasi dan *Employee Self Service* (ESS) dengan dukungan aplikasi BRISTARS, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja untuk melakukan layanan secara mandiri dan menjalankan proses bisnis di bidang *human capital*. Selain dapat diakses melalui web, pada tahun 2019 BRI meluncurkan aplikasi BRISTARS versi mobile yang memungkinkan Pekerja mengakses aplikasi sumber daya manusia dalam genggaman.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

BRI meyakini bahwa seluruh Pekerja adalah aset sekaligus tulang punggung Perusahaan dalam mencapai setiap tujuan. Oleh karena itu, BRI selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka dan positif. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menjaga kondusivitas hubungan industrial antara Pekerja dan Perusahaan.

Dalam menjalin hubungan dengan Pekerja, BRI senantiasa menjunjung prinsip dasar pengelolaan hubungan industrial sebagai berikut:

Menjunjung Kebebasan Berserikat

Setiap Pekerja BRI diperkenankan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapatnya. Di lingkup Perusahaan, setiap Pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Beberapa hal yang dilakukan BRI guna menjaga keharmonisan hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja di antaranya diwujudkan dengan:

1. Pada tahun 2019 BRI bersama SP BRI telah melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara BRI bersama Serikat Pekerja (SP) BRI dan telah disepakati sebagai PKB periode 2019-2021. Dokumen PKB tersebut mengatur ketentuan-ketentuan mengenai administratif kepegawaian, hak, kewajiban, benefit, dan fasilitas Perusahaan dan Pekerja.
2. Pelaksanaan Forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai sarana mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru, sebagai sarana menampung segala aspirasi/usulan dari Pekerja, dan juga sebagai sarana koordinasi antara manajemen Perusahaan dengan Pekerja sehingga perselisihan atau permasalahan yang mungkin timbul di Unit Kerja dapat dideteksi lebih dini.
3. Pelaksanaan pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen Tingkat Pusat.
4. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* Pekerja terhadap Perusahaan dan melakukan bentuk komunikasi lain seperti dalam kegiatan ibadah, sosial, olah raga, seni, dan kegiatan lain yang melibatkan Pekerja.

Menerapkan Kebijakan Anti-Diskriminasi

BRI selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di setiap fungsi pengelolaan *human capital*.

Salah satu bentuk penerapan asas kesetaraan di Perusahaan adalah dengan dibukanya kesempatan bekerja bagi Pekerja disabilitas, dengan posisi dan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing Pekerja disabilitas.

Pada tahun 2019, jumlah Pekerja disabilitas BRI berjumlah 71 orang dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	2018		2019	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Kantor Pusat	21	13	15	12
Kantor Wilayah	34	27	18	21
Total	95		71	

Program Keberagaman

Sebagai salah satu BUMN Kebanggaan Negeri dengan Unit Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, demografi insan BRI sangat beragam. BRI meyakini bahwa keberagaman yang ada merupakan nilai tambah yang dapat membantu Perusahaan untuk tetap menjadi yang terbaik.

Oleh karena itu BRI memiliki komitmen untuk mendukung setiap program keberagaman yang ada. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran pengembangan jasmani dan rohani yang digunakan untuk pelaksanaan peringatan kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung keberagaman.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Penanganan Keluhan Pekerja

Selain melalui sarana LKS Bipartit, BRI juga menyediakan sarana alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan informasi dan penanganan keluhan Pekerja yang dapat diakses secara mudah dan *realtime*.

Selain layanan *Call Center Human Capital*, pada tahun 2019, BRI telah meluncurkan layanan *chatbot* di aplikasi Telegram yang diberi nama BRIGITA. Melalui BRIGITA, seluruh Pekerja BRI dapat mengajukan pertanyaan terkait sumber daya manusia yang akan dibalas secara *realtime*.

Monitoring Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

Sebagai bentuk penguatan *good corporate governance* (GCG) BRI memfasilitasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh Pekerja melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yang langsung dimonitor oleh manajemen puncak Perusahaan.

Manajemen berkomitmen untuk menegakkan disiplin Pekerja di Perusahaan sebagai usaha mempertahankan suasana dan etos kerja yang baik. Untuk itu, pada tahun 2019 BRI telah melakukan peningkatan pada Aplikasi Portal Hubungan Industrial. Peningkatan tersebut memungkinkan Manajemen Kantor Pusat memantau setiap progress penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di seluruh Unit Kerja BRI.

SISTEM REKRUTMEN

Pada tahun 2019, aplikasi *e-recruitment* telah dapat digunakan untuk seluruh proses rekrutmen dari mulai penerimaan berkas lamaran sampai dengan dokumentasi hasil rekrutmen Pekerja BRI di seluruh Indonesia. Selain itu, pada tahun 2019 telah dikembangkan fitur *video based assessment* dan *online test* yang memungkinkan setiap kandidat Pekerja untuk dapat mengikuti proses rekrutmen tanpa harus mengeluarkan biaya dari dan menuju lokasi seleksi. Dengan kemudahan akses tersebut, setiap tahunnya rata-rata terkumpul ± 250.000 *curriculum vitae* (CV) baru pada sistem *e-recruitment*.

Dalam rangka mencari talenta-talenta terbaik, pada tahun 2019 BRI melaksanakan program Beasiswa BRILiaN. Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan sebagai jalur *early recruitment* bagi talenta terbaik untuk bergabung dengan BRI. Selain itu pada tahun 2019 BRI telah melaksanakan *roadshow* Beasiswa BRILiaN di 10 perguruan tinggi di Indonesia diantaranya Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Telkom, dan Binus University. Roadshow tersebut telah memberikan Beasiswa BRILiaN pada 21 Mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pendidikan Sertifikasi bagi Pekerja

Dalam rangka peningkatan kualitas human capital BRI untuk mendukung pencapaian kinerja unggul, pada tahun 2019 BRI telah melakukan pembaruan kebijakan Pendidikan Sertifikasi bagi Pekerja.

Dalam kebijakan ini Pekerja didorong untuk lebih mudah mengambil sertifikasi di bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga keahlian atau kompetensi Pekerja di bidang tersebut telah memenuhi standar industri atau diakui oleh lembaga/institusi bidang keahlian tersebut.

Pada tahun 2019, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 4.231.199 peserta dengan komposisi 3,06% pendidikan *In Class* dan 91,39% *e-Learning*, serta sisanya sebesar 2,9% merupakan peserta FPK/FGD dan 2,65% untuk sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

No	Program Pendidikan	2017	2018	2019
1	<i>Development</i>	11.326	9.895	13.350
2	<i>Enhancement</i>	1.604.946	2.799.661	3.982.868
3	FPK/FGD	93.691	109.762	122.889
4	Sosialisasi	63.231	67.963	112.096
Total		1.773.194	2.987.284	4.231.199

Catatan:

Untuk program Pendidikan *Enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *e-Learning*. Sedangkan untuk Pendidikan *development* termasuk Pendidikan *master degree/S2*.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI & LEMBAGA PELATIHAN KERJA BRI

Dalam rangka memastikan bahwa Pekerja BRI Group telah kompeten dan memiliki Talent, untuk bersama-sama menuju Pencapaian Visi BRI "Home to The Best Talent" serta menuju SDM Unggul Indonesia Maju, melalui SK Direksi BRI No. B.723-DIR/CDS/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BRI yang bertujuan untuk melakukan Uji Kompetensi ke seluruh pekerja BRI Group. LSP BRI sebagai LSP P2 merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP BRI adalah sertifikat Negara dengan Lambang Burung Garuda.

Selain itu, BRI *Corporate University* dan *Campus BRI Corporate University* Seluruh Indonesia juga telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perusahaan, sehingga BRI *Corporate University* dapat menerbitkan 'Sertifikat Pelatihan' serta seluruh Pendidikan dan Pelatihan Pekerja BRI yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan.

BIAYA PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Biaya pendidikan dan pengembangan *human capital* BRI di tahun 2019 tercatat sebesar Rp696 miliar. BRI berhasil melakukan efisiensi biaya pendidikan sebesar 72,9% dengan biaya per pekerja sebesar Rp165.000 per peserta melalui implementasi teknologi (*e-learning*). Berikut rincian biaya pendidikan human capital BRI tahun 2019:

Learning Cost

Rupiah (Juta)

Program	Real 2019
<i>Development</i>	138.293
<i>Enhancement</i>	384.395
Total Development & Enhancement	522.688
FPK/FGD	154.335
Sosialisasi	4.771
Literasi	200,46
<i>Support</i>	14.799
Total FPK, Sosial, Literasi, & Support	174.106
Total Biaya	696.794



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Learning Participants

Program	2018	2019	%
<i>Development</i>	9.895	13.350	34,9%
<i>Enhancement</i>	2.799.661	3.982.868	42,2%
Total Development & Enhancement	2.809.556	3.996.218	42,2%
FPK/FGD	109.762	122.889	12%
Sosialisasi	67.963	112.092	64,9%
Total FPK, Sosial & Literasi	177.728	234.981	32,2%
Total Peserta	2.987.284	4.231.199	41,6%

Learning Cost Efficiency

(Biaya per Peserta)

Program	2018	2019	% Efficiency
<i>Development</i>	10.781	10.359	3,9%
<i>Enhancement</i>	116	96,5	16,8%
Biaya per Peserta I	153	131	14,6%
FPK/FGD	1.419	1.256	11,5%
Sosialisasi	50	43	15,4%
Literasi	-	-	-
Biaya per Peserta II	972	741	23,8%
Total Biaya per Peserta I & II	202	165	18,4%

Terdapat efisiensi sebesar 18,4% pada tahun 2019 dibandingkan realisasi tahun 2018, yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah peserta *Enhancement* yang didominasi oleh *e-learning*, sehingga menyebabkan biaya per peserta yang lebih murah.

Learning Effectiveness

Selama tahun 2019 BRI telah melakukan program pendidikan *development* dan *enhancement* kepada 4.231.199 peserta pendidikan. Hasil dari evaluasi terhadap efektivitas pendidikan BRI mencapai 87,85.

Program	Learning Evaluation	Total Evaluation	
	Level 1	Level 2	Level 3
<i>Development</i>	85,82	85,76	80,07
<i>Enhancement</i>	84,65	89,69	
Average	84,77	89,28	80,07

Catatan:

Tingkat Kelulusan 77,5

Level 1: *Student Reaction & Satisfaction* (30%)

Level 2: *Student Learning Result (Skill & Knowledge Improvement)* (50%)

Level 3: *Student Learning Behaviour (Application)* (20%)

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

BRI mendasarkan penilaian kinerja pada 2 (dua) hal, yaitu (i) pencapaian kinerja Pekerja berdasarkan *key performance indicator* (KPI) yang disepakati, dan (ii) pemenuhan atau peningkatan kompetensi Pekerja.

Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk (i) memastikan kinerja Pekerja selaras dengan kinerja Perusahaan, (ii) mendorong, memotivasi, dan mengarahkan Pekerja untuk selalu meningkatkan kinerjanya, (iii) mewujudkan hubungan yang jelas antara pencapaian rencana kinerja dengan pengembangan karier Pekerja (promosi jabatan), dan (iv) predikat hasil penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kompensasi dan *benefit* serta penentuan *talent class* Pekerja.

Dalam rangka menciptakan iklim *performance driven culture* di Perusahaan, BRI melakukan penajaman pada aspek penilaian kinerja, di antaranya ditempuh dengan cara standardisasi konten Sasaran Kinerja Objektif (SKO) Pemimpin Unit Kerja, Pekerja di jabatan struktural, dan tenaga pemasar. BRI telah melakukan otomatisasi pencapaian target KPI untuk Jabatan Tenaga Pemasar dan mengimplementasikan *monitoring* pencapaian KPI dengan siklus *Performance Appraisal* per triwulan. BRI secara konsisten melakukan standardisasi konten KPI untuk seluruh Jabatan di Perusahaan (kecuali Staff dan Petugas Administrasi), hal ini dimaksudkan untuk mempertajam penilaian kinerja sehingga objektivitas dan keadilan penilaian kinerja dapat terjaga.

Penajaman juga dilakukan dengan menarik dan mengunci nilai Sasaran Kompetensi (SK) di awal sebelum periode evaluasi SKO dan penerapan 360° *competency review*. Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja tidak hanya berasal dari 1 arah yakni atasan bawahan, tetapi juga sesama Pekerja dan bawahan dapat melakukan penilaian kinerja.

Dalam menetapkan KPI pada proses Sistem Manajemen Kinerja (SMK), BRI selalu mengintegrasikan target Perusahaan kepada seluruh Pekerja, sehingga KPI Individu dan KPI Perusahaan dapat sejalan. Oleh karena itu, penilaian kinerja berbasis kompetensi diharapkan mendapatkan hasil yang objektif dan *fair*.

Struktur remunerasi Pekerja didasarkan beberapa faktor seperti penilaian kinerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Jenis Kompensasi dan Benefit

Kompensasi dan benefit bagi Pekerja BRI, terdiri dari:

- Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
- Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.
- Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BRI memberikan fasilitas berupa *benefit* kepada Pekerja. *Benefit* ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh perusahaan sejenis di industri perbankan.
- Untuk meningkatkan *engagement* Pekerja dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan memberikan motivasi/ insentif jangka panjang kepada Pekerja agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI pada tahun 2019 telah melaksanakan *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) kepada Pekerja BRI dalam bentuk Bonus Saham tahap I. Pekerja yang diberikan alokasi saham adalah Pekerja tetap dengan kinerja tertentu. Pemberian hak saham (tanggal *Grant*) ditetapkan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019.

Kenaikan Kompensasi

BRI menerapkan strategi *merit increase* dalam penerapan pemberian kompensasi Pekerja. Artinya Pekerja yang memiliki kinerja tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi pula. Atau bisa dibilang kenaikan upah berbanding lurus dengan kinerja Pekerja.

Pada tahun 2019 BRI juga melakukan penyesuaian besaran kompensasi upah serta formula tunjangan kinerja yang lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya, terutama bagi para tenaga pemasar yang merupakan ujung tombak Perusahaan.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Tingkat Turnover

Kepuasan (*satisfaction*) Pekerja BRI terhadap pengelolaan *Human Capital* salah satunya diukur dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2019, tingkat *turnover* mencapai sebesar 2.29%, lebih rendah dari tingkat *turnover* secara industri yang mencapai 12%.

Angka *turnover* tersebut menunjukkan bahwa upaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan Pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Perusahaan untuk menjaga tingkat *turnover* tersebut di antaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, *benefit* yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, jenjang karier yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

Tingkat Keterikatan

Employee Survey tahun 2019 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 78.2% Pekerja menyatakan terikat dengan Perusahaan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat dibandingkan *survey* tahun 2018 sebesar 76%. Sedangkan untuk tingkat *satisfaction* di tahun 2019, 97% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI.

Perusahaan meyakini bahwa keterikatan yang dinyatakan Pekerja tersebut merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif di bidang pengelolaan *human capital* BRI. Untuk selanjutnya, Perusahaan akan tetap berkomitmen menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan *engagement* Pekerja terutama Pekerja generasi Y sebagai mayoritas Pekerja di BRI yang mencapai 80% dari total Pekerja.

Tingkat Produktivitas

Pada tahun 2019, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp556.16 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian EPE tahun 2018 yang sebesar Rp518.81 juta per pekerja tetap.

DEMOGRAFI HUMAN CAPITAL

Human Capital BRI saat ini didominasi oleh Generasi Y dengan komposisi sebanyak 80,19%, Generasi X sebanyak 15,60%, Generasi Z sebanyak 3,14%, dan *Baby Boomers* sebanyak 1,07%. Dominasi generasi Y atau generasi 'tech savvy' pada komposisi Pekerja BRI menunjukkan bahwa Perusahaan telah berhasil bertransformasi ke *digital banking*.

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Komposisi Pekerja BRI menurut level organisasi adalah sebagai berikut:

Level Organisasi	2017	2018	2019
Senior Executive Vice President	5	3	4
Executive Vice President	98	103	109
Vice President	209	198	177
Assistant Vice President	345	353	345
Senior Manager	735	766	788
Manager	1.331	1.320	1.532
Assistant Manager	5.41	5.599	5.277
Officer	12.003	11.945	12.574
Assistant	72.722	69.656	70.814
Total	92.858	89.943	91.620

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada tahun 2019 status Pekerja BRI umumnya adalah Pekerja tetap sebanyak 61.496 orang, Pekerja kontrak sebanyak 29.852 orang, dan Pekerja *outsourcing* 33.982 orang. Adapun komposisi Pekerja BRI menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Status	2017	2018	2019
Pekerja Tetap	60.764	60.947	61.496
Pekerja Kontrak	31.994	28.970	29.852
<i>Trainee</i>	100	63	272
<i>Outsourcing</i>	7.929	33.949	33.982
Total	130.787	123.929	125.602

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, Trainee) Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas Pekerja BRI berdasarkan tingkat pendidikan merupakan lulusan Strata-1 dan Diploma. Profil komposisi Pekerja BRI menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan	2017	2018	2019
SLTA / Setingkat	2.652	2308	1.955
Diploma	10.134	10.595	10.564
Strata 1	78.867	75.797	77.767
Strata 2	1.202	1237	1.317
Strata 3	3	6	17
Total	93.679	89.943	91.620

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, Trainee) Berdasarkan Usia

Profil komposisi Pekerja BRI menurut usia adalah sebagai berikut:

Usia	2017	2018	2019
< 25	6.235	4.635	5.931
> 50	4.805	4.767	4.759
25 - 30	46.616	41.304	36.617
31 - 35	17.638	21.606	26.116
36 - 40	8.503	9.023	9.449
41 - 45	3.940	3.980	4.619
46 - 50	5.121	4.628	4.129
Total	92.858	89.943	91.620



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Komposisi Pekerja BRI dilihat dari generasi mayoritas merupakan Generasi Y yaitu sebesar 80,19% atau sebanyak 73.469 orang Pekerja.

Usia	2017			2018			2019		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
<i>Baby Boomers</i> (lahir 1944-1964)	2.107	743	2.850	1.347	555	1.902	668	311	979
Gen X (lahir 1965 – 1979)	9.660	5.754	15.414	9.269	5.469	14.738	9.000	5.292	14.292
Gen Y (lahir 1980 – 1995)	40.636	33.863	74.499	40.484	32.274	72.758	41.609	31.860	73.469
Gen Z (lahir setelah 1995)	31	64	95	180	365	545	1.020	1.860	2.880
Total	52.434	40.424	92.858	51.280	38.663	89.943	52.297	39.323	91.620

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan Gender

Dukungan BRI terhadap kesetaraan *gender* terlihat dalam praktik penerimaan pekerjaanya dengan komposisi yang cukup seimbang antara Pekerja wanita 42,92% dan Pekerja pria 57,08% dengan rincian sebagai berikut:

Gender	2017	2018	2019
Wanita	40.424	38.662	39.323
Pria	52.434	51.281	52.297
Total	92.858	89.943	91.620

#YANG PENTING BUAT KITA

KELIATAN KEREN. KARENA KARTU DEBIT BRI BRITAMA,
BISA DAPETIN YANG KITA MAU.

DISKON
SERU BUAT
HANGOUT
SERU

KEREN
TERUS/
PAKAI
BRIPoin

CASHBACK
BIKIN
GREGET

DISKON
BELANJA
ONLINE

**Pakai Terus Kartu Debit BRI BritAma Di Setiap
Transaksi Kamu, Nikmati Semua Kemudahannya!**

Info lebih lanjut kunjungi: promo.bri.co.id



Tabungan BRI
BritAma



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

Direktorat Digital, Teknologi Informasi dan Operasi

Saat ini teknologi dan digital menjadi *backbone* dari pengembangan layanan dan produk perbankan. Mengingat adanya perubahan preferensi nasabah perbankan dari sebelumnya produk perbankan tradisional yang menggunakan outlet-outlet bank yang konvensional menjadi layanan dan produk perbankan dengan orientasi digital. Untuk itu Direktorat Digital, Teknologi dan Operasi memastikan tercapainya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif, *availability & reliability* sistem informasi BRI, penerapan *information security* yang efektif, pengembangan digital banking BRI serta terlaksananya berbagai implementasi inisiatif strategis.

Sepanjang tahun 2019, pengembangan TI secara khusus berfokus pada Blue Print Transformasi BRI yang salah satunya adalah menitik beratkan pada transformasi di area digital. Hal ini menguatkan fungsi strategis teknologi informasi dan perannya secara langsung dalam pelaksanaan inisiatif bisnis Bank.



Peralihan fokus bisnis BRI pada layanan digital semakin menguatkan fungsi strategis teknologi informasi dan operasional serta perannya secara langsung dalam pelaksanaan inisiatif bisnis Perseroan.

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) menjawab kebutuhan usaha dalam dua segi, yakni pelayanan nasabah dan operasional organisasi. Sistem TI yang berkualitas memungkinkan terciptanya interaksi cepat dan nyaman antara nasabah dengan Bank, yaitu melalui produk-produk terbaik Bank. Sementara, dari segi operasional, sistem TI mendorong efisiensi dan produktivitas kerja dan biaya. Menyadari nilai penting ini, BRI memastikan bahwa sistem TI Perseroan senantiasa sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu dengan melaksanakan penyempurnaan dan pengkianan sistem secara berkala.

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

Menggunakan teknologi terdepan, BRI menempatkan diri sebagai pemain terunggul di industri dengan menyediakan konektivitas terbaik dengan jangkauan luas ke seluruh Indonesia. Untuk itu, BRI terus melakukan pengembangan sistem TI secara sistematis agar TI dapat berkontribusi optimal pada pencapaian kinerja usaha sekaligus mewujudkan Indonesia digital dan memajukan taraf hidup masyarakat secara luas.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan teknologi informasi BRI didasarkan pada visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Bank, *Roadmap* Pengembangan ke depan serta pedoman dalam *IT Governance*.

IT STRATEGY PLAN

Menjawab tantangan, perubahan pasar dan tren digitalisasi yang terjadi dalam industri finansial dan non-finansial, seperti disrupsi rantai nilai perbankan, tren makro ekonomi yang menantang, perubahan regulasi, serta perubahan preferensi nasabah dan pertumbuhan segmen baru, Bank BRI mencanangkan IT Strategy Plan 2018-2022, yang disiapkan guna menciptakan peluang dalam mencapai komitmen digitalisasi.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI BRI

TEMA

Menjadi “The Most Valuable Bank di Asia Tenggara” dan “Home to The Best Talent”.

VISI

Menjadi penyedia teknologi yang berfokus pada nasabah (*customer centric*) dengan solusi dan layanan yang andal, aman, dan responsif melalui inovasi dan kolaborasi.

MISI

1. Mengembangkan talenta digital terbaik dan membangun budaya kerja inovatif.
2. Menerapkan tata kelola TI secara Bi-modal untuk kolaborasi yang lebih cepat dan andal dengan lini bisnis.
3. Membangun platform ICT yang bersifat *future-ready*, yaitu andal, aman, dan responsif.
4. Mengoptimalkan tata kelola data & *analytics* dalam rangka menyajikan sumber informasi tunggal (*single source of truth*) terkait dengan data nasabah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat.
5. Menciptakan digital bank yang inovatif yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric solutions and services*)

BRI merealisasikan visi dan misi TI melalui sinergi yang solid dengan Anak Perusahaan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. *Cost Reduction*
Meningkatkan efisiensi biaya melalui pembelian dengan skala ekonomi.
2. *Cost Avoidance*
Melakukan penghematan biaya melalui *sharing of resources* dan konsolidasi layanan dan kegiatan TI.
3. *Revenue Enhancement*
Menciptakan sumber pendapatan baru melalui *sharing platform* dan informasi.
4. *Group Procurement*
Melakukan pengadaan produk dan layanan TI secara kolektif guna mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari vendor.
5. *Join Operation*
Melakukan *Shared Services* atau *co-location* operasional TI sehingga dapat melakukan efisiensi biaya operasional.
6. *Application & E-channel*
Melakukan kolaborasi *development* pembuatan aplikasi yang terintegrasi dan dapat digunakan bersama.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

7. *Standardization*
Menerapkan standarisasi melalui *sharing best practices*.
8. *Talent Development*
Melakukan kolaborasi dalam hal pengembangan talenta pekerja secara organik dan mendukung percepatan proses perekrutan talenta secara digital.

ROADMAP DAN PROGRAM KERJA UTAMA TI

BRI menetapkan arahan *Roadmap* strategis TI (*IT Strategic Directions*) berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional yaitu:

1. *Nurture Great Digital Talent*
2. *Drive Bi-modal IT Governance*
3. *Build Future Ready ICT Platform*
4. *Leverage Data Governance & Analytics*
5. *Deliver Innovative Digital Banks*

Functional Strategy	2019 Intensify Digital & IT Agility to Drive Leading MSME & Consumer Banking	2020 Foster Integrated Digital Financial Solution Ecosystem	2021 - 2022 Industry leader on Digital Maturity in Indonesia & Southeast Asia
 Nurture Digital Talent	Enhance ICT Competence & Digital Talent to Enable The Best Business Performance	Digital Talent Center of Excellence	Home to the Best Digital Talent & Mature Digital Dexterity (Holding & Subsidiaries)
 Drive Bi-modal IT Governance	Establish Agile DevSecOps to Accelerate Business Need Delivery	Effective Agile & DevSecOps to Support Business & IT	Mature Bimodal IT Governance
 Build Future Ready ICT Platform	Deliver Excellent, Flexible and Secured ICT Service & Platform	Robust & Secured Digital Architecture & Infrastructure	World-Class Digital Infrastructure
 Leverage Data & Analytics	Provide Fast & Accurate Reporting using Reliable Data Management & Big-Data Analytics	Improved Data Management Process & Big Data Analytics	World-Class Data Company
 Deliver Innovative Digital Banks	Concert Leading Digital Banking and Leverage Transaction thru Open Banking	Innovative Digital & Open Financial Solution	The Most Innovative Digital Financial Ecosystem in Southeast Asia

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

IT GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO

Selain aspek teknis, isu yang berkaitan dengan TI juga meliputi aspek tata kelola. Perencanaan dan implementasi proyek TI menuntut proses manajemen dan tata kelola yang solid agar pelaksanaan seluruh aktivitas selalu berada dalam koridor yang tepat, sejalan dengan visi dan misi Bank.

Untuk itu, tata Kelola TI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), guna mendukung pengelolaan risiko TI dan nilai

strategis Bank. BRI menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI. Dalam rangka menerapkan manajemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik, BRI berkomitmen membangun perilaku yang sesuai dengan standar etika BRI Dalam pelaksanaannya. BRI senantiasa mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, serta konsisten dalam penerapan nilai-nilai GCG, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

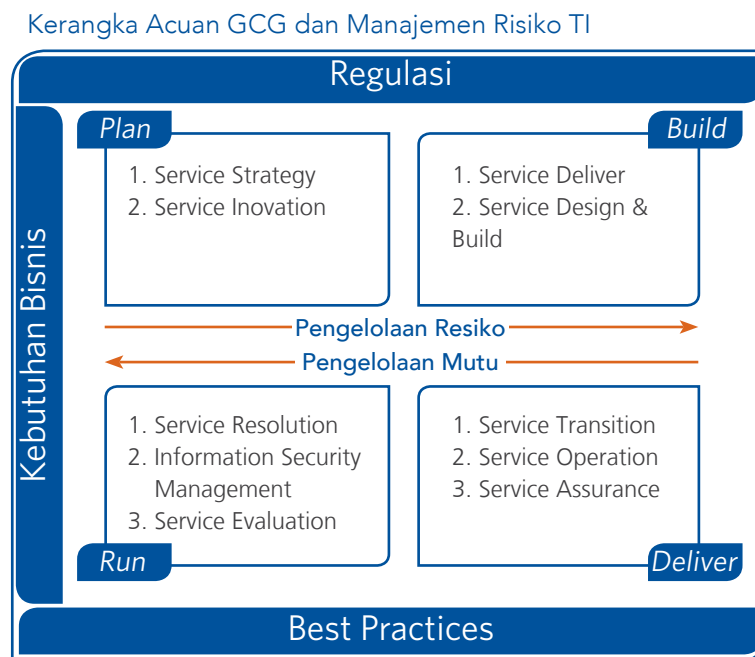
Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL



HUMAN CAPITAL TI

Untuk human capital TI, kompetensi keunggulan profesional yang tinggi dari setiap pekerja menjadi persyaratan utama, khususnya mengingat lingkungan bisnis yang kini sangat dinamis dan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Sampai dengan Desember 2019, BRI mencatat 942 Pekerja pada 6 Divisi dibawah Direktorat Digital Teknologi Informasi dan Operasi, yang terdiri dari:

No	Divisi/Desk	2019
1	Divisi Perencanaan dan Pengembangan	286
2	Divisi Operasional TI	274
3	Desk Information Security	40
4	Divisi Kerjasama Teknologi	107
5	Divisi Digital Center of Excellence	108
6	Divisi Satelit dan Jaringan Infrastruktur	127
Total		942

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

KOMPETENSI TI

Dilaksanakan oleh Divisi Human Capital, pengembangan human capital bidang TI dalam bentuk pelatihan maupun sertifikasi adalah salah satu prioritas BRI pada tahun 2019. Lebih dari itu, pengembangan berlangsung berkelanjutan dan menyentuh semua aspek keterampilan komunikasi, karakter, keterampilan lunak, dan keterampilan teknis. Selain itu, pekerja TI juga didorong agar berpartisipasi aktif dalam berbagai forum TI.

Oleh karena itu, BRI telah melakukan mapping kebutuhan pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja yang bersifat teknis, non teknis serta manajerial pekerja sesuai kebutuhan. Pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2019 yang telah diikuti maupun dimiliki antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Materi
1	Talent Leadership and Management	1. Improve Communication Skill for IT Professionals 2. Pendidikan Enhancement Special Request Project Management 3. Bulding Capability & Acknowledgement 4. Establishing & Managing The Project Management Office 5. High-Potential Leader: Accelerating Your Impact 6. Digital Leadership Executive Transformation Program 7. Internalisasi Value Profesionalism "Brilian Presentation" 8. Becoming A Leader of Leaders: Pathways For Success 9. Digital Leadership Executive Transformation Program 10. Personal Branding Tahun 2019 11. Pelatihan interpretasi Kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU) BUMN 12. Peran Stakeholder dalam meminimalkan Fraud Internal dan Eksternal 13. Digital Leadership Executive Transformation Program 14. Design Thingking 15. Management Development Program AVDP
2	IT Product, Services and Governance	1. TOGAF 9.2 Foundation & Certified 2. COBIT 5 3. BITAF (Business IT Architecture Fundamental) 4. Product Life Cycle 5. BRILian Shine "Moving From Project To Product Centric" 6. Leading And Winning In The Era Of Digital Transformation 7. Training Agile untuk Tim Product Development BRILink & Internet Banking 8. Product Creation: How Company Can Survive in Fast Changing World 9. In House Training IT Strategic Plan 10. Agile For Executives 11. IT Infrastructure Library (ITIL Foundation V4) 12. Agile Practical Guide 13. Update Digital Banking & Fintech 2019 14. Internal Audit ISO 9001:2015 15. Implementasi ISO 20000 IT SMS 16. Agile Tim Product Development Human Capital & Sistem



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Jenis Pendidikan	Materi
3	Application and Database	1. React & React Native 2. Special Request Aldon 3. Machine Learning 4. JQ & JQM Programming Full Package 5. Android Application Development & Programming 6. Aplikasi Tableau 7. Aplikasi IServer Orbus 8. Software AG-WebMethods 9. Progressive Web Application (PWA) 10. Python Data Science and Machine Learning 11. Microservices With Docker 12. Docker & Kubernetes 13. ASP.NET Core 3 Development 14. Administering Microsoft SQL Server Databases 15. Programming API Service with GraphQL 16. KONY Partnership 17. ESB Web Methods: "Operation Training" 18. MySQL Full Package 19. Advanced Android Development
4	Infrastructure and Service Operation	1. Archimate 3.0 2. Fundamental Arsitektur Data untuk IT Governance Pada Industri 3. Pendidikan Enhancement Special Request Hadoop Cloudera Admin 4. Visiting World Class Data Center Equinix 5. Training IBM Z Systems 6. Complaint Handling 7. Fundamental Arsitektur Data untuk IT Governance Pada Industri 8. Aplikasi IServer Orbus 9. Data Science for Manager
5	Security	1. Secure Programming 2. Information Security Management Professional 3. Project Management in IT Security
6	Risk Management	1. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 (BSMR) 2. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 (BSMR) 3. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (BSMR) 4. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (BSMR) 5. Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (BSMR) 6. IT Risk Management Knowledge
7	Quality Assurance	1. Quality Control & Quality Assurance 2. Advance Level Test Automation Engineer 3. Advance Software Test

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Keterangan	Jumlah Pekerja Sertifikasi
DIVISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TI			
1	Certified Secure Programmer .NET	Sertifikasi dalam keamanan dalam bahasa pemrograman .Net	2
2	Developing ASP.NET MVC Web Application	Merupakan program sertifikasi dengan keahlian implementasi dan infrastruktur ASP.Net, pengembangan aplikasi, konsep <i>controller</i> dan <i>action</i> untuk mengelola <i>workflow</i> sebuah aplikasi.	2
3	Certified Data Science Specialist - CDSS Certification	Program sertifikasi keahlian pada bidang <i>Data Scientist</i> .	1
4	COBIT 5 Foundation	Sertifikasi terkait kerangka kerja berisi best practices untuk tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi (TI).	1
5	CICPE: Certified IT Capacity Planning Expert	Merupakan program sertifikasi <i>expert</i> di bidang <i>IT Capacity Planning</i> .	1
6	Implementing a Datawarehouse with Microsoft SQL Server	Sertifikasi keahlian dari Microsoft yang berkaitan dengan SQL server serta implementasinya.	5
7	IT Architecture (TOGAF 9.1)	Sertifikasi untuk kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan.	2
8	Sertifikasi Manajemen Risiko Manager Level 2	Sertifikasi kompetensi di bidang Manajemen Risiko kepada para profesional agar dapat menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko (Level 2).	1
9	Certified Data Science For Manager - CDSM	Program ini bertujuan memfasilitasi para manajer perusahaan dan peserta lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai big data secara umum maupun pengetahuan dan kemampuan terkait data <i>science</i> dan <i>machine learning</i> .	5
10	Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v.3 Foundation Certification	Sertifikasi terkait konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI).	1
11	Red Hat RHCSA & RHCE	Program sertifikasi untuk keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan administrator sistem pada sistem <i>Red Hat Enterprise Linux</i> .	2
12	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Sertifikasi kompetensi di bidang Manajemen Risiko agar dapat menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko (Level 1).	4



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Materi Sertifikasi	Keterangan	Jumlah Pekerja Sertifikasi
DIVISI OPERASIONAL TI			
1	Certified Data Center Professional (CDCP)	Sertifikasi mengenai komponen utama atau komponen kunci dari sebuah Data Center, seperti kelistrikan, pendinginan, keamanan, pengkabelan, keselamatan, dan lain sebagainya untuk memastikan tercapainya tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability) dari sebuah Data Center.	8
2	Information Technology Infrastructure Library (ITIL)	Sertifikasi terkait konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI).	6
3	Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT)	Merupakan program sertifikasi profesional di manajemen atau konsultasi tata kelola teknologi informasi yang diadakan oleh ISACA.	1
4	International Software Testing Qualification Board (ISTQB) Agile Tester	Merupakan program sertifikasi untuk <i>software tester</i> dengan konsep <i>agile</i> .	1
5	Certified Ethical Hacker (CEH)	Salah satu tingkatan sertifikasi yang ditawarkan oleh <i>EC-Council</i> , lembaga sertifikasi di bidang <i>cyber security</i> .	2
6	International Software Testing Qualification Board (ISTQB) Tester (Business Analyst)	Merupakan program sertifikasi untuk <i>software tester</i> dari segi pemahaman terhadap proses bisnis.	1
7	Certified Data Science for Manager (CDSM)	Program ini bertujuan memfasilitasi para manajer perusahaan dan peserta lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai big data secara umum maupun pengetahuan dan kemampuan terkait data science dan machine learning.	1
8	Pendidikan Lead Auditor Course ISO 9001:2015 Quality Management System (IRCA Approved)	Sertifikasi Standar Internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.	3
9	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja	Sertifikasi yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.	6
10	Certified Network Defender (CND)	Sertifikasi dan pelatihan yang memberikan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menganalisis ancaman internal dan ancaman keamanan eksternal terhadap jaringan dan service (Email Server, Apps Server, Voip dll).	2

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Materi Sertifikasi	Keterangan	Jumlah Pekerja Sertifikasi
11	Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) 1 & 2	Program sertifikasi untuk kemampuan dan keahlian <i>core</i> sistem administrator yang diperlukan dalam lingkungan Red Hat Enterprise Linux.	2
12	Certified Data Centre Facilities Operation Manager	Merupakan program sertifikasi <i>expert</i> di bidang IT Facility dan Operasional Data Center.	2
13	Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Provisioning SQL Databases	Merupakan Sertifikasi dibidang Database SQL Server meliputi Konfigurasi SQL Server, SQL Server Components, Performance, Migration dll.	1
19	Certified Data Center Specialist (CDCS)	Sertifikasi spesialisasi di bidang Data center untuk meningkatkan ketepatan, efektifitas, dan efisiensi Data Center, Memahami siklus hidup desain data center dan tahapannya.	1
20	Certified IT Capacity Planning Expert (CICPE)	Merupakan program sertifikasi <i>expert</i> di bidang IT Capacity Planning.	1
DIVISI SATELITE & INFRASTRUKTUR JARINGAN			
1	Cisco Certification Network Associate (CCNA)	Sebuah program sertifikasi di industri jaringan komputer yang dikeluarkan oleh Cisco System. CCNA merupakan sertifikasi tingkat intermediate (menengah) yang berarti lulusan pemegang sertifikat cisco CCNA dianggap sudah mampu mengelola jaringan level medium-high skala enterprise.	8
2	Cisco Certified Network Professional (CCNP)	Sertifikasi yang levelnya satu tingkat diatas CCNA, memiliki kemampuan untuk handle multi-area dengan kapasitas 500-1000 user, menganalisa permasalahan serta melakukan troubleshooting secara cepat dan terstruktur.	1
3	Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)	Sertifikasi Expert dibidang jaringan untuk merancang, membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan memecahkan masalah infrastruktur jaringan perusahaan yang kompleks.	1
4	Certified Information Systems Auditor (CISA)	Sertifikasi profesional audit sistem informasi yang dikeluarkan oleh ISACA, memiliki kemampuan dalam IT audit, kontrol dan keamanan.	1
5	Certified Ethical Hacker (CEH)	Salah satu tingkatan sertifikasi yang ditawarkan oleh EC-Council, lembaga sertifikasi di bidang <i>cyber security</i> .	1
6	Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA)	Sertifikasi terkait Juniper Networks fundamental jaringan, routing dasar dan switching dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Juniper agar dapat di implementasikan ke jaringan yang menggunakan perangkat Juniper.	8
7	Information Technology Infrastructure Library (ITIL)	Sertifikasi terkait konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI).	2



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Materi Sertifikasi	Keterangan	Jumlah Pekerja Sertifikasi
8	Certified Data Center Professional (CDCP)	Sertifikasi mengenai komponen utama atau komponen kunci dari sebuah Data Center, seperti kelistrikan, pendinginan, keamanan, pengkabelan, keselamatan, dan lain sebagainya untuk memastikan tercapainya tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability) dari sebuah Data Center.	4
9	Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)	Program Sertifikasi guna untuk memahami penggunaan RouterOS Software dan RouterBoard milik Mikrotik.	2
10	Palo Alto	Program Sertifikasi untuk memberikan jaminan atas kemampuan untuk mengoperasikan dan mengelola Platform Pengoperasian Keamanan Palo Alto Networks.	3
11	Certified Data Science for Manager (CDSM)	Program ini bertujuan memfasilitasi para manajer perusahaan dan peserta lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai big data secara umum maupun pengetahuan dan kemampuan terkait data science dan machine learning.	7
12	Certified Data Centre Facilities Operation Manager (CDFOM)	Sertifikasi yang di rancang untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan operasi Data Center dari perencanaan sampai pemantauan dan pelaporan.	2
13	ISO/IEC 27001:2013	Standar global untuk manajemen keamanan informasi.	2
14	DevOps	Sertifikasi DevOps adalah kompetensi khusus dan Subject matter yang dibutuhkan untuk menjadi DevOps professional.	2

DIGITAL CENTER EXCELLENCE

1	JIRA	Program setifikasi untuk mengelola, menyesuaikan, dan konfigurasi menggunakan Jira Interface, mendukung setiap metodologi manajemen Agile, baik itu scrum, kanban, dan lainnya untuk pengembangan perangkat lunak.	8
2	Big Data Analytic (BDA) - Machine Learning	Sertifikasi membahas mengenai pembangunan sistem yang berdasarkan pada data.	2

DESK INFORMATION SECURITY

1	Certified Information Systems Auditor (CISA)	Sertifikasi profesional audit sistem informasi yang dikeluarkan oleh ISACA, memiliki kemampuan dalam IT audit, kontrol dan keamanan.	1
2	Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	Certified Information Systems Security Professional merupakan sertifikasi di bidang keamanan sistem informasi yang secara independen dikeluarkan oleh (ISC) ² alias International Information Systems Security Certification Consortium.	1

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Materi Sertifikasi	Keterangan	Jumlah Pekerja Sertifikasi
3	Certified Ethical Hacker (CEH)	Salah satu tingkatan sertifikasi yang ditawarkan oleh <i>EC-Council</i> , lembaga sertifikasi di bidang <i>cyber security</i> .	3
4	Certified Hacking Forensics Investigator (CHFI)	Sertifikasi mengenai proses penanganan insiden <i>Hacking</i> dan <i>Cyber Crime</i> yang mencakup teknik investigasi komputer (Digital Investigation), baik itu pengumpulan dan pengamanan bukti, forensik digital, serta standar pemulihan data komputer dan perangkat mobile.	1
5	Certified Secure Programming (ECSP)	Sertifikasi guna untuk melakukan identifikasi berbagai kelemahan keamanan serta menerapkan teknik pengamanan aplikasi pada seluruh tahap Software Development Life Cycle (SDLC) demi meningkatkan kualitas aplikasi yang dikembangkan.	1
6	Ec-council Network Security Administrator (ENSA)	Sertifikasi yang dirancang untuk memberikan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menganalisis ancaman keamanan internal dan eksternal terhadap jaringan, dan untuk mengembangkan kebijakan keamanan yang akan melindungi informasi.	1
7	DevOps	Sertifikasi DevOps adalah kompetensi khusus dan Subject matter yang dibutuhkan untuk menjadi DevOps professional.	2
DIVISI KERJASAMA TEKNOLOGI			
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2 Certification	Meningkatkan kualitas manajemen risiko dan corporate governance. Manajemen Risiko Level 2 memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan proses manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.	1
2	Devops Foundation	Introduction DevOps - gerakan budaya yang menekankan pada komunikasi, kolaborasi, integrasi, dan otomatisasi untuk meningkatkan work flow antara pengembang perangkat lunak dan IT Operation.	6
TOTAL			135

Realisasi Program Kerja TI 2019

No	Strategic Initiatives	Work Programs	Realization of IT Work Programs 2019
1	Enhance ICT Competence & Digital Talent	Groom Digital Leaders & Talents	139 Sertifikasi Pekerja TI 47 Product Manager 75 Talent BRI DREAM (Digital Leadership Executive Transformation Program) dan BRI Digital Leader Curriculum 799 pekerja insourcing/outsourcing TI BRI



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

No	Strategic Initiatives	Work Programs	Realization of IT Work Programs 2019
2	Develop Product Management Mindset	Enforce Product Approach in IT Business Alignment	637 inisiatif selesai, 171 sedang berjalan - Implementasi tools ADLM - Atlassian : Confluence, Jira, Bitbucket, Bamboo, dll. - Tim Product Development: BRILINK, Internet Banking (Mobile dan Web), Pembayaran BI-Remittance-Trade Finance, CMS, BRISPOT, Human Capital
3	Advance Implementation BiModal IT	Impose Governance For Agile & DevSecOps Method	- Integrasi DevSecOps Tools - Static Application Security Testing - Pembaharuan Tata Kelola TI BRI
4	Modernize CBS by managing impact vs risk	Enhance Finance & Core System	- Pra-Implementasi Proyek Tactical Enhancement BRINETs - Pra-Implementasi Sistem Enterprise GL
		Implement Middleware Enhancement	Roll-Out Microservices-Based ESB (Phase 1)
5	Accelerate Next-Gen ICT Architecture	Excel Network & IT Service Delivery	- Next Gen Infrastructure: - BRISat Utilization - iNMS Implementation - ODC Implementation - DRC Implementation - VSAT HUB - VSAT Remote - IT Service Performance: - Response Time Host: 1.6 detik (target max 2detik, pencapaian 115%), - Availability Power DC: 100% (target 99,749%) - Availability Server: 99.99% (target 99,95%) - Success Rate Trx: 99,81% (Target: 99,5%).
6	Enhance Cyber security & Digital Resilience	Improve Privacy Management	Implementasi Security Operation Center (SOC)
7	Excel Data Governance & Analytics	Enrich Big Data for Augment intelligent	- Augment Risk Management & Operational Excellence, use cases: - Credit Risk Analytics Platform - Customer & Merchant Analytics Platform - Fraud Analytics - Fast Data Analytics Platform Democratize - Business Intelligence through Self Service Analytics (Big Data Self Service Analytics Platform)
8	Deliver Digital Initiative	Thrive Digital Banking for MSME & Consumer	- Digital Ultra Micro Loan: Pinang 1.0 & 2.0 - Digital Consumer Loan: Ceria 1.0 & 2.0
9	Deliver Excellent Ecosystem Platform	Boost Digital Ecosystem Platform	- BRI API (dengan 60 partner yang telah live, fintech dan e-commerce: DANA, Lazada dan Tokopedia, dll) - Ecosystem Platform Junio Smart, BRI Smart Billing, BRI Store

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

INVESTASI DAN EKSPLOITASI TI

Pada tahun 2019, alokasi anggaran TI BRI sebesar Rp4,9 triliun dengan anggaran investasi TI sebesar Rp3,6 triliun dan anggaran Eksploitasi IT sebesar Rp1,4 triliun yang meliputi 33 proyek dari 14 Divisi inisiasi sampai dengan Bulan Desember 2019.

Beberapa proyek utama Direktorat TI&O 2019 yang menggunakan alokasi anggaran investasi IT dan eksploitasi sebagai berikut:

No	Divisi	Proyek
1	Divisi Jaringan Bisnis Ritel	1. Bankstore 2. Smart Branch 3. BRIBOX
2	Divisi Desk E-Channel	1. Outlet Expansion CRM Tahun 2019 (600 CRM) 2. Outlet Expansion EDC Tahun 2019 (25.500 EDC)
3	Divisi Satellite & Jaringan Infrastruktur	Network & Security Enhancement (Network, Application, Data Center, Business Processes Procedures)
4	Desk Information Security	Pengadaan Software Pengamanan Komunikasi data ATM
5	Divisi Perencanaan dan Pengembangan TI	1. Enterprise Data Warehouse (EDW) 2. Modernisasi Core Banking System 3. New Delivery System
6	Divisi Digital Center of Excellence	1. Pengembangan Big Data BRI Tahap 1 2. BRI Open API 3. Digital Banking -- Pinang & Ceria
7	Divisi Transaction Banking	1. Akuisisi Platform CMS Fitur Korporasi <i>End to End</i> 2. Pengembangan Supply Chain Financing Platform
8	Divisi Layanan Contact Center	1. Sistem Complaint Handling Terintegrasi 2. Penggunaan Voice Biometrics di Contact BRI (Pengembangan Contact Center)
9	Divisi Kredit Consumer	Pengembangan Sistem Collection Support Kredit Konsumer
10	Divisi Bisnis International	1. Peningkatan Status BRI Hongkong Representative Office (HKRO) 2. Pembukaan UKLN BRI Taiwan
11	Divisi Akuntansi dan Manajemen	Implementasi IFRS 9 (PSAK 71)
12	Divisi Kepatuhan	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Produk & Aktivitas Baru (PAB)
13	Divisi Investment Services	Sistem Aplikasi Tapera
14	Divisi Corporate Transformation	1. New Finance System 2. Modernisasi Middleware 3. Data Reporting Architecture 4. Digitalisasi end to end proses bisnis Mikro 5. Pengadaan Environment Back-Up untuk Aplikasi BRISPOT 6. Digitalisasi proses kredit Ritel 7. Server DB & Repository (Storage) untuk Aplikasi BRISPOT menunjang Segmen Ritel 8. Business Process Reengineering Bisnis Konsumer 9. Enhance Customer Experience Through Integrated BRI Loyalti Point 10. Stress Asset Management



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

BRI DIGITAL STRATEGY FRAMEWORK

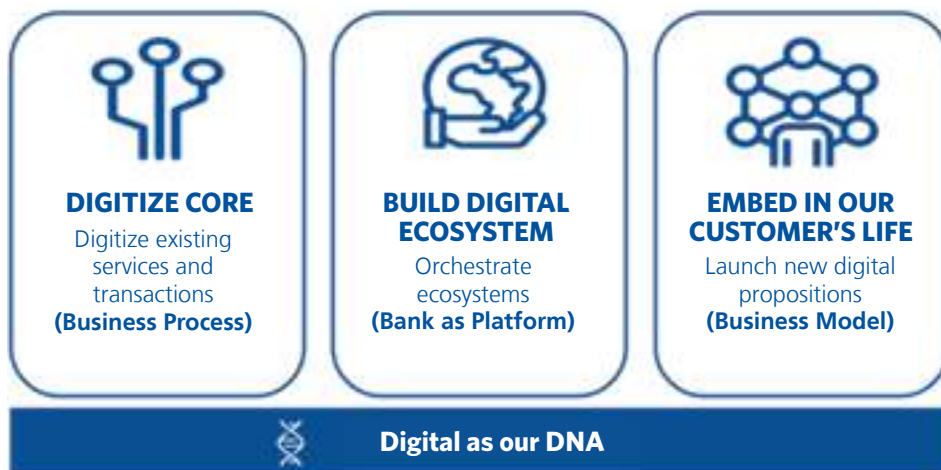
Transformasi Digital BRI dibentuk mengacu pada kekuatan utama BRI, yaitu jaringan luas yang menjangkau hingga pelosok desa, serta fokus pertumbuhan pangsa pasar di segmen UMKM dan konsumen. Untuk mendukung proses transformasi tersebut, Bank BRI fokus pada tiga pilar **BRI Digital Strategy Framework**:

Pilar pertama adalah 'Digitizing Our Core', yaitu meningkatkan proses bisnis pada sistem yang telah berjalan sekian lama. Salah satu contoh adalah BRISpot, aplikasi *credit approval system*, yang menjadikan putusan pinjaman oleh pejabat kredit lini dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan secara *paperless*.

Pilar kedua adalah 'Building a Digital Ecosystem'. Produk yang paling penting dari pilar ini adalah BRIAPI, platform Open Banking milik BRI yang telah tersertifikasi dan mendapat izin dari regulator dan satu-satunya API di Indonesia yang telah mendapat sertifikasi ISO 27001 dalam rangka membangun super ekosistem digital di Indonesia.

Pilar ketiga adalah 'Embedding Digital in Our Customers' Lives', dimana BRI mengembangkan dan meluncurkan bisnis model baru (*new digital banking proposition*). Hasil dari pilar ini yang terkenal adalah Pinang. Aplikasi Pinang telah *fully digital* dan dilengkapi sistem *digital verification*, *digital scoring*, dan *digital signature*. Aplikasi ini merupakan produk pinjaman digital berbasis aplikasi pertama di Indonesia.

Pada dasar pilar-pilar tersebut terdapat "Digital as our DNA":



- a. BRIMOLA: sebuah platform *supply chain non-financing* berbasis web dan aplikasi smartphone khusus LPG 3kg bersubsidi yang secara khusus dibuat untuk mempermudah *system ordering* dari pangkalan ke agen Pertamina serta menyediakan solusi *cashless* dalam rangka menangani risiko *cash handling* serta transparansi informasi kuota LPG oleh pangkalan. Melalui platform Brimola sebanyak lebih dari 1.350 agen dan 60.000 pangkalan telah bertransaksi dan melakukan pemesanan sejumlah lebih dari 2,6 juta. Hal ini juga selaras dengan fokus BRI untuk melakukan pemberdayaan di segmen UMKM salah satunya melalui layanan *cashless payment* di rantai distribusi LPG 3kg.
- b. JUNIO SMART: sebuah platform manajemen pendidikan dan sekolah yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, guru, dan bagian administrasi sekolah untuk *sharing* informasi terkait silabus pendidikan, absensi, pembayaran biaya sekolah dalam rangka menciptakan sebuah *environment* yang kondusif untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Platform Junio Smart berbasis web dan aplikasi secara khusus dibuat untuk melayani segmen sekolah dasar, menengah, sekolah tingkat atas dan pendidikan setingkat. Sebanyak lebih dari 200 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah menggunakan Junio Smart dan melayani lebih dari 16 ribu orang tua siswa untuk menciptakan sebuah layanan pendidikan yang berbasis pendidikan sekaligus literasi keuangan kepada generasi muda Indonesia melalui layanan perbankan BRI.
- c. BRI STORE: sebuah platform sistem ordering berbasis web dan aplikasi yang dapat melayani para pelaku perdagangan khususnya para retailer dalam melakukan pemesanan barang kepada distributor dengan dilengkapi fitur unggulan online *inventory* dan status *payment* guna memberikan kemudahan bagi retailer dan distributor dalam pengelolaan persediaan barang dan *cash flow*. Platform ini juga
- d. BRI Smart Billing: sebuah platform pengelolaan *invoicing/billing* secara elektronik yang dapat digunakan untuk segmen usaha properti, pengelolaan gedung, pengelolaan tenant, dan small medium enterprise guna menciptakan sebuah billing management terpadu. BRI *billing management* didukung dengan layanan *invoice tracking*, *payment status*, dan *reporting* untuk dapat memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan piutangnya sekaligus sebuah aplikasi *green banking* yang berdampak terhadap pengurangan penggunaan kertas untuk pencetakan *invoices* dan menggantinya menjadi elektronik *invoices*.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

BUMN
Hadir untuk negeri

Build Ecosystem Platforms

BANK BRI

Ecosystems Platform to provide service solutions in B2B2C. Closed ecosystems for BRI will increase:

CASA, Fee Based Income, Loan, Awareness



Pada tahun 2020, beberapa inisiatif platform akan diluncurkan meliputi layanan terhadap ekosistem korporasi serta UMKM, diantaranya:

- Gov-Store: merupakan sebuah platform *supply chain* untuk instansi dan lembaga tinggi pemerintah yang mendorong *cashless payment* di lingkungan instansi dan lembaga tinggi pemerintah dengan menjunjung asas transparansi serta *real time online cashless payment* melalui Kartu Kredit pemerintah, guna mencapai efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah.
- Corporate Billing Management: merupakan platform *billing management* yang dapat digunakan oleh para korporasi dalam mengelola *invoice*-nya serta melakukan transaksi *payment* melalui layanan perbankan serta fasilitas lainnya.

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

INDONESIA MALL

Sejalan dengan meningkatnya transaksi e-commerce dunia, dalam beberapa tahun terakhir BRI mengembangkan ekosistem bisnis melalui kerja sama dengan berbagai pelaku usaha, termasuk e-commerce dan fintech. Sejak tahun 2018, BRI mengembangkan Indonesia Mall, yang merupakan inovasi kerjasama Bank BRI dengan e-commerce besar dunia untuk mendorong UMKM *go-online*. Indonesia Mall membantu para UMKM berkualitas internasional untuk meningkatkan daya saing, produktivitas dan jangkauan produk.

Lebih lanjut pada tahun 2019, Indonesia Mall telah memiliki 6 jaringan e-commerce dengan kerjasama terakhir terhubung dengan e-commerce besar dunia asal Singapore, Qoo10.

BRI akan senantiasa melakukan berbagai inovasi yang fokus pada pembangunan ekonomi sektor UMKM serta berupaya melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis seperti pelaku e-commerce dan fintech.





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

BRIAPI

Di tengah era digitalisasi, BRI berkomitmen untuk mendukung integrasi program transaksi non-tunai dengan para mitra-mitra strategis seperti pemerintah, institusi layanan publik, perusahaan *financial technology (fintech)* dan pelaku e-commerce. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, BRI mengembangkan BRI Application Programming Interface (BRI API) yang mempermudah konektivitas antar berbagai sistem pembayaran secara aman serta

meningkatkan jangkauan kepada pasar yang masih belum terlayani secara konvensional. BRIAPI telah tersertifikasi dan mendapat izin dari regulator.

Pada tahun 2019, BRI menjadi bank dengan open banking platform pertama di Indonesia yang bersertifikasi ISO 27001. Sertifikasi ISO 27001 merupakan pembuktian bahwa BRIAPI memiliki kejelasan flow operasional; keamanan data; kepatuhan sistem informasi

terhadap aturan yang berlaku serta kesiapan penanganan atas risiko yang dapat terjadi.

Atas pencapaian tersebut dan dengan telah menghubungkan lebih dari 100 mitra bisnis melalui BRI API, BRI senantiasa mengembangkan produk-produk berbasis digital teknologi untuk melayani nasabah dengan lebih baik kedepannya.



TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

PINANG

Bank BRI, melalui anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro), meluncurkan produk layanan dan jasa keuangan digital terbaru yang dikenal dengan PINANG (Pinjam Tenang). Langkah ini merupakan strategi Bank BRI untuk mengoptimalkan peran bisnis perusahaan anak dengan pendekatan teknologi.

PINANG adalah produk pinjaman digital berbasis aplikasi pertama di Indonesia yang dirilis pada Februari 2019. Aplikasi yang di platform Android ini menyediakan pilihan pinjaman dengan angsuran yang kompetitif untuk nasabah.

Aplikasi PINANG telah fully digital dan dilengkapi sistem *digital verification*, *digital scoring*, dan *digital signature*. Pinjaman dengan menggunakan PINANG memiliki limit pinjaman hingga Rp 20 juta dengan tenor hingga dua belas bulan. Disamping itu, waktu pemrosesan pengajuan kredit hanya memakan waktu 15 menit. Beberapa keunggulan inilah yang membuat PINANG nyaman, aman dan mudah dioperasikan.

Walaupun proses meminjam menggunakan PINANG cukup sederhana, namun faktor keamanan tetap menjadi prioritas utama. Produk PINANG telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

CERIA

Bank BRI senantiasa melakukan terobosan inovasi untuk mendukung aspirasi perusahaan dan mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, Bank BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA. Melalui peluncuran ini, Bank BRI menjadi bank BUMN pertama yang memiliki aplikasi pinjaman online.

Menyesuaikan dengan gaya hidup millennial yang serba praktis, aplikasi CERIA merupakan aplikasi *fully digital*, dengan sistem *digital verification*, *digital scoring*, dan *digital signature* serta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. CERIA mempercepat proses pengajuan pinjaman dengan waktu tak lebih dari 10 menit, dengan tenor yang fleksibel sampai dengan 12 bulan. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap muka dengan petugas bank. Limit transaksi hingga maksimum Rp 20 juta dan memiliki suku bunga yang kompetitif dibandingkan pinjaman online sejenis. Saat ini masyarakat sudah dapat mengunduh CERIA di sistem operasi Android, Playstore.



TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL



SABRINA

Sejak tahun 2018, dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI telah mengembangkan layanan BRI New Smart Assistance (Sabrina). Sabrina merupakan Chatbot berbasis artificial intelligence yang dapat diakses langsung oleh pengguna melalui smartphone. Melalui Sabrina, nasabah dapat mengetahui informasi produk; promo dan event; lokasi ATM, Kantor dan Top-up BRIZZI; dan bantuan langsung oleh Agen Contact Center. BRI terus menyempurnakan layanan Sabrina yang tersedia pada platform aplikasi chat populer dengan pemanfaatan teknologi chatbot dan *machine learning*.

BIG DATA

Era transformasi dan disrupsi digital saat ini tidak hanya memberikan hasil yang menarik bagi para pelaku usaha, namun di saat yang bersamaan membawa risiko yang besar apabila tidak dikelola secara memadai. Risiko-risiko baru di dunia siber sangat kompleks, dengan pola ancaman yang semakin dinamis, serta pelaku fraud yang inovatif, cepat dan membentuk jaringan. Menyadari hal tersebut, BRI membangun Digital Trust dengan melakukan pengelolaan Big Data yang bertujuan tidak hanya meningkatkan pelayanan nasabah dan kinerja perusahaan, namun juga meningkatkan keamanan transaksi.

Big Data merupakan salah satu elemen fundamental bagi BRI dalam memberikan layanan prima kepada nasabah seperti penggunaan *Big Data Analytics* yang memanfaatkan *machine learning* dalam *fraud detection*, *credit scoring* dan *merchant assessment*. Oleh karena itu, pengelolaan *Big Data Analytics* yang sesuai standar internasional merupakan hal yang terus dijaga oleh Bank BRI.

Bank BRI berhasil meraih ISO 27001 pada tahun 2018 dan diakui oleh dunia dengan mendapatkan penghargaan Global Data Impact Awards by Cloudera pada tahun 2019. Capaian tersebut menjadi semangat Bank BRI untuk selalu memelihara dan meningkatkan tata kelola Big Data.

FRAUD DETECTION SYSTEM

BRI menyadari bahwa bisnis perbankan selalu dihadapkan dengan risiko operasional yang mungkin terjadi akibat ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia, sistem ataupun dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini bisa dikelola dengan lebih efektif dengan optimalisasi Teknologi Informasi, seperti Big Data Analytics dengan fitur Fraud Detection System dan Early Warning System yang mengantisipasi perilaku fraud secara proaktif dan untuk kemudian dilakukan tindakan pencegahan.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

BRI menyakini bahwa dengan pendekatan proaktif akan meningkatkan proses manajemen risiko perusahaan saat ini. FDS telah membantu perusahaan untuk menciptakan platform yang integrasi untuk mendeteksi transaksi-transaksi anomali, pelaporan fraud, proses investigasi. Dengan FDS, perusahaan kini dapat mengelola transaksi perbankan dengan lebih efektif.



BRI Innovation Lab Program merupakan program inovatif berupa *Business Matchmaking* dan *Business Pitching Idea Competition* antara BRI, BRI Group dan pelaku startup untuk mendorong kemajuan industri keuangan dan industri UMKM di Indonesia. Para peserta berkompetisi ide kerjasama bisnis yang inovatif untuk mewujudkan aspirasi BRI sebagai Financial Integration Solution pada tahun 2020.

Rangkaian BRI Innovation Lab Program 2019 dengan tema *Business Collaboration to Achieve Financial Integration* telah diselenggarakan pada tanggal 3 Desember - 11 Desember 2019, diikuti oleh lebih dari 100 pelaku startup yang telah menghasilkan 66 kolaborasi bisnis bagi BRI dan BRI Group. Disamping itu, sebagai bentuk apresiasi atas ide-ide kolaborasi bisnis tersebut, BRI menyelenggarakan Appreciation Night, malam penghargaan kepada pemenang atas kategori-kategori: The Best Collaboration Program of The Year; The Best Product Manager of The Year dan The Best Collaboration Startup & BRI Group of The Year.

INNOVATION LAB PROGRAM

Di era digital saat ini, kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai aspirasi perusahaan. Bank BRI senantiasa meningkatkan sinergi antar lini bisnis dan perusahaan anak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Disisi lain, pelaku startup dapat menghadirkan pola bisnis yang begitu sederhana dan *seamless* untuk menjangkau kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan layanan keuangan maupun non keuangan.

Oleh karena itu BRI menyelenggarakan Innovation Lab Program yang bertujuan untuk menghasilkan kolaborasi bisnis antara Bank BRI dan BRI Group dengan startup baik yang bergerak di industri keuangan maupun non keuangan.



TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

Sertifikasi ISO 9001:2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa serta manajemen aktiva tetap, BRI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk beberapa proses sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 13 Januari 2018 sampai dengan 9 Desember 2020 terkait dengan "Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.
2. Sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 26 November 2018 sampai dengan 25 November 2021 terkait dengan "Provision of Establishment Strategy and Policy of AT Management Division & Property Procurement Including Vendor Management". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.
3. Sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 29 November 2018 sampai dengan 28 November 2021 terkait dengan "Provision of Cost Estimation Processes". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.



ISO 9001:2015

Diseluruh bagian pada Bidang Computing Service Operation

ISO 9001 merupakan standar Internasional di bidang system manajemen mutu, dimana dengan telah diperolehnya ISO tersebut seluruh bagian dibidang computing service telah memenuhi standar Internasional dalam hal manajemen mutu atas produk/jasa yang dihasilkannya.

Sertifikat ISO 9001 akan dilanjutkan di seluruh bagian pada tahun 2020.



ISO 27001

Pada Bagian Spacecraft Operation

ISO 27001 merupakan standar Internasional di bidang Information security, dimana dengan telah diperolehnya ISO tersebut maka bagian spacecraft operation telah memenuhi standar Internasional keamanan atas setiap informasi yang dimiliki.

Sertifikat ISO 27001 akan dilanjutkan ke bagian-bagian lain pada tahun 2020.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PENGHARGAAN INTERNASIONAL ATAS BRI DIGITAL TRANSFORMATION 2019

Dengan segala inovasi digital yang telah dilakukan, Bank BRI mampu meraih berbagai penghargaan bergengsi di level internasional di tahun 2019, antara lain: The Best Digital Bank in Indonesia by The Asian Banker dan Global Data Impact Award 2019 by Cloudera.



The Best Digital Bank in Indonesia 2019



Best Implementation of
Confluent Kafka Platform in Indonesia



Global Data Impact Award 2019



The Best Client Innovation Award 2019



ASEAN Enterprise Innovation Award
2018/2019

TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASIONAL

PROGRAM KERJA 2020

Lebih lanjut beberapa inisiatif platform yang akan diluncurkan pada tahun 2020 meliputi layanan terhadap ekosistem korporasi, UMKM dan juga di antaranya :

- a. Gov-Store : merupakan sebuah platform supply chain untuk instansi dan lembaga tinggi pemerintah yang mendorong cashless payment dilingkungan instansi dan lembaga tinggi pemerintah dengan menjunjung asas transparansi dan juga real time online cashless payment melalui Kartu Kredit pemerintah guna mencapai efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah.
- b. Corporate Billing Management : merupakan platform billing management yang dapat digunakan oleh para korporasi dalam mengelola invoicennya serta melakukan transaksi payment melalui layanan perbankan serta fasilitas lainnya.
- c. Platform Ekosistem Pasar : untuk memfasilitasi transaksi di pasar, terdiri dari fasilitas transaksi pembayaran retribusi dengan BRI Smart Billing Mikro, fasilitas transaksi pembayaran dengan POS / Merchant System yang diintegrasikan dengan Link Aja (berbasis standarisasi QRIS). Sebuah layanan solusi transaksi elektronik terpadu yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar secara berkesinambungan melalui layanan-layanan keuangan digital yang dapat menjawab berbagai permasalahan finansial di pasar. Pedagang juga akan memiliki dashboard sederhana untuk mengetahui mutasi dan transaksi di platform yang digunakan.
- d. Platform Ekosistem SME : memfasilitasi transaksi di segmen UMKM yang di antaranya adalah POS sistem serta sistem pencatatan Journal Laba Rugi yang turut memanfaatkan supply chain platform di antaranya BRISore dan BRIMOLA, fasilitas transaksi pembayaran dengan melalui EDC maupun metode pembayaran lainnya.
- e. Platform Ekosistem Pertanian : untuk memonitoring hasil tanam setiap lahan pertanian di wilayah Indonesia agar setiap hasil tanam dan panen dapat lebih optimal dan termonitoring lebih baik yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat sekitar.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

OPERASIONAL

Secara umum, kegiatan bisnis Bank BRI sebagai *financial intermediary* fokus pada pengumpulan dana masyarakat dan redistribusi dalam bentuk kredit serta pembiayaan di samping pengadaan layanan perbankan lainnya. Bank BRI telah menentukan strategi yang tepat yang ditandai dengan peningkatan kinerja yang signifikan melalui penyempurnaan proses bisnis dan efisiensi operasional.

Perkembangan industri *financial technology* yang tak terbantahkan pada tahun 2019 menjadi tantangan bagi perekonomian dan industri perbankan Indonesia. Oleh karena itu, penyempurnaan proses bisnis merupakan sebuah langkah strategis Bank BRI dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan antara lain diwujudkan dengan mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan layanan. Peningkatan efisiensi operasional yang dilakukan oleh BRI secara intensif adalah mereduksi biaya namun tetap memperhatikan *inherent risk*, yakni melalui optimalisasi jaringan dan infrastruktur *payment system*, Re-engineering Bisnis Proses, dan Standarisasi kualitas mutu.

PENGEMBANGAN OPERASIONAL TAHUN 2019

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat, BRI senantiasa mengembangkan sistem operasionalnya. Selama tahun 2019, Bank BRI melakukan pengembangan sistem dan operasional sebagai berikut:

1. Optimalisasi Jaringan dan Infrastruktur Payment System

Bank BRI secara rutin meninjau produktivitas dan stabilitas jaringan untuk kegiatan *payment system* seperti transaksi transfer dana rupiah (RTGS & Kliring), transfer dana mata uang valas (remittance) dan *settlement treasury* serta sentralisasi proses rekonsiliasi. Langkah strategis yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan dan *business continuity plan*, pada tahun 2019 Bank BRI telah melakukan penyempurnaan arsitektur *back up system* untuk sistem pembayaran seperti BI-RTGS, SKNBI dan BI-SSSS pada jaringan utama (*data center*) dan jaringan sistem cadangan (*Disaster Recovery Center*) serta secara periodik melakukan pengujian terhadap sistem cadangan tersebut dalam rangka menjalankan *business continuity plan*.

2. Efisiensi Over Head Cost melalui Re-engineering Bisnis Proses

Penggunaan biaya lebih fokus pada pengembangan jaringan layanan yang mendukung pertumbuhan transaksi dan pengembangan infrastruktur digital yang lebih efisien dengan memprioritaskan biaya yang digunakan untuk inisiatif strategis yang sejalan dengan strategi jangka panjang.

Selama tahun 2019 BRI telah melakukan *re-engineering* bisnis proses kegiatan operasional melalui otomasi proses bisnis yang berdampak pada efisiensi *over head cost* seperti :

- *Enhancement* sistem untuk pengelolaan surat berharga, inventori kartu BRI dan otomasi register sasaran mutu.
- *Efektivitas* pengelolaan kas melalui pengembangan *cash smart system* dan integrasi pengelolaan Kas ATM dengan CRO

3. Operational Excellence

Operasional BRI sejak tahun 2012 telah memperoleh Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001 : 2008. Seiring dengan berjalannya waktu, standarisasi kualitas mutu ISO 9001:2008 berubah menjadi Standarisasi

Kualitas Mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2017 untuk 9 (sembilan) ruang lingkup meliputi *Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, E-Banking Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and E-Banking Settlement, Cash Operation and Trade Processing Centre* dari Badan Sertifikasi PT. Lloyd's Register Indonesia. Selain itu BRI telah meningkatkan keamanan sistem informasi terutama menjaga data nasabah melalui Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Badan Sertifikasi BSI.

SINKRONISASI STRATEGI OPERASIONAL TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan *Centralized Back Office Organization and Improving Internal Control supported by real time data* di bidang operasional, Divisi STO BRI telah menetapkan strategi operasional tahun 2020 yaitu

1. *Integrated Remittance Payment System* (Simplikasi proses transaksi remittance untuk efisiensi operasional dan memudahkan monitoring transaksi)
2. *Centralized Payment Reconciliation* (Sinergi *product owner* dan *support* dalam mewujudkan rekonsiliasi sistem pembayaran yang akurat, tepat dan comply terhadap pihak eksternal/regulator)
3. *Reliable Human Resources* melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas pekerja serta sertifikasi khusus pekerja operasional



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAJEMEN AKTIVA TETAP & PENGADAAN

Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

Dengan jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 120 juta disertai dengan jumlah jaringan kantor lebih dari 9.000 kantor dan jumlah pekerja yang mencapai 125 ribu maka BRI memiliki skala operasional bisnis BRI yang sangat besar. Untuk itu, SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan bertanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan pengadaan operasional di BRI dan tercapainya pengelolaan aktiva tetap dan properti BRI yang baik.

MANAJEMEN AKTIVA TETAP

Untuk mencapai menjadi penunjang bisnis yang efektif dan efisien dan memiliki Misi untuk melaksanakan pengelolaan aktiva tetap dan logistik secara terencana, serta memberi kontribusi yang optimal bagi BRI maka strategi yang disusun oleh Divisi MAT & Pengadaan Properti ditekankan pada percepatan proses pengadaan dan keakuratan sistem informasi manajemen aktiva tetap.

DIVISI MANAJEMEN AKTIVA TETAP (MAT) & PENGADAAN PROPERTI

Divisi MAT dan Pengadaan Properti memiliki Visi untuk menjadi penunjang bisnis yang efektif dan efisien serta memiliki Misi untuk melaksanakan pengelolaan aktiva tetap dan logistik secara terencana dan terpadu yang berorientasi pada ketepatan sasaran, ketepatan guna dan ketepatan waktu. Untuk mencapai Visi tersebut dan memberi kontribusi yang optimal bagi BRI maka strategi yang disusun oleh Divisi MAT & Pengadaan Properti ditekankan pada percepatan proses pengadaan dan keakuratan sistem informasi manajemen aktiva tetap. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Divisi MAT & Pengadaan Properti yaitu untuk melakukan proses pengadaan properti (tanah/bangunan) dan fasilitas penunjang bangunan, monitoring properti serta melakukan pencatatan asset-asset BRI.

Strategi yang telah disusun untuk mencapai Visi dan Misi Divisi MAT & Pengadaan Properti diwujudkan dengan pelaksanaan pembuatan Daftar Rencana Pengadaan (DRP) bersama-sama dengan Divisi User pada awal tahun 2019. Kegiatan tersebut bertujuan agar informasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dapat diperoleh secara terperinci di awal tahun, sehingga pelaksanaan pengadaan dapat lebih terarah dan tepat waktu.

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap

Pengelolaan Aktiva Tetap BRI berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. KEMAL BRI memperoleh pengesahan dari Direksi pada tahun 2011

MANAJEMEN AKTIVA TETAP

dan diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan menjunjung tinggi prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Realisasi Strategi dan Operasional Tahun 2019

Program kerja tahun 2019 yang telah terlaksana yaitu, antara lain;

1. Implementasi strategi kontrak payung untuk pengadaan genset 12.5 KVA.
2. Implementasi renovasi dan/atau pembangunan gedung dengan metode *design and build*.
3. Penerapan Pendaftaran Rekanan *Online* berbasis *Website*.
4. Penyempurnaan Aplikasi BRISmile, antara lain:
 - a. Pengembangan *new function* perhitungan biaya premi asuransi aktiva tetap seluruh unit kerja BRI seluruh Indonesia.
 - b. Perhitungan biaya premi asuransi Aktiva Tetap yang otomatis agar dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
 - c. Migrasi *User Management* dari *single sign on* (portal SSO) ke PN Base Bristars.
 - d. Untuk mempermudah proses bisnis yang lebih *user friendly*.
 - e. Integrasi Modul Pembayaran Brismile dengan aplikasi Bripasti Divisi AMK.
 - f. Mempunyai tujuan utama simplikasi proses bisnis pembayaran kepada vendor penyedia barang dan/atau jasa.
 - g. Integrasi Pembayaran dengan pihak ketiga pada aplikasi Bripasti Divisi KPD.
 - h. Bertujuan untuk meningkatkan akurasi penggunaan anggaran agar betul-betul sesuai dengan peruntukannya.
 - i. Penyempurnaan modul eksisting agar BRISmile berfungsi secara maksimal di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah sampai di level Kantor cabang sehingga aktiva tetap dapat dikelola secara efektif dan efisien. Adapun efisiensi yang didapatkan atas pengelolaan aktiva tetap melalui BRISmile adalah sebagai berikut:
 1. Unit kerja BRI dapat melakukan monitoring atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *online* sehingga permasalahan yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat segera diselesaikan. Unit kerja dapat memastikan bahwa aktiva tetap yang diterima sudah tercatat di BRISmile.
 2. Bertambahnya unit kerja BRI dan adanya resupervisi unit kerja BRI membutuhkan pengelolaan aktiva tetap yang bersifat desentralisasi terutama yang berkaitan dengan relokasi (pindahan) aktiva tetap antar unit kerja.
 3. Proses asuransi aktiva tetap termasuk didalamnya penutupan asuransi dan pembayaran klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap dapat dilakukan secara *online* dengan pihak penanggung (asuradur) sehingga proses penutupan asuransi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pada saat dilakukan secara manual sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian aktiva tetap BRI. Selain itu, *progress* klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap BRI dapat dimonitoring oleh unit kerja yang melakukan pengajuan klaim asuransi melalui BRISmile. Selanjutnya setelah terdapat persetujuan klaim dari asuradur maka pembayaran klaim dilakukan secara otomatis.
 4. Proses penghapusbukuan dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja BRI mulai dari usulan sampai dengan penghapusan dari pencatatan di BRISmile. Proses ini memberikan kemudahan unit kerja untuk melakukan monitoring atas *progress* setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.
 5. Modul anggaran dalam BRISmile memberikan kemudahan dalam penyusunan anggaran BRI. Hal ini dikarenakan usulan dari setiap unit kerja dilakukan melalui sistem sehingga kebutuhan unit kerja dapat langsung dimonitor dan di analisa oleh Kantor Pusat.
 6. Proses pengadaan aktiva tetap dimulai dari input ijin prinsip pengadaan, ijin prinsip hasil pengadaan dan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan pengiriman/distribusi aktiva tetap ke unit kerja BRI



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAJEMEN AKTIVA TETAP

dapat dilakukan melalui Aplikasi BRISmile sehingga dapat diketahui *progress* semua pengadaan aktiva tetap yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan di Kanpus, Kanwil, Kanins, dan BRI Corporate University sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas setiap pengadaan aktiva tetap yang dilakukan termasuk waktu dan kendala yang dihadapi.

7. Proses pengajuan usulan sampai dengan pencatatan aktiva tetap sewa/beli properti dan pembangunan/ renovasi Gedung BRI sudah dapat dilakukan melalui BRISmile sehingga *progress* usulan atau pembangunan/ renovasi dapat langsung dimonitor oleh unit kerja BRI.
8. Modul BRISmile telah terhubung (*interface*) langsung dengan Brinets, dimana mayoritas transaksi pembukuan dilakukan otomatis melalui BRISmile, sehingga tidak diperlukan lagi pembukuan manual oleh unit kerja.
9. Kebutuhan informasi mengenai aktiva tetap BRI baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, terutama data yang terkait dengan laporan keuangan BRI dapat didapatkan dengan cepat dan akurat. Adapun laporan yang dapat dihasilkan dari BRISmile ini antara lain laporan rincian aktiva tetap, laporan mutasi aktiva tetap, laporan penghapusbukuan aktiva tetap, laporan penutupan asuransi aktiva tetap, dll.
10. Memudahkan pihak manajemen dalam mengambil strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan aktiva tetap

Optimalisasi Aktiva Tetap

Optimalisasi properti terbengkalai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah 10 properti terbengkalai yang terdiri dari 8 properti tanah dan 2 properti tanah dan bangunan. Untuk 8 properti tanah, 2 unit dioptimalisasikan menjadi unit kerja dan 6 unit dioptimalisasikan menjadi fasilitas penunjang kegiatan operasional BRI. Sementara untuk 2 properti tanah dan bangunan, 1 unit dioptimalisasikan menjadi unit kerja dan 1 unit dioptimalisasikan menjadi fasilitas penunjang kegiatan operasional BRI.

Adapun langkah yang telah ditempuh oleh BRI untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan properti terbengkalai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan lapangan terhadap lokasi yang diduga atau teridentifikasi sebagai properti terbengkalai.
- b. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi atas properti terbengkalai yang ditemui. Optimalisasi properti terbengkalai dapat dilakukan dengan menjadikan properti terbengkalai tersebut menjadi unit kerja BRI maupun penunjang kegiatan BRI sesuai dengan analisa kelayakan yang dilakukan berdasarkan aspek bisnis, lokasi, dan kesesuaian dengan tata ruang di daerah atau wilayah properti terbengkalai tersebut berada. Langkah penghapusbukuan properti terbengkalai dilakukan sebagai alternatif terakhir dengan pertimbangan properti tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan BRI baik gunakan sebagai operasional BRI maupun didayagunakan. Selain itu, penghapusbukuan properti dapat dilakukan apabila merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh BRI karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan hal tersebut dilakukan.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

BRI melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dengan selalu menekankan pentingnya penerapan Prinsip GCG. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses pengadaan yang berkualitas, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga transparansi dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan.

Pengadaan adalah proses kegiatan dalam rangka memenuhi atau menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa perusahaan dengan cara membeli atau sewa atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BRI bertujuan untuk mendukung operasional bank dan kinerja bisnis secara umum. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang aman, efektif, dan efisien.

Kebijakan

Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip GCG (Good Corporate Governance).

KEMAL BRI diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Tujuan dari disusunnya KEMAL BRI adalah:

- Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
- Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di BRI sehingga proses pengadaan di BRI.

Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi:

Efisien	Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
Efektif	Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
Kompetitif	Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Transparan	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
Adil dan Wajar	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
Akuntabel	Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kegiatan pengadaan dengan prinsip-prinsip diatas, maka Bank BRI mengimplementasikannya melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi dan Independensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Senantiasa patuh terhadap regulasi internal dan eksternal
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan serta serta pengendalian risiko.
4. Senantiasa berpedoman pada Budaya Perusahaan bank BRI yang berlandaskan pada nilai-nilai:
 - a. BRILIAN (Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric);
 - b. Good Corporate Governance; dan
 - c. Kode Etik Perusahaan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:



Penjelasan:

- Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.
- Dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan dibutuhkan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan. Pada tahun 2017 telah dibentuk Grup Estimasi, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.
- Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.
- Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.
- Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.
- Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menyediakan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah Good Corporate Governance.

Pengelolaan Rekanan

- Pengelolaan rekanan mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon rekanan, monitoring dan evaluasi kinerja rekanan hingga penetapan daftar hitam rekanan, sehingga dengan adanya pengelolaan rekanan diharapkan BRI mempunyai *database* penyedia barang/jasa yang siap dan mampu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) BRI. TDR (Tanda Daftar Rekanan) adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.
3. Penerbitan TDR dilakukan secara selektif kepada calon rekanan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak dibatasi dalam sektor kegiatan usaha tertentu sepanjang produk/jasa yang dihasilkan diperlukan oleh BRI.
4. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa yang lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, guna menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Evaluasi dilakukan terhadap rekanan dilakukan dengan variable penilaian meliputi *procurement process, quality, delivery, responsiveness*, dan *maintenance period*.
6. BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (TDR Online), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai dengan penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI (TDR BRI) melalui Aplikasi TDR Online.

Strategi dan Program Kerja Tahun 2019

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa berperan sebagai pendukung bisnis dan operasional BRI. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan yang aman, efektif, dan efisien.

Berikut beberapa strategi yang diterapkan selama tahun 2019:

- Pengadaan dengan multi vendor
Strategi multi vendor mempercepat proses pemenuhan barang dan/atau jasa.
- Pengadaan dengan blanket order
Penerapan strategi tersebut mempercepat proses pemenuhan barang dan jasa yang bersifat rutin dengan jumlah yang relatif besar, serta mengefisienkan biaya operasional pengadaan.
- Pengadaan Repeat Order
Strategi pemesanan barang dan jasa untuk menjaga kontinuitas barang dan/atau jasa dalam rangka efisiensi biaya proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- Penggunaan Aplikasi BRISMILE
Dengan menggunakan sistem tersebut, monitoring proses dan reporting hasil pengadaan dapat dilakukan secara elektronik/system.

Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa serta Implementasi e-procurement

BRI melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dengan selalu menekankan pentingnya penerapan Prinsip Good Corporate Governance. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses pengadaan yang berkualitas, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga transparansi dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan. Program kerja yang telah dilakukan untuk mendukung transparansi pelaksanaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Finansial menggunakan Aplikasi E-Procurement Modul E-Auction
2. Pengumuman lelang pengadaan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik.

Untuk memastikan evaluasi finansial dalam proses pengadaan barang dan jasa memenuhi aspek GCG dengan menyediakan HPS yang lebih independen, maka sesuai dengan kebijakan Direksi BRI, pada tahun 2019 dilakukan peningkatan status organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan estimasi harga yaitu Grup Estimasi, yang dibentuk pada tahun 2017 menjadi Desk Estimasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Desk Estimasi harus bisa menjadi *strategic procurement* yang independen, efektif dan efisien, serta dapat mengakselerasi bisnis proses pengadaan barang dan jasa melalui penyediaan HPS yang akurat dan cepat, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian target pertumbuhan serta pencapaian *cost efficiency*.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pencapaian Persentase Cost Efficiency (target 10% terhadap anggaran)

Efisiensi menjadi hal yang penting dilakukan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, BRI selalu menjaga agar cost efficiency berhasil ditekan sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih efektif.

Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 2019

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka untuk pengadaan barang dan jasa dalam batas nilai tertentu, diterapkan mekanisme pengambilan keputusan bersama oleh para Pejabat Pemutus Pengadaan dalam suatu forum Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan adanya Putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan putusan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan secara lebih seksama, akuntabel dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berikut data Komite Pengadaan Barang dan Jasa di BRI selama tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan	Jumlah Pengadaan
1	Komite Pengadaan I	> Rp. 200 Miliar	1
2	Komite Pengadaan II	> Rp. 75 Miliar sd. Rp. 200 Miliar	1
3	Komite Pengadaan III	> Rp. 20 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	6
4	Komite Pengadaan IV	> Rp. 7,5 Miliar sd. Rp. 20 Miliar	40
Total			48

Realisasi Strategi dan Operasional Tahun 2019

Program kerja tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan yaitu:

1. Implementasi strategi pengadaan melalui kontrak payung untuk barang/jasa.
2. Implementasi strategi pengadaan melalui multi vendor.
3. Implementasi strategi pengadaan melalui *repeat order*.
4. Implementasi strategi pengadaan melalui *design and build* untuk renovasi/pembangunan gedung.
5. Implementasi pendaftaran rekanan secara *online* berbasis *Website*.
6. Implementasi metodologi dan standarisasi estimasi harga.
7. Implementasi *new business process* estimasi berbasis aplikasi.
8. Pengembangan *new function* perhitungan biaya premi asuransi aktiva tetap seluruh unit kerja BRI pada
9. Migrasi *User Management System* pada aplikasi BRISmile eksisting.
10. Integrasi Modul Pembayaran pada aplikasi BRISmile eksisting

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa dan Manajemen Aktiva Tetap

Agar BRISmile berfungsi secara optimal di level pengguna Kantor Pusat, Kantor Wilayah sampai di level Kantor cabang, maka penyempurnaan modul dan versioning dilakukan secara terus menerus, sehingga memberikan dampak positif pada pengelolaan Aktiva Tetap BRI sebagai berikut:

1. Unit kerja BRI dapat melakukan monitoring atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *online* sehingga potensi terjadinya selisih pencatatan aktiva tetap dapat kendalikan.
2. Unit kerja BRI dapat melakukan pengelolaan aktiva tetap secara desentralisasi.
3. Unit kerja BRI dapat memonitoring progress klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap secara online.



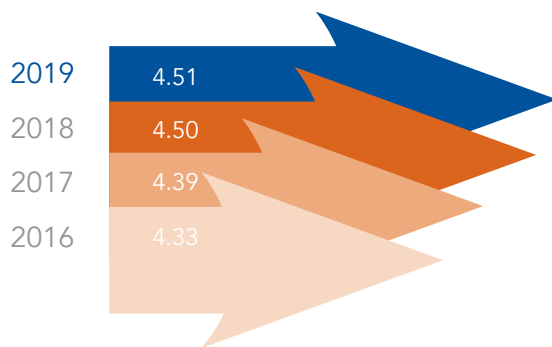
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

4. Unit kerja BRI dapat melakukan secara mandiri proses penghapusbukuan aktiva tetap.
5. Unit kerja BRI dapat melakukan monitoring atas progress setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.
6. Unit kerja BRI dapat menyusun kebutuhan dan penganggaran secara sistem dan realisasi dapat dimonitor secara optimal.
7. Unit kerja BRI dapat melakukan usulan sewa/beli properti secara sistem

Tanggung Jawab kepada Pemasok

1. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, Bank BRI senantiasa melakukan audit secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal BRI.
2. Vendor Gathering
Pada tahun 2019, BRI telah melakukan Vendor Gathering melalui Forum Group Discussion (FGD) Bank BRI. Adapun pemaparan materi dari kegiatan vendor gathering yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sharing mengenai visi dan misi Bank BRI ke depan.
 - b. Sarana untuk mempererat jalinan kerjasama yang harmonis antara BRI dengan mitra kerja Bank BRI.
 - c. Forum komunikasi untuk mendapatkan masukan dari vendor untuk perbaikan proses pengadaan di BRI.
3. Index Kepuasan Pelanggan Internal dan Eksternal
Dalam peningkatan standar kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Bank BRI, Bank BRI telah melakukan survey kepada pemasok/vendor dengan hasil survey sebagai berikut:



Jelajahi Pesona Indonesia Bersama Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia



Nikmati keuntungannya:

Double Points untuk setiap transaksi pembelian tiket, pemesanan hotel, *tour* dan *travel*
Wonderful Indonesia Extra Traveloka Points | Auto Conversion to Traveloka Points



wonderful
indonesia

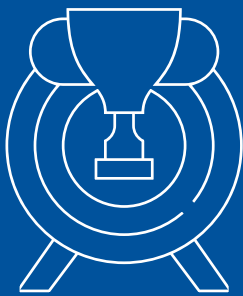
*Syarat dan Ketentuan Berlaku

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

 **BANK BRI** ~ Official Partner Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

CONTACT **BRI 14017 / 1500017** | www.bri.co.id |  **BANK BRI** |  **@promo_BRI**

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN



Penguasaan peran BRI dalam mendukung pertumbuhan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2019 merupakan wujud dari pelaksanaan Tata Kelola yang berkesinambungan dan mengutamakan transparansi dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019, BRI mampu mewujudkan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap pertumbuhan bisnis digital yang semakin berkembang pesat. Praktik Tata Kelola ini memberikan kepuasan bagi pemangku kepentingan dalam menunjang perkembangan sektor UMKM melalui digitalisasi perbankan.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direktorat
Kepatuhan

Bagi BRI, sebagai sebuah institusi keuangan yang terpercaya selalu memastikan bahwa dalam setiap operasional bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG). Terkait dengan hal tersebut, maka Direktorat Kepatuhan senantiasa berupaya untuk memastikan tercapainya pelaksanaan kepatuhan di BRI melalui pengelolaan kebijakan & prosedur yang efektif sehingga terdapat peningkatan yang terus menerus atas kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme GCG mengambil peran penting dalam pelaksanaan strategi *Blue Print* Transformasi BRI, dimana aktivitas strategis terkait operasional dan aksi korporasi membutuhkan penelaahan menyeluruh, pengambilan keputusan yang cepat dan efektif serta mekanisme pengawasan pelaksanaan yang tepat termasuk penerapan manajemen risiko. Digitalisasi tidak hanya diaplikasikan dalam bentuk produk kepada pelanggan maupun kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan GCG oleh organ-organ Perseroan khususnya di sisi proses pengambilan keputusan dan budaya kerja sehari-hari.

Sebagai perusahaan yang berbasis pelanggan, BRI senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan yang saat ini bergerak cepat ke arah tren digital. Kondisi ini disigapi Perseroan dengan pelaksanaan *Blue Print* Transformasi Digital BRI melalui pembangunan teknologi informasi yang andal dan data *analytics* untuk mendukung terciptanya layanan digital melalui jaringan yang cepat dan berkualitas.

PENGHARGAAN GCG

Penerapan GCG yang tercermin melalui *governance outcome* sepanjang 2019 mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal melalui beberapa penghargaan diantaranya sebagai berikut:



11th IICD Award: Bank BRI memperoleh penghargaan dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)



GCG Award 2019: Bank BRI memperoleh predikat "Most Trusted Company" dari Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Tata Kelola Perusahaan

PENERAPAN GCG

Dasar penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
7. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
11. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
12. Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran OJK No.13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
14. Surat Edaran Kementerian BUMN No: SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan

BRI juga mengadopsi standar terbaik serta pedoman dan best practice terkini dalam meningkatkan kualitas mutu penerapan GCG antara lain:

1. Prinsip-prinsip GCG oleh *Organization for Economic Cooperation and Development*.
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

PRINSIP GCG DAN PENERAPANNYA

BRI menerapkan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas usaha berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Transparansi

1. Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Bank mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi

dan misi Bank, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Bank.

Tata Kelola Perusahaan

- Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Bank dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

- Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*.
- Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
- Bank menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku.
- Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
- Bank memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
- Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tanggung Jawab

- Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
- Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam
- Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Independensi

- Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
- Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

- Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

TUJUAN PENERAPAN GCG

BRI juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk:

- Mendukung Visi dan Misi Bank.
- Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
- Memaksimalkan nilai perusahaan.
- Meningkatkan keyakinan kepada *shareholders* dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
- Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank.
- Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Bank.
- Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara efektif dan efisien.
- Mengoptimalkan hubungan *risk return* yang konsisten dengan strategis Bank.
- Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank didasari prinsip-prinsip GCG.
- Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
- Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

PELAKSANAAN ROADMAP GCG

Tahapan mekanisme GCG di BRI dituangkan dalam bentuk *Roadmap* berkelanjutan yang pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. *Roadmap* BRI adalah sebagai berikut:

2000-2001

Penerapan GCG yang tertuang dalam business plan
Komitmen manajemen dalam visi misi, *core value*, dan *corporate culture* GCG policy (*Charter*)

2002-2005

Kebijakan Kode Etik BRI
Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi
Pedoman Sekretariat Perusahaan
Panduan transparansi dan pengungkapan
Piagam Komite Audit
Kebijakan Umum Manajemen Risiko
Kebijakan Peraturan Disiplin
Peraturan Ketenagakerjaan
Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi
Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi
Revisi Kebijakan Umum Logistik.

2006-2009

Panduan Komite Komite Nominasi dan Remunerasi
Panduan Komite Pengawas Manajemen Risiko
Piagam Audit (*Audit Charter*)
Arsitektur SDM.

2010-2012

Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).
Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
Kebijakan Strategi *Anti Fraud*.
Standar Service Level Agreement (SLA).

2013

Kebijakan Prinsip Mengenal Pekerja (*Know Your Employee*).
Pelaksanaan Program Bina Lingkungan.
Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan.

2014

Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern.
Pelaksanaan Program Pendampingan Pekerja Baru.
BPO Penerapan APU dan PPT.
Pedoman Penilaian peningkatan Kesehatan Bank .
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
Ketentuan Security Teknologi Sistem Informasi BRI.

2015

Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang BRI.
Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang BRI.
Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*).
Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
Piagam Audit Intern BRI.
IT Strategic Plan.

BRI kembali meraih penghargaan:

1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index*.
2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD)

2016

Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi BRI bersama KPK.
Disaster Recovery Plan (DRP) Teknologi Informasi BRI.
Implementasi aplikasi *Knowledge Management* yaitu *sharing of knowledge* (ketentuan internal dan eksternal, publikasi hasil kajian/ riset, dan *training*) kepada seluruh pekerja.
Implementasi *E-learning* ke seluruh pekerja BRI.

BRI kembali meraih penghargaan:

1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index*.
2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Pelaksanaan Roadmap GCG

2017

Pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi BRI.

BRI kembali meraih penghargaan:

1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.*
2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*.

2018

Kebijakan BRI tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Implementasi *Recovery Plan* bagi Bank sistemik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Review kebijakan *Whistleblowing System* dan penerapan sarana pelaporan WBS pada website BRI.

2019

Diseminasi Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pada Tahun 2019 BRI kembali meraih penghargaan:

1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index* selama 7 tahun berturut-turut.
2. *The Best Financial Sector dan Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*

IMPLEMENTASI GCG 2019

Penerapan GCG BRI untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan GCG Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi diikuti oleh Seluruh Pekerja BRI Selindo dalam Forum Peningkatan Kinerja
2. Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 telah dilaksanakan 40 (empat puluh) hari kalender sebelum tanggal RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014 dimana paling lambat Pemanggilan RUPS Tahunan dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS Tahunan.
3. Pada Pemanggilan RUPS telah disampaikan rincian penjelasan masing-masing mata acara RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.
4. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 sekaligus Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 pada tanggal 17 Mei 2019 telah memenuhi ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.
5. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018 tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS atau setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yaitu tanggal 13 Juni 2019.
6. Penandatanganan Pakta Integritas Anti Fraud oleh Seluruh Pekerja BRI sebagai komitmen *zero tolerance* terhadap Fraud
7. Publikasi Anti Gratifikasi pada harian Investor Daily, dan Bisnis Indonesia pada bulan Mei 2019 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta pada bulan Desember 2019 dalam rangka Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
8. Pelaksanaan pendidikan pekerja dengan materi GCG, *Anti Fraud*, Pengendalian Gratifikasi, APU PPT serta Budaya Kepatuhan kepada seluruh Pekerja BRI melalui *in-class*, sosialisasi maupun *e-learning*.
9. Penyampaian Laporan Tahunan 2018 dilakukan sebelum akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir, telah sesuai dengan POJK No.29/POJK.04/2016.
10. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG Tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017.
11. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014 dan SE OJK No.15/SEOJK.03/2015
12. Penyampaian Laporan fungsi Pelaksanaan *Corporate Secretary* kepada Direksi yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014
13. Pelaksanaan Corporate Governance Performance Index (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* dan pada tahun 2019 BRI memperoleh skor 90.75 dengan predikat Sangat Terpercaya (Most Trusted Company).
14. Pemenuhan penerapan GCG mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* serta mengikuti penilaian *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. BRI berhasil meraih predikat *The Best Financial Sector* dan *Top 50 Public Listed Companies* untuk tahun 2019.
15. Revitalisasi sarana pelaporan *Whistleblowing System* pada Website Perusahaan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEBIJAKAN TATA KELOLA

BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap level organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.281-DIR/ DKP/12/2011 tentang Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/15/2012 dan Nokep. S.104-DIR/ DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.64-DIR/ DKP/12/2013 tentang Kebijakan Good Corporate Governance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.65-DIR/ DKP/12/2013 tentang Kode Etik (Code of Conduct) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep. S.339-DIR/ DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Edaran Direksi BRI Nose. S.27-DIR/ DKP/12/2016 tentang Whistleblowing System PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/ DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9. Pedoman Tata Tertib Komisaris.
10. Kebijakan Dividen BRI
11. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No:04-KOM/BRI/09/2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

STRUKTUR MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KELOLA

GCG Policy Charter dirumuskan berdasarkan perkembangan usaha BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta best practice GCG yang mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:

KOMITMEN TATA KELOLA	STRUKTUR TATA KELOLA	PROSES TATA KELOLA	HASIL TATA KELOLA
• Visi dan Misi • Nilai Perusahaan • Board Charter • Kode Etik • Pelestarian Lingkungan	Organ Utama • RUPS • Dewan Komisaris • Direksi Organ Pendukung • Komite • Sekretaris Dewan Komisaris • Sekretariat Perusahaan • Satuan Kerja Kepatuhan • Satuan Kerja Audit Internal • Satuan Kerja Manajemen Risiko Kebijakan dan Prosedur • Rencana Strategi bank • Kebijakan Bisnis Bank • Transparansi dan Pengungkapan	• Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham • Pelaksanaan fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi • Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank • Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan • Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) • Pengelolaan Anak Perusahaan	• Kesenambungan usaha • Perlindungan Nasabah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai Good Corporate Citizen. • Kemanfaatan Bank Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

1. KOMITMEN TATA KELOLA

Visi dan Misi

BRI mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Misi kemudian menjelaskan cara BRI dalam mencapai tujuan tersebut. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)

Core Value BRI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja. Secara lebih jelas Core Value dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

BRI mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat struktur, pembagian tugas dan tanggung jawab, etika kerja, tata cara rapat, organisasi, dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perusahaan. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Dewan Komisaris.

Kode Etik

BRI menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku insan BRI dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan

perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Kode Etik.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama (PKB) disusun untuk mengatur syarat-syarat kerja sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara BRI dengan serikat pekerja BRI, yang kemudian menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja. PKB merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya menjunjung hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja. Secara lebih jelas Perjanjian Kerja Bersama dijelaskan pada Bab SDM.

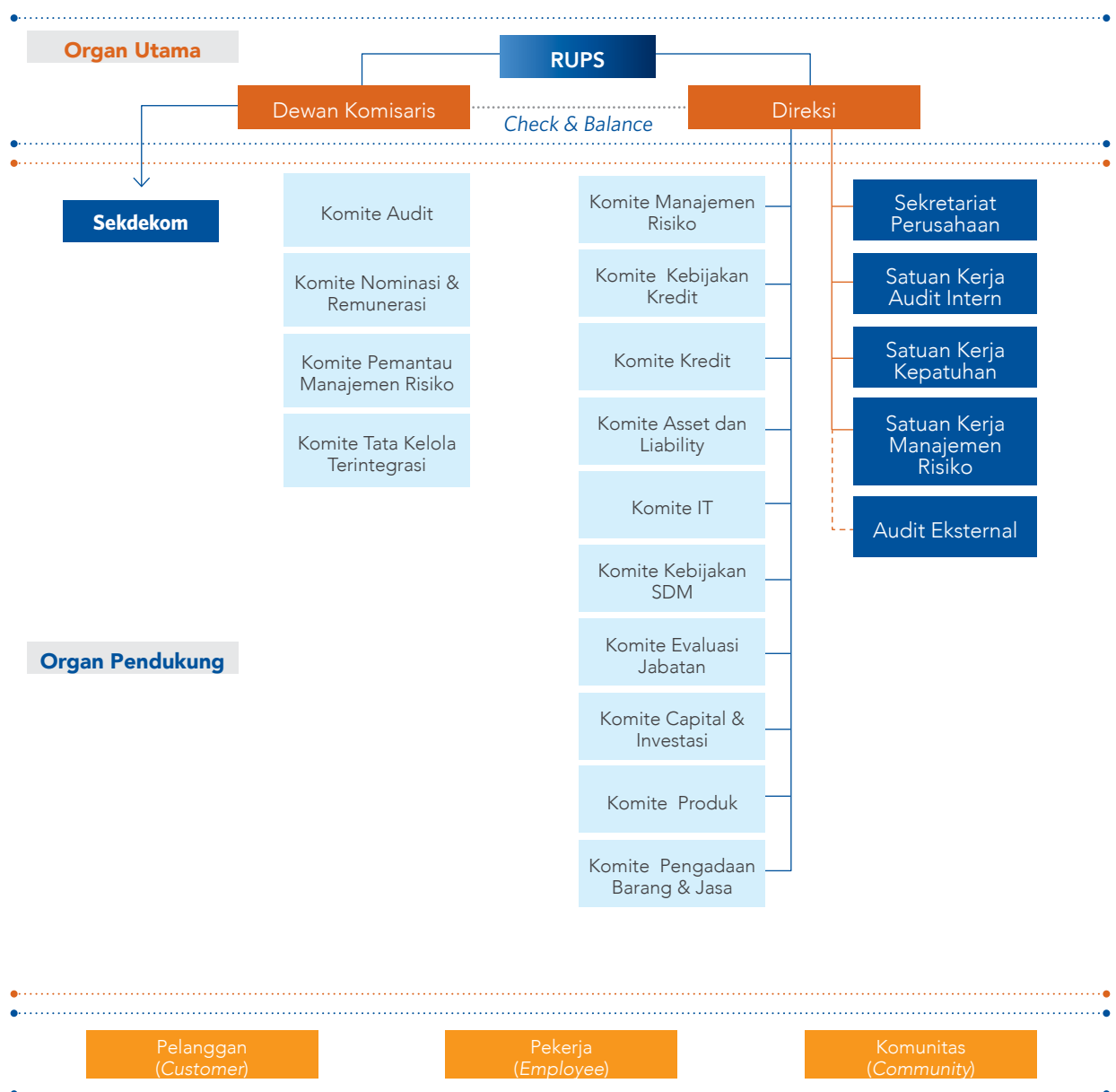
Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BRI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala. Secara lebih jelas peran BRI dalam pelestarian sumber daya alam dijelaskan pada Bagian Tanggung jawab Sosial Perusahaan.

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

2. STRUKTUR TATA KELOLA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, struktur GCG terdiri atas 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Guna memastikan efektifitas GCG dan menciptakan mekanisme kontrol check and balance, maka struktur Tata Kelola BRI juga meliputi Organ Pendukung serta Kebijakan dan Prosedur sebagai berikut:





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

RUPS

RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

DIREKSI

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Bank termasuk mewakili Bank dengan pihak ketiga didalam maupun diluar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

ORGAN PENDUKUNG STRUKTUR TATA KELOLA

Komite Dibawah Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pemantau Manajemen Risiko
- Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Komite Dibawah Direksi

- Asset & Liabilities committee (ALCO)
- Risk Management committee
- Komite Kredit
- Komite Capital & Investasi
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Kebijakan Human Capital
- Komite Evaluasi Jabatan
- Komite Produk
- Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Dewan Komisaris

Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Perusahaan

Merupakan organ pendukung yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan berperan untuk membantu Dewan Komisaris serta Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing - masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM). Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan

Merupakan Unit kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi kepatuhan di BRI. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern

Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris dan insan Perseroan, kebijakan internal Bank dievaluasi dan disempurnakan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (policy owner) sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan Bank. Penyempurnaan dan evaluasi atas kebijakan internal Bank disusun sesuai dengan hirarki kebijakan internal Bank.

Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank meliputi:

- Rencana Jangka Panjang (RJP/Corporate Plan) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
- Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target-target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
- Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk Standard Operating Procedure yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/Three Lines of Defense yaitu:

- First Line of defense merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Second Line of defense merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

- c. Third Line of Defense merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada First Line dan Second Line of Defense serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.
- d. Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:
 - a. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
 1. Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep three line of defense.
 2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: risk assessment terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank.
 3. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, dual control dan sebagainya.
 4. Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam Data Warehouse (DWH)
 5. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
 - b. Kebijakan pengawasan internal, antara lain meliputi kebijakan audit Intern, Strategi Anti Fraud, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
 - c. Kebijakan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

- a. Panduan transparansi dan pengungkapan (Transparency and Disclosure Guidelines)
- b. Kebijakan Rahasia Bank.
- c. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.
- d. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

3. PROSES TATA KELOLA

Proses Tata Kelola suatu perusahaan merupakan mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wujud dari komitmen dan penerapan struktur tata kelola yang ada, guna mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPST/RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS diumumkan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar pertanggungjawaban, itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut di implementasikan melalui penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan mengikuti strategi Bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada anggaran dasar dan rencana kerja bidang SDM, dengan berpedoman prinsip-prinsip GCG, serta mendukung pencapaian tujuan usaha Bank.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank harus menjadi bagian dari sasaran strategis Bank, dan dilaksanakan dengan didasari prinsip-prinsip GCG.

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

6. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)
 Bank memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap teknologi Informasi yang handal, efektif, efisien, akurat dan terpercaya. Untuk itu Bank terus memastikan TI dikembangkan dengan berpedoman pada prinsip GCG dan dapat memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, serta mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.
7. Pengelolaan Anak Perusahaan
 Pengembangan usaha anak Perusahaan dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Dengan demikian pengelolaan anak Perusahaan harus berpegang pada pedoman dan praktik terbaik GCG, serta berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
8. Sosialisasi Kebijakan Bank
 Seluruh kebijakan Bank wajib disosialisasikan/dikomunikasikan kepada seluruh karyawan sesuai bidang kerja/tugasnya dengan baik dan lengkap sebagai acuan atas pelaksanaan pekerjaan, serta kepada pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

4. HASIL TATA KELOLA

Hasil pelaksanaan GCG terwujud dalam bentuk:

1. Kesisinambungan Usaha
 BRI menjaga keberlangsungan usaha melalui penerapan GCG best practices di seluruh elemen organisasi, dengan mengacu kepada prinsip GCG: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kewajaran dan Kesetaraan. Penerapan GCG tersebut turut mendukung kinerja keuangan BRI yang terjaga dengan baik.
2. Perlindungan Nasabah
 BRI senantiasa menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah sesuai prinsip GCG yang akan dibahas lebih rinci pada sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai Good Corporate Citizen.
 BRI tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan laba namun juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui program CSR. Program-program tersebut bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terhadap segmen Usaha Mikro dan kecil (UMK). Selain itu, BRI juga mendukung program lingkungan yang salah satunya melalui komitmen Green Banking dalam operasional harian dan Green Financing dalam proses pemberian kredit.
4. Kemanfaatan Bank Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional
 Selaras dengan tujuan visinya, yaitu Integrated Banking Solution, BRI berkomitmen memberikan pelayanan yang didukung kehandalan teknologi, jaringan yang luas serta peningkatan produk dan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Komitmen BRI untuk dekat dengan masyarakat dibuktikan dengan jaringan yang mudah dijangkau diantaranya dengan pengoperasian Teras Kapal, pemanfaatan kerjasama bersama agen BRILink dan unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga terus berinovasi dengan produk-produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat diantaranya seperti Teman Simpedes dan BRI mall.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

MEKANISME PENERAPAN GCG

Guna memastikan tercapainya GCG Excellent di BRI, maka implementasi GCG BRI dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perumusan



- ▶ *Komitmen GCG*
- ▶ *GCG Structure*
- ▶ *Infrastruktur GCG*
- ▶ *Sistem, Kebijakan dan Prosedur GCG*

Implementasi



- ▶ *GCG Awareness*
- ▶ *Budaya Perusahaan dan Kode Etik*
- ▶ *Organ pendukung Perusahaan*
 - *Fungsi Kepatuhan*
 - *Fungsi Audit Intern*
 - *Fungsi Manajemen Risiko*
- ▶ *GCG Tools*

Monitoring & Evaluasi



- ▶ *Assessment GCG*
- ▶ *Monitoring implementasi GCG*
- ▶ *Evaluasi Kinerja Perusahaan*
- ▶ *Evaluasi Rencana Bisnis Bank*
- ▶ *Penyempurnaan struktur, infrastruktur, sistem, kebijakan dan prosedur GCG*

GCG Excelent



- ▶ *GCG Excelent*
- ▶ *Budaya GCG*
- ▶ *GCG Citizen*
- ▶ *Keberlanjutan Perusahaan*
- ▶ *Value added bagi Stakeholder*
- ▶ *Service Excelent*
- ▶ *Most Valuable Bank*

Hubungan Struktur, Mekanisme dan Hasil Tata Kelola

Tata kelola perusahaan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu structure, process, dan outcome. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh BRI guna menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan meningkatkan outcome tata kelola untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Struktur Mekanisme Dan Hubungan Tata Kelola

STRUCTURE

Struktur, komposisi, kriteria, jumlah dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kriteria ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan wajib memiliki komite dan satuan kerja dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi organ perusahaan ditetapkan dalam bentuk Kebijakan, Pedoman, Tata Tertib, dan Prosedur.

Rencana strategi bisnis Bank sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.



PROCESS

Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta keberagaman Dewan Komisaris & Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal lebih optimal.

Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian intern, Dewan Komisaris membentuk 4 (empat) komite dalam pengawasan perusahaan. Direksi membentuk 3 (tiga) Satuan Kerja dalam pengendalian intern perusahaan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerja didasarkan pada level jabatan/bidang tugas serta pemisahan fungsi jabatan (segregation of duty) dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.

Penyusunan rencana strategi bank dilakukan secara komprehensif dan terukur yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada shareholders dan seluruh jenjang organisasi.



OUTCOME

Kinerja positif perseroan diantaranya pencapaian laba meningkat, kinerja keuangan yang baik dan kuatnya struktur modal perusahaan.

Komite dibawah Dewan Komisaris diantaranya Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawas Manajemen Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Satuan Kerja dibawah Direksi diantaranya Satuan Kerja Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Terdapat Daftar Uraian Jabatan pada setiap level jabatan dalam struktur organisasi perusahaan.

Rencana strategis Bank menggambarkan keberlanjutan perusahaan dan kontribusi positif kepada shareholders dan Stakeholders.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Dalam rangka menerapkan manajemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik, BRI senantiasa mengacu pada praktik terbaik (best practice) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, serta berkesinambungan dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai GCG, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran. Adapun tata kelola TI BRI mengacu pada ketentuan/regulasi :

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminasi Teknologi Informasi.
5. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016, tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
6. Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017, tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (tindak lanjut dari POJK No. 38/POJK.03/2016).

Tata kelola TI memiliki kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. S.874-DIR/PPT/10/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi BRI. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dan sistem pengendalian bagi seluruh Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk melaksanakan

penatakelolaan dan pengendalian risiko penggunaan TI di BRI.

Kebijakan tata kelola TI mencakup antara lain:

- a. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen dalam Pengelolaan Teknologi Informasi.
- b. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi.
- c. Aktivitas Operasional Teknologi Informasi.
- d. Penyediaan, Pengendalian Risiko dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
- e. Pengamanan Teknologi Informasi.
- f. Rencana Pemulihan Bencana.
- g. Layanan Perbankan Elektronik.
- h. Audit Internal Teknologi Informasi.
- i. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
- j. Penyediaan Jasa Teknologi Informasi.
- k. Pelaporan Teknologi Informasi.

Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola TI terdiri dari kerangka kerja utama (primary activities) maupun kerangka kerja pendukung (supporting activities) dalam memberikan nilai tambah kepada stakeholders. Penerapan best practice TI dalam lingkungan BRI, diantaranya meliputi:

1. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 2019.
2. Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019.
3. SNI ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS).
4. ISO 20000 Information Technology – Service Management.

Dalam merealisasikan visi dan misi TI 2018-2022, manajemen telah memberikan dan menetapkan arahan 5 pilar Functional Strategy dan turunannya melalui 9 Strategic Initiative dan 10 Program Utama sebagai berikut:

Tata Kelola Teknologi Informasi



Strategi Fungsional (SF)	Program Utama	Program Kerja
Nurture Great Digital Talent	Enhance ICT Competence & Digital Talent	Groom Digital Leaders & Talents
Drive Bimodal IT Governance	Develop Product Management Mindset	Enforce Product Approach in IT Business Alignment
	Advance Implementation BiModal IT	Impose Governance For Agile & DevSecOps Method
Build Future Ready Platform	Modernize CBS by managing impact vs risk	1. Enhance Finance & Core System 2. Implement Middleware Enhancement
	Accelerate Next-Gen ICT Architecture	Excel Network & IT Service Delivery
	Enhance Cyber security & Digital Resilience	Improve Privacy Management
Leverage Data Governance & Analytics	Excel Data Governance & Analytics	Enrich Big Data for Augment intelligent
Deliver Innovative Digital Bank	Deliver Digital Initiative	Thrive Digital Banking for MSME & Consumer
	Deliver Excellent Ecosystem Platform	Boost Digital Ecosystem Platform



TATA KELOLA PERUSAHAAN

EVALUASI DAN PENILAIAN GCG 2019

BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan GCG (GCG Assessment) secara berkala yang bertujuan untuk menjaga pelaksanaan GCG agar selalu sesuai dengan standar terbaik dan sejalan dengan Roadmap GCG Perseroan, serta sebagai pemenuhan atas komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas mekanisme GCG.

Evaluasi dan Penilaian GCG Dari Pihak Internal, Regulator dan Pihak Eksternal

BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian GCG melalui 2 pendekatan, yaitu penilaian oleh pihak eksternal dan pihak regulator yang mandatory sesuai POJK Tata Kelola bagi Bank Umum.

Evaluasi dari pihak internal dilakukan oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala sesuai prinsip pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi oleh regulator dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran) berdasarkan self-assessment yang dilakukan. Sedangkan penilaian dan evaluasi oleh pihak eksternal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk menilai penerapan GCG di BRI sesuai dengan standar best practice dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu penilaian secara self-assessment dengan penerapan prinsip GCG berdasarkan standar ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) juga dilakukan dan dikaji untuk senantiasa menuju kearah perbaikan berdasarkan international best practice.

Self-Assessment GCG 2019

Berdasarkan POJK No: 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No: 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan Penilaian sendiri (Self Assessment) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek Governance yaitu:

1. **Governance Structure**

Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders.

2. **Governance Process**

Penilaian bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders.

3. **Governance Outcome**

Penilaian bertujuan untuk menilai outcome yang memenuhi harapan Stakeholders Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian sendiri (Self Assessment) tersebut dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 11 faktor penilaian tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Penilaian Self Assessment GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian GCG selama tahun 2019 mencapai nilai komposit 2 (BAIK), dengan rincian sebagai berikut:

Evaluasi Dan Penilaian GCG 2019

Periode	Peringkat	Definisi
2019	PK-2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.

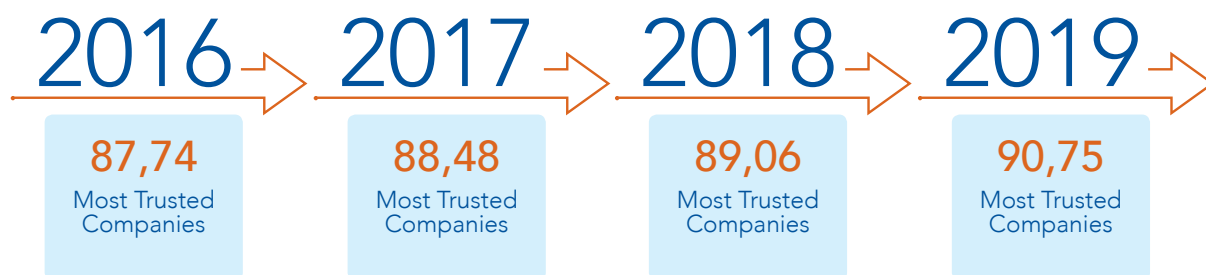
Analisa	
Struktur Tata Kelola	Aspek struktur tata kelola (Governance Structure) diBRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya struktur organisasi terdiri dari organ utama dan organ pendukung perusahaan, ketersediaan rencana bisnis, kebijakan, dan prosedur dalam pelaksanaan GCG.
Proses Tata Kelola	Aspek proses tata kelola (Governance Process) telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsisten melakukan review dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.
Hasil	Aspek hasil tata kelola (Governance Outcome) telah dilaksanakan dengan baik. Pengungkapan & transparansi informasi dilakukan secara memadai dan tidak adanya pelanggaran BPMK. Bank BRI secara kontinyu melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada stakeholders.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Evaluasi Dan Penilaian GCG 2019

Hasil Penilaian CGPI BRI selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dari keseriusan Manajemen BRI dalam melakukan peningkatan implementasi Good Corporate Governance secara berkesinambungan dalam rangka mendukung visi dan misi Perusahaan.



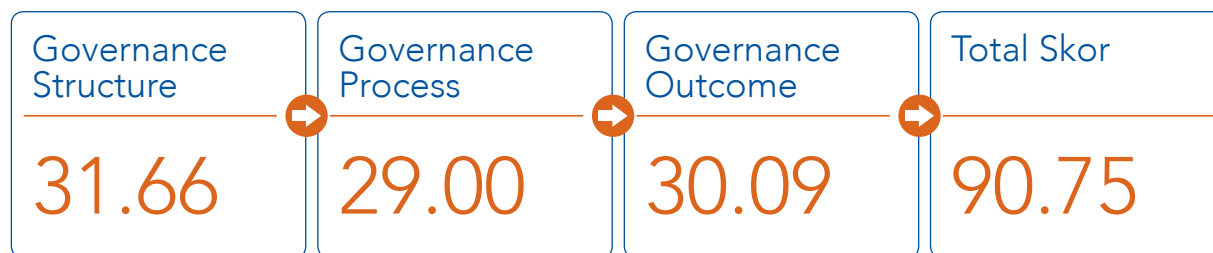
Corporate Governance Performance Index (CGPI)

CGPI diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Pada pelaksanaan CGPI tahun 2019 dengan tema "Penguatan Platform Bisnis dalam Kerangka GCG", telah dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

- Governance Structure meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
- Governance Process meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
- Governance outcome meliputi output, outcome dan impact dari proses implementasi GCG.

Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2019 mendapat skor 90,75 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (Most Trusted) dengan rincian penilaian sebagai berikut:



ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

BRI juga telah senantiasa meningkatkan prinsip-prinsip Corporate Governance sesuai kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard yang mengadopsi prinsip the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria ACGS dilakukan oleh pihak independen yaitu Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Evaluasi Dan Penilaian GCG 2019

Dari hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS pada tahun 2019, BRI memperoleh penghargaan dengan kategori The Best Financial Sector dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Penilaian Kinerja Direksi Melalui Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKU) BUMN

Penilaian Kinerja Direksi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dilakukan dengan metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang terdiri dari 6 (enam) proses dan 1 (satu) kategori hasil yaitu:

1. Kepemimpinan.
2. Perencanaan Strategi.
3. Fokus Pelanggan.
4. Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan.
5. Fokus Tenaga Kerja.
6. Fokus Operasi.
7. Hasil.

Hasil penilaian KPKU terhadap BRI beberapa tahun terakhir yaitu:

Hasil penilaian KPKU terhadap BRI beberapa tahun terakhir yaitu: BRI meraih nilai sebesar 696,75 pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 686,75 dengan tetap mempertahankan posisi BRI sebagai *Industri Leader*.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Evaluasi Dan Penilaian GCG 2019

INFRASTRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

BRI memiliki struktur tata kelola, diantaranya:

1. Anggaran Dasar BRI Nomor: 5 tanggal 3 Desember 2018 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 06 Desember 2018.
2. Arsitektur Kebijakan BRI disahkan pada tahun 2016.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kode Etik BRI.
4. Tata Tertib (Board Manual) Dewan Komisaris.
5. Tata Tertib (Board Manual) Direksi.
6. Piagam Komite Audit.
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Piagam Komite Pengawas Manajemen Risiko.
9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kebijakan Good Corporate Governance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep: S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.
13. Surat Keputusan Nokep: S.209-DIR/DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KEMAL-BRI).
14. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.08-DIR/KPT/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Kebijakan Whistleblowing System BRI.
15. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/DKP/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
16. Surat Edaran Direksi BRI No: S.05-DIR/MOP/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Strategi Anti Fraud BRI.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.
18. Pedoman Penyusunan Bisnis Bank.
19. Surat Keputusan Nokep: S.296-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 aspek, 8 prinsip dan 24 rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut:

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
A. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.				
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic voting.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (one vote one share). Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan Petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir. Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui website perseroan. Prosedur pengambilan suara (voting) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada website Perusahaan. Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	RUPST Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi. Keterangan: Memenuhi
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPS LB dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Risalah rapat dipublikasikan dalam website perseroan maksimal 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 17 Mei 2019 untuk RUPST Bank. Publikasi risalah rapat dimuat dalam harian Kontan, Tempo dan Investor Daily, serta melalui website Perseroan yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun (www.bri.co.id). Risalah rapat RUPS LB dipublikasikan dalam website perseroan maksimal 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 4 September 2019. Publikasi risalah rapat dimuat dalam Bisnis Indonesia dan Jakarta Post, serta melalui website Perseroan yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun (www.bri.co.id). Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya analyst meeting, public expose bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui Website Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com). Keterangan: Memenuhi
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di upload dalam situs web perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com. Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
B. FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS				
	Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2019 adalah 8 (Delapan) orang yang terdiri 5 (lima) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris non Independen. Keterangan: Memenuhi
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI. Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self Assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya Self Assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) yang tercantum dalam Board Charter sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan Self Assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) yang tercantum dalam Board Manual sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2019 pada Bab Dewan Komisaris. Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2019 Keterangan:Memenuhi
C. FUNGSI DAN PERAN DIREKSI				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) Direksi Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Penilaian kemampuan & kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini. Keterangan: Memenuhi
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Sesuai POJK 06/2015 tentang Transparansi dan Publikasi laporan bank, Direktur yang membidangi/ membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Haru Koesmahargo memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain: Pendidikan: Meraiah gelar MBA, Investment Banking, dari Emory University, Amerika Serikat (2000). Sarjana Teknik Industri Pertanian, dari Universitas Brawijaya, Malang (1989). Pengalaman: Kepala Divisi Treasury, General Manager Kantor Cabang Luar Negeri BRI New York, Presiden Komisaris BTMU-BRI Finance. Tambahkan pendidikan terkait bidang akuntansi Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) yang tercantum dalam Board Charter sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan Self Assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan Self Assessment atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2019. Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada Board Charter. Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI. Keterangan: Memenuhi
D. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN				
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan BRI tentang Insider Trading diatur dalam: Kode Etik BRI (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/ BRI/12/ 2013 dan Nomor S.65 DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013). Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02 – KOM/ BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan Strategi Anti fraud di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.05-DIR/MOP/03/2018 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Strategi Anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan, dan sanksi, Pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut. Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait praktik korupsi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep:S.11-DIR/ DKP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI bersama KPK dalam pencegahan korupsi. Keterangan: Memenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.35-DIR/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. BRI memiliki mengembangkan aplikasi manajemen vendor yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, monitoring, pemeliharaan rekanan (Vendor Maintenance) sampai dengan evaluasi performance rekanan sehingga BRI mempunyai database dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI. Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur. Keterangan: Memenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i>	ebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Kebijakan mengenai <i>Whistleblowing System</i> di BRI yang diatur Surat Edaran Direksi Nomor.S.08-DIR/KPT/05/2018. Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> BRI mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan & kerahasiaan pelapor, unit pengelola <i>Whistleblowing System</i>. Pembahasan terkait. Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2019. Keterangan: Memenuhi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
E. KETERBUKAAN INFORMASI				
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada Stakeholders melalui media teknologi informasi, selain website Perseroan. Omni Channel BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia yaitu: Tatap muka melalui Customer Service di seluruh Unit kerja operasional BRI Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400 / Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017 SMS 0812 12 14017 Web chat melalui website www.bri.co.id Email callbri@bri.co.id Telegram 0812 12 14017 Internet Banking di https://ib.bri.co.id Twitter di @kontak_bri Facebook di Bank BRI Official Keterangan: Memenuhi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2019 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Keterangan: Memenuhi

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme governance dan budaya Perusahaan.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan corporate governance, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pengawas Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepemimpinan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek governance yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan Fit and Proper Test. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Enterprise Risk and Portofolio Management dan Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Pasar. Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pengawas Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, monitor dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pengawas Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semester.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan corporate governance dan risk management.	Struktur remunerasi Bank BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi Bank BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2019 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan governance dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi Bank BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui website perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Public Expose.

RENCANA PENINGKATAN GCG 2020

Rencana peningkatan GCG BRI pada tahun 2020:

1. Melakukan penerapan panduan Cegah Korupsi.
2. Melakukan pengkinian terhadap kebijakan-kebijakan pendukung tata kelola antara lain yaitu, Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI, Kebijakan Kode Etik BRI, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, dan Piagam Kepatuhan.
3. Melakukan enhancement pada aplikasi pendukung tata kelola antara lain, GCG online system, BRISmile, BRISStars, BRIOPRA.
4. Meningkatkan Internalisasi 5 core value Budaya Perusahaan ke seluruh pekerja.
5. Meningkatkan penerapan tata kelola di dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Monitoring implementasi GCG

Monitoring implementasi GCG Bank BRI dilakukan oleh beberapa organ perusahaan diantaranya:

Fungsi Kepatuhan

Memiliki fungsi untuk membantu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Satuan Kerja Audit Intern

SKAI memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance.

Komite Audit

Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (internal control system), efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat umum Pemegang saham (RUPS) sebagai salah satu organ utama Bank memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BRI. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan mengacu pada batasan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BRI.

Dasar Hukum RUPS

Pelaksanaan RUPS BRI mengacu dan telah sesuai pada ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Bursa efek Indonesia No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban Penyampaian Informasi.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

Hak Pemegang Saham

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu

1. Saham Seri A Dwiwarna
Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
2. Saham Seri B.
Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan asset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Diluar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

Rapat Umum Pemegang Saham

2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
 3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
 4. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
 5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 6. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
 7. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 8. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan /aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
 9. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
 - a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait
 - c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
 3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan hubungan dengan pemegang saham

Hubungan dengan Pemegang saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dalam bagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Segala komunikasi dengan para Pemegang Saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua Pemegang Saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (equitable treatment) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

- a. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
- b. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Investor Relations antara lain melalui interaksi langsung pada acara Public Expose, Non-deal Roadshow, Press Conference, atau 1-on-1 Meeting, Conference Call, dan Email, serta Dokumen yang tersedia pada website Perusahaan, Investor Relations, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited, dan Highlights Kinerja Keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
 - a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

- c. Jumlah komisaris independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 5 orang Komisaris dari total 9 orang Komisaris.
- d. Pemegang saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank, diantaranya informasi kinerja perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

PENYELENGGARAAN RUPS 2019

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan POJK. 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 hari sebelum RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

Prosedur Kuorum

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1	Pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2	Persetujuan Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3	Perubahan terkait Direksi, Dewan Komisaris, Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
5	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6	Di luar dari Mata Acara 1 s.d 5 tersebut di atas.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Tata Tertib RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Tata tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara RUPS.
3. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/ tanggapan dari pemegang saham.
4. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan/ tanggapan selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
5. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

BRI telah menyediakan akses terhadap Informasi untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya:

1. RUPS, sebagai media di mana Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Pemegang Saham, menyampaikan Informasi mengenai Perseroan dan memungkinkan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
2. Media elektronik seperti Situs web (website) Bursa Efek dan Situs web (website) Perseroan yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dimana tersedia berbagai dokumen, laporan dan publikasi yang dapat dengan mudah diunduh baik oleh Pemegang Saham maupun publik.
3. Email dan Kontak telepon resmi Perseroan untuk menyampaikan dan mengetahui Informasi terkini Perseroan.
4. Media komunikasi lain agar Pemegang Saham dapat terus memperoleh informasi terkini diantaranya conference call, Investor/Analyst meeting, non-deal roadshow, conference, public expose dan Investor/Analyst gathering.

Upaya Mengajak Pemegang Saham Hadir Dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarkan secara tepat waktu melalui website Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di website Perusahaan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan Pemungutan Suara RUPS

1. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara yang sedang dibicarakan.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
3. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.
4. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan RUPS, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

Pemungutan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu: Notaris Fathiah Helmi SH and PT Datindo Entrycom.

Notaris

Notaris bertugas membuat risalah/berita acara RUPS BRI. Dalam setiap kegiatan RUPS, Notaris secara langsung menyaksikan dan mendengar proses berjalannya RUPS serta memberikan pendapat/saran/koreksi yang diperlukan sehubungan dengan RUPS.

Biro Administrasi Efek (pihak independen)

Biro Administrasi Efek Perseroan adalah pihak independen yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan pemilik efek, dan secara berkala memberikan pengkinian laporan kepada perusahaan. Dalam proses penyelenggaraan RUPS, tugas Biro Administrasi Efek antara lain:

- a. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) bagi karyawan dan pemegang saham yang sahamnya dalam omnibus account serta mendistribusikan KTUR tersebut ke alamat yang bersangkutan.
- b. Melakukan registrasi dan validasi Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.
- c. Melakukan perhitungan suara baik kuorum maupun pengambilan keputusan pada setiap mata acara dengan sistem elektronik.
- d. Menyediakan materi cetakan sehubungan dengan administrasi pemungutan suara.

Selain Notaris dan Biro Administrasi Efek, RUPS juga dihadiri oleh pihak independen lain sesuai dengan mata acara yang diselenggarakan dalam RUPS diantaranya:

1. Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik bertindak sebagai pihak independen yang melakukan audit atas penyajian laporan keuangan BRI secara wajar dan menyampaikan masukan serta saran-saran perbaikan kepada Manajemen.
2. Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum
Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum adalah pihak independen yang selalu terlibat dalam hal terdapat aksi korporasi seperti penerbitan efek bersifat hutang, merger, akuisisi, pengambilalihan, dan lainnya. Konsultan Jasa Penilai Independen bertugas memastikan kewajaran nilai transaksi sedangkan Konsultan Hukum memastikan transaksi yang akan dilakukan telah sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2019

BRI menyelenggarakan RUPS pada tahun 2019 sebanyak 3 kali yaitu, RUPSLB pertama pada tanggal 3 Januari 2019, RUPST pada tanggal 15 Mei 2019 dan RUPSLB kedua pada tanggal 2 September 2019.

Pelaksanaan RUPST 2019 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019, dan telah memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan RUPST 15 Mei 2019

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
26.03.2019	Pemberitahuan RUPST kepada OJK	Pemberitahuan RUPST kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
05.04.2019	Pengumuman RUPST	Pengumuman RUPST 14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Investor Daily, dan Kontan) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
23.04.2019	Pemanggilan RUPST	Pemanggilan RUPST 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Investor Daily, dan Kontan) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
15.05.2019	RUPST	RUPST 2019 diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210.	
17.05.2019	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPST	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Bisnis Indonesia, Kontan, Tempo, Investor Daily) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
17.05.2019	Penyampaian Risalah Rapat	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.	

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (voledig acquit et decharge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Tahun Buku 2018.
Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
Ketiga	Penetapan Remunerasi/Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 serta Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Keempat	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.
Kelima	Perubahan Pengurus Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan total jumlah 105.143.889.577 saham setara dengan 86,02% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Dewan Komisaris**	1. Andrinof A. Chaniago 2. – 3. Hadiyanto 4. Nicolaus Teguh Budi H 5. A. Fuad Rahmany 6. A. Sonny Kerat 7. Mahmud 8. Rofikoh Rokhim	1. Komisaris Utama/Independen 2. Wakil Komisaris Utama/Komisaris 3. Komisaris 4. Komisaris 5. Komisaris Independen 6. Komisaris Independen 7. Komisaris Independen 8. Komisaris Independen
Direksi	1. Suprajarto 2. Sunarso *** 3. Mohammad Irfan 4. R. Sophia Alizsa 5. Haru Koesmahargyo 6. Sis Apik Wijayanto 7. Supari 8. Indra Utoyo 9. Priyastomo 10. Osbal Saragi R. 11. Ahmad Solichin Lutfiyanto 12. Handayani	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur 4. Direktur 5. Direktur 6. Direktur 7. Direktur 8. Direktur 9. Direktur 10. Direktur 11. Direktur 12. Direktur

Catatan: RUPS dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI.

*) Gatot Trihargo telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 29 April 2019.

**) Dari delapan anggota Dewan Komisaris, satu anggota tidak menghadiri Rapat dikarenakan telah ditunjuk menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 29 April 2019.

***) Efektif setelah persetujuan fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat Umum Pemegang Saham

Kesempatan mengajukan pernyataan/pendapat & Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independent (Biro Administrasi Efek). Dalam RUPSLB jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Opini/ Pertanyaan
Kesatu	104.700.714.747 saham (99,56%)	21.450.300 saham (0,02%)	421.724.530 saham (0,40%)	3 (tiga) orang
Kedua	104.842.666.312 saham (99,71%)	283.166.535 saham (0,27%)	18.056.730 saham (0,02%)	3 (tiga) orang
Ketiga	96.832.038.745 saham (92,09%)	5.879.430.165 saham (5,59%)	2.432.420.667 saham (2,31%)	Tidak Ada
Ke-empat	98.917.841.212 saham (94,07%)	5.741.241.215 saham (5,46%)	484.807.150 saham (0,46%)	1 (satu) orang
Kelima	71.302.557.999 saham (67,81%)	29.918.688.037 saham (28,45%)	3.922.643.541 saham (3,73%)	1 (satu) orang

Berita Acara RUPST - Akta No. 40 tanggal 15 Mei 2019

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Kesatu	1	Hendra Untung	25	BBRI sudah ikut Big Data, apa hasil yang sudah di dapat? Biasanya hasil analisa dengan big data akan membuka/memberi data yang mengejutkan dan tidak terduga sebelumnya. Apa tidak takut disalip Fintech menghimpun dana dengan cara lama akan habis dilindas cara Fintech. Misalnya SAKUKU, bisa makan berbagai makanan dengan murah, juga GOJEK.	Memang secara khusus kita sudah mengembangkan Bid Data, dan beberapa hal sudah kita lakukan seperti misalnya bagaimana kita membuat <i>credit scoring</i> kemudian juga terkait dengan <i>early warning system</i> , kemudian juga yang sudah kami sampaikan berkenaan dengan <i>assessment</i> ini sangat bermanfaat dan ke depan kita akan terus mengembangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan Big Data dan tidak hanya sampai di sini karena <i>fraud detection</i> pun kita tangani dari hasil Big Data. Bapak Ibu, tadi Bapak Haru sudah menyampaikan bahwa kita sudah punya BRI Ventures yang kita ambil kemarin. Ini memang kita akan kembangkan untuk platform-platform dan aplikasi yang terkait dengan Fintech termasuk juga start up. Jadi kita akan kembangkan kesana dan sebelum itu juga memang sudah banyak kerja sama kita dengan beberapa Fintech dan ini tentu akan terus kita dorong dan buat BRI, Fintech bukan kompetitor yang kita khawatirkan namun justru Fintech kita gandeng, karena justru teknologi kita, jaringan kerja kita, potensi ceruk pasar dan sebagainya masih memungkinkan untuk bekerja sama dengan Fintech.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Berita Acara RUPST – Akta No. 40 tanggal 15 Mei 2019

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
	2	Rataoelam P. Sianturi	3,000	Usul agar RUPS ini dimulai tepat waktu. Tadi terlambat 40 menit. Kami sudah hadir 20 menit sebelum pukul 14.00 WIB. Jika tepat waktu sesuai tag line melayani dengan sepenuh hati. Cara bertanya agar langsung saja, jangan tertulis, makan waktu. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank adalah 89,67%, tetapi keseluruhan 94,02%, mohon penjelasan.	Untuk usulan agar RUPS agar tepat waktu, insya Allah ke depan akan kita perbaiki agar tepat waktu. Ini ada beberapa hal yang kadang kadang membuat sedikit molor karena kondisi satu dan lain hal. Terkait dengan LDR Bank only tercatat 89,34% dan kalau konsolidasi, LDR kita adalah 90,4%. Kemudian ini dimanfaatkan secara maksimal bukan hanya oleh BRI tetapi juga oleh BRI Grup karena kita juga punya BRISyariah, BRI Agro.
	3	Rendy Brayen Latuputty	600	Belakangan ini ramai diperbincangkan bahwa Perseroan bersama 2 Bank BUMN lain mendapat pinjaman senilai USD3 miliar (dari China Development Bank (CDB), mengapa dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 tersebut tidak diungkapkan secara memadai khususnya terkait penggunaan pinjaman tersebut dan rencana pelunasannya?	Yang terkait dengan China Development Bank (COB) sebetulnya ini sudah kita terima agak lama tahun 2015. Jadi tahun-tahun sebelumnya sudah masuk dalam Laporan Tahunan kita bukan baru tapi 2015 kurang lebih sudah 4 (empat) tahun.
Kedua	1	Hadi Legowo	2.900	Laba Rp32 triliun, Earning Per Share (EPS) per saham berapa? Dividen per saham berapa?	Laba Rp32 triliun (tiga puluh dua triliun Rupiah), Earning Per Share EPS per saham. EPS per saham menjadi Rp263,- per lembar dan dividen per lembar menjadi Rp131,14,- per lembar saham.
	2	Ni Luh Mariani Tirtasari	600	Berapa dividen per lembar saham yang diusulkan? Apakah dalam waktu dekat ada rencana Perseroan akan melepas saham Treasury sehingga jumlah pembagi dividen menjadi lebih besar (dividen per lembar saham menjadi lebih kecil)?	Dividen per lembar saham minimal sebesar Rp131, 14,- per lembar saham maksimal Rp132,3, per lembar saham. Rencana melepas treasury stock tergantung dari eksekusi masing-masing pemegang saham Management Stock Option Program (MSOP), jadi kita sudah memberikan MSOP, dan tentu pelepasan treasury stock tergantung pada kondisi terakhir nanti ketika masing-masing pemegang MSOP mengeksekusi MSOP nya.
Keempat	1	Rendy Brayen Latuputty	600	Untuk kepentingan transparansi, berapa besar honorarium (fee) atas jasa audit untuk tahun buku 2018? Parameter dan indikator apa saja yang digunakan komite audit dalam membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan KAP?	Untuk tahun 2018, datanya sudah ada tahun lalu sekitar Rp17 miliar, angka persisnya ada di laporan tahunan. Tentunya sekarang rekomendasi Dewan Komisaris menyangkut kompetensi dan scope-nya juga dilihat sesuai dengan apa yang akan dilaporkan biasanya selain laporan tahunan, ada juga laporan tahunan interim, kemudian kita lihat juga siapa saja anggota-anggota Akuntan Publiknya, jadi kita lihat kompetensi dan juga independensi. Independensi selama ini kita evaluasi sebelum pengadaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Berita Acara RUPST – Akta No. 40 tanggal 15 Mei 2019

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Kelima	1	Rendy Brayen Latuputty	600	Apakah anggota Dewan Komisaris yang diajukan akan rangkap jabatan, mengingat beliau-beliau saat ini sedang menduduki jabatan-jabatan tertentu? Apakah hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja Perseroan, terlebih lagi saat ini sudah ada anggota Dewan Komisaris yang rangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal di salah satu Kementerian.	Akan diberikan jawaban secara tertulis.

Keputusan RUPST 15 Mei 2019

MATA ACARA KESATU

Keputusan	1.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Nomor 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan penawaran umum Obligasi Subordinasi III selama tahun 2018. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan Nomor 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/111/2019 tanggal 6 Maret 2019.
	2.	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Status	Telah diselesaikan	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KEDUA

Keputusan	1.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018 sebesar Rp32.351.133.341.945 yaitu sebagai berikut: Dividen sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham sebesar Rp9.179.798.381.218 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status	Telah diselesaikan

MATA ACARA KETIGA

Keputusan	1.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2019.

Status	Telah diselesaikan

MATA ACARA KEEMPAT

Keputusan	1.	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2019 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
	3.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status	Telah diselesaikan

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KELIMA

Keputusan	1.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Tuan Gatot Trihargo -sebagai Wakil Komisaris Utama 2) Tuan Mahmud -sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
	2.	Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama 2) Tuan Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen
	3.	Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
	4.	Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago 2. Wakil Komisaris Utama, Wahyu Kuncoro 3. Komisaris, Nicolaus Teguh Budi Harjanto 4. Komisaris, Hadiyanto 5. Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim 6. Komisaris Independen, Hendrikus Ivo 7. Komisaris Independen, A. Sony Keraf 8. Komsaris Independen, A. Fuad Rahmany
	5.	Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka "yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
	6.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
Status	Telah diselesaikan	

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA 2019

BRI menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019, sebagai berikut:

RUPSLB Pertama, 3 Januari 2019

Pelaksanaan RUPSLB 2019 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019, dan telah memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014, dengan tahapan sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Tahapan RUPSLB Pertama, 3 Januari 2019

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
19.11.2018	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
27.11.2018	Pengumuman RUPSLB	Pengumuman RUPSLB 14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Kompas, Kontan & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
12.12.2018	Pemanggilan RUPSLB	Pemanggilan RUPSLB 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Bisnis Indonesia, & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
03.01.2019	RUPST	RUPST 2019 diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2019 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210.	
05.01.2019	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Bisnis Indonesia, & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
07.01.2019	Penyampaian Risalah Rapat	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPSLB.	

Mata Acara

Kesatu	Pemaparan dan Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018.
Kedua	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan total jumlah 104.054.098.314 saham setara dengan 85,1247% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Dewan Komisaris**	- Andrinof A. Chaniago - Gatot Trihargo - Hadiyanto - Nicolaus T.B. Harjanto A. Fuad Rahmany A. Sonny Keraf - Mahmud - Rofikoh Rokhim	- Komisaris Utama/ Komisaris Independen - Wakil Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris - Komisaris Independen - Komisaris Independen - Komisaris Independen - Komisaris Independen

Rapat Umum Pemegang Saham

Direksi	1.	Suprajarto	1.	Direktur Utama
	2.	Haru Koesmahargyo	2.	Direktur
	3.	Indra Utoyo	3.	Direktur
	4.	Priyastomo	4.	Direktur
	5.	Supari	5.	Direktur
	6.	Kuswiyoto	6.	Direktur
	7.	Handayani	7.	Direktur
	8.	Mohammad Irfan	8.	Direktur
	9.	Osbal Saragi R.	9.	Direktur
	10.	Sis Apik Wijayanto	10.	Direktur
	11.	R. Sophia Alizsa	11.	Direktur
	12.	A. Solichin Lutfiyanto	12.	Direktur

Catatan: RUPS dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI.

*) Efektif setelah persetujuan fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesempatan mengajukan pernyataan/pendapat & Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independent (Biro Administrasi Efek). Dalam RUPSLB jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Opini/ Pertanyaan
Kesatu	Hanya bersifat laporan sehingga tidak dibuka sesi tanya jawab.			
Kedua	97.334.914.783 saham (93,54%)	4.955.816.500 saham (4,76%)	1.763.367.031 saham (1,69%)	Tidak Ada

Keputusan RUPSLB 3 Januari 2019

MATA ACARA KESATU

Keputusan 1. Mata Acara Rapat Kesatu bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Status Telah diselesaikan

MATA ACARA KEDUA

- Keputusan**
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Jefry J. Wurugian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan
 2. Memberhentikan dengan hormat Kuswiyoto sebagai Direktur Corporate Banking dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat pada jabatan tersebut.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KEDUA

3. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama, dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi, yang berada dalam lingkup Direktorat: a) Direktorat Mikro dan Kecil, b) Direktorat Jaringan dan Layanan, c) Direktorat Teknologi Informasi dan Operasi, serta d) Direktorat Hubungan Kelembagaan.
4. Mengangkat Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.
5. Masa jabatan Wakil Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, maka susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago
 Wakil Komisaris Utama, Gatot Trihargo
 Komisaris, Hadiyanto
 Komisaris, Nicolaus T.B. Harjanto
 Komisaris Independen, A. Fuad Rahmany
 Komisaris Independen, A. Sonny Kerat
 Komisaris Independen, Mahmud
 Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim

Anggota Direksi

Direktur Utama, Suprajarto
 Wakil Direktur Utama, Sunarso
 Direktur, Mohammad Irfan
 Direktur, R. Sophia Alizsa
 Direktur, Haru Koesmahargyo
 Direktur, Sis Apik Wijayanto
 Direktur, Supari
 Direktur, Indra Utoyo
 Direktur, Priyastomo
 Direktur, Osbal Saragi R.
 Direktur, A. Solichin Lutfiyanto
 Direktur, Handayani

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Status	Telah diselesaikan

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPSLB Kedua, 2 September 2019

Pelaksanaan RUPSLB 2019 dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, telah memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan RUPSLB Kedua, 2 September 2019

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
17.07.2019	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
25.07.2019	Pengumuman RUPSLB	Pengumuman RUPSLB 14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Kompas, Kontan & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
09.08.2019	Pemanggilan RUPSLB	Pemanggilan RUPSLB 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Kompas, Kontan & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
02.09.2019	RUPST	RUPST 2019 diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210.	
04.09.2019	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Bisnis Indonesia, & Jakarta Post) www.idx.co.id dan www.bri.co.id.	
10.09.2019	Penyampaian Risalah Rapat	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPSLB.	

Mata Acara

Kesatu	Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.
Kedua	Persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.
Ketiga	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan total jumlah 106.163.182.674 saham setara dengan 86,74% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Dewan Komisaris**	1. Andrinof A. Chaniago 2. Wahyu Kuncoro 3. Nicolaus Teguh Budi Harjanto 4. Hadiyanto 5. Rofikoh Rokhim 6. Hendrikus Ivo 7. A. Sony Keraf 8. A. Fuad Rahmany	1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen 2. Wakil Komisaris Utama 3. Komisaris 4. Komisaris 5. Komisaris Independen 6. Komisaris Independen 7. Komisaris Independen 8. Komisaris Independen
Direksi	1. Sunarso* 2. Mohammad Irfan 3. R. Sophia Alizsa 4. Haru Koesmahargyo 5. Sis Apik Wijayanto 6. Supari 7. Indra Utoyo 8. Priyastomo 9. Osbal Saragi R. 10. Ahmad Solichin Lutfiyanto 11. Handayani	1. Plt. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur 5. Direktur 6. Direktur 7. Direktur 8. Direktur 9. Direktur 10. Direktur 11. Direktur

Catatan: RUPS dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI.

*) Efektif setelah persetujuan fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesempatan mengajukan pernyataan/pendapat & Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independent (Biro Administrasi Efek). Dalam RUPSLB jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Opini/ Pertanyaan
Kesatu	—	—	—	—
Kedua	105.889.904.910 saham (99,74%)	5.066.900 saham (0,005%)	268.210.864 saham (0,25%)	Tidak Ada
Ketiga	73.165.621.579 saham (68,92%)	29.053.425.378saham (27,37%)	3.944.135.717saham (3,72%)	2 (dua) orang

Rapat Umum Pemegang Saham

Berita Acara RUPSLB – Akta No. 1 tanggal 2 September 2019

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Ketiga	1	M. Saman selaku kuasa dari Andry Ansjori	4.000	a. Pelaksanaan Rapat: 1. Seharusnya tata tertib juga mencantumkan sanksi kepada Perseroan atas keterlambatan Rapat yang lebih dari 2 (dua) jam sebagaimana sanksi terhadap Pemegang Saham jika datang terlambat. Mahon dijelaskan alasan keterlambatan secara jujur. 2. Jika keterlambatan Rapat melebihi dari 2 (dua) jam, seandainya Bapak-Bapak sendiri sebagai Pemegang Saham publik, bagaimana perasaan Bapak, apakah merasa kesal atau biasa-biasa saja? b. 1. Apa alasan pemberhentian yang seharusnya dicantumkan agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang berlebihan. 2. Apakah pihak yang akan memangku jabatan tertentu (Direktur/ Dewan Komisaris) pada perusahaan BUMN Tbk telah mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari Kementerian BUMN/ pihak berwenang sebelum Rapat?	Akan diberikan jawaban secara tertulis.
	2	Laurensia Irianti selaku Kuasa dari Rahadi Santoso	8.189.500	Apakah pemberhentian/mutasi jabatan juga dikembalikan mekanismenya ke OJK dalam hal penilaian kinerjanya atau mutlak (tanpa keterlibatan OJK) diputuskan oleh Pemegang Saham Mayoritas?	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPSLB 2 September 2019

MATA ACARA KESATU

Keputusan 1. Mata Acara Rapat Kesatu bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Status Telah diselesaikan

MATA ACARA KEDUA

Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Status Telah diselesaikan

MATA ACARA KETIGA

Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:
Perubahan Dewan Komisaris Perseroan:

1. Mengangkat Nyonya Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris
2. Masa jabatan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama/Komisaris Independen, Andrinof A. Chaniago
 - b. Wakil Komisaris Utama, Wahyu Kuncoro
 - c. Komisaris, Nicolaus Teguh Budi Harjanto
 - d. Komisaris, Hadiyanto
 - e. Komisaris, RR. Loeke Larasati A
 - f. Komisaris Independen, Rofikoh Rokhim
 - g. Komisaris Independen, A. Sonny Keraf
 - h. Komisaris Independen, A. Fuad Rahmany
 - i. Komisaris Independen, Hendrikus Ivo
4. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 - baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KETIGA

2. Perubahan Direksi Perseroan:
 1. Mengukuhkan dengan hormat pemberhentian Suprajarto sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Sis Apik Wijayanto, sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan
 - b. Osbal Saragi Rumahorbo, sebagai Direktur Jaringan dan Layanan
 - c. Mohammad Irfan, sebagai Direktur Manajemen Risiko
 - d. R. Sophia Alizsa, sebagai Direktur Human Capital
 3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Semula Direktur Mikro dan Kecil, menjadi Direktur Bisnis Mikro
 - b. Semula Direktur Ritel dan Menengah, menjadi Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah
 - c. Semula Direktur Hubungan Kelembagaan, menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
 - d. Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi, menjadi Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi
 4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Sunarso, semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama
 - b. Priyastomo, semula Direktur Mikro dan Kecil menjadi Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah
 - c. Supari, semula Direktur Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Mikro
 - d. Indra Utoyo, semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi
 - e. Ahmad Solichin Lutfiyanto, semula Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Jaringan dan Layanan yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2019, RUPS Tahunan Tahun 2016, RUPS Tahunan Tahun 2018 dan RUPS Tahunan Tahun 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
 5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama
 - b. Herdy Rosadi Harman, Direktur Human Capital
 - c. Agus Noorsanto, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
 - d. Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko
 - e. Azizatul Azhimah, Direktur Kepatuhan
 6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KETIGA

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Anggota Direksi
 - a. Direktur Utama, Sunarso
 - b. Wakil Direktur Utama, Catur Budi Harto
 - c. Direktur Keuangan, Haru Koesmahargyo
 - d. Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, Agus Noorsanto
 - e. Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah, Priyastomo
 - f. Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi, Indra Utoyo
 - g. Direktur Bisnis Mikro, Supari
 - h. Direktur Jaringan dan Layanan, Ahmad Solichin Lutfiyanto
 - i. Direktur Kepatuhan, Azizaton Azhimah
 - j. Direktur Manajemen Risiko, Agus Sudiarto
 - k. Direktur Konsumer, Handayani
 - l. Direktur Human Capital, Herdy Rosadi Harman
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. 1Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status	Telah diselesaikan

REALISASI RUPS

RUPS Tahun sebelumnya (RUPST 2016)

Terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) mata acara pada RUPST tahun 2016 yaitu: Mata Acara kelima, Penyaluran ESOP periode pertama telah diberikan di triwulan kedua tahun 2019 (bulan Mei).

RUPS TAHUN BUKU 2018

Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2018 telah direalisasikan seluruhnya (100%) sehingga tidak ada lagi putusan pada RUPS Tahunan 2018 yang perlu direalisasikan lebih lanjut.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang dewan komisaris Badan Usaha Milik negara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik negara.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 / POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 / SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 / POJK.03/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Umum.
- i. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan & Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS (BOC CHARTER)

Dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki podoman berupa Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan disahkan melalui SK Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 dengan rincian sebagai berikut:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris secara kolegal melakukan pengawasan terhadap fungsi pengelolaan Perseroan. Peran Dewan Komisaris mencakup aktivitas memberikan nasehat dan arahan kepada Direksi atas penerapan kebijakan-kebijakan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas usaha sesuai strategi dan tujuan BRI.

Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan.

Komisaris Utama

1. Memimpin pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring atas pelaksanaan program Kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan pemberhentian seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari :
 - a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP);
 - b. Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), dan
 - d. Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai peraturan perundangan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan; yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada regulator.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

Dewan Komisaris

7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
8. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
9. Menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
14. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
15. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
16. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
17. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi;
18. Melakukan Pengawasan Aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
19. Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengevaluasi dan mengambil keputusan atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
20. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
21. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT;
22. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank;
23. Memantau Tingkat Kesehatan Bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha;
24. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
25. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

26. Menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh Pengurus; menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; dan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
28. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perseroan setiap triwulan kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna;
29. Memastikan bahwa komite - komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif; dan
30. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ruang Lingkup Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya yang meliputi:

1. Pengawasan pasif, yaitu melalui telaah atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Manajemen, surat-surat yang diterima dari OJK, Bank Indonesia dan lembaga lain serta informasi lain yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya.
2. Pengawasan aktif, yaitu melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Komite Komisaris bersama Direktur dan pejabat terkait, rapat dengan auditor eksternal dan pihak ketiga lainnya, serta melalui kunjungan kerja ke Unit Kerja.

Strategi dan Kebijakan	Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Tata Kelola Perusahaan	Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: • Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS. • Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS. • Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
Manajemen risiko	Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko dengan menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
Kepatuhan	Memberitahukan kepada regulator mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/ atau oleh Direktur Kepatuhan kepada regulator serta melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Dewan Komisaris

Masa Jabatan

Masa jabatan Komisaris satu periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama satu periode dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS.

Etika

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Apabila terdapat suatu benturan kepentingan, maka setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut; dan
4. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi kode etik Perseroan.

Waktu Kerja

Waktu kerja Dewan Komisaris adalah saat namun tidak terbatas pada Rapat Dewan Komisaris dan waktu kunjungan kerja Dewan Komisaris.

KRITERIA, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kriteria, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi.

Kriteria

Kriteria Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Kualifikasi Umum	1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. Dinyatakan pailit. b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Jabatan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila: a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya. b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
	Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.
Persyaratan Integritas	Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Akhlak dan moral yang baik. 2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
Pemenuhan POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Dewan Komisaris

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya. 2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan. 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Secara internal, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Pernyataan Integritas yang didokumentasikan oleh BRI.

Sistem dan Prosedur Nominasi

Sistem dan Prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum antara lain sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkang Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, antara lain melalui penelusuran rekam jejak /daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
4. Hasil penggalan informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris.
5. Hasil pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Nota Dinas kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut sekaligus merupakan dokumen rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Calon anggota Dewan Komisaris yang terpilih diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai ketentuan Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Dewan Komisaris yang meliputi persyaratan: integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank. Bagi calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Prosedur Pengangkatan

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diangkat belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK.

Untuk memperoleh persetujuan atas anggota Dewan Komisarisnya, Perseroan mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK meliputi penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka Perseroan melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Bagi calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Prosedur Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS

4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Pengunduran Diri Dewan Komisaris Atas Tindakan Kejahatan Keuangan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dewan Komisaris Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Komisaris	Jabatan	Tanggal Lulus Fit & Proper Test OJK	Pelaksana Fit And Proper Test	Hasil
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	19 Juli 2017	OJK	Lulus
2	Gatot Trihargo*	Wakil Komisaris Utama	10 Juni 2015	OJK	Lulus
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	26 Mei 2017	OJK	Lulus
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	10 Juni 2015	OJK	Lulus
5	Mahmud**	Komisaris Independen	28 Februari 2017	OJK	Lulus
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	31 Januari 2018	OJK	Lulus
8	Hadiyanto	Komisaris	21 September 2018	OJK	Lulus
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017	OJK	Lulus
10	Wahyu Kuncoro***	Wakil Komisaris Utama	29 Agustus 2019	OJK	Lulus
11	Hendrikus Ivo****	Komisaris Independen	29 Agustus 2019	OJK	Lulus

Catatan :

- * Efektif sampai dengan 29 April 2019
- ** Efektif sampai dengan 15 Mei 2019
- *** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019, efektif sampai dengan 18 November 2019
- **** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019

LARANGAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Board Charter yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku
2. Memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;
 - b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah; jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundangundangan;
3. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

4. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris;
5. Terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Memberikan atau menawarkan kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Melibatkan diri pada penjualan atau pembelian atas efek dimana yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam (insider trading).

Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan berupa adanya status terpidana dari pihak yang berwenang maka anggota Dewan Komisaris dimaksud wajib mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KRITERIA PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan atas pencapaian target RKA dengan parameter KPI yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris setiap tahun yang meliputi aspek Learning and Growth Perspective, internal Procces Perspective, Compliance Perspective dan Financial perspective.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris.

Kebagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan berasal dari beragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, jenis kelamin, usia dan pengalaman sebagaimana tertuang pada profil masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu dari kalangan praktisi perbankan, cendekiawan/akademisi, birokrasi dan mereka yang pernah berkarir sebagai pengambil keputusan/kebijakan di bidang regulasi maupun korporasi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN TAHUN 2019

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris

Selain itu, jumlah anggota Dewan Komisaris perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan Dewan Komisaris BRI selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris 1 Januari 2019 sampai dengan 29 April 2019

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	57	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	59	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	65	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	61	RUPST 19 Maret 2015
5	Mahmud	Komisaris Independen	61	RUPST 15 Maret 2016
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	48	RUPSLB 18 Oktober 2017
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	47	RUPST 15 Maret 2017
8	Hadiyanto	Komisaris	57	RUPST 23 Maret 2018

Susunan Dewan Komisaris 29 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019

Berdasarkan penunjukan Sdr. Gatot Trihargo sebagai Komisaris Pertamina, Ybs. tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI, sehingga susunan Dewan Komisaris BRI periode 29 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	57	RUPST 15 Maret 2017
2	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	65	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	61	RUPST 19 Maret 2015
4	Mahmud	Komisaris Independen	61	RUPST 15 Maret 2016
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	48	RUPSLB 18 Oktober 2017
6	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	47	RUPST 15 Maret 2017
7	Hadiyanto	Komisaris	57	RUPST 23 Maret 2018

Susunan Dewan Komisaris 15 Mei 2019 sampai dengan 2 September 2019

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 Mei 2019, RUPS mengukuhkan pemberhentian Sdr. Gatot Trihargo dan memberhentikan Sdr. Mahmud, dan mengangkat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama dan Sdr. Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris BRI periode 15 Mei 2019 sampai dengan 2 September 2019 adalah sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	57	RUPST 15 Maret 2017
2	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	50	RUPSLB 2 September 2019
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	65	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	61	RUPST 19 Maret 2015
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	48	RUPSLB 18 Oktober 2017
6	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	61	RUPSLB 2 September 2019
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	47	RUPST 15 Maret 2017
8	Hadiyanto	Komisaris	57	RUPST 23 Maret 2018

Susunan Dewan Komisaris 2 September 2019 sampai dengan 18 November 2019

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 2 September 2019, RUPS mengangkat Sdri. Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris BRI periode 15 Mei 2019 sampai dengan 2 September 2019 adalah sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	57	RUPST 15 Maret 2017
2	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	50	RUPSLB 2 September 2019
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	65	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	61	RUPST 19 Maret 2015
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	48	RUPSLB 18 Oktober 2017
6	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	61	RUPSLB 2 September 2019
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	47	RUPST 15 Maret 2017
8	Hadiyanto	Komisaris	57	RUPST 23 Maret 2018
9	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	60	RUPSLB 2 September 2019

Susunan Dewan Komisaris 18 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Berdasarkan Penunjukan Sdr. Wahyu Kuncoro menjadi Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 18 November 2019, susunan Dewan Komisaris BRI periode 2 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	57	RUPST 15 Maret 2017
2	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	65	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	61	RUPST 19 Maret 2015
4	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	48	RUPSLB 18 Oktober 2017
5	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	61	RUPSLB 2 September 2019
6	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	47	RUPST 15 Maret 2017

Dewan Komisaris

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
7	Hadiyanto	Komisaris	57	RUPST 23 Maret 2018
8	Loeke Larasati Agoestina*	Komisaris	60	RUPSLB 2 September 2019

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut:

	KNR	KPMR	KT KT	KA
Ketua Anggota	Andrinof A. Chaniago	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim	A. Fuad Rahmany
	A. Fuad Rahmany	Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	A. Sonny Keraf
	A. Sonny Keraf	A. Fuad Rahmany	Hendrikus Ivo	Rofikoh Rokhim
	Rofikoh Rokhim	Hendrikus Ivo	Hadiyanto	Hendrikus Ivo
	Hendrikus Ivo	Nicolaus Teguh Budi Harjanto		
	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Loeke Larasati Agoestina*		
	Hadiyanto			
	Loeke Larasati Agoestina*			

*Efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test OJK

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan POJK No: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pada Bank Umum, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen dimana Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50 persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib menyampaikan pernyataan independensi Komisaris Independen dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dengan prinsip bahwa kedua organ Perseroan tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan kondisi demikian, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

HUBUNGAN AFILIASI

1. Hubungan Keuangan
Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

2. Hubungan Keluarga

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.

Berikut adalah hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris (BOC)													
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama / Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gatot Trihargo*	Wakil Komisaris Utama		✓		✓	✓			✓		✓		✓
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mahmud**	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nicolaus teguh Budi Harjanto	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Hadiyanto	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Wahyu Kuncoro***	Wakil Komisaris Utama		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Hendrikus Ivo****	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Loeke Larasati Agoestina*****	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Catatan :

* Efektif sampai dengan 29 April 2019

** Efektif sampai dengan 15 Mei 2019

*** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019, efektif sampai dengan 18 November 2019

**** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019

***** Diangkat dalam RUPSLB 2 September 2019

KEBIJAKAN DAN PENERAPAN RANGKAP JABATAN

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK-03/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

1. Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;

Dewan Komisaris

2. Lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/instansi Lain
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2006 - sekarang	Pengajar di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Universitas Indonesia
2	Gatot Trihargo*	Wakil Komisaris Utama	2015 - 2019	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan	Kementerian BUMN
			2018 - sekarang	Anggota Dewan Penasihat	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
			2010 - sekarang	Presiden Association	Certified Fraud Examiner (CFE) - Indonesia Chapter
			2010 - sekarang	Anggota Dewan Kehormatan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
			2009 - sekarang	Anggota Dewan Penguji	Center for Sustainability Reporting (NCSR)
			2016 - sekarang	Ketua umum	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII)
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	1998 - sekarang	Dosen Etika Bisnis & Etika Profesi Akuntansi	Universitas Atma Jaya Jakarta
			2014 - Juli 2019	Anggota	Dewan Energi Nasional
			2016 - Sekarang	Komisaris Independen	PT Gorontalo Sejahtera Mining
5	Mahmud**	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	2006 - Sekarang	Dosen dan Peneliti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.	Univesitas Indonesia
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	2015 - Sekarang	Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan	Kementerian Sekretariat Negara
8	Hadiyanto	Komisaris	2015 - Sekarang	Sekretaris Jenderal	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
			2016 - Sekarang	Ketua Dewan Pengawas	RS Dr. Cipto Mangunkusumo
			2015 - Sekarang	Dewan Pengawas	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
9	Wahyu Kuncoro***	Wakil Komisaris Utama	2016-2019	Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi	Kementerian BUMN
10	Hendrikus Ivo****	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
11	Loeke Larasati Agoestina*****	Komisaris	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		

Catatan :

* Efektif sampai dengan 29 April 2019

** Efektif sampai dengan 15 Mei 2019

*** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019, efektif sampai dengan 18 November 2019

**** Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019

***** Diangkat dalam RUPSLB 2 September 2019



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEPEMILIKAN SAHAM & PERUBAHAN TAHUN 2019

Anggota Dewan Komisaris telah menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga melalui Surat Pernyataan. Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Sejalan dengan independensi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Per 31 Desember 2019, tidak ada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham 5% atau lebih di dalam Perseroan maupun perusahaan atau bank atau lembaga keuangan bukan bank lain.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan %
DEWAN KOMISARIS				
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	0	0,0000000
2	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	386.700	0,0003135
3	Hadiyanto	Komisaris	201.200	0,0001631
4	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	0	0,0000000
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	0	0,0000000
6	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	0	0,0000000
7	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	0	0,0000000
8	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	0	0,0000000

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Komisaris Independen Perseroan senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Kriteria Komisaris Independen

BRI telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Komisaris Independen antara lain:

1. Jumlah Komisaris Independen Perseroan per 31 Desember 2019 adalah 5 orang dari total delapan orang Dewan Komisaris. Jumlah tersebut sudah melebihi jumlah minimal 50% anggota Komisaris Independen sebagaimana ditentukan oleh POJK Nomor 55/POJK.03/2016.
2. Memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagai berikut:
 - a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 - b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/ Perusahaan bukan keuangan, BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta.
 - c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Pernyataan Independen

Seluruh Komisaris Independen BRI secara bersama-sama telah menyampaikan pernyataan sebagai Komisaris Independen.

Model 54



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DEWAN KOMISARIS

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon : Direct 2500139, atau 5751915, 5751916, 5751917
 Facsimile : 2510856, Telex: 65293, 65301, 65456, 65461 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini,

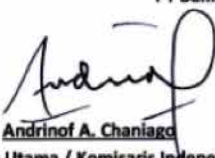
1. **Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama / Komisaris Independen**
2. **A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen**
3. **A. Sonny Keraf, Komisaris Independen**
4. **Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen**
5. **Hendrikus Ivo, Komisaris Independen**

dengan ini menyatakan bahwa saya :

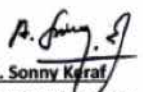
1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

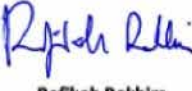
Demikian pernyataan independensi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 Desember 2019
Komisaris Independen
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


Andrinof A. Chaniago
 Komisaris Utama / Komisaris Independen


A. Fuad Rahmany
 Komisaris Independen


A. Sonny Keraf
 Komisaris Independen


Rofikoh Rokhim
 Komisaris Independen


Hendrikus Ivo
 Komisaris Independen

Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customers Centric

Dewan Komisaris

PROGRAM ORIENTASI, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

BRI memiliki kebijakan program orientasi dan pendidikan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.43-DIR/SKP/01/2018 tanggal 17 Januari 2018, dengan program pendidikan dan orientasi sebagai berikut:

1. Program Orientasi dilaksanakan khusus bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat melalui RUPS BRI atau sesuai permintaan Dewan Komisaris apabila diminta;
2. Program Orientasi dilaksanakan khusus bagi Anggota Direksi yang baru diangkat melalui RUPS BRI atau sesuai permintaan Direksi apabila diminta;
3. Program pendidikan dilaksanakan oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
4. Program Orientasi yang diadakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru meliputi:
 - a. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi & Misi, Strategi, Rencana Jangka Menengah & Jangka Panjang, kinerja dan keuangan.
 - b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, dan aturan-aturan yang relevan.
 - c. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan, dan ketentuan GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris/Direksi.
 - d. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi.
 - e. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan;
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan Bank BRI;
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI;
4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI;
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI; pemahaman value creation untuk para stakeholders, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak Bank BRI;
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI;
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Program Orientasi Dewan Komisaris Tahun 2019

Peserta	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
Wahyu Kuncoro	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	- Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI. - Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. - Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. - Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. - Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi, - Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi; - Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	- Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI. - Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. - Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. - Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. - Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi, - Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi; - Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.
Loeke Larasati Agoestina	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	Divisi Manajemen Risiko Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	- Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI. - Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. - Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. - Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. - Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi, - Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi; - Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

PROGRAM PELATIHAN & PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

BRI memiliki Kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI dalam menunaikan tugasnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis;
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan;
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan governance perusahaan.

Program Pendidikan Pengembangan Kompetensi anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagaimana telah dilaporkan pada Bab Profil.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang Manajemen Risiko sesuai syarat minimum standar sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan perubahan Peraturan Bank Indonesia dimaksud dengan No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010.

Memperhatikan hal tersebut dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan syarat sebagai Dewan Komisaris, selain mengikuti berbagai training dan conference, Dewan Komisaris Perseroan senantiasa membekali diri dengan sertifikasi manajemen risiko yang mendukung tugas nya sebagai Pengawas Perseroan. Sertifikasi manajemen risiko sepanjang tahun 2019 yang diikuti anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana tercantum di Bab Profil Perusahaan.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

1. Penyusunan Kebijakan Suksesi dalam Proses Nominasi Pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa usulan penggantian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS, serta penggantian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris disetujui Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan remunerasi telah melakukan Review terhadap kebijakan suksesi dalam proses Nominasi pengurus Perseroan, Perusahaan Anak, serta Pihak Terafiliasi sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Review kebijakan suksesi dalam proses Nominasi pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak.	3 April 2019	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.03-KIOM/BRI/04/2019 tentang Nominasi pengurus perusahaan anak BRI



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

2. Melaksanakan Proses Nominasi Direksi

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa usulan penggantian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan proses nominasi berupa usulan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas usulan calon anggota Direksi untuk diputuskan dalam RUPS BRI tahun 2019 sebagai berikut:

Materi	Output	Realisasi
Usulan Nominasi Direksi	8 Mei 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.14-KOM/05/2019 tentang Top talent PT BRI
	31 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.24-KOM/07/2019 tentang Penyampaian data top talent PT BRI
	2 September 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.26-KOM/09/2019 tentang Penilaian Talent calon direksi BRI

3. Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar BRI, salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah mengusulkan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan bagi perseroan dan/ atau bernilai strategis. Memperhatikan hal tersebut, selama Tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris telah melaksanakan proses Nominasi terhadap calon wakil perseroan yang diusulkan oleh Direksi untuk ditempatkan kepada anak perusahaan dan Pihak terkait antara lain sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Nominasi calon anggota komisaris dan direksi PT Bank Agroniaga Tbk	23 Januari 2019	Surat Dewan Komisaris No SR.02-KOM/01/2019 tentang Persetujuan bakal calon anggota komisaris dan direksi PT Bank Agroniaga Tbk
2	Nominasi calon anggota komisaris dan direksi PT Bank Agroniaga Tbk	31 Januari 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.03-KOM/01/2019 tentang Persetujuan bakal calon anggota komisaris dan direksi PT Bank Agroniaga Tbk
3	Nominasi calon Komisaris Utama dan Direktur Utama Ventura Investama	19 Februari 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.06-KOM/02/2019 tentang Persetujuan calon anggota dewan komisaris dan direksi PT BRI Ventura Investama
4	Nominasi calon anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	12 Februari 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.05-KOM/02/2019 tentang Persetujuan calon anggota dewan komisaris PT Asuransi jiwa bringin jiwa sejahtera
5	Nominasi Calon komisaris utama dan direktur utama PT BRI Ventura Investama	9 April 2019	Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.08-KOM/04/2019 tentang Persetujuan pencalonan komisaris utama dan direktur utama PT BRI Ventura Investama
6	Nominasi Calon direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah	29 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.11-KOM/04/2019 tentang Persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah
7	Nominasi Calon Pengurus PT BRI Agroniaga Tbk	28 Mei 2019	Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.17-KOM/05/2019 tentang Persetujuan pencalonan pengurus PT BRI Agroniaga Tbk
8	Perubahan nomenklatur dan pengalihan penugasan direksi BRI Multifinance Indonesia	4 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.21-KOM/07/2019 tentang Persetujuan perubahan nomenklatur dan pengalihan penugasan direksi BRI Multifinance Indonesia
9	Nominasi calon pengurus PT Danareksa Sekuritas	17 September 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.27-KOM/09/2019 tentang Persetujuan pencalonan pengurus PT Danareksa Sekuritas
10	Nominasi pengurus PT Danareksa Sekuritas	28 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. SR.30-KOM/10/2019 tentang Persetujuan pemberhentian direktur utama PT Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris

4. Review dan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Review dan usulan remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menjadi usulan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019. Review dan usulan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Peraturan Menteri yang berlaku, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, kewajaran dengan peer group, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan, serta berbagai hasil survei dan kajian yang reliabel dari pihak eksternal. Review dan usulan remunerasi Direksi dan Komisaris tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Output	Realisasi
Usulan Remunerasi Direksi dan Komisaris	22 April 2019	Surat Direksi No. SR.10-KOM/04/2019 tentang Usulan penghasilan direksi dan dewan komisaris tahun 2019 dan tantiem/insentif kinerja tahun 2018

5. Evaluasi Kinerja Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Komite Nominasi dan remunerasi harus melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan KPI Direksi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi Direksi tersebut antara lain untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi serta melakukan revaluasi kembali atas kompetensi masing-masing Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kinerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Output
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	6 Mei 2019	Surat tertulis Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.13-KOM/05/2019 tentang Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk

6. Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan

Review ini dilakukan untuk memastikan BRI selalu menetapkan remunerasi dan kebijakan ketenagakerjaan, yang adil untuk memotivasi seluruh pekerja. Penetapan remunerasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kinerja Perusahaan.

Review dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur SDM, Kebijakan SDM dan laporan Direksi serta pemaparan Direksi dan/atau Divisi SDM. Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Output	Realisasi
Penyusunan kebijakan Remunerasi berdasarkan Ketentuan POJK 45POJK.013/2015	20 Juni 2019	SK bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 08-KOM/BRI/06/2019 tentang Penetapan penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi pekerja yang ditetapkan sebagai material risk taker (MRT) tmt 1 Januari 2017
Evaluasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	15 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.77-KOM/10/2019 tentang Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan remunerasi pekerja BRI

7. Penelaahan Laporan Keuangan

Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan mencakup laporan keuangan triwulan dan tahunan. Hasil penelaahan tersebut dapat berupa tanggapan kepada Direksi untuk penyempurnaan atau perbaikan laporan sebelum dipublikasikan. Penelaahan laporan keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Materi	Realisasi	Output
Laporan Keuangan akhir tahun 2018	30 Januari 2019	Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 05-KOM/01/2019 tentang Kinerja Keuangan & Realisasi RBB BRI Semester II tahun 2018
Laporan Keuangan triwulan I tahun 2019	23 April 2019	Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 13-KOM/04/2019 tentang Kinerja Keuangan & Realisasi RBB BRI Triwulan I tahun 2019
Laporan Keuangan triwulan II tahun 2019	6 Agustus 2019	Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 27-KOM/08/2019 tentang Kinerja Keuangan & Realisasi RBB BRI Triwulan II tahun 2019
Laporan Keuangan triwulan III tahun 2019	22 Oktober 2019	Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 59-KOM/10/2019 tentang Kinerja Keuangan & Realisasi RBB BRI Triwulan III tahun 2019

8. Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan monitoring tindak lanjut temuan oleh manajemen.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, BI, BPK dan SKAI. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Intern dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau unit kerja terkait. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Semester II Tahun 2018	27 Februari 2019	Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi No. R.08-KOM/02/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sd tw IV tahun 2018
Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan I Tahun 2019	21 Mei 2019	Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi No. R.18-KOM/05/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sd tw I tahun 2019
Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern dan Terintegrasi Semester I Tahun 2019	2 Agustus 2019	Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi No. R.48-KOM/08/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sd tw II tahun 2019
Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan III Tahun 2019	25 November 2019	Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi No. R.93-KOM/11/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sd tw III tahun 2019

9. Evaluasi pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI dan Evaluasi Kinerja DPLK BRI

Dewan Komisaris selaku Pengawas DPLK BRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI dan Evaluasi Kinerja DPLK BRI.

Pelaksanaan Review pengawasan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Evaluasi pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI tahun buku 2018	26 Juni 2019	Surat hasil evaluasi Dewan Komisaris B.175-KOM/06/2019 tentang Laporan hasil evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan BRI (DPLK BRI) tahun buku 2018
Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI Semester II 2018	15 Maret 2019	Surat hasil evaluasi Dewan Komisaris No.B.70-KOM/03/2019 tentang Evaluasi kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI tahun 2019

Dewan Komisaris

10. Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Strategis Perkreditan, Kebijakan IT dan Perubahan/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Review dan persetujuan kebijakan-kebijakan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)	5 November 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.311-KOM/11/2019 tentang Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko
Perubahan / Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank	2 Juli 2019	Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. B.178-KOM/07/2019 tentang Persetujuan ketua pengganti komite perkreditan (KKP) BRI

11. Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK

Sesuai POJK No 16/POJK.05/ 2016, tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Dewan Pengawas melaksanakan evaluasi kebijakan dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun pada tahun yang bersangkutan paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun periode yang bersangkutan.

Review dan evaluasi kinerja dan penerapan Tata Kelola DPLK tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Penerapan Pedoman Tatakelola DPLK Tahun 2019	29 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.128-KOM/04/2019 tentang Evaluasi Penerapan Tata Kelola DPLK BRI

12. Review dan Evaluasi Profil Risiko

Review dan evaluasi profil risiko dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan, yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan pengendalian risiko (risk control system) yang mencakup seluruh jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis. Review dan evaluasi profil risiko lebih difokuskan terhadap risiko-risiko yang memiliki peringkat 3 (moderate) sampai peringkat 5 (high) dan risiko yang memiliki peringkat dengan kecenderungan memburuk.

Review dan evaluasi profil risiko selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018	31 Januari 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.27-KOM/01/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV tahun 2018
Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2019	28 Mei 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.153-KOM/05/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan I tahun 2019
Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2019	16 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.52-KOM/08/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan II tahun 2019

13. Review dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas berwenang lainnya.

Review dan evaluasi dilakukan terutama terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku menyangkut pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (CAR), BMPK, Posisi Devisa Neto



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

(PDN), Transaksi Derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valuta Asing, dan Tingkat Kredit Bermasalah (NPL). Apabila hasil review bulanan Dewan Komisaris diketahui terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris akan memberikan saran dan pendapat paling lambat sepuluh hari kerja setelah laporan diterima.

Review dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan akan dilakukan secara periodik setiap semester (6 bulan) dengan memperhatikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Disamping itu, Dewan Komisaris melalui KPMR juga akan melakukan review dan evaluasi terhadap Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum yang selanjutnya diubah dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Review dan evaluasi fungsi kepatuhan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2018	10 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.100-KOM/04/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2018
Laporan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2019	28 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.223-KOM/08/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2019

14. Review dan Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum bahwa bank disyaratkan untuk membangun 4 (empat) pilar strategi pengendalian fraud yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: (a) pencegahan; (b) deteksi; (c) investigasi, pelaporan dan sanksi; dan (d) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, BRI wajib menerapkan manajemen risiko di mana pengawasan aktif dari Dewan Komisaris merupakan salah satu aspek penting dari manajemen risiko. Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan empat pilar strategi pengendalian fraud di BRI.

Review dan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II 2018	10 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.100-KOM/04/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2018
Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I 2019	28 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.223-KOM/08/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2019

15. Review dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program APU PPT

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum bahwa Bank wajib menerapkan program APU PPT. Ayat (1) pasal 5 menyatakan bahwa program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal 5 dinyatakan bahwa penerapan program APU PPT mencakup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Review secara berkala terhadap Pelaksanaan Program APU PPT tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester II Tahun 2018	10 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.100-KOM/04/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2018
Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester I Tahun 2019	28 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.223-KOM/08/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2019

16. Review dan Evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank setiap semester yang telah mendapat persetujuan Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan yang mencakup penilaian profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital).

Evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2018	10 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.100-KOM/04/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2018
Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari – Juni 2019	28 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.223-KOM/08/2019 tentang Tingkat Kesehatan Bank, Pengelolaan Risiko, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PPT, Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2019

17. Review dan Evaluasi Portofolio Aktiva Produktif

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Dewan Komisaris terhadap optimalisasi Aktiva Produktif BRI, dilakukan review portofolio kredit dan aktiva produktif lainnya.

Target waktu review dan Evaluasi Portofolio Aktiva Produktif adalah sebagai berikut :

Materi	Realisasi	Output
Review Portofolio Aktiva Produktif dan Portofolio Guideline .	18 Juni 2019 20 Agustus 2019	Risalah Dewan Komisaris No. 28-KOM/08/2019 tentang Reviu Portofolio Aktiva Produktif dan No. 18-KOM/06/2019 tentang Loan Portofolio Guideline & Political Exposed Person (PEP)

18. Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris

Setiap kredit yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan atau Surat Edaran Direksi Perseroan, wajib dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Konsultasi kredit tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terdapat putusan pencairan kredit oleh Direksi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Apabila karena satu dan lain hal forum rapat konsultasi kredit tidak dilaksanakan, maka konsultasi kredit dapat dilakukan dengan media lainnya tanpa harus melalui forum rapat konsultasi kredit.

Konsultasi kredit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Konsultasi Kredit	16 April 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.106-KOM/04/2019 tentang Konsultasi Kredit
	06 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.51-KOM/08/2019 tentang Konsultasi Kredit
	06 September 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.65-KOM/09/2019 tentang Konsultasi Kredit
	8 November 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.86-KOM/11/2019 tentang Konsultasi Kredit
	26 November 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.94-KOM/11/2019 tentang Konsultasi Kredit

19. Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Dewan Komisaris melakukan review dan persetujuan terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan Anak atau Pihak Terkait lainnya dengan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan atau Surat Edaran Direksi Perseroan.

Persetujuan pemberian fasilitas penyediaan dana kepada perusahaan anak atau pihak terkait lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Proposal fasilitas penyediaan dana kepada Perusahaan Anak/Pihak Terkait	9 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.34-KOM/07/2019 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait an. Sdri. Jenny Rachman
	26 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.34-KOM/07/2019 tentang Persetujuan penyediaan dana fasilitas uncommitted credit line kepada pihak terkait atas nama PT Asuransi BRI Life
	30 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.06-KPMR/08/2019 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Danareksa Sekuritas
	30 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.63-KOM/08/2019 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait Joint borrower PT Bahana Artha Ventura dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
	28 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.91-KOM/11/2019 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait kepada Bank BRI Syariah

20. Review dan Evaluasi Recovery Plan

Sesuai POJK No 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017, Bank Sistemik wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala dan/atau setelah evaluasi dan pengujian (stress testing) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank.

Evaluasi recovery plan dan memberikan rekomendasi penyempurnaannya dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Perubahan / Penyempurnaan Recovery Plan	30 Januari 2019	Surat Dewan Komisaris No.B.26-KOM/01/2019 tentang Persetujuan atas revisi dokumen rencana aksi recovery plan BRI
	28 November 2019	Surat Dewan Komisaris No.R.97-KOM/11/2019 tentang Persetujuan dokumen rencana aksi Recovery plan BRI Tahun 2019-2020

21. Aksi Korporasi pada Perusahaan Anak

Setiap aksi korporasi yang meliputi namun terbatas pada tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan/ akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana strategis lainnya harus mendapat persetujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan harus persetujuan Dewan Komisaris.

Persetujuan Aksi Korporasi pada Perusahaan Anak selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Proposal aksi korporasi pada Perusahaan Anak	20 Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.24-KOM/06/2019 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Pemegang Saham BRI Agro Terkait Rencana Penawaran Umum Terbatas Saham IX BRI Agro tahun 2019
	12 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.36-KOM/07/2019 tentang Persetujuan tambahan modal kepada PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
	27 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.55-KOM/08/2019 Persetujuan Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur (BRINS)

22. Laporan Tahunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Perseroan wajib membuat beberapa laporan pengawasan kegiatan selama tahun 2019 dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan dimintakan persetujuan RUPS tahun 2019.

Target waktu penyelesaian Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Materi Laporan	Realisasi	Output
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	Minggu ke-IV Januari 2019	Laporan Tahunan Dewan Komisaris yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
Sambutan Komisaris	Minggu ke-II Januari 2019	
Laporan Pelaksanaan GCG	Minggu ke-IV Januari 2019	

23. Penelaahan Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik

Dewan Komisaris melalui Komite Audit akan melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan audit Laporan Keuangan BRI dan Management Letter yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Target waktu penyelesaian review terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2018	26 Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.28-KOM/06/2019 tentang Laporan evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP PSS (EY)
Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2018	26 Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.28-KOM/06/2019 tentang Laporan evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP PSS (EY)
Management Letter Tahun Buku 2018	Minggu ke-IV Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.93-KOM/11/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit Triwulan III tahun 2019 dan Management Letter tahun 2018



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

24. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, BI, BPK dan Audit Intern. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Intern dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau mendalami di unit kerja terkait.

Target waktu pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit adalah:

Materi	Realisasi	Output
Laporan tindak lanjut Hasil Temuan Audit TW IV 2018	27 Februari 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.08-KOM/02/2019 tentang Evaluasi Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Sampai Dengan Triwulan IV tahun 2018
Laporan tindak lanjut Hasil Temuan Audit TW I 2019	21 Mei 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.18-KOM/05/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan I tahun 2019
Laporan tindak lanjut Hasil Temuan Audit TW II 2019	2 Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.19-KA/08/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan II semester I tahun 2019
Laporan tindak lanjut Hasil Temuan Audit TW III 2019	25 November 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.93-KOM/11/2019 tentang Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit Triwulan III tahun 2019 dan Management Letter tahun 2018

25. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangka Audit Laporan Keuangan BRI.

Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan proses seleksi Kantor akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan BRI dan Laporan PKBL BRI. Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Audit, selanjutnya menyampaikan usulan KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk diputuskan dalam RUPS Tahunan.

Hasil evaluasi dan usulan penunjukan/ penunjukkan kembali auditor independen adalah:

Materi	Realisasi	Output
Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independen/KAP untuk tahun buku 2018	26 Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.28-KOM/06/2019 tentang Laporan evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP PSS (EY)
Usulan Penunjukan/ Penunjukkan Kembali Auditor Independen, termasuk Audit Fee Kepada RUPS .	7 Mei 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.15-KOM/05/2019 tentang Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan PKBL BRI tahun Buku 2019

26. Hasil Review Profil Risiko Terintegrasi

Berdasarkan POJK No 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dinyatakan pada ayat 1 pasal 11 bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Usaha Konglomerasi Keuangan.

Dewan Komisaris melakukan review dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan (inherent risk) yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Dewan Komisaris

Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2018	14 Mei 2019	Notulen Rapat KTKT tentang Penerapan Tata Kelola Teintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Audit Terintegrasi Semester II tahun 2018
Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2019	10 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.01-KTKT/10/2019 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester I tahun 2019

27. Hasil Review Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi

Review dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Intern Terintegrasi dilakukan secara semesteran dengan memperhatikan Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan BRI dan LJK anggota konglomerasi BRI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga dengan memperoleh penjelasan melalui presentasi dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kecukupan pengendalian terintegrasi adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Pelaksanaan Audit Terintegrasi Semester II Tahun 2018	14 Mei 2019	Notulen Rapat KTKT tentang Penerapan Tata Kelola Teintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Audit Terintegrasi Semester II tahun 2018
Laporan Pelaksanaan Audit Terintegrasi Semester I Tahun 2019	10 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.01-KTKT/10/2019 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester I tahun 2019

28. Evaluasi Penilaian Kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi

Review dan evaluasi terhadap Penilaian Kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi akan dilakukan secara semesteran dengan memperhatikan Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan BRI dan LJK anggota konglomerasi BRI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga dengan memperoleh penjelasan melalui presentasi dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Laporan Kepatuhan Terintegrasi Semester II Tahun 2018	14 Mei 2019	Notulen Rapat KTKT tentang Penerapan Tata Kelola Teintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Audit Terintegrasi Semester II tahun 2018
Laporan Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2019	11 Oktober 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.281-KOM/10/2019 tentang Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi semester I 2019

29. Persetujuan dan Pengawasan Rencana Kerja Perseroan

Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap semua Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama tahun 2019. Disamping itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

Evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana kerja serta laporan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Materi	Realisasi	Output
Revisi RBB Tahun 2019-2020 dan revisi RKAP tahun 2019	25 Juni 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.25-KOM/06/2019 tentang Persetujuan RBB Tahun 2019-2020 (revisi) dan revisi RKAP tahun 2019
Rencana Bisnis Bank 2020-2022	28 November 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.95-KOM/11/2019 tentang Persetujuan RBB tahun 2020-2022 dan RKAP tahun 2020
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020		
Rencana Kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2020		
Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2018	27 Februari 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.09-KOM/02/2019 tentang Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan RBB PT BRI (Persero) Semester II tahun 2018
Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2019	Minggu keempat Agustus 2019	Surat Dewan Komisaris No. R.54-KOM/08/2019 tentang Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan RBB PT BRI (Persero) Semester I tahun 2019

30. Review Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa Keuangan. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Otoritas Jasa Keuangan, Audit paling lama enam bulan setelah Tahun buku berakhir.

Ruang lingkup kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap KAP antara lain meliputi:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2018 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY) dan Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2018 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (KAP MSI). dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Evaluasi KAP	Ruang Lingkup Evaluasi			
	Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dan/atau KAP dengan Standar Audit Yang Berlaku	Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan	Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik	Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2018 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY)	Pelaksanaan audit oleh KAP PSS EY dilakukan sesuai dengan dengan Standar audit yang berlaku. Standar audit yang digunakan sebagai acuan, antara lain, Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [POJK].	KAP PSS telah memiliki perencanaan audit termasuk timetable audit untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup audit. Timetable tersebut, pada awal proses audit, didiskusikan dengan Komite Audit. Dalam pelaksanaannya, KAP PSS telah menyelesaikan seluruh agenda pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam timetable audit tersebut. Dalam pelaksanaan audit, berdasarkan Time Table Audit tersebut, KAP PSS telah menyelesaikan isu-isu akuntansi yang ditemukan di lapangan, termasuk estimasi dan judgement yang signifikan yang terjadi. Ketersediaan data dari unit kerja di BRI yang dibutuhkan oleh KAP PSS secara tepat waktu telah mendukung pelaksanaan audit sesuai dengan timetable audit yang sudah disepakati.	Berdasarkan diskusi dengan KAP PSS, Komite Audit meyakini bahwa risiko Audit (Identifikasi <i>inherent risk</i> , dan <i>control risk</i> serta meminimalkan <i>detection risk</i>) dapat diminimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang diidentifikasi telah memadai untuk dapat mendeteksi <i>material miss statement</i> di dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan demikian, Komite Audit meyakini bahwa KAP PSS telah melakukan pengujian yang memadai atas transaksi dengan jumlah Uji Petik yang cukup.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: R.28 -KOM/06/2019 tanggal 26 Juni 2019
Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2018 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (KAP MSI).	Pelaksanaan audit oleh KAP MSI dilakukan sesuai dengan dengan Standar audit yang berlaku. Standar audit yang digunakan sebagai acuan, antara lain, Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [POJK].	Ketersediaan data secara tepat waktu yang dibutuhkan KAP MSI sesuai perencanaan audit termasuk timetable audit yang sudah disepakati.	Komite Audit meyakinkan bahwa cakupan jasa yang diberikan kepada KAP MSI telah sesuai dengan standar auditing yang berlaku, tidak ada penugasan asuransi dan non-asurans yang dilakukan bersamaan.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: B.175 -KOM/06/2019 tanggal 25 Juni 2019

31. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat terhadap setiap pemberian kredit yang memenuhi kriteria kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi Perseroan. Konsultasi kredit tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terdapat putusan kredit oleh Direksi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 telah dilakukan Konsultasi Kredit dengan rincian sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Konsultasi Kredit	16 April 2019	Surat Komisaris No: B.106-KOM/04/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Konsultasi Kredit
	6 September 2019	Surat Komisaris No: R.65-KOM/09/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Konsultasi Kredit
	8 November 2019	Surat Komisaris No: R.86-KOM/11/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Konsultasi Kredit
	26 November 2019	Surat Dewan Komisaris No: R.94-KOM/11/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Konsultasi Kredit

32. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kegiatan operasional dan implementasi kebijakan Perseroan di unit kerja. Kegiatan operasional unit kerja yang dievaluasi pada pokoknya meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan operasional di unit kerja yang bersangkutan, seperti perkreditan, pendanaan, layanan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan aspek lainnya. Hasil kunjungan kerja dapat dijadikan sebagai bahan Dewan Komisaris dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan dan/atau dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan.

Kunjungan Kerja selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Komisaris	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Wilayah Jayapura	A Sonny Keraf	10 -13 Januari 2019	Kunjungan Kerja
2	Kantor Wilayah Surabaya	Rofikoh Rokhim	17 - 19 Januari 2019	Kunjungan Kerja
3	Kantor Wilayah Padang	Andrinof A Chaniago	15-17 Januari 2019	Kunjungan Kerja
4	Kantor Wilayah Makassar	Rofikoh Rokhim	26-27 Januari 2019	Kunjungan Kerja
5	Kantor Wilayah Manado	Rofikoh Rokhim	13-14 Februari 2019	Rakerwil & Kunjungan Kerja
6	Kantor Wilayah Banjarmasin	A Sonny Keraf	13-17 Februari 2019	Kunjungan Kerja
7	Kantor Wilayah Lampung	Andrinof A Chaniago	20-21 Februari 2019	Rakerwil & Kunjungan Kerja
8	Kantor Wilayah Malang	A Fuad Rahmany	20 Februari 2019	Pembicara IHT AIW
9	Kantor Wilayah Surabaya	Rofikoh Rokhim	13-15 Maret 2019	Kunjungan Kerja
10	Kantor Wilayah Semarang	Gatot Tri Hargo	24 Maret 2019	Kunjungan Kerja
11	Kantor Wilayah Denpasar	A Sonny Keraf	27-29 Maret 2019	Pembicara IHT AIW
12	Kantor Wilayah Jayapura	Mahmud	27-29 Maret 2019	Pembicara IHT AIW
13	Kantor Wilayah Medan	A Fuad Rahmany	9-10 april 2019	Kunjungan Kerja
14	Kantor Wilayah Lampung	Rofikoh Rokhim	12 April 2019	Pembicara IHT AIW
15	Kantor Wilayah Lampung	Andrinof A Chaniago	8-9 April 2019	SIPK
16	Kantor Wilayah Semarang	Mahmud	23-24 April 2019	Pembicara IHT AIW
17	Kantor Wilayah Palembang	Nicolaus TB Harjanto	11-12 April 2019	SIPK
18	Kantor Wilayah Pekanbaru	Andrinof A Chaniago	10-14 April 2019	SIPK
19	Kantor Wilayah Semarang	Mahmud	24-25 April 2019	Pembicara IHT AIW
20	Kantor Wilayah Makassar	Andrinof A Chaniago	23-24 April 2019	Pembicara IHT AIW
21	Kantor Wilayah Aceh	A Fuad Rahmany	24-27 April 2019	Pembicara IHT AIW
22	Kantor Wilayah Pekanbaru	Rofikoh Rokhim	26-27 April 2019	Pembicara IHT AIW
23	Kantor Wilayah Palembang	Rofikoh Rokhim	24-25 April 2019	Kunjungan Kerja
24	Kantor Wilayah Palembang	Mahmud	2-3 Mei 2019	Pembicara IHT AIW

Dewan Komisaris

No.	Unit Kerja	Komisaris	Pelaksanaan	Keterangan
25	Kantor Wilayah Bandung	Rofikoh Rokhim	30 Jun - 1 Juli 2019	FGD
26	Kantor Wilayah Lampung	Nicolaus TB Harjanto	21-22 Juni 2019	Exit meeting
27	Kantor Wilayah Yogyakarta	Rofikoh Rokhim	12-14 Juli 2019	Pembicara IHT AIW
28	Kantor Wilayah Semarang	Hadiyanto	10-11 Juli 2019	Kunjungan Kerja
29	Kantor Wilayah Denpasar	Nicolaus TB Harjanto	8-9 Agustus 2019	Kunjungan Kerja
30	Kantor Wilayah Malang	Rofikoh Rokhim	8 - 9 Agustus 2019	Kunjungan Kerja
31	Kantor Wilayah Denpasar	Andrinof A Chaniago	22-23 Agustus 2019	Kunjungan Kerja
32	Kantor Wilayah Aceh	A Fuad Rahmany	19-20 September 2019	Kunjungan Kerja
33	Kantor Wilayah Denpasar	A Sonny Kerat	22-30 September 2019	Kunjungan Kerja
34	Kantor Wilayah Medan	Hendrikus Ivo	24-26 September 2019	Pembicara IHT AIW & Kunjungan Kerja
35	Kantor Wilayah Denpasar	Hadiyanto	15-18 Oktober 2019	Kunjungan Kerja

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Selain melaksanakan fungsi pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai rekomendasi dan masukan kepada manajemen berdasarkan atas laporan rutin manajemen ke Dewan Komisaris maupun berdasarkan atas kejadian atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut :

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
07 Januari 2019	B.02-KOM/01/2019	Laporan kinerja DPLK BRI bulan oktober 2018 dan november 2018
31 Januari 2019	B.27-KOM/01/2019	Laporan profil risiko triwulan IV tahun 2018
13 Februari 2019	B.40-KOM/02/2019	Rekomendasi draft piagam audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI versi 1.0
27 Februari 2019	R.08-KOM/02/2019	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit sd tw IV semester II tahun 2018
15 Maret 2019	B.70-KOM/03/2019	Evaluasi kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI tahun 2019
10 April 2019	B.100-KOM/04/2019	Tingkat kesehatan bank, pengelolaan risiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, program APU PPT pelaksanaan strategi anti fraud semester II tahun 2018
12 April 2019	B.101-KOM/04/2019	Penghapusbukuan pinjaman dan pemasukan (recovery plan) pinjaman yang dihapusbukukan triwulan IV tahun 2018
16 April 2019	B.106-KOM/04/2019	Konsultasi kredit PT Lion Mentari CS
24 April 2019	B.126-KOM/04/2019	Kunjungan kerja komisaris Bp Gatot Semarang
29 April 2019	B.127-KOM/04/2019	Laporan hasil penilaian tingkat risiko dan laporan penerapan manajemen risiko DPLK BRI
29 April 2019	B.128-KOM/04/2019	Evaluasi penerapan tata kelola DPLK BRI
07 Mei 2019	R.15-KOM/05/2019	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan PKBL BRI tahun Buku 2019
21 Mei 2019	R.18-KOM/05/2019	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan I tahun 2019



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
25 Juni 2019	R.26-KOM/06/2019	Pendalaman terhadap beberapa debitur yang terkait dengan political exposed person
26 Juni 2019	B.175-KOM/06/2019	Laporan hasil evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan BRI (DPLK BRI) tahun buku 2018
26 Juni 2019	R.28-KOM/06/2019	Laporan evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP PSS (EY)
02 Agustus 2019	R.48-KOM/08/2019	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit triwulan II semester I tahun 2019
06 Agustus 2019	R.51-KOM/08/2019	Konsultasi Kredit
16 Agustus 2019	R.52-KOM/08/2019	Profil risiko triwulan II 2019
28 Agustus 2019	B.223-KOM/08/2019	Tingkat kesehatan bank, pengelolaan risiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, program APU PPT dan pelaksanaan strategi anti fraud semester I tahun 2019
30 Agustus 2019	B.225-KOM/08/2019	Progress tindak lanjut temuan BPK RI semester II tahun 2019
06 September 2019	R.65-KOM/09/2019	Konsultasi Kredit
11 September 2019	B.235-KOM/09/2019	Tindak lanjut hasil keputusan RUPSLB BRI
19 September 2019	R.69-KOM/09/2019	Implementasi PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73
10 Oktober 2019	R.76-KOM/10/2019	Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester I 2019
11 Oktober 2019	B.281-KOM/10/2019	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi semester I 2019
15 Oktober 2019	R.77-KOM/10/2019	Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan remunerasi pekerja BRI
05 November 2019	R.84-KOM/11/2019	Stress testing resiko kredit
07 November 2019	R.85-KOM/11/2019	Pendalaman terhadap beberapa debitur yang terkait dengan kolektibilitas minimal 2 DPK
08 November 2019	R.86-KOM/11/2019	Konsultasi kredit
25 November 2019	R.93-KOM/11/2019	Evaluasi laporan pokok pokok hasil audit tw III 2019
26 November 2019	R.94-KOM/11/2019	Konsultasi Kredit

Jenis-jenis Keputusan yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris tahun 2019

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi. Selama Tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
02 Januari 2019	R.01-KOM/01/2019	Persetujuan rencana audit tahunan (PAT) SKAI Tahun 2019
23 Januari 2019	SR.02-KOM/01/2019	Persetujuan bakal calon anggota komisaris dan direksi PT Bank Agroniaga Tbk
30 Januari 2019	B.26-KOM/01/2019	Persetujuan atas revisi dokumen rencana aksi recovery plan PT BRI 2018
31 Januari 2019	SR.03-KOM/01/2019	Persetujuan calon direksi PT BRI Syariah Tbk

Dewan Komisaris

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
11 Februari 2019	B.36-KOM/02/2019	Batasan tindakan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dewan komisaris dan pemegang saham seri A dwiwarna dan RUPS
12 Februari 2019	SR.05-KOM/02/2019	Persetujuan calon anggota dewan komisaris PT Asuransi jiwa bringin jiwa sejahtera
13 Februari 2019	B.49-KOM/02/2019	Pengkinian piagam audit intern
19 Februari 2019	SR.06-KOM/02/2019	Persetujuan calon anggota dewan komisaris dan direksi PT BRI Ventura Investama
13 Maret 2019	B.69-KOM/03/2019	Persetujuan perubahan organisasi
02 April 2019	R.13-KOM/04/2019	Persetujuan HPS Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik th 2019
02 April 2019	SR.07-KOM/04/2019	Persetujuan pemberhentian kepala SKAI BRI
09 April 2019	SR.08-KOM/04/2019	Persetujuan pencalonan komisaris utama dan direktur utama PT BRI Ventura Investama
29 April 2019	SR.11-KOM/04/2019	Persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah
28 Mei 2019	B.152-KOM/05/2019	Persetujuan atas penyertaan pendiri dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun BRI
28 Mei 2019	SR.17-KOM/05/2019	Persetujuan pencalonan pengurus PT BRI Agroniaga Tbk
20 Juni 2019	B.173-KOM/06/2019	Persetujuan piagam audit intern tahun 2019
20 Juni 2019	R.24-KOM/06/2019	Persetujuan perubahan struktur pemegang saham BRI Agro terkait rencana PUT IX Saham BRI Agro Tahun 2019
25 Juni 2019	R.25-KOM/06/2019	Persetujuan RBB Tahun 2019-2020 (revisi) dan revisi RKAP tahun 2019
26 Juni 2019	SR.19-KOM/06/2019	Persetujuan Implementasi management employee ownership program (MESOP) Bagi Pekerja
28 Juni 2019	B.177-KOM/06/2019	Pengiriman berkas dokumen persetujuan piagam audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI
02 Juli 2019	B.178-KOM/07/2019	Persetujuan ketua pengganti komite perkreditan (KKP) BRI
02 Juli 2019	R.33-KOM/06/2019	Persetujuan pengangkatan kepala SKAI BRI
04 Juli 2019	SR.21-KOM/07/2019	Persetujuan perubahan nomenklatur dan pengalihan penugasan direksi BRI Mulifinance Indonesia
09 Juli 2019	R.34-KOM/07/2019	Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait
12 Juli 2019	R.36-KOM/07/2019	Persetujuan tambahan modal kepada PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
26 Juli 2019	R.46-KOM/07/2019	Persetujuan penyediaan dana fasilitas uncommitted credit line kepada pihak terkait atas nama PT Asuransi BRI Life
23 Agustus 2019	B.221-KOM/08/2019	Pengadaan jasa audit KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI tahun 2019
27 Agustus 2019	R.55-KOM/08/2019	Persetujuan penyertaan modal kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur
30 Agustus 2019	R.61-KOM/08/2019	Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Danareksa Sekuritas



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
30 Agustus 2019	R.62-KOM/08/2019	Pelaksanaan PUT IX Saham BRI Agro Tahun 2019
30 Agustus 2019	R.63-KOM/08/2019	Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait Joint borrower PT Bahana Artha Ventura dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
30 Agustus 2019	R.64-KOM/08/2019	Usulan Nomenklatur BRI
17 September 2019	SR.27-KOM/09/2019	Persetujuan pencalonan pengurus PT Danareksa Sekuritas
19 September 2019	R.70-KOM/09/2019	Persetujuan atas usulan penyesuaian organisasi PT BRI (Persero) Tbk
02 Oktober 2019	R.72-KOM/10/2019	Persetujuan Usulan HPS Pengadaan Jasa KAP Dalam Rangka Penelaahan Terbatas Laporan Keuangan Agustus 2019
02 Oktober 2019	R.73-KOM/10/2019	Persetujuan Usulan HPS Pengadaan Jasa KAP Untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun 2019
02 Oktober 2019	R.74-KOM/10/2019	Putusan Addendum Surat Perjanjian Kerja Pengadaan (SPK) Kantor Akuntan Publik
28 Oktober 2019	SR.30-KOM/10/2019	Persetujuan pemberhentian direktur utama PT Danareksa Sekuritas
19 November 2019	R.91-KOM/11/2019	Penyediaan dana kepada pihak terkait an Bank BRI Syariah
28 November 2019	R.95-KOM/11/2019	Persetujuan RBB tahun 2020-2022 dan RKAP tahun 2020
28 November 2019	R.96-KOM/11/2019	Persetujuan dokumen rencana aksi keuangan berkelanjutan tahun 2020
28 November 2019	R.97-KOM/11/2019	Persetujuan dokumen rencana aksi Recovery plan BRI Tahun 2019-2020

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Internal Dewan Komisaris

- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris membuat rencana kerja setiap awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self Assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan Key performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian sendiri, Dewan Komisaris juga melakukan *Review* atas pelaksanaan tugas komite-komite dan sekretariat di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hasil *Review* serta *self assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Komite dinyatakan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Kriteria Penilaian**

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (Key Success Factors) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi perspektif Learning& Growth, Internal process, compliance dan financial.

Dewan Komisaris

Dalam tahun 2019, Dewan Komisaris telah menetapkan aspek-aspek yang menjadi Indikator kinerja utama, sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dekom sesuaidengan ketentuan yang berlaku	2,00
			b	Organisasi Organ Dekom sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ dibawah Dekom sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and propertest OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi MR sesuai ketentuan	2,00
			c	Program pendidikan/training / seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	2,00
Sub Total10,00						
2	Internal Procces	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dekom	RKAP Dekom disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50
			b	PengesahanRBB dan/ atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00
		Pelaksanaan	a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dekom sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dekom terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00
			b	Rapat Dekom dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dekom dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dekom dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00
			c	Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
			d Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50
			e Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00
		Pengawasan	a Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dekom	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dekom	7,50
			Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50
			b Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Pengawasan	c Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
Sub Total					50,00
3	Compliance Prespective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai Good Corporate Governance	a Pelaksanaan Penilaian Self Assessment GCG	Penilaian Self Assessment GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			b Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian Self Assessment GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00
			d Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	Skor penilaian CGPI sesuai dengan target	2,50

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00
			b Pelaksanaan fungsi kepatuhan	Skor self assessment reviu pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50
			c Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semster sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
Sub Total					30,00
4	Financial Perspective	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
			b Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50
			c NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50
			d CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50
Sub Total					10,00
TOTAL					100,00

Pencapaian indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Nilai 80 - 100 = Sangat Baik
 Nilai 70 - < 80 = Baik
 Nilai 55 - < 70 = Cukup Baik
 Nilai < 55 = Kurang Baik

- Mekanisme Proses Penilaian**

Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Dewan Komisaris. Assessment dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan hasilnya sebagai dasar untuk mengambil langkah perbaikan dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

• Review/Hasil Penilaian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil *self assessment* Dewan Komisaris sesuai dengan target dan indikator yang ditetapkan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) Dewan Komisaris tahun 2019 memperoleh skor 99.91 dengan kriteria "Sangat Baik" dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Dewan Komisaris	a Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris comply dengan ketentuan yang berlaku	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator	Sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	2.00	1.00	2.00
			b Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator		2.00	1.00	2.00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	Setiap Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh program orientasi Dewan Komisaris	Selama Tahun 2019 terdapat dua Anggota Dewan Komisaris baru Bpk. Wahyu Kuncoro dan Ibu. Loeke Lrasati A dan sudah mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	2.00	1.00	2.00
			b Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and proper test OJK dan memenuhi kewajiban sertifikasi MR sesuai ketentuan	8 (Delapan) Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and proper test OJK dan memenuhi kewajiban sertifikasi MR sesuai ketentuan	8 (Delapan) Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and proper test OJK dan memenuhi kewajiban sertifikasi MR sesuai ketentuan	2.00	1.00	2.00
			c Program pendidikan/training /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	Seluruh Anggota Dewan Komisaris minimal mengikuti satu kali training atau seminar dalam satu tahun	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan training minimal satu kali dalam setahun	2.00	1.00	2.00
			Sub Total					10.00	10.00
2	Internal Procces	Perencanaan	a Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (paling lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (paling lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	2.50	1.00	2.50
			b Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan tanggapan atas usulan RBB ke Direksi Paling lambat tanggal 30 November 2018	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas RBB BRI 2020-2022 dan RKAP 2019 melalui surat Dewan Komisaris Nomor : R.95-KOM/11/2019 tanggal 28 November 2019	5.00	1.00	5.00

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
		Pelaksanaan	a. Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Selama tahun 2019, terdapat 42 persetujuan aksi korporasi, penyediaan dana pihak terkait dan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tanggapan dan persetujuan yang disampaikan Dewan Komisaris atas seluruh permohonan yang disampaikan Direksi	5.00	1.00	5.00
			b. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.	Dewan Komisaris minimal melaksanakan rapat sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal 4 bulan sekali.	Selama Tahun 2019 terdapat 6 Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, 31 Rapat Komisaris dengan Direktur Bidang, 6 Rapat Komisaris dengan Perusahaan anak, 5 Rapat Internal Dewan Komisaris, 16 Rapat Komite Audit, 25 Rapat KNR, 12 Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan 4 Rapat Komite tata Kelola terintegrasi di bawah Dewan Komisaris.	10.00	1.15	11.50
			c. Menyusun kebijakan nominasi dan pelaksanaan proses nominasi calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna b. Kebijakan Nominasi Perseroan	a. Dewan Komisaris menyampaikan surat Nominasi Pengurus Perseroan sebelum pelaksanaan RUPST dan RUPSLB BRI Tahun 2019. b. Kebijakan Nominasi Perseroan tersedia sesuai ketentuan	a. Usulan Perubahan Pengurus PT BRI (Persero) Tbk disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.01-KNR/01/2019 tanggal 2 Januari 2019. b. Usulan dan penilaian calon direksi BRI disampaikan melalui surat SR.26-KOM/09/2019 tanggal 02 September 2019. c. Permohonan persetujuan bakal calon Direktur Utama disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor SR.28-KOM/09/2019 tanggal 18 September 2019. Dewan Komisaris telah menetapkan Surat Keputusan terkait Kebijakan Nominasi Pengurus Perusahaan Anak BRI Nomor: 03-KIOM/BRI/04/2019 tanggal 30 April 2019 d. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP-07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015	2.50	1.00	2.50



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
			d Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	a. Terdapat ketentuan Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna disampaikan paling lambat Minggu I Juni 2018	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tersedia antara lain sebagai berikut: 1. SK Dewan Komisaris No.01-KOM/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 2. SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/09/2015 tanggal 08 September 2015 3. SK Dewan Komisaris SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/09/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi 4. SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi 5. SK Dewan Komisaris No: 04-KOM/09/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi Yang Ditangguhkan b. Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris SR.10-KOM/04/2019 tentang Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun 2018 tanggal 22 April 2019.	2.50	1.00	2.50
		Pengawasan	e Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 Mei 2019	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2019 disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor:R.15-KOM/05/2019 pada tanggal 07 Mei 2019	2.50	1.00	2.50
			Evaluasi atas KAP yang melaksanakan Audit Tas Laporan Keuangan dan PKBL	Laporan evaluasi atas KAP yang melaksanakan audit atas laporan keuangan dan PKBL BRI	Laporan disampaikan paling lambat 30 Juni 2019 (sesuai dengan ketentuan OJK)	Laporan hasil evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan BRI (DPLK BRI) tahun buku 2018 disampaikan melalui surat B.175-KOM/06/2019 tanggal 26 Juni 2019	2.50	1.00	2.50
			Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja ke 19 Kanwil	Selama Tahun 2018 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 35 kali ke 19 Kanwil	7.50	1.15	8.63

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
			Pelaksanaan review pengendalian internal	Review atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	Review atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.	Review atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris tentang Persetujuan rencana audit tahunan (PAT) SKAI Tahun 2019 nomor R.01-KOM/01/2019 tanggal 02 Januari 2019	2.50	1.00	2.50
		b	Pelaksanaan Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target sebanyak 4 kali	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaan audit internal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi : a. Surat Dewan Komisaris R.08-KOM/02/2019 tentang Laporan Hasil Audit TW IV Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2019 b. Surat Dewan Komisaris Nomor R.18-KOM/05/2019 tentang Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 c. Surat Dewan Komisaris Nomor : R.48-KOM/08/2019 tentang Laporan hasil Audit Triwulan II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019 d. Surat Dewan Komisaris Nomor: R.93-KOM/11/2019 tentang Laporan hasil Audit Triwulan III Tahun 2019 tanggal 25 November 2019	2.50	1.00	2.50
		c	Pelaksanaan Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi tindak lanjut dan Management Letter atas audit umum Laporan keuangan tahun 2018 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.20-KA/04/2019	2.50	1.00	2.50
		d	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan	Review Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Telaah Laporan keuangan dilaksanakan setiap triwulan dan berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsisten penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk.	2.50	1.00	2.50
Sub Total							50.00		52.63



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
3	Compliance Prespective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai Good Corporate Governance	a Pelaksanaan Penilaian Self Assessment GCG	Penilaian Self Assessment GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Self Assessment GCG dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Dewan Komisaris telah melaksanakan self assessment GCG dan memberikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris Nomor: R.03-KOM/01/2019 Pelaksanaan Self Assessment GCG Semester II 2018 dan surat Dewan Komisaris Nomor: R.35-KOM/07/2019 tentang Pelaksanaan Self assessment GCG Semester I 2019	2.50	1.00	2.50
			b Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian Self Assessment GCG terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Penilaian Self Assessment GCG Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Penilaian Self Assessment GCG Terintegrasi dilaksanakan 2 kali dalam satu Tahun	2.50	1.00	2.50
			c Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5.00	1.00	5.00
			d Skor nilai Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Skor CGPI sesuai dengan target	Target Skor nilai CGPI lebih tinggi dari tahun sebelumnya 89,06	Skor CGPI 90,75	2.50	1.02	2.55
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a Pelaksanaan Review atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan Review atas Laporan Profil Risiko setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Terdapat rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris Pelaksanaan Review atas Laporan Profil Risiko setiap 3 bulan selama Tahun 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.27-KOM/01/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018 b. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.153-KOM/05/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2019 c. Surat Dewan Komisaris Nomor: R.52-KOM/08/2019 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2019 d. Surat Dewan Komisaris Nomor B.267/KOM/12/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2019	10.00	1.00	10.00

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
			b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan	a. Pelaksanaan review atas fungsi kepatuhan BRI dilaksanakan setiap Semester b. Nilai self Assessment Review Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	Peringkat risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (Low to Moderate) menurut assessment OJK	Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (Low to Moderate)	2.50	1.00	2.50
			c. Pelaksanaan Review atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Review atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas review fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan setiap semester selama tahun 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank melalui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.27-KOM/01/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018 Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan b. Surat Dewan Komisaris Nomor: R.52-KOM/08/2019 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2019 Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	2.50	1.00	2.50



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir
			d Pelaksanaan review Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Review Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester diberikan melalui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.37-KOM/02/2019 tentang penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester II tahun 2018 b. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.40-KOM/02/2019 tentang Rekomendasi draft piagam audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI versi 1.0 c. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.177-KOM/06/2019 tentang persetujuan piagam audit intern terintegrasi konglomerasi keuangan BRI d. Surat Dewan Komisaris Nomor B.187-KOM/07/2019 tentang penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester I tahun 2019 e. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.281-KOM/10/2019 tentang Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi semester I 2019 f. Surat Dewan Komisaris Nomor: R.76-KOM/10/2019 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester I 2019.	2.50	1.00	2.50
Sub Total							30.00		30.05
4	Financial Perspective	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a Laba	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	36,115	34029	2.50	0.94	2.36
			b Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	1,350,666	1,343,078	2.50	0.99	2.49
			c NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2.16%	2.62%	2.50	0.82	2.06
			d CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	21.33%	22.55%	2.50	1.06	2.64
Sub Total							10.00		9.54
TOTAL							100.00		102.22

Dewan Komisaris

Penilaian Eksternal Dewan Komisaris

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tersebut kepada RUPS dalam laporan tahunan Perseroan, dimana berdasarkan laporan tersebut RUPST menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.
 - Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS
Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2019 yang seluruhnya tercapai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.
 - Pihak Yang Melakukan Assessment
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS
Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2019 yang seluruhnya tercapai, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan Perseroan. Di samping itu dalam Anggaran Dasar BRI juga diatur kewajiban Dewan Komisaris untuk menyusun program kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disusun oleh Direksi.
- Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan perseroan selama tahun berjalan.
2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Self Assessment GCG
Dewan Komisaris juga melakukan self assessment GCG terkait penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester dengan menggunakan Kertas Kerja self assessment sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK. Self assessment dimaksud meliputi assessment terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris (faktor 1), Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (faktor 3) dan Penanganan Benturan Kepentingan (faktor 4).
 - Kriteria Evaluasi Self Assessment GCG oleh Dewan Komisaris
Self assessment GCG tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan kedalam 3 (tiga) aspek governance yaitu: governance structure, governance process dan governance outcome yang harus di dukung dengan data/informasi dan dokumen yang memadai, seperti kebijakan internal, laporan internal, laporan Bank, dan/atau pengungkapan-pengungkapan lainnya yang telah dipublikasikan.
 - Pihak yang Melakukan Assessment GCG Dewan Komisaris
Penilaian Self Assessment GCG Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
 - Hasil Self Assessment GCG oleh Dewan Komisaris
Hasil self assessment GCG Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah dengan peringkat implementasi sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Aspek Penilaian	Peringkat Implementasi
<i>Governance Structure</i>	1
<i>Governance Process</i>	1
<i>Governance Outcome</i>	1
Rata-rata	1 (sangat Baik)

*) Hasil tersebut merupakan self assessment Dewan Komisaris

3. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Lembaga Independen
Salah satu mekanisme penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang berasal dari eksternal yang dilakukan melalui penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance Perseroan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) melalui program riset penerapan GCG: Corporate Governance Perception Index (CGPI).

- Prosedur & Kriteria Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris Melalui Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Pelaksanaan assessment Corporate Governance Perception Index (CGPI) dilakukan melalui 4 (empat) tahap penilaian yaitu 1) Self assessment, 2) Penilaian Dokumentasi, 3) Penilaian Makalah, dan 4) Observasi Wawancara terhadap aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome BRI.
- Pihak Yang Melakukan Assessment
Pihak yang melakukan assessment kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).
- Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui Assessment Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Berdasarkan penilaian pihak independen tersebut skor penilaian Perseroan masuk dalam kategori "Sangat Terpercaya" dengan total point 90,75 (Governance Structure: 31,66, Governance Process: 29,00, dan Governance

Outcome: 30,09). Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan penilaian tahun sebelumnya dengan total point 90,75.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2019 Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing secara baik dan telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris.

Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi dan masukan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Pengawas sekaligus memberikan nasihat kepada Manajemen, secara umum penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Komite Audit**
Peranan Komite Audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

Dewan Komisaris

- **Komite Pemantau Manajemen Risiko**

Kemampuan BRI dalam mengelola risiko tidak terlepas dari keberhasilan Komite Pemantau Manajemen Risiko bersama dengan Direktorat Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di BRI. Peringkat profil risiko yang berada di level Low to Moderate, kualitas portofolio kredit yang baik dan prosentase non performing loan yang terjaga pada tahun 2019 merupakan hasil nyata dari sinergi pengelolaan risiko yang baik. Komite Pemantau Manajemen Risiko juga memberikan berbagai masukan dan kajian kepada Dewan Komisaris terhadap keputusan permohonan persetujuan atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Pemantau Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Kontribusi dari Komite Nominasi dan Remunerasi juga sangat besar terutama terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk nominasi pengurusan anak perusahaan serta pengelolaan SDM secara keseluruhan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris BRI dan Perusahaan Anak serta pihak independen anggota komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- **Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan unsur-unsur dari anggota Dewan Komisaris BRI, anggota Dewan Komisaris BRI Syariah, BRI Agro, BRI Life, BRI Finance serta anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Bank BRI Syariah. Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, audit terintegrasi dan fungsi Kepatuhan terintegrasi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Dewan Komisaris Badan usaha Milik negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, Peraturan Direksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar BRI.

PEDOMAN TATA TERTIB DIREKSI (BOD CHARTER)

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Board charter) Nokep 801-DIR/SKP/11/2015 tanggal 11 November 2015.

Board charter Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Board charter Direksi berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi

8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolektif bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

- a. Melaksanakan keputusan RUPS.
- b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
- c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
- d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.
- e. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Direksi

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
- Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
- Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

- Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
- Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki kewenangan dibawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

- Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain;

- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
- Menghapusbukkan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban

Berdasarkan Anggaran Dasar Direksi berkewajiban untuk:

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan Rencana Kerja lainnya serta Perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
- Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

5. Menyusun Laporan Keuangan pada butir 4 diatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
10. Menyimpan ditempat kedudukan Perseroan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
14. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai, serta organ yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan dan pengabdianya secara penuh kepada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
20. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
21. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
22. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank tempat yang bersangkutan maupun pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Etika Kerja

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi perseroan maupun anak perusahaannya.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
3. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

Direksi

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
- b. Anggota Dewan Komisaris/ dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
- d. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislative dan atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
4. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada perusahaan lain.
5. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus.
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 1.
6. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perseroan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, pembagian tugas masing-masing Direksi BRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertujuan untuk memastikan agar fungsi pengelolaan Perseroan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Ruang Lingkup Pekerjaan
Sunarso Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Catur Budi Harto Wakil Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Haru Koesmahargyo Direktur Keuangan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap Corporate Development & Strategy, Akuntansi Manajemen & Keuangan, Assets & Liabilities Management, dan Hubungan Investor; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Agus Noorsanto Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Hubungan Lembaga, Transaction Banking, dan Bisnis BUMN; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Nama	Ruang Lingkup Pekerjaan
Priyastomo Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan Bisnis Kecil, Ritel & Menengah, Bisnis Ritel & Menengah, Small Sales Management, dan Bisnis Pertanian; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Supari Direktur Bisnis Mikro	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan Bisnis Mikro, Micro Sales Management, Bisnis Program & Kemitraan, Social Entrepreneurship & Inkubasi; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Handayani Direktur Konsumer	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Wealth Management, Kredit Konsumer, Kredit Briguna, Kartu Kredit, Mass Funding, Retail Payment dan Marketing Communication; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Jaringan dan Layanan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Kantor, Jaringan Brilink, E-Channel, Layanan & Contact Center, dan Sentra Operasi; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Indra Utoyo Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan IT Strategy & Governance, Application Management & Operation, IT Infrastructure & Operation, Digital Center of Excellence, Kerjasama Teknologi dan Information Security; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Herdy Rosadi Harman Direktur Human Capital	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Human Capital, Culture Transformation serta BRI Corporate University; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Agus Sudiarto Direktur Manajemen Risiko	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio, Manajemen Risiko Operasional & Pasar, Analisis Risiko Kredit, Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Kebijakan Kredit, dan Operasional Kredit; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
Azizatul Azhimah Direktur Kepatuhan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • Memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kepatuhan, Hukum, dan Kebijakan & Prosedur; • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kriteria

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berikut:

Direksi

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah:
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan usaha Milik negara, Badan usaha Milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas pada Badan usaha Milik negara;
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pemenuhan PBI No. 12/23/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test)

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia).

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan Integritas

- Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki:
- Akhlak dan moral yang baik;
- Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
- Tidak termasuk dalam daftar Tidak lulus.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan

Prosedur pengangkatan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Direksi yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan kompetensi terlebih dahulu di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BRI melalui penelurusan pengalaman profesional dan riwayat hidup. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Nota Dinas Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Dewan Komisaris atas dasar Rapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan atas calon anggota Direksi. Hasil putusan rapat Dewan Komisaris tersebut sekaligus menjadi dasar rekomendasi calon Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Calon anggota Direksi kemudian diangkat melalui keputusan RUPS yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu kepada POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Penilaian OJK dilaksanakan melalui antara lain penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka BRI melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

- Meninggal dunia
- Masa jabatannya berakhir
- Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
- Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Pengungkapan Kebijakan Direktur Pengganti dan SEVP

Dalam memastikan kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan pada saat Direktur dan SEVP berhalangan hadir, BRI memiliki kebijakan Penetapan Direktur Pengganti yang tertuang dalam SK Direksi BRI No. S.20-DIR/CDS/05/2017.

Direktur Pengganti

- Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.
- Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
- Direktur Utama Pengganti I adalah Wakil Direktur Utama.
- Direktur Utama Pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir dengan tetap memperhatikan four eyes principle sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan tentang perkreditan.
- Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka tugasnya dapat dirangkap oleh Direktur Utama dan tidak diperlukan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Wakil Direktur Utama pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir.
- Direktur Kepatuhan Pengganti harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai berikut:
 - Direktur lain, kecuali Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
 - Direktur Kepatuhan Pengganti dilarang membawahkan fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang & jasa, teknologi informasi dan audit intern.
 - Apabila Direktur Kepatuhan Pengganti membawahkan fungsi-fungsi pada butir 'b' Ayat ini, maka tugas utamanya digantikan oleh Direktur Pengganti.
- Direktur Pengganti I ditetapkan apabila Direktur tidak ada atau berhalangan hadir.
- Direktur Pengganti II ditetapkan apabila Direktur dan Direktur Pengganti I tidak ada atau berhalangan hadir.

Direksi

10. Direktur Pengganti III ditetapkan apabila Direktur, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II tidak ada atau berhalangan hadir.
11. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur Pengganti I s.d III menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur Pengganti.
12. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III, Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.

SEVP Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan SEVP yang tugasnya diambil alih.
2. Pengambilalihan tugas SEVP berlaku efektif apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
4. Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
5. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur I dan Direktur II tersebut menjalankan tugas untuk mengambil alih tugas SEVP, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP.
6. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP dan Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat mengambil alih tugas SEVP.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DIREKSI

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tugasnya, Direksi BRI dapat membentuk komite-komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi BRI membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank. Hingga 31 Desember 2019, BRI memiliki 10 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management Committee (RMC)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Human Capital
6. Komite Evaluasi Jabatan
7. Komite Produk
8. Komite Pengadaan Barang dan Jasa
9. Komite Capital & Investment
10. Komite Kredit



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman dan Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi. Keberagaman Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan dapat membantu Perseroan dalam mencapai target dan tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka Panjang.

Tabel Data Keberagaman Komposisi Direksi Bank BRI

Usia	Jenis Kelamin	Agama	Latar Belakang Pendidikan/Bidang Studi	Pengalaman Kerja	Pengalaman Kedirektoran/di bidang industri perbankan atau keuangan
Keberagaman usia Direksi mulai dari usia 48 s/d 62 tahun	Terdapat Direksi BRI berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	Terdapat keberagaman lebih dari 1 agama	Direksi BRI memiliki latar belakang Pendidikan S3 manajemen bisnis, Pendidikan akuntansi, MBA, Magister Manajemen, ilmu pertanian dokter gigi, magister administrasi bisnis, Teknik Elektro Komunikasi, Communication and Signal Processing, dan Human Capital.	Pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di bidang keuangan/finansial dan/atau pengalaman di bidang tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan yang jabat saat ini.	Direksi Bank BRI memiliki pengalaman kedirektoran sebelum menjadi Direksi Bank BRI, Direksi Bank BRI memiliki pengalaman di dunia perbankan dan atau bidang tugas yang saat ini diemban oleh yang bersangkutan.

KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2019 DAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2019 terdapat perubahan komposisi Direksi melalui RUPSLB tanggal 3 Januari 2019, RUPST tanggal 15 Mei 2019, serta RUPSLB 2 September 2019 dimana RUPS tersebut menyetujui, mengangkat dan/atau mengalihkan tugas Direktur BRI, sehingga komposisi menjadi, sebagai berikut:

Komposisi Direksi Dalam Periode 22 Maret 2018 – 3 Januari 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Suprajarto	Direktur Utama	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Kuswiyoto	Direktur Corporate Banking	RUPSLB tanggal 12 Agustus 2015
Supari	Direktur Retail dan Menengah	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015

Direksi

Komposisi Direksi Dalam Periode 22 Maret 2018 – 3 Januari 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST tanggal 23 Maret 2016
R. Sophia Aliza	Direktur Human Capital	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018

Komposisi Direksi Dalam Periode 3 Januari 2019 – 2 September 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Suprajarto*	Direktur Utama	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sunarso	Wakil Direktur Utama	RUPSLB tanggal 3 Januari 2019
Supari	Direktur Retail dan Menengah	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Priyastomo	Direktur Mikro& Kecil	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST tanggal 23 Maret 2016
R. Sophia Aliza	Direktur Human Capital	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018

*) Ybs. Efektif s/d 28 Agustus 2019

Komposisi Direksi Dalam Periode 2 September 2019 – 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Sunarso	Direktur Utama	Diangkat sebagai Direktur Utama pada RUPSLB pada tanggal 02 September 2019
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 2 September 2019
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Supari	Direktur Bisnis Mikro	RUPST tanggal 22 Maret 2018
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Komposisi Direksi Dalam Periode 2 September 2019 – 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	RUPSLB tanggal 2 September 2019
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan & Layanan	RUPST tanggal 22 Maret 2018
Agus Noorsantor	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	RUPSLB 2 September 2019
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	RUPSLB 2 September 2019
Azizaton Azhimah	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 2 September 2019

INDEPENDENSI DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (Board Charter) BRI mengatur tentang Independensi Direksi dimana Direksi wajib mendahulukan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu serta menghindari potensi benturan kepentingan atas transaksi yang dilaksanakan oleh Bank.

Selain proses pengambilan keputusan oleh Direksi wajib terlepas dari tekanan atau intervensi pihak manapun.

BRI memastikan adanya independensi Direksi melalui jajaran Direksi yang seluruhnya anggotanya :

1. tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun dengan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan
2. tidak memiliki jabatan rangkap diluar BRI.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

1. Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
2. Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.

Hingga 31 Desember 2019, tidak ada anggota Direksi yang miliki hubungan afiliasi dengan saham pengendali, maupun dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik secara keuangan, kepengurusan maupun hubungan keluarga.

Direksi

Bahwa Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar. Adapun data tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Anggota Direksi (BOD)												
Sunarso		√		√		√		√		√		√
Catur Budi Harto		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargyo		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√
Supari		√		√		√		√		√		√
Ahmad Solichin Lutfiyanto		√		√		√		√		√		√
Herdy Rosadi Harman		√		√		√		√		√		√
Agus Noorsanto		√		√		√		√		√		√
Agus Sudiarto		√		√		√		√		√		√
Azizatun Azhimah		√		√		√		√		√		√
Suprajarto*)		√		√		√		√		√		√
Mohammad Irfan*)		√		√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto*)		√		√		√		√		√		√
R. Sophia Alizsa*)		√		√		√		√		√		√
Osbal Saragi Rumahorbo*)		√		√		√		√		√		√

*) Efektif sampai dengan tanggal 2 September 2019

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Direksi BRI telah memenuhi ketentuan Rangkap Jabatan sebagaimana terdapat pada Peraturan yang berlaku. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Direksi BRI per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2018		31 Desember 2019	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
DIREKSI					
Sunarso*	Direktur Utama	-	-	-	-
Catur Budi Harto**	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Haru Koesmahargyo	Direktur	528,700	0.00043	944.400	0.00077
Priyastomo	Direktur	528,700	0.00043	944.400	0.00077
Indra Utoyo	Direktur	419,500	0.00034	835.200	0.00068
Supari	Direktur	-	-	351.100	0.00028
Handayani	Direktur	106,600	0.00003	522.300	0.00042
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur	585.000	0.00047	928.200	0.00075
Herdy Rosadi Harman**	Direktur	-	-	-	-
Agus Noorsanto**	Direktur	-	-	46.800	0.000037
Agus Sudiarto**	Direktur	-	-	-	-
Azizaton Azhimah**	Direktur	-	-	25.100	0.000020

*) Diangkat dalam RUPSLB 3 Januari 2019

**) Diangkat dalam RUPSLB 2 September 2019

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BRI sepanjang tahun 2019 telah dilaporkan pada Perusahaan dalam 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transaksi atas saham yang dilaksanakan oleh anggota Direksi BRI sepanjang tahun 2019 di laporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Program Kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka tantiem Direksi dan Dewan Komisaris yang ditangguhkan dalam bentuk saham perusahaan (BBRI). Program ini merupakan program kepemilikan saham dalam rangka pemberian porsi tantiem yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan/syarat pencairan yang telah ditetapkan. Program ini hanya berlaku bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen yang menjabat selama periode tahun 2018.

Direksi

Adapun program tersebut di eksekusi pada tanggal 24 Juni 2019 dengan rincian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Pembelian /Penjualan Saham	
			Lembar	Tanggal transaksi
1	Suprajarto	Direktur Utama	489.000	24 Juni 2019
2	Priyastomo	Direktur	415.700	24 Juni 2019
3	Haru Koesmahargyo	Direktur	415.700	24 Juni 2019
4	Mohammad Irfan	Direktur	415.700	24 Juni 2019
5	R. Sophia Alizsa	Direktur	415.700	24 Juni 2019
6	Sis Apik Wijayanto	Direktur	415.700	24 Juni 2019
7	Indra Utoyo	Direktur	415.700	24 Juni 2019
8	Handayani	Direktur	415.700	24 Juni 2019
9	Supari	Direktur	321.800	24 Juni 2019
10	A.Solichin Lutfiyanto	Direktur	321.800	24 Juni 2019
14	Gatot Trihargo	Komisaris	207.800	24 Juni 2019
11	Osbal Saragi R.	Komisaris	321.800	24 Juni 2019
12	Nicolaus T.B Harjanto	Komisaris	198.000	24 Juni 2019
13	Hadiyanto	Komisaris	153.300	24 Juni 2019

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program Orientasi Direksi

Setiap anggota Direksi BRI yang baru bergabung wajib mengikuti Program Orientasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Visi, misi dan strategi Perseroan.
2. Prinsip-prinsip GCG di dalam Perseroan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Pengenalan organ – organ Perseroan beserta tugas dan kewenangannya termasuk Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Pada tahun 2019 program orientasi telah dilaksanakan pada minggu pertama setelah Direksi baru diangkat pada RUPS untuk Direksi BRI yang baru diangkat yaitu:

- Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama
- Herdy Rosadi Harman, Direktur Human Capital
- Agus Noorsanto, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
- Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko
- Azizatul Azhimah, Direktur Kepatuhan

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Pengembangan kompetensi dan pelatihan Direksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Direksi dalam menunaikan tugasnya. Program Pendidikan Pengembangan Kompetensi Direksi selama tahun 2019 sebagaimana telah dilaporkan pada Bab Profil.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi manajemen risiko sepanjang tahun 2019 yang diikuti anggota Direksi adalah sebagaimana tercantum di Bab Profil Perusahaan.

PEMANTAUAN EVALUASI DAN STRATEGI BANK

Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas strategi 2018 yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemantauan dan evaluasi strategi 2019 dilaksanakan dalam bentuk:

- Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas sesuai dengan struktur GCG yaitu fungsi eksekutif dan pengawasan termasuk dalam hal pemantauan dan evaluasi atas strategi Bank. Dalam hal ini baik strategi Bank dalam bentuk RKAP (tahunan), RBB (3 tahunan) serta Corporate Plan (Jangka Panjang).

- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam periode semesteran, evaluasi dilakukan oleh Direksi kemudian selanjutnya dimintakan pendapat dan putusan bersama dengan Dewan Komisaris BRI. Hal ini sudah dilaksanakan rutin dan selanjutnya apabila terdapat Revisi akan dimintakan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

RENCANA SUKSESI DIREKSI

Suksesi Direksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Pelaksanaan suksesi Direksi mempertimbangkan dari berbagai aspek segi bidang pekerjaan, pengalaman kerja dan kepemimpinan. Prinsip pelaksanaan Suksesi Direksi didasarkan pada asas Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

BRI memiliki kebijakan talent pool candidate untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang potensial untuk menduduki posisi pimpinan di Perusahaan maupun Perseroan BUMN lain. Selain itu perusahaan juga secara berlaka melakukan evaluasi terhadap pejabat eksekutif maupun pejabat dibawahnya untuk dapat menjadi penerus selanjutnya sehingga kepemimpinan dan karakter tetap cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan diperlukan oleh perusahaan.

Kandidat yang terpilih kemudian diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya menjalani prosedur pencalonan Direksi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

PENILAIAN PENERAPAN GCG 2019 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2019 disampaikan pada sub bab Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2019

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan berdasarkan KPI Direksi yang disusun di awal tahun berjalan.

Pihak Penilai Kinerja

Penilaian Kinerja Direksi tahun 2019 dinilai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris di setiap triwulan dalam bentuk evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI).

Selanjutnya Dewan Komisaris menyusun Laporan Pengawasan dan disampaikan kepada:

- a. Kementerian BUMN dan OJK secara berkala di tiap semester tahun buku bersangkutan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai dasar untuk RUPS dalam menentukan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di tahun buku berikutnya.

Indikator Penilaian Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan mengacu KPI Direksi yang kemudian di kelompokkan menjadi aspek kinerja sebagai berikut:

- Keuangan: Fokus perusahaan untuk meningkatkan revenue dan meminimasi biaya.

- Nasabah: Fokus perusahaan untuk meningkatkan persepsi Pelanggan terhadap "value proposition" Perusahaan. Pelanggan yang dimaksud disini mencakup nasabah internal, nasabah eksternal, termasuk regulator.
- Inovasi: Fokus Perusahaan untuk meningkatkan inovasi produk/layanan, customer value, dan efektivitas proses bisnis
- Pekerja: Fokus Perusahaan untuk meningkatkan pengembangan organisasi, kemampuan, dan engagement Pekerja.

Mekanisme Penilaian

Direksi BRI memperoleh target Kontrak Manajemen dari Kementerian BUMN RI berupa target-target dengan aspek :

1. Keuangan & Pasar
2. Fokus Pelanggan
3. Efektivitas Produk & Proses
4. Fokus Tenaga Kerja
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, & Tanggung Jawab Kemasyarakatan
6. Agent of Development

Aspek-aspek tersebut memiliki Key Performance Indicator (KPI) serta bobot atas KPI tersebut.

Hasil Penilaian 2019

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kontrak manajemen serta hasil penilaian tersebut bersifat kolektif dan kolegial yang mencerminkan kinerja masing-masing Direksi termasuk Direktur Utama. Metode penilaian kinerja Direksi merupakan self assessment atas pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan aspek-aspek penilaian kontrak manajemen tahun 2019.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penilaian Penerapan GCG 2019 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Kontrak Manajemen Tahun 2019

Aspek	KPI	Bobot	Ukuran
Keuangan&Pasar	1 Laba setelah pajak (Earning After Tax –EAT)	5,4 %	Lebih tinggi dari tahun lalu
	2 Market Cap Growth	5,4 %	Lebih tinggi dari industri bank (JAKFIN)
	3 Rasio NPL	5,4 %	Lebih tinggi dari industri bank
	4 Cost to Income Ratio	5,4 %	Lebih baik dari tahun lalu
FokusPelanggan	5 Hasil Survey Kepuasan Pelanggan oleh Surveyor Independen	9.90%	Lebih baik dari tahun lalu
	6 Implementasi atas PAB yang telah disetujui OJK	9.90%	Minimum 80%
EfektivitasProduk& Proses	7 Peningkatan produk& layanan perbankan yang sudah terdigitalisasi (Misalnya: dari teller menjadi e-channel)	6.30%	Lebih baik dari tahun lalu
	8 Pertumbuhan Agen Branchless Banking	6.30%	Lebih baik dari tahun lalu
	9 Implementasi subrogasi online untuk KUR	5.40%	Terlaksananya subrogasi online untuk KUR di seluruh cabang
Fokus Tenaga Kerja	10 Employee Productivity	8.10%	Meningkat dari tahun lalu
	11 Employee Engagement Survey	7.20%	Lebih baik dari tahun lalu
Kepemimpinan, Tata Kelola, & Tanggung Jawab Kemasyarakatan	12 Skor KPKU	5.40%	Lebih baik dari skor tahun terakhir
	13 Realisasi Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	4.50%	Realisasi 100% dari anggaran RKAP
	14 Corporate Governance Perception Index	5.40%	Lebih baik dari tahun lalu
Agent of Development	15 Implementasi Sinergi ICT Himbara	1.20%	Pencapaian sesuai yang telah dijadwalkan
	16 Implementasi ATM, EDC Merah Putih (efisiensi capex)	1.10%	Sesuai BUMN target Kementerian
	17 Peningkatan fee based income	1.10%	Lebih tinggi dari tahun lalu
	18 Peningkatan laba perusahaan anak	1.10%	Lebih tinggi dari tahun lalu
	19 Peningkatan jumlah Rumah Kreatif	1.10%	Sesuai target Pemerintah
	20 Peningkatan jumlah BUMDES	1.10%	Lebih tinggi dari tahun lalu
	21 Pembiayaan Bank Himbara pada sektor infrastruktur	1.10%	Meningkat dari tahun lalu
	22 Realisasi Penyaluran KUR	1.10%	Sesuai target Pemerintah
	23 Realisasi penyaluran Bansos dan Kartu Tani	1.10%	Sesuai target Pemerintah
Total		100,00%	

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BRI telah memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015. Kebijakan tata kelola remunerasi BRI diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

- Latar belakang dan Tujuan kebijakan remunerasi. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
- Evaluasi kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharui sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- Indepndensi remunerasi bagi pekerja di unit ariabl. Remunerasi yang diterima Pekerja disusun berdasarkan jabatan Pekerja melalui hasil evaluasi jabatan, sehingga Remunerasi yang diterima Pekerja di unit ariabl tidak terkait dengan unit kerja yang di awasi.

Cakupan kebijakan remunerasi dan implementasi per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri.

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perusahaan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perusahaan mengadakan

peninjauan terhadap Tunjangan Premium secara ariable apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perusahaan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko meliputi:

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan Person Grade dan/ atau Job Grade Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah midpoint (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menanggukuhkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variable.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

- Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja. Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perusahaan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- b. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu. Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja, besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.
- c. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai. Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

- a. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
 - ii. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.
- b. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus). Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT yang terbukti melakukan Individual Fraud.

PROSEDUR PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

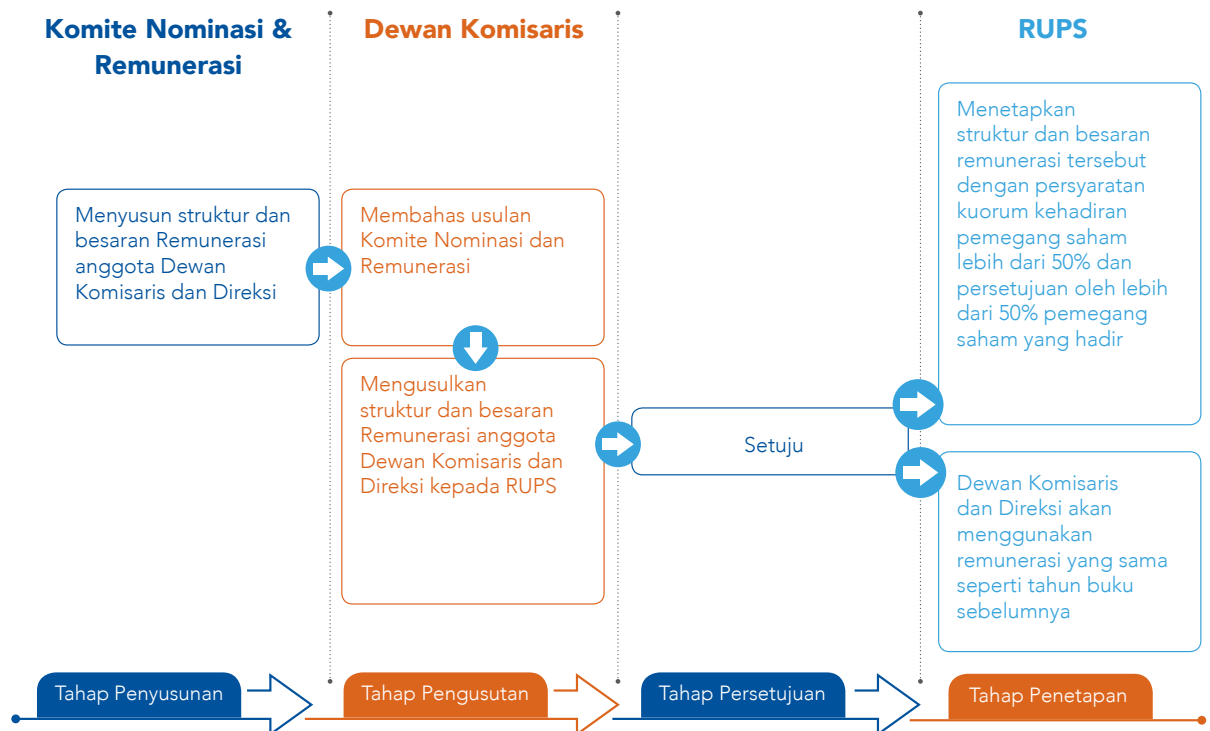
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari: honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Berdasarkan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang serta menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dalam setiap RUPS Tahunan mengajukan usulan mengenai penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi setelah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, business size, dan hasil survei remunerasi dalam industri perbankan.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Direksi



Tahapan Prosedur	Aktivitas
Penyusunan	Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.
Pengusulan	Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Penetapan	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
- Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah 10% dari Tantiem.

Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus).

Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:

- Terbukti adanya Individual Fraud.
- Restatement laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
- Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (Moderate to High) atau lebih buruk.

Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perusahaan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan bekerjasama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan benchmarking dan/atau Salary Survey sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan jumlah nominalnya.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 tahun.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi yang bersifat Variable meliputi:

- a. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel. Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 1. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan; dan
 2. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
 - i. Tunjangan Kinerja.
Tunjangan Kinerja merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun. Tunjangan Kinerja bertujuan untuk mendorong motivasi Pekerja, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.
 - ii. Bonus.
Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.
- b. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- c. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
- Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
 - Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
 - Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi bersifat variabel (yang ditangguhkan) selama 1 (satu) tahun atas tantiem tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Direksi dan Dewan Komisaris	Jenis Remunerasi Variabel (yang ditangguhkan)*
1	Suprajarto	Direktur Utama	Saham
2	Mohammad Irfan	Direksi	Saham
3	Haru Koesmahargyo	Direksi	Saham
4	Kuswiyoto	Direksi	Saham
5	Sis Apik Wijayanto	Direksi	Saham
6	Priyastomo	Direksi	Saham
7	Indra Utoyo	Direksi	Saham
8	R Sophia Alizsa	Direksi	Saham
9	Handayani	Direksi	Saham
10	Osbar Saragi Rumahorbo	Direksi	Saham
11	Supari	Direksi	Saham
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direksi	Saham
13	Donsuwan Simatupang	Direksi	Saham
14	Susy Liestyowati	Direksi	Saham
15	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	Cash
16	Mahmud	Komisaris Independen	Cash
17	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	Cash
18	Tri Wintarto	SEVP BRI (pegawai 1 level dibawah Direksi)	Cash
19	Gunawan Sulistyio	SEVP BRI (pegawai 1 level dibawah Direksi)	Cash

*) remunerasi yang ditangguhkan dengan presentase tertentu atas pencapaian kinerja tahun buku 2018



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Keterangan	Jumlah	Total Nominal (Rp)
Direksi/BOD	14 orang	21.399juta
Komisaris/BOC	8 orang	7.650 juta
Pekerja/Workers	91.620 orang	5,5 Triliun

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker Pihak yang ditetapkan menjadi MRT adalah sbb.:

- Direksi
- Dewan Komisaris
- Senior Executive Vice President (SEVP)

Share Option yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

- Kebijakan Share Option
Data telah disajikan dalam sub bab Share Option
- Jumlah Saham yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat Eksekutif sebelum diberikan Share Option.
Terdapat pada sub bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris BRI.
- Jumlah Share Option yang diberikan. Jumlah Share Option mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja perusahaan, unit kerja dan individu serta memperhitungkan stock option yang telah dialokasikan untuk kebijakan share option.
- Jumlah share option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir tahun 2019. Pada tahun 2019, belum dilakukan eksekusi terhadap share option.
- Harga opsi yang diberikan
Data telah disajikan dalam sub bab Share Option)
- Jangka waktu berlakunya eksekusi share option
Data telah disajikan dalam sub bab Share Option

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji/ Salary Ratio	2017	2018	2019
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	37,93	36,04	31,24
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11	1,18	1,16
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11	1,14
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,10	2,56	2,60

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pekerja selama 1 tahun pertama bekerja. Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

Tidak terdapat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun buku 2018)	
	Tunai (Gross)	Saham (setara rupiah)
Direksi	-	Rp21.399 juta
Dewan Komisaris	Rp6.229 juta	Rp3.289 juta
SEVP	Rp2.139 Juta	13.500 lembar

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu tahun.

- a. Remunerasi yang bersifat Tetap atau Variabel.

Deskripsi	Total
Kompensasi yang bersifat tetap	Rp10.803.769 juta
Kompensasi yang bersifat variable	Rp5.425.741 juta

- b. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perusahaan.
- Upah Bulanan
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - Tunjangan cuti
 - Tunjangan Kinerja
 - Bonus/Tantiem

Informasi kuantitatif mengenai:

- a. Total remunerasi yang masih ditangguhkan baik penyesuaian implisit atau eksplisit.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
- b. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit selama tahun 2018.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
- c. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama tahun 2018.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem
Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan masing-masing sebesar 95% dan 90% dari Honorarium Komisaris Utama.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

2. Tunjangan

Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	a. THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh
2.	Tunjangan Transportasi	a. Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. b. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: - Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana huruf a di atas. - Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
3.	Asuransi Purna Jabatan	a. Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. b. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
4.	Keanggotaan pada <i>Club</i>	Diberikan dua keanggotaan <i>Club</i> Profesi.
5.	Pakaian <i>Corporate</i>	Diberikan dua stel jas corporate dan satu baju batik per Tahun.

3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Kesehatan	a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. b. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal tiga orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 Tahun c. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: - rawat jalan dan obat; - rawat inap dan obat; - medical check up. d. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: - Penggantian Frame setiap dua Tahun maksimal sebesar Rp15 juta. - Penggantian Lensa setiap 1 Tahun. e. Medical check up diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : - Medical check up diberikan 1 kali setiap Tahun. - Medical check up dilakukan di dalam negeri. f. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping
2.	Fasilitas Bantuan Hukum	a. Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. b. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

4. Fasilitas Lainnya

Fasilitas lainnya yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Fasilitas Lainnya	Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya berupa perjalanan dinas, pemberian laptop/ipad dan pengemudi yang diberikan sesuai ketentuan intern perusahaan yang diatur dalam suatu keputusan Direksi.

Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris BRI tahun buku 2019

No	Nama	Gaji (Rp)	THRK (Rp)	Tantiem Tahun Buku 2018 (Rp)	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Premi Asuransi Purna Jabatan (Rp)	Pakaian Corporate (Rp)	Tunjangan Komunikasi (Rp)
Dewan Komisaris BRI									
1	Andrinof A Chaniago *)	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Gatot Trihargo	√	√	-	√	-	√	-	-
3	A. Fuad Rahmany	√	√	√	√	√	√	√	-
4	A. Sonny Keraf	√	√	√	√	√	√	√	-
5	Jeffry J. Wurangian *****)	√	√	√	√	√	√	√	-
6	Mahmud	√	√	√	√	√	√	√	-
7	Nicolaus T.b Harjanto *)	√	√	√	√	√	√	√	-
8	Rofikoh Rokhim ***)	√	√	-	√	√	√	-	-
9	Hadiyanto *****)	√	-	-	√	-	√	-	-
10	Mustafa Abubakar **)	√	-	√	√	-	-	-	-
11	Ahmad Fuad **)	√	-	√	√	√	√	-	-
12	Adhyaksa Dault ****)	-	-	√	-	-	-	-	-
13	Vincentius Sonny Loho *****)	-	-	√	-	-	-	-	-
Jumlah Total		14,758,612,000	1,199,715,000	109,287,930,015	2,951,722,400	789,195,198	4,814,141,802	178,526,800	-

Keterangan :

*) Diangkat oleh RUPST tanggal 15 Mei 2019

**) Diangkat oleh RUPSLB tanggal 2 September 2019

***)) Diberhentikan oleh RUPST pada tanggal 15 Mei 2019

*****) Mengundurkan diri pada tanggal 20 September 2018

*) & *****) Diangkat oleh RUPST tanggal 15 Mei 2019 dan Efektif s/d 18 November 2019 sebagai Komisaris BRI

*****)) Diberhentikan oleh RUPST 22 Maret 2018



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris BRI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2019)	
	Orang	Jutaan
Remunerasi:		
Gaji**	11	14,758
Tunjangan Rutin***	10	4,328
Tantiem*	10	109,287
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi	11	2,951
Asuransi Purna Jabatan	10	4,814
Jenis Remunerasi per Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	9	38,714
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar**	1	5,217
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	1	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

*) termasuk Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2017 namun tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 22 Maret 2018

**) Termasuk Dewan Komisaris yang diberhentikan pada RUPST tanggal 22 Maret 2018 dan RUPSLB tanggal 03 Januari 2019

***) Tunjangan terdiri dari THR, Transportasi dan pakaian Corporate

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris R.42-KOM/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95% dan Direksi sebesar 90%.
2. Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5juta,- per bulan. termasuk didalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan.
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus fit and proper test oleh OJK.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Keanggotaan Klub		Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: 2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan Club Financial. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club) 2 (dua) club profesi. Direktur: 1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club). 2 (dua) club profesi
Pakaian corporate		Berupa 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per tahun.
Komunikasi	Biaya pulsa diganti sesuai dengan pemakaian	Diberikan 2 (dua) unit HP yang dapat diganti setiap tahun.

3. Fasilitas

Tipe	Penjelasan
Kesehatan	- Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Direksi dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. - Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun - Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: - Rawat jalan dan obat; - Rawat inap dan obat; - Medical check up. - Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: - Penggantian Frame setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp. 15 juta. - Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun. - Medical check up diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: - Medical check up diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun. - Medical check up dilakukan di dalam negeri. - Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping.
Fasilitas Bantuan Hukum	Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Direksi Tahun 2019

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Direksi BRI tahun buku 2019

No	Nama	Gaji (Rp)	THRK (Rp)	Tantiem Tahun Buku 2017 (Rp)	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Premi Asuransi Purna Jabatan (Rp)	Pakaian Corporate (Rp)	Tunjangan Komunikasi (Rp)
Direksi BRI									
1	Sunarso *) & *)	√	√	-	√	√	√	√	√
2	Catur Budi Harto *)	√	-	-	√	√	√	-	√
3	Haru Koesmahargo	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Priyastomo	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Indra Utoyo	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Handayani	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Supari	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√	√	√	√	√	√	√	-
9	Herdy Rosadi Harman *)	√	-	-	√	√	√	-	√
10	Agus Noorsanto *)	√	-	-	√	√	√	√	√
11	Agus Sudiarto *)	√	-	-	√	√	√	√	√
12	Azizatun Azhimah *)	√	-	-	√	√	√	√	√
13	Suprajarto ***)	√	√	√	√	√	√	-	√
14	Mohammad Irfan **)	√	√	√	√	√	√	-	√
15	Sis Apik Wijayanto **)	√	√	√	√	√	√	√	√
16	R. Sophia Alizsa **)	√	√	√	√	√	√	√	√
17	Osbal Saragi Rumahorbo **)	√	-	√	√	√	√	-	√
18	Kuswiyoto *****)	√	-	√	-	-	-	-	-
19	Donsuwan Simatupang *****)	-	-	√	-	-	-	-	-
20	Susy Liestiwaty *****)	-	-	√	-	-	-	-	-
Jumlah Total		45,679,061,289	3,521,100,000	305,712,069,985	3,738,225,806	1,074,030,000	19,310,256,213	545,881,800	675,243,900

Keterangan :

*) Diangkat oleh RUPSLB tanggal 2 September 2019

*) & *) Diangkat pada 3 Januari 2019 serta dialihkan tugas menjadi Direktur Utama pada RUPSLB 2 September 2019

**) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 2 September 2019

***) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 29 Agustus 2019

****) Diangkat oleh RUPST tanggal 15 Mei 2019

*****) Diberhentikan oleh RUPST pada tanggal 15 Mei 2019

*****) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 3 Januari 2019

*****) Diberhentikan oleh RUPST pada tanggal 22 Maret 2018

*****) Mengundurkan diri pada tanggal 20 September 2018

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Bank BRI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2018)	
	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi:		
Gaji**	18	45,679
Tunjangan Rutin***	17	8,879
Tantiem*	14	305,712
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi	17	1.074
Asuransi Purna Jabatan	17	19.310
Jenis Remunerasi per Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	15	39,368
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar**	5	4,913
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

*) termasuk Direksi yang menjabat pada periode 2018 namun tidak menjabat lagi setelah RUPSLB tanggal 03 Januari 2019, RUPSLB 2 September 2019.

**) Termasuk Direksi yang diberhentikan pada RUPSLB tanggal 03 Januari 2019, RUPSLB 2 September 2019.

***) Tunjangan terdiri dari THR, Tunjangan perumahan, Transportasi dan pakaian *Corporate*



TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan & Pelaksanaan Rapat tahun 2019

Rapat Dewan Komisaris dibagi menjadi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan. Inisiatif rapat gabungan ini dapat berasal dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Melalui rapat gabungan ini, didapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional harian Perseroan.

Etika Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan; Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (e-mail) paling lambat lima hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis, dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.
6. Panggilan rapat seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
7. Pedoman pelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
 - b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
 - d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
 - e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
 - f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Suara

1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;
 - b. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir;
 - d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi

salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan huruf *b* wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Pelaksanaan Rapat Tahun 2019

a. Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
1	Rabu, 30 Januari 2019	Kinerja Keuangan & Realisasi RBB BRI Semester II tahun 2018	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
2	Selasa, 23 April 2019	Pembahasan Realisasi RBB 2019-2021 sampai dengan TW I 2019 dan Pembahasan Kinerja Keuangan TW I Tahun 2019	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
3	Kamis, 20 Juni 2019	Usulan Perubahan RBB 2019-2021 dan RKAP 2019 BRI			√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Selasa, 6 Agustus 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan realisasi RBB 2019-2021 sampai dengan TW II 2019			√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Selasa, 22 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja TW III 2019, Evaluasi Realisasi RBB 2019-2021 sampai dengan TW III 2019			√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Selasa, 19 November 2019	RBB 2020-2022 dan RKAP 2020 BRI			-	√	√	√	√	√	√	√	
Total Rapat			2	2	3	6	6	6	6	6	6	4	0
Total Kehadiran			2	2	3	6	6	6	6	6	6	4	0
% Total Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Catatan :

GT : Gatot Trihargo

MHD : Mahmud

WK : Wahyu Kuncoro

AAC : Andrinof A. Chaniago

AFR : A. Fuad Rahmany

ASK : A. Sonny Keraf

NTBH : Nicolaus T. Budi Harjanto

RR : Rofikoh Rokhim

HD : Hadiyanto

IVO : Hendrikus Ivo

LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Lulus Fit & Proper Test OJK)

b. Rapat Dewan Komisaris & Direktur Bidang

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
1	Selasa, 8 Januari 2019	1. Tata Kelola DPLK BRI, 2. Kick Of Meeting Audit DPLK BRI Tahun Buku 2018	√	√	-	√	√	-	-	√	-		
2	Kamis, 17 Januari 2019	Pembahasan Rencana Bisnis dan Investasi Tahun 2019, Manajemen Risiko DPLK BRI	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
3	Selasa, 29 Januari 2019	Usulan perubahan organisasi BRI	√	√	-	√	√	√	√	√	√		

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

b. Rapat Dewan Komisaris & Direktur Bidang

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
4	Selasa, 12 Februari 2019	Action Plan dalam mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI " Leading Consumer Banking in Indonesia " di Tahun 2019	√	√	-	√	√	√	√	√	-		
5	Selasa, 19 Februari 2019	1. Action Plan Direktorat Digital Banking & TI dan SEVP Manajemen Aset & Pengadaan untuk Mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI: " Leading Consumer Banking in Indonesia " 2. Strategi Bisnis & Action Plan Direktorat Hubungan Lembaga tahun 2019. 3. Update progress report perbaikan dan pengembang IT	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
6	Selasa, 26 Februari 2019	Action Plan Direktorat Mikro Kecil dan Direktorat Ritel dan Menengah dalam mencapai target bisnis dan mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI Tahun 2019	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
7	Selasa, 5 Maret 2019	Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan & Action Plan Direktorat Human Capital untuk Mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI menjadi Leading Consumer Banking in Indonesia	√	√	-	√	√	√	√	-	√		
8	Selasa, 12 Maret 2019	Pemaparan Action Plan Direktorat Risk Management, Direktorat Kepatuhan dan SKAI dalam mendukung pencapaian target dan mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI Tahun 2019	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
9	Selasa, 19 Maret 2019	Pemaparan Action Plan Direktorat Keuangan dan Treasury Global Services dalam mendukung pencapaian target dan mewujudkan <i>Destination Statement</i> BRI Tahun 2019	√	√	-	√	√	√	√	√	√		
10	Selasa, 2 April 2019	Action Plan Direktorat Treasury & Global Services dalam mendukung pencapaian target dan <i>destination statement</i> BRI tahun 2019	-	√	-	√	√	√	√	√	√		
11	Selasa, 9 April 2019	Pembahasan Daft Final Audit Laporan Keuangan & Investasi DPLK	√	√	-	√	√	√	-	-	-		



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

b. Rapat Dewan Komisaris & Direktur Bidang

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
12	Selasa, 7 Mei 2019	Rekomendasi Pengadaan KAP untuk Audit Laporan Keuangan BRI dan PKBL Tahun 2019	-	√	-	√	√	√	√	√	-		
13	Selasa, 16 Juli 2019	Evaluasi dan action plan dalam rangka pencapaian target CASA dan FBI BRI			√	√	√	√	-	√	√	√	
14	Selasa, 23 Juli 2019	Update Progress report transformasi IT BRI			√	√	√	-	√	√	√	√	
15	Selasa, 30 Juli 2019	Pemaparan Update New Finance System BRI			√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Selasa, 20 Agustus 2019	Reviu Portofolio Aktiva Produktif			√	√	√	√	√	√	√	√	
17	Selasa, 27 Agustus 2019	Penyediaan Dana Pihak Terkait (Danareksa Sekuritas & BAV)			√	√	√	√	-	√	√	√	
18	Selasa, 10 September 2019	Pembahasan tentang Rencana Penawaran Umum Terbatas BRI Agro			√	√	-	√	√	√	√	√	
19	Selasa, 10 September 2019	Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan RUPSLB BRI Tanggal 2 September 2019			√	√	√	√	√	√	√	√	
20	Selasa, 17 September 2019	Evaluasi Kinerja BRI Life.			√	√	√	√	-	√	√	√	
21	Selasa, 8 Oktober 2019	Pembahasan Hasil Audit Debitur PEP oleh SKAI			√	√	√	√	√	√	√	√	
22	Selasa, 8 Oktober 2019	Protokol Security IT BRI			-	√	√	√	√	√	√	√	
23	Selasa, 5 November 2019	Evaluasi Kinerja DPLK Semester I tahun 2019			√	√	-	-	√	√	√	√	
24	Selasa, 5 November 2019	Penyediaan Dana kepada BRI Syariah			√	√	√	√	√	√	-	√	
25	Selasa, 12 November 2019	Penyediaan Dana pada Pihak Terkait BRI Syariah			-	√	√	√	√	√	√	√	
26	Selasa, 19 November 2019	Tindalan hasil audit keuangan agustus 2019			-	-	√	√	√	√	-	-	
27	Selasa, 19 November 2019	Tindak Lanjut hasil audit keuangan agustus 2019 terkait kolektibilitas kredit korporasi dan PEP			-	√	√	√	√	√	√	√	
28	Selasa, 26 November 2019	Review pelaksanaan PKBL BRI tahun 2019			-	√	√	√	√	√	√	√	
29	Selasa, 26 November 2019	Review Kebikakan Recovery plan, review kebijakan rencana aksi keuangan berkelanjutan			-	√	√	√	√	√	√	√	
30	Selasa, 26 November 2019	Rencana Bisnis DPLK BRI 2020-2022			-	-	√	-	-	√	√	√	
31	Selasa, 3 Desember 2019	Pembahasan Tambahan Modal BRI VENTURA			-	√	√	√	√	√	-	√	

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

b. Rapat Dewan Komisaris & Direktur Bidang

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
Total Rapat			12	12	13	31	31	31	31	31	31	19	0
Total Kehadiran			10	12	11	25	26	27	25	29	25	18	0
% Total Kehadiran			83%	100%	85%	81%	84%	87%	81%	94%	81%	95%	-
Catatan :			NTBH : Nicolaus T. Budi Harjanto										
GT : Gatot Trihargo			RR : Rofikoh Rokhim										
MHD : Mahmud			HD : Hadiyanto										
WK : Wahyu Kuncoro			IVO : Hendrikus Ivo										
AAC : Andrinof A. Chaniago			LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Lulus Fit & Proper Test OJK)										
AFR : A. Fuad Rahmany													
ASK : A. Sonny Keraf													

c. Rapat Dewan Komisaris Dengan Pengurus Perusahaan Anak

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
1	Jumat, 27 September 2019	Evaluasi Kinerja BRI Syariah			√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Jumat, 27 September 2019	Evaluasi Kinerja BRI Life			√	√	√	√	√	√	√	-	-
3	Selasa, 8 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja BRI AGRO			√	√	√	-	-	√	√	√	-
4	Selasa, 15 Oktober 2019	Evaluasi kinerja BRI Ventura Investama			√	√	√	√	√	√	√	√	-
5	Selasa, 15 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja BRI Finance			√	√	√	√	√	√	√	√	-
6	Selasa, 29 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja Danareksa BRI			0	√	√	√	-	√	-	√	-
Total Rapat			0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0
Total Kehadiran			0	0	5	6	6	5	5	6	5	5	0
% Total Kehadiran			-	-	83%	100%	100%	83%	83%	100%	83%	83%	-
Catatan :			NTBH : Nicolaus T. Budi Harjanto										
GT : Gatot Trihargo			RR : Rofikoh Rokhim										
MHD : Mahmud			HD : Hadiyanto										
WK : Wahyu Kuncoro			IVO : Hendrikus Ivo										
AAC : Andrinof A. Chaniago			LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Lulus Fit & Proper Test OJK)										
AFR : A. Fuad Rahmany													
ASK : A. Sonny Keraf													



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

d. Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	GT	MHD	WK	AAC	AFR	ASK	NTBH	RR	HD	IVO	LKE*
1	Rabu, 8 Mei 2019	Perubahan Nomenklatur BRI terkait Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2019, Usulan Perubahan Struktur Pemegang Saham Terkait Rencana Penawaran Umum Terbatas IX BRI Agro tahun 2019.	√	√	-	√	√	√	√	√	-		
2	Selasa, 21 Mei 2019	Pembahasan Persetujuan Calon Kepala SKAI dan Penetapan perubahan Komite di bawah Dewan Komisaris.			√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Selasa, 18 Juni 2019	Sinergi Konglomerasi Keuangan BRI & Pembahasan Rencana Akuisisi BRI General Insurance (BRINS)			√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Selasa, 25 Juni 2019	Pembahasan Proses Usulan Pengangkatan Kepala SKAI			-	√	√	√	√	√	√	√	
5	Selasa, 10 September 2019	Penetapan Komite Dewan Komisaris, penetapan Wilayah Binaan, Rencana Raker Dekom			√	√	√	√	√	√	√	√	
Total Rapat			1	1	4	5	5	5	5	5	5	4	0
Total Kehadiran			1	1	3	5	5	5	5	5	4	4	0
% Total Kehadiran			100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	-

Catatan :
 GT : Gatot Trihargo
 MHD : Mahmud
 WK : Wahyu Kuncoro
 AAC : Andrinof A. Chaniago
 AFR : A. Fuad Rahmany
 ASK : A. Sonny Kerat

NTBH : Nicolaus T. Budi Harjanto
 RR : Rofikoh Rokhim
 HD : Hadiyanto
 IVO : Hendrikus Ivo
 LKE : Loeke Larasati Agoestina* (Efektif Setelah Lulus Fit & Proper Test OJK)

Rencana Rapat Dewan Komisaris tahun 2020

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, setiap awal Tahun melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite (KNR, KPMR, KA dan KTKT), Dewan Komisaris menyusun agenda rapat rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Rutin yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2020	Waktu
1	Pengadaan Auditor Independen (KAP)	Minggu ke IV Januari 2020
2	Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2019	Minggu ke I Februari 2020

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Agenda Rapat Tahun 2020	Waktu
3	Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal	Minggu ke III Februari, Mei, Agustus dan November 2020
4	Reviu dan Evaluasi Profil Risiko	Minggu ke I Februari, Mei, Agustus dan November 2020
5	Reviu Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Minggu II Maret dan Agustus 2020
7	Evaluasi Kinerja Direksi dan Dekom	Minggu ke II Februari 2020
8	Pembahasan Proses Nominasi & Remunerasi Direksi	Minggu ke III Februari 2020
9	Pembahasan Laporan Keuangan akhir Tahun 2019	Minggu ke II Februari 2020
10	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2020	Minggu ke III April 2020
11	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	Minggu ke IV Juni 2020
12	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2020	Minggu ke III Juli 2020
13	Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2020	Minggu I Agustus 2020
14	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020	Minggu ke III Oktober 2020
15	Reviu atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu ke IV Oktober 2020
16	Rencana Bisnis Bank 2021-2023	Minggu ke II April 2020
17	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2020	Minggu ke II November 2020

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur didalam Anggaran Dasar BRI Pasal 13 sebagai berikut:

Etika

- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Selain Rapat Direksi yang telah dijadwalkan tersebut, Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau
 - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada angka (6) hanya dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pemanggilan Rapat

- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan
- Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail).
- Pemanggilan Rapat disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
- Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
- Pemanggilan tertulis untuk rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

Pengambilan Keputusan

- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Direksi.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Hak Suara

- Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
- Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
- Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama, atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2019

Bulan Januari s/d 27 Agustus 2019 (susunan Direksi s/d 2 September 2019 atau sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 2 September 2019).

Kehadiran rapat dihadiri oleh mayoritas (kuorum) anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:

No.	Tanggal	Daftar Hadir Direksi											
		Suprajarto	Sunarso	Mohammad Irfan	R. Sophia Alizsa	Haru Koesmahargyo	Sis Apik Wijayanto	Supari	Indra Utoyo	Priyastomo	Osbal Saragi R.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Handayani
1	03 January 2019	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	08 January 2019	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
3	16 January 2019		1	1	1	1			1	1	1	1	
4	22 January 2019	1	1	1	1			1		1	1		1
5	29 January 2019		1			1	1	1	1		1	1	1
6	06 February 2019	1	1	1		1			1		1	1	
7	12 February 2019	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
8	19 February 2019	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
9	26 February 2019	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1
10	04 March 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	05 March 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	26 March 2019	1	1	1			1	1	1		1		
13	02 April 2019			1	1	1	1	1	1		1	1	1
14	09 April 2019	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
15	23 April 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	16 April 2019	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
17	25 April 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
18	30 April 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	07 May 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	14 May 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	21 May 2019	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
22	11 June 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	13 June 2019	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1
24	18 June 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	25 June 2019		1		1			1	1		1	1	
26	30 June 2019		1		1	1		1	1		1	1	
27	09 July 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	11 July 2019	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	16 July 2019	1		1	1		1	1				1	1
30	23 July 2019	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1
31	06 August 2019	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	13 August 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	20 August 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	27 August 2019	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1
Rekap kehadiran masing-masing direksi		29	27	30	29	26	29	32	31	24	32	28	27
% kehadiran masing-masing direksi		85%	79%	88%	85%	76%	85%	94%	91%	71%	94%	82%	79%
Total Jumlah Rapat		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2019

3 September s/d 31 Desember 2019 (susunan Direksi setelah pelaksanaan RUPS LB tanggal 2 September 2019). Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:

No.	Tanggal	Daftar Hadir Direksi											
		Sunarso	Catur Budi Haarto	Agus Sudiarto	Herdy Rosadi Harman	Haru Koesmahargyo	Agus Noorsanto	Priyastomo	Indra Utoyo	Supari	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Azizatul Azhimah	Handayani
1	03 September 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	09 September 2019	1		1	1	1	1	1	1				1
3	17 September 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	24 September 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	01 October 2019	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
6	03 October 2019	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
7	08 October 2019		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	10 October 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	15 October 2019	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
10	16 October 2019	1		1	1				1		1	1	1
11	22 October 2019	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
12	23 October 2019	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1
13	29 October 2019	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
14	5 November 2019	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
15	7 November 2019	1	1	1			1	1		1		1	1
16	12 November 2019	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1
17	19 November 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
18	26 November 2019	1	1	1		1		1	1	1		1	1
19	5 December 2019	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1
20	13 December 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	18 December 2019	1	1			1	1		1	1			1
22	26 December 2019	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
23	31 December 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rekap kehadiran masing-masing direksi		22	21	20	17	18	20	18	22	20	17	21	23
% kehadiran masing-masing direksi		96%	91%	87%	74%	78%	87%	78%	96%	87%	74%	91%	100%
Total Jumlah Rapat		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat Direksi selama Tahun 2019

No.	Tanggal	Agenda
1	03 January 2019	Tindaklanjuti atas RUPSLB tanggal 03 Januari 2019
2	08 January 2019	1. Update Laporan Keuangan Konsolidasi Desember 2018 (non audited) 2. Laporan Persiapan RAKERNAS BRI
3	16 January 2019	1. Update Project NSE 2. Update Project Link.Aja
4	22 January 2019	1. Update Project 558 2. Update Project Piloting Asuransi BriGuna
5	29 January 2019	1. Update Project NSE 2. Update Project 558 dan Putusan Iron Project 3. Kinerja Keuangan 2018 (Materi Untuk Analyst Meeting dan Press Conference)
6	06 February 2019	1. Putusan Terkait Project Link.Aja
7	12 February 2019	1. Update NSE Project 2. Tindak Lanjut Pengelolaan Digital Attacker 3. Project Link.Aja 4. Update Project 558
8	19 February 2019	1. Update Kajian: Potensi Bisnis Perusahaan Anak bagi Bank BRI 2. Update Project 558 3. Usulan Deviden Payout Ratio Tahun Buku 2018
9	26 February 2019	1. Update Progress Pengadaan Implementasi Tier III dan Update NSE Project 2. Rencana Pelaksanaan SOE Investment Forum Tahun 2019 3. Brandbook Bank BRI dan Perusahaan Anak BRI 4. Permohonan Putusan-Integrated Credit Collection
10	04 March 2019	1. Arahan dari Direktur Utama 2. Branding – Bank BRI 3. Tindak Lanjut Putusan Brandbook Bank BRI dan Perusahaan Anak Bank BRI
11	05 March 2019	1. Update BRISat 2. Permohonan Putusan – Tiering Kewenangan Penghapusbukuan dan Melepaskan atau Memidahkan Aktiva Tetap 3. Permohonan Putusan – Design BRI Club 4. Permohonan Putusan – Ruang Rapat Lantai 20 Gedung BRI 1
12	19 Maret 2019	1. Proyeksi Simpanan, Pinjaman, dan NPL Untuk Publikasi Laporan Keuangan 31 Maret 2019 2. RUPST Perusahaan Anak BRI 3. Representasi Kinerja dan rencana IYKP Bank BRI 4. Road to Credit Excellent 5. Permohonan persetujuan – pengadaan implementasi infrastruktur Uptime institute tier 3 DC GTI dan TBN 6. Permohonan putusan- SK kewenangan PH 7. Permohonan putusan – design penataan taman Kawasan sentra BRI
13	26 March 2019	1. Rencana pelaksanaan Indonesia SOE'S Investment Forum Tahun 2019 2. Permohonan putusan biaya dan penyelenggaraan mudik bareng BRI tahun 2019 3. Pembahasan mengenai kebijakan human capital
14	2 April 2019	1. Update regulasi qanun dan immediate impact 2. Presentasi design awal corpu university
15	9 April 2019	1. Pemaparan kinerja 31 Maret 2019 2. Penyampaian asumsi dasar RKAP revisi 2019 3. Rencana strategic partnership – payment company dan BRI Group
16	16 April 2019	1. Permohonan putusan - rencana implementasi asuransi kredit s/d Rp. 3 Milyar 2. Tindak lanjut dari presentasi desain Gedung BRI Sudirman 3. Tindak lanjut dari presentasi desain BRI Group 4. Arahan Jajaran Direksi
17	23 April 2019	1. Pembahasan kinerja keuangan TW I Tahun 2019 dan Concern Analyst 2. Update new finance system 3. Update permasalahan operasional IT
18	25 April 2019	1. Rencana penerbitan obligasi rupiah
19	30 April 2019	1. Kebutuhan jaringan komunikasi 2020 -2030 2. Permohonan izin prinsip private banking
20	07 May 2019	1. Update Qanun 2. Usulan struktur organisasi 3. Presentasi lanjutan design corpu Sentul 4. Usulan peningkatan kesejahteraan pensiun



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat Direksi selama Tahun 2019

No.	Tanggal	Agenda
21	14 May 2019	1. Update Task Force efisiensi OHC 2. Update Pengelolaan Kerjasama Asuransi 3. Update Progress kerjasama Investree dan Usulan Pengembangan Kerjasama 4. Usulan Perubahan PDWK dan Roadmap Kartu Kredit
22	21 May 2019	1. Evaluasi Efektivitas Peran RA dan RAU 2. Update Qanun 3. Revisi RKAP Tahun 2019 4. Sosialisasi atau Pembahasan POJK no.32/POJK.03/2018 tahun 2018 tentang BMPK dan penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum 5. Rencana Pengelolaan Aplikasi BRIsport
23	11 June 2019	1. Penerapan LinkAja pada Agen BRILink 2. Surat Kuasa Direksi terkait permohonan penandatanganan Surat Kuasa Direksi untuk Pgs SEVP 3. Update Progress LinkAja 4. Update Kinerja Posisi Juni 2019 5. Update Kondisi Kredit Wilayah Palu - Kanwil Manado
24	13 June 2019	1. Prognosa kinerja periode juni 2019
25	18 June 2019	1. Permohonan persetujuan RBB 2019-2021
26	25 June 2019	1. Prognosa kinerja periode Juni 2019 2. Bonus Pekerja tahun 2018, MOP dan Tunkin & Bonus SEVP 3. Leverage Bank BRI
27	30 June 2019	1. Prognosa juni 2019
28	09 July 2019	1. Project Arjuna 3 2. Renovasi RS BRIMedika 3. Ketentuan Tunkin, Benefit Homebase dan review remunerasi pengurus Perusahaan Anak BRI
29	16 July 2019	1. Ketentuan Tunkin tahun 2019
30	23 July 2019	1. Potensi NPL temuan EY posisi Lapkeu Juni 2019 (Audited)
31	06 August 2019	1. Laporan Kinerja Bank BRI 2. Rencana HUT Bank BRI
32	13 August 2019	1. Rencana Pelaksanaan PUT IX 2. Rencana HUT Bank BRI
33	20 August 2019	1. Rencana Pembangunan BRI Corpu Sentul 2. Prognosa Desember 2019 & Rencana Penyelesaian kredit bermasalah 3. Usulan Organisasi Bank BRI
34	27 August 2019	1. Perhitungan benefit homebase
35	3 September 2019	1. Usulan Struktur Organisasi BRI, Pembina Wilayah, Dirganti dan Pembina perusahaan anak
36	9 September 2019	1. Usulan Komite Kredit 2. Usulan Komite Direksi 3. Asumsi Dasar RKAP 2019 4. Permohonan putusan tindakan lanjut PUT IX
37	17 September 2019	1. Update ESOP 2. Prognosa RKAP September 2019 3. Pembahasan permasalahan Fraud
38	24 September 2019	1. Update penyampaian rencana investasi project tiger 2. Update dan permohonan persetujuan - Kemitraan Strategis 3. Review Asuransi Jiwa Briguna 4. Pembahasan Fasilitas Direksi & SEVP
39	01 October 2019	1. Update project 147 2. Implementasi BRI First
40	03 October 2019	1. Rangkaian HUT BRI ke-124
41	08 October 2019	1. Pembahasan terkait Jaringan BRI
42	10 October 2019	1. Prognosa Desember 2019 dan Pembahasan RKAP 2020 2. Program transformasi Human Capital 3. Pembahasan Jaringan BRI 4. Persetujuan Logo HUT BRI ke-124
43	15 October 2019	1. Rencana investasi 2. Update Clustering Unit
44	22 October 2019	1. Persiapan Analys Meeting TW 3 2019 2. Implementasi Qanun LKS Aceh 3. Implementasi PSAK 71,72 dan 73
45	23 October 2019	1. Pembahasan BRIGuna 2. Pembahasan fasilitas Pinjaman BRI
46	29 October 2019	1. Presentasi terkait Perekatan NKRI 2. Sinergi Pengelolaan Multifinance BRI Group

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat Direksi selama Tahun 2019

No.	Tanggal	Agenda
47	5 November 2019	1. Update Transformasi IT 2. Update BRIBOX 3. Update HUT BRI ke-124
48	7 November 2019	1. Pembahasan terkait Audit BPK RI
	12 November 2019	1. Persetujuan RKAP dan RBB tahun 2020 2. Tindak lanjut atas CGPI 2019 3. Dampak kebijakan KUR 2020
49	19 November 2019	
50	26 November 2019	1. Implementasi & review Recovery Plan 2. Pengaturan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan di BRI 3. Update pendirian BRI Institute, BMC dan PT BRIDGE 4. Skema organisasi baru
51	5 Desember 2019	1. Project Garuda 2.0 2. Usulan pembahasan terkait pindajam CDB 3. Pembahasan terkait temuan OJK 4. Pembahasan atas hasil penataan kawasan Taman Sentra BRI 5. Pembahasan BRIGuna Kawan
52	13 Desember 2019	1. Prognosa Kinerja Desember 2019 2. Laporan Implementasi HC Transformation 3. Update BrilianPreneur
53	18 Desember 2019	1. Update rakernas 2. Update BRIFEST 3. Usulan Pelaksanaan RUPST Perusahaan Anak 4. Update persiapan natal & tahun baru 5. Usulan putusan terkait LinkAja
54	26 Desember 2019	1. Kebijakan Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI 2. Evaluasi layering RM dan usulan pembentukan RCB 3. Update Kinerja Harian dan Prognosa Kinerja Desember 2019
55	31 Desember 2019	1. Update Kinerja Desember 2019

Rapat Konsultasi Direksi kepada Dewan Komisaris

Sebagaimana terdapat dalam anggaran BRI, Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam tugas pengawasan dimaksud Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai Perseroan kepada Direksi termasuk kegiatan operasional dalam pemberian kredit dan penjelasan lain yang diminta Komisaris.

1. Kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Komisaris adalah Pemberian kredit berupa kredit direct, kredit contingent (BG/ SBLB, dll) termasuk kredit Sindikasi dengan kriteria sebagai berikut: Pemberian kredit baru dan atau pemberian tambahan kredit/suplesi dengan total exposure risiko 1 (satu) triliun rupiah ke atas atau ekuivalen dalam valas, dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Komisaris.
2. Penetapan besaran exposure tersebut di atas didasarkan pada besaran exposure debitur individual
3. Pemberian kredit diluar butir 1 di atas tidak perlu dikonsultasikan dengan Komisaris, namun setiap 3 bulan Direksi wajib menyampaikan laporan pemberian kredit kepada Komisaris.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2020

Dalam rangka mendukung kinerja dan perencanaan kegiatan setiap awal tahun melalui Rapat Direksi, Direksi telah menyusun agenda rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat tahun 2020	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tahun buku 2018	Minggu ke II Januari 2020
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2020	Minggu ke I April 2020
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2020	Minggu ke I Juli 2020
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2020	Minggu ke II Oktober 2020



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No	Agenda Rapat tahun 2020	Waktu
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2020	Minggu ke II Januari 2021
6	Evaluasi dan rencana Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022	Minggu ke II Juni 2020
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020	Minggu ke IV Juni 2020
8	Aktivitas operasional dan putusan perusahaan yang membutuhkan persetujuan melalui Rapat Direksi	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2020

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

1. Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
2. Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan atas beban Perseroan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- b. Anggaran Dasar Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan tata tertib kerja, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris yaitu:
 - a. Menyusun dan/atau menerima/ mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Komite mengenai agenda rapat, serta memfinalisasi agenda rapat berdasarkan prioritas dan urgency permasalahan.
 - b. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris atau kepada Komite jika permasalahan perlu mendapatkan masukan dan analisa Komite.
 - c. Mengusulkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat serta mendistribusikan undangan rapat kepada pihak-pihak yang perlu hadir.
 - d. Menyusun risalah rapat dan menyimpan salinannya.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris yaitu:
 - a. Melakukan seleksi atas surat-surat ataupun dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, menetapkan prioritas surat dan/atau dokumen tersebut berdasarkan urgency permasalahan dan menindaklanjutinya sesuai kepentingan masing-masing surat dan/ atau dokumen dimaksud;
 - b. Membuat catatan khusus dari surat dan/ atau dokumen yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, khususnya yang memiliki tingkat kepentingan/kompleksitas yang tinggi.
 - c. Menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut diatas;
 - d. Mempersiapkan korespondensi lainnya dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite;
 - e. Mendokumentasikan arsip Lembaga Dewan Komisaris dan memastikan central
 - f. Filing yang up-date dan sistematis untuk memudahkan pencarian dokumen serta tindak lanjut;
 - g. Menjadwalkan dan mengkoordinasikan acara dan kegiatan Dewan Komisaris antara lain keikutsertaan dalam program *training/ workshop/seminar*, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain;
 - h. Memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran acara-acara Dewan Komisaris sebagaimana diatas, dan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan operasional Dewan Komisaris lainnya antara lain ATK, reimbursement kesehatan, dan lainlain; dan



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- i. Mempersiapkan pidato/sambutan ataupun bahan presentasi Dewan Komisaris sesuai kebutuhan yang menyangkut hal-hal yang tidak terkait dengan tugas-tugas Komite.
4. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan Self Assessment GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap Semester, berkoordinasi dengan divisi Kepatuhan.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas Komite-Komite dan organ yang berada dibawah Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Menetapkan data/informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan masukan Komite, surat masuk, dan permasalahan yang memerlukan penanganan/tindak lanjut; dan
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal terkait.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi yaitu:
 - a. Memperoleh masukan dari Dewan Komisaris/Komite mengenai rencana kegiatan Tahunan;
 - b. Menetapkan prioritas rencana kegiatan tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara lebih optimal dan efektif;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut diatas untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menindaklanjuti anggaran yang telah disetujui tersebut dengan Divisi Sekretariat Perseroan untuk dapat difinalisasi dan dikonsolidasikan dengan anggaran Tahunan Perseroan.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham pada:
 - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekdekom Tahun 2019

1. Kunjungan Kerja
Sekretariat Dekom bersama-sama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) amendingi Dewan Komisaris untuk melakukan kunjungan kerja ke Unit-unit Kerja Perseroan.

Selama Tahun 2019 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris melakukan sebanyak 35 kali kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah beserta Unit Kerja Supervisinya, Divisi Kantor Pusat, dan Unit Kerja Luar Negeri.

2. Persetujuan & Pengawasan Rencana Kerja Perseroan
Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama Tahun 2019. Disamping itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama Tahun 2019 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan Persetujuan, Rekomendasi dan Konsultasi Kredit. Tercatat selama Tahun 2019 Dewan Komisaris telah memberikan Persetujuan sebanyak 42 kali, Rekomendasi sebanyak 31 kali dan Konsultasi Kredit sebanyak 4 kali.

3. Laporan Tahunan Dewan Komisaris
 Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris selama Tahun 2019 yang akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS Tahun 2019.
4. Rapat Kerja Dewan Komisaris
 Dalam rangka melakukan review atas realisasi RKA Dekom Tahun 2018 serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Tahun 2019, Sekretariat Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah melaksanakan Rapat Kerja Dewan Komisaris di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018.

Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka pengembangan kompetensi, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti Pendidikan, Seminar maupun Conference untuk mendukung tugasnya. Selama Tahun 2018 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

Tahun	Tempat	Penyelenggara	Judul
2019	Jakarta	PWC - EY	Pelatihan PSAK 71, 72, dan 73,

Profil Sekretariat Dewan Komisaris



Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BRI tanggal 1 Mei 2019. Menempuh pendidikan Ahli Madya Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003-2006), Pendidikan S1 - Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (2007-2009), dan Pendidikan S2 - Magister Manajemen di Universitas Indonesia (2011-2013). Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN (2015 – Sekarang).

Dini Desvalina

Sekretaris Dewan Komisaris
 Periode: 1 Mei 2019 - Sekarang



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan mandat untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 / POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor

PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

11. Peraturan OJK No. 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
12. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.
13. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Desember 2013 Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 atau S.05-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (Code of Conduct) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
14. Surat Keputusan Direksi Nokep: 675 -DIR-KHC/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit

Komite Audit BRI memiliki Buku Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Charter) yang menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit. Pedoman Komite Audit disahkan oleh disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 11-KOM/11/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit**Struktur Komite**

1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

Komite Audit

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; dan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
5. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
2.	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
3.	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Oktober 2017 - sekarang
4.	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Oktober 2019- Sekarang
5.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
6.	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Desember 2016- sekarang
7.	Handayani	Anggota	Pihak Independen	Oktober 2019- Sekarang

Profil Komite

Profil Anggota Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

A. Fuad Rahmany	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris.
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang	
Sonny Keraf	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang	
Rofikoh Rokhim	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Februari 2018 - sekarang	
Hendrikus Ivo	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Oktober 2019 - sekarang	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

Pamuji Gesang Raharjo

Anggota Komite Audit
Pihak Independen
Periode: Februari 2016 - sekarang

Lahir di Jakarta, 10 April 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Februari 2016. Sebelumnya merupakan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk. Pernah berkarir dalam berbagai posisi pada PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Danahutama; PT Pegadaian (Persero); dan pernah menjabat Direktur Eksekutif Risk Management Center Indonesia (RMCI). Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta (1996), gelar Magister Manajemen bidang kekhususan Manajemen Risiko diperoleh dari Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003), dan meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan memperoleh Certified of Financial Consultant (CFC) dari Institute of Financial Consultant, Canada (2013).

Sunuaji Noor Widiyanto

Anggota Komite Audit
Pihak Independen
Periode: Desember 2016 - sekarang

Lahir di Yogyakarta, 1 Januari 1960, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Desember 2016. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi BRI Yogyakarta (2014-2016) dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat BRI (2012-2014). Yang bersangkutan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Nasional selama 2 (dua) periode (2006-2012). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1996) dan memperoleh sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2015.

Handayani

Anggota Komite Audit
Pihak Independen
Periode: Oktober 2019 - sekarang

Lahir di Blitar, 24 Agustus 1963, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak 08 Oktober 2019. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Kepala Audit Intern BRI Wilayah Jakarta 3, Kepala Audit Intern BRI Wilayah Banjarmasin, Wakil Inspektur Kantor Inspektur Surabaya dan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis di Kanwil BRI Palembang dan Semarang. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan memperoleh gelar Master Business dari Master Business and Finance, Monash University, Melbourne Australia.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
3. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BRI yang memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI dan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota anggota Komite Audit sebelum menjalani masa tunggu (cooling-off) paling singkat 1 (satu) tahun.

Komite Audit

No	Kriteria Independensi	A. Fuad Rahmany	A. Sonny Keraf	Rofikoh Rokhim	Hendrikus Ivo	Pamuji Gesang Rahardjo	Sunuaji Noor Widiyanto	Handayani
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√
4.	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Laporan Keuangan
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - b. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
 - d. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
2. Pengendalian Internal
Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas kerja SKAI.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - c. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
 - d. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
4. Auditor Independen
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 - b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - c. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
 - d. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
 1. Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
 2. Ruang lingkup audit;
 3. Imbalan jasa audit;
 4. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 6. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - e. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
 - g. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.

Komite Audit

- h. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (pre-approval) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
 - i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
 2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
 5. Hal lainnya.
 - j. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK BRI.
5. Kepatuhan (*Compliance*)
 - a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko fraud yang terkait dengan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting risks) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 6. Pengaduan
Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.
 7. Lain-Lain
 - a. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - b. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - c. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite Audit untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2019

I. Komite Audit dengan SKAI BRI

1. Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2019.
 - a. Komite Audit telah mereview dan menelaah draft Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2019 yang diajukan oleh SKAI BRI melalui surat R.10-SKA/PSA/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Permohonan Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Tahun 2019;
 - b. Komite Audit telah mereview dan menelaah kembali draft Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2019 yang diajukan oleh SKAI tersebut, dan Komite Audit telah membuat Nota Dinas No. R.01-KA/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2019 kepada Dewan Komisaris; dan
 - c. Dewan Komisaris BRI telah memberikan persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2019 melalui surat No. R.01-KOM/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI tahun 2019.
2. Laporan Hasil Audit (LHA)
Secara periodik, Komite Audit telah melakukan review terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) yang disampaikan oleh SKAI.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

Proses review LHA SKAI tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Perencanaan Audit Tahunan yang telah disusun oleh SKAI dan disetujui Dewan Komisaris, telah dilaksanakan dengan baik oleh SKAI, termasuk untuk meyakinkan kualitas pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh SKAI. Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan kegiatan review dan evaluasi terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) SKAI sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan IV semester II tahun 2018	27 Februari 2019	Notulen Rapat Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan IV 2018 tanggal 26 Februari 2019 Nomor: 03 - KA/02/2019 Laporan Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan IV semester II tahun 2018 yang disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit Nomor: R.05-KA/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 Surat Dewan Komisaris Ke Direksi BRI Nomor: R.08-KOM/02/2019 tentang Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan IV semester II tahun 2018.
2	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan I tahun 2019	14 Mei 2019	Notulen Rapat Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan I 2019 tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 07 - KA/05/2019 Laporan Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan I 2019 yang disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit Nomor R.14-KA/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 Surat Dewan Komisaris Ke Direksi BRI Nomor: R.18-KOM/02/2019 tanggal 21 Mei tentang Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan I tahun 2019
3	Laporan pokok pokok hasil audit sd triwulan II tahun 2019	29 Juli 2019	Notulen Rapat Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan II 2019 tanggal 29 Juli 2019 Nomor: 10-KA/07/2019 Laporan Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan II tahun 2019 yang disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit Nomor: R.19-KA/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Surat Dewan Komisaris Ke Direksi BRI Nomor: R.48-KOM/08/2019 tentang Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan II tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019
4	Laporan pokok pokok hasil audit sd triwulan III tahun 2019	21 November 2019	Notulen Rapat Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan II 2019 tanggal 11 November 2019 Nomor: 15-KA/07/2019 Laporan Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan III 2019 yang disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit Nomor R.30-KA/11/2019 tanggal 21 November 2019 Surat Dewan Komisaris ke Direksi BRI Nomor: R.93-KOM/08/2019 tentang Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sampai dengan triwulan III tahun 2019 tanggal 25 November 2019

- Penelaahan Komite Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Secara Triwulanan.
Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Publikasi Perseroan, baik yang diaudit oleh KAP (audited) maupun yang tidak diaudit (unaudited). Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan diskusi dengan KAP PSS (EY) atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan hasil audit umum dan review terbatas (limited review), yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

No.	Posisi Laporan Keuangan Publikasi	Pelaksanaan Rapat Komite Audit
1.	31 Desember 2018 (audited)	Kamis, 17 Januari 2019 Risalah Rapat KA No: 01 - KA/01/2019 tentang Pembahasan Progress Report Audit atas Laporan Keuangan dan PKBL BRI Tahun 2019
2.	30 Juni 2019 (limited review)	Senin, 5 Agustus 2019 Risalah Rapat KA No: 11-KA/08/2019 tentang Closing meeting audit atas laporan keuangan BRI TW II Tahun 2019 dengan EY
3.	31 Agustus 2019 (Akun tertentu)	Selasa, 15 Oktober 2019 Risalah Rapat KA Nomor: 13-KA/10/2019 Closing Meeting Audit atas akun tertentu posisi 31 Agustus 2019

Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan hasil review SKAI terhadap Laporan Keuangan Publikasi Perseroan yang tidak diaudited (*unaudited*), yaitu sebagai berikut:

No.	Periode Laporan Keuangan Publikasi	Output
1.	Triwulan I Tahun 2019 (unaudited)	Risalah Rapat KA Nomor: 05-KA/04/2019 tanggal 23 April 2019 Nota Dinas KA No. 05 - KA/04/2019 tgl. 23 April 2019.
2.	Triwulan III Tahun 2019 (unaudited)	Risalah Rapat KA No. 14-KA/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Nota Dinas KA No. 14 - KA/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.

4. Penelaahan Laporan Whistle Blower System (WBS)

Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Whistle Blower System (WBS) maupun pengaduan atau pelaporan tertulis yang diterima Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pelaksanaan penelaahan Laporan Whistle Blower System (WBS) dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi dan pembahasan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) triwulanan yang disampaikan SKAI dalam Rapat Komite Audit.

Secara kumulatif, selama periode bulan Januari s/d. Desember 2019 total pengaduan/pelaporan yang diterima melalui Whistle Blower System (WBS) BRI sebanyak 134 laporan. Seluruh pengaduan/pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti SKAI, baik melalui investigasi maupun penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 81 laporan statusnya dapat dinyatakan "Selesai".
- 53 laporan masih "Dalam Proses" penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

Untuk pengaduan dan pelaporan tertulis lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan atau Komite Audit, setelah dilakukan penelaahan oleh Komite Audit selanjutnya dimintakan klarifikasi secara tertulis kepada SKAI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain pengaduan an. Laporan pengaduan kantor pengacara & konsultan hukum Nurkholid SH & rekan terkait dengan tuntutan ganti rugi atas hilangnya sertifikat an H Nuridin yang dijaminan untuk agunan pada Kanca BRI Tegal, Pengaduan an. Dony Septriana R Debitur BRI Kanca Kopo Bandung, Pengaduan pesiunan BRI, Tanggapan atas surat PT Kagum Husada NO.003/KKH-JARRDIN/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilan, pengaduan debitur an Ahmad Rohani, Klarifikasi Penyelesaian kredit debitur bank BRI an. Ahmad Rohani, Surat LHB Perjuangan Semarang, Penjelasan kasus Edmond Praise Tampubolon, pengaduan Sdri Dewi Anggraini Debitur Kanca Ngawi, pengaduan an. H Eddy Sofyan terkait penyampaian dana CSR, pengaduan atas nama Sdr Tumpak sitanggang. Pada sisi lain, selama periode tahun 2019 tidak terdapat pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

5. Pengangkatan Kepala SKAI

Menunjuk Peraturan POJK Nomor: 01/POJK.03/2019 pasal 3 ayat 4 dan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang menyebutkan bahwa Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Komite Audit. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2019, Komite Audit telah memberikan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direktur Utama BRI antara lain sebagai berikut:

No	Materi	Output
1	Rekomendasi Komite Audit atas pemberhentian Sdr Tri Wintarto sebagai kepala SKAI	1. Nota Dinas Komite Audit Nomor: R.06-KA/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Rekomendasi komite audit atas pemberhentian Sdr Tri Wintarto sebagai kepala SKAI 2. Nota Dinas Komite Audit Nomor: R.10-KA/04/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Rekomendasi komite audit atas pemberhentian Sdr Tri Wintarto sebagai kepala SKAI.
2	Rekomendasi Komite Audit atas usulan Direktur utama terkait pengangkatan Kepala SKAI	1. Nota Dinas Rekomendasi Komite Audit Nomor: R.07-KA/03/2019 tentang usulan Direktur utama terkait pengangkatan Sdr Hari Siaga Amijarso sebagai kepala SKAI BRI. 2. Nota Dinas Komite Audit No: R.15-KA/05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Rekomendasi Komite Audit atas usulan Sdr Hari Siaga Amijarso sebagai kepala Satuan Kerja Audit Intern. 3. Nota Dinas Komite Audit No: R.17-KA/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Rekomendasi Komite Audit untuk usulan Direktur Utama terkait pengangkatan Sdr Hari Siaga Amijarso sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dalam memberikan rekomendasi pengangkatan Kepala SKAI, Komite Audit mensyaratkan bahwa Kepala SKAI harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II Pasal 6 POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2018, yaitu antara lain:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
 - f. Mematuhi kode etik audit internal;
 - g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
 - h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
 - i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
6. Dalam rangka penyampaian “tone of the top” kepada segenap jajaran auditor, anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris didampingi oleh anggota Komite Audit dari pihak independen juga ikut berpartisipasi dalam program In-house Training (IHT) yang diselenggarakan oleh Audit Intern Wilayah (AIW) pada akhir tahun 2019, yaitu:

Komite Audit

No.	Kantor AIW	Pemateri	Waktu Penyelenggaraan IHT
1.	Malang	A. Fuad Rahmany dan Sunuaji Noor W.	20 Februari 2019
2.	Denpasar	A. Sonny Keraf	27-29 Maret 2019
3.	Jayapura	Mahmud dan Sunuaji Noor W.	27-29 Maret 2019
4.	Padang	Andrinof A. Chaniago dan Sunuaji Noor W.	4-5 April 2019
5.	Medan	A. Fuad Rahmany dan Pamuji G. Raharjo	9-10 April 2019
6.	Lampung	Rofikoh Rokhim dan Sunuaji Noor W.	11-12 April 2019
7.	Semarang	Mahmud dan Suindiyo	24-25 April 2019
8.	Makassar	Andrinof A. Chaniago	23-24 April 2019
9.	Aceh	A. Fuad Rahmany dan Sunuaji Noor W.	24-27 April 2019
10.	Pekanbaru	Rofikoh Rokhim dan Pamuji Gesang R.	26-27 April 2019
11.	Lampung	Nicolaus TB. Harjanto dan Pamuji Gesang R.	21-22 Juni 2019
12.	Yogyakarta	Rofikoh Rokhim dan Sunuaji Noor W.	12-14 Juli 2019
13.	Medan	Hendrikus Ivo dan Pamuji Gesang R.	24-26 September 2019
14.	Semarang	Rofikoh Rokhim dan Handayani W.	28 Oktober 2019
15.	Banjarmasin	A. Fuad Rahmany dan Handayani W.	5 Desember 2019
16.	Jayapura	A. Sonny Keraf dan Sahat Pardede	3-7 Desember 2019

7. Customer Satisfaction Survey (CSS) SKAI BRI

Komite Audit telah mengisi kuesioner terkait Customer Satisfaction Survey (CSS) yang disampaikan SKAI dan selanjutnya melalui Surat Komite Audit No. 20-KA/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Pengisian *Customer Satisfaction Survey* (CSS) terhadap SKAI BRI, Komite Audit telah menyampaikan masukan/saran bagi perbaikan kinerja SKAI kedepan, yaitu:

- Jajaran SKAI harus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi, sehingga dapat mewujudkan visi SKAI menjadi *"Trusted Audit"* yang dapat memberikan nilai tambah bagi BRI dan jajaran manajemen (auditee). Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan mengikut-sertakan jajaran SKAI dalam program sertifikasi, baik yang dilaksanakan oleh SKAI dalam bentuk In House Training (fHI) maupun kursus di dalam dan luar negeri.
- SKAI agar bertindak secara independent dalam setiap pelaksanaan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran secara obyektif serta tidak memiliki benturan kepentingan sesuai kode etik dan profesi serta standar audit yang berlaku umum. Selain itu jajaran SKAI dapat menjadi teladan bagi jajaran manajemen.
- Dalam melaksanakan rekrutmen untuk pemenuhan jajaran SKAI, maka agar selektif sehingga dapat diisi dengan pekerja yang berpengalaman dan mempunyai kompetensi tinggi sehingga dapat menjalankan perannya sebagai Auditor (Assurance), konsultan Istrategic Business Portner, EWS (Early Warning Signal).
- Jajaran SKAI meningkatkan kedalaman analisis mengenai akar permasalahan (root cause) dari berbagai temuan audit dan mampu memberikan saran/ rekomendasi yang memadai dan applicable kepada auditee. Tindak lanjut agar dipantau penyelesaiannya.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

- e. SKAI agar berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi BRISMA, PDE, dan aplikasi pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung SKAI.
 - f. SKAI agar proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas perbaikan/ pengembangan sistem dan teknologi informasi yang sedang dilakukan oleh manajemen BRI. Pemantauan tersebut mencakup aspek availability system, reliability, confidentiality, integrity, dan security, termasuk telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait manajemen resiko teknologi informasi dan IT Governonce. Hasil evaluasi tersebut agar dikomunikasikan dan dibahas secara berkala dengan Direktur IT, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan dan pengamanan yang diperlukan.
 - g. Fokus audit meliputi KUR, restrukturisasi, reaktivasi yang tidak didukung dengan dokumen putusan, rekening menggantung, biaya-biaya yang diambil dari perskot namun belum dinihilkan, penyelesaian dokumen perkreditan yang sudah diputus dan direalisasi namun belum selesai.
8. Pengkinian Piagam Audit Intern
- Komite Audit telah memberikan pendapat dan masukan terkait pengkinian Piagam Audit Intern SKAI Tahun 2019 yang diusulkan melalui surat SKAI No.: B.17-SKA/PSA/03/2019 tanggal 12 Maret 2019 dan No: B.17-SKA/PSA/03/2019 tanggal 19 Maret 2019. Pembahasan Draft Piagam Audit Intern dilaksanakan melalui Rapat Dewan Komisaris dan Masukan yang dituangkan dalam nota Dinas Komite Audit sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
1.	Tanggapan KA atas draft pengkinian piagam audit intern	20 Maret 2019	Tanggapan KA atas pengkinian piagam audit intern disampaikan melalui Nota Dinas KA No: 14-KA/03/2019 tentang Tanggapan Komite Audit atas draft piagam audit intern
2	Penelaahan komite audit atas revisi draft piagam audit intern tahun 2019	21 April 2019	Hasil Penelaahan komite audit atas revisi draft piagam audit intern tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.21-KA/04/2019
3	Rapat Pembahasan review Piagam Audit	23 April 2019	Risalah rapat Komite Audit Nomor: 05 - KA/04/2019 tentang Pembahasan Piagam Audit BRI, & Telaah atas Laporan Keuangan TW I Tahun 2019
4	Rekomendasi atas persetujuan piagam audit intern BRI	28 Mei 2019	Rekomendasi KA atas pengkinian piagam Audit SKAI disampaikan melalui Nota dinas KA No: B.32-KA/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Rekomendasi Komite Audit atas piagam internal audit tahun 2019

II. Komite Audit dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, peran Komite Audit dalam proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis kepada Perseroan adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan penunjukan AP dan/atau KAP.

Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tersebut dengan mempertimbangkan:

1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP
2. Ruang lingkup audit
3. Imbalan jasa audit
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;

Komite Audit

6. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
7. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, bila ada.

Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penunjukan dan pelaksanaan audit umum oleh AP dan/atau KAP, yang mencakup:

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
1.	Permohonan Ijin Pengadaan KAP	20 Maret 2019	Ijin prinsip pengadaan KAP disampaikan melalui Nota Dinas KA No: 04-KA/03/2019
2	Management Letter atas Audit umum laporan keuangan tahun buku 2018	02 April 2019	Tindak lanjut dan Management Letter atas audit umum laporan keuangan tahun 2018 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.20-KA/04/2019
3	Review harga perkiraan sendiri (HPS) jasa kantor akuntan publik untuk audit atas laporan keuangan per 30 Juni 2019 dan per 31 desember 2019 dan program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2019	18 April 2019	Rekomendasi KA atas usulan review HPS jasa KAP untuk general audit atas laporan keuangan PKBL BRI tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.23-KA/04/2019
4	Rekomendasi Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI tahun buku 2019	07 Mei 2019	Rekomendasi Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI tahun buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.12-KA/05/2019
5	Evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja KAP PSS	25 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja KAP PSS disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.16-KA/06/2019
6	Evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019	25 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.36-KA/06/2019
7	Penyampaian Alokasi Anggaran dan Permohonan Pembentukan Tim Pengadaan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun 2019	20 Agustus 2019	Dokumen Alokasi Anggaran dan Permohonan Pembentukan Tim Pengadaan Jasa Audit Pengadaan jasa audit KAP untuk laporan keuangan & Laporan Investasi DPLK BRI tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.39-KA/08/2019
8	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP dalam rangka penelaahan terbatas laporan keuangan posisi 31 Agustus 2019	02 Oktober 2019	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP dalam rangka penelaahan terbatas laporan keuangan posisi 31 Agustus 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.23-KA/10/2019
9	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK tahun 2019	02 Oktober 2019	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.24-KA/10/2019



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
10	Pengadaan jasa KAP dalam rangka audit umum atas laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019	09 Desember 2019	Rekomendasi Hasil pengadaan jasa KAP dalam rangka audit umum atas laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.56-KA/12/2019
11	Persetujuan penunjukan KAP untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019	10 Desember 2019	Persetujuan penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.57-KA/12/2019

Dalam rangka memenuhi kewajiban Komite Audit dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Komite Audit telah hadir secara langsung (field visit) dalam pelaksanaan "exit meeting" atas hasil audit umum KAP PSS (EY) yang dilaksanakan pada beberapa Kanca BRI dan Kantor Audit Intern Wilayah (AIW) yang menjadi sampel audit, yaitu sebagai berikut:

No	Evaluasi Audit Oleh KAP di Kantor Cabang	Pelaksanaan	Posisi Laporan Keuangan
1	Otista Jakarta	21-May-19	30 Juni 2019
2	Malang Kawi	25-Jun-19	30 Juni 2019
3	Tanjung Karang Lampung	01-Jul-19	30 Juni 2019
4	Makassar Somba Opu	11-Nov-19	31 juli 2019
5	Palembang Rivai	12-Nov-19	31 juli 2019
6	Martadinata Malang	26-Nov-19	31 juli 2019
7	Jakarta Tanjung Duren	27-Nov-19	31 juli 2019
8	Jakarta Rawamangun	27-Nov-19	31 juli 2019
9	Kanca kalimalang	10-Dec-19	31 juli 2019
10	AIW Malang	16-Dec-19	31 Desember 2019
11	AIW Surabaya	16-Dec-19	31 Desember 2019
12	AIW Jakarta I	16-Dec-19	31 Desember 2019

Laporan pelaksanaan evaluasi KAP tersebut disampaikan sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
1	Evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja KAP PSS	25 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi komite audit PT BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja KAP PSS disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.16-KA/06/2019

Komite Audit

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
2	Evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019	25 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.36-KA/06/2019

III. Komite Audit Dengan OJK, Bank Indonesia PPAK dan BPK RI

Komite Audit melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PPAK dan BPK RI. Pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap laporan hasil audit/pemeriksaan yang diterima Komite Audit atau dilakukan pembahasan dengan SKAI secara bersamaan dalam Rapat Komite Audit terkait Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) SKAI secara triwulanan dan/atau meminta SKAI untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPAK dan BPK RI.

Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPAK/BPK RI, yaitu antara lain:

No.	Pengirim Surat	No. Surat OJK/Bank Indonesia/ PPAK/BPK RI	Perihal/Obyek Pemeriksaan	Tanggapan/ Rekomendasi/ Saran Komite Audit
1.	Kementerian BUMN	S-45/D5.MBU/07/2019 tanggal 30 Juli 2019	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2018	Nota Dinas KA No: R.20-KA/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019
2.	OJK	S-76/PB.313/2019 tanggal 20 Agustus 2019	Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Nota Dinas KA No: B.41-KA/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019
3.	OJK	SR.30/PB.31/2019 tanggal 06 Maret 2019	Kejadian fraud di teras BRI unit Toddopulli makassar dan kasus transaksi EDC di hotel Regent Malang	Nota Dinas KA No: R.09-KA/03/2019 tanggal 20 Maret 2019
4.	OJK	SR-58/PB.31/2019 tanggal 30 April 2019	Pemeriksaan terhadap pengelolaan Risiko Debitur dan grup usaha	Nota Dinas KA No: R.13-KA/05/2019 tanggal 08 Mei 2019
5.	Bank Indonesia	20/1497/DSSK/Srt/Rhs tanggal 20 September 2019	Hasil pemeriksaan tematik skimming bank saudara	Nota Dinas KA No: R.02-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019
6.	OJK	SR.30/PB.31/2019 tanggal 06 Maret 2019	Kejadian fraud di teras BRI unit Toddopulli makassar dan kasus transaksi EDC di hotel Regent Malang	Nota Dinas KA No: R.09-KA/03/2019 tanggal 20 Maret 2019

Pada sisi lain, Komite Audit juga telah melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pengenaan sanksi denda/kewajiban membayar oleh regulator secara berkala berdasarkan surat-surat OJK, Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lainnya yang diterima oleh Komite Audit. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk memberikan pendapat dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris agar pengenaan sanksi kewajiban membayar tersebut menjadi minimal atau tidak terulang kembali.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

IV. Komite Audit Dengan Manajemen

1. Tindak Lanjut dan Pemenuhan Komitmen Direksi BRI atas Hasil Audit
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemantauan yang dilakukan oleh Komite Audit atas pelaksanaan komitmen dan rencana tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan, baik oleh SKAI BRI maupun OJK, Bank Indonesia, BPK RI dan KAP sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dan dipaparkan SKAI dalam Laporan Hasil Audit (LHA) secara triwulanan.

Untuk hasil audit SKAI berdasarkan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) Triwulanan yang memerlukan perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti oleh Direksi, Komite Audit memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama melalui surat Dewan Komisaris yang ditembuskan pula kepada SKAI.

Selanjutnya untuk hasil audit SKAI yang disampaikan secara khusus kepada Komite Audit dan laporan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia, BPK RI dan KAP ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Direksi BRI. Selama periode tahun 2019, terdapat beberapa hasil temuan audit yang dimintakan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut serta rekomendasi yang diberikan kepada Direksi, yaitu:

No.	Materi	No & Tgl. Nota Dinas KA / Surat Dewan Komisaris
1.	Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum	B.09-KA/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 B.49-KOM/02/2019 tanggal 19 Februari 2019
2.	Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	B.41-KA/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019
3.	Tindak lanjut komitmen BRI atas hasil pemeriksaan tematik skimming oleh Bank Indonesia	R.02-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019
4.	Penilaian terhadap sistem pengendalian intern BRI selama periode tahun 2018	R.04-KA/01/2019 tanggal 22 Januari 2019
5.	Pemeriksaan terhadap pengelolaan Risiko Debitur PT Krakatau Steel dan grup usaha	R.13-KA/05/2019 tanggal 08 Mei 2019
6.	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2018	R.20-KA/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019
7.	Tindaklanjuti komitmen BRI atas hasil pemeriksaan tematik Skimming oleh bank Indonesia	R.02-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019
8.	Langkah pencegahan fraud	R.03-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019
9.	Penilaian terhadap kecukupan dan aktivitas sistem pengendalian intern BRI selama periode tahun 2018	R.04-KA/01/2019 tanggal 22 Januari 2019
10.	Surat kepada kepala SKAI tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2018	R.20-KA/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019

2. Penelaahan Atas Laporan Kejadian Fraud Yang Diperkirakan Berdampak Signifikan
Komite Audit juga melakukan penelaahan atas Laporan-laporan Kejadian Fraud yang berdampak signifikan kepada Perseroan yang disampaikan Direktur Kepatuhan kepada OJK. Selanjutnya Komite Audit menyampaikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan Direksi. Selama periode tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan Laporan Kejadian Fraud Diperkirakan Berdampak Signifikan sebagai berikut:

Komite Audit

No.	Periode Laporan Fraud Yang Diperkirakan Berdampak Signifikan	No. & Tgl. Nota Dinas KA & Surat Dewan Komisaris
1.	Laporan fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank BRI	R.03-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019
2.	Laporan fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank BRI	R.08-KA/03/2019 tanggal 20 Maret 2019
3.	Kejadian fraud di teras BRI unit dan kasus transaksi EDC	R.09-KA/03/2019 tanggal 20 Maret 2019
4.	Tindaklanjut komitmen BRI atas hasil pemeriksaan tematik Skimming oleh bank Indonesia	R.02-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019

V. Komite Audit Dengan DPLK BRI

1. Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI

Menunjuk pasal 24 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Dewan Komisaris sebagai Pengawas DPLK BRI wajib menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK Semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

Berdasarkan POJK tersebut, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap perkembangan kinerja investasi DPLK BRI secara berkala berdasarkan laporan kinerja investasi DPLK BRI yang diterima. Hasil penelaahan dan evaluasi Komite Audit selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, termasuk pendapat dan rekomendasi Komite Audit atas laporan kinerja investasi DPLK BRI yang selanjutnya dituangkan dalam surat Dewan Komisaris kepada Pengurus DPLK BRI dan disampaikan kepada OJK.

Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan penelaahan dan evaluasi atas investasi kinerja DPLK BRI sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	No. & Tgl. Nota Dinas KA /Surat Dewan Komisaris
1.	Laporan evaluasi kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI Tahun 2018	B.13-KA/03/2019 tanggal 6 Maret 2019 B.70-KOM/03/2019 tanggal 15 Maret 2019
2.	Laporan hasil evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019	B.36-KA/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 B.175-KOM/06/2019 tanggal 25 Juni 2019

2. Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Investasi DPLK BRI

Terkait dengan pelaksanaan audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Investasi DPLK BRI tahun buku 2019, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit antara lain:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

No.	Kegiatan/Materi	Realisasi	Output
1	Evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019	25 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi KA BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI untuk tahun buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.36-KA/06/2019
2	Penyampaian Alokasi Anggaran dan Permohonan Pembentukan Tim Pengadaan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun 2019	20 Agustus 2019	Dokumen Alokasi Anggaran dan Permohonan Pembentukan Tim Pengadaan Jasa Audit Pengadaan jasa audit KAP untuk laporan keuangan & Laporan Investasi DPLK BRI tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.39-KA/08/2019
3	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK tahun 2019	02 Oktober 2019	Rekomendasi Komite Audit atas usulan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.24-KA/10/2019
4	Pengadaan jasa KAP dalam rangka audit umum atas laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019	09 Desember 2019	Rekomendasi Hasil pengadaan jasa KAP dalam rangka audit umum atas laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.56-KA/12/2019
5	Persetujuan penunjukan KAP untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019	10 Desember 2019	Persetujuan penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun Buku 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: B.57-KA/12/2019

VI. Kegiatan Internal dan Kegiatan Lainnya Komite Audit

1. Melakukan telaah terhadap implementasi PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2019, rekomendasi saran dan masukan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui Nota Dinas Ka No: R.21-KA/09/2019 tanggal 17 September 2019 dan Surat Dewan komisaris ke Direksi No: R.69-KOM/09/2019 tanggal 19 September 2019.
2. Memberikan rekomendasi terkait dengan Pelaksanaan audit khusus (spesial audit) atas debitur debitur bermasalah PT BRI Agroniaga yang disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.26-KA/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019.
3. Memberikan rekomendasi kepada SKAI terkait menindaklanjuti temuan kantor akuntan publik EY tentang beberapa debitur dengan kolektibilitas minimal 2 DPK disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.28-KA/11/2019 tanggal 01 November 2019.
4. Memberikan rekomendasi kepada SKAI terkait langkah pencegahan fraud disampaikan melalui Nota Dinas KA No: 02-KA/01/2019 tanggal 07 Januari 2019.
5. Memberikan rekomendasi kepada SKAI terhadap kecukupan dan aktivitas sistem pengendalian intern BRI selama periode tahun 2018 disampaikan melalui Nota Dinas KA No: R.04-KA/01/2019 tanggal 02 Januari 2019.

Ikut mendampingi kunjungan kerja anggota Dewan Komisaris ke beberapa Kanwil BRI, Kanca BRI, KCP BRI, BRI Unit, dan unit-unit kerja BRI lainnya, termasuk secara khusus hadir dalam pelatihan internal (in-house training – IHT) yang diselenggarakan oleh beberapa Kantor Audit Intern Wilayah. Dalam IHT AIW tersebut di atas, Komite Audit mensosialisasikan peran, fungsi dan tanggung jawab Lembaga Komisaris, khususnya Komite Audit serta menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pengendalian internal dan penerapan tata kelola, baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan BRI. Hal ini merupakan bagian dari penyampaian “tone of the top” dari Lembaga Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit kepada segenap jajaran di lingkungan BRI, khususnya unit-unit kerja yang dikunjungi.

6. Komite Audit bersama-sama dengan Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite lainnya melakukan koordinasi dan pembahasan lainnya sesuai dengan penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Audit

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE AUDIT 2019

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Audit dari unsur Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2019 di Bab 3 Profil Perusahaan. Pendidikan Anggota Komite Audit Non Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Pamuji Gesang Raharjo	Prinsip, Praktek, dan Isu Fundamental Penerapan PSAK 71	BARA Risk Forum	27-28 Juni 2019	Denpasar
2	Sunu Aji Noor W	Prinsip, Praktek, dan Isu Fundamental Penerapan PSAK 71	BARA Risk Forum	27-28 Juni 2019	Denpasar

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Setiap pemanggilan Rapat dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, atau dilakukan secara lisan atau media komunikasi lainnya.
4. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
7. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Risalah rapat Komite Audit harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
10. Risalah rapat Komite Audit merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
11. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Rapat Komite Audit tahun 2019

Pada tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan 16 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	No. Risalah	Jumlah Anggota KA yang Hadir	Keterangan
1	Pembahasan Progress Report Audit atas Laporan Keuangan dan PKBL BRI Tahun 2019	Kamis, 17 Januari 2019	01 - KA/01/2019	5	Kuorum
2	Closing Meeting Laporan Audit Keuangan & PKBL BRI tahun 2018	Selasa, 29 Januari 2019	02 - KA/01/2019	5	Kuorum



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

No	Agenda Rapat	Tanggal	No. Risalah	Jumlah Anggota KA yang Hadir	Keterangan
3	Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2018	Selasa, 26 Februari 2019	03 - KA/02/2019	5	Kuorum
4	Pemberhentian dan pengangkatan Kepala SKAI BRI	Selasa, 12 Maret 2019	05.a - KA/03/2019	5	Kuorum
5	Closing Audit PKBL tahun 2018 & Laporan evaluasi kinerja manajemen	Selasa, 2 April 2019	04 - KA/04/2019	5	Kuorum
6	Pembahasan Piagam Audit BRI, & Telaah atas Laporan Keuangan TW I Tahun 2019	Selasa, 23 April 2019	05 - KA/04/2019	5	Kuorum
7	Rekomendasi Pengadaan KAP & Pembahasan Kepala SKAI	Selasa, 7 Mei 2019	06 - KA/05/2019	5	Kuorum
8	Pembahasan Laporan Hasil Audit TW I Tahun 2019	Senin, 13 Mei 2019	07 - KA/05/2019	5	Kuorum
9	Pembahasan Calon Kepala SKAI	Selasa, 21 Mei 2019	09 - KA/05/2019	6	Kuorum
10	Kick off meeting audit laporan keuangan BRI 30 Juni 2019	Selasa, 28 Mei 2019	08 - KA/05/2019	5	Kuorum
11	Pembahasan Laporan Hasil Audit TW II Tahun 2019	Senin, 29 Juli 2019	10-KA/07/2019	6	Kuorum
12	Closing meeting audit atas laporan keuangan BRI TW II Tahun 2019 dengan EY	Senin, 5 Agustus 2019	11-KA/08/2019	6	Kuorum
13	Progress Report Audit atas Laporan Keuangan Interm BRI 31 Agustus 2019	Selasa, 8 Oktober 2019	12-KA/10/2019	6	Kuorum
14	Closing Meeting Audit atas akun tertentu posisi 31 Agustus 2019	Selasa, 15 Oktober 2019	13-KA/10/2019	7	Kuorum
15	Telaah Laporan Keuangan TW III 2019	Selasa, 22 Oktober 2019	14-KA/10/2019	7	Kuorum
16	Laporan hasil audit tw III tahun 2019 & Manajemen Letter tahun 2019	Senin, 11 November 2019	15-KA/10/2020	7	Kuorum
17	Pembahasan perencanaan audit tahunan tahun 2020	Senin, 16 Desember 2019	16-KA/10/2021	7	Kuorum
18	Pembahasan perencanaan audit tahunan BRI Tahun 2019	Senin, 16 Desember 2019	17-KA/10/2022	7	Kuorum

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	% Kehadiran
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	18	18	100%
2	A. Sonny Keraf	Anggota	18	16	89%
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	18	18	100%
4	Hendrikus Ivo*	Anggota	6	6	100%
5	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	18	18	100%
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	18	18	100%
7	Handayani*	Anggota	6	6	100%

* Efektif Oktober 2019

Tindak Lanjut Rapat

Seluruh hasil kegiatan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh komite Audit di dokumentasikan dalam risalah rapat dan ditindaklanjuti dengan berbagai surat Ke Dewan Komisaris dan pihak terkait.

Komite Audit

REMUNERASI KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Khusus Anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2019

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJKPeraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 07-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KA BRI. Komposisi Anggota KA telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KA pada Tahun 2019	Piagam Audit pada Tahun 2018 telah di update dan ditetapkan kembali melalui SK Dekom Nokep: 11 -KOM/11/ 2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit BRI	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KA telah lulus fit & proper test OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KA telah lulus fit & proper test OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KA	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 07-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KA BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KA tidak melebihi ketentuan	5	5
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KA pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KA pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Satu bulan sekali (12 kali)	Selama Tahun 2019 dilaksanakan 18 kali Rapat KA	5	5
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT)	Setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No. R.01-KA/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Persetujuan Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2019	5	5



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	Setahun sekali	1. Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap KAP dan/ Akuntan Publik telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu dan sesuai ketentuan	5	5
			Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dekom	Sesuai tugas dan arahan Dekom	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	5	5
		Pengawasan	Review laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas setiap Triwulan	10	10
			Review laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak 3 Kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI	10	10
			Review terhadap pengelolaan Wistleblower System	Setahun sekali	Secara kumulatif, selama periode Tahun 2019 total pengaduan/ pelaporan yang diterima melalui Whistle Blower System (WBS) BRI sebanyak 134 laporan. Seluruh pengaduan/pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti SKAI bersamaan dengan proses review pelaksanaan Audit internal BRI, baik melalui investigasi maupun penelitian dan tindaklanjut oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut: a. 81 laporan statusnya dapat dinyatakan "Selesai". b. 53 laporan masih "Dalam Proses" penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.	5	5

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Review pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI	Setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Komite Audit sesuai dengan ketentuan	10	10
			Review tindaklanjut Management Letter dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	Setahun sekali	1. Review Management Letter disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit perihal Management Letter atas Audit Umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. 2. Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah menyampaikan penelaahan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPATK/BPK RI	5	5
			Penelaahan Atas Laporan Kejadian fraud yang diperkirakan Berdampak Signifikan	Setahun sekali	Selama tahun 2019 Komite Audit telah menyampaikan Penelaahan Atas Laporan Kejadian fraud yang diperkirakan Berdampak Signifikan	5	5
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI Wajar Tanpa Pengecualian	10	10
Total						100	100



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas untuk meninjau kebijakan remunerasi dan memberikan saran dan rekomendasi atas prosedur pemilihan kandidat dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak ketiga independen didalam komite dibawah Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor

PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

12. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.
14. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Desember 2013 No. 06-KOM/ BRI/12/2013 atau S.05-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (Code of Conduct) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 08 Maret 2010 No. 01-KOM/ BRI/03/2010 atau Nokep S.14-DIR/DKP/03/2010 tentang Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
15. Surat Keputusan Direksi Nokep: 656 -DIRIKHC/09/2019 tanggal 30 Spetember 2019 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Piagam Komite

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengatur tentang tujuan pembentukan, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan bidang manajemen SDM. Panduan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat keputusan Dewan Komisaris No: B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan Kebijakan Nominasi dan Kebijakan Remunerasi.

Struktur dan Keanggotaan

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;

Struktur KNR

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, sebagai berikut

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (ex officio).
2. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
 - a. wajib memenuhi syarat:
 1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 - b. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
 - c. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja

kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
5. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
8. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/ atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko, bidang keuangan dan/atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
 - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
 6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
 - a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
 - b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
 7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan sampai dengan 1 Januari 2019 sampai dengan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Profesi
Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
Hadiyanto	Anggota	Komisaris
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
Busrul Iman	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capita)

Susunan Keanggotaan 30 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Wahyu Kuncoro *	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Nama	Jabatan	Profesi
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
8	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
9	Loeke Larasati A**	Anggota	Komisaris
10	E.R.A Taufiq	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital)

* Efektif s/d 18 November 2019 sebagai Anggota Komisaris & KNR

** Efektif Setelah Lulus Fit And Proper Test OJK

Profil Komite

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Andrinof A. Chaniago Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Profile is available at BOC Profile section.
A. Fuad Rahmany Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
A. Sonny Keraf Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rofikoh Rokhim Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hadiyanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus Teguh Budi Harjanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Loeke Larasati A* Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
E.R.A Taufiq Anggota Komite KNR (01 Juli 2019-Sekarang)	Lahir di Bandung 13 Mei 1967, memperoleh gelas Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung. Selama bekerja di BRI antara lain menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Karier Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital, Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2014-2019), Kepala Divisi Kebijakan Human capital BRI (2019) dan terakhir sebagai Executive Vice President Divisi Human Capital Business Partner (2019 sampai sekarang).

*Efektif Setelah Lulus Fit And Proper Test OJK



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

1. Mempunyai integritas, obyektifitas, mentalitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi
2. Mampu bersikap independen, yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, diutamakan berpengalaman dalam manajemen SDM antara lain perencanaan suksesi, pengembangan karir, evaluasi kinerja serta berpengalaman mengelola sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perusahaan.
5. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
6. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif.

Independensi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komisaris Independen merupakan anggota KNR yang tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perseroan dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Tugas Tanggung Jawab Wewenang dan Larangan

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Komite Nominasi dan Remunerasi

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2019

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) diukur dari pencapaian atas program kerja / rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (Key Success Factors) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KNR tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2019

Fokus Pelaksanaan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Nominasi Direksi BRI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi KNR. Adapun proses Nominasi yang terjadi selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Nominasi dalam RUPS Tahunan Tahun 2019.
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi dan Komisaris dari Internal Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk di Putus dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan Proses Nominasi Direksi dan Rekomendasi KNR adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Usulan Nominasi Direksi	15 Mei 2019	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPST Tahun 2019 Nota Dinas KNR R.07-KNR/05/2019

- b. Nominasi dalam RUPSLB Tahun 2019.
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk ditetapkan dalam RUPSLB tanggal 03 Januari 2019 dan RUPSLB tanggal 2 September 2019 sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.SR-742/MBU/11/2018 Tanggal 05 November 2018 yang salah satu agendanya adalah perubahan Pengurus Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

Materi	Realisasi Waktu	Output
Perubahan Pengurus BRI dalam RUPSLB 2019	28 Desember 2018	Usulan Update Top Talent PT. BRI (Persero) Tbk Usulan calon Perubahan PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.17-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018
Nominasi pengurus BRI dalam RUPSLB	02 Januari 2019	Usulan Perubahan Pengurus PT BRI (Persero) Tbk disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.01-KNR/01/2019
Nominasi pengurus BRI dalam RUPSLB	02 Septemebr 2019	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPSLB Tahun 2019 disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.12-KNR/09/2019 Permohonan persetujuan bakal calon Direktur Utama disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.13-KNR/09/2019

2. Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar BRI, salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna adalah mengusulkan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan bagi perseroan dan/ atau bernilai strategis. Memperhatikan hal tersebut, selama Tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris telah melaksanakan proses Nominasi terhadap calon wakil perseroan yang diusulkan oleh Direksi untuk ditempatkan kepada anak perusahaan dan Pihak terkait antara lain sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Nominasi calon Komisaris Utama dan Direktur Utama Ventura Investama	11 Februari 2019	Usulan Nominasi calon komisaris utama dan direktur utama ventura investama disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.02-KNR/02/2019
Nominasi calon anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	11 Februari 2019	Usulan calon anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.03-KNR/02/2019
Nominasi anggota Dewan Komisaris PT BRI Life	11 Februari 2019	Usulan anggota Dewan Komisaris PT BRI Life disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.02-KNR/02/2019
Nominasi Calon komisaris utama dan direktur utama BRI Syariah	10 April 2019	Usulan Calon komisaris utama dan direktur utama BRI Syariah disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.06-KNR/04/2019
Usulan Persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah	29 April 2019	Usulan Persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.07-KNR/04/2019
Nominasi calon pengurus BRI Agro	29 Mei 2019	Usulan Rekomendasi calon pengurus BRI Agro disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.08-KNR/05/2019
Rekomendasi perubahan nomenklatur dan pengalihan direksi PT BRI Multifinance Indonesia	04 Juli 2019	Usulan rekomendasi perubahan nomenklatur dan pengalihan direksi PT BRI Multifinance Indonesia disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.09-KNR/07/2019
Rekomendasi Calon Direktur Utama BRI Agro	20 November 2019	Nominasi Direktur Utama BRI Agro disampaikan melalui Nota Dinas KNR SR.12-KNR/11/2019

Komite Nominasi dan Remunerasi

3. Evaluasi Kinerja Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Komite Nominasi dan remunerasi harus melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan KPI Direksi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi Direksi tersebut antara lain untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi serta melakukan Review kembali atas kompetensi masing-masing Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kinerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Output
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	31 Juli 2019	Surat tertulis KNR / Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.10-KNR/07/2019 Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk.

4. Review Kebijakan/Ketentuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Bahwa dalam rangka memastikan tata kelola pemberian remunerasi untuk mendorong prudent risk taking oleh Pejabat Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank harus memiliki kebijakan tata kelola remunerasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut KNR telah menyusun Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI yang telah ditetapkan melalui SK bersama Direksi dan Komisaris SK Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 09-KOM/BRI/11/2017 dan Nomor 1023-DIR/KPS/11/2017 Surat tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta KNR telah menyusun Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/09/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan review kebijakan remunerasi terkait penempatan penangguhan remunerasi yang bersifat variable bagi pekerja yang ditetapkan sebagai material risk taker melalui SK bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 08-KOM/BRI/06/2019 tanggal 20 Juni 2019..

5. Review Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan dengan hasil keputusan RUPST Tahun 2019, RUPST memberi kewenangan kepada Dewan komisaris untuk menentukan struktur dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan komisaris kepada Dewan komisaris setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Berdasarkan keputusan tersebut, KNR menyampaikan Review dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang meliputi usulan honorarium/gaji Dewan Komisaris dan Direksi, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun 2018, usulan tantiem atas kinerja Tahun Buku 2018 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan Review dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun 2018	22 April 2019	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris SR.10-KOM/04/2019 tentang Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun 2018.

Dalam merumuskan usulan remunerasi KNR dibantu oleh Konsultan Independen Willis Towers Watson, review dilaksanakan dengan melakukan survey kajian berdasarkan benchmark dengan perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau regional Asia Tenggara sesuai dengan Permen No.06/MBU/2017 yang antara lain memiliki kriteria skala usaha yang dianggap setara, mempunyai usaha inti yang sejenis atau kompleksitas usaha yang sama, serta dapat diketahui indikator kinerjanya serta dapat diketahui biaya Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.

6. Pembayaran Remunerasi Yang Ditangguhkan

Dalam rangka implementasi kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta mendorong dilakukannya prudent risk taking, sebagai wujud peningkatan tata kelola, sebagian remunerasi yang bersifat variabel ditangguhkan pembayarannya untuk jangka waktu tertentu, pada tahun KNR telah menyusun Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/09/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil evaluasi dengan Unit Kerja pengelola manajemen risiko dan Satuan kerja Audit Intern, Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, KNR meminta konfirmasi dari Kepala SKAI dan Divisi Enterprise Risk Management (ERM) untuk memastikan apakah terdapat kondisi sesuai Kriteria tersebut di atas sehingga perlu penyesuaian terhadap remunerasi variabel yang ditangguhkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan keterangan dari Kepala SKAI disampaikan bahwa:

- Selama Tahun 2018 tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terbukti melakukan individual fraud.
- Sampai dengan saat ini menurut KAP BRI tidak ada Re-Statement atas Laporan Keuangan BRI tahun 2017.
- Peringkat Profil Risiko BRI pada Triwulan IV tahun 2018 adalah 2 (Low to Moderate).

Berdasarkan konfirmasi dan keterangan tersebut, KNR dan Dewan Komisaris sepakat bahwa tidak ada penyesuaian atas pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atas kinerja tahun 2017.

Materi	Realisasi Waktu	Output
Rekomendasi Pembayaran tahap I atas tantiem kinerja tahun 2017 yang ditangguhkan	28 Mei 2019	Pembayaran tahap I atas tantiem kinerja tahun 2017 yang ditangguhkan disampaikan melalui surat R.20-KOM/05/2019 tentang Rekomendasi Pembayaran tahap I atas tantiem kinerja tahun 2017 yang ditangguhkan

7. Review atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI

KNR menyampaikan rekomendasi mengenai hasil Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dimaksud menjadi bahan bagi Dewan Komisaris dalam rangka pemberian

Komite Nominasi dan Remunerasi

pendapat dan saran kepada Direksi untuk memastikan Perseroan selalu menetapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Perseroan. Reviu dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur Human Capital, Kebijakan Human Capital dan laporan serta pemaparan Direktur Human Capital serta sistem remunerasi Pekerja BRI.

Pelaksanaan dan realisasi Reviu atas implementasi remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu	Output
Reviu Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu Pertama Desember 2018	15 Oktober 2019	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KNR Nomor: R.14-KNR/10/2019 tentang Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI yang selanjutnya disampaikan kepada Direksi BRI.

Hal-hal yang menjadi Concern KNR dan Dewan Komisaris terkait dengan Kebijakan dan pengelolaan Human Capital BRI antara lain sebagai berikut:

- Pemenuhan formasi jabatan yang kosong, khususnya untuk jabatan yang strategis yang berdampak pada performance Unit kerja.
- Transformasi culture, pengembangan suasana kerja yang baik, kejelasan dan transparansi jenjang karier semua pekerja, peningkatan kompetensi pendidikan serta peran aktif BRI untuk membangun corporate culture.
- Pengelolaan pekerja untuk menghadapi digital banking dan branchless banking.
- Pengembangan materi silabus pendidikan untuk tahap Senior Manajer ke atas diharapkan lebih bersifat strategik.
- Memperkuat pengembangan karakter dan leadership pekerja BRI, internalisasi budaya kerja dalam tindakan budaya kerja BRI.
- Mengembangkan sistem atau konsep yang efektif untuk mengantisipasi kejadian fraud dari pekerja yang terus meningkat melalui big data.
- Pengembangan kebijakan human capital dan talent pool yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan anak perusahaan untuk setiap level jabatan.
- Memetakan kembali kebutuhan sertifikasi bagi pekerja sesuai dengan tuntutan keahlian maupun regulator, hal ini memperhatikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- Struktur remunerasi pekerja, khususnya besaran remunerasi yang diterima setiap bulan, sehingga lebih menarik bagi *best talent* untuk bergabung dengan BRI.
- Remunerasi bagi pekerja dalam setiap level jabatan *comparable* dengan industri sehingga mendorong tingkat produktivitas pekerja.

8. Lain-lain

Selain kegiatan utama tersebut di atas Selama Tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

- Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris Tahun 2019
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perekrutan termasuk perpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

4. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan.
6. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Review* dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
7. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Review* perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
8. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2019

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun 2019 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2019 pada Bab 3 Profil Perusahaan.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Rapat

Pengaturan Rapat Komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (e-mail) dan media komunikasi lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
6. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite.
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan;
10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
11. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
12. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
13. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan

Komite Nominasi dan Remunerasi

14. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
15. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh KNR dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	No Notulen Rapat KNR	Anggota KNR yang Hadir	Keterangan
1	Nominasi Pengurus BRI	Kamis, 3 Januari 2019	01 - KNR/01/2019	5	Kuorum
2	Nominasi calon pengurus BRI Life dan BRI Ventura	Selasa, 29 Januari 2019	02 - KNR/01/2019	7	Kuorum
3	Nominasi Pengurus BRI Syariah	Selasa, 2 April 2019	03 - KNR/04/2019	5	Kuorum
4	Wawancara calon direktur utama BRI Syariah	Selasa, 9 April 2019	04 - KNR/04/2019	5	Kuorum
5	1. Pembahasan Kebijakan Nominasi Pengurus Perusahaan Anak. 2. Pembahasan Kebijakan Evaluasi Pengurus BRI. 3. Pembahasan Hasil Evaluasi Kinerja Direksi BRI. 4. Pembahasan Hasil Fit n Proper Test Calon Kepala SKAI.	Selasa, 30 April 2019	05 - KNR/04/2019	6	Kuorum
6	Nominasi Calon Pengurus BRI	Selasa, 7 Mei 2019	06 - KNR/05/2019	6	Kuorum
7	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2019	Selasa, 14 Mei 2019	07 - KNR /05/2019	7	Kuorum
8	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2019	Rabu, 15 Mei 2019		7	Kuorum
9	Pembahasan Nominasi Pengurus BRI Agro, Pembahasan Employee Stock Option (ESOP), Pembahasan Tantiem Pembayaran Malus (Tantiem yg ditahan)	Selasa, 21 Mei 2019	09 - KNR/05/2019	7	Kuorum
10	Fit & Proper Test Calon Kepala Divisi SKP	Selasa, 2 Juli 2019	08-KNR/07/2019	8	Kuorum
11	Nominasi BRI Finance	Selasa, 2 Juli 2019	10-KNR/02/2019	6	Kuorum
12	Evaluasi Kinerja BRI	Selasa, 16 Juli 2019	11-KNR/07/2019	6	Kuorum
13	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi BRI 2. Pembahasan Seleksi Calon Anggota Komite Non Komisaris BRI	Selasa, 23 Juli 2019	13-KNR/07/2019	6	Kuorum



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Agenda Rapat	Tanggal	No Notulen Rapat KNR	Anggota KNR yang Hadir	Keterangan
14	Pembahasan Talent Pool BRI	Selasa, 30 Juli 2019	12-KNR/07/2019	5	Kuorum
15	Seleksi dan Wawancara Calon Anggota Komite Non Komisaris	Rabu, 31 Juli 2019	14-KNR/07/2019	7	Kuorum
16	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2019.	Jumat, 30 Agustus 2019	15 - KNR/08/2019	8	Kuorum
17	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2019.	Senin, 2 September 2019	16 - KNR/09/2019	8	Kuorum
18	Fit and Proper Test Pengurus PT Danareksa Sekuritas	Selasa, 17 September 2019	18 - KNR/09/2019	7	Kuorum
19	Review Kebijakan Ketenagakerjaan & Remunerasi Pekerja BRI	Selasa, 1 Oktober 2019	17- KNR/10/2019	7	Kuorum
20	Review Pengurus Perusahaan Anak	Selasa, 22 Oktober 2019	19 - KNR/10/2019	6	Kuorum
21	Calon Kadiv SKP, Calon KPMR yang berasal dari non Komisaris	Selasa, 29 Oktober 2019	20 - KNR/10/2019	7	Kuorum
22	Pembahasan calon Kadiv SKP & anggota KPMR	Selasa, 19 November 2019	21 - KNR/11/2019	8	Kuorum
23	Pembahasan Pengrus BRINS, dan pending matters terkait tindakan lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	Selasa, 3 Desember 2019	22 - KNR/12/2019	7	Kuorum
24	Fit & Proper test calon Direktur Utama BRINS	Selasa, 10 Desember 2019	23 - KNR/12/2019	7	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR

Tingkat kehadiran rapat KNR selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat KNR	Kehadiran KNR	% Kehadiran KNR
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	24	22	92%
2	Gatot Trihargo	Anggota	17	13	76%
3	Wahyu Kuncoro	Anggota	14	11	79%
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	24	24	100%
5	A. Sonny Keraf	Anggota	24	24	100%
6	Mahmud	Anggota	8	8	100%
7	Rofikoh Rokhim	Anggota	24	22	92%
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	24	21	88%
9	Hadiyanto	Anggota	24	19	79%
10	Hendrikus Ivo	Anggota	17	17	100%
11	E.R.A Taufiq	Anggota	17	14	82%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Tindak Lanjut Rapat

Dokumen rekomendasi atau hasil Review kebijakan yang dikeluarkan oleh KNR dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi dan Hasil Review Kebijakan	Nomor Surat	Perihal Dokumen/Surat
1	Rekomendasi pengurus PT BRI (Persero) Tbk	R.01-KNR/01/2019	Perubahan pengurus PT BRI (Persero) Tbk
2	Rekomendasi calon komisaris utama dan direktur utama ventura investama	R.02-KNR/02/2019	Usulan calon komisaris utama dan direktur utama ventura investama
3	Rekomendasi persetujuan calon anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	R.03-KNR/02/2019	Persetujuan calon anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
5	Rekomendasi Usulan dan pemberhentian Sekdekom BRI	R.05-KNR/04/2019	Usulan dan pemberhentian Sekdekom BRI
6	Rekomendasi Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 dan tantiem/insentif kinerja tahun 2018	R.06-KNR/04/2019	Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 dan tantiem/insentif kinerja tahun 2018
7	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPST Tahun 2019	R.07-KNR/05/2019	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPST Tahun 2019
8	Rekomendasi pembayaran tahap I atas taantem kinerja tahun 2017 yang ditangguhkan	R.10-KNR/05/2019	Pembayaran tahap I atas taantem kinerja tahun 2017 yang ditangguhkan
9	Rekomendasi pengangkatan Komite Non Komisaris BRI	R.11-KNR/08/2019	Usulan pengangkatan Komite Non Komisaris BRI
10	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPSTLB Tahun 2019	R.12-KNR/09/2019	Rekomendasi KNR atas penetapan calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan dalam RUPSTLB Tahun 2019
11	Rekomendasi bakal calon Direktur Utama	R.13-KNR/09/2019	Permohonan persetujuan bakal calon direktur utama
12	Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan remunerasi BRI	R.14-KNR/10/2019	Hasil Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan remunerasi BRI
13	Rekomendasi perpanjangan kontrak kerja anggota komite Non Komisaris	R.15-KNR/11/2019	Rekomendasi perpanjangan kontrak kerja anggota komite Non Komisaris
14	Rekomendasi kandidat calon anggota komite Non Komisaris BRI	R.16-KNR/11/2019	Rekomendasi kandidat calon anggota komite Non Komisaris BRI
15	Rekomendasi Dewan Komisaris dan Direksi BRI Ventura	SR.01-KNR/02/2019	Usulan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Ventura
16	Rekomendasi anggota Dewan Komisaris PT BRI Life	SR.02-KNR/02/2019	Usulan anggota Dewan Komisaris PT BRI Life
17	Rekomendasi Calon komisaris utama dan direktur utama BRI Syariah	SR.06-KNR/04/2019	Rekomendasi Calon komisaris utama dan direktur utama BRI Syariah
18	Rekomendasi persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah	SR.07-KNR/04/2019	Persetujuan pencalonan direksi dan dewan komisaris PT BRI Syariah
19	Rekomendasi calon pengurus BRI Agro	SR.08-KNR/05/2019	Rekomendasi calon pengurus BRI Agro
20	Rekomendasi perubahan nomenklatur dan pengalihan direksi PT BRI Multifinance Indonesia	SR.09-KNR/07/2019	Rekomendasi perubahan nomenklatur dan pengalihan direksi PT BRI Multifinance Indonesia



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Rekomendasi dan Hasil Review Kebijakan	Nomor Surat	Perihal Dokumen/Surat
21	Rekomendasi evaluasi Kinerja Direksi BRI	SR.10-KNR/07/2019	Hasil Evaluasi Kinerja Direksi BRI
22	Rekomendasi top talen BRI	SR.11-KNR/07/2019	Penyampaian top talen BRI
23	Rekomendasi Calon direktur utama BRI Agro	SR.12-KNR/11/2019	Rekomendasi Calon direktur utama BRI Agro

Rencana Agenda Rapat Rapat KNR

No.	Rencana Agenda Rapat Tahun 2020	Target Waktu
1.	Nominasi Direksi dan Komisaris	Minggu I Februari 2020
2.	Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu I Maret 2020
3	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak	Tentative Sesuai Usulan Direksi
4	Review Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Minggu II Mei 2020
5	Review dan penyusunan Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris untuk Tahun 2020	Minggu I Juni 2020
6	Review Kebijakan Human Capital	Minggu I September 2020
7	Review Kebijakan Remunerasi Pekerja	Minggu I September 2020

REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2019

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 08-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KNR BRI. Komposisi Anggota KNR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KNR pada Tahun 2019	Piagam KNR telah di review dan di update melalui Nokep Dekom No.: 13-KOM/11/ 2018 Tentang Pedoman tata Tertib KNR.	5	5

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus Fit & Propertest OJK dan/ atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	8 (Delapan) Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus Fit and Proper Test OJK dan selalu update pendidikan setiap Tahun	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 08-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR tidak melebihi ketentuan	5	5
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP KNR pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 27 Desember 2019	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 bulan	Selama tahun 2019 dilaksanakan 15 kali rapat KNR	10	10
			Nominasi pengurus BRI	Minimal sekali dalam setahun	Usulan Nominasi Direksi, Komisaris BRI disampaikan kepada Dewan Komisaris Untul disampaikan kepada pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang selanjutnya diputus dalam RUPST dan RPSLB BRI Tahun 2019.	10	10
			Nominasi pengurus anak perusahaan	Tentative sesuai dengan usulan Direksi	Dewan Komisaris melaksanakan nominasi seluruh Pengurus anak perusahaan BRI selama 2019 sebanyak 9 kali.	10	10
			Review dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.10-KOM/04/2019 tanggal 22 april 2019 tentang Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun 2018.	10	10



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Review dan menyusun Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Review kebijakan remunerasi dilaksanakan pada tahun terkait Penetapan penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi pekerja yang ditetapkan sebagai material risk taker yang selanjutnya disahkan dalam SK Komisaris No: 08-KOM/ BRI/06/2019 tanggal 20 Juni 2019.	10	10
		Pengawasan	Review Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat melauai Nota Dinas KNR Nomor: R.14-KNR/10/2019 tentang Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI yang selanjutnya disampaikan kepada Direksi BRI.	10	10
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Surat tertulis KNR / Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.10-KNR/07/2019 Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk	5	5
			Pelaksanaan penilaian self assesment kinerja Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Dilaksanakan sekali dengan nilai hasil self assessment Dekom 99,97%	5	5
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dekom dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Annual Report BRI	5	5
Total						100	100

OPINI KNR TERHADAP PELAKSANAAN NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN

Komite Remunerasi dan Nominasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus lulus assessment yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon pengurus Perseroan berdasarkan data Top talent BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau Direksi Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani proses fit and proper test oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan untuk Direksi yang dilakukan secara kolektif kolegial saat ini dinilai telah mencukupi. Selain saat ini telah dikembangkan penilaian kinerja individu, khususnya untuk Direksi, yang dapat mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat dibawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang prudent, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, benchmark ke industri dan peers group serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh pihak independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Sukses Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
- b. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
 1. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
 2. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 3. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
- c. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris;
- d. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
- f. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
 1. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 2. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon;
- g. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dan wajib menjaga independensinya.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

2. Prosedur Nominasi Direksi dan Komisaris

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjangkau Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan assessment oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
- c. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
 1. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;
 2. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkau bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkauan ini melibatkan lembaga assessment profesional/eksternal atau Professional Search Firm yaitu yaitu : PPM Manajemen Assesment Center Indonesia (ACI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil assessment tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
 3. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
 - I. Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
 - II. Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
4. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
- d. Hasil penggalan informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- e. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
- f. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk selanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
- g. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. Calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.

Komite Nominasi dan Remunerasi

- h. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- i. OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KPMR bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

1. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman/Piagam Komite

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota KPMR. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi KPMR dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko BRI.

Panduan kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko di review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulasi terkait lain yang berlaku. Panduan Kerja KPMR disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko Perseroan. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite.

Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Risiko Periode 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Mahmud	Ketua	15 Maret 2017 - 15 Mei 2019	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Ketua	28 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris Utama / Independen
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Komisaris Independen
6	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris
7	Suindiyo	Anggota	1 Desember 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Sumaryo	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Indrayeti	Anggota	1 Agustus 2014 – 10 Agustus 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
10	Tubagus A. Maulana	Anggota	1 Februari 2015 – 1 Februari 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
 - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
 - a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
 - b. Masa kerja paling lama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rofikoh Rokhim Ketua KPMR/ Komisaris Independen Periode: 28 Mei 2019 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko per 28 Mei 2019, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Andrinof A. Chaniago Anggota KPMR/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 15 Maret 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
A. Fuad Rahmany Anggota KPMR/ Komisaris Independen Periode: Juni 2015-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per Juni 2015, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus T. Budi Harjanto Anggota KPMR/ Komisaris Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 15 Maret 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo Anggota KPMR/Komisaris Independen Periode: 10 September 2019 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 10 September 2019, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Suindiyo Anggota KPMR Pihak Independen Periode: Desember 2015-Sekarang	Lahir di Blora 27 April 1959. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir Perumtel / PT. Telkom (1977-1986), PT BRI (Persero) Tbk dalam berbagai posisi antara lain Inspektur (Executive Vice President bidang Audit), Vice President Loan Restructuring and Recovery, Vice President Administrasi Kredit dan Vice President Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan gelar Master of Business Administration Finance dari Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) (1994) telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko Level IV.
Sumaryo Anggota KPMR Pihak Independen Periode: 1 Februari 2019 - Sekarang	Lahir di Kertosono, 10 Februari 1964. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak 28 Mei 2019. Sebelumnya berkarir lebih dari 20 tahun di Bank Indonesia sebagai Pengawas dan Pemeriksa Bank dan 6 Tahun sebagai Direktur di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Memperoleh gelar Master of Finance & Accounting dari Universitas Sebelas Maret (2000).

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Sesuai dengan Pedoman Tata tertib KPMR Anggota Komite paling kurang terdiri dari Seorang Komisaris Independen, Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.

Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI, bukan merupakan pemegang saham lebih dari 5% yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR BRI antara lain sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi;
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Kriteria Independensi	Rofikoh Rokhim	Andrinof A. Chaniago	A. Fuad Rahamny	Nicolaus T. Budi Harjanto	Hendrikus Ivo	Mahmud	Sunidiyo	Sumaryo	Tubagus NA. Maulana	Indra Yeti
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan lebih dari 5% yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;

Komite Pemantau Manajemen Risiko

4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan;
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan; dan
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Pendidikan dan Pelatihan Komite 2019

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota KPMR Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2019 pada Bab 3 Profil Perusahaan.

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota KPMR Non Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Anggota KPMR Non Komisaris	Tahun	Tempat	Penyelenggara	Judul
Suindiyo	27-28 Juni 2019	Bali	BARA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Prespective
Sumaryo	27-28 Juni 2019	Bali	BARA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Prespective

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat KPMR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail), WA paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko

4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
6. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen;
8. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan;
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
13. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
14. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
15. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
16. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Agenda Rapat KPMR Tahun 2019

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	MHD	AAC	AFR	NTBH	RR	IVO	YET	INDY	SUM
1	Selasa, 22 Januari 2019	Profil Risiko Triwulan. IV 2018	1	0	1	1	1		1	1	
2	Jumat, 8 Februari 2019	Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2018, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II tahun 2018, Penerapan APU PPT Semester II tahun 2018, Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2018	1	1	1	1	0		1	1	1
3	Selasa, 12 Maret 2019	Mekanisme kontrol penghapusbukuan kredit/pinjaman	1	1	0	1	1		1	0	1
4	Selasa, 7 Mei 2019	Profil Risiko Triwulan I tahun 2019	1	1	1	1	1		1	1	1
5	Selasa, 25 Juni 2019	Pembahasan Potofolio Guide Line dan Pengelolaan PEP.		1	1	1	1		1	1	1

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No.	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	MHD	AAC	AFR	NTBH	RR	IVO	YET	INDY	SUM
6	Selasa, 25 Juni 2019	1. Usulan Ketua Pengganti Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) BRI 2. Permohonan Kredit Pihak Terkait PT. BRI Finance (BRIF)		1	1	1	1		1	1	1
7	Selasa, 9 Juli 2019	Stress Test Portofolio kredit BRI		1	1	1	1		0	1	1
8	Selasa, 23 Juli 2019	Profil Risiko Triwulan II Tahun 2019		1	1	1	1		1	1	1
9	Selasa, 6 Agustus 2019	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank, Fungsi Kepatuhan, APU PTT, Strategi Anti Fraud dan Kebijakan GCG BRI.		1	1	1	1			1	1
10	Selasa, 24 September 2019	Stres Test Portofolio Asset Management BRI		1	0	1	1	1		1	1
11	Jumat, 27 September 2019	Restrukturisasi Kredit Bermasalah BRI		1	1	1	1	1		1	1
12	Selasa, 29 Oktober 2019	Evaluasi Profil Risiko BRI TRIWULAN III Tahun 2019		1	1	1	1	1		1	1
Kehadiran			4	11	10	12	11	3	7	11	11
Jumlah Rapat			4	12	12	12	12	3	8	12	11
% Kehadiran			100%	92%	83%	100%	92%	100%	88%	92%	100%

Realisasi RKA KPMR 2019

No.	Materi	Realisasi	Output	Keterangan
1	Review kebijakan umum Manajemen Risiko & Kebijakan Perkreditan bank	5 November 2019 2 Juli 2019	Surat Dewan Komisaris No. B.311-KOM/11/2019 tentang Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. B.178-KOM/07/2019 tentang Persetujuan ketua pengganti komite perkreditan (KKP) BRI	Selesai
2	Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK	23 April 2019	Hasil evaluasi atas penerapan Tata Kelola DPLK BRI melalui Surat Dewan Komisaris No. B.128-KOM/04/2019 tentang Evaluasi Penerapan Tata Kelola DPLK BRI	Selesai
3	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV tahun 2018	31 Januari 2019	Review Laporan Profil Risiko Triwulan IV Th. 2018 melalui surat Komisaris kepada Direksi No B.27-KOM/01/2019 Tgl. 31 Januari 2019	Selesai
4	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I tahun 2019	28 Mei 2019	Review Laporan Profil Risiko Triwulan I tahun 2019 melalui NoDin Nomor B.15-KPMR/05/2019 tanggal 28 Mei 2019	Selesai
5	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II tahun 2019	12 Agustus 2019	Pemaparan Profil Risiko Triwulan II 2019 melalui NoDin Nomor B.21-KPMR/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019	Selesai



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No.	Materi	Realisasi	Output	Keterangan
6	Review Laporan Tingkat Kesehatan, Fungsi Kepatuhan, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Pelaksanaan Program APU PPT Semester II tahun 2018	1 Maret 2019	Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Laporan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) dan Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud semester II tahun 2018 melalui surat No.B.63-KOM/03/2019 tanggal 1 Maret 2019	Selesai
7	Review Laporan Tingkat Kesehatan, Fungsi Kepatuhan, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Pelaksanaan Program APU PPT Semester I tahun 2019	28 Agustus 2019	Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Laporan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) dan Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud semester I 2019 melalui surat No. B.223-KOM/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019	Selesai
8	Mekanisme kontrol penghapusbukuan kredit/pinjaman	26 Maret 2019	Evaluasi Penghapusbukuan Kredit (PH) dan Recovery PH tahun 2018 melalui NoDin Nomor B.07-KPMR/03/2019 tanggal 26 Maret 2019	Selesai
9	Review dan Evaluasi Portfolio Aktiva Produktif dan Portfolio Guideline tahun 2019	9 Juli 2019	Pemaparan Strees Test Portfolio Kredit BRI pada tanggal 9 Juli 2019	Selesai
10	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	16 April 2019 6 Sept 2019 8 November 2019 26 November 2019	- Surat Komisaris No: B.106-KOM/04/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Konsultasi Kredit - Surat Komisaris No: R.65-KOM/09/2019 tanggal 6 Sept 2019 tentang Konsultasi Kredit - Surat Komisaris No: R.86-KOM/11/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Konsultasi Kredit - Surat Dewan Komisaris No: R.94-KOM/11/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Konsultasi Kredit	Selesai
11	Persetujuan atas Pemberian Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	9 Juli 2019 30 Agustus 2019 30 Agustus 2019 19 Desember 2019	- Surat Dewan Komisaris No:R.34-KOM/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 - Surat Dewan Komisaris No: R.61-KOM/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 - Surat Dewan Komisaris No: R.63-KOM/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 - Surat Dewan Komisaris No: R.91-KOM/11/2019 tanggal 19 Desember 2019	Selesai
12	Review Rencana Aksi (Recovery Plan)	30 Januari 2019 8 Mei 2019	- Surat Komisaris No: RR.34-KOM/07/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Hasil review revisi Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 - Nota Dinas No: B.14-KPMR/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan struktur bank sistemik dan capital surcharge periode Maret s.d September 2019 serta kewajiban implementasi Recovery Plan 2019.	Selesai

Remunerasi Komite

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2019

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Nokep: 652.DIR/KHC/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KPMR pada Tahun 2019	Pada Tahun 2019 telah dilakukan review dan tidak ada perubahan terhadap piagam KPMR	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus fit & proper test OJK dan/ atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KTKT telah lulus fit & proper test OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KPMR.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Nokep: 652.DIR/KHC/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KPMR pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 kali rapat.	Selama Tahun 2019 dilaksanakan 12 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review sebanyak 4 kali konsultasi kredit. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review sebanyak 4 kali persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review sebanyak 3 kali persetujuan rencana aksi korporasi. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	10	10
		Pengawasan	Review kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan Recovery Plan	Sekali setahun	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review KUMR dan Recovery Plan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Review kebijakan umum perkreditan dan Evaluasi portfolio perkreditan/ portfolio guideline	Sekali setahun	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review Kebijakan Umum Perkreditan dan Evaluasi portfolio perkreditan/ portfolio guideline. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Selama tahun 2019 KPMR melakukan review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Selama tahun 2019 KPMR melakukan Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5

Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya fraud Perseroan	Setiap Semester	Selama tahun 2019 KPMR melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya fraud Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	Sekali setahun	Selama tahun 2019 KPMR melakukan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Selama tahun 2019 KPMR melakukan Evaluasi profil risiko Perseroan setiap triwulan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan	Setiap Semester	Selama tahun 2019 KPMR melakukan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
			Evaluasi penerapan Good Pension Fund Governance.	Setiap Semester	Selama tahun 2019 KPMR melakukan Evaluasi penerapan Good Pension Fund Governance secara periodik sesuai ketentuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2019.	5	5
Total						100	100

Opini KPMR terhadap Pelaksanaan Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko memastikan BRI memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BRI. Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama tahun 2019 melalui rapat, kunjungan kerja, konsultasi dan review, komite menyampaikan bahwa Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dari risiko yang diambil telah sesuai dengan appetite risk yang ditetapkan (low to moderate) sampai dengan triwulan III tahun 2019, tingkat kesehatan Bank yang memperoleh peringkat komposit 2 (Sehat) pada Juni 2019 serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham seiring dengan perkembangan bisnis di era digital ekonomi dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan manajemen.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan salah satu organ Dewan Komisaris BRI sebagai Entitas Utama yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KTKT bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

KTKT membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar tata kelola yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran diterapkan secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Pedoman/Piagam Komite

Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

KTKT adalah Komite membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan (oversight) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan secara terintegrasi. KTKT bertanggung jawab untuk melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Ketua dan Anggota KTKT ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 11-KOM/09/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris BRI dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada BRI
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern BRI

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen dari BRI sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

3. Setiap anggota Komite harus independen dengan pengertian:
 - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris BRI dan Entitas Anak
 - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan BRI dan
 - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
4. Penunjukan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris BRI, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:
 - a. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
 - b. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite; dan
6. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen	15 Maret 2017 - 15 Mei 2019
2.	Rofikoh Rokhim	Ketua	Komisaris Independen	21 Mei 2019 - Sekarang
3.	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/Independen	19 Juli 2017 - Sekarang
4.	Wahyu Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	10 Agustus 2019 - 18 November 2019
5.	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	10 Agustus 2019 - Sekarang
6.	Hadiyanto	Anggota	Komisaris	21 September 2018 - Sekarang
7.	Heru Sukanto	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga Tbk	19 Mei 2015 - 26 Juni 2019
9.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT Bank BRISyariah Tbk	7 Agustus 2018 - 29 April 2019
10.	Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BRISyariah Tbk	21 Mei 2019 - Sekarang
11.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah Tbk	19 Mei 2015 - Sekarang
12.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017 - November 2019
13.	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia	27 Maret 2017 - Sekarang
14.	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen	10 Agustus 2019 - Sekarang
15.	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015 - 10 Agustus 2019
16.	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015 - 1 Februari 2019



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Komite

Profil Anggota KTKT per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rofikoh Rokhim Ketua KTKT/ Komisaris Independen Periode: 28 Mei 2019 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Tata Kelola Terintegrasi per 19 Juli 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Andrinof A. Chaniago Anggota KTKT/ Komisaris Independen Periode: 19 Juli 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi per 19 Juli 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hadiyanto Anggota KTKT / Komisaris Periode: 21 September 2018 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 21 September 2018, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendrikus Ivo Anggota KTKT/Komisaris Independen Periode: 10 Agustus 2019 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 10 Agustus 2019, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Heru Sukanto Anggota KTKT Komisaris Independen BRI Agro 7 Agustus 2018- 26 Juni 2019	Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya pada tanggal 05 September 1957. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1982) dan gelar Megister Pemasaran dari STM PPM lulus tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, berdasarkan RUPS tanggal 12 April 2017. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Bank BRI Jakarta Veteran tahun 1998-2001, Wapinwil Ritel Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya tahun 2001-2002, PJ. Kepala Divisi Bisnis Umum Bank BRI tahun 2002-2004, Pemimpin wilayah Bank BRI Makassar tahun 2004-2005, Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank BRI Jakarta tahun 2005-2007, Pemimpin Wilayah Bank BRI Jakarta 2 tahun 2007-2008, Kepala Divisi RPKB Bank BRI tahun 2008-2009, Pemimpin Wilayah Bank BRI Surabaya tahun 2009-2012, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk tahun 2012-2016 dan Direktur Bank Banten 2016.
Eko Suwardi Anggota KTKT Komisaris Independen BRI Syariah Periode : 21 Mei 2019-Sekarang	Warga Negara Indonesia, Lahir di Jember 23 Maret 1958. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Gajah Mada Indonesia (1987), S2 Master of Science in Accountancy di California State University, Fresno, USA (1994), S3 Doktor of Philosophy in Business (Accounting) di Queensland University of Technology Australia (2005). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen BRI Syariah (Oktober 2017 - sekarang), Ketua ISEI cabang Yogyakarta (2017 - sekarang), Ketua Forum Dosen Perpajakan Indonesia (2015 - sekarang), Chairman of ASEN University Network: Business and Economics (2017 - sekarang). Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (2016 - 2021), Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB Universitas Gajah Mada (2012 - 2016), Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM FEB Universitas Gajah Mada (2008 - 2012), Kepala Audit Internal Universitas Gajah Mada (2005 - 2008).
M. Gunawan Yasni Anggota KTKT Dewan Pengawas BRI Syariah Periode: Juni 2015-Sekarang	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 17 September 1969. Menyelesaikan Strata 1(S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (1993) dan meraih gelar Magister Management Keuangan dari Prasetya Mulya pada (1995). Selama berkarir pernah menjadi Manajer PT Pacific 2000 Investindo (Securities Financial Services), Deputy Head of Product Development PT Bahana Artha Ventura (Venture Capital) Jakarta (2000), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi SIMAS Syariah (2004-2005), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jaminan Kredit Indonesia (2006), Advisor-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2009), Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah (2008-sekarang) dan aktif sebagai konsultan dan pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan (Pasca Sarjana). Sertifikasi yang dimiliki antara lain sebagai Certified Islamic Financial Analyst dari Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia, Fellow di Islamic Insurance Society (FIIS) dan pemegang Sertifikasi Level Lanjutan (Level IV) Manajemen Risiko Perbankan dan Memiliki izin Bapepam sebagai Investment Manager, Underwriter & Broker-Dealer.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Mulabasa Hutabarat Anggota KTKT Komisaris Independen BRI Life Periode: September 2017-November 2019	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 6 Januari 1954. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Indonesia (1982) dan S2 di Jurusan Ekonomi, Indiana University, USA. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi penting di Kementerian Keuangan antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (2000-2006), Kepala Biro Dana Pensiun, Bapepam-Lk (2006-2012), Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-Lk (2012-2013), Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2013-2014). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo I Medan (2002-2007), Komisaris PT Bank BTN (2008-2012), Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (2014-2016), Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (2015-Sekarang), Komisaris Independen PT Sinar Mas Multi Finance (2014-sekarang), Komisaris Jiwa Tugu Mandiri (2014-sekarang). Berbagai pelatihan yang pernah diikuti antara lain Erma Bali International Seminar On Enterprise Risk Management 2015, Strategy To Be A Winner In Crisis: "Refocusing On Credit Risk Management, Pricing, Asset & Liability Management And Be Prepared In Upcoming Regulations" Frankfurt, Jerman 2012, Manajemen Risiko Tingkat I (Satu) 2010, Diklat SPAMA 1998, Job Evaluation Workshop 2001.
Boyke Budiono Anggota KTKT Komisaris Independen BRI Finance Periode: 27 Maret 2017-Sekarang	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 27 Agustus 1957. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan gelar MBA bidang Operation Management & Management Information System di University of Colorado, Boulder, USA. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Consumer Banking, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006), Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2007), Direktur Keuangan, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2007-2012), Direktur Utama, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2012-2103). Saat ini menjabat sebagai Private Management Consultant, PT Makmur Jaya Kreasindo (2013-sekarang) dan Komisaris Independen PT BRI Multifinance (2017-Sekarang).
Suindiyo Anggota KTKT Pihak Independen Periode: 10 Agustus 2019-Sekarang	Lahir di Blora 27 April 1959. Menjabat sebagai anggota KTKT PT BRI (Persero), Tbk sejak 10 Agustus 2019. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk dalam berbagai posisi antara lain Inspektur (Executive Vice President bidang Audit), Vice President Loan Restructuring and Recovery, Vice President Administrasi Kredit dan Vice President Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan gelar Master of Business Administration Finance dari Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) (1994).

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengamalaman
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai BRI dan Entitas Anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota

Independensi Komite

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

No	Kriteria Independensi	Rofikoh Rokhim	Andrinof A. Chaniago	Gatoto Trihargo	Hadiyanto	Heru Sukanto	Hermanto Siregar	M. Gunawan Yasni	Mulasaba Hutabarat	Boyke Budiono	Suindiyo
1.	Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BRI untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Self Assessment) setiap semester kepada Direksi BRI.
5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BRI dalam rangka peningkatan pengendalian intern secara terintegrasi;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BRI dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BRI dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Pendidikan dan Pelatihan Komite 2019

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota KTKT selama tahun 2019 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2019.

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota KTKT NonKomisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Anggota KPMR Non Komisaris	Tahun	Tempat	Penyelenggara	Judul
Suindiyo	27-28 Juni 2019	Bali	BARA	PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Prespective

KPI dan Pencapaian Tahun 2019

Indikator atau kriteria kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KTKT dalam setiap rapat. Adapun program kerja KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (Key Success Factors) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan memberikan masukan/saran dalam hal pengelolaan manajemen risiko terintegrasi, Fungsi Kepatuhan terintegrasi dan audit terintegrasi di entitas utama dan entitas anak.

Secara umum seluruh KPI Komite Tata Kelola terintegrasi telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KTKT tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KTKT yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KTKT dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap mengambil keputusan.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas inisiatif seorang atau lebih anggota Komite dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Rapat Komite yang terjadwal harus dilakukan pemanggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris BRI, sedangkan rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mendesak atau tidak terjadwal dapat dilakukan pemanggilannya secara lisan atau komunikasi melalui video conference;
- Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
- Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris BRI;
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat;
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
- Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
- Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.

Agenda Rapat KTKT tahun 2019

No	Hari & Tanggal Rapat	Agenda	Rofikoh Rokhim	Andrinof A. Chaniago	Wahyu Kuncoro	Hadiyanto	Hendrikus Ivo	Indra Yetti	Suindiyo	Heru Sukanto	Eko Suwardi	M. Gunanan Yasni	Mulabasa Hutabarat	Boyke Budiono
1	Selasa, 14 Mei 2019	Profil Risiko Terintegrasi SMT II 2018, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi SMT II 2019, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi SMT II 2019, Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi	1	1			-	1		1		1	1	1
2	Selasa, 28 Mei 2019	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester II tahun 2019	1	1				1		1	1	1	1	1
3	Selasa, 27 Agustus 2019	Fungsi Kepatuhan & Pengendalian Intern Terintegrasi	1	1	1		1		1		1	1	1	1
4	Selasa, 29 Oktober 2019	Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I Tahun 2019	1	1	1	1	1	-	1		1	1	1	1
Kehadiran			4	4	2	1	2	2	2	2	3	4	4	4
Jumlah Rapat			4	4	2	1	2	2	2	2	3	4	4	4
% Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
1.	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	Review terhadap usulan anggota KTKT dari LJK.	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/05/2019 dan Nokep: 11-KOM/BRI/09/2019
2.	Evaluasi dan rekomendasi pertumbuhan <i>non organic</i> /LJK	Telah dilakukan	- Nodin R.01-KPMR/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Peningkatan modal inti perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) IX BRI Agro sebesar maksimum tiga miliar lembar senilai maksimum Rp700 miliar. - Nodin B.13-KPMR/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Terdapat kendala eksekusi terkait tingginya NPL BRI Agro - Nodin R.02-KPMR/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Peningkatan modal BRI Ventures sebesar RP200 MILIAR DAN Rp800 miliar - Nodin R.04-KPMR/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bringin Sejahtera Makmur (BRINS) melalui pembelian saham Dapen BRI di BRINS sebesar RP1.041 miliar yang mewakili 90% saham BRINS.
3	Evaluasi dan rekomendasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi		Belum ada usulan perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian, komite akan menyarankan kepada manajemen melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola terkait masuknya PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS) sebagai bagian dari konglomerasi BRI.
4	Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi. Dilakukan semesteran dengan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/penyempurnaan	Evaluasi fungsi pengendalian intern dengan setiap LJK atas audit internal (organisasi SKAI, pelaksanaan audit, hasil audit dan tindak lanjut audit) telah dilakukan untuk: - Semester II/2018 - Semester I/2019	Rapat KTKT tanggal 28 Mei 2019 Rapat KTKT tanggal 27 Agustus 2019 Nodin B.05-KTKT/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 Surat Komisaris No B. 281-KOM/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 - Masih terdapat denda di LJK terkait kepatuhan ketentuan regulator - Perlu percepatan pengkinian data nasabah - Kepatuhan pelaporan kepada PPATK terutama Danareksa Sekuritas



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
5	Laporan Semester Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Tatakelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dikoordinasikan dengan Divisi Kepatuhan. Telah dilaporkan ke OJK dengan Surat Direksi No. B.32-DIR/KPT/GCG /05/2019 tanggal 23 Mei 2019	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dimuat dalam website bri.co.id
6	Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Terintegrasi	Telah dilakukan bersamaan dengan review KUMR BRI pada bulan Desember 2018	Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Tatakelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dikoordinasikan dengan Divisi Kepatuhan. Telah dilaporkan ke OJK dengan Surat Direksi No. B.32-DIR/KPT /GCG /05/2019 tanggal 23 Mei 2019
7	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/ penyempurnaan Semester II/2018 dan Semester I/2019	Evaluasi Semester II/2018 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 melalui Rapat Direktur Kepatuhan dan SKAI untuk membahas rencana aksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan self assessment Semester II/2018.	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Tata Kelola Terintegrasi BRI pada Semester II 2018 dan Semester I/2019 berperingkat 2, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan: Aspek Struktur: Perubahan bentuk konglomerasi keuangan yang relatif cepat dengan bergabungnya BRI Ventures dan Danareksa Sekuritas memerlukan peningkatan koordinasi antara entitas utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
8	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018 telah disampaikan kepada OJK sesuai surat Direksi BRI: No.B.11 -DIR/KPT/GCG/ 02/2019 tanggal 14 Februari 2019 No.B.67- DIR/KPT/GCG/ 02/2019 tanggal 14 Agustus 2019	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Tata Kelola Terintegrasi BRI pada Semester II 2018 dan Semester I/2019 berperingkat 2, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan: - Aspek Struktur: Perubahan bentuk konglomerasi keuangan yang relatif cepat dengan bergabungnya BRI Ventures dan Danareksa Sekuritas memerlukan peningkatan koordinasi antara entitas utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan. - Aspek Proses: Pelaksanaan dan pelaporan terkait fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi masih perlu penyempurnaan. - Aspek Hasil: Masih terdapat pengenaan sanksi denda terhadap pemenuhan ketentuan regulator.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
9	Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi - Semester II/2018 - Semester I/2019	Evaluasi profil risiko terintegrasi telah dilakukan untuk: • Semester II tahun 2018 dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 • Semester I tahun 2019 akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019	Notulen Rapat KTKT: • Semester II tahun 2018 dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 • Semester I tahun 2019 telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KTKT sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 11-KOM/09/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KTKT BRI. Komposisi Anggota KTKT telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KTKT pada Tahun 2019	Piagam KTKT telah di <i>review</i> dan di update melalui Nokep Dekom No.: 14-KOM/11/ 2018 Tentang Pedoman tata Tertib KTKT.	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KTKT telah lulus Fit & Proper test OJK dan/ atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KTKT dari Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KTKT.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 11-KOM/09/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KTKT BRI, masa jabatan ketua dan Anggota KTKT tidak melebihi ketentuan.	5	5
		Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Dewan Komisaris	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	Seluruh tugas dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.	5	5



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 2 kali	Selama Tahun 2019 dilaksanakan 4 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	10	10
			Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Satu kali	Selama tahun 2019 KTKT melakukan review Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Kajian disampaikan minimal 14 hari ekra sejak surat diterima	Selama tahun 2019 KTKT melakukan review Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya) sebanyak 4 kali. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	10	10
		Pengawasan	Review penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2019 KTKT melakukan review Laporan Tahunan penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	10	10
			Review kebijakan umum Manajemen risiko (KUMR) terintegrasi	Sekali	Telah dilakukan bersamaan dengan review KUMR BRI pada bulan Desember 2018.	5	5
			Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2019 KTKT melakukan Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	5	5

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan	Minimal sekali dalam setahun	Selama tahun 2019 KTKT melakukan Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan sesuai ketentuan berlaku. Outpit Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	5	5
			Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik	Setiap semester	Selama tahun 2019 KTKT melakukan Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	10	10
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko teritegrasi secara periodik sesuai ketentuan	Setiap semester	Selama tahun 2019 KTKT melakukan Evaluasi profil risiko teritegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	5	5
			Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi sesuai ketentuan	Setiap semester	Selama tahun 2019 KTKT melakukan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2019.	5	5
Total						100	100

Opini Komite Tata Kelola Terintegrasi Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Untuk mendukung Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BRI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, BRI sebagai entitas Utama telah menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Komite menilai bahwa penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* yang memperoleh peringkat 2 (baik) pada semester II/2018 dan semester I/2019. Komite menilai terdapat beberapa kelemahan pada aspek struktur dan proses penyesuaian prosedur internal terkait penerapan manajemen risiko BRI dan LJK KK BRI masih berjalan. Selain itu, pengelolaan SDM pada BRI dan LJK anggota konglomerasi keuangan perlu mendapat perhatian agar risiko operasional dapat diturunkan. Oleh karenanya, pada tahun mendatang Komite secara berkelanjutan akan memastikan perbaikan kelemahan dan memperkuat struktur dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan (*outcome*) Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE DIREKSI

Direksi BRI membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Hingga 31 Desember 2019, BRI memiliki 12 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management Committee (RMC) & Operational Risk Management Committee (ORMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Permodalan dan Investasi
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Komite Kebijakan SDM
8. Komite Evaluasi Jabatan
9. Komite Pengarah Project Management Office (PMO)
10. Komite Produk

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (assets) dan kewajiban (liabilities) berikut penetapan tarif Fund Transfer Price (FTP).

Struktur Keanggotaan

Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2019 terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Assets & Liabilities Management	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Bisnis Mikro	Anggota Tetap	√
Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	Anggota Tetap	√
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Anggota Tetap	√
Direktur Konsumer	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP <i>Treasury & Global Services</i>	Anggota Tetap	√
SEVP <i>Corporate Banking</i>	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
SEVP <i>Change Management & Transformation Office</i>	Anggota Tetap	√
SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Divisi Agribisnis	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis BUMN 1	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis BUMN 2	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis Korporasi	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Hubungan Lembaga	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Transaction Banking</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Social Entrepreneurship</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Wealth Management</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kredit Konsumer	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kredit Briguna	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Mass Funding</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kartu Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Retail Payment</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis <i>Treasury</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Investment Services</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis Internasional	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan & Strategi Bisnis Mikro	Anggota Tetap	√
Kepa1a Divisi <i>Micro Sales Management</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis Program & Kemitraan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan & Strategi Bisnis Kecil, Rite1 & Menengah	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Bisnis Pertanian	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi SME <i>Sales Management</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Corporate Development & Strategy</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Subsidiary Management</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Corporate Transformation</i>	Anggota Tetap	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Desk <i>Project Management Office</i>	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 1	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 2	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah Jakarta 3	Anggota Tetap	√
Pemimpin Cabang Khusus	Anggota Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

- Asset and Liability Committee (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan asset and liability yang optimum dengan memperhatikan potential risk, optimum yield generation dan cost efficiency.
 - Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), fund transfer price (FTP) dan pricing lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian net interest income (NII).
 - Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutuskan suku bunga khusus simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
 - Menentukan kebijakan net openposition (NOP).
 - Memonitor bahwa pengelolaan asset and liability di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.
- Bagian Assets & Liabilities Management, Divisi Assets & Liabilities Management sebagai ALCO Supporting memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan analisa dan merekomendasikan strategi pengelolaan Asset and Liability yang optimal sebagai dasar penetapan strategi oleh Asset and Liability Committee (ALCO) dengan mengacu kepada target kinerja Perusahaan.
 - Menyusun dan mengembangkan skenario tingkat suku bunga simpanan, pinjaman dan produk bank lainnya.
 - Bersama dengan Unit Kerja terkait, melakukan analisa dan menyusun rekomendasi alternatif dalam penetapan harga/pricing sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar dan kondisi makro ekonomi.
 - Bersama dengan Unit Kerja terkait, menyusun funding strategy berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA) bank, kondisi di pasar dan/atau acuan lainnya.
 - Melakukan analisa dan monitoring terhadap net open position (NOP).
 - Melakukan analisa dan menyediakan data sesuai kebutuhan ALCO.
 - Mengoordinir penyelenggaraan Rapat ALCO sesuai ketentuan dan rencana kerja yang ditetapkan.
 - Mendistribusi dan mengadministrasikan hasil putusan Rapat ALCO serta melakukan monitoring tindak lanjut dari Unit Kerja yang terkait.

Pedoman Kerja

- Rapat ALCO sekurangnyanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti sesuai urutan.
- Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO
- Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO.
- Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk pengantinya setingkat Wakil Kepala Divisi atau sekurangnyanya setingkat Kepala Bagian.
- Rapat ALCO terbatas dapat diselenggarakan secara insidentil untuk membahas pengelolaan asset and liability yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat issue khusus yang harus hams segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.

Komite Direksi

Rapat ALCO Terbatas

1. Asset and Liability Committee (ALCO) secara insidentil dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas pengelolaan asset and liability yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat issue khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.
2. Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu Surat undangan tersendiri.
3. Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO sebagaimana yang diatur.

Rapat Komite

Pada tahun 2019, ALCO telah mengadakan Rapat sebanyak 12 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1.	09.01.2019	Economic Briefing Kinerja Assets & Liabilities Perkembangan Saham BRI Putusan Rapat ALCO
2.	07.02.2019	
3.	14.03.2019	
4.	11.04.2019	
5.	09.05.2019	
6.	20.06.2019	
7.	12.07.2019	
8.	08.08.2019	
9.	12.09.2019	
10.	11.10.2019	
11.	13.11.2019	
12.	12.12.2019	

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti I atau Ketua ALCO Pengganti II.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Keanggotaan Komite

1. Risk Management Committee (RMC)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua pengganti/ Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Kepala Divisi Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Terkait	Anggota tidak tetap	-

2. Integrated RMC

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti/Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Syariah	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Agro	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Syariah	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Agro	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Finance	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Kepala Divisi Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Terkait	Anggota tidak tetap	-

Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Risk Management Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. *Risk Management Committee* (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
 - c. Merekomendasikan penetapan limit dan perubahannya.
 - d. Menyampaikan laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta apabila diperlukan rekomendasi perubahan.
2. *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan kepada Direksi BRI dan Direksi Perusahaan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - c. Menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi, laporan Tata Kelola Terintegrasi, laporan Audit Terintegrasi, laporan Profil Risiko Individual Perusahaan Anak serta hasil pemantauan risiko kepada Direksi BRI.
 - d. Menyampaikan analisa permodalan terintegrasi serta rencana penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
 - e. Menyampaikan simulasi stress testing terintegrasi dan/atau individual serta contingency plan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal kepada Direksi BRI.

Pedoman Kerja

RMC dan RMC Terintegrasi memiliki pedoman kerja organisasi sebagai berikut:

1. Rapat RMC diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan, Rapat RMC Terintegrasi diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat RMC dan RMC Terintegrasi dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat issue terpenting dan mendesak, antara lain:
 - a. Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran limit risiko internal atau faktor lain.
 - b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
 - c. Terjadi kondisi force major yang disebabkan faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal dan faktor disruptif lain.
 - d. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan rapat RMC dan RMC Terintegrasi.
3. RMC dan RMC Terintegrasi membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud di antaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
4. Rapat RMC dan RMC Terintegrasi dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko. Dalam hal Direktur Manajemen Risiko berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sesuai urutan sebagaimana telah diatur.
5. Rapat RMC dan RMC Terintegrasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Hasil keputusan pada RMC dan RMC Terintegrasi dapat dianulir oleh Direksi melalui Rapat Direksi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

8. Koordinasi penyelenggaraan Rapat RMC dan RMC Terintegrasi menjadi tanggung jawab sekretaris RMC dan RMC Terintegrasi.
9. Kehadiran Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Rapat Komite

Pada tahun 2019, RMC telah mengadakan Rapat sebanyak 4 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Agenda
1	RMC I 2019	4 Maret 2019	1. Profil Risiko 2. Tindak Lanjut Putusan RMC -2018 3. Analisa Permodalan BRI dan Stress Test 4. Pembahasan Risk Issue Eksternal dan Profil Risiko BRI 5. Pembahasan Risk To Be Noticed di BRI 6. Rekomendasi dan Putusan RMC I -2019
2	RMC II 2019	27 Juni 2019	1. Profil Risiko 2. Tindak Lanjut Putusan RMC I-2019 3. Analisa Permodalan dan Stress Test 4. Pembahasan Risk Issue di BRI 5. Pembahasan Risk To Be Noticed di BRI 6. Rekomendasi dan Putusan RMC II -2019
3	RMC III 2019	25 September 2019	1. Tindak Lanjut RMC II 2019 2. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 3. Monitoring Permodalan 4. Leverage Ratio 5. Stress Testing 6. Pembahasan Risk Issue di BRI 7. Pembahasan Risk To Be Noticed di BRI 8. Rekomendasi dan Putusan RMC III Tahun 2019
4	RMC IV 2019		1. Tindak Lanjut RMC III 2019 2. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 3. Monitoring Permodalan 4. Leverage Ratio 5. Stress Testing 6. Pembahasan Risk Issue di BRI 7. Pembahasan Risk To Be Noticed di BRI 8. Rekomendasi dan Putusan RMC IV Tahun 2019

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE KREDIT

Merupakan Komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Komite Direksi

Struktur Komite

1. Komite Kredit di tingkat Direksi, yaitu
 - a. Komite Kredit BRI.
 - b. Komite Kredit Direksi 1
 - c. Komite Kredit Direksi 2
2. Komite Kredit di tingkat Divisi
3. Komite Kredit Regional Commercial Business (RCB)
4. Komite Kredit di Kantor Wilayah/ Kantor cabang Khusus
5. Komite Kredit Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan Asset & Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
3. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite kredit.

Benturan Kepentingan

Dalam pemberian putusan kredit, Komite Kredit tetap berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan terlepas dari benturan kepentingan terhadap Komite Kredit dan individual, dengan mekanisme yang diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal anggota pemutus Komite Kredit BRI memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest), maka putusan kredit dilakukan oleh seluruh Direksi dan SEVP yang memiliki kewenangan memutus, kecuali anggota Komite Kredit BRI yang memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest) dimaksud. Pengambilan keputusan diambil secara unanimous dari seluruh anggota Pemutus.
2. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada anggota Komite Kredit selain Komite Kredit BRI, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pemutus kredit individual, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sehingga putusan kredit dilaksanakan sebagaimana butir 2 dan 3 diatas, maka hal tersebut harus disampaikan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kredit hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) + 1 dari seluruh anggota Komite Kredit.
2. Anggota Komite Kredit yang tidak dapat hadir dalam Rapat Komite karena sedang tidak berada ditempat (namun tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja) maka tidak dapat diperhitungkan dalam penetapan quorum pelaksanaan rapat Komite Kredit.
3. Pelaksanaan Komite Kredit dilaksanakan dalam forum rapat Komite Kredit dengan Unit Kerja Administrasi Kredit terkait sebagai Sekretaris Komite.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Rapat Komite

Pada tahun 2019, Komite Kredit telah mengadakan Rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

KOMITE PERMODALAN DAN INVESTASI

Komite Permodalan dan Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Struktur Komite

Dalam melaksanakan tugas, Komite Capital & Investment didukung oleh Tim Penunjang Komite.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Assets & Liabilities Management.	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur atau SEVP terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur atau SEVP Pembina Bisnis Perusahaan Anak	Anggota Tidak Tetap	√
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Dalam melaksanakan tugas maka Komite Capital & Investment didukung oleh Tim Penunjang Komite yang bertugas melakukan kajian dan analisa yang terdiri dari:

- Kepala Divisi *Corporate Development & Strategy*
- Kepala Divisi *Assets & Liabilities Management*
- Kepala Divisi *Subsidiary Management*
- Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan
- Kepala Divisi Bisnis *Treasury*
- Kepala Divisi Hukum
- Kepala Divisi Kepatuhan
- Kepala Divisi Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio
- Kepala Divisi/Desk Bisnis terkait

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite *Capital & Investment* memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut

- Terkait Langkah Korporasi:
 - Melakukan review atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
 - Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi sebagaimana disebutkan di Pasal 2 ayat (1) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.

Komite Direksi

- b. Terkait Pengelolaan Perusahaan Anak
 - 1. Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk key performance indicator dan rencana dividen Perusahaan Anak.
 - 2. Melakukan review kinerja dan menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak.
 - 3. Mengevaluasi dan merekomendasikan langkah korporasi Perusahaan Anak BRI (Initial Public Offering, penawaran umum terbatas, akuisisi, merger, tambahan modal dan rencana divestasi) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
 - 4. Menetapkan putusan apabila terjadi deadlock inisiatif sinergi Perusahaan Anak dengan BRI yang bersifat strategis.

Tim Penunjang Komite sesuai ruang lingkupnya masing-masing memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan data pendukung atas usulan yang akan dilaksanakan
- b. Membuat kajian dan analisa atas usulan yang akan diajukan
- c. Menyiapkan bahan presentasi yang akan disampaikan dalam rapat Komite Capital & Investment

Pedoman Kerja

- 1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
- 2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan/atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
- 3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.
- 4. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti. Rapat hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- 5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti sebagaimana diatur.
- 6. Ketua Komite memimpin Rapat Komite Capital & Investment dan mempunyai hak suara.
- 7. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Capital & Investment, berupa antara lain:
 - a. Mempersiapkan agenda, jadwal dan tempat rapat.
 - b. Menyusun Risalah Rapat
 - c. Memantau implementasi putusan rapat.
- 8. Rekomendasi dan/atau putusan Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua dan seluruh anggota Komite. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka rekomendasi dan/atau putusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Rapat Komite

Pada tahun 2019, Komite Permodalan dan Investasi telah mengadakan Rapat sebanyak 18 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	30 Jan 2019	Usulan dividen tahun buku 2018, kajian corporate action non M&A, progress implementasi PSAK 71	Kuorum
2	20 Feb 2019	Performance review dan post acquisition plan perusahaan anak	Kuorum
3	27 Feb 2019	Performance review dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
4	07 Mei 2019	Performance review dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
5	13 Mei 2019	Performance review dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
6	16 Mei 2019	Performance review dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
7	27 Mei 2019	Pipeline bisnis perusahaan anak	Kuorum
8	13 Juni 2019	Revisi rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
9	17 Juni 2019	Revisi rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
10	03 Juli 2019	Revisi rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
11	31 Juli 2019	Revisi rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
12	20 Aug 2019	Progress update corporate action	Kuorum
13	18 Okt 2019	Kinerja dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
14	21 Okt 2019	Kinerja dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
15	24 Okt 2019	Kajian Corporate Action dan Capital Management Report	Kuorum
16	25 Okt 2019	Kinerja dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
17	11 Nov 2019	Kinerja dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum
18	29 Nov 2019	Kinerja dan rencana kerja perusahaan anak	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Rekomendasi Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka rekomendasi Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Struktur Keanggotaan

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Direktur Utama	Ketua
Kepala Divisi Kebijakan Kredit	Sekretaris (merangkap anggota)
Wakil Direktur Utama	Anggota
Direktur Bisnis Mikro	Anggota
Direktur Bisnis Kecil, Ritel, & Menengah	Anggota
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Anggota
Direktur Konsumer	Anggota
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Anggota
Direktur Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Keuangan	Anggota
Direktur Human Capital	Anggota
SEVP Corporate Banking	Anggota
SEVP Treasury & Global Services	Anggota
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota
SEVP Manajemen Aset Tetap & Pengadaan	Anggota
SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota
Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit	Anggota
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	Anggota
Kepala Divisi Kebijakan & Strategi Bisnis Mikro	Anggota
Kepala Divisi Micro Sales Management	Anggota
Kepala Divisi Bisnis Program & Kemitraan	Anggota
Kepala Divisi Kebijakan & Strategi Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	Anggota
Kepala Divisi SME Sales Management	Anggota
Kepala Divisi Bisnis Pertanian	Anggota
Kepala Divisi Kredit Konsumer	Anggota
Kepala Divisi Kredit Briguna	Anggota
Kepala Divisi Agribisnis	Anggota
Kepala Divisi Bisnis BUMN 1	Anggota
Kepala Divisi Bisnis BUMN 2	Anggota
Kepala Divisi Bisnis Korporasi	Anggota



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Kepala Divisi Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan	Anggota
Kepala Divisi Bisnis Treasury	Anggota
Kepala Divisi Bisnis Internasional	Anggota
Kepala Divisi Investment Services	Anggota
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota
Kepala Divisi Hukum	Anggota
Kepala Divisi Operasional Kredit	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) Bank Indonesia.
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
3. Melakukan review berkala Kebijakan Umum Perkreditan Bank (KUP).
4. Memantau dan mengevaluasi terhadap:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
 - f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
 - h. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar kredit Dalam Perhatian Khusus
5. Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).

Panduan Kerja

1. Perubahan atau revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) wajib melakukan rapat pembahasan final Draft perubahan atau revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
2. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) maupun terkait issue penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari perusahaan.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) maka unit kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) untuk melakukan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
4. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.

Komite Direksi

5. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota KKP yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Direktur yaitu:
 - a. Direktur Manajemen Risiko;
 - b. Direktur Kepatuhan;
 - c. Direktur Bidang Bisnis;
 - d. SEVP Satuan Kerja Audit Intern;
 - e. Kepala Divisi Kebijakan Kredit; dan
 - f. Kepala Divisi Kepatuhan
6. Apabila Kepala Divisi yang menjadi anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berhalangan hadir maka Penggantinya dapat ditunjuk.

Pelaksanaan Rapat Komite

Selama tahun 2019 tidak terdapat rapat komite kebijakan perkreditan BRI.

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merupakan Komite di kantor pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional Teknologi Informasi (TI).

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Ketua	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Ketua Pengganti (merangkap anggota tetap)	√
Wakil Kepala Divisi IT <i>Strategy & Governance</i>	Sekretaris (merangkap anggota tetap)	-
Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi IT <i>Strategy & Governance</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Application Management & Operation</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi IT <i>Infrastructure & Operation</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi <i>Digital Center of Excellence</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kerjasama Teknologi	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Jaringan Kantor	Anggota Tetap	√
Kepala Desk <i>Information Security</i>	Anggota Tetap	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Fungsi

1. Memberikan arahan kebijakan dan manajemen TI baik jangka panjang maupun jangka pendek (tahunan) dan mengacu kepada Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT Strategic Plan) BRI.
2. Melakukan kontrol atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI di BRI yang sedang dan akan dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT Strategic Plan) BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi rencana strategi TI jangka panjang yang sejalan dengan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam IT Strategic Plan BRI.
2. Merumuskan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
3. Memastikan kesesuaian rencana strategi IT dengan proyek IT lain yang disetujui untuk dilaksanakan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan proyek-proyek TI agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati (Project Charter).
5. Melakukan evaluasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis Bank.
6. Memantau efektifitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang TI agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan bisnis BRI.
7. Memantau performa sistem TI dan memberikan rekomendasi upaya peningkatannya.
8. Memberikan rekomendasi upaya penyelesaian masalah TI yang tidak dapat diselesaikan Unit Kerja pengguna TI dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan kecukupan atas alokasi resources yang dimiliki BRI.

Pedoman Kerja

1. Komite Pengarah TI mengadakan rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun.
2. Rapat Komite Pengarah TI sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite Pengarah TI yang diundang dan terkait dengan agenda rapat Komite Pengarah TI.
3. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti I.
4. Dalam hal Ketua Komite dan Ketua Komite Pengganti I berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti II dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Penetapan Direktur Pengganti.
5. Ketua Komite memimpin Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan mempunyai hak suara.
6. Dalam hal Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Direktur Utama, Direktur Teknologi Informasi & Operasi bertindak sebagai Anggota Komite dengan hak suara.
7. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Mempersiapkan dan mengundang rapat.
 - b. Menyusun dan mempresentasikan rapat.
 - c. Menyusun dan mendistribusikan Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - d. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait.

Pelaksanaan Rapat Komite

Pada tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan Rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

Komite Direksi

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	23 Mei 2019	Review Disaster Recovery Plan Teknologi Informasi (DRP TI)	Kuorum
2	27 Agustus 2019	Switch Over AS400, Mainframe Cardlink dan RTGS. Upgrade CAMS (Card Management System) dan Proswitching Middleware (Linux-0).	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang Human Capital.

Struktur Keanggotaan**BIDANG KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL**

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direksi atau Senior Executive Vice President Bidang terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Bidang Karir 1 (untuk Pekerja level Executive Vice President, Vice President, Assistant Vice President dan Senior Manager)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Bidang Karir 2 (untuk Pekerja level Pemimpin Cabang Pembantu)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Human Capital	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Bidang Karir 3 (untuk Pekerja level Manajer selain Pemimpin Cabang Pembantu)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Ketua	√
Kepala Bagian Pengembangan Karier	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Anggota Tetap	√

BIDANG TALENT MANAGEMENT

Sub Bidang Talent Identification 1 (untuk Pekerja level Executive Vice President dan Vice President)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Sub Bidang Talent Identification 2 (untuk Pekerja level Assistant Vice President, Senior Manager dan Manager)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Human Capital	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Direksi

Sub Bidang Talent Development dan Engagement 1 (untuk Pekerja level Executive Vice President, Vice President, Assistant Vice President dan Senior Manager)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Sub Bidang Talent Development dan Engagement 2 (untuk Pekerja level Pemimpin Cabang Pembantu)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√

Sub Bidang Talent Development dan Engagement 3 (untuk Pekerja level Manager selain Pemimpin Cabang Pembantu)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Ketua	√
Kepala Bagian Pengembangan Karier	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Anggota Tetap	√

BIDANG MANAJEMEN KINERJA DAN PENETAPAN SASARAN KINERJA OBJEKTIF (SKO)

Sub Bidang Manajemen Kinerja

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Sub Bidang Penetapan Sasaran Kinerja Objektif (SKO)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Ketua	√
Wakil Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i> Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital	Sekretaris	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota Tetap	√

BIDANG ETIK

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i>	Sekretaris	√
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Bidang Kebijakan Human Capital

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas human capital BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRI.
2. Memberikan rekomendasi dalam proses penetapan kebijakan strategis, manajemen karier dan corporate culture di bidang human capital untuk kemudian diputus di dalam Rapat Direksi.
3. Memberikan rekomendasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Bidang Karir

1. Menetapkan pengembangan karier Pekerja
2. Memberikan rekomendasi kepengurusan perusahaan Anak

Bidang Talent Management

Menetapkan Talent dan penentuan program pengembangan yang diberikan kepada Talent termasuk pengembangan karier Talent.

Bidang Manajemen Kinerja dan Penetapan Sasaran Kinerja Objektif (SKO)

1. Menetapkan penilaian kinerja Pekerja untuk level Executive Vice President dan Vice President.
2. Menetapkan Standar SKO untuk level Executive Vice President dan Vice President.

Bidang Etik

Memutus kasus Pelanggaran Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP).

Komite Direksi

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kebijakan Human Capital dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka Rapat Komite Kebijakan Human Capital dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
2. Seluruh anggota Komite Kebijakan Human Capital memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.
3. Penyelenggaraan rapat Komite Human Capital sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite yaitu yang antara lain:
 - a. Mempersiapkan agenda rapat
 - b. Mempresentasikan materi rapat;
 - c. Menyusun Risalah Rapat
 - d. Menindaklanjuti dan/atau meneruskan hasil rapat kepada Unit Kerja yang terkait sesuai kebutuhan
4. Apabila terdapat issue penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite Human Capital maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite melakukan Rapat Komite Human Capital.
5. Keputusan Komite Human Capital ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite Kebijakan Human Capital dinyatakan sah dan mengikat apabila Ketua Komite, Direktur Human Capital dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite yang hadir di dalam rapat Komite Human Capital telah memberikan suara setuju.
6. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir.
7. Dalam hal rapat Komite Human Capital tidak dapat diselenggarakan maka Komite Human Capital dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
8. Apabila diperlukan maka Komite Human Capital dapat menghadirkan Pihak Lain yang terkait sebagai narasumber.

Pelaksanaan Rapat Komite

Selama tahun 2019, telah dilakukan 8 (delapan) kali Rapat Komite Human Capital dengan keterangan sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Komite HC

1. Penilaian Kinerja Pejabat EVP dan VP untuk periode penilaian tahun 2018 Tanggal 23 April 2019
2. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 15 Oktober 2019
3. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 29 Oktober 2019
4. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 5 November 2019
5. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 19 November 2019
6. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 20 November 2019
7. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 3 Desember 2019
8. Putusan Penetapan Pengembangan Karier Pekerja tanggal 10 Desember 2019

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Komite Human Capital ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite Kebijakan Human Capital dinyatakan sah dan mengikat apabila Ketua Komite, Direktur Human Capital dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite yang hadir di dalam rapat Komite Human Capital telah memberikan suara setuju.
2. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir. Dalam hal rapat Komite Human Capital tidak dapat diselenggarakan maka Komite Human Capital dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

KOMITE EVALUASI JABATAN

Merupakan Komite Kantor Pusat yang melakukan proses penilaian atau pemeringkatan suatu jabatan secara logis dan adil yang dilakukan dengan membandingkan jabatan satu dengan jabatan lainnya berdasarkan skala atau kriteria tertentu untuk menentukan nilai/bobot/ukuran relatif suatu jabatan (job size/ score) dan kontribusi serta hubungannya dengan jabatan lain di Perusahaan.

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Organization & Performance Management Divisi Corporate Development & Strategy	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Human Capital Strategy & Policy	Anggota Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan review, merekomendasi, dan/atau menetapkan golongan jabatan.

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Evaluasi Jabatan dipimpin oleh Ketua Komite.
2. Komite Evaluasi Jabatan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Komite. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat Komite Evaluasi Jabatan tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak suara berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh Direktur atau Kepala Divisi Pengganti sesuai dengan ketentuan Direktur Pengganti atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS).
3. Seluruh anggota Komite Evaluasi Jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama didalam proses review, merekomendasikan, dan atau menetapkan golongan jabatan.
4. Penyelenggaraan rapat Komite Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite antara lain:
 - a. Mempersiapkan agenda rapat
 - b. Mempresentasikan materi rapat
 - c. Menyusun Risalah Rapat
 - d. Menindaklanjuti dan/atau meneruskan hasil rapat kepada Unit Kerja yang terkait sesuai kebutuhan
5. Keputusan Komite Evaluasi Jabatan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
6. Dalam hal rapat Komite Evaluasi jabatan tidak dapat diselenggarakan maka Komite Evaluasi Jabatan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya
7. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Pelaksanaan Rapat Komite

Pada tahun 2019, Komite Evaluasi Jabatan tidak pernah mengadakan rapat. Usulan yang dilakukan oleh Komite dilakukan secara sirkuler.

Komite Direksi

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Komite Evaluasi Jabatan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
3. Dalam hal rapat Komite Evaluasi Jabatan tidak dapat diselenggarakan maka Komite Evaluasi Jabatan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.

KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan Komite yang bertanggungjawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan dan penghentian produk dan jasa eksisting, memutus produk dan jasa bundling diatas kewenangan Direktur atau, dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan jasa.

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP/Direktorat Bidang Pemilik Produk	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Fungsi

Mengevaluasi kinerja produk serta memberikan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Produk memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Umum Produk dan perubahannya, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan putusan atas usul pengembangan produk/jasa baru atau pengembangan produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
 - b. Memberikan putusan atas penghentian produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
 - c. Pengembangan produk dan/atau jasa
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan rapat Pra-Komite dan Rapat Komite Produk
 - e. Mengkoordinir usulan penghentian produk dan atau jasa
 - f. Memberikan putusan atas produk dan/atau jasa bundling, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
 - g. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan/atau jasa



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

2. Sekretaris Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Umum Produk dan perubahannya, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendokumentasikan hasil perencanaan produk dan/atau jasa
 - b. Mendokumentasikan evaluasi produk dan/atau jasa
 - c. Melakukan *screening*

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
2. Rapat diluar dari rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon organisasi khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - c. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.
3. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Wakil Direktur Utama sebagai Ketua Komite. Apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite dapat digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai dengan ketentuan Direktur Pengganti.
4. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Dengan Hak Suara. Dari 3 (tiga) Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur/SEVP.
5. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang memiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
6. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Produk menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.
7. Risalah Rapat Komite Produk ditandatangani oleh Sekretaris Komite Produk, dan disampaikan kepada Seluruh Direksi/ SEVP dan Unit Kerja di Kantor Pusat BRI yang terkait dengan putusan Komite Produk dimaksud.

Rapat Komite

Pada Tahun 2019, Komite Produk telah Mengadakan Rapat Sebanyak 13 kali Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	27 Februari 2019	Rapat Pra Komite Produk I tahun 2019 dalam rangka penentuan <i>product owner</i>	Kuorum
2	12 Maret 2019	Rapat Pra Komite Produk I tahun 2019 dalam rangka penyusunan Taksonomi Produk	Kuorum
3	13 Maret 2019	Rapat Pra Komite Produk I tahun 2019 dalam rangka penyusunan Taksonomi Produk	Kuorum
4	3 Mei 2019	Rapat Komite Produk I tahun 2019 dengan agenda: 1. Paparan Direksi 2. Paparan <i>Brief</i> dan Progres produk/<i>platform</i> (Divisi KJT) 3. Keputusan Komite Produk: a. Penetapan <i>Platform Owner</i> b. Tugas dan tanggung jawab <i>Platform Owner</i> c. Setiap platform owner menjalankan strategi pemasaran yang telah dipaparkan pada Komite Produk	Kuorum
5	18 Mei 2019	Rapat Pra Komite Produk II tahun 2019 dalam rangka menentukan <i>product decline</i>	Kuorum

Komite Direksi

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
6	22 Juli 2019	Rapat Pra Komite Produk II tahun 2019	Kuorum
7	8 Agustus 2019	Rapat Pra Komite Produk II tahun 2019 dalam rangka Penentuan <i>Product Owner</i> Bank Garansi dan Aplikasi <i>Value Chain</i>	Kuorum
8	13 Agustus 2019	Rapat Pra Komite Produk II tahun 2019 dalam rangka Penentuan <i>Product Owner</i> Bank Garansi dan Aplikasi <i>Value Chain</i>	Kuorum
9	6 September 2019	Rapat Komite Produk II tahun 2019 dengan agenda: 1. Paparan Direksi 2. Keputusan Komite Produk: a. Pengelolaan Bank Garansi b. Penghapusan Fitur Host to Host c. Pengelolaan BRIAPI d. Pengelolaan EDC Merchant e. Pengelolaan Product Type terkait Implementasi BRIFIRST	Kuorum
10	7 Oktober 2019	Rapat Pra Komite Produk III Tahun 2019	Kuorum
11	10 Oktober 2019	Rapat Pra Komite Produk III Tahun 2019	Kuorum
12	18 Desember 2019	Rapat Pra Komite Produk III tahun 2019: <i>Alignment Project</i> BRIFIST dengan Rencana STP dan Komite Produk	Kuorum
13	30 Desember 2019	Rapat Komite Produk III Tahun 2019 (dalam proses penjadwalan)	Kuorum

Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Dengan Hak Suara. Dari 3 (tiga) Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur/SEVP.
2. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka Keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang memiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Komite Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah Komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Komite Pengadaan I

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi MAT atau PBJ	Sekretaris	
Seluruh Anggota Direksi BRI kecuali Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Direksi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan II

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti I (Merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi MAT atau PBJ	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Bisnis Mikro/ Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah/Direktur Jaringan dan Layanan/ Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur/SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan III

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Keuangan/ Direktur Bisnis Mikro/ Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah/ Direktur Jaringan dan Layanan/ Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan IV

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, objektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian putusan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atau usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya.
5. Memberikan putusan pengadaan, melalui:
 - a. Risalah Rapat Direksi, atau
 - b. Risalah Rapat Komite Pengadaan, atau
 - c. Nota Dinas Sirkuler.

Pedoman Kerja

1. Keputusan Komite diambil dalam suatu rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara unanimous dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak didalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan.
4. Mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah diputus oleh Direksi melalui Rapat Direksi, maka putusan dimaksud dipersamakan dengan putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan Risalah Rapat Direksi.
6. Tugas dan tanggung jawab fasilitator untuk rapat Komite dilaksanakan oleh Sekretaris Komite Pengadaan antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
 - b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
 - c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
 - d. Membuat Risalah Rapat dan Berita Acara Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja terkait. Dalam hal rapat Komite Pengadaan tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Pengadaan dapat

Rapat Komite 2

Pada tahun 2019, Komite Pengadaan barang dan Jasa telah mengadakan Rapat sebanyak 2 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	16 Januari 2019	Permohonan Putusan Proyek <i>Network & Service Enhancement</i>	Kuorum
2	29 Januari 2019	Putusan <i>Update NSE Project</i> Kehadiran	Kuorum



TATA KELOLA PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam website serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Per 31 Desember 2019, Sekretaris Perusahaan BRI dijabat oleh Hari Purnomo.

Profil Sekretaris Perusahaan



Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Usia 53 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 2 September 2019 berdasarkan Keputusan Direksi No. Nokep: 140.e-DIR/KHC/07/2019 22 Juli 2019 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.20-KOM/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Proteksi dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Dalam perjalanan karirnya, telah menjabat berbagai posisi antara lain Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis di berbagai wilayah serta Pimpinan Cabang.

Hari Purnomo

Sekretaris Perusahaan

Dasar Hukum

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan BRI bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Pejabat setingkat eselon 2 yang membawahi Bidang Kesekretariatan dan Protokoler, Hubungan Masyarakat, CSR dan Bina Lingkungan, serta Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan BRI sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan



Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi 2019

Dalam hal pengembangan kompetensi, Sekretaris Perusahaan beserta jajaran Sekretariat Perusahaan dapat mengikuti pelatihan dan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan maupun oleh pihak profesional di luar Perusahaan. Pelatihan dan program Pendidikan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan beserta jajaran Sekretariat Perusahaan pada tahun 2019 tersedia dalam Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan hubungan masyarakat/media relation; pengelolaan CSR dan bina lingkungan; serta pengelolaan fungsi kesekretariatan Perusahaan, protokol, dan pelayanan intern Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam rangka mewujudkan target kinerja dan corporate image BRI sesuai visi, misi dan strategi Perusahaan dengan perincian tanggung jawab sebagai berikut:

- Penyusunan implementasi dan evaluasi strategi & kegiatan kehumasan, seperti namun tidak terbatas pada mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang berkepentingan secara langsung atau melalui media cetak maupun elektronik, mengelola isu-isu yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap Perusahaan dan program/event/pameran, pemberian sponsorship sebagai salah satu perwujudan dalam rangka meningkatkan corporate image BRI.
- Penyusunan, implementasi dan evaluasi strategi dan kegiatan CSR dan Bina Lingkungan dalam rangka kepedulian BRI terhadap lingkungan sosial masyarakat dan meningkatkan corporate image BRI.
- Penyelenggaraan RUPS / RUPSLB, Rapat Direksi Komisaris dan Rapat Direksi, forum internal dan eksternal.
- Penyusunan, analisis dan evaluasi kebijakan terkait pemberian layanan hak-hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP serta aktivitas kesekretariatan untuk memastikan terpenuhi hak dan fasilitas Komisaris, Direksi dan SEVP tersebut serta penyelenggaraan kesekretariatan Perusahaan.
- Penatakerjaan dan pengadministrasian aktivitas kesekretariatan, administrasi dan dokumentasi Perusahaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan lainnya yang terkait Anggaran Dasar Perusahaan)
- Pelaksanaan dan evaluasi protokol seluruh aktivitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
- Sebagai spoke person Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan BRI telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan

Laporan Pelaksanaan Tugas SKP tahun 2019

Hubungan dengan Media Massa

Pelaksanaan komunikasi korporat dilakukan dengan melibatkan berbagai media sebagai strategic partner yang meliputi media cetak, elektronik, maupun online. Komunikasi dilakukan melalui penerbitan press release yang selama tahun 2019 telah mencapai sejumlah 212 siaran pers oleh perusahaan. Selain itu Corporate Secretary juga bertindak sebagai spoke person untuk menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari wartawan, mendampingi jajaran Direksi BRI dalam kegiatan wawancara bersama media, menyelenggarakan kegiatan press conference untuk meningkatkan citra perusahaan, serta melakukan monitoring hingga klarifikasi terhadap pemberitaan negatif atau isu-isu yang dapat menurunkan reputasi Bank BRI.

Dalam menjalin hubungan dengan awak media, Corporate Secretary Bank BRI melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Gathering bersama Sahabat Pers BRI yang dilaksanakan di Bogor pada bulan April 2019.
- Gathering bersama Pemimpin Redaksi di Jakarta pada bulan Juni 2019.
- Buka puasa bersama wartawan di Jakarta pada bulan Juni 2019.
- Program mudik bareng Sahabat Pers BRI pada bulan Juni 2019.
- Kegiatan Media Visit yang secara rutin dilakukan, selama periode 2019 tercatat telah dilakukan lebih dari 10 kali media visit media nasional.
- Kegiatan nonton bareng Sahabat Pers, diantaranya adalah nonton bareng film Captain Marvel dan Avengers End Game.
- Untuk menjalin hubungan baik, berbagai kegiatan informal juga dilakukan bersama awak media, seperti makan bersama redaktur maupun Pemimpin Redaktur.

Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris

1. Secara rutin dilakukan update pada Forum ALCO kepada Direksi yang dilaksanakan secara rutin bulanan dalam forum rapat Komite Asset & Liability (ALCO).
2. Secara triwulanan diupdate pada forum Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom) update kinerja perusahaan dan perkembangan pasar modal.
3. Materi komunikasi BBRI Update (pamflet) terkait pasar modal dan kinerja saham BBRI kepada Direksi dan kalangan internal perusahaan.

Pelaksanaan program Komunikasi kepada Komunitas Pasar Modal

1. Telah dilaksanakan dalam ajang public expose sebagaimana rincian dijelaskan di sub bab ini.
2. Analyst Meeting yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka paparan kinerja Triwulanan perusahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pasar Modal di Kota Solo pada 27 November 2019
4. Workshop Go Public bersama BRI Group dengan mengundang nasabah Korporasi dan Menengah Bank BRI dari perwakilan seluruh Indonesia dengan Tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan Perusahaan melalui IPO Saham".

Transparansi Penyampaian Laporan

Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah	Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan	Tahunan	1	OJK dan BEI
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak	Triwulan	4	OJK, BI Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Hutang Valas	Bulanan	12	OJK
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12	OJK dan Bursa Efek Indonesia
Laporan Keterbukaan Informasi	Insidentil	7	OJK dan Bursa Efek Indonesia

Sekretaris Perusahaan

Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS oleh Sekretaris Perusahaan BRI sebagaimana dilaporkan pada sub bab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun luar biasa. Selama tahun 2019 telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 kali, RUPSLB pada tanggal 3 Januari 2019, RUPST pada tanggal 15 Mei 2019 serta RUPSLB pada tanggal 2 September 2019.

Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Radirkom

Pengatur jadwal, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Laporan pelaksanaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana telah disampaikan dalam sub bab RUPS. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom) dapat dilihat pada sub bab rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris baru

Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan pelaksanaan program orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan diantaranya tugas dan tanggung jawab selaku Direksi dan Dewan Komisaris, hak dan kewajiban, peraturan dan ketentuan terkait, adapun bentuk pelaksanaan program orientasi tersebut sebagai berikut:

- Presentasi mengenai profil perusahaan dari berbagai aspek yang dipandang perlu sesuai dengan permintaan/kebutuhan yang bersangkutan.
- Program Orientasi Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi, pertemuan tatap muka Sekretaris Perusahaan dengan Direksi. Adapun masa orientasi antara lain:
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dan sesuai pembedangan Direksi
 - Visi dan Misi Perusahaan
 - Hak dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris
- Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris baru sebagaimana program kunjungan kerja Dewan Komisaris dan/atau rapat dewan komisaris.
- Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPST tahun 2018 telah dilaksanakan program orientasi mengenai perusahaan sesuai dengan permintaan Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Analyst Meeting

Secara triwulanan Bank BRI rutin menyelenggarakan kegiatan analyst meeting untuk memaparkan kinerja triwulanan. Analyst Meeting diselenggarakan di kantor Bank BRI Gedung BRI 1 lantai 21. Kegiatan analyst meeting diselenggarakan bersamaan dengan keterbukaan informasi berupa *press conference* Bersama dengan pihak media.

Selama tahun 2019, Bank BRI telah menyelenggarakan *Analyst Meeting* pada:

Analyst Meeting	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
Kinerja Triwulan I tahun 2019	24 April 2019	Ruang Aula Gedung BRI 1
Kinerja Triwulan II tahun 2019 (audited)	14 Agustus 2019	Ruang Aula Gedung BRI 1
Kinerja Triwulan III tahun 2019 (unaudited)	24 Oktober 2019	Ruang Aula Gedung BRI 1



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan

Penyelenggaraan Public Expose 2019

Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Public Expose dengan sebagai berikut:

Perihal	Tanggal	Keterangan
Pemberitahuan Rencana <i>Public Expose</i>	05 Agustus 2019	Situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> tersebut telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Penyampaian Materi <i>Public Expose</i>	19 Agustus 2019	
Laporan Pelaksanaan <i>Public Expose</i>	22 Agustus 2019	

Keterbukaan Informasi

Selama tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) kali keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan diunggah pada situs web Perusahaan dan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Perihal
1	12 Maret 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Keterbukaan informasi laporan hasil pemeringkatan
2	1 April 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Tambahan modal kepada BRI Ventura Investama
3	21 Juni 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Rencana Penyertaan modal kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS)
4	30 Juli 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Tambahan modal kepada BRI Ventura Investama
5	22 Agustus 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Keterbukaan informasi laporan hasil pemeringkatan
6	27 Agustus 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Tambahan modal kepada PT BRI Multifinance Indonesia
7	27 September 2019	Keterbukaan Informasi perusahaan	Pengambilalihan 90% saham PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS)

Selain keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) juga melakukan konfirmasi serta tanggapan/jawaban atas pemberitaan di media massa yang terkait dengan rencana aksi atau berita yang menyangkut aksi korporasi yang simpang siur atau yang memerlukan kepastian kebenarannya.

Press Release 2019

No	Judul
1	Gelar RUPSLB, Ini Susunan Pengurus Bank BRI Yang Baru
2	3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati KUR BRI Senilai Rp.80,2 Triliun
3	Fantastis! Transaksi Agen BRILink Tembus Rp.512,7 Triliun Sepanjang 2018
4	Aset Kelolaan DPLK BRI Tumbuh 25% Sepanjang Tahun 2018
5	BRI Dorong Petani dan UMKM Kopi di Banyuwangi Naik Kelas
6	UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Terus Menjadi Tulang Punggung Bisnis BRI
7	Rajai Segmen UMKM, Laba BRI Tembus Rp.32,4 Triliun
8	BRI dan Pupuk Indonesia Ajak Millennial Bergaya Hidup Ramah Lingkungan
9	BPN Berikan Kewenangan Hak Milik Aset Kepada BRI

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
10	Bank BRI Sukseskan Peluncuran KUR Khusus Peternakan Rakyat
11	BRI bersama HIMBARA Gelar Customer Gathering di Surabaya
12	BRI Dukung Rencana Pembangunan Nasional Melalui Kerjasama dengan Kementerian ESDM
13	Di Hadapan Ribuan Mahasiswa UNPAD, Direktur Utama Bank BRI Berbagi Kiat Kepemimpinan
14	BRI Agro Luncurkan PINANG, Digital Lending Perbankan Pertama di Indonesia
15	Konsisten Dorong Ekspor UMKM, BRI Gelar BRICRAFT 2019
16	Sasar Millenial, BRI Luncurkan Aplikasi BRImo
17	Bank BRI Dukung Ekonomi Kerakyatan melalui Penyaluran KUR Ketahanan Pangan
18	Digelar di Kawasan Wisata Mandeh, Ribuan Pelari Antusias Ikuti BRI Mandeh Run 2019
19	Pakai Jurus Gethok Tular, Ibu Ini Raup 2.000 Transaksi Agen BRILink Tiap Bulan
20	BRI Perkuat Kerjasama Perbankan Dengan Kemendagri
21	BRI Hadirkan Promo Diskon di Traveloka Lewat BRI Online Travel Fair
22	Wadirut BRI Berbagi Ilmu Public Relations di Kongres dan Munas Forum Humas BUMN
23	Bank BRI Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir Bandang di Sentani
24	BBRI Terus Melesat Sentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
25	Dukung Program Kewirausahaan Pertanian, BRI Wujudkan Lumbung Padi Organik di Jawa Barat
26	Edukasi Investasi bagi Generasi Muda, BRI Gelar Bancassurance Expo 2019 Selama 3 Hari
27	BRI Perkuat Kerja Sama Layanan Perbankan TNI Angkatan Darat
28	Bank BRI Sabet 2 Penghargaan Bergengsi dari The Asian Banker
29	BRI Teken Kerja Sama Layanan Perbankan dengan Lemdiklat Polri
30	Market Cap Tembus Rp.500 Triliun, BBRI Cetak Rekor Baru Pekan ini
31	Promosikan LinkAja, BRI Berikan Paket Pangan Murah
32	Bank BRI Terbitkan Global Sustainability Bond Pertama di Indonesia
33	Bank BRI Terus Perluas Aliansi Strategis Dengan BPD
34	Direktur Utama BRI Sapa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada Acara BUMN Goes to Campus
35	BRI Promosikan Tabungan BRI SiMuda dan BRImo Dalam Event Young On Top National Conference 2019 Menyatukan Indonesia
36	Dukung Bali Spirit Festival, BRI Tawarkan Program Menarik
37	Suntik Modal BRI Ventures
38	Dongkrak Penjualan BRIZZI, BRI Luncurkan Official Store dan BRIZZI Edisi Tahilalats di Tokopedia
39	Tingkatkan Bisnis Kartu Kredit, BRI Luncurkan Kartu Kredit BRI Agro
40	BRI Ajak Debiturnya Melantai Di Bursa
41	Dukung Green Environment, BRI Luncurkan Pembiayaan Untuk Mobil Ramah Lingkungan



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
42	Gelar Multifinance Gathering, BRI Jawab Tantangan Industri Pembiayaan Kedepan
43	Dukung Pemerintah Genjot Pariwisata Halal, Bank BRI Angkat UMKM di Halal Park
44	Usung Semangat Kartini, BRI Gelar Talkshow Inspiratif
45	Digitalisasi Segmen Mikro, BRI Raih Laba Rp 8,20 Triliun
46	BRI Kucurkan KUR Rp 25,32 Triliun Dalam 3 Bulan
47	Bank BRI Gelar Kejuaan Trampolin dan Luncurkan BRIZZI Edisi Khusus
48	Terapkan Open Banking Platform, Bank BRI Raih ISO 27001 dengan BRIAPI
49	Edukasi Pelajar Untuk Menabung Sejak Dini, BRI dan OJK selenggarakan SimPel Day 2019
50	Raih Predikat Best of The Best Company, BRI Borong 7 Penghargaan di BUMN Marketeers Awards 2019
51	Tingkatkan Partisipasi Lelang, BRI Adakan "BRI Auction Day"
52	BRI Siapkan Layanan Terbaik Bagi Kementerian Pertahanan RI
53	Dorong Industri Halal Go Online, BRI Luncurkan Halal Mall di Tokopedia
54	Bank BRI Siapkan Rp 48,2 Triliun Guna Antisipasi Libur Lebaran 2019
55	Dukung Pemerataan Pendidikan, BRI Gelar Beasiswa Indonesia Cerdas
56	Bank BRI Bagikan Dividen Rp 16,17 Triliun
57	Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan, Bank BRI Salurkan 64 Ribu Paket Sembako
58	Perkuat Bisnis Bancassurance, BRI Luncurkan Davespro dan Davestera Optima Syariah
59	Forbes Kembali Nobatkan Bank BRI Sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia
60	Usung Tema Ramadan Ceria Bersama Anak Indonesia, BRI Rangkul 3.500 Anak Yatim Berbuka Puasa Bersama
61	Jelang Lebaran, BRI Ajak Nasabah untuk Bertransaksi Secara Non Tunai
62	BRI dan Pertamina Berikan Cash Back Pembelian BBM Non Subsidi
63	Perkuat Silaturahmi, Dirut BRI Buka Bersama Santri Ponpes Singo Ludiro Solo
64	Berbagi Kebahagiaan, BRI Bagikan Al Quran, Santuni Anak Yatim Piatu Hingga Berikan Sembako Gratis di Papua dan Papua Barat
65	15 Ribu Orang Ikuti Mudik Bareng BRI
66	Bidik Bisnis Remitansi, BRI Bukukan Rp 218 Triliun
67	Asian Banker Nobatkan CEO BRI Sebagai The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award for Indonesia
68	Layanan Perbankan BRI Tetap Aktif Selama Libur Hari Raya Idul Fitri
69	Kepercayaan Masyarakat Kepada BRI Terus Meningkat
70	BRI Hadir Di Tengah Bencana Banjir Sultra dan Kaltim
71	Kembali Sasar Millenial, Bank BRI Luncurkan Credit Card Mobile
72	Selangkah Lagi Bank BRI Miliki Asuransi Umum
73	Bank BRI Fasilitas BPKH, Sediakan Bank Notes Untuk Living Cost Jemaah Haji 2019

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
74	Dirut BRI Berbicara Tentang Pemberdayaan UMKM di Forum PBB
75	BRI Berikan Fasilitas Kustodian Kepada BPD Bali
76	BRI Sabet Penghargaan Khusus Bidang UMKM Dari Majalah Investor
77	Corporate Governance Asia Anugrahi BRI 3 Penghargaan Prestisius
78	Program Kewirausahaan Pertanian BRI Telah Berhasil di 286 Daerah
79	Dukung Pagelaran Prambanan Jazz 2019, BRI Berikan Diskon Tiket Hingga 50%
80	Kapitalisasi Pasar BRI Sentuh Rp 551 Triliun
81	BRI Gelar Konser BritAma "Inspirasi Cinta Yovie and His Friends"
82	Dorong Inklusi Keuangan, Transaksi Agen BRILink Tembus Rp 331 triliun
83	Bank BRI Raih Dua Penghargaan Sebagai Bank Persero Terbaik dan CEO of The Year 2019
84	2,3 Juta Orang Nikmati KUR BRI di Sepanjang Paruh Pertama 2019
85	Serikat Pekerja BRI Rayakan Hari Jadi ke-20 Tahun (unblasted)
86	Tanggap Bencana, BRI Salurkan Bantuan CSR Peduli Korban Bencana Gempa Halmahera
87	Garap Bisnis DPLK, Bank BRI Edukasi Masyarakat Soal Kebutuhan Hari Tua
88	Bank BRI Diganjar Sebagai Emiten Kinerja Terbaik di Ajang CSA Award
89	Kala Bank Kapal Jalankan Misi Kemanusiaan di Halmahera Selatan
90	Kembangkan UMKM, BRI Kembali Luncurkan BRIncubator di tahun 2019
91	BRI Bersiap Luncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva IV
92	Dukung Ekspor Tekstil dan Garmen ke Amerika Serikat, BRI New York Agency
93	Selangkah Lagi Buka Rekening Tanpa Harus ke Kantor (unblasted)
94	Akhir Pekan Tiba, Saatnya Berburu Mobil Keluaran Terbaru
95	Dorong Kaum Muda Menabung, OJK Gandeng BRI Gelar Aksi Muda 2019
96	Ajukan Pinjaman di Bank Bisa Cair dalam Hitungan Jam
97	Junio Smart, Terobosan BRI Perkuat Ekosistem Pendidikan di Indonesia
98	Solusi Transaksi Praktis Non Tunai LPG 3 Kg dalam Genggaman
99	Ini Jurus BRI Jaga Layanan Perbankan Tetap Normal
100	Peran BRIst Menjaga Layanan BRI Tetap Lancar
101	Bank BRI Meriahkan Pasar Nusantara 2019
102	Bank BRI Telah Menurunkan Suku Bunga
103	Fantastis! 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Lewat BRI
104	Imbas Demo, BRI Cabang Hong Kong Terapkan Operasional Layanan Terbatas (unblasted)
105	Kredit UMKM BRI Tumbuh 13% di Semester I 2019-1408.22.34
106	Bank BRI Borong 4 Penghargaan di IDX Channel Innovation Award



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
107	Bank BRI Bangun Semangat Nasionalisme Generasi Muda
108	Rayakan HUT RI, BRI Beri Bantuan CSR Kepada 57 SLB di Seluruh Indonesia
109	Bank BRI Luncurkan Kartu BRIZZI Desain Gundala
110	Lagi! BRI Apresiasi Prestasi Para Paskibraka Nasional
111	Bersama BRI, 5.000 Peserta Jalan Sehat Ramaikan Peringatan HUT ke-74 RI di Papua
112	Gelar Public Expose, BRI Ungkap Strategi Untuk Menjadi The Most Valuable Bank In Southeast Asia
113	Dukung Pendidikan, BRI Tambah Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
114	Satelit BRIsat, Kini dan Nanti
115	BRI Ungkap Strategi Genjot KUR Sektor Produksi v2 (belum ACC)
116	BRI dan Investree Perkuat Penyaluran Kredit Berplatform Online
117	Pemberdayaan UMKM di Tengah Revolusi Industri 4.0 v2 (belum ACC)
118	Gandeng Pelindo III, BRI Perluas Gerakan Non Tunai di Wilayah Pelabuhan v2 (belum ACC)
119	BRI Hadirkan Kopi Nusantara di Tengah-tengah Talenta Musik Indonesia
120	KPR BRI Dinobatkan Sebagai KPR Terbaik di Indonesia Oleh The Asian Banker
121	Literasi BRI bersama BI dan KDEI Taipei Gelar Literasi untuk Pekerja Migran di Taiwan
122	Dukung Industri Golf, BRI kembali sponsori Indonesia Open
123	BRI Menjadi Perusahaan BUMN Dengan Nilai Merek Terbesar v2 (belum ACC)
124	Agen BRILink Percepat Inklusi dan Literasi Keuangan di Indonesia
125	Sunarso Diangkat Menjadi Direktur Utama Bank BRI
126	Hari Purnomo Diangkat Menjadi Corporate Secretary Bank BRI
127	Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Jajaran Direksi BRI
128	Pasca Kerusuhan, Bank BRI Salurkan Bantuan untuk Percepat Pemulihan Papua
129	Bank BRI Pamerkan Big Data, BRI API Hingga Pinang di Ajang Google Cloud Summit
130	BRI Mudahkan Nasabah Mekaar Naik Kelas Mendapat Pembiayaan KUR
131	Clustering, Jurus BRI Berdayakan Nasabah Ultra Mikro
132	BRI Benahi Ekosistem di Gunung Semeru
133	BRI Raih Penghargaan di Ajang IDC Digital Transformation Awards 2019
134	Kembangkan UMKM, BRI Kucurkan KUR Rp 67,6 Triliun
135	Pengguna BRImo Tembus 1,9 Juta Orang v2 (unblasted versi blast 159)
136	Program Pendampingan UMKM dari BRI Raih Penghargaan Indonesia's Best Corporate Social Initiative (unblasted)
137	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sulawesi, BRI Resmikan Kantor Cabang Morowali
138	Sinergi BRI dan POLRI, Sukseskan Registrasi SIM Online dan SMART SIM
139	BRI Sabet Penghargaan The Best Performance Bank dari Bisnis Indonesia (unblasted)

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
140	Bangun Ekosistem Digital Bank BRI Dukung Indonesia Fintech Summit Expo 2019
141	BRI Ajak Debitur Korporasi Implementasikan Praktek Keuangan Berkelanjutan (unblasted)
142	Layanan Perbankan BRI di Wamena Tetap Normal
143	Pasca Gempa Ambon, Operasional BRI Berjalan Lancar
144	Sinergi BUMN, BRI - Pegadaian Teken Kerjasama Strategis
145	Implementasikan Praktik Keuangan Berkelanjutan, BRI Dinobatkan Asiamoney Sebagai Best Bank for CSR
146	Bank BRI Sambut Puncak Peringatan Hari Batik Nasional
147	BRI Terbitkan Obligasi Rp 5 Triliun
148	Bank BRI Dukung UMKM Melalui Festival Garam Amed di Bali
149	Dukung Lestarian Batik, Bank BRI Gelar Batik Musik Festival di Yogyakarta
150	Mudahkan Pengguna, Kini Isi Ulang BRIZZI Bisa Melalui Aplikasi Traveloka
151	BRI dan BJB Perkuat Kerjasama Strategis
152	Tumbuh Pesat, Pemegang Polis Asuransi Mikro BRI Bertambah 4 Juta
153	Dorong Perkembangan Sektor Perikanan, BRI Jalin Sinergi Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan
154	Dorong Inklusi Keuangan Kepada Generasi Z, BRI Hadirkan BRILink
155	BRI Bangun Sarana Umum Dermaga dan Pendidikan Senilai 1,3 Miliar di Pulau Messah
156	Ciptakan Kawasan Bisnis Ramah Lingkungan, BRI Ajak Pekerja Gunakan GrabWheels
157	Panen Hadiah di Gelaran Pesta Rakyat Simpedes BRI
158	Sinergi Bisnis Bank BRI dan BPD Seluruh Indonesia
159	Digital Banking Kian Digemari, Pengguna BRIimo Tembus 2,2 Juta Orang
160	BRI Gelar Konser BritAma "Inspirasi Cinta Yovie and His Friends"
161	BRI Tampilkan Berbagai Inovasi Digital di Habibie Festival 2019 (unblasted)
162	Gencar Ajak Millenial Untuk Menabung Sejak Dini, BRI Dinobatkan OJK Sebagai Bank Terbaik Dalam Mendukung Inklusi Keuangan
163	Kredit Mikro Tumbuh 13%, Menjadi Pilar Utama Pertumbuhan Kinerja BRI
164	Sambut HUT BRI ke 124, Bank BRI Selenggarakan Ajang Olahraga dan Seni (unblasted)
165	Bantuan Sosial Melalui Bank BRI Capai Rp 11 Triliun
166	Bank BRI Dukung Grand Opening Outlet Tulola di Plaza Indonesia
167	BRISPOT, Jurus BRI Mendukung Ekonomi Kerakyatan Melalui Digitalisasi (unblasted)
168	Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Bank BRI – Kospin Jasa Sinergi Layanan Transaksi
169	Cara BRI Mendidik Generasi Muda Lewat Literasi Keuangan (unblasted)
170	Agen BRILink Rambah 49 Ribu Desa di Seluruh Indonesia
171	Peringati HUT ke 124, BRI Gelar Pelatihan 10.000 UMKM, Konservasi Kawasan Sungai Hingga Renovasi Ratusan Rumah (unblasted)



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
172	Bank BRI Ajak Generasi Millennial Jauhi Narkoba
173	BRI Bangun Ekosistem Pendidikan Melalui Platform Digital
174	Obligasi BRI Laris Diburu Investor
175	Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Gelar Pelatihan di 100 Kota
176	Masjid dan Sekolah di Aceh Terima Kucuran CSR dari BRI
177	Dorong Pertumbuhan Simpanan, BRI Tambah Sentra Layanan Prioritas di Padang
178	Dukung Industri Musik dan Kreatif, Bank BRI Gelar Konser NOAH "an Intimate Night at BRI"
179	Bank BRI Mendukung BRIsyariah Lakukan Percepatan Qanun di Aceh
180	Dukung Perekonomian Daerah, Bank BRI Gelar Program Padat Karya
181	Rayakan Dies Natalis Pertamanya, BRI Institute Jalin Kerjasama Bersama MIT
182	Sambut HUT ke-124, Bank BRI Selenggarakan BRILian Run Surabaya Series
183	Top Up BRIZZI di Tokopedia Semakin Praktis Dengan NFC
184	Dorong Lahirnya Pengusaha Muda di Lingkungan Pesantren, BRI Gelar Santripreneur
185	Dukung Industri Seni dan Kreatif, Bank BRI Gelar Pentas Teater Musikal La La Love v3
186	Meriahkan HUT 124, Bank BRI Gelar Turnamen Golf Bersama Para Nasabah
187	Peran BRI Tingkatkan Perdagangan Indonesia dan AS Melalui Program "Mathmaking Business What Indonesia Has, BRI Has It"
188	Bank BRI Dinobatkan Sebagai Bank UMKM Terbaik dan Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
189	Rayakan HUT ke-124, Bank BRI Renovasi Ratusan Rumah (unblasted)
190	Go Smaller, Go Shorter and Go Faster, Jurus BRI Akselerasi Kredit UMKM
191	10.000 Runners Ramaikan BRILian Run Surabaya Series
192	Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan, BRI Luncurkan Kartu Nelayan
193	Gandeng Start Up, Strategi BRI Wujudkan Integrated Financial Solution
194	Kampanye Hemat Energi, BRI Berikan Skim Khusus Pembiayaan Motor Listrik Bagi Pegawai PLN
195	Dirut BRI Sunarso Terima Penghargaan Indonesia Humane Entrepreneurship Award 2019
196	Gandeng ICMI, BRI Terbitkan Kartu Co-Branding BRIZZI - ICMI (unblasted)
197	Ciptakan Pemimpin Masa Depan, BRI Berikan Beasiswa BRILian Scholarship Program
198	Bank BRI Berikan Apresiasi untuk Guru Honorer melalui Benihbaik.com
199	Gelar Innovation Lab Program, Upaya Nyata BRI Dorong UMKM Naik Kelas
200	Luncurkan CERIA, Bank BRI Jadi Bank BUMN Pertama Miliki Aplikasi Pinjaman Online

Sekretaris Perusahaan

No	Judul
201	Bank BRI Raih Penghargaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan dari IICG (unblasted)
202	Bank BRI Siapkan Rp 34,64 Triliun Jelang Libur Nataru
203	Bank BRI Siapkan Layanan Prima Bagi Nasabah High Net Worth Individual
204	UMKM Export BRILian Preneur 2019, Terobosan BRI Dorong UMKM Naik Kelas
205	BRI Kembali Peroleh Apresiasi sebagai Dealer Utama SUN Dengan Kinerja Terbaik dan Mitra Distribusi SUN Ritel Terbaik
206	Berbagai Rangkaian Program CSR Diselenggarakan BRI Dalam Rangka HUT ke 124 Tahun
207	Lebih dari 328 Ribu Pelaku UMKM Tergabung Dalam Digital Economy Ecosystem Melalui RKB BRI
208	Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan UMKM Export BRILian Preneur 2019
209	65.000 Orang Ikuti BRIFFEST, Puncak Perayaan HUT ke 124 Tahun Bank BRI
210	Tiga Hari Digelar, BRILian Preneur Catatkan Transaksi
211	Dorong Peningkatan Ekspor, Bank BRI Sediakan layanan Trade Finance Bagi Nasabah LPEI
212	Bank BRI Gelar Rangkaian Program CSR Dalam Rangka Natal dan Tahun Baru

Detail Press Release dapat diakses di kanal Warta BRI pada website Bank BRI (<https://bri.co.id/news>)

DIVIDEN

Kebijakan

Dalam memutuskan pemberian Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham, Bank BRI memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor sustainable tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Bank BRI kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Bank BRI memiliki kebijakan pemberian Dividen kepada pemegang saham dengan rasio pemberian secara historis kisaran 40% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen

Pembayaran Dividen dilaksanakan berdasarkan hasil putusan RUPS atas mata acara persetujuan penggunaan laba. Pembayaran Dividen dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal RUPST	Tanggal Pengumuman Hasil RUPST	Tanggal Pembayaran	Dividen Payout Ratio
23 Maret 2016	25 Maret 2016	22 April 2016	30%
15 Maret 2017	17 Maret 2017	13 April 2017	40%
22 Maret 2018	26 Maret 2018	25 April 2018	45%
15 Mei 2019	17 Mei 2019	13 Juni 2019	50%



TATA KELOLA PERUSAHAAN

HUBUNGAN INVESTOR

Divisi Hubungan Investor BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, Divisi Hubungan Investor BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.



Achmad Royadi

Head Investor Relations

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, Achmad Royadi memperoleh gelar MBA Finance pada tahun 2009 dari A.B Freeman School of Business, Tulane University, USA dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1998. Beberapa sertifikasi yang telah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Treasury Dealer.

Menjabat sebagai Head of Investor Relations sejak Juni 2018, dan memulai karier di BRI pada tahun 1999.

Dalam perjalanan karirnya, beliau sempat menjabat sebagai Vice President Corporate Development & Strategy, Head of Economist Group, Group Head of Global Market, serta Kepala Bagian Manajemen Likuiditas Divisi Treasury.

Contact Investor Relation

Nama : Achmad Royadi
 Alamat : Gedung BRI II lantai 7
 Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta
 Pusat 10210
 Telp. : +62 21 575 2019
 Fax : +62 21 575 2010
 Email : ir@bri.co.id
 Website : www.ir-bri.com

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama Head of Investor Relations BRI adalah merumuskan strategi dan melakukan fungsi komunikasi terkait kinerja dan strategi perusahaan kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, Divisi Hubungan Investor BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

Analyst Meeting

Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas yang bertujuan agar analyst/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan report dengan data terkini kepada para investor.

Company Visit - Field Visit

Menerima kunjungan dari investor/ analyst yang ingin mengupdate kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.

Conference Call

Melakukan kegiatan tele-conference untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/ analyst dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

Investor Newsletter

Update informasi terkini melalui penerbitan newsletter pada website hubungan investor BRI.

Hubungan Investor

Investor Conference dan Non-deal Roadshow
Melakukan kegiatan komunikasi melalui 1-on-1 meeting maupun group meeting dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama pada kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.

Rating Review

Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch Rating, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).

Pengelolaan Website Hubungan Investor
Melakukan pengelolaan informasi pada website hubungan investor agar pemegang saham, pemegang surat hutang, analis, lembaga pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. Website yang dikelola oleh Divisi Hubungan Investor tersebut juga terkoneksi dengan website perusahaan yaitu www.bri.co.id.

Advisory Report

Melakukan penyusunan materi advisory yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi gap antara intrinsic value dan target price analis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasikan secara internal kepada Board of Management.

Market Update Advisory

Melakukan penyusunan materi berupa update kondisi pasar saham, harga saham BRI dan peers untuk dikomunikasikan secara internal kepada Board of Management.

Financial Update

Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas pada kegiatan Analyst Meeting.

Financial Brief

Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.

BBRI News

Melakukan penyusunan materi terkait issue terupdate yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada Board of Management ataupun pekerja BRI.

Program Pelatihan Kompetensi

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Head of Investor Relation dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh *Head of Investor Relations* adalah:

1. *Risk Management Certification Refresher Program "Tantangan Utama Manajemen Risiko 2019"*, BARa, Batam, 2018.
2. *Training Strategic Marketing "Competing in the Digital Age Program"* - Ross School of Business, University of Michigan, 2017.
3. *Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution* - BSMR and PWC, Jakarta, 2017.
4. *ASEAN RISK CONFERENCE 2017- Asia Risk, Incisive Media*, Kuala Lumpur, 2017.
5. *ACI (The Financial Market Associate) World Congress*, 2016.
6. *Bond Market Analysis - School of Bonds and Fixed Income (IBPA)*, Jakarta, 2016.
7. *ASEAN Conference "Connecting ASEAN"* - Bank of America Merrill Lynch, Singapore, 2015.
8. *Enrichment Reksadana* - Infovesta, Jakarta, 2015.
9. *Key Risk Management Challenge* - BARa, Denpasar, 2014.
10. *Hedge Accounting by Deloitte*, Jakarta, 2014.
11. *Treasury Derivative Course* - HSBC, Jakarta, 2013.
12. *IR and Stake Holder Management* - Marcus Evans, Singapore, 2012.
13. *Basic Training of Islamic Bank* - LPPI, Jakarta, 2011.
14. *Corporate Action and Equity Analysis* - Indonesia Investor Relations Institute, Jakarta, 2010.
15. *Sertifikasi Manajemen Risiko*, LSPP, Jakarta, 2019.
16. *Becoming a Leader of Leaders*, ACT Consulting, Jakarta, 2019.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hubungan Investor

Selain itu, beberapa pelatihan juga diikuti oleh Kepala Bagian dan staff Divisi Hubungan Investor pada tahun 2019 diantaranya:

1. *Green Bonds*
2. *VBA Excel*
3. *Business Writing*
4. *Mini-MBA*
5. *Bonds Market & Instrument*
6. *Strategic Business Analysis*

Pelaksanaan Kegiatan 2019

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2019 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan
2. Kegiatan komunikasi berupa 161 *company visit*, 15 *field visit*, 16 *roadshow* luar negeri, 5 *roadshow* dalam negeri dan 61 *conference call*.
3. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk Fitch, Moodys, S&P serta Pefindo.
4. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan *Investor Newsletter*.
5. Pengelolaan informasi terkini pada *website* Investor Relations (www.ir-bri.com) meliputi:
 - a. Informasi Perusahaan.
 - b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
 - c. *Corporate Governance*.
 - d. Informasi Terkait RUPS.
 - e. Disclosure (*Regulatory Filings*, *Events Calender*, *Release*). Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern

BRI sebagai bank terbesar di Indonesia, merefleksikan besarnya skala usaha yang harus diawasi dan dimonitor. Untuk memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka peranan auditor menjadi critical. SEVP Kepala Satuan Kerja Audit Intern memastikan tercapainya pelaksanaan internal audit yang lebih efektif dan efisien dengan penggunaan metodologi & tools audit yang inovatif serta melakukan pengawalan dan monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.

Profil SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)



Hari Siaga Amijarso
 SEVP Satuan Kerja
 Audit Intern

Lahir di Surabaya, 9 Oktober 1965. Lulusan Universitas Brawijaya tahun 1989.

Pengalaman profesional beliau adalah:

- Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 (Juli 2018 – 1 Juli 2019)
- Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta (Januari 2018 – Juni 2018)
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2015-2017)
- Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan (Agustus 2012-Oktober 2015)
- Pemimpin Cabang BRI Gresik (2010-2012)
- Pemimpin Cabang BRI Sragen (2008-2010)
- Pemimpin Cabang BRI Wonosari (2007-2008)
- Pemimpin Cabang BRI Kabanjahe (2005-2007)
- Pemimpin Cabang BRI Sidrap (2002-2004)

Dan sejak 2 Juli 2019 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President Satuan Kerja Audit Intern.

Training yang diikuti

Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar diantaranya Pendidikan dan Uji Sertifikasi QIA di Jakarta (2019), dan Risk Management (BMSR) di London (2017)

Sertifikasi

Beliau telah memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (2019) dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4.

Dasar Hukum

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk dengan dilandaskan ketentuan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

Sebagai *strategic business partner*, SKAI memberikan value bagi perusahaan dengan menyeleraskan seluruh kegiatan audit dan konsultasi dengan arah dan strategi perusahaan. Goal perusahaan sebagai *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to the Best Talent* pada tahun 2022 yang diterjemahkan ke dalam destination statement tahun 2020 sebagai *Integrated Financial Solution* untuk mendukung hal tersebut SKAI menerapkan pendekatan audit yang lebih lincah (*agility*) agar dapat meningkatkan kinerja, kualitas dan memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools audit* yang sesuai dengan *best practices*. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI juga senantiasa meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line of defense & 2nd line of defense* dalam rangka penyelarasan prioritas risiko.

Kedudukan SKAI

Secara struktural SKAI BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SKAI dipimpin oleh SEVP Satuan Kerja Audit Intern.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan SEVP SKAI

SEVP Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan SEVP SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

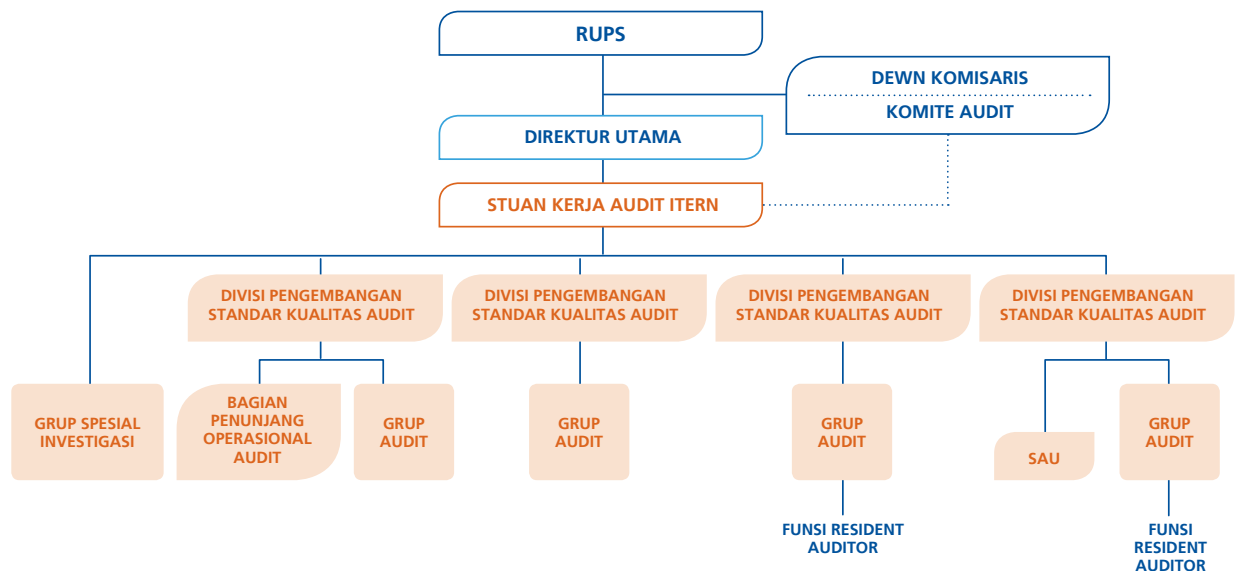
Piagam Audit Intern

SKAI memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:05-KOM/BRI/05/2019 dan Nokep S.348-DIR/SAI/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan mengacu pada International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) dari The Institute of Internal Auditors (IIA). Piagam Audit Intern BRI merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), inisiasi komunikasi SKAI dengan unit kerja yang diperiksa, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan SKAI dalam mengakses catatan, dokumen, dan fisik asset bank. Dalam hal fungsi SKAI terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, SKAI memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman utama tata kelola terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua SKAI Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Organisasi SKAI

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools audit* yang sesuai dengan *best practices*. SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang membawahi Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi, 19 (Sembilan belas) Audit Intern Wilayah dan Grup Spesial Investigasi. Berikut adalah Struktur Organisasi SKAI:

Satuan Kerja Audit Intern



SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan unit kerja yang melaksanakan pengembangan Standar & Kualitas Audit sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit sebagai berikut:
 - a. Audit Intern Wilayah
 Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai strategic business partner dengan objek audit Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Layanan Prioritas, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit di wilayah kerjanya.

Saat ini BRI memiliki 19 (Sembilan Belas) Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan 19 Kantor Wilayah BRI. Keberadaan Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan Kantor Wilayah merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai Strategic Business Partner dan fungsi assurance dapat

lebih efektif dan efisien mengingat struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.

Pada organisasi Audit Intern Wilayah juga terdapat Resident Auditor (RA) yang ditempatkan di Kantor Cabang dan BRI Unit. Penempatan RA diseluruh Unit Kerja diharapkan dapat berperan untuk memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko di Unit Kerja Operasional. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Audit Intern Wilayah dan RA, maka dalam menentukan ruang lingkup audit, Audit Intern Wilayah memperhatikan ruang lingkup dan hasil audit, serta monitoring berkala dari RA Kanca dan RA Unit. Demikian sebaliknya. Sinergi dan komunikasi yang terbangun antar Audit Intern Wilayah dan RA merupakan faktor utama dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

- b. **Audit Intern Kantor Pusat**
Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai strategic business partner dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari 50%. Audit Intern Kantor Pusat juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, dan APU PPT.
 - c. **Audit Intern Teknologi Informasi**
Melaksanakan kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai strategic business partner terhadap terhadap unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi Core dan Non Core Banking; operasional infrastruktur TSI pada Data Center, Disaster Recovery Center & seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi & kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI (pengelolaan aset & logistik, pengadaan barang dan jasa IT yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BRI) serta End User Computing).
 - d. **Grup Spesial Investigasi**
Melakukan investigasi atas indikasi fraud dan pengaduan whistleblowing system dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. Grup Spesial Investigasi berada di bawah SEVP Satuan Kerja Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada SEVP Satuan Kerja Audit Intern.
2. **Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit** melakukan penyusunan visi, misi & strategi SKAI, melaksanakan evaluasi kualitas audit oleh jajaran SKAI, pihak independen maupun internal quality assurance terhadap SKAI perusahaan anak, melaksanakan pengkajian dan perancangan software maupun hardware untuk mendukung pelaksanaan audit, melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil audit serta melakukan pengembangan dan pengelolaan analytical tools data audit.

Berikut adalah posisi 19 (Sembilan belas) Audit Intern Wilayah BRI yang tersebar di Seluruh Indonesia:



Satuan Kerja Audit Intern

Wewenang SKAI

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, dll.

Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi Liaison Officer bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit.

Tanggung Jawab Kepala SKAI

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
3. Memastikan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

4. Memastikan seluruh Kegiatan asurans dan konsultasi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
5. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
6. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
7. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
8. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern, memastikan bahwa:
 - a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - c. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank.
13. SKAI BRI sebagai perusahaan induk:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak
 - b. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
14. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada jajaran SKAI, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi.
15. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak eksternal (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan Divisi Hukum atau Legal Officer.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

Kode Etik Audit Intern BRI

SKAI BRI memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 prinsip, yaitu:

1. Integrity principle

Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern dalam melaksanakannya tugas & tanggung jawabnya.

2. Objectivity principle

Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan; Auditor Internal harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.

3. Confidentiality principle

Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi;

4. Competency principle

Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

Independensi SKAI BRI

SKAI sebagai 3rd line of defense secara struktural telah independen terhadap fungsi 1st line of defense (Unit Kerja Operasional) dan fungsi 2nd line of defense (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan). Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (communication line) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit), maka hal tersebut mendukung independensi & objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa

pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala.

Sistem Manajemen Informasi Audit

SKAI memiliki Sistem Manajemen Informasi Audit yang memadai dikenal dengan BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA). BRISMA merupakan sebuah suite application dalam bidang Manajemen Audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai dari tahap Perencanaan hingga Monitoring. BRISMA digunakan oleh jajaran SKAI sejak tahun 2012, dan pada tahun 2018 sampai dengan saat ini dilaksanakan enhancement aplikasi BRISMA Versi 2 meliputi pengembangan modul electronic working paper, reference, monitoring, catalog, plan dan human resource. Pengembangan tersebut mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit jajaran SKAI.

Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan metode *risk based audit* (RBA) dalam melaksanakan fungsi audit dengan memfokuskan pada area yang beresiko tinggi. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan risk based audit, SKAI menggunakan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools* audit untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Disamping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko fraud melalui kegiatan *monitoring off site* yang dilaksanakan Audit Intern Wilayah serta melalui kegiatan monitoring berkala yang dilaksanakan Resident Auditor. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja.

Satuan Kerja Audit Intern

Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide & masukan untuk penyempurnaan draft dan kebijakan; melakukan forum komunikasi antara Audit Intern Wilayah dan Kantor Wilayah; Program Auditor Mengajar; kegiatan konsultasi; dan *sharing knowledge*; khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh level unit kerja.

Profil Personil SKAI

SKAI terus berkomitmen mengembangkan kualitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Auditor melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pada tahun 2019, SKAI telah menetapkan standar kompetensi Auditor berbasis IIA, yang selanjutnya standar tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Auditor kedepannya. Pendidikan berkelanjutan dilaksanakan melalui on the job training, pendidikan development dan enhancement (Inclass, In House Training, Public Course dan Seminar) dan sertifikasi profesional Auditor.

1. Jumlah Auditor & Jabatannya

No	Jabatan	Jumlah
1	SEVP	1
2	Kepala Audit Intern Wilayah/KP/TI	20
3	Kepala Divisi	1
4	Wakil Kepala Audit Intern Wilayah	19
5	Wakil Kepala Divisi	1
6	Group Head	76
7	Kepala Bagian	1
8	Auditor (Senior Auditor s/d Associate Auditor)	545
9	Resident Auditor Kanca	391
10	Resident Auditor Unit	1082
11	Junior Staf	1
Total		2156

2. Sertifikasi Profesi SKAI

Satuan Kerja Audit Intern telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 20 Mei 2018 sampai dengan 4 Desember 2020. Sertifikasi tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Divisi Pengembangan Standar Kualitas Audit, Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan 19 Audit Intern Wilayah BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI menjadi strategic business partner yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

A. Sertifikasi Internasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Fraud Examiner (CFE)*	22
2	Certified Information System Auditor (CISA)*	5
3	Certified Ethical Hacker (CEH)	2
4	Certified Data Center Professional (CDCP)*	1
5	Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)*	1
6	Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	3
7	COBIT 5 Foundation Certificate	2
8	Certified Financial Planner (CFP)	1
9	Certified Statement Analysis	1
10	Certified Blockchain Business Foundations (CBBF)	1
11	Certified Investment Banker (CIB)	1

B. Sertifikasi Nasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Qualified Internal Auditor (QIA)*	35
2	Certified Bank Internal Audit (CBIA)	75
3	Certified Forensic Auditor	1
4	Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Approved	2
5	Big Data Administrator	4
6	Lead Auditor ISO 27001:2013 and ISO 19011:2011	1
7	Certified Wealth Management (CWM)	3
8	Certified Securities Analyst (CSA)	1
9	Certified Risk Professional (CRP)	1
10	Sertifikasi Kepatuhan	1
11	Certified Forensic Security Specialist (CFSS)	1
12	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	68
13	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	74
14	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	28
15	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	14

Satuan Kerja Audit Intern

3. Kualifikasi Pendidikan Formal

Kualifikasi Pendidikan Formal Jajaran SKAI



4. Pendidikan & Pengembangan Kompetensi Audit Intern BRI

Telah dilaksanakan pendidikan, public course dan seminar (baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal maupun lembaga eksternal BRI) kepada 7.811 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

a. Keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal

No	Jenis Pendidikan	Σ Peserta Pendidikan
1	Pendidikan <i>In House Training</i>	7406
2	Pendidikan <i>Public Course</i> dalam negeri	302
3	Pendidikan pembekalan audit (<i>Development</i>)	188
4	Pendidikan sertifikasi	95
5	Pendidikan <i>public course</i> luar negeri	13
TOTAL		8004

5. Partisipasi dalam Asosiasi Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional audit internal, SKAI telah berpartisipasi dalam asosiasi profesi audit internal, antara lain:

a. Keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan
Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	SEVP SKAI BRI periode Januari – Maret 2019 sebagai Ketua Umum IAIB.
	Salah satu AVP dan Senior Manager Divisi PSKA SKAI BRI sebagai Bendahara Umum IAIB dan Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

b. Daftar institusi yang melakukan *benchmarking* ke SKAI BRI selama periode tahun 2019, sebagai berikut:

No	Lembaga/Institusi	Materi <i>Benchmark</i>
1	PT Indonesia Power	<i>Governance, Risk and Compliance</i>
2	PT PLN (Persero)	Tugas Fungsi dan Mekanisme Resident Auditor
3	Direktorat Jendral Pajak	Sistem Pengendalian Intern
4	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Continuous Monitoring</i>

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SKAI

1. Program Kerja SKAI

Menindaklanjuti POJK nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, BRI telah melaksanakan pengkinian Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan menyusun Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI sebagai pedoman umum bagi SKAI yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BRI. Disamping hal tersebut, pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai program kerja yang mendukung pelaksanaan audit jajaran SKAI, antara lain:

- Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern
- Penyusunan Prosedur Audit terhadap Perusahaan Anak
- Pengkinian program audit
- Pengkinian Risk & Control Matrix
- Pengembangan *continuous auditing* melalui pengkinian indikator Monitoring Berkala.
- Pengembangan BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)
- Pengembangan tools audit seperti BRI Data Extractor (BRIDEX), Monitoring Berkala Generator dan EJ Reader.
- Pelaksanaan Quality Assurance Review di seluruh Unit Kerja Audit termasuk Perusahaan Anak.
- Penyusunan Internal Audit Hard Competency Framework
- Pengembangan SDM jajaran SKAI melalui program pendidikan yang berkelanjutan.
- Pelaksanaan SKAI Terintegrasi

2. Pelaksanaan Kegiatan/Tugas Audit

Kegiatan audit dilaksanakan sesuai Perencanaan Audit Tahun yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama serta berdasarkan hasil *assessment* terhadap potensi risiko. Selama tahun 2019, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit reguler, audit khusus (*special audit*) dan audit tematik. Secara terperinci, realisasi kegiatan audit yang telah dilaksanakan meliputi:

- Audit reguler
Objek kegiatan audit reguler SKAI terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: Unit Kerja, Jaringan Elektronik (*electronic channel*) dan aplikasi serta non aplikasi. Realisasi kegiatan audit reguler terhadap Unit Kerja adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja Audit Intern

Tabel Realisasi Audit Terhadap Unit Kerja

No	Objek Audit	Reguler Audit
1	Divisi	55
2	UKLN	3
3	Perusahaan Anak	1
4	Kantor Wilayah	22
5	Kantor Cabang Khusus	1
6	Kantor Cabang	458
7	Kantor Cabang Pembantu	605
8	Kantor Kas	358
9	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	2.334
10	SAU	19

Realisasi kegiatan audit reguler terhadap jaringan elektronik (electronic channel) adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Terhadap Jaringan Elektronik

No	Objek Audit	Target	Realisasi	%
1	Electronic channel	44.298	75.715	170,9%

Realisasi kegiatan audit reguler bidang teknologi informasi terhadap objek audit aplikasi dan non aplikasi sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Intern Teknologi Informasi terhadap Aplikasi dan Non Aplikasi

No	Objek Audit	Target	Realisasi	%
1	Aplikasi	21	23	109,5%
2	Non Aplikasi	10	10	100%

b. Audit khusus (*special audit*)

Audit khusus (*special audit*) dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu (baik atas inisiatif SKAI, manajemen, auditee atau dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan ketentuan regulator). Pada tahun 2019 SKAI telah melaksanakan 817 audit khusus.

No	Objek Audit	Special Audit
1	Divisi	12
2	Perusahaan Anak	3
3	Kantor Wilayah	39



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

No	Objek Audit	Special Audit
4	Kantor Cabang Khusus	3
5	Kantor Cabang	344
6	Kantor Cabang Pembantu	51
7	Kantor Kas	7
8	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	359
9	SAU	1

c. Audit tematik

Audit tematik dilaksanakan untuk mendapatkan profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh. Adapun pelaksanaan audit tematik pada tahun 2019 mengambil fokus sebagai berikut:

1. Audit Tematik terhadap Laporan yang Berpotensi Denda
2. Audit Tematik Resegmentasi Kredit.

EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERN TAHUN 2019

1. Pelaksanaan Tugas Audit

SKAI BRI melaksanakan program review untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh jajaran SKAI BRI guna melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

a. **Review Intern**

SKAI melaksanakan review secara berkesinambungan atas kualitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit BRI. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya target sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Review dilaksanakan dengan 3 metode yakni Quality Assurance (QA), Peer Review dan Supervisi:

1. Kegiatan QA dilakukan pada seluruh Unit Kerja Audit Fungsi Delivery, RA Kanca dan RA Unit.
2. Penilaian peer review yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan antar tim audit.
3. Supervisi yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan oleh atasan auditor pada setiap project audit.

Penilaian kualitas pelaksanaan audit tersebut merupakan salah satu Key Performance Indicator dalam penilaian kinerja.

b. **Review Ekstern**

ISO 9001:2015

SKAI berhasil mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan telah dilaksanakan surveillance untuk Unit Kerja Audit Seluruh Indonesia. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat major.

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Pelaksanaan kaji ulang oleh pihak ekstern yang independent terhadap aktivitas internal audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hasil kaji ulang terakhir diperoleh hasil bahwa aktivitas internal audit SKAI Secara Umum Sesuai (Generally Comply) terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Selanjutnya, kaji ulang akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk menilai kesesuaian dengan SPFAIB sebagaimana diatur pada POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Satuan Kerja Audit Intern

Peraturan dan Surat Edaran OJK

Telaah kesesuaian pelaksanaan aktivitas internal audit yang dilakukan oleh Audit Intern Teknologi Informasi BRI terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017, mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern TI Bank untuk meningkatkan proses kerja Audit TSI BRI dengan kesimpulan Secara Umum Sesuai (Generally Comply) terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 (Bab VIII–Audit Intern TI).

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA)

Kajian kesesuaian pelaksanaan aktivitas Audit Intern Bank Rakyat Indonesia terhadap International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) dengan kesimpulan Umumnya Sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari The Institute of Internal Auditors, dan SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Intern.

c. *Customer Satisfaction Survey (CSS)*

Pelaksanaan fungsi audit intern sesuai sistem manajemen mutu tetap berfokus pada kepuasan pelanggan/stakeholders. Salah satu pelanggan utama SKAI adalah pihak Auditee. Karenanya kepuasan Auditee tetap akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas pelaksanaan audit.

2. Wujud Koordinasi dengan Eksternal dan Komite Audit

Pelaksanaan audit terhadap BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, SKAI berperan sebagai liaison officer untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

SKAI BRI sebagai Liaison Officer bagi Auditor Eksternal dan Pihak Eksternal yang berkaitan dengan kegiatan audit melakukan hal-hal sbb:

- Komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan
- Pemenuhan data sesuai permintaan (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
- Pendampingan terhadap Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
- Menindaklanjuti setiap tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan).
- Monitoring tindak lanjut perbaikan atas temuan Pihak Eksternal secara memadai.

Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI, maka SKAI BRI melakukan komunikasi secara berkala dengan Komite Audit dalam bentuk penyampaian Laporan Triwulanan SKAI.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Satuan Kerja Audit Intern

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

SKAI secara rutin melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern serta memberikan opini kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan manajemen. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Monitoring Komitmen Manajemen

No	Hasil Monitoring RPM	Rata - rata TW III / 2019
1	Memadai	92,87%
2	Tidak Memadai	0,94%
3	Masih Dalam Proses Pemantauan	6,19%
Total		100,00%

Disamping pemantauan terhadap tindak lanjut temuan SKAI, dilakukan pemantauan progress tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan temuan Auditor Eksternal dan Pengawas. Hasil pemantauan komitmen manajemen terhadap temuan Auditor Eksternal dan Pengawas sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tindak Lanjut Atas Temuan Auditor Eksternal

No	Lembaga Pemeriksa	Σ Rekomendasi	Tindak Lanjut s.d TW IV/2019			
			Selesai	%	Dalam Pemantauan	%
1	Otoritas Jasa Keuangan	467	412	88,2%	55	11,8%
2	Badan Pemeriksa Keuangan RI	256	221	86,3%	35	13,7%
3	Bank Indonesia	164	162	98,8%	2	1,2%
4	KAP Ernst & Young	238	232	97,5%	6	2,5%

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Auditor Eksternal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan POJK.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengatur bahwa bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (partner in charge) disertai dengan opini yang diberikan.

Prosedur Penunjukkan Audit Eksternal

Prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

1. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan.
2. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan serta bertanggungjawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
3. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Fee Jasa Audit

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Perusahaan

Nama Akuntan Perusahaan:

Drs. Hari Purwantono (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684) / Danil Setiadi Handaja,
 CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008)

Alamat Kantor:

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Telp. (62-21) 5289 5000
 Fax. (62-21) 5289 4100

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Publik

Nama Kantor Akuntan Publik:

Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)

Alamat Kantor Akuntan Publik:

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Telp. (62-21) 5289 5000
 Fax. (62-21) 5289 4100
www.ey.com/id



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Nama Akuntan Publik	Nama Akuntan	Fee
2014	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.775.000.000,-
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	7.300.000.000,-
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	8.200.000.000,-
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	10.700.000.000,-

Fee Jasa Lainnya

Jasa audit lainnya yang digunakan adalah audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak pada audit 30 Juni 2019.

Besar biaya jasa audit 30 Juni 2019 yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik sebesar Rp.14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan BRI selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan
2014	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka memitigasi risiko dengan upaya yang bersifat preventif (ex-ante) serta mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di bank secara keseluruhan, BRI telah melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan, Divisi Kepatuhan Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan kantor wilayah yang berada di bawah supervisi Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan Kantor Wilayah dan fungsi kepatuhan Unit Kerja Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi Divisi Kepatuhan Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI.

Struktur Organisasi Kepatuhan BRI



Struktur Organisasi Jajaran Kepatuhan Kantor Wilayah BRI



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan BRI saat ini dijabat oleh Azizaton Azhimah yang menjabat sejak 2 September 2019 (sesuai pengangkatan saat RUPS), menggantikan A. Solichin Lutfiyanto yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 22 Maret 2018. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BRI;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Fungsi Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional.
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
 - c. Treasury.
 - d. Keuangan dan Akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang & jasa.
 - f. Teknologi dan informasi.
 - g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari oengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak professional dan objektif.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BRI pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan review (kaji ulang) dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh insan BRI mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
 - c. Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Fungsi Kepatuhan

Profil Kepala Divisi Kepatuhan BRI



**Johanes Kuntjoro
Adisardjono**

Kepala Divisi Kepatuhan

Lahir di Surakarta 11 Juni 1964. Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor.

Pengalaman Profesional

- Kepala Bagian Perencanaan Anggaran & SIM Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan BRI (2005-2008)
- Pemimpin Cabang BRI Cikampek, Kantor Wilayah Jakarta 2 (2008-2012)
- Wakil Inspektur Audit Intern BRI Medan (2012-2016)
- Wakil Inspektur Audit Intern BRI Denpasar (2016-2017)
- Inspektur Audit Intern BRI Manado (2017-2018)
- Pejabat Level Executive President di anak perusahaan BRI - PT Bahana Artha Ventura (2018-2019)
- Kepala Divisi Kepatuhan BRI (2019 - sekarang)

Training yang diikuti

- Strategic For Increasing & Maximising Profit
- Kuala Lumpur Valuation and Performance Measurement Techniques for banks
- London UK Financial Modeling Masterclass
- Melbourne Ketentuan PAT Tahun 2015 & Bidang Hukum
- Grand Kanaya Risk Based Internal Audit School
- HONG KONG Executive Education Program Tahun 2019 dengan Tema "Corporate Governance"

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (BSMR)
- Qualified Internal Audit (YPIA)

Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*)

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, BRI telah memiliki pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di BRI yang tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*). Ruang lingkup Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) antara lain:

1. Fungsi Kepatuhan Bank dan Ketentuan umum mengenai Jajaran Kepatuhan, diantaranya Independensi Jajaran Kepatuhan, Kewenangan Jajaran Kepatuhan dan Kedudukan Jajaran Kepatuhan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.
3. Pelaporan Fungsi Kepatuhan.

Pendidikan/Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2019, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

1. Pelaksanaan training, short course, seminar dan/atau workshop dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
2. Pelaksanaan In house training kepada jajaran fungsi kepatuhan Kanwil.
3. Pelaksanaan sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP).



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Fungsi Kepatuhan

Sertifikasi Kepatuhan

Selama Tahun 2019, 21 Jajaran Fungsi Kepatuhan BRI telah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan untuk meningkatkan kompetensi jajaran fungsi kepatuhan yang baru.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan 2019

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 Divisi Kepatuhan memiliki 8 (delapan) program kerja utama, antara lain:

- a. Pengembangan Sistem Anti Money Laundering & Countering Financing Terorisme BRI
- b. Pengembangan perhitungan Risk Based Approach (RBA) customer yang terintegrasi dengan data Beneficial Owner (BO)
- c. Review BPO APU & PPT Unit Kerja Operasional
- d. Menginisiasi pengembangan aplikasi Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru dan Co-Branding Satu Pintu.
- e. Enhancement GCG Online System
- f. Pengembangan sistem yang dapat menyediakan data sebagai berikut :
 - i. Jumlah nasabah incoming dan outgoing
 - ii. Jumlah transaksi beserta total transaksi incoming dan outgoing
 - iii. Jumlah nasabah PEP beserta jumlah transaksinya
 - iv. Jumlah nasabah BRI yang bertransaksi melalui e-banking, mobile banking, phone banking, teller dsb.

Pada tahun 2019, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan beberapa program kerja utama guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif dan efisien, antara lain:

1. Pengembangan alert Sistem Anti Money Laundering & Countering Financing Terorisme BRI yang memudahkan unit kerja dalam melakukan pemantauan transaksi nasabah
2. Pengembangan sistem aplikasi Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru dan Co-Branding untuk memudahkan product owner melakukan pengajuan produk dan aktivitas baru.
3. Pengembangan aplikasi GCG online system yang digunakan oleh pekerja di seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan benturan kepentingan, kode etik, komitmen dan gratifikasi.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan meliputi:

1. Review dan pengkinian kebijakan internal bank dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Identifikasi risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan putusan Direksi tidak menyimpang dari peraturan OJK/regulator/perundang-undangan yang berlaku melalui pengujian prinsip kehati-hatian.
3. Pengukuran dan pemantauan risiko berdasarkan data Manajemen Insiden atas terjadinya pelanggaran ketentuan.
4. Monitoring dan tindak lanjut kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada pihak regulator dan/atau pengawas lainnya yang berwenang.

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian

Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

Fungsi Kepatuhan

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengujian

Merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengujian Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan untuk memastikan kembali bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).

Tanggapan Aspek Kepatuhan

Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta hal lain yang memiliki issue terkait dengan risiko kepatuhan.

Resume Kebijakan Eksternal

Baik resume maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.

Analisa Dampak Kebijakan Eksternal

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka untuk memperoleh persetujuan regulator dilakukan secara satu pintu melalui Divisi Kepatuhan.

Pemantauan Komitmen

Pemantauan terhadap komitmen BRI terhadap regulator/otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Divisi Kepatuhan memantau pemenuhan seluruh komitmen dari unit kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko APU dan PPT yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan regulator, Perseroan melakukan Penerapan Program APU dan PPT secara memadai.

Dasar Hukum

Ketentuan eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Kepala PPATK), dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala Bapeten), Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta (DPPSPM) atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum Dalam DPPSPM.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT).
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Jo. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

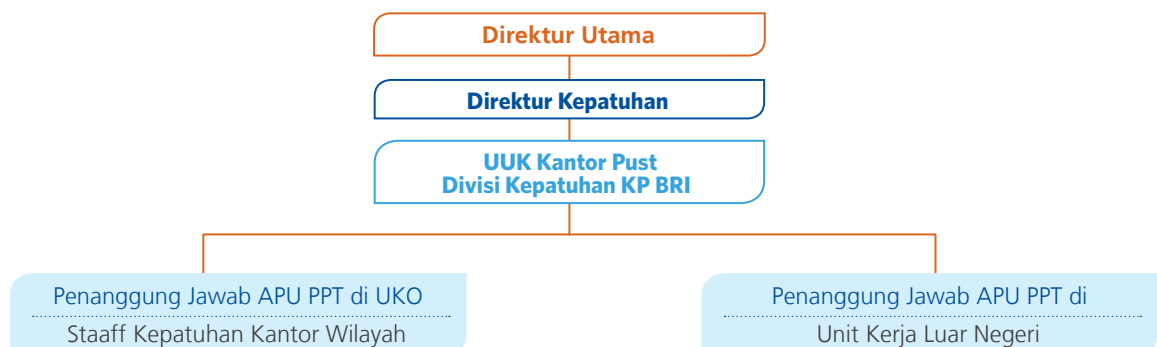
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESTAT).

Ketentuan Internal

1. Surat Keputusan Direksi BRI No. PP.01-DIR/KPT08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) BRI.
2. Surat Keputusan Nomor: BP.13-DIR/KPD/05/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Customer Due Diligence (CDD)
3. Surat Edaran Nomor: SE.09-DIR/KPT/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Petunjuk Teknis No. JN.03-KPD/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Aplikasi Risk Based Approach (RBA) APU dan PPT.

Pengelola APU-PPT

Penanggungjawab Penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Kepatuhan KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU-PPT di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU-PPT Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dijabat oleh Staff Kepatuhan Kantor Wilayah, dimana pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan KP BRI.



Tugas Dan Tanggung Jawab Pengelola APU-PPT

Tugas dan Tanggung Jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL);
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9. Melakukan koordinasi pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
10. Memantau rekening efek dan pelaksanaan transaksi nasabah kustodian;
11. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek;
12. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan regulator;
13. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
14. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
15. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja;
17. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri untuk disampaikan kepada PPAK;
18. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
19. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan
20. Berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPAK, dan Aparat Penegak Hukum).

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional adalah:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan Tunai.
3. Memonitor pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
4. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan Anti Tipping-Off.
5. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit kerja operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
6. Menerima, dan memverifikasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

7. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pekerja unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
8. Berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Sosialisasi APU-PPT

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengadakan In House Training kepada seluruh Kepala bagian dan staf Kepatuhan di Kantor Pusat maupun kantor wilayah, perwakilan jajaran operasional dan Relationship Manager Dana Kantor Cabang BRI dan Divisi terkait dengan menghadirkan pembicara dari pihak eksternal seperti PPATK, BNN dan KPK.
2. Pelaksanaan self-learning dengan materi APU PPT selama 2 kali dengan materi Know Your Customer (KYC).

Implementasi APU-PPT 2019

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
 - Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
 - Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai Politically Exposed Person (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Walk In Customer (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT;
 - b. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
 - Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT;
 - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
 - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Divisi Kepatuhan KP BRI atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator;
 - Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti frontliner, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi;
 - Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
 - Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko BRI.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
 - a. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) terkait dengan Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi (delivery channels);
 - b. Uji Tuntas Nasabah/Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan Walk In Customer (WIC);
 - c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - e. Pengkinian dan pemantauan;
 - f. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - g. Pelaporan kepada PPATK.
3. Pengendalian Intern
 - a. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 - b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT; dan
 - c. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - a. Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT
 - b. Aplikasi Penilaian Risk Based Approach (RBA) untuk menilai kategori risiko Nasabah dan Unit Kerja Operasional BRI terkait APU dan PPT.
 - c. Sistem APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (TKL).
 - d. Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - e. Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi.
 - f. Aplikasi pencatatan profil dan transaksi Walk In Customer (WIC).
 - g. Aplikasi pelaporan Suspicious Transaction Report (STR) dan Cash Transaction Report (CTR) WIC online.
 - h. Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI wajib melakukan: Prosedur penyaringan (pre-employee screening) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE).

Pelatihan

- a. Pelatihan terkait Penerapan Program APU dan PPT sebagai materi wajib (mandatory) dalam pelaksanaan pendidikan terhadap pekerja baru di BRI.
- b. Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (online base) maupun melalui pertemuan tatap muka.
- c. Pelatihan secara elektronik (online base) dapat menggunakan media e-learning baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan oleh BRI dengan materi tertentu pada setiap tahun. Pada tahun 2019, telah melaksanakan e-learning Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Dilligent (CDD).
- d. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan misalkan melalui atap muka secara interaktif (misal In House Training/IHT) dengan topik Penerapan Program APU dan PPT tertentu sesuai kebutuhan pekerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

In House Training APU dan PPT pada tahun 2019 telah dilakukan di Seluruh Kantor Wilayah BRI dan Kantor Cabang Khusus (KCK). Adapun jadwal yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

No	Kanwil	Tanggal Pelaksanaan
1	Jakarta 1 & KCK	8-9 April 2019
2	Jakarta 2	15-16 April 2019
3	Jakarta 3	15-16 April 2019
4	Malang	22-23 April 2019
5	Pekanbaru	25-26 April 2019
6	Lampung	2-3 Mei 2019
7	Denpasar	17-18 Juni 2019
8	Yogyakarta	1-2 Juli 2019
9	Semarang	4-5 Juli 2019
10	Surabaya	8-9 Juli 2019
11	Bandung	11-12 Juli 2019
12	Banda Aceh	15-16 Juli 2019
13	Makassar	18-19 Juli 2019
14	Medan	22-23 Juli 2019
15	Padang	25-26 Juli 2019
16	Palembang	1-2 Agustus 2019
17	Jayapura	5-6 Agustus 2019
18	Banjarmasin	8-9 Agustus 2019
19	Manado	19-20 Agustus 2019

1. Telah melaksanakan In House Training yang turut mengundang pula seluruh Perusahaan Anak untuk ikut dalam Pendidikan Enhancement Program Special Request Penerapan Program APU dan PPT Terkait Kewajiban Pelaporan Dan Pemenuhan Informasi/data Kepada PPATK atau Aparat Penegak Hukum pada tanggal 25 s/d 26 April 2018 di BRI Corporate University, dengan Nara Sumber dari PPATK.
2. Telah melaksanakan In House Training Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kantor Wilayah Tahun 2019 "Penguatan Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam Rangka Menghadapi Era Digital" pada tanggal 7,8, dan 9 Oktober 2019.
3. Telah melaksanakan workshop penyesuaian Risk Based Approach (RBA) Bank dan Kebijakan Penerapan Program APU & PPT pada tanggal 23, 27, dan 28 November 2019.
4. Telah melaksanakan Workshop Penyesuaian Ketentuan Penerapan Program APU dan PPT, dengan mengundang seluruh perusahaan anak dan Divisi terkait 28 Februari s/d 02 Maret 2018 di Kantor Wilayah BRI Bandung.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsi intermediary dan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, Bank menghadapi risiko pengelolaan bisnis yang cukup besar, diantaranya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu tata kelola risiko yang handal, Direktorat Manajemen Risiko bertanggungjawab atas tercapainya penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan, pengelolaan kualitas Non Performing Loan yang efektif, terlaksananya implementasi sustainable finance sesuai milestones serta terlaksananya budaya manajemen risiko.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal didukung satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko Bank

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/ POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Surat Keputusan Nokep: 72 DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Keputusan No. PP.04-DIR/EMP/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terintegrasi (SK Direksi BRI Nokep: S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), dan telah dikaji ulang pada tahun 2019 sesuai dengan Surat Kaji Ulang KUMR Nomor B.1598-DIR/EMP/10/2019, Tanggal 31 Oktober 2019.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
 - b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.
 - e. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko *Enterprise Risk Management*

Manajemen Risiko

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Prinsip dan Penerapan Manajemen Risiko Pilar 1 Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Komite Pengawas Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pengawasan Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pengawas Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 22 Januari 2019, 7 Mei 2019, dan 23 Juli 2019.

Pengawasan Direksi

1. *Risk Management Committee* dilaksanakan berkala secara triwulanan dan telah dilaksanakan selama periode 2019 meliputi:
 - a. RMC I tanggal 4 Maret 2019
 - b. RMC II tanggal 27 Juni 2019
 - c. RMC III tanggal 25 September 2019
 - d. RMC IV tanggal 27 Desember 2019
 - e. RMCT tanggal 25 Mei 2019
 - f. RMCT tanggal 12 Desember 2019
2. Forum ALCO terkait dengan pembahasan ekonomi makro serta kondisi dan pencapaian *asset & liability* yang dilakukan minimal 1 bulan sekali atau sebanyak 12 kali selama periode tahun 2019.
 - a. ALCO I tanggal 9 Januari 2019
 - b. ALCO II tanggal 7 Februari 2019
 - c. ALCO III tanggal 14 Maret 2019
 - d. ALCO IV tanggal 11 April 2019
 - e. ALCO V tanggal 9 Mei 2019
 - f. ALCO VI tanggal 20 Juni 2019

- g. ALCO VII tanggal 12 Juli 2019
- h. ALCO VIII tanggal 8 Agustus 2019
- i. ALCO IX tanggal 12 September 2019
- j. ALCO X tanggal 11 Oktober 2019
- k. ALCO XI tanggal 13 November 2019
- l. ALCO XII tanggal 12 Desember 2019

3. *Business Performance Review* (BPR) kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BRI secara nasional, kinerja seluruh unit kerja bisnis (Kantor Wilayah dan KCK serta seluruh Divisi Bisnis Kantor Pusat) serta program-program kerja strategis lainnya yang dilakukan secara bulanan dalam rangka pencapaian kinerja yang melibatkan Direksi, SEVP, Pimpinan Wilayah, Inspektur, Kepala Divisi dan Kepala Desk. Pelaksanaan BPR selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. BPR I tanggal 13 Februari 2019
 - b. BPR II tanggal 13 Maret 2019
 - c. BPR III tanggal 24 April 2019
 - d. BPR IV tanggal 22 Mei 2019
 - e. BPR V tanggal 12 Juni 2019
 - f. BPR VI tanggal 10 Juli 2019
 - g. BPR VII tanggal 14 Agustus 2019
 - h. BPR VIII tanggal 28 Oktober 2019
 - i. BPR IX tanggal 11 Desember 2019

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit (SEBI 15/15)

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Surat Keputusan No PP. 04 -Dir /EMP/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Pilar 3 Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko
Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambilan keputusan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

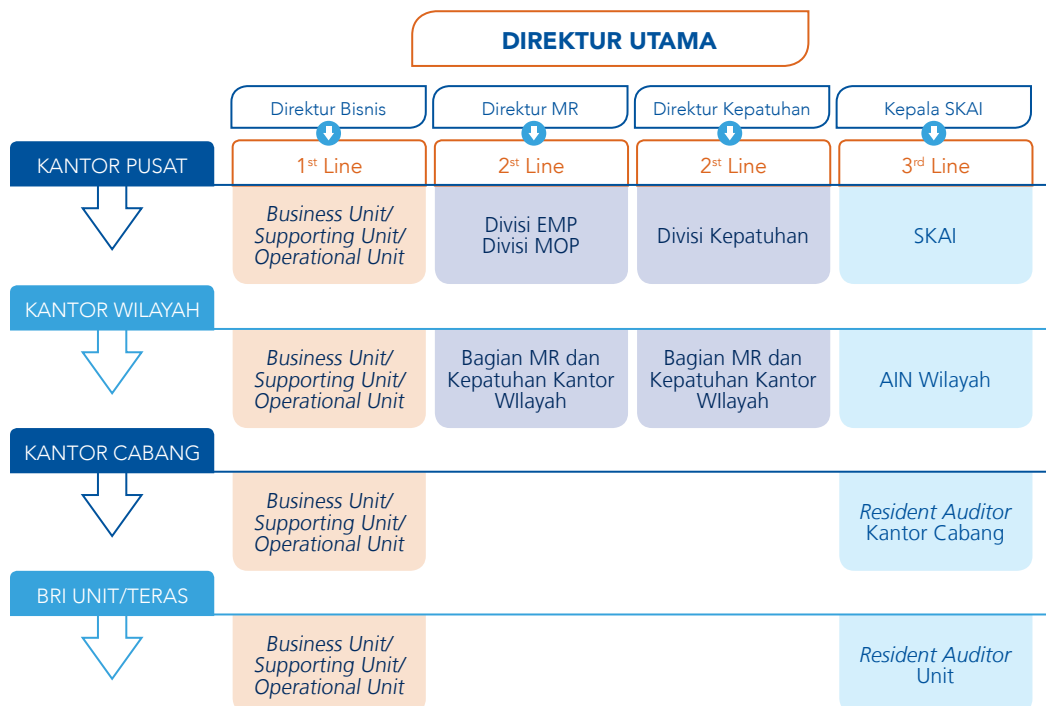
Manajemen Risiko

- b. Laporan memuat informasi mengenai total eksposur risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan limit, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.
2. Manajemen Data Risiko
Manajemen data risiko merupakan pengelolaan data risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersediaan, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen Risiko.

Sistem Informasi diantaranya meliputi: BRINETS, Cognos, BRISIM, Dashboard *Loan Portfolio Guideline* (LPG), BRIOPRA Dashboard Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan Dashboard Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain. BRI *Operational Risk Assessor* (BRIOPRA), *Early Warning Indicator*, *Dashboard* Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan *Dashboard* Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI diterapkan dengan menggunakan konsep *Three Line of Defense*, dengan rincian sebagai berikut:



Manajemen Risiko

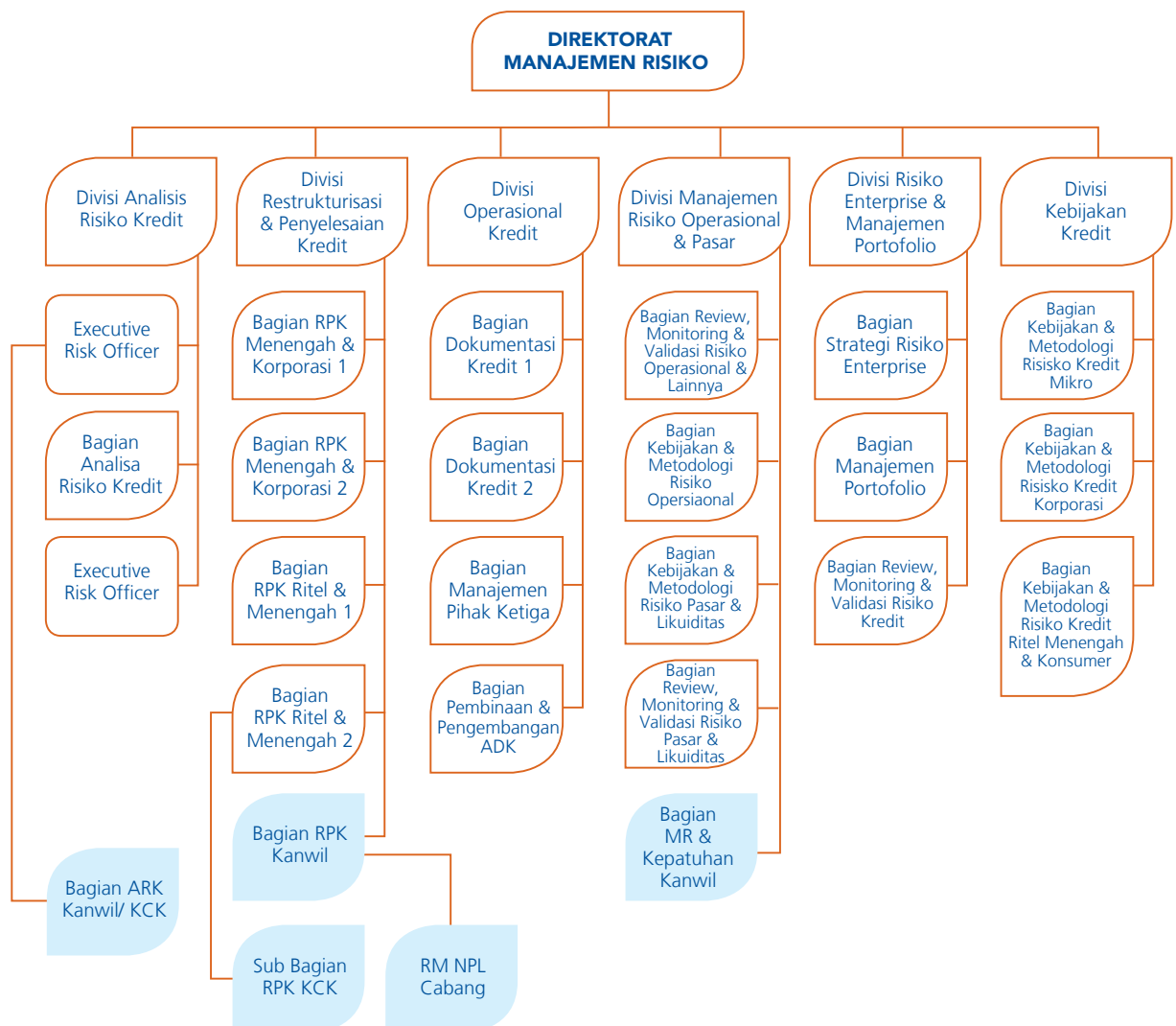
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI

Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi meliputi:

1. Ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi BRI baik risiko keseluruhan maupun per jenis risiko.
2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Ketersediaan informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan BRI sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2019, struktur fungsi Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Manajemen Risiko dengan rincian data sebagai berikut :





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Profil Kepala Divisi Fungsi Manajemen Risiko



Kristina Lestari N.

Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio

Lahir di Jakarta 5 Maret 1965 lulusan S 1 Fakultas Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor tahun 1988, S2 MBA J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, Atlanta, Georgia - USA 1998, dan S3 Doktor Manajemen Strategik, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2017.

Pengalaman Profesional

- Wakil Kepala Divisi Bisnis Korporasi BRI
- Wakil Pimpinan Wilayah Bisnis, Kantor Wilayah BRI Bandung
- Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis, Kantor Wilayah BRI Jakarta 3
- Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1
- Kepala Divisi Transaksional Banking BRI
- Direktur Keuangan, Human Capital dan Logistik PT Bringin Gigantara
- Kepala Divisi Corporate Development dan Strategy BRI

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio

Training yang diikuti

- Corporate Credit and Cash Flow Analysis, Euromoney, London UK
- Valuation, Euromoney, Dubai, United Emirat Arab
- SIBOS Global Payment, Toronto, Canada
- Sespibank LPPI Jakarta

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Level 2 dan Level 3 di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP
- Sertifikasi General Banking level 3, LPPI



Heri Supriyadi

Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar

Lahir di Purbalingga, 10 Oktober 1965, memperoleh gelar S1 Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman tahun 1989, MBA Gatton Collage of Bussiness and Economic, University of Kentucky tahun 2000, dan S2 Master Manajemen Universitas Gadjah Mada tahun 2001.

Pengalaman Profesional

- Kepala Bagian Operasional Risk Management Methodology
- Pemimpin Cabang BRI
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar
- Wakil Kepala Divisi Manajemen Risiko BRI

Saat ini menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar BRI sejak tanggal 1 Juli 2017.

Training yang diikuti

- Becoming A Leader of Leaders: Pathways for Success by ACT Consulting
- International Conference on Risk Management as an Interdisciplinary Approach by ACISE-ICRMIA dan Undip, Semarang
- Assesment Center Assessor Certification by PPM Jakarta
- Integration of GRC – Governance Risk Management Compliance, International Public Course by CRMS, New Zealand.
- Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared for Upcoming Regulations. Risk Management Certification Refresher Program by BARa. Jakarta
- Market Innovation for Sustainable Finance: 2016 International Sustainable Finance Forum by OJK and IFC. Denpasar
- Developing and Applying an Integrated Stress Testing Framework. Seminar by KPMG and SAS Institute. Jakarta
- A Symbiotic Relationship to Achieve the Effective Risk Management. Internal Audit and Risk Management Seminar. Held by IBI, IAIB and BARa

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 oleh BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan 4 oleh LSPP
- Sertifikasi Assessor BRI untuk Kompetensi Pekerja

Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh three line of defense, yaitu seluruh risk taking unit selaku first line, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku second line dan unit internal audit selaku third line. Pada triwulan IV 2019 peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat low to moderate, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Berikut tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko:

1. Penyusunan metodologi manajemen risiko enterprise, manajemen risiko operasional, manajemen risiko pasar, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko terintegrasi
2. Penyusunan dan analisa profil risiko, tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, credit risk rating & scoring dan validasi metodologi risiko kredit
3. Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS)
4. Penyusunan Recovery Plan (Rencana Aksi)
5. Penyusunan dan analisa loan portfolio guideline (LPG), sustainability finance, risk based pricing, dan stress testing
6. Menyusun, menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan/ketentuan/prosedur dan metodologi proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian termasuk validasi data, strategi manajemen risiko, profil risiko, stress testing, dan memantau risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya) Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/Business Continuity Management (BCM)
7. Menilai kecukupan pengelolaan risiko atas produk dan/atau aktiva baru yang diusulkan unit kerja
8. Penyelenggaraan Risk Management Committee (RMC) individu dan terintegrasi

Pengembangan dan Pendidikan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Pendidikan/Pengembangan Kompetensi

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pengantar Manajemen Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko
3. Public Course dan IHT Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Kanwil.
4. BRILian Shine Manajemen Risiko
5. In House Training Direktorat Manajemen Risiko
6. Sharing Session Business Continuity Management (BCM)
7. Managing Market Risk
8. Basic Risk Management
9. Basel Capital Requirement, Covering Operational Credit & Market Risk Capital and Internal Capital Assessment Adequacy Process (ICAAP)
10. Aligning Business with Risks and Compliance
11. Management Treasury Risk
12. Strategi, Peluang dan Risiko Perusahaan - Transformasi Digital
13. Derivatif Market Dynamic
14. Fraud Management
15. Implementing GRC
16. Risk Control Self Assessment
17. Risk Management Outlook 2020 "Strengthening Risk Mitigation Amid Global Downturn"
18. Aligning Business Strategy with Governance, Risk & Compliance
19. Attachment Manajemen Portfolio & Instrumen Keuangan untuk Banking Book, Pasar Uang & Likuiditas BNP Paribas Singapore



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

20. Pendidikan Special Request In House Training Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) 2019
21. GRI Standard Certified Training Sustainable Report
22. ISO 31000 Enterprise Risk Management Implementing
23. Oportunity & Risk In Digital Banking

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan Sertifikasi dan Pejabat yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Level Sertifikasi	Peserta
1	1	482
2	2	325
3	3	93
4	4	40
TOTAL		940

JENIS RISIKO DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 Risiko yang dikelola BRI dalam Konglomerasi Keuangan yaitu:

1. RISIKO KREDIT

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Proses putusan kredit diatas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris
- b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
- c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan, khususnya risiko kredit.
- d. Pelaporan profil risiko triwulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- a. Ketentuan Loan Portfolio Guideline (LPG)
- b. Penentuan limit risiko di level korporat (risk appetite statement) mengenai NPL, dan NPL Coverage
- c. Ketentuan PDWK berjenjang

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. **Identifikasi** risiko kredit dilakukan menggunakan sistem Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur existing BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja

Manajemen Risiko

yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau review atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode back testing.

- b. **Pengukuran** risiko kredit dilakukan dengan internal model menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung probability of default dan loss given default untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengembangan Internal Rating Based Approach (IRBA). Selain itu, serangkaian Stress Test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress. Stress test tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan guidance melalui Loan Portfolio Guideline (LPG), sehingga dengan adanya LPG ini akan membuat pemberian kredit menjadi lebih terarah sesuai potensi masing-masing unit kerja.
- c. **Pemantauan** risiko kredit dilakukan melalui proses monitoring portofolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja monitoring risiko kredit di kantor pusat. Monitoring portofolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, CL, komposisi Loan at Risk (LAR), Credit Cost, NPL Coverage Ratio, PH, Recovery Income, dan Recovery Rate.
- d. **Pengendalian** risiko kredit dilakukan melalui:
 1. Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa Agunan, dimana harus mematuhi ketentuan minimum loan to value atau minimum coverage terhadap pinjaman
 2. Penilaian agunan menjadi lebih terarah melalui aplikasi Collateral Data Management (CODAM)
 3. Risiko kredit menjadi lebih terkendali melalui sustainable finance (Green Banking) yang mengintegrasikan risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola ke dalam aspek ekonomi/bisnis yang selama ini telah berlangsung, sehingga

pembiayaan yang diberikan dapat memperhatikan praktek bisnis yang tidak merusak lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan tata kelola yang baik

4. Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi
5. Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan
6. Prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Four Eyes Principles: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
- b. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi
- c. Penggunaan aplikasi Loan Approval System (LAS) yang meliputi identifikasi risiko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
- d. Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portofolio kredit per segmen.
- e. Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

2. RISIKO PASAR

Merupakan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan kondisi pasar. Variabel pasar yang dikelola BRI terdiri dari suku bunga, nilai tukar termasuk transaksi derivatif dan perubahan harga option.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- b. Rapat Komite Pengawas Manajemen Risiko yang dilaksanakan setiap triwulan



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

- c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- d. Forum ALCO sebagai bentuk pengawasan aktif yang dilaksanakan setiap bulan
- e. Pelaporan Dashboard Profil Risiko Pasar dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- a. Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (PPMPRP)
- b. Perumusan Kode Etik Pasar (Market Code of Conduct)
- c. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar yang tertuang dalam Limit Profil Risiko Pasar dan Limit Aktivitas Treasury (termasuk Unit Kerja Luar Negeri)
- d. Penetapan Market Risk Conversion Factor (MRCF)
- e. Kebijakan Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB)
- f. Kebijakan terkait aktivitas Bisnis Treasury lainnya melalui Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Treasury, ALM Policy, Surat Edaran terkait Lindung Nilai (Hedging)

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi

1. Perhitungan Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar menggunakan metode standar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai Trading Book dan Banking Book. Untuk Instrumen yang diklasifikasikan sebagai Banking Book, BRI telah menyusun kebijakan Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) yang telah disesuaikan dengan regulator.
2. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
 - I. Risiko Spesifik (Specific Risk) dari setiap penerbit efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi long atau posisi short. Dengan demikian proses saling hapus (offset) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;

- II. Risiko Umum (General Market Risk) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau posisi short dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
3. Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean price) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (accrued interest). Perhitungan present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik Trading Book dan Banking Book dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN).
4. Faktor Risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam perhitungan Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) yaitu:
 - a. Repricing Risk yaitu Risiko kerugian yang disebabkan adanya perbedaan waktu antara repricing aset dan repricing liabilitas apabila terjadi perubahan suku bunga.
 - b. Basis Risk
Basis risk adalah risiko kerugian karena penggunaan indeks suku bunga yang berbeda antara aktiva dan passiva.
 - c. Option Risk
Option Risk merupakan Risiko yang muncul dari fitur opsi (option) posisi derivatif atau komponen pilihan (optional) yang melekat pada sebagian besar aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif yang dapat mengubah tingkat dan waktu dari arus kas.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) antara lain:

Manajemen Risiko

- a. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
- b. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (price movement) secara aktual dan atau potensial.
- c. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profit).
- d. Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/ FRAs.
- e. Seluruh efek utang dengan suku bungatetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan Negotiable Certificates of Deposits) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (Repo/ Securities Lending).
- f. Posisi valuta asing BRI dalam trading book dan banking book yang terekspos risiko nilai tukar.

b. Pengukuran

1. Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) menggunakan pendekatan metode pengukuran standardized dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII) secara berkala atau setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga.
2. Valuasi portofolio trading book dan banking book dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrument yang diperdagangkan secara aktif (mark to market). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar

(mark to market) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (mark-to-model).

3. Melakukan stress testing risiko pasar secara berkala atau sesuai dengan keadaan pasar

c. Pemantauan dan Pengendalian

Dalam melakukan proses manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum Asset & Liability Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC) serta laporan eksposur risiko pasar melalui dashboard profil risiko pasar.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

- a. Pemisahan fungsi front, middle and back office. Fungsi manajemen risiko pasar terdiri dari unit kerja front office (Divisi Bisnis Treasury), middle office (Divisi MOP), dan back office (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan sebagai berikut:
 1. Jajaran front office berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
 2. Jajaran middle office menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (market price) yang digunakan untuk mark-to-market (MTM).
 3. Jajaran back office melakukan settlement transaksi treasury dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b. BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi treasury and market risk (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi front office, middle



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

office dan back office. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan monitoring eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi dealer, limit open position, Limit Uncommitted Credit Line (UCL), cut loss limit, stop loss limit dan limit lainnya. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/trading.

- c. Integrasi antara pelampauan limit risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Merupakan risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Pelaksanaan Rapat ad-hoc mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
- b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
- d. Pelaksanaan forum ALCO setiap bulan
- e. Pelaporan hasil monitoring profil risiko likuiditas dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- a. Tersedianya kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
- b. Tersedianya Kebijakan pengelolaan likuiditas yaitu ALM Policy, SE Pengelolaan Risiko Likuiditas, Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Treasury, dan BPO Treasury.

- c. Petunjuk teknis dan penentuan parameter limit risiko Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- d. Petunjuk teknis dan penentuan parameter limit risiko Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- e. Penetapan parameter Limit Profil Risiko Likuiditas

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui dashboard profil likuiditas harian.
- b. Pengukuran risiko likuiditas secara berkala dengan menggunakan proyeksi arus kas, profil maturitas, dan rasio-rasio likuiditas
- c. Pengendalian risiko melalui Protokol liquidity contingency plan dan pelaksanaan uji coba secara berkala
- d. Melakukan stress testing risiko likuiditas

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

- a. Sistem monitoring posisi likuiditas harian melalui Dashboard Profil Risiko Likuiditas
- b. Integrasi antara pelampauan limit risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.
- c. Evaluasi dan Analisis Strategi Pendanaan yang dilakukan melalui Forum ALCO dan kajian-kajian risiko likuiditas
- d. Penetapan kewenangan pejabat dalam melakukan aktivitas pengelolaan likuiditas

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Kejadian Risiko Operasional merupakan kejadian risiko yang melekat pada setiap proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank dan dapat memicu terjadinya Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko lainnya apabila tidak dikelola dengan baik.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui Pelaksanaan forum Risk Management Committee (RMC) triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan, dalam rangka

Manajemen Risiko

membahas potensi kejadian risiko, efektifitas kontrol, tindak lanjut, dan mitigasi risiko. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut apabila terjadi pelampauan limit Risiko.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kelancaran aktivitas operasional dan bisnis Bank didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap produk dan aktivitas Bank, termasuk penetapan Limit approval untuk transaksi yang diberikan berjenjang. Pengelolaan Risiko Operasional berpedoman Risk Appetite Statement dan limit Risiko yang telah ditetapkan untuk setiap parameter Risiko Operasional.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui penetapan risk issue di setiap aktivitas fungsional Bank yang dilakukan masing-masing Unit Kerja selaku Risk Owner.
- b. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan baik terhadap historis kerugian atas Risiko Operasional maupun terhadap predictive risk ke depan.
- c. Pemantauan profil risiko dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja selaku Risk Owner terhadap Key Risk Indicator dan Dashboard Pemantauan Risiko di setiap aktivitas fungsional Bank yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengendalian Risiko dilakukan antara lain melalui:
 - Penetapan dan monitoring Rencana Tindak Lanjut atas setiap kejadian Risiko Operasional
 - Risk Self Assessment atas setiap produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh Product Owner dan Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko untuk setiap produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Protokol Business Continuity Management untuk kejadian yang bersifat katastrofik.

Tim Manajemen Krisis (TMK) berperan dan bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam kondisi bencana. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yang meliputi TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, dan TMK Kantor Cabang.

Dalam rangka mendukung penerapan proses manajemen risiko, BRI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional melalui aplikasi BRIOPRA, dengan cakupan meliputi:

- a. Risk & Control Self Assessment (RCSA)
Merupakan Risk & Control Library atas Risiko Operasional, sekaligus menampilkan Profil Predictive Risk Risiko Operasional di setiap Unit Kerja.
- b. Manajemen Insiden (MI)/ Loss Event Database (LED)
Merupakan database insiden/kerugian Risiko Operasional yang bertujuan untuk mengelola Risiko Operasional yang dihadapi beserta pengelolaannya melalui dokumentasi dan pemantauan progress pelaksanaan Rencana Perbaikan yang dilakukan. Sistem Informasi ini juga merupakan sumber data dalam mensimulasikan beban modal untuk Risiko Operasional.
- c. Key Risk Indicator (KRI)
Merupakan Dashboard Pemantauan Risiko Operasional yang terdapat di setiap Unit Kerja yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi Risiko.
- d. Forum Manajemen Risiko
Merupakan dokumentasi atas pembahasan identifikasi, pencegahan, dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja selaku Risk Owner.
- e. Maturitas Penerapan Manajemen Risiko
Merupakan tools untuk melakukan Risk Self Assessment terhadap tingkat Maturitas penerapan Manajemen Risiko Unit Kerja.
- f. Capital Calculation
Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mensimulasikan beban modal Risiko Operasional, termasuk dalam rangka kepentingan Operational Risk Economic Capital.
- g. Dashboard Mobile
Merupakan Dashboard Profil Risiko Unit Kerja atas hasil pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Operasional.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Risiko Operasional BRI dilakukan melalui, antara lain:

- Pemisahan fungsi Maker-Checker-Signer dalam aktifitas operasional perbankan, dimana approval sebagian besar proses operasional telah embedded dalam system Core Banking, Asset Management maupun HR MIS.
- Pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin
- Kaji ulang terhadap Penerapan Manajemen Risiko Operasional secara rutin.

5. RISIKO KEPATUHAN

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan, antara lain:

- Piagam Kepatuhan (Compliance Charter)
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terhadap Rencana Kebijakan dan/ atau Keputusan BRI oleh Direktur Kepatuhan dan Jajaran Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja
- Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Kebijakan tentang Benturan Kepentingan
- Kebijakan tentang Kode Etik
- Kebijakan tentang Program Pengendalian Gratifikasi
- Kebijakan tentang Whistleblowing System
- Divisi Kepatuhan sebagai koordinator risiko kepatuhan melakukan uji prinsip kehati-hatian terhadap seluruh kebijakan internal BRI yang ditetapkan oleh Direksi.

- Parameter dan limit risiko hukum telah ditetapkan dan di-review secara berkala setiap tahun

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Melakukan identifikasi risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah berdasarkan kompilasi dari UKO, kepada Divisi Kepatuhan
- Proses manajemen risiko kepatuhan didukung dengan sistem informasi yang memadai antara lain:
- Aplikasi AML (Anti Money Laundering) digunakan untuk monitoring suspicious transaction.
- Aplikasi otomasi Pengujian Kepatuhan digunakan untuk melakukan proses pengujian dan monitoring progress pengujian
- Aplikasi GCG Online digunakan untuk pelaporan terhadap komitmen, gratifikasi, kode etik, benturan kepentingan dan annual disclosure oleh Unit Kerja
- Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT.
- Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.
- Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengelola risiko kepatuhan memiliki kompetensi yang memadai dan mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan level jabatan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang independent (independent review) oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan. Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

Manajemen Risiko

6. RISIKO HUKUM

Merupakan risiko yang menyebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan karena adanya tuntutan hukum, dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui Pelaksanaan forum Risk Management Committee (RMC) triwulanan yang dapat berupa pembahasan mengenai kasus hukum yang material serta pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya. Selain itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris juga dilakukan melalui Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Divisi Hukum telah menyusun Pedoman Hukum yang disosialisasikan ke seluruh Unit Kerja.
- Kewenangan pendampingan kasus hukum bri telah diatur menjadi kewenangan Divisi Hukum Kantor Pusat dan Legal Officer di Kantor Wilayah.
- Parameter dan limit risiko hukum telah ditetapkan dan di-review secara berkala setiap tahun

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
- Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Operasional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Wilayah melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
- Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja Operasional.
- Sistem Informasi Risiko Hukum dipantau oleh Divisi Hukum dan Legal Officer Kantor Wilayah melalui Aplikasi Legal Database.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Divisi Hukum secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- Divisi Hukum sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
- Divisi Hukum memberikan advis/ opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/ agreement antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/ agreement ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
- Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai
- Divisi Hukum bekerja sama dengan legal officer (LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
- Divisi hukum menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
- Pembinaan staf pada Unit Kerja operasional (UKO) di Kantor Wilayah dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.
- Legal officer (LO) di Kantor Wilayah memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Hukum.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

- h. Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
- i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Hukum mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
- j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai contingency plan harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
- k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi MOP terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui Dashboard Profil risiko
- l. Kaji ulang terhadap Penerapan Manajemen Risiko Hukum dilakukan secara rutin.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Divisi Hukum telah mengeluarkan Kompilasi Resume ketentuan yang dikeluarkan Divisi Hukum. Kompilasi tersebut memuat resume ketentuan/panduan yang dikeluarkan oleh Divisi Hukum yang meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, Legal Manual dan Buku Saku Hukum. Kompilasi tsb dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja operasional untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi BRI dari risiko hukum.

7. RISIKO STRATEJIK

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, monitoring pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris

dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulanan.

Materi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Corporate Development and Strategy dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penyelenggaraan Joint Planning session pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat.

Penyelenggaraan Workshop Penyelarasan (Alignment) Rencana program kerja strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.

Penerapan Performance Management BRI dengan pendekatan Balanced Scorecard, melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.

Monitoring Strategic Initiatives Perusahaan oleh Unit Kerja Project Management Office. Strategic Initiatives yang dimaksud adalah program kerja non rutin yang bersifat sangat strategis dan critical, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.

Pembentukan Tim Corporate Plan dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022.

Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & Performance Management yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.

Manajemen Risiko

Monitoring dan review pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi Corporate Development and Strategy secara berkala. Review juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih behind schedule akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyalarsan /akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan support. Penyalarsan dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi Corporate Development and Strategy.

8. RISIKO REPUTASI

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi beserta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan. Prosedur penanganan aduan (Complaint Handling) dengan SLA tertentu.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat jumlah pemberitaan negative terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, call center dan rating perusahaan.

- Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (vulnerabilities) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.
- Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negative di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
- Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Seksi Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
- Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Layanan dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan negative dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.
- Parameter dan limit risiko reputasi telah ditetapkan dan di-review secara berkala setiap tahun

Pilar 4 Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang independent (independent review) oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi.

9. RISIKO TRANSAKSI INTRA GROUP

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- a. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Direksi BRI membentuk Risk Management Komite Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
- c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 1. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
- d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

- a. Surat Keputusan Nokep: DIR 313-DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dan Perusahaan Anak.
- b. Surat Keputusan No. PP.04-Dir/EMP/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk.
- c. Surat Keputusan Risk Management Komite Nokep: 807-DIR/CDS/11/2019 tanggal 26 November 2019.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
- c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya
- d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-group memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Intern dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

10. RISIKO ASURANSI

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- a. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.

Manajemen Risiko

- b. Direksi BRI membentuk Risk Management Comitte Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI
- c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 1. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
- d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

- a. Surat Keputusan No PP. 04 -Dir/EMP/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Surat Keputusan no 807-DIR/CDS/11/2019 tentang Risk Management Comitte (RMC)

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pengukuran Risiko Inheren Asuransi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
- c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan BRI
- b. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

TARGET DAN PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO 2019

Kegiatan Kerja Program Kerja Risiko

1. Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS)

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), toleransi Risiko (Risk Tolerance) dan limit Risiko BRI yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengendalian Risiko secara efektif. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BRI secara keseluruhan.

Risk Appetite ditetapkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (zero tolerance) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. Risk Appetite dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

Penetapan Risk Appetite digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

2. Penyusunan Recovery Plan

Sebagai salah satu Bank yang telah ditunjuk sebagai Domestic-Systemically Important Banks (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat berbagai mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank-bank Sistemik.

Dalam Gambaran Umum Bank, BRI telah melakukan analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan scorecard materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan lini bisnis, peringkat perusahaan anak dan jaringan kantor. Untuk keterkaitan usaha eksternal, BRI melakukan analisis berdasarkan aspek (1) Intra-financial system assets, (2) Intra-financial system liabilities, dan (3) securities outstanding serta 10 (Sepuluh) counterpart signifikan (Obligor, Deposan, Treasury Counterparties) sesuai dengan common practice yang ada. Untuk analisis skenario dampak perubahan sistemik, BRI melakukan aktivitas Stress Testing yang dibagi ke dalam 2 (dua) bagian skenario yaitu skenario Idiosyncratic serta skenario Market-wide. Untuk skenario Idiosyncratic BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario Market-wide, BRI menggunakan Regulatory Stress Testing Financial Stress Assessment Program (atau disingkat dengan FSAP) berdasarkan skenario yang telah ditetapkan oleh FSAP sebagai representasi atas kondisi krisis yang dapat terjadi.

3. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Penerapan proses Manajemen Risiko atas setiap rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru (PAB) di BRI dilakukan melalui pelaksanaan Risk Self Assessment PAB oleh Product Owner dan dimintakan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Direktur Manajemen Risiko BRI dalam rangka mendapatkan persetujuan.

4. Implementasi Budaya Sadar Risiko

Penerapan Budaya Sadar Risiko mencerminkan nilai-nilai serta komitmen Direksi BRI dalam rangka peningkatan kesadaran pekerja BRI terhadap pengelolaan risiko. Elemen Budaya Sadar Risiko adalah aspek-aspek dasar Budaya Sadar Risiko yang mendasari penerapan Budaya Sadar Risiko yang terdiri dari; Komitmen, Manajemen Kinerja, Tatakelola Risiko, Komunikasi, Pelatihan dan Pengembangan, Pelaporan dan Pemantauan.

Budaya Sadar Risiko dimulai dari adanya komitmen manajemen yang tertuang dalam strategi perusahaan, strategi inisiatif, dan strategi risiko dalam bentuk penetapan Risk Appetite Statement. Budaya Sadar Risiko tercermin dari adanya penetapan manajemen kinerja berbasis risiko dalam bentuk KPI (Key Performance Indicator) yang diturunkan dari komitmen manajemen.

BRI telah memiliki materi pengembangan budaya sadar risiko yang dikemas dalam bentuk permainan interaktif, yang rencananya akan di implementasikan dalam acara Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di Uker Selindo. Selain itu, sistem pelaporan dan monitoring risiko melalui perangkat manajemen risiko operasional menciptakan terbentuknya budaya saling memberikan feedback yang dapat diterima secara positif untuk membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

5. Otomasi Pengkinian Business Continuity Management (BCM)

Dalam rangka memudahkan Unit Kerja terkait penerapan BCM, telah dikembangkan modul pengkinian dokumen BCM yang embedded pada aplikasi Manajemen Risiko Operasional BRIOPRA, yang antara lain meliputi pengkinian Business Impact Analysis, pelaksanaan Risk and Threat Assessment (RSA), pelaksanaan Disaster Assessment, serta pengkinian Call Tree di Unit Kerja.

6. Penyempurnaan Perangkat Manajemen Risiko Operasional yang Terintegrasi

Pengembangan Perangkat Manajemen Risiko Operasional akan di integrasikan dengan aplikasi monitoring risiko yang telah dimiliki oleh BRI sehingga dapat memberikan feedback berupa

Manajemen Risiko

predictive risk baik dari sisi severity maupun likelihood. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan untuk menyediakan tools penerapan Manajemen Risiko bagi Unit Kerja yang *user friendly*

7. Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar

Persiapan dilakukan melalui perbaikan proses pencatatan data kerugian dan recovery kerugian atas Risiko Operasional. Dalam rangka mendukung hal tersebut, akan dilakukan *joint development* pengembangan Sub Ledger untuk pencatatan data kerugian dan recovery kerugian atas Risiko Operasional yang terintegrasi dengan *New Financial System* BRI.

8. Pengembangan Dashboard Employee Risk Profile

Pengembangan permodelan ini meliputi modul *Know Your Employee* (KYE) bertujuan untuk mengetahui profil risiko pekerja disetiap unit kerja, dan modul *Know Your Customer* (KYC) yang bertujuan untuk mengetahui profil risiko nasabah BRI.

Kegiatan Credit Risk Monitoring

1. Risk Issue Kredit pada Risk Management Committee (RMC)

- Prognosa Kualitas Kredit pada Desember 2019
Pertumbuhan NPL dan DPK tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan OS pinjaman, sehingga Bisnis perlu mewaspadai potensi -potensi pemburukan yang akan terjadi pada akhir TW 4 2019 termasuk potensi downgrade EY yang berulang setiap tahunnya. Strategi kredit agar fokus kepada sektor bisnis yang sehat sesuai pipeline bisnis yang disusun sehingga diharapkan kualitas kredit pada akhir tahun 2019 tercapai sesuai target manajemen.
- Tingginya Loan at Risk (LAR)
Penyebab memburuknya kualitas kredit akibat lemahnya proses analisa kredit dan kurangnya monitoring, sehingga pemrakarsa kredit harus mempertajam analisis pemberian kredit dengan meningkatkan pengetahuan dalam melakukan analisis 5C termasuk pemanfaatan Loan

Portfolio Guideline (LPG), serta melakukan monitoring *on site* maupun *off site* sampai kredit lunas.

c. KUR Challenge

Tantangan alokasi KUR Mikro dari pemerintah sebesar Rp 100 T dan KUR Kecil sebesar Rp 20 T pada tahun 2020 berdampak pada *opportunity loss* pendapatan bunga kredit non KUR, rentang kendali tenaga pemasar, serta potensial loss dari ketertiban penjaminan. Selain itu, sebagai *awareness* ekspansi kredit KUR ke depan dipaparkan pula tren kualitas kredit KUR dalam tiga tahun terakhir.

2. Risk Awareness bidang Perkreditan yang disampaikan kepada unit kerja wilayah sebagai control pengendalian risiko kredit.

- Potensi kerugian pinjaman KUR akibat keterlambatan pengajuan klaim.
- Monitoring kualitas kredit yang direalisasikan dalam 1 tahun terakhir.
- Peningkatan CKPN akibat adanya tunggakan kecil (Rp. 15 ribu).
- Tingginya kolektibilitas pinjaman DPK pada segmen Kecil dan Ritel.
- Review dan monitoring CKPN Individual.
- Monitoring kualitas kredit per segmen.
- Perbedaan data statis debitur dan putusan kredit restrukturisasi berpotensi kepada meningkatnya biaya CKPN.
- Pinjaman kupedes cashcollateral yang membentuk PPAP.
- Reaktivasi pinjaman.
- Kajian pengelolaan portofolio kredit dalam perhatian khusus (DPK) posisi November 2019.

3. Pembinaan dan Sosialisasi Credit Risk Monitoring ke Unit Kerja Wilayah

Kegiatan monitoring risiko kredit yang dilakukan secara tematik terutama di unit kerja wilayah yang memiliki kualitas kredit rendah (DPK, NPL, LAR) tinggi.

4. Backtesting Internal Model

Melakukan uji kelayakan dari model credit risk yang dilakukan setiap satu tahun untuk menguji apakah model masih layak digunakan atau perlu dilakukan perubahan parameter (*redesign model*).



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

5. Penyusunan *Credit Risk Managemen Handbook*

CRM handbook merupakan buku saku yang berisi titik kritis prosedur perkreditan, risk issue & control pada segmen bisnis Ritkom yang disusun berdasarkan kebijakan.

6. Penyusunan Laporan Kinerja Perkreditan BRI (ERM Report)

Laporan Kinerja Perkreditan BRI yang dilakukan setiap bulan dalam rangka monitoring dan analisa pencapaian kinerja perkreditan sebagai laporan ke Direksi dan Divisi Bisnis.

7. Laporan Rutin Bulanan

- Laporan monitoring BMPK ke OJK
- Laporan Perkembangan Restrukturisasi Kredit ke OJK dan Komisaris

Penyusunan Kebijakan *Green banking*

Peningkatan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat global dan lokal. Disadari bahwa peran perbankan sangat signifikan untuk mendorong investasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan karena perbankan menyalurkan kredit terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan *Sustainable Finance* (SF) di perbankan atau sering disebut perbankan hijau (*Green Banking*).

Alasan penerapan *green banking* Bagi BRI karena penerapan *Green banking* dinilai memiliki dampak positif yaitu:

- Merupakan kontribusi nyata peran BRI terhadap dampak ekonomi yang seimbang dengan lingkungan sosial dan kelestarian alam
- Meningkatkan reputasi BRI sehingga akhirnya dapat meningkatkan value BRI dimata stakeholders
- Merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan
- Membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait *green fund* baik dengan lembaga nasional maupun internasional

Roadmap Greenbanking BRI akan diselaraskan kembali sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sesuai POJK tersebut, BRI sebagai Bank BUKU IV wajib menerapkan SF per 1 Januari 2019. Roadmap secara umum yaitu: Tahun 2017 merupakan tahap untuk penyusunan kebijakan, peningkatan capacity building serta sosialisasi. Tahun 2018 menyesuaikan POJK, penyelarasan ketentuan internal BRI dan menyusun rencana aksi untuk tahun 2019. Tahun 2019 melakukan penyesuaian terhadap kebijakan turunan dan melaksanakan Rencana aksi keuangan berkelanjutan 2019 serta menyusun Laporan Keberlanjutan.

Dalam rangka menjadi champion *green banking* serta persiapan terhadap penerapan POJK, BRI telah melakukan implementasi SF secara bertahap, antara lain:

- Mengikuti pilot project "*First Step To Be A Sustainable Finance*" hasil kerjasama dan WWF Indonesia

Menyusun kebijakan terkait keberlanjutan yaitu: Kebijakan Umum Keberlanjutan (*Sustainability*). Penyusunan Kebijakan *Green Banking*

Isu Perubahan Iklim, penurunan kualitas lingkungan dan semakin melebarnya kesenjangan sosial mengubah paradigma pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Efek jangka panjang yang dapat ditimbulkan akibat perubahan iklim dan isu sosial harus mendapat perhatian oleh berbagai pihak baik tingkat global dan lokal. Disadari bahwa peran perbankan sangat signifikan untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan karena perbankan menyalurkan kredit terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan *Sustainable Finance* (SF) di perbankan atau sering disebut perbankan hijau (*Green Banking*).

Alasan penerapan *green banking* Bagi BRI karena penerapan *green banking* dinilai memiliki dampak positif yaitu:

- Merupakan kontribusi nyata peran BRI terhadap dampak ekonomi yang seimbang dengan lingkungan sosial dan kelestarian alam

Manajemen Risiko

2. Meningkatkan reputasi BRI sehingga akhirnya dapat meningkatkan value BRI di mata stakeholders
3. Merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan
4. Membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait green fund baik dengan lembaga nasional maupun internasional

Roadmap Green banking BRI akan diselaraskan kembali sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sesuai POJK tersebut, BRI sebagai Bank BUKU IV wajib menerapkan SF per 1 Januari 2019. Roadmap secara umum yaitu: Tahun 2017 merupakan tahap untuk penyusunan kebijakan, peningkatan capacity building serta sosialisasi. Tahun 2018 menyesuaikan POJK, penyesuaian ketentuan internal BRI dan menyusun rencana aksi untuk tahun 2019. Tahun 2019 melakukan penyesuaian terhadap kebijakan turunan dan melaksanakan Rencana aksi keuangan berkelanjutan 2020 serta menyusun Laporan Keberlanjutan.

Dalam rangka menjadi champion green banking serta persiapan terhadap penerapan POJK, BRI telah melakukan implementasi SF secara bertahap, antara lain:

1. Mengikuti pilot project "*First Step To Be A Sustainable Finance*" hasil kerjasama dan WWF Indonesia
2. Menyusun kebijakan terkait keberlanjutan yaitu: Kebijakan Umum Keberlanjutan (*Sustainability*). Kebijakan Strategi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
3. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan
4. *Capacity building* bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit
5. Internal campaign untuk memberikan *awareness* bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya
6. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/ instansi terkait
7. Mengikuti ajang penghargaan terkait sustainable finance antara lain Sustainable Finance Award yang diselenggarakan oleh OJK.

8. Kebijakan Strategi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
9. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan
10. Capacity building bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit
11. Internal campaign untuk memberikan *awareness* bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya
12. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/ instansi terkait
13. Mengikuti ajang penghargaan terkait sustainable finance antara lain *Sustainable Finance Award* yang diselenggarakan oleh OJK.

Loan Portfolio Guideline (LPG)

Pada tingkat portofolio, pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan mengimplementasikan *Loan Portfolio Guideline* (LPG) dalam setiap prakarsa kredit. Melalui LPG, BRI mengatur arah pertumbuhan portofolio kredit pada sektor industri yang prospektif, dengan tingkat risiko yang dapat diterima serta memelihara diversifikasi portofolio pada tingkat optimal. Untuk memperkuat pengelolaan risiko portofolio kredit, BRI sedang mengembangkan digitalisasi pipeline management dan menginisiasi pengembangan dashboard LPG guna meningkatkan efektifitas monitoring pertumbuhan portofolio kredit di masing-masing wilayah.

Penyusunan Market Code of Conduct BRI

Dalam rangka membangun Pasar Keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 19/5/PBI/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Penerapan PBI dan PADG tersebut dimaksudkan agar terdapat peningkatan standar kompetensi Pelaku Pasar, standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; integritas Pelaku Pasar, Direksi, dan Pekerja; dan penerapan prinsip kehati-hatian.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Direksi dan Pekerja BRI harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Treasuri. Kode Etik Pasar menjadi pedoman Direksi dan Pekerja berdasarkan prinsip konvensional yang mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan. Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) sebagai asosiasi profesi di Indonesia telah menerbitkan Kode Etik Pelaku Pasar dalam Buku Market Code of Conduct (Guideline to Market Practices in the Financial Markets), 3rd Edition. Berdasarkan hal tersebut, BRI telah menyusun market code of conduct dalam aktivitas Treasuri yang bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan berperilaku, bertindak, meningkatkan disiplin dan integritas bagi setiap Manajemen dan Pekerja BRI dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik dan luar negeri, mencakup Manajemen Senior, Manajemen, dan Dealers yang terlibat transaksi di pasar keuangan.
2. Standar minimum perilaku yang dapat dijadikan acuan dalam market *best practices* bagi Manajemen dan Pekerja BRI. Implementasi dari Kode Etik Pasar ini disesuaikan dengan kompleksitas usaha BRI dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Market Code of Conduct telah diterbitkan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 disosialisasikan kepada pekerja melalui modul dan e-learning MCO yang bekerjasama dengan BRI Corporate University.

Penyusunan *Early Warning Indicators* Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang sangat berbahaya bagi jantung sebuah bank. Regulator mensyaratkan Bank mampu memiliki *High Quality Liquid Assets* yang mampu mengcover net cash outflow dalam kondisi stress minimal selama 30 hari. BRI mengembangkan mekanisme sistem peringatan dini (*early warning indicators*) yang merupakan indikator untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dan memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan, sehingga Bank memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengatasi potensi pengetatan likuiditas dalam waktu

mendatang. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan eksternal yang dipantau oleh Divisi Assets & Liabilities Manajemen dan Divisi Treasury sebagai unit kerja pengelola risiko likuiditas, serta Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar.

Selain untuk level kantor pusat, *Early Warning Indicator* juga dikembangkan untuk level Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berfungsi sebagai peringatan dini terhadap parameter-parameter likuiditas di unit kerja.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. Permodalan
Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.
2. Operasional
Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
3. Pasar dan Likuiditas
 - a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan Standardized Model sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
 - b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan Basel III Approach: *Liquidity Coverage Ratio* & *Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015

Manajemen Risiko

- tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum.
- c. Pengukuran Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)

Penilaian Profil Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh three line of defense, yaitu seluruh risk taking unit selaku first line, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku second line dan unit internal audit selaku third line. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2019, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat low to moderate, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

1. Peringkat Profil Risiko

Posisi Risiko BRI Triwulan IV-2019 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2019 (unaudited). Secara keseluruhan peringkat Profil Risiko BRI adalah *Low to Moderate* (Risiko Inheren) Predikat komposit Risiko Inheren adalah Low to Moderate dengan perincian peringkat risiko *Low to Moderate* untuk Risiko kredit, pasar, likuiditas, strategik, dan reputasi sedangkan dengan peringkat risiko risiko operasional berperingkat moderate dan risiko hukum berperingkat low.

2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Predikat komposit kualitas penerapan Manajemen Risiko adalah Satisfactory dengan dengan perincian peringkat Satisfactory meliputi Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi, adapun risiko operasional berperingkat Fair untuk risiko operasional.

Kesimpulan

Peringkat Profil Risiko BRI bulan Desember tahun 2019 adalah Low to Moderate (Peringkat 2) tidak mengalami perubahan peringkat risiko dibanding tahun Desember 2018 (Low to Moderate /peringkat 2).

Evaluasi Efektifitas Sistem Manajemen Risiko

Secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menjaga objektivitas dan independency penilaian efektivitas sistem manajemen risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
Penyusunan limit risiko dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi Enterprise Risk&Portofolio Management BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi Enterprise Risk&Portofolio Management BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau Risk Management Committee BRI.
2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BRI adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Selain itu SPI BRI juga mengacu kepada:

1. Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Kebijakan GcG, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, Strategi AntiFraud dan Kebijakan WBS
2. Struktur Organisasi, Penetapan Formasi & Daftar Uraian Jabatan Seluruh Unit Kerja.
3. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional.
4. Kebijakan & Pedoman Operasional Manajemen Risiko Atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru.
5. Buku Pedoman Operasional.
6. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Organisasi.
7. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang & Rencana Bisnis Bank.
8. Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Risiko TI.
9. Kebijakan Umum Teknologi Informasi.
10. Kebijakan Umum & Pedoman Pelaksanaan Kredit.
11. Ketentuan Pembukuan dan Verifikasi Serta Kewenangan User di BRINETs Piagam Audit Intern.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Dengan COSO

Bank BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO IC framework (*Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*).

Internal Environment

Elemen pertama dari struktur pengendalian intern BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi BRI telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja.

Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk budaya pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam core value BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.

Objective Setting

Bank BRI telah menerapkan objective setting perusahaan melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) pada setiap unit kerja yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. KPI disosialisasikan kepada pekerja dan direview secara berkala untuk mencapai target dan sasaran perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Event Indication

Bank BRI telah menerapkan Risk Control Self Assessment (RCSA) dalam identifikasi kejadian dan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penerapan RCSA dilakukan oleh seluruh unit kerja BRI dalam penetapan profil risiko unit kerja tersebut atas kejadian dan risiko yang dihadapi untuk dilakukan evaluasi.

Risk Assessment

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian internal terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko.

Bank BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

Risiko kredit

Penilaian dilakukan dengan internal model menggunakan model standard yaitu menghitung probability of default dan loss given default untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian stress test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress.

Risiko pasar

Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi pendekatan dengan metode standar dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai trading book dan banking book yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Risiko Likuiditas

Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui dashboard profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui protocol liquidity contingency plan. Penilaian risiko likuiditas meliputi penilaian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan limit risiko likuiditas dan stress test.

Risiko Operasional

Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko Hukum

Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Risiko Strategik

Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko Reputasi

Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal

Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Risiko Asuransi

Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

Risiko Transaksi Intra Group

Menilai risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan Early Warning System pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Risk Response

Manajemen melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan Early Warning System pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Control Activities

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
 - a. Penerapan fungsi MCS (maker, checker, signer) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
 - b. Penerapan segregation of duties berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Penerapan Four Eyes Principles dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pmutus.
 - d. Penerapan three line of defense untuk aktivitas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen (Top Management Reviews)
 - b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
 - I. Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah

Sistem Pengendalian Internal

- II. Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan disain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas output yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum Market Risk Management Committee dan forum Asset & Liability Committee (ALCO).
- III. Pengendalian risiko likuiditas meliputi Protocol Liquidity Contingency Plan.
- IV. Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, Protocol Liquidity Contingency Plan untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
- V. Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
- VI. Pengendalian risiko strategik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- VII. Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
- VIII. Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjutnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
- IX. Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
- c. Pengendalian risiko intra grup dilaksanakan oleh Desk Subsidiary yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Information & Communication

Bank BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Monitoring

Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. Monitoring sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui Three line of defenses, yaitu:

1. 1st line of defense selaku risk owner yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (a.l. Unit Kerja Operasional)
2. 2nd line of defense yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (a.l. Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
3. 3rd line of defense yaitu Unit Kerja yang melakukan assurance. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas monitoring sistem pengendalian intern.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan monitoring SKAI terhadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal

Elemen Sistem Pengendalian Internal

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain 1stline of defense (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), 2ndline of defense (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan), dan 3rdline of defense (Jajaran SKAI termasuk Resident Auditor Kanca dan Resident Auditor Unit).

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Implementasi Pengendalian Internal BRI mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017.

Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian

Direksi dan Komisaris telah berperan aktif melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.

1. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

1. BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
2. BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang didalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
4. Melakukan monitoring terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
5. Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.
6. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Pelaksanaan Kaji Ulang Sistem Pengendalian Intern.

Budaya pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implementasinya meliputi:

1. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, melalui:
 - a. Aplikasi BRIPEDIA
 - b. Aplikasi BRISHARE
 - c. Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
2. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam core value BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
4. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI

Sistem Pengendalian Internal

Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui risk based audit. Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko.

Pengendalian intern dilaksanakan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

Kaji Ulang Manajemen (Top Level Review)

BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan top level review terkait Strategi Anti Fraud. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terkait pilar penerapan strategi anti fraud perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Kaji Ulang Operasional (Functional Review)

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan assurance dan pemberian jasa konsultasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan corporate governance. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindakan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Auditee.

Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi Anti Fraud.

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik - praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Hasil penilaian risiko.
2. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penanganan risiko.
3. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
4. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
 - a. Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
 - b. Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
 - c. Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
 - d. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas Disaster Recovery Plan.
 - e. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
 - f. Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi. Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan
 - g. Melakukan alih daya (outsourcing) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
 - h. Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

Pengendalian Asset Fisik

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL). KEMAL memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal

Dokumentasi

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-update secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:

1. Penerapan fungsi Dual Control dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan
2. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pekerja. Implementasinya meliputi:

1. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
2. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), Loan Approval System (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi treasury and market risk (GUAVA), Sistem Informasi Human Capital BRISTARS, dll.
3. BRI telah memiliki Disaster Recovery Plan dan sistem back up untuk mencegah kegagalan usaha yang beresiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.

4. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholder baik pihak ekstern maupun intern dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
 - a. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
 - b. Tersedia media komunikasi untuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pusataka SDM).
 - c. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti Forum Risk Management Committee, Business Performance Review, Support Performance Review, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Focus Group Discussion dan Forum Peningkatan Kinerja.

Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian intern baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Intern. SKAI telah melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Review Sistem Pengendalian Internal 2019

BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh fungsi 1st line of defense sebagai risk owner yang melakukan evaluasi secara terus menerus dalam kegiatan operasional bank, fungsi 2nd line of defense yakni jajaran Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara berkala memastikan kecukupan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan, serta fungsi 3rd line of defense yang melakukan kegiatan audit.

Jajaran Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan evaluasi kecukupan struktur pengendalian intern dilakukan dengan tujuan untuk menilai keandalan sistem pengendalian intern sehingga diharapkan dapat

Sistem Pengendalian Internal

memberikan keyakinan secara memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Evaluasi kecukupan sistem pengendalian intern dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem atau mekanisme yang dikembangkan BRI dalam rangka mencapai tujuan kepatuhan, tujuan informasi dan tujuan operasional.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum. SKAI memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan manajemen. SKAI telah melaksanakan review dan assurance secara periodik terhadap aktivitas di seluruh level organisasi termasuk Unit Kerja Luar Negeri dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan review dan assurance tersebut dilaksanakan secara independen dengan jalur pelaporan yang memadai dan didukung kompetensi serta keahlian Auditor Intern yang handal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor perbaikannya dalam rangka memastikan sistem pengendalian intern telah berjalan efektif. Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara rutin melakukan telaah terhadap hasil evaluasi sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh SKAI dan memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan sistem pengendalian intern perusahaan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern pada Bank BRI telah memadai.

Tujuan Informasi

BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Lebih lanjut, BRI telah memiliki kebijakan tentang Pengelolaan Dokumen (administrasi dokumen, pengelolaan kontrol/register, penyimpanan serta retensi dokumen). Disamping itu, BRI telah memiliki mekanisme terkait komunikasi kebijakan ke seluruh jenjang organisasi sebagai berikut:

- Divisi pembuat kebijakan (policy owner) dapat melakukan upload kebijakan pada aplikasi BRI Share (Knowledge Management).
- Terkait kebijakan bidang SDM, disosialisasikan melalui Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS.
- Terkait kebijakan bidang perkreditan dilakukan upload pada Aplikasi Bisnis Information System (BIS).
- Terdapat Aplikasi BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM) yang dapat menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh Manajemen dan atau Unit Kerja BRI.

Tujuan Operasional

BRI telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan usaha BRI, antara lain:

- Bidang operasional
Telah disusun Buku Pedoman Operasional (BPO) dan kebijakan operasional lainnya sebagai pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan aktiva tetap, kebijakan pengadaan barang dan jasa.
- Bidang perkreditan
BRI telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan kebijakan kredit lainnya sebagai pedoman bagi Pejabat Kredit dalam melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman.
- Bidang SDM
BRI memiliki arsitektur human capital, kebijakan pengelolaan human capital, kebijakan pengembangan human capital, kebijakan penilaian kinerja dan remunerasi.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal

d. Bidang teknologi informasi

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola operasional teknologi informasi, BRI telah memiliki kebijakan teknologi informasi yang disusun dengan mengacu prinsip-prinsip IT Governance.

Tujuan Budaya Risiko

BRI telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko, terdapat Fungsi Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja yang bertanggungjawab mengkoordinasikan proses penerapan Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja.

BRI telah memiliki beberapa kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko antara lain:

- a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko
- b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Rencana Aksi (Recovery Plan)
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Kelapa Sawit
- d. Kebijakan Umum dan Strategi Implementasi Keberlanjutan (Sustainability)

BRI telah memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan operasional melalui pengkinian buku top risk issue secara berkala yang disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Operasional. Dalam rangka pengelolaan risiko yang dihadapi, BRI didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan core banking system, antara lain: BRIOPRA, LAS dan Guava.

Pernyataan Direksi dan Komisaris Atas Kecukupan Pengendalian Internal BRI

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perkara hukum material yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan)	: 336 perkara (73,52%)
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan)	: 83 perkara (18,16%)
3. Perkara Operasional & Jasa	: 27 perkara (5,91%)
4. Perkara Support (SDM, Logistik, dll)	: 10 perkara (2,19%)
5. Perkara Treasury, Trade Finance & IT	: 1 perkara (0,22%)

Dengan Rincian sebagai berikut:

2019					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	88	64	94	90	336
Kredit Non Lelang	9	17	35	22	83
Ops & Jasa	6	12	5	4	27
Support	0	1	8	1	10
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	1	1

Total Perkara yang telah memperoleh Keputusan Hukum yang tetap/ berstatus (Inkracht Van Gewijsde) adalah sebanyak 158 perkara yang terdiri dari:

a. Perkara *Inkracht Menang*

Perkara Inkracht Menang pada tahun 2019 sebanyak 153 Perkara (96,84%), yang terdiri dari:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan)	: 123 perkara (77,85%)
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan)	: 24 perkara (15,19%)
3. Perkara Operasional & Jasa	: 2 perkara (1,27%)
4. Perkara Support (SDM, Logistik, dll)	: 4 perkara (2,53%)
5. Perkara Treasury, Trade Finance & IT	: 0 perkara (0,00%)

INKRACHT MENANG					
2019					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	63	18	20	22	123
Kredit Non Lelang	4	9	6	5	24
Ops & Jasa	0	1	1	0	2
Support	2	1	0	1	4
Treasury, Trade Finance & It	0	0	0	0	0



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkara Penting yang dihadapi Perseroan

b. Perkara Inkraacht Kalah

Perkara Inkraacht Kalah pada tahun 2019 sebanyak 5 Perkara (3,16%), yang terdiri dari:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 2 perkara (1,27%)
2. Perkarakredit (Non Lelang Agunan) : 1 perkara (0,63%)
3. Perkara Operasional & Jasa : 0 perkara (0,00%)
4. Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 2 perkara (1,27%)
5. Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 0 perkara (0,00%)

Dengan rincian sebagai berikut:

INKRACHT KALAH		2019			
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	1	1	0	0	2
Kredit Non Lelang	0	1	0	0	1
Ops & Jasa	0	0	0	0	0
Support	1	0	0	1	2
Treasury, Trade Finance & It	0	0	0	0	0

PERKARA PENTING YANG DIHADAPAI PERSEROAN

Adapun dari 430 perkara tersebut, terdapat 3 (tiga) perkara penting yang dihadapi oleh PT. BRI (Persero) Tbk yaitu:

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap BRI	Sanksi Administrasi
1	Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pensiunan BRI (Perkara No. 29/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tjk) Gugatan ini diajukan oleh Sjamsuddin dan 37 orang lainnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung, Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa BRI tidak adil dalam memberikan Uang Pesangon kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat hanya menerima Uang Penggantian Hak (bukan Uang Pesangon) yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Atas gugatan-gugatan yang diajukan pada PHI Tanjung Karang tersebut pada prinsipnya sama dengan gugatan- gugatan di Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Jakarta Pusat dan Surabaya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.	Dalam menghadapi gugatan perkara hubungan industrial dengan pensiunan tersebut BRI, mendalilkan fakta-fakta hukum melalui jawaban, duplik dan kesimpulan, serta mengajukan pembuktian berupa bukti yuridis salah satunya dalah Putusan-putusan perkara Hubungan industrial yang sama dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Saat ini tahapan sidang adalah menunggu putusan	Nama baik/reputasi perusahaan, mengingat Penggugat menggugat berkaitan dengan peraturan internal dan pelaksanaannya di BRI	-

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap BRI	Sanksi Administrasi
2	Gugatan dan Perlawanan PT Rapico Busana Indah (Perkara No. 258/Pdt. Plw/2019/PN.Jkt.Bar) PT. RBI menjadi debitur BRI sejak tahun 1987 dan sampai dengan terakhir PT. RBI diberikan kredit dengan total plafon senilai Rp26.582 miliar. Dalam perjalanannya PT. RBI tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BRI, namun setiap BRI melakukan upaya untuk lelang maupun fiat eksekusi, PT. RBI selalu melakukan upaya-upaya mengajukan gugatan maupun perlawanan atas fiat yang diajukan oleh BRI sehingga hal tersebut menghambat proses penyelesaian kredit di BRI.	1. Perlawanan terhadap Fiat Eksekusi PT RBI yang diajukan di Jakarta Barat, saat ini dalam tahap pengajuan kesimpulan, penanganannya ditangani oleh Pengacara Rekanan BRI Sekartaji Law Firm. 2. Gugatan Perdata yang diajukan oleh PT. RBI saat ini dalam tahapan Mediasi.	Potensi kerugian terhadap BRI Rp26.582 M	-
3	PKPU PT. Dunia Textile dan Group (perkara No.22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Smg) dan (perkara No.25/Pdt. Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Smg) DDT adalah debitur BRI sejak 2016 dengan kredit eksekusi eqv Rp1.807 M. Pada tahun 2019 DDT mengalami kesulitan keuangan akibat trade war antara US dan China sehingga debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada BRI. Atas kondisi tersebut para pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi kredit setelah diajukan proses PKPU.	Menunggu proposal perdamaian dari debitur	Apabila perdamaian tidak tercapai, maka debitur dapat dinyatakan pailit.	-

Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2019, tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang menjabat memiliki perkara hukum terkait Perdata dan Pidana dengan kegiatan bisnis BRI.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

Bank BRI memiliki kebijakan dalam pengelolaan keterbukaan informasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.08-DIR/SKP/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Ketersediaan Akses Informasi Perusahaan

Bank BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Sosial Media, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.



Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Bank BRI
Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 1210, Indonesia
Telp : (+62 21) 251 0244, 251 0254
Fax : (+62 21) 250 0065, 250 0077

Situs Perusahaan

www.bri.co.id



Call Centre

14017, 1500017, (+62 5798 7400)

Customer Care

callbri@bri.co.id

Media Sosial

BANK BRI @bankbri_id
 @kontakBRI BANK BRI
@promo_BRI
@bankbri_id

Chatbot: Sabrina

Melalui facebook messenger dan whatsapp/
telegram: 081-212-14017



Sekretaris Perusahaan

Hari Purnomo

Telepon : (+62 21) 575 1966
Faksimil : (+62 21) 570 0916
Email : humas@bri.co.id



Siaran Pers

Siaran pers yang telah dilakukan Bank BRI selama tahun 2019 dapat dilihat pada sub bab pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan dan dapat dilihat pada situs website Perusahaan.

Majalah BRI

Bank BRI memiliki majalah Internal yaitu "BRllian News" yang terbit setiap bulan sejak bulan November 2019 dalam bentuk media cetak dan aplikasi yang dapat diakses secara *online*. Majalah "BRllian News" terbit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Edisi Bulan	Tema
1	November 2019	Digitalisasi adalah keniscayaan
2	Desember 2019	Integrated Financial Solution

Transparansi Penyampaian Laporan

Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah	Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan	Tahunan	1	OJK dan BEI
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak	Triwulan	4	OJK, BI Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	Bulanan	12	OJK
Laporan Hutang Valas	Bulanan	12	OJK
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Bulanan	12	OJK dan BEI
Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12	BEI



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KODE ETIK

Dasar Hukum

Dalam mewujudkan insan BRI yang disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan bisnis bank, BRI memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh pekerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI. Kode etik BRI merupakan bagian penting dari kerangka kerja GCG BRI dan memberikan pedoman etika bagi insan BRI dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya.

Komitmen Kode Etik

Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode etik BRI memiliki 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank
Komitmen Bank patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.
2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
 - a. Etika terhadap Nasabah
Komitmen Bank memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
 - b. Etika terhadap Mitra Kerja
Komitmen Bank dengan Mitra Kerja berdasarkan praktik-praktik usaha yang sah dan wajar dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan.
 - c. Etika terhadap Pesaing
Komitmen Bank mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan usahanya, dengan meningkatkan Bank pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja.
 - d. Etika terhadap Regulator
Komitmen Bank memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan otoritas berwenang lainnya.
 - e. Etika terhadap Pemegang Saham
Komitmen Bank dalam upaya memberikan kontribusi positif dan optimal kepada Pemegang saham (shareholders).

3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
Komitmen Bank menjunjung nilai-nilai masyarakat setempat (local wisdom) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya.
4. Hubungan Perusahaan dengan Karyawan Bank
 - a. Komitmen Bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan misi Bank.
 - b. Komitmen Bank untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan etika sesama pekerja.
5. Kerahasiaan Informasi Bank
Komitmen Bank melindungi seluruh informasi nasabah dan internal Bank dari pihak luar/tidak berkepentingan.
6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank
Komitmen insan BRI menyampaikan laporan Bank secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
7. Benturan Kepentingan
Komitmen insan BRI menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan tidak menempatkan pada kondisi/situasi timbulnya benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, Nasabah, dan Pihak Ketiga yang dapat merugikan perusahaan.
8. Kontribusi dan Aktifitas Politik
Komitmen insan BRI untuk tidak berkontribusi dalam aktifitas politik atau usaha sejenis lainnya.
9. Larangan Menerima Hadiah
Insan BRI tidak diperkenankan meminta dan menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

1. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI (insan BRI) wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI.
2. Seluruh insan Bank wajib secara tertulis untuk menyatakan kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Surat Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI yang ditandatangani merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Bank.

Kode Etik

Penyebarluasan Kode Etik

BRI telah melakukan sosialisasi kebijakan kode etik kepada pekerja BRI pada tahun 2019 melalui program pendidikan, kegiatan workshop, In House Training, Pembinaan dan Monitoring secara onsite ke unit kerja BRI, pembelajaran atau e-learning melalui portal internal BRI, dan pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di seluruh unit kerja BRI.

Upaya Penegakan Kode Etik Perusahaan

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Penerapan Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BRI di seluruh jenjang organisasi dan unit kerja luar negeri.
2. Seluruh insan BRI diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kepatuhan terhadap Kode Etik BRI.
3. Setiap Pelanggaran Kode Etik akan di berikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.
4. Sosialisasi Kode Etik kepada Pekerja BRI.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019

Selama tahun 2019 terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 283 pekerja tetap. Pelanggaran terhadap Kode Etik BRI telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

Pelanggaran Internal

Jumlah pelanggaran internal yang dilakukan oleh pekerja BRI selama tahun 2019 dari hasil pemeriksaan unit kerja investigasi BRI adalah sebagai berikut:

Internal Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran							
	Dewan Komisaris	Direksi	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap				
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total	-	-	-	-	212	283	123	239
Telah diselesaikan	-	-	-	-	171	253	97	239
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	41	30	26	0



TATA KELOLA PERUSAHAAN

BUDAYA PERUSAHAAN

BRI merumuskan Nilai-Nilai Utama perusahaan baru yang digunakan untuk membentuk perilaku dan karakter kerja selaras dengan strategi perusahaan terkini. Nilai-nilai utama perusahaan tersebut yakni BRI dengan 5 (lima) nilai atau biasa disebut BRILIAN yang tercermin dalam 10 sikap dan perilaku. Adapun BRILIAN serta sikap dan perilakunya adalah sebagai berikut:

Integrity

Senantiasa berfikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan dan taat aturan. Adapun sikap perilaku dari nilai Integrity adalah sebagai berikut:

- Terbuka, Jujur dan tulus; dan
- Patuh Terhadap Peraturan.

Profesionalism

Berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Adapun sikap perilaku dari nilai Profesionalism adalah sebagai berikut:

- Continuous Learner
- Fairness

Trust

Membangun keyakinan dan sangka baik di antara stakeholders dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Adapun sikap perilaku dari Nilai Trust adalah sebagai berikut:

- Saling menghargai
- Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri

Innovation

Mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan perusahaan. Adapun sikap perilaku dari nilai Innovation adalah sebagai berikut:

- Visioner
- Pionir Perubahan

Customer Centric

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Adapun sikap perilaku dari nilai Customer Centric adalah sebagai berikut:

- Melayani Lebih dari Ekspektasi Nasabah dengan setulus hati.
- Collaborative

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam penerapan GCG, BRI secara transparan dan adil dalam menerima dan mengelola laporan pelanggaran melalui sarana Whistleblowing System.

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana pelaporan bagi insan BRI secara khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang terindikasi melanggar kode etik, prinsip GCG serta ketentuan yang berlaku baik internal BRI maupun perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh insan BRI.

Kebijakan WBS

Kebijakan Whistleblowing System BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.08-DIR/KPT/05/2018 yang mengatur sistem, mekanisme dan prosedur penanganan laporan indikasi pelanggaran yang dikelola secara rahasia dan independen.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan Whistleblowing System dapat dilaporkan melalui:

- SMS dengan nomor 0812 8200 600
- Surat tertulis dengan alamat PO BOX 1895 JKP 10900

Whistleblowing System

3. Webmail dengan alamat whistleblower@corp.bri.co.id
4. Website dengan alamat www.bri.co.id/whistleblowing-system

Sosialisasi WBS

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Memasang poster informasi WBS di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
3. Menyampaikan materi WBS pada in-class training Pekerja BRI.
4. Melaksanakan pembelajaran e-learning WBS kepada seluruh pekerja BRI.
5. Penyampaian informasi WBS melalui website perseroan.
6. Sosialisasi WBS secara onsite ke Unit Kerja.
7. Memasang Pop Up pada dashboard aplikasi Bristars (portal internal BRI).

Perlindungan Pelapor

BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.

Penanganan dan Mekanisme Pengaduan Penanganan WBS

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana WBS.
2. Laporan diterima oleh Unit Pengelola WBS.
3. Petugas WBS akan melakukan verifikasi dan analisa awal informasi indikasi pelanggaran paling lambat 20 hari kerja kemudian menyampaikan ke Pimpinan Unit Pengelola WBS.
4. Memeriksa dan memastikan laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan WBS. Selanjutnya memutuskan tindak lanjut laporan WBS ke Unit Kerja Investigasi. Apabila laporan tidak sesuai kriteria maka laporan indikasi pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti.
5. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap informasi indikasi pelanggaran. Selanjutnya

menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi ke Unit Pengelola WBS.

6. Unit Pengelola WBS akan menyurati Unit Kerja Berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi atas rekomendasi dari Unit Kerja Investigasi.
7. Unit Kerja Berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi kepada Terlapor.
8. Unit Pengelola WBS melakukan monitoring terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Unit Kerja Berwenang.
9. Unit Kerja Berwenang menyampaikan laporan realisasi perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.
10. Unit Pengelola WBS memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan secara memadai.
11. Unit Pengelola WBS melaporkan rekapitulasi dan evaluasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit setiap Triwulan.

Mekanisme Pelaporan WBS

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana yang telah ditentukan.
2. Laporan indikasi pelanggaran diterima oleh Unit Pengelola Whistleblowing System untuk ditindaklanjuti ke Unit Kerja Investigasi.
3. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap laporan indikasi pelanggaran dan hasil investigasi disampaikan kembali ke Unit Pengelola Whistleblowing System.
4. Unit Pengelola Whistleblowing System akan melaporkan secara berkala ke Direktur Utama.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Pihak pengelola WBS berada dibawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktur Utama membentuk Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Jumlah Laporan & Tindak Lanjut Pengaduan

Jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang diterima selama tahun 2018 sebanyak 101 pengaduan pelaporan yang terdiri dari 155 sub pengaduan indikasi pelanggaran. Secara kumulatif, total laporan pengaduan yang masuk sejak diimplementasikannya sistem WBS sampai dengan posisi 30 September 2018 berjumlah 1.820 laporan dengan rincian sebagai berikut:



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Whistleblowing System

Tabel Perkembangan Laporan WBS 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Laporan	Media Penyampaian			Status		
		SMS	Surat	Telp/ Lisan	Email	Open	Closed
2017	65	48	13	2	2	0	65
2018	124	77	4	0	43	4	120
2019	134	44	6	0	84	53	81

Dari 134 pengaduan pelaporan yang masuk selama tahun 2019 dapat diidentifikasi menjadi 297 sub pengaduan indikasi pelanggaran dengan kategori sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Laporan Pengaduan WBS

No	Klasifikasi Sub Pengaduan Indikasi Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran SOP Perusahaan	140
2	Pelanggaran Kode Etik dan berpotensi melanggar GCG	29
3	Tindakan <i>fraud</i>	107
4	Perbuatan yang membahayakan keselamatan & kesehatan pekerja atau membahayakan keamanan perusahaan serta merugikan perusahaan	0
5	Pelanggaran etika	21
6	Perbuatan melanggar hukum	0
7	Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan	0

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum pengangkatannya oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BRI telah memenuhi kebijakan keberagaman yang berlaku di Perseroan.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi secara terperinci dari sisi kompetensi, pengalaman kerja/kedirektoran serta latar belakang pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada bagian Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN & PROSEDUR ANTI KORUPSI

BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.05-DIR/MOP/03/2018 tentang Strategi Anti *Fraud* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan dimaksud merupakan wujud komitmen manajemen BRI dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.

PENGADAAN JASA & BARANG – MANAJEMEN AKTIVA TETAP

Pembahasan dapat dilihat pada Bab Analisa & Pembahasan Manajemen di Laporan Tahunan ini.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

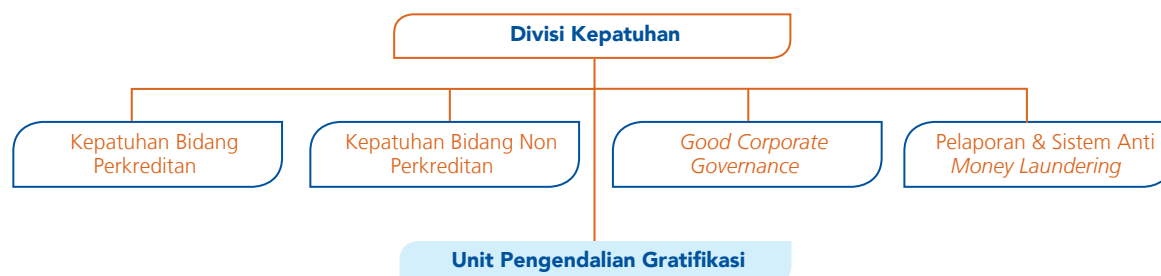
Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara hubungan bisnis dan mitra perusahaan, BRI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi dilingkungan perusahaan. Bank BRI memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI. Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI mengatur tentang:

1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi
2. Klasifikasi gratifikasi
3. Sosialisasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi
4. Mekanisme pengelolaan gratifikasi
5. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi.
6. Perlindungan kepada Pelapor Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi

Merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi.

Struktur Unit Pengelola Gratifikasi:



1. Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
2. Menyusun kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis penerapan gratifikasi.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan gratifikasi.
4. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi.
5. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK.
6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sesuai dengan kewenangan BRI.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sistem Pengendalian Internal

Jenis Gratifikasi

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan penerimaan yang diterima oleh insan BRI bukan berdasarkan/tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban.
3. Gratifikasi terkait kedinasan merupakan pemberian gratifikasi kepada insan BRI dari pihak manapun dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi 2019

Pakta Integritas

Bank BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, salah satu diantaranya BRI memiliki pakta integritas dalam bentuk komitmen pengendalian gratifikasi yang ditandatangani oleh seluruh pekerja BRI pada Forum Peningkatan Kinerja (FPK) 2019. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh vendor dan rekanan BRI untuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi dan Program Awareness Gratifikasi

1. Pelaksanaan pendidikan kepada seluruh pekerja BRI tentang program pengendalian gratifikasi.
2. Sosialisasi pengendalian gratifikasi secara onsite ke seluruh Divisi di Kantor Pusat BRI, kantor wilayah BRI dan Kantor Cabang BRI.
3. Sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BRI dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)

E-learning

Pada tahun 2019, Unit Penendalian gratifikasi telah menyusun pendidikan pedoman pengendalian gratifikasi berupa e-learning yang diikuti oleh 79.658 pekerja BRI. Pelaksanaan e-learning bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengendalian dan melaporkan gratifikasi di unit kerja.

Program Pengendalian Gratifikasi pada Konglomerasi Keuangan

Bank BRI telah menerapkan program pengendalian gratifikasi pada konglomerasi keuangan BRI melalui penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh seluruh Direktur Utama konglomerasi keuangan dengan KPK. Selanjutnya, seluruh konglomerasi keuangan BRI menyusun program pengendalian gratifikasi diantaranya:

1. Menyusun kebijakan program pengendalian gratifikasi di Perusahaan Anak.
2. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja di Perusahaan Anak.



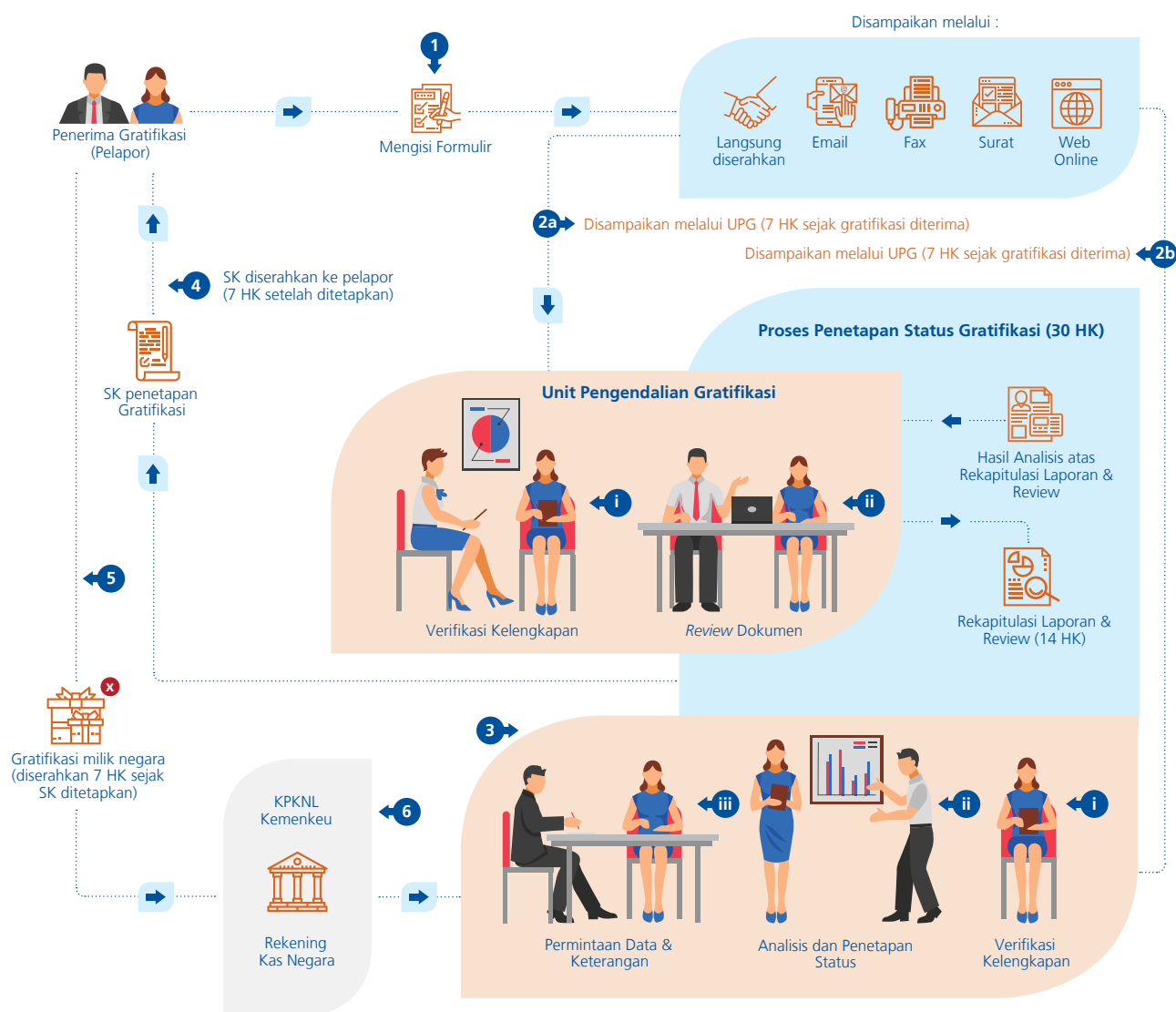
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Standar pelaporan gratifikasi merujuk dengan standar dan prosedur pelaporan di KPK dengan rincian sebagai berikut:

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi



Laporan Penerimaan Gratifikasi 2019

Pada tahun 2019, jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi sebanyak 245 laporan.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam menjalankan salah satu fasilitas bisnisnya BRI memberikan pinjaman kepada masyarakat, dimana hak BRI sebagai kreditur dilindungi dan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam masing-masing perjanjian kredit. Bank BRI senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan hak dan perlindungan terhadap nasabahnya dengan melakukan beberapa aktivitas dalam rangka perlindungan kreditur diantaranya:

- Memperoleh informasi terkait perkembangan kinerja dan laporan keuangan BRI.
- Memperoleh informasi terhadap syarat dan ketentuan produk & jasa bank kepada nasabah.
- Penjelasan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan perihal kredit yang diajukan oleh pegawai bank dan notaris rekanan bank pada saat akan akad kredit.
- Memperoleh informasi dan bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perjanjian kredit dibuat rangkap 2 untuk kedua pihak.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NASABAH

Dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada konsumen, BRI mengacu pada beberapa ketentuan di antaranya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha. Selanjutnya BRI juga telah menyusun pedoman kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah melalui Surat Keputusan NOKEP S.1051-DIR/LCC/12/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kebijakan pelayanan kepada nasabah di BRI juga dituangkan dalam sebuah panduan pelayanan yang disebut Budaya Layanan BRI "CAKRAM" yang berarti Cepat AKurat Ramah Aman nyaMan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Cepat

- Melayani nasabah dengan segera sesuai dengan Service Level Agreement dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Menanggapi keluhan nasabah sesegera mungkin sesuai dengan Service Level Agreement dengan winwin solution.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Akurat

1. Melakukan pencatatan transaksi nasabah secara benar.
2. Menyediakan informasi nasabah dengan dukungan sistem yang terintegrasi.

Ramah

1. Menjadikan nilai kekeluargaan sebagai ciri khas BRI dalam memberikan layanan kepada nasabah melalui sentuhan Pribadi.
2. Memberikan kesan positif kepada nasabah melalui sikap, tutur kata yang santun dan penampilan yang menarik.
3. Berkomunikasi dengan penuh keakraban dan profesional.

Aman

1. Memberikan rasa aman kepada nasabah dengan dukungan sistem yang handal dan mendayagunakan sumber daya manusia profesional & berintegritas tinggi.
2. Menjaga kerahasiaan data nasabah.
3. Melakukan pencatatan keuangan nasabah secara teratur dan benar.
4. Senantiasa menjaga keselamatan dan keamanan atas segala sesuatu yang dipercayakan nasabah.

Nyaman

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang bersih, rapi terpelihara dan lingkungan yang menyenangkan.
2. Menyediakan infrastruktur yang senantiasa berfungsi sesuai dengan kebutuhan nasabah.

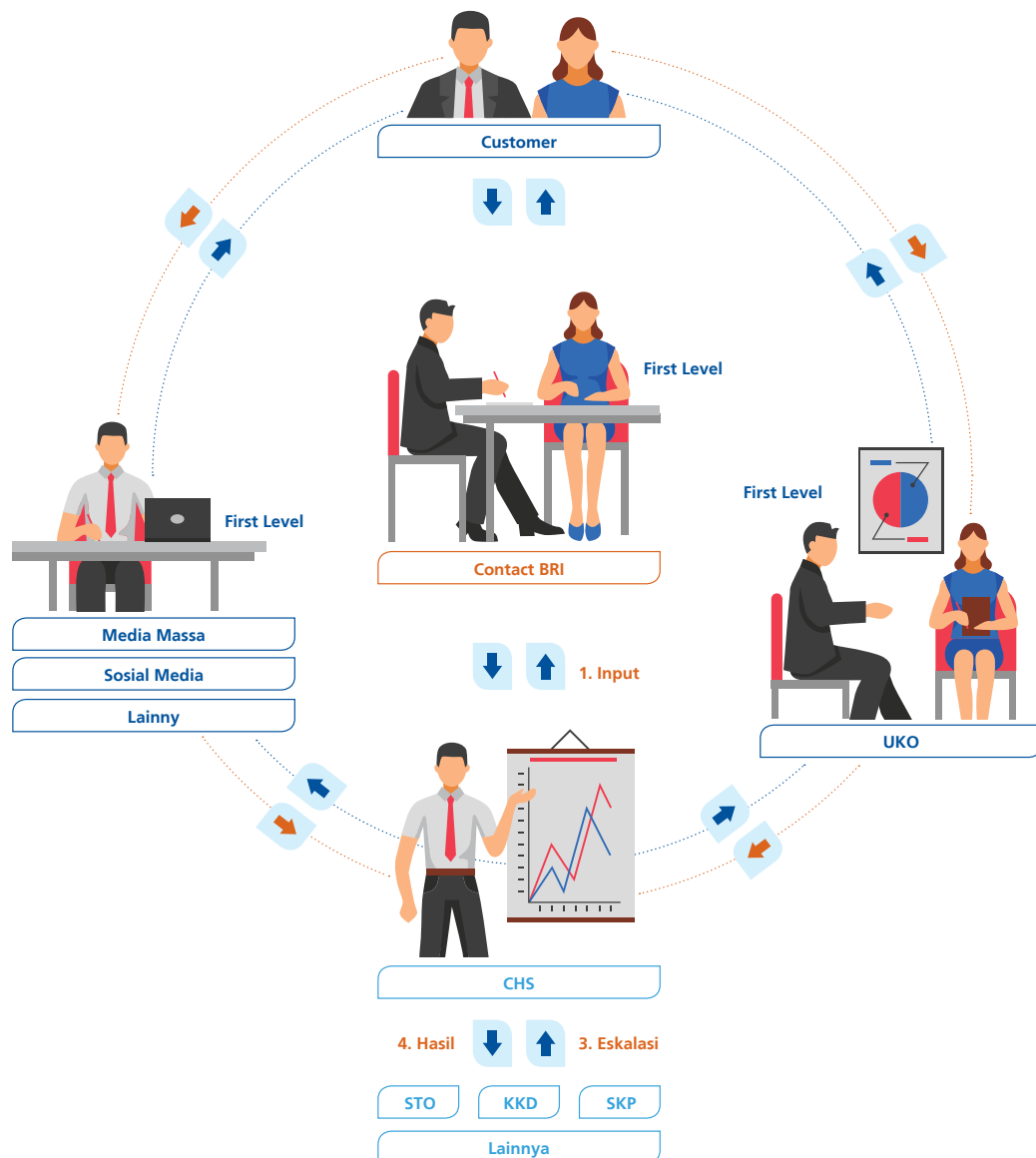
Dalam pelayanannya kepada nasabah, BRI berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah secara baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan/atau service level agreement yang berlaku. Dalam hal penilaian kepuasan pelanggan, BRI rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat terus menjadi evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah yang pada akhirnya berujung pada peningkatan loyalitas nasabah terhadap perusahaan.

BRI memandang setiap pengaduan nasabah merupakan masukan yang penting untuk peningkatan kualitas layanan dan produk. Melalui sistem sentralisasi complaint handling, BRI menyediakan sarana bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan dan menjadi rekomendasi perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap keluhan nasabah dapat diidentifikasi dan diketahui secara cepat, saat ini BRI menggunakan media omni-channel, yaitu sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia yaitu:

1. Tatap muka melalui Customer Service di seluruh Unit kerja operasional BRI;
2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400/Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017;
3. Webchat melalui website www.bri.co.id;
4. Email di callbri@bri.co.id;
5. Internet banking di <https://ib.bri.co.id>;
6. Media sosial twitter di @kontakbri;
7. Media sosial facebook di BANK BRI@BRIofficialpage;
8. Telegram dan SMS di 0812 12 14017.
9. Layanan Toll Free khusus Agen BRILink 0800 10 14017

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah, BRI menetapkan service level agreement (SLA) yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Adapun mekanisme pengaduannya nasabah BRI adalah sebagai berikut:





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Cara Pengaduan:

1. Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial/pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
2. Nasabah dapat segera melaporkan pengaduannya kepada BRI melalui sarana yang telah ditentukan sesegera mungkin apabila nasabah mengalami kondisi pada poin 1.
3. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui sarana media yang telah tersedia.
4. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dilengkapi dengan informasi data nasabah dan permasalahan yang diadukan.
5. Pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan di Unit Kerja Operasional/melalui fax harus dilengkapi dengan:
 - a. Formulir pengaduan nasabah dan permasalahan yang diadukan.
 - b. Fotocopy kartu identitas nasabah.
 - c. Bukti transaksi keuangan di BRI yang terkait dengan permasalahan yang diadukan/dokumen pendukung lainnya yang terkait pengaduan.
6. Pengaduan melalui email harus dilengkapi dengan
 - a. Data nasabah dan permasalahan yang diadukan.
 - b. Scan file/data capture bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan pengaduan yang diajukan.
7. Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
8. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah, maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui media perbankan.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

Kebijakan

Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- Mengutamakan kepentingan publik.
- Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
- Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

Komitmen

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan.

Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

- Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (Annual Disclosure) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
- Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

Sosialisasi

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, kegiatan workshop, In House Training, Pembinaan dan Monitoring secara onsite ke unit kerja BRI, pembelajaran atau e-learning melalui portal internal BRI, dan pernyataan benturan kepentingan.

Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2019

Tidak terdapat laporan transaksi benturan kepentingan sepanjang tahun 2019.

PENCEGAHAN INSIDER TRADING

Insider Trading merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan.

Kebijakan

Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan insider trading bagi seluruh insan BRI. Kebijakan insider trading tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Kebijakan terkait kegiatan insider trading mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang

diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.

2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktifitas yang terkait dengan insider trading yang merujuk pada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan diatas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan (Annual Disclosure) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi insider trading yang dilakukan oleh insan BRI.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

RENCANA STRATEGIS BANK

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang BRI 2018 – 2022, Aspirasi yang akan dicapai dituangkan ke dalam visi BRI yaitu menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent.

Dalam penyusunan Corporate Plan 2018 – 2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI juga beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan, antara lain:

- Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi millennial yang akrab dengan teknologi digital.
- Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan serta pengembangan dan pemberdayaan pedesaan.
- Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank-bank baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.
- Perubahan preferensi nasabah yang berpengaruh kepada pertumbuhan nasabah yang digitally savvy. Digitally Savvy yang dimaksud adalah perubahan perilaku para nasabah yang lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan hemat waktu. Para nasabah menyukai cara bertransaksi yang tidak lagi dibatasi waktu dan juga tempat.

Rencana Strategis Jangka Panjang

Dalam penyusunan Corporate Plan 2018-2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, penyusunan Rencana Jangka Panjang tersebut akan menjadi guideline proses transformasi BRI. Sampai dengan Tahun 2022, BRI memiliki aspirasi untuk menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent.

Rencana Strategis Jangka Menengah

Recana jangka menengah BRI merupakan *milestone* untuk pencapaian visi dan misi bank BRI kedepan. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, BRI juga menetapkan tema-tema tahunan agar strategi yang dilakukan dapat terfokus untuk menjapai target jangka panjang. BRI juga fokus pada *sustainability finance* dimana BRI tidak hanya tumbuh tetapi juga peduli pada keberlanjutan usaha serta lingkungan. Dalam jangka menengah BRI fokus pada beberapa hal berikut:

- Pertumbuhan simpanan yang fokus pada CASA
- Fokus pada segmen UMKM khususnya bisnis Mikro
- Pertumbuhan pendapatan berbasis fee
- Perbaikan kualitas aset

Rencana strategis Jangka Pendek

BRI menetapkan tema tahunan dalam rencana perusahaan di tahun 2020 yaitu menjadi *Integrated Financial Solution*. Untuk mewujudkan tema tersebut BRI ingin memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah dengan menawarkan *experience* yang memuaskan bukan hanya untuk produk-perbankan konvensional namun juga produk yang dimiliki perusahaan anak. Pengembangan teknologi yang dilakukan juga menjadi landasan utama dalam memberikan layanan terbaik ditambah dengan transformasi digital serta data *analytics* diharapkan mampu mendukung pencapaian target jangka panjang yaitu menjadi *The MostValuable Bank in SouthEast Asia* dan *Hometothe Best Talent*. Dalam jangka pendek, BRI menyusun target strategis antara lain:

Rencana Jangka Pendek yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (tahun) adalah sebagai berikut:

- Fokus pada *fee-basedIncome*
- Pertumbuhan aset produktif yang fokus pada segmen UMKM
- Pertumbuhan dana murah (CASA)
- Perbaikan kualitas asset
- Peningkatan kapabilitas operasional

KEBIJAKAN LAINNYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan operasional bank yang optimal, dibutuhkan suatu pedoman kebijakan akuntansi yang didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Kebijakan akuntansi BRI disusun dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyempurnakan akuntansi BRI untuk disesuaikan dengan ketentuan PSAK, PAPI, dan Peraturan OJK;
2. Memberikan pedoman bagi bank dalam melaksanakan praktik akuntansi yang sehat;
3. Menyeragamkan penerapan perlakuan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
4. Mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan BRI, sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat, serta dapat memberikan informasi yang mudah dipahami bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang memerlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, peraturan dan praktik yang diterapkan bank sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan OJK. Dengan adanya Kebijakan Akuntansi yang dibuat secara tertulis, maka BRI mempunyai pedoman/acuan standard untuk melaksanakan dan menerapkan asas-asas akuntansi yang sehat.

Selanjutnya, sehubungan dengan standar akuntansi keuangan yang terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan, maka BRI pun juga terus melakukan penyempurnaan atas pedoman kebijakan akuntansi agar comply terhadap ketentuan yang berlaku

Penerapan Konvergensi PSAK ke IFRS

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, BRI berpedoman pada kebijakan akuntansi yang salah satunya didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dimana DSAK-IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke IFRS secara bertahap dengan dukungan dari para regulator.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku

Tidak terdapat ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku.

Perubahan & Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi 2019

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka. Mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan". Mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

PSAK No. 24 (Amandemen 2018), "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program". Memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Lainnya

terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada saat awal pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK No. 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlibat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak atas aset berubah.

Penerapan PSAK di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Keseluruhan perubahan di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK

Bank BRI memiliki kebijakan pengelolaan perusahaan anak yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.759-DIR/CDS/09/2017 tentang Kebijakan Umum Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak BRI. Didalam kebijakan tersebut diantaranya mengatur tentang:

1. Prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan pengelolaan perusahaan anak.
2. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia
3. Penyertaan modal
4. Perencanaan dan strategi perusahaan anak
5. Keselarasan bisnis dan Joint Infrastructure
6. Pelaporan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Perusahaan Anak dan Perusahaan Partisipasi
7. Integrasi manajemen risiko dengan perusahaan anak, Integrasi Kepatuhan dengan Perusahaan Anak
8. Integrasi Tata Kelola (Governance) dengan Perusahaan
9. Akuntansi dan Perpajakan
10. Komunikasi Korporasi
11. Integrasi Audit Intern dengan Perusahaan Anak
12. Pengelolaan Perusahaan Anak di Luar Negeri

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi
 - a. Visi dan Misi Perusahaan
 - b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
 - c. Komposisi dan profil Direksi
 - d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Dana Besar (Large Exposure)

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK dan Penyediaan Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar (large exposure) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor:SE.36-DIR/KRD/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Kebijakan Pemberian Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait, dan hal ini wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit BRI.

Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank BRI pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar (market rate) dan wajar (arm length basis) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kewajaran Transaksi kepada Pihak Terkait

Berdasarkan ketentuan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", pihak berelasi didefinisikan antara lain:

1. Orang yang:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
 - b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.

Mekanisme Penyediaan dana kepada Pihak Terkait

1. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank diajukan secara mandiri atau kolektif melalui Divisi Operasional Kredit (OPK) dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Pemberian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib direview terlebih dahulu oleh Komite Independen BRI sebelum dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
3. Pemberian Penyediaan Dana (khusus kredit) kepada Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan secara adil dan wajar (*equal treatment*).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Ketentuan tentang pengaturan limit BMPK adalah sebagai berikut:

Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Dana Besar (Large Exposure)

2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
 3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah (aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dan/atau telah dilakukan restrukturisasi) dari Pihak Terkait.
 4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
 - a. Pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana; dan/atau
 - b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
 5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
 - a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3 dan 4.
- Pihak terkait meliputi:
1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank.
 2. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali.
 3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana pada poin 1 bertindak sebagai pengendali.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank.
 5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal.
 6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3.
 7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank.
 8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3. Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 9. Perusahaan yang:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan
 - b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3 bertindak sebagai pengendali.
 10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 9 memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut.
 11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 9 diatas.
 12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11.
 13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11.
 14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sd 11 kepada bank lain tersebut.
 15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.
- Penyediaan Dana kepada Pihak Selain Pihak Terkait
1. Penyediaan Dana kepada:
 - a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
 - b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait
 2. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) kelompok Peminjam



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Dana Besar (Large Exposure)

selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

3. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
4. Penggolongan kelompok Peminjam dengan kriteria:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
5. Penggolongan Kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
 - a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
 - c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan.
 - d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma.
 - e. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

PENYEDIAAN DANA

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi banking book dan *trading book*.

- Jenis- Jenis Penyediaan Dana yaitu:
 - a. Penempatan
 - b. Transaksi Derivatif
 - c. Surat Berharga
 - d. Tagihan Akseptasi
 - e. Kredit
 - f. Penyertaan Modal
 - g. Transaksi Rekening Administratif.
- Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk:
 - a. Pengadaan pangan;
 - b. Pengadaan rumah sangat sederhana;
 - c. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energy lain yang setara;
 - d. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
 - e. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
 - f. Pengadaan dan/atau pengelolaan komoditas yang berorientasi ekspor;
 - g. Pengadaan instruktur penunjang transportasi darat, laut dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau
 - h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) yang ditetapkan dan diprioritaskan pemerintah pusat.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Dana Besar (Large Exposure)

PENGECUALIAN DARI PERHITUNGAN BMPK

Penempatan pada setiap Prime Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK dengan ketentuan:

1. Penempatan pada setiap Prime Bank;
2. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank;
3. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
4. Penempatan pada Bank Indonesia;
5. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
6. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia.
7. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan dan Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.
8. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu.
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal.

BMPK	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Tidak Terkait (Kelompok Peminjam)	BUMN
Pelanggaran BMPK	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelampauan BMPK	N/A	N/A	N/A	N/A

Transaksi kepada Pihak terkait

Pada tahun 2019, transaksi kepada pihak terkait (Related Party Transaction) telah dilakukan secara adil, berlaku umum (normal commercial terms), wajar (arm length basis) dengan rincian sebagai berikut:

Penyediaan dana	Jumlah Debitur	OS (Juta)
Pihak Terkait	593	3.473.205
Individu	50	145.090.641
top 25 BUMN	25	84.006.661
top 25 non BUMN	25	59.589.495
Group	50	161.267.078
Top 25 Group BUMN	25	99.095.656
Top 25 Group Non BUMN	25	63.617.486

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama periode pelaporan, Bank tidak memberikan/menyalurkan dana untuk kegiatan politik.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

- Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Direksi Nokep: S.07-DIR/KPS/02/2017 tanggal 22 Februari 2017. Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Koordinator Pelaporan LHKPN
Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 285 pekerja BRI (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN selama tahun 2019 sebagai berikut:

No	Jabatan	Wajib LHKPN	Wajib LHKPN yang telah Melaporkan		Wajib LHKPN yang Belum Melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	12	12	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	287	282	98.26%	5	1.74%
Total		307	302	98.37%	5	1.63%

LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, BRI sebagai Entitas Utama melakukan Pelaporan Tahunan atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Keterangan
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Hasil Analisa	
Struktur	Aspek struktur tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta didukung oleh Unit Kerja Subsidiary Management. Selain itu Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah menjadi pedoman kerja untuk Entitas Utama dan Entitas Anak dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI
Proses	Aspek proses tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsisten melakukan review dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ tata kelola terintegrasi tersebut.
Hasil	Aspek hasil tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh anggota Konglomerasi Keuangan BRI telah menjalankan tugas melalui organ-organ tata kelola, dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Transaksi Intra Group

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan diberbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan POJK Nomor:17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group.

Kebijakan transaksi intra group diatur dalam ketentuan internal BRI yang ditetapkan dalam SK Direksi BRI No:S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi BRI. Pengendalian risiko intra group bertujuan agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan ketergantungan LJK baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam konglomerasi keuangan.

BRI senantiasa mengawasi kinerja dan risiko bisnis yang timbul pada perusahaan anak dengan memastikan transaksi intra group sesuai aturan dan limit yang ditetapkan oleh regulator.

Struktur Konglomerasi Keuangan BRI dan Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

Sesuai surat BRI kepada OJK No.B.72-DIR/KPT/GCG/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Struktur Konglomerasi Keuangan BRI adalah sebagai berikut:



Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Struktur Kepemilikan

Perusahaan Anak				
Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19/12/2007	73%	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	03/03/2011	87.10%	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
BRI Life	Asuransi	29/12/2015	91%	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta
BRI Finance	Financing	30/09/2016	99.78%	Lippo Kuningan, Lantai 1 Jl. HR Rasuna Said Kav.B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
BRI Ventures	Modal Ventura	20/12/2018	99.97%	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	21/12/2018	67.00%	Gedung BRI II Lantai 23 Jl Jend Sudirman No 44 – 46 Jakarta 10210
BRINS	Perusahaan Asuransi Umum	26/09/2019	90.00%	Graha BRINS Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Komite TKT	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
BRI Syariah	√	√	√	√
BRI Agro	√	√	√	√
BRI Life	√	√	√	√
BRI Finance	√	√	√	√
BRI Venture	√	√		√
Danareksa Sekuritas	√	√	√	√
BRINS	√	√	√	√



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Struktur Organisasi Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI

Entitas Utama

Struktur Organisasi Entitas Utama dibahas dalam BAB Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Anggota Konglomerasi Keuangan BRI

BRI Syariah

Dewan Komisaris

Parman Nataatmadja*	Komisaris Utama
Eko Suwardi	Komisaris Independen
Ernie Tisnawati Sule*	Komisaris Independen
Sutanto	Komisaris

* subject to fit & proper test OJK

Direksi

Ngatari*	Direktur Utama
Kokok Alun Akbar	Direktur
Fidri Arnaldy	Direktur
Fahmi Subandi	Direktur
Yana Soeprianan*	Direktur

Dewan Pengawas Syariah - BRISyariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRISyariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRISyariah, namun DPS juga melakukan kepastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Dewan Pengawas

KH. Didin Hafidhuddin	Ketua DPS
M. Gunawan Yasni	Anggota DPS

*) Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

BRI Agro**Dewan Komisaris**

Anna Maria Tjiadarma	Plt. Komisaris Utama & Komisaris Independen
I.B.K. Suamba Manuaba*	Komisaris
A.Y. Soepadmo	Komisaris Independen

Direksi

Ebeneser Girsang	Plt. Direktur Utama
Sigit Murtiyoso	Direktur
Bambang Krisminarno	Direktur
Herry Prayudi	Direktur

BRI Life**Dewan Komisaris**

Tri Wintarto	Komisaris Utama
Sapto Haryono Wahyu S.	Wakil Komisaris Utama
M. Ridwan Rizqi R. Nasution	Komisaris Independen
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
Eko Wahyu Andriastono	Komisaris Independen
Siswarin D. Hendarsapti	Komisaris

Direksi

Gatot Mardiwasisito Trisnadi	Direktur Utama
Sugeng Sudibjo	Direktur
Khairi Setiawan	Direktur
Ansar Arifin	Direktur
Danny Cahya Rukmana	Direktur
Anik Hidayati	Direktur



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Pengawas Syariah - BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah

KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua DPS
Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota DPS
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota DPS

BRI Finance

Dewan Komisaris

I Komang Sudiarso	Komisaris Utama
Ngalim Sawego	Komisaris
Boyke Budiono	Komisaris Independen

Direksi

Wisto Prihadi	Direktur Utama
Handayatni Ariefiana Harjanti	Direktur
Achmad Chairul Ganie	Direktur
Willy Halim Sugiarda	Direktur

BRI Venture

Dewan Komisaris

Hadi Susanto	Komisaris Utama
I Nyoman Sugiri Yasa	Komisaris

Direksi

Nicko Widjaja	Direktur Utama
	Direktur

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris	
	Komisaris Utama
Soehandjono	Komisaris
	Komisaris Independen
Direksi	
	Direktur Utama
Budi Susanto	Direktur
	Direktur
Santri Suryandari	Direktur
Boumediene Samurung Halomoan	Direktur

BRINS

Dewan Komisaris	
Siswanto	Komisaris Utama
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
Imam Sundoro	Komisaris Independen
Direksi	
Tri Wintarto	Direktur Utama
Achmad Chumaidi	Direktur
Sutarno	Direktur
Adi Setianto	Direktur
Ade Zulfikar	Direktur

Dewan Pengawas Syariah (DPS) - BRINS

Bertugas tidak terbatas hanya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun memastikan aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
Ibu Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua DPS
Bapak Muhammad Syukhandri	Anggota DPS



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BRI, Entitas Utama memiliki pedoman untuk mendorong LJK Konglomerasi keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasi pedoman tersebut, seluruh organ entitas utama dan LJK konglomerasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi.

Direksi Entitas Utama

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris dan Direksi Anggota LJK

Dewan Komisaris LJK Konglomerasi Keuangan

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran DPS BRISyariah

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut.

Dewan Pengawas Syariah BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis disupport oleh manajemen, terhadap:

1. Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
2. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
3. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
3. Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
4. Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
5. Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
6. Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
8. Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
9. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
10. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
4. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Direksi LJK Konglomerasi Keuangan

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.
3. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Mengacu pada POJK tentang Tata Kelola Terintegrasi, POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI dan disetujui oleh Direksi Konglomerasi Keuangan BRI tentang Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI, tertuang tugas dan tanggung jawab SKAI Terintegrasi sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direksi Utama Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam konglomerasi keuangan minimal meliputi:
 - a. Laporan kegiatan audit dan laporan pokok-pokok hasil audit perusahaan anak.
 - b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian fraud signifikan yang terjadi di Perusahaan Anak.
 - c. Kualitas SKAI Perusahaan Anak yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, Sumber Daya Manusia (SDM) dan tools audit.
3. Melaksanakan audit atau join audit dengan SKAI Perusahaan Anak atau berdasarkan laporan dan internal audit Perusahaan Anak secara independen, objektif dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak setelah mendapat persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang ditaur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI Perusahaan Anak secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
6. SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
8. SKAI terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi pada perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bersifat independen, terpisah dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan unit kerja operasional (risk taking unit) di BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan BRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak. Koordinasi dilakukan antara lain dengan cara penyampaian informasi eksposur masing-masing Perusahaan Anak kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI dan kepada RMC Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
3. Melakukan pemantauan risiko pada Perusahaan Anak berdasarkan hasil penilaian :
 - a. Profil Risiko setiap Perusahaan Anak
 - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
 - c. Profil Risiko Terintegrasi
4. Melakukan stress testing terintegrasi
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
6. Melakukan pelaksanaan kaji ulang secara berkala bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal terhadap Konglomerasi Keuangan BRI
7. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan
8. Memberikan informasi kepada RMC Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi BRI atau Perusahaan Anak.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan BRI dan kepada RMC Terintegrasi. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan jika kondisi pasar berubah dengan cepat.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2019

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan dua kali rapat bersama LJK Konglomerasi Keuangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2018, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Semester II 2018, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2018, dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester II 2018
3. Fungsi Kepatuhan dan Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I 2019
4. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I 2019

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada konglomerasi keuangan.
3. Penilaian self assessment TKT pada konglomerasi keuangan BRI.
4. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi strategic business partner dalam mendukung tujuan perusahaan dalam konglomerasi keuangan dan untuk memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, maka selama tahun 2019 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Penetapan Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua Satuan Kerja Audit Intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI.

2. Melaksanakan evaluasi terhadap fokus dan strategi audit SKAI Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2019 masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring, sbb:
 - a. Monitoring pencapaian kinerja Perusahaan Anak
 - b. Monitoring Laporan Hasil Audit Perusahaan Anak
 - c. Monitoring tindak lanjut temuan signifikan Perusahaan Anak
 - d. Monitoring pemenuhan SDM Audit Perusahaan Anak
4. Melaksanakan audit individual dalam hal pengadaan dan core banking serta audit non IT di BRI Life.
5. Melaksanakan joint audit dengan BRI Agro dan BRI Syariah (bidang IT dan Non IT).
6. Melaksanakan Quality Assurance Review and Improvement Program (QAIP) di SKAI Perusahaan Anak dalam rangka mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. QAIP yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi terhadap SKAI Perusahaan Anak dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar, kode etik Auditor dan menilai efisiensi serta efektivitas aktivitas audit internal untuk kemudian diidentifikasi peluang peningkatannya. Selama tahun 2019, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan Quality Assurance terhadap SKAI BRI Syariah dan BRI Life.
7. Penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan Auditor LJK Konglomerasi Keuangan BRI dengan materi sbb:
 - a. Training Root Cause Analysis pada tanggal 20 – 22 Maret 2019.
 - b. Training Audit Investigatif pada tanggal 25 – 29 Maret 2019.
 - c. Training Implementasi PSAK 71 pada tanggal 10 – 11 Oktober 2019.

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

8. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi setiap semester.
9. Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi setiap semester. Hasil penilaian sendiri terhadap Faktor 5 Indikator Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi baik meliputi aspek struktur, proses dan hasil adalah 1 (sangat baik). Atas penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum SKAI Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
10. Dalam rangka akselerasi proses transfer knowledge dari SKAI BRI kepada SKAI Perusahaan Anak, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BRI Agro : Kepala SKAI (1 Orang), Wakil Kepala SKAI (1 Orang), Auditor TI (1 Orang), Auditor (2 Orang)
 - b. BRI Life : KTA (1 Orang), 3 (tiga) Orang Auditor
 - c. BRI Finance : 2 orang Auditor

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selama periode tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.
5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.
6. Stress Test Terintegrasi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) (KPM)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN

I.	MODAL INTI (Tier 1)
1.	Modal Inti Utama (CET 1)
1.1.	Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)
a.	Saham biasa
b.	Saham preferen
1.2.	Cadangan Tambahan Modal *)
1.2.1.	Faktor Penambah :
1.2.1.1.	Pendapatan Komprehensif Lainnya
1.2.1.1.1.	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
1.2.1.1.2.	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.1.1.3.	Saldo surplus revaluasi aset tetap
1.2.1.2.	Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)
1.2.1.2.1.	Agio
1.2.1.2.2.	Cadangan Umum
1.2.1.2.3.	Laba tahun-tahun lalu
a.	Laba tahun lalu
b.	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
c.	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
1.2.1.2.4.	Laba tahun berjalan
a.	Laba tahun berjalan
b.	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
c.	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
1.2.1.2.5.	Dana Setoran Modal
1.2.1.2.6.	Lainnya
1.2.2.	Faktor Pengurang :
1.2.2.1.	Pendapatan Komprehensif Lainnya
1.2.2.1.1.	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
1.2.2.1.2.	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.2.2.	Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)
1.2.2.2.1.	Disagio
1.2.2.2.2.	Rugi tahun-tahun lalu
1.2.2.2.3.	Rugi tahun berjalan
1.2.2.2.4.	Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
1.2.2.2.5.	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>
1.2.1.2.6.	PPA aset non produktif yang wajib dibentuk
1.2.1.2.7.	Lainnya

Manajemen Risiko

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 18		31 DESEMBER 19	
Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
164,924,546	172,358,004	187,012,209	197,219,352
164,924,546	172,358,004	187,012,209	197,219,352
6,111,861	6,111,861	6,424,794	6,424,794
6,111,861	6,111,861	6,424,794	6,424,794
173,305,084	172,705,454	196,978,130	198,099,128
175,257,520	174,797,796	197,035,154	198,254,265
13,873,912	13,873,912	17,590,764	17,577,033
49,220	49,220	0	0
0	0	726,681	712,950
13,824,692	13,824,692	16,864,083	16,864,083
161,383,608	160,923,884	179,444,390	180,677,232
410,340	410,340	618,004	618,004
3,022,685	3,022,685	3,022,685	3,022,685
126,248,608	125,608,444	141,775,016	142,937,516
126,248,608	125,608,444	141,775,016	142,937,516
0	0	0	0
0	0	0	0
31,701,975	31,882,415	34,028,685	34,099,027
31,701,975	31,882,415	34,028,685	34,099,027
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,952,436	2,092,342	57,024	155,137
1,919,488	1,971,392	14,868	30,633
0	0	14,868	14,868
1,919,488	1,971,392	0	15,765
32,948	120,950	42,156	124,504
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	71,755	0	66,101
0	0	0	0
32,948	36,851	42,156	46,059
0	12,344	0	12,344



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN

1.3.	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan
1.4.	Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)
1.4.1.	Perhitungan pajak tangguhan
1.4.2.	<i>Goodwill</i>
1.4.3.	Selisih aset tidak berwujud lainnya
1.4.4.	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
1.4.5.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
1.4.6.	Eksposur sekuritisasi
1.4.7.	Faktor pengurang modal inti utama lainnya
1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
2.	Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1</i> (AT 1) *)
2.1.	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1
2.2.	<i>Agio/Disagio</i>
2.3.	Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain *)
2.3.1.	Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
2.3.2.	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
II.	MODAL PELENGKAP (Tier 2)
1.	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2
a.	Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
b.	Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
c.	Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
d.	<i>Mandatory convertible bond</i>
e.	Penerbitan Tier 2 oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)
f.	Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa (-/-)
2.	<i>Agio / disagio</i>
3.	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
4.	Faktor pengurang modal pelengkap *)
4.1.	<i>Sinking Fund</i>
4.2.	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain
4.3.	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar

(Dalam Jutaan Rupiah)

Laporan Tahunan **2019**



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN

TOTAL MODAL

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

ATMR RISIKO KREDIT

ATMR RISIKO PASAR

ATMR RISIKO OPERASIONAL

TOTAL ATMR

RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISK (%)

ALOKASI PEMENUHAN KPMM

Dari CET 1 (%)

Dari AT1 (%)

Dari Tier 2 (%)

RASIO KPMM

Rasio CET 1 (%)

Rasio Tier 1 (%)

Rasio Tier 2 (%)

Rasio Total (%)

CET UNTUK BUFFER (%)

PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)

Capital Conversion Buffer (%)

Countercyclical Buffer (%)

Capital Surcharge untuk D-SIB (%)

1) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

Manajemen Risiko

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 18		31 DESEMBER 19	
Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
173,618,421	182,387,311	195,986,650	207,379,430
659,319,661	690,764,915	689,093,355	726,179,371
11,078,731	11,229,322	13,712,721	14,004,256
148,209,848	152,229,031	166,214,312	170,666,840
818,608,240	854,223,268	869,020,388	910,850,467
9.53%	9.53%	9.60%	9.61%
8.47%	8.36%	8.57%	8.49%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.06%	1.17%	1.03%	1.12%
20.15%	20.18%	21.52%	21.65%
20.15%	20.18%	21.52%	21.65%
1.06%	1.17%	1.03%	1.12%
21.21%	21.35%	22.55%	22.77%
11.68%	11.82%	12.95%	13.16%
3.750%	3.750%	5.000%	5.000%
1.875%	1.875%	2.500%	2.500%
0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
1.875%	1.875%	2.500%	2.500%



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 1.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	290,583,943	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	72,258,144	3,354,518
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	87,019,078	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	9,371	14,537
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,140,176	482,526
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	19,930,508	63,958,293
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40,669,961	75,876,544
9	Tagihan kepada Korporasi	143,431,672	25,555,693
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	896,689	2,162,631
11	Aset Lainnya	36,120,610	11,638,859
	Total	693,060,153	183,043,601

Tabel 1.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	337,788,093	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	71,252,844	513,691
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	76,753,965	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,132,605	1,135,774
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,128,932	1,844,683
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	20,972,639	66,889,978
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45,616,667	84,335,969
9	Tagihan kepada Korporasi	126,921,206	30,342,484
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,272,258	2,318,011
11	Aset Lainnya	28,924,964	13,619,180
	Total	713,764,173	200,999,770

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018**Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**

Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	0	0	2,544,738	293,128,681
4,904,531	0	3,216,100	3,693,366	1,106,464	88,533,123
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	107,850	87,126,928
3,444	2,794	2,834	6,887	7,006	46,873
16,391	57,950	143,632	76,280	3,518	2,920,473
13,815,174	11,081,194	15,237,800	25,163,911	5,646,570	154,833,450
29,242,575	56,117,337	44,701,934	52,022,747	10,552,347	309,183,445
11,514,390	15,733,269	18,699,369	27,634,569	8,574,864	251,143,826
665,473	768,692	1,055,156	1,776,402	262,667	7,587,710
5,326,231	5,571,022	4,643,038	7,295,083	2,783,561	73,378,404
65,488,209	89,332,258	87,699,863	117,669,245	31,589,585	1,267,882,914

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**

Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
0	0	0	0	1,761,903	339,549,996
4,866,019	0	3,123,089	3,126,717	1,224,958	84,107,318
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	76,753,965
446,241	691,889	714,792	598,443	73,210	4,792,954
519,702	495,848	433,717	1,166,580	155,055	7,744,517
14,114,595	11,307,942	15,306,593	26,327,322	5,928,153	160,847,222
32,883,563	63,393,476	50,856,096	56,853,939	11,893,682	345,833,392
12,848,401	16,123,741	19,837,394	29,119,057	12,650,730	247,843,013
670,018	774,052	1,165,111	1,566,774	268,561	8,034,785
5,640,712	7,410,764	4,873,518	8,932,785	3,383,787	72,785,710
71,989,251	100,197,712	96,310,310	127,691,617	37,340,039	1,348,292,872



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 1.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	343,813,333	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	72,686,341	513,691
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	77,317,976	30
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,334,671	1,160,116
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,136,931	1,844,683
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	21,133,306	66,904,296
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	46,671,207	84,699,640
9	Tagihan kepada Korporasi	139,503,215	30,413,582
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,701,017	2,339,868
11	Aset Lainnya	29,209,109	13,620,889
	Total	736,507,106	201,496,795

Tabel 1.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	295,046,870	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	73,096,095	3,354,518
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	89,564,987	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	171,586	40,451
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,327,659	482,526
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	20,024,749	63,969,537
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	41,958,732	76,309,001
9	Tagihan kepada Korporasi	153,813,861	25,590,431
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	908,236	2,178,450
11	Aset Lainnya	36,367,037	11,642,769
	Total	713,279,812	183,567,683

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**

Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	0	0	1,761,903	345,575,236
4,866,019	0	3,123,089	3,126,717	1,224,958	85,540,815
0	0	0	0	0	0
11	20	36	80	0	77,318,153
470,628	711,766	741,783	686,123	73,210	5,178,297
519,702	495,848	433,717	1,168,049	155,055	7,753,985
14,181,174	11,324,732	15,318,755	26,707,548	5,928,153	161,497,964
32,947,454	63,529,281	50,930,977	57,722,328	11,893,682	348,394,569
12,874,979	16,201,438	20,006,611	29,593,146	12,650,729	261,243,700
832,464	824,588	1,260,112	1,702,318	268,561	8,928,928
5,648,527	7,413,839	4,876,695	8,970,787	3,383,787	73,123,633
72,340,958	100,501,512	96,691,775	129,677,096	37,340,038	1,374,555,280

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**

Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
0	0	0	0	2,544,738	297,591,608
4,904,531	0	3,216,100	3,693,366	1,106,464	89,371,074
0	0	0	0	0	-
0	0	0	479	107,850	89,673,316
31,724	15,592	18,126	64,939	7,006	349,424
16,391	57,950	184,447	92,022	3,518	3,164,513
13,885,650	11,084,898	15,243,663	25,441,297	5,646,570	155,296,364
29,298,307	56,235,213	44,814,558	52,860,562	10,552,347	312,028,720
11,541,715	15,928,427	18,957,279	28,083,166	8,574,864	262,489,743
779,680	808,993	1,061,360	1,846,370	262,667	7,845,756
5,334,637	5,574,613	4,648,206	7,331,352	2,783,561	73,682,175
65,792,635	89,705,686	88,143,739	119,413,553	31,589,585	1,291,492,693



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 2.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18,757	1,134
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	23,646,149	14,395,282
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	38,326,561	3,432,907
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	9
6	Kredit Beragun Properti Komersial	982	25,773
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	136,137	4,460,772
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	34,968,490	142,616,334
9	Tagihan kepada Korporasi	30,420,947	46,750,034
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	472,096	1,909,628
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	127,990,119	213,591,873

Tabel 2.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259	1,139
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29,053,329	4,841,640
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28,442,760	4,442,779
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	18,991
6	Kredit Beragun Properti Komersial	421	440,001
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	109,820	3,794,541
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	39,295,904	153,465,444
9	Tagihan kepada Korporasi	38,609,717	41,662,652
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	585,785	1,926,963
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	136,097,995	210,594,150

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018**Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak**

	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	(5)	(6)	(7)	(8)
	288	14,431,524	278,676,978	293,128,681
	6,337,035	38,115,319	6,039,338	88,533,123
	-	-	-	-
	6,271,376	5,995,574	33,100,510	87,126,928
	1,868	44,996	-	46,873
	1,080,345	1,813,373	-	2,920,473
	19,625,346	130,610,791	404	154,833,450
	79,540,586	49,878,711	2,179,324	309,183,445
	33,940,432	114,682,144	25,350,269	251,143,826
	1,883,136	3,322,850	-	7,587,710
	-	-	73,378,404	73,378,404
	148,680,412	358,895,282	418,725,227	1,267,882,913

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak**

	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	14,932,014	324,616,584	339,549,996
	6,394,286	43,618,836	199,227	84,107,318
	-	-	-	-
	6,100,046	5,524,021	32,244,359	76,753,965
	226,152	4,547,811	-	4,792,954
	3,005,204	4,298,891	-	7,744,517
	17,501,102	139,441,414	345	160,847,222
	98,129,426	52,257,204	2,685,414	345,833,392
	42,844,654	114,122,150	10,603,840	247,843,013
	1,955,360	3,566,677	-	8,034,785
	-	-	72,785,710	72,785,710
	176,156,230	382,309,018	443,135,479	1,348,292,872



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 2.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4,481,684	1,134
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24,086,354	14,793,028
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	40,822,308	3,436,907
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	949	17,095
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11,320	165,812
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	153,408	4,548,386
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	36,034,647	142,795,884
9	Tagihan kepada Korporasi	34,272,654	47,332,992
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	570,739	1,923,484
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	140,434,063	215,014,722

Tabel 2.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,025,499	1,139
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29,482,241	5,240,245
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28,956,564	4,482,778
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,277	35,623
6	Kredit Beragun Properti Komersial	8,017	440,053
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	144,921	3,897,193
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40,230,306	153,691,654
9	Tagihan kepada Korporasi	42,571,425	42,310,230
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	754,801	2,030,148
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	148,175,051	212,129,063

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018**Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak**

	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	(5)	(6)	(7)	(8)
	288	14,431,524	278,676,978	297,591,608
	6,337,035	38,115,319	6,039,338	89,371,074
	-	-	-	-
	6,318,018	5,995,574	33,100,510	89,673,317
	41,578	289,801	-	349,423
	1,172,515	1,814,866	-	3,164,513
	19,809,064	130,785,102	404	155,296,364
	79,770,520	51,248,345	2,179,324	312,028,720
	35,632,751	119,901,078	25,350,268	262,489,743
	1,893,397	3,458,136	-	7,845,756
	-	-	73,682,175	73,682,175
	150,975,166	366,039,745	419,028,997	1,291,492,693

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak**

	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	14,932,014	324,616,584	345,575,236
	6,702,583	43,916,519	199,227	85,540,815
	-	-	-	-
	6,110,431	5,524,021	32,244,359	77,318,153
	276,888	4,864,509	-	5,178,297
	3,005,353	4,300,563	-	7,753,985
	17,658,139	139,797,366	345	161,497,964
	98,584,167	53,203,028	2,685,414	348,394,569
	44,728,059	121,030,146	10,603,840	261,243,700
	2,080,877	4,063,102	-	8,928,928
	-	-	73,123,633	73,123,633
	179,146,497	391,631,268	443,473,402	1,374,555,280



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 3.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kpd Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 DESEMBER 2018				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	3,820,702	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	517,088	-
4	Industri pengolahan	-	10,564,119	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	25,677,691	-
6	Konstruksi	-	5,638,043	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	18,908,256	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	5,102,956	-
10	Perantara keuangan	276,042,591	6,724,830	-
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	65,598	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,544,738	274,638	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,252,296	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,431,525	1,058,150	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	109,827	6,928,756	-
	Total	293,128,681	88,533,123	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	5,305	293,476	41,974,011	41,311,686	502,480	-
-	-	-	6,951	3,089,367	627,694	46,403	-
-	-	-	15,198	419,554	4,420,289	24,718	-
495,372	-	-	31,841	11,239,009	40,197,836	242,813	-
-	-	-	12,084	371,314	11,296,833	6,199	-
12,138	-	-	134,256	1,127,507	26,156,427	147,898	-
4,033	459	-	44,534	173,558,973	79,101,759	4,899,766	-
1,257	-	1,761,048	2,540	3,511,141	1,870,727	77,046	-
-	-	1,092,289	20,420	4,754,217	10,135,951	107,978	-
38,465,024	-	-	28,035	342,074	2,593,033	7,977	-
6,028	3,216	61,831	73,316	3,995,938	4,721,188	98,232	-
-	-	-	2,374,201	176,936	68,752	2,943	-
-	-	-	564,943	406,996	291,972	3,089	-
-	-	-	393,839	1,074,865	2,162,998	23,576	-
-	-	-	917,893	15,873,841	5,607,298	204,583	-
-	-	-	26,626	1,554,049	234,286	26,112	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,598,510	1,468	-	7,911,725	11,511,770	3,365,632	221,087	-
-	41,730	-	141,981,572	34,177,355	10,322,632	944,810	-
45,544,566	-	-	-	24,528	6,656,833	-	73,378,404
87,126,928	46,873	2,920,473	154,833,450	309,183,445	251,143,826	7,587,710	73,378,404



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 3.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kpd Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 DESEMBER 2019				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	3,788,439	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	8,081,324	-
4	Industri pengolahan	-	6,026,226	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	26,266,561	-
6	Konstruksi	-	3,862,118	-
7	Perdagangan besar dan eceran	259	16,352,038	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	4,161,737	-
10	Perantara keuangan	322,832,366	2,435,916	-
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	82,839	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,761,903	202,928	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	3,500,000	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	786,004	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	291,696	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,932,014	336,605	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	23,454	7,932,887	-
	Total	339,549,996	84,107,318	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	509	368,155	446,326	50,077,081	38,473,704	471,233	-
-	1,917	9,331	7,242	4,100,560	672,348	64,267	-
-	581	121,195	24,119	495,608	6,126,944	32,023	-
244,612	340	398,567	38,238	18,717,867	34,047,892	293,455	-
-	-	319,981	14,778	461,135	12,382,202	14,870	-
6,415	3,525	279,658	159,712	1,270,302	34,039,958	264,063	-
2,798	21,753	2,423,385	66,328	180,269,121	71,509,164	4,843,184	-
1,248	-	2,058,186	3,806	5,547,096	1,807,750	169,433	-
-	1,984	725,540	22,751	5,455,925	9,794,977	142,091	-
34,371,653	1,102	10,571	51,021	430,690	5,793,383	5,505	-
713	115,098	347,565	81,292	4,209,001	4,550,302	117,263	-
-	2,607	1,789	3,080,620	207,899	84,023	5,191	-
-	683	73,428	589,042	459,626	368,131	9,111	-
-	663	246,170	446,790	1,134,122	1,820,751	24,765	-
-	2,149	336,149	1,323,735	19,551,947	6,069,479	247,072	-
-	-	19,230	45,927	1,351,654	207,046	23,139	-
2,287	-	-	-	7,343	99,740	-	-
2,217,715	8,975	3,173	5,482,472	14,978,236	3,115,685	164,032	-
-	4,631,068	2,444	148,963,023	37,102,734	11,635,961	1,144,088	-
39,906,524	-	-	-	5,445	5,243,573	-	72,785,710
76,753,965	4,792,954	7,744,517	160,847,222	345,833,392	247,843,013	8,034,785	72,785,710



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 3.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 DESEMBER 2018				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4,526,297	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	517,088	-
4	Industri pengolahan	-	10,564,119	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	25,677,691	-
6	Konstruksi	-	5,638,043	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	18,908,256	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	5,102,956	-
10	Perantara keuangan	276,042,591	6,857,186	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	65,598	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,544,738	274,638	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,252,296	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,431,525	1,058,150	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	4,572,754	6,928,756	-
	Total	297,591,608	89,371,074	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	18,498	293,476	43,380,974	47,817,401	524,478	-
-	-	-	6,951	3,100,203	627,694	47,364	-
-	-	-	15,198	451,088	4,421,789	25,307	-
495,372	-	-	31,841	11,334,022	42,378,653	253,780	-
-	-	-	12,084	380,248	11,699,130	6,382	-
12,138	-	115,920	134,256	1,274,444	26,418,531	158,588	-
4,033	1,234	1,209	44,534	174,244,783	80,260,562	4,956,243	-
1,257	-	1,789,311	2,540	3,593,816	1,911,700	156,940	-
-	-	1,092,289	20,420	4,810,445	10,305,448	111,122	-
41,011,412	-	-	28,035	390,538	3,173,027	7,977	-
6,028	3,216	123,840	73,316	4,132,577	4,738,670	139,327	-
-	-	-	2,374,201	176,936	68,752	2,943	-
-	-	-	564,943	408,048	291,972	3,089	-
-	-	-	393,839	1,099,422	2,162,998	23,576	-
-	-	-	917,893	15,957,472	5,634,033	211,464	-
-	-	23,445	26,626	1,557,072	234,286	26,112	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,598,510	303,243	-	8,374,639	11,534,747	3,365,632	246,253	303,773
-	41,730	-	141,981,572	34,177,356	10,322,632	944,810	-
45,544,566	-	-	-	24,528	6,656,833	-	73,378,404
89,673,316	349,423	3,164,512	155,296,364	312,028,719	262,489,743	7,845,755	73,682,177



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 3.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 DESEMBER 2019				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4,478,875	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	8,081,324	-
4	Industri pengolahan	-	6,026,226	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	26,405,478	-
6	Konstruksi	-	4,187,800	-
7	Perdagangan besar dan eceran	259	16,352,038	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	4,161,737	-
10	Perantara keuangan	322,832,366	2,638,375	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	158,842	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,761,903	202,928	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	3,500,000	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	786,004	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	291,696	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,932,014	336,605	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	6,048,694	7,932,887	-
	Total	345,575,236	85,540,815	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	509	368,304	446,326	51,342,604	44,762,004	842,134	-
-	1,917	9,331	7,242	4,110,572	675,308	66,178	-
-	581	121,195	24,119	504,836	6,147,156	36,157	-
244,612	340	399,521	38,238	18,833,150	36,235,239	385,380	-
-	-	319,981	14,778	471,358	13,324,860	14,939	-
6,415	3,525	280,927	159,712	1,420,808	35,936,128	314,780	-
2,798	21,753	2,423,923	66,328	180,915,024	72,634,440	4,990,728	-
1,248	-	2,063,630	3,806	5,590,600	1,966,538	282,765	-
-	1,984	725,540	22,751	5,514,130	10,004,578	145,309	-
34,935,841	1,102	10,571	51,021	463,571	6,189,713	5,505	-
713	115,098	348,679	81,292	4,305,369	4,686,725	172,776	-
-	2,607	1,789	3,080,620	207,899	84,023	5,191	-
-	683	73,428	589,042	460,827	368,131	9,273	-
-	663	246,170	446,790	1,158,530	1,824,033	24,765	-
-	2,149	336,149	1,323,735	19,645,650	6,086,302	258,302	-
-	-	19,230	45,927	1,355,883	208,007	23,139	-
2,287	-	-	-	7,343	99,740	-	-
2,217,715	394,318	3,173	6,133,214	14,978,236	3,131,242	207,519	337,923
-	4,631,068	2,444	148,963,023	37,102,734	11,635,961	1,144,088	-
39,906,524	-	-	-	5,445	5,243,572	-	72,785,710
77,318,153	5,178,297	7,753,985	161,497,964	348,394,569	261,243,700	8,928,928	73,123,633



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 7.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat		Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		1,831	-	-	12,663,003	2,270,150
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		5,579	46,962	-	14,855	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		522,342	403,708	430,359	2,005,466	3,193,789
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		40,054	185,265	-	2,315,882	1,038,639
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		569,806	635,935	430,359	16,999,206	6,502,578

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan Bersih****Peringkat Jangka Pendek**

B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	324,615,012	339,549,996
-	-	-	-	-	-	84,039,922	84,107,318
-	-	-	-	-	-	-	-
3,865	-	-	-	-	-	70,194,436	76,753,965
-	-	-	-	-	-	244,263,173	247,843,013
3,865	-	-	-	-	-	723,112,543	748,254,292



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 7.a.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

			Tagihan Bersih					
Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang						
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-		
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-		
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3		
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)		
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-		
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional		1,375,519	578,088	1,160,841	5,225,366	3,607,572	
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		1,342,114	225,424	121,900	2,326,340	1,076,092	
9	Tagihan kepada Korporasi							
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya		2,717,633	803,512	1,282,741	19,444,850	7,123,163	
TOTAL								

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018**Tagihan Bersih****Peringkat Jangka Pendek**

B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	278,796,038	293,128,681
-	-	-	-	-	-	88,533,123	88,533,123
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	75,179,542	87,126,928
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	246,051,957	251,143,827
-	-	-	-	-	-	688,560,660	719,932,559



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 7.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih						
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		1,831	-	-	12,663,003	2,270,150
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		140,579	46,962	-	73,645	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		522,342	403,708	430,359	2,005,466	3,193,789
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		98,480	185,265	-	2,315,882	1,038,639
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		763,232	635,935	430,359	17,057,996	6,502,578

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019**Tagihan Bersih****Peringkat Jangka Pendek**

B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	330,640,252	345,575,236
-	-	-	-	-	-	85,279,629	85,540,815
-	-	-	-	-	-	-	-
3,865	-	-	-	-	-	70,758,624	77,318,153
-	-	-	-	-	-	257,605,434	261,243,700
3,865	-	-	-	-	-	744,283,939	769,677,904



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 7.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
			Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB-
			Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB-
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3
			PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn)
			PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia		idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	11,893,144	2,439,499
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		100,000	-	-	31,068	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1,389,254	578,088	1,160,841	5,262,213	3,607,572
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		1,392,114	271,097	121,900	2,326,340	1,076,092
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		2,881,368	849,185	1,282,741	19,512,765	7,123,163

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018**Tagihan Bersih****Peringkat Jangka Pendek**

B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	283,258,965	297,591,608
-	-	-	-	-	-	89,240,006	89,371,074
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	77,675,348	89,673,316
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	257,302,200	262,489,743
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	707,476,519	739,125,742



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 8.a: Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018									
No	Variabel yang Mendasari	Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	4,797,216	2,321,766	3,593,581	69,307	91,211	127,252	-	127,252
2	Nilai Tukar	36,686,066	164,766	1,303,205	374,364	168,737	1,104,707	-	1,104,707
3	Lainnya	-	-	-	25,671	67,944	45,095	-	45,095
	TOTAL	41,483,282	2,486,532	4,896,786	469,342	327,892	1,277,054	-	1,277,054
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	4,797,216	2,321,766	3,593,581	69,307	91,211	127,252	-	127,252
2	Nilai Tukar	36,686,066	164,766	1,303,205	374,364	168,737	1,104,707	-	1,104,707
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	25,671	67,944	45,095	-	45,095
	TOTAL	41,483,282	2,486,532	4,896,786	469,342	327,892	1,277,054	-	1,277,054

Manajemen Risiko

Tabel 8.a: Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

</



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 8.b.1 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Repo Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Tabel 8.b.2 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Repo Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	2,145,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	50,030,136	49,902,938	119,557	27,119
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	50,030,136	49,902,938	2,265,031	27,119

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	2,145,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	50,030,136	49,902,938	119,557	448,227
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	50,030,136	49,902,938	2,265,031	27,119



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 8.c.1 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Reverse Repo Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Tabel 8.c.2 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Reverse Repo Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019			
Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6,723,269	-	6,723,269	-	17,644,591	-	17,644,591	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,524,128	-	1,524,128	304,826	1,789,622	-	1,789,622	357,924
-	-	-	-	-	-	-	-
1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	879,051	-	879,051	879,051
9,396,553	-	9,396,553	1,453,981	20,313,264	-	20,313,264	1,236,975

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019			
Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6,723,269	-	6,723,269	-	19,913,572	-	19,913,572	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,524,128	-	1,524,128	304,826	1,789,622	-	1,789,622	357,924
-	-	-	-	-	-	-	-
1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	879,051	-	879,051	879,051
9,396,553	-	9,396,553	1,453,982	22,582,245	-	22,582,245	1,236,975



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio					
		0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	286,356,952	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,627,557	3,699,540	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	40,361,304	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	12,742	6,992	27,139	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,253,506	18,858,390	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	20,303,139	2,545,800	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,017	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	27,170,587	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	336,712,758	65,477,776	6,992	27,139	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	478,171	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	24,449	478,171	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (<i>Counterparty Credit Risk</i>)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	46,386	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4,587,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i>)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>	6,747,281	4,634,176	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-
-	69,674,646	-	-	-	-	35,577,231	2,846,178
-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,927,858	-	-	-	-	20,036,190	1,602,895
-	-	-	-	-	-	13,795	1,104
-	-	-	2,920,473	-	-	2,920,473	233,638
-	154,833,450	-	-	-	-	77,416,725	6,193,338
-	-	288,723,154	-	-	-	220,314,044	17,625,124
-	109,400	-	221,982,961	-	-	222,546,821	17,803,746
-	-	-	1,014	7,585,679	-	11,379,533	910,363
-	-	-	46,161,739	46,078	-	46,230,856	3,698,468
-	248,545,354	288,723,154	271,066,187	7,631,757	-	636,435,668	50,914,853
-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,140,348	-	-	-	-	6,570,174	525,614
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16,482,138	-	-	-	-	8,336,703	666,936
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	348,395	-	-	-	261,296	20,904
-	-	-	4,863,633	-	-	4,863,633	389,091
-	-	-	-	-	-	-	-
-	29,622,486	348,395	4,863,633	-	-	20,031,806	1,602,544
-	-	-	-	-	-	-	-
-	344,645	-	-	-	-	181,600	14,528
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,285,904	-	3,763	-	-	1,429,803	114,384
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,338,893	-	-	1,338,893	107,111
-	-	-	-	-	-	92,268	7,381
-	1,630,550	-	1,342,656	-	-	3,042,565	243,405



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	286,356,952	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,627,557	3,699,540	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	40,361,304	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	12,742	6,992	27,139	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,253,506	18,858,390	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	20,303,139	2,545,800	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,017	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	27,170,587	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	336,712,758	65,477,776	6,992	27,139	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	478,171	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	24,449	478,171	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (<i>Counterparty Credit Risk</i>)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	46,386	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4,587,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i>)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>	6,747,281	4,634,176	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	69,674,646	-	-	-	35,577,231	2,846,178
	-	-	-	-	-	-	-
	-	23,927,858	-	-	-	20,036,190	1,602,895
	-	-	-	-	-	13,795	1,104
	-	-	-	2,920,473	-	2,920,473	233,638
	-	154,833,450	-	-	-	77,416,725	6,193,338
	-	-	288,723,154	-	-	220,314,044	17,625,124
	-	109,400	-	221,982,961	-	222,546,821	17,803,746
	-	-	-	1,014	7,585,679	11,379,533	910,363
	-	-	-	46,161,739	46,078	46,230,856	3,698,468
	-	248,545,354	288,723,154	271,066,187	7,631,757	-	636,435,668
	-	-	-	-	-	-	-
	-	13,140,348	-	-	-	6,570,174	525,614
	-	-	-	-	-	-	-
	-	16,482,138	-	-	-	8,336,703	666,936
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	348,395	-	-	261,296	20,904
	-	-	-	4,863,633	-	4,863,633	389,091
	-	-	-	-	-	-	-
	-	29,622,486	348,395	4,863,633	-	-	20,031,806
	-	-	-	-	-	-	-
	-	344,645	-	-	-	181,600	14,528
	-	-	-	-	-	-	-
	-	1,285,904	-	3,763	-	1,429,803	114,384
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1,338,893	-	1,338,893	107,111
	-	-	-	-	-	92,268	7,381
	-	1,630,550	-	1,342,656	-	-	3,042,565



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.a.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	319,757,841	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,838,595	323,874	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	28,155,675	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	824,101	1,744,993	2,223,860	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,186,660	18,587,857	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	21,474,822	225,319	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,090	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	29,931,216	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	375,190,224	48,116,826	1,744,993	2,223,860	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	753,261	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	259	753,261	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (<i>Counterparty Credit Risk</i>)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	19,791,896	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	52,541	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,373,961	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	-	-	-	-	-
	Total Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>	19,791,896	2,426,502	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	70,976,665	-	-	-	-	35,553,108	2,844,249
-	-	-	-	-	-	-	
-	23,518,251	-	3,193,789	-	-	20,584,049	1,646,724
-	-	-	-	-	-	1,379,419	110,354
-	-	-	7,744,517	-	-	7,744,517	619,561
-	160,847,222	-	-	-	-	80,423,611	6,433,889
-	-	324,974,031	-	-	-	247,448,095	19,795,848
-	-	-	221,220,975	-	-	221,266,039	17,701,283
-	-	-	64,063	7,969,632	-	12,018,512	961,481
-	-	-	42,791,446	63,048	-	42,886,018	3,430,881
-	255,342,138	324,974,031	275,014,790	8,032,680	-	669,303,368	53,544,269
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,822,339	-	-	-	-	5,411,170	432,894
-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,682,606	-	-	-	-	9,491,955	759,356
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	84,844	-	-	-	63,633	5,091
-	-	-	4,022,605	-	-	4,022,605	321,808
-	-	-	-	-	-	-	-
-	29,504,945	84,844	4,022,605	-	-	18,989,363	1,519,149
-	-	-	-	-	-	-	-
-	93,304	-	-	-	-	57,160	4,573
-	-	-	-	-	-	-	-
-	76,422	-	-	-	-	513,003	41,040
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	899,292	-	-	899,292	71,943
-	-	-	-	-	-	193,123	15,450
-	169,726	-	899,292	-	-	1,662,578	133,006



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	323,514,100	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,838,595	458,874	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	28,518,933	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	824,101	1,820,750	2,533,446	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,312,219	18,587,857	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	22,191,892	225,319	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,090	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	29,956,138	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	379,814,034	48,615,084	1,820,750	2,533,446	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	753,261	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	259	753,261	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (<i>Counterparty Credit Risk</i>)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	22,060,877	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	52,541	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,373,961	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>	22,060,877	2,426,502	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	72,247,162	-	-	-	36,215,357	2,897,229
	-	-	-	-	-	-	-
	-	23,719,181	-	3,193,789	-	20,757,166	1,660,573
	-	-	-	-	-	1,506,713	120,537
	-	-	-	7,753,877	-	7,753,877	620,310
	-	161,497,948	-	-	-	80,748,974	6,459,918
	-	-	327,375,960	-	-	249,343,711	19,947,497
	-	58,426	-	233,613,676	-	234,405,024	18,752,402
	-	-	-	228,373	8,699,465	13,277,572	1,062,206
	-	-	-	43,100,467	67,028	42,886,018	3,430,881
	-	257,522,717	327,375,960	287,890,182	8,766,493	-	686,894,412
	-	-	-	-	-	-	-
	-	10,850,339	-	-	-	5,085,317	406,825
	-	-	-	-	-	-	-
	-	18,682,606	-	-	-	5,578,308	446,265
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	108	-	71,943	5,755
	-	16	-	-	-	-	-
	-	-	118,533	-	-	117,659	9,413
	-	-	-	4,255,095	-	5,548,266	443,861
	-	-	-	-	-	-	-
	-	29,532,961	118,533	4,255,203	-	-	16,401,493
	-	-	-	-	-	-	-
	-	93,304	-	-	-	57,160	4,573
	-	-	-	-	-	-	-
	-	76,422	-	-	-	513,003	41,040
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	899,292	-	899,292	71,943
	-	-	-	-	-	193,123	15,450
	-	169,726	-	899,292	-	-	1,662,578



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

31 Desember 2018

Wilayah							
Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
618,953,171	189,572,893	62,652,397	85,039,712	84,598,129	133,335,125	16,079,809	1,190,231,236
16,181,395	7,323,333	1,311,365	1,414,084	2,190,480	4,918,281	2,045,055	35,383,993
11,510,695	4,944,099	251,722	343,567	854,952	2,249,755	1,699,028	21,853,818
4,670,700	2,379,234	1,059,643	1,070,517	1,335,528	2,668,526	346,027	13,530,175
10,214,975	4,198,118	275,697	102,770	368,297	876,585	429,049	16,465,491
3,884,640	4,471,467	1,765,999	2,330,120	1,906,639	3,019,311	726,213	18,104,389
3,194,812	2,465,085	1,347,407	1,394,090	1,255,452	2,182,736	339,824	12,179,406

(dalam juta rupiah)

31 Desember 2019

Wilayah							
Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
650,606,849	203,405,457	72,232,061	95,908,114	94,099,992	144,281,869	33,357,973	1,293,892,315
25,036,256	3,952,226	2,923,285	4,994,537	2,199,242	4,741,797	1,625,793	45,473,136
15,278,343	1,395,155	1,633,539	1,078,459	702,646	2,653,153	1,278,911	24,020,206
9,757,913	2,557,071	1,289,746	3,916,078	1,496,596	2,088,644	346,882	21,452,930
11,648,065	382,157	868,908	2,017,950	301,623	888,283	126,727	16,233,713
4,628,151	5,401,993	2,054,001	2,558,468	2,360,889	3,494,045	806,674	21,304,221
6,049,832	3,193,504	1,312,182	1,408,764	1,748,267	2,809,658	484,157	17,006,364



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.4.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

31 Desember 2018

Wilayah

Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
667,817,635	193,563,352	67,094,334	87,626,848	87,347,822	138,469,337	16,081,844	1,258,001,172
17,071,515	7,688,111	1,830,357	1,516,143	2,342,484	5,753,746	2,045,055	38,247,411
12,247,815	5,185,717	448,558	383,700	966,611	2,828,325	1,699,028	23,759,754
4,823,700	2,502,394	1,381,799	1,132,443	1,375,873	2,925,421	346,027	14,487,657
10,305,307	4,205,111	393,016	105,388	394,164	994,142	429,049	16,826,177
4,191,774	4,556,254	1,838,470	2,366,191	1,945,926	3,152,926	726,213	18,777,754
3,458,110	2,476,722	1,373,974	1,414,545	1,267,525	2,228,284	339,824	12,558,984

(dalam juta rupiah)

31 Desember 2019

Wilayah

Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
702,470,601	207,770,365	76,027,810	109,750,233	96,574,648	149,722,242	32,763,148	1,375,079,047
28,167,121	4,236,470	3,414,846	5,562,999	2,403,136	5,562,407	1,625,793	50,972,772
17,525,656	1,593,512	1,811,268	1,568,895	828,102	3,168,277	1,278,911	27,774,621
10,641,465	2,642,958	1,603,578	3,994,104	1,575,034	2,394,130	346,882	23,198,151
12,110,668	389,742	940,282	2,265,742	311,322	1,001,371	126,727	17,145,854
4,944,502	5,469,249	2,152,876	2,669,273	2,405,583	3,603,166	806,674	22,051,323
6,265,414	3,268,593	1,408,612	1,422,855	1,784,471	2,872,974	484,157	17,507,076



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan -
Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
31 Desember 2018	
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	90,322,491	4,172,975	981,602	2,274,175	2,590,457	1,120,830
	4,093,319	385,803	62,295	309,460	150,935	112,190
	6,367,847	1,663,220	67,020	1,216,628	77,797	22,689
	65,906,758	8,656,791	521,378	5,969,411	1,099,296	533,264
	35,882,017	171,504	571,780	589,948	606,707	106,259
	32,444,818	1,620,898	1,649,082	2,305,856	429,280	1,385,140
	280,801,375	1,854,189	6,375,291	1,249,151	8,152,207	6,555,642
	7,670,885	845,145	151,300	449,390	182,440	164,458
	22,495,723	481,977	1,182,672	1,308,424	452,742	377,776
	3,482,796	739	8,643	112	60,655	215,349
	10,678,809	179,105	224,636	153,209	220,801	153,740
	5,386,747	197	1,758	-	154,958	2,362
	1,236,835	2,550	3,063	-	29,776	10,397
	3,636,102	82,196	31,273	13,660	64,101	15,898
	26,346,366	1,476,990	270,099	576,695	774,710	427,070
	1,836,856	1,314	30,460	-	72,349	38,602
	-	-	-	-	-	-
	6,835,161	91,485	6,382	-	271,053	111,484
	198,913,527	166,740	1,391,441	49,372	2,714,125	826,256
	385,892,804	-	-	-	-	-
	1,190,231,236	21,853,818	13,530,175	16,465,491	18,104,389	12,179,406



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan -
Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
31 Desember 2019	
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	97,045,634	9,991,556	756,363	3,012,274	2,822,524	1,710,589
	5,259,728	121,091	582,942	301,790	228,135	125,871
	15,723,582	2,034,404	30,818	1,014,932	547,933	108,536
	73,266,152	4,650,699	9,732,070	8,436,728	1,422,496	587,439
	39,702,692	142,981	840,152	520,186	718,128	10,695
	38,157,767	1,137,482	577,101	558,906	600,754	1,655,878
	277,651,064	2,018,667	5,983,929	850,373	8,825,642	8,842,397
	9,746,746	1,114,427	273,258	156,180	259,957	153,248
	20,814,622	1,034,538	374,949	470,719	483,770	1,551,064
	8,557,846	1,606	5,840	19	156,547	23,116
	9,477,049	95,309	203,265	54,343	203,580	246,681
	5,351,377	31	8,004	-	157,002	6,402
	1,502,527	763	9,862	-	39,244	9,271
	7,184,872	49,564	22,042	6,810	66,070	33,288
	29,111,280	1,364,975	365,336	666,599	1,030,294	495,170
	1,657,226	1,673	28,083	-	68,236	46,385
	-	-	-	-	-	-
	23,026,876	78,070	365,048	104,419	696,493	25,489
	196,321,255	182,370	1,293,868	79,435	2,977,416	1,374,845
	434,334,020	-	-	-	-	-
	1,293,892,315	24,020,206	21,452,930	16,233,713	21,304,221	17,006,364



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan -

Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Sektor Ekonomi

(1)	(2)

31 Desember 2018

1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengilangan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	100,304,211	4,559,813	1,061,959	2,357,085	2,657,871	1,130,716
	4,471,879	406,451	68,892	309,698	161,064	112,190
	7,367,188	1,663,896	67,859	1,216,628	79,445	22,689
	72,162,139	8,987,837	650,444	5,990,716	1,333,999	566,103
	36,423,545	172,719	572,233	589,948	610,611	106,259
	35,515,380	1,782,951	1,665,168	2,350,576	466,359	1,385,479
	286,402,199	2,220,519	6,475,274	1,276,711	8,260,154	6,573,719
	8,265,111	911,083	317,825	536,180	193,222	164,485
	23,942,802	552,637	1,190,474	1,313,633	468,561	378,200
	4,767,971	191,375	79,803	35,155	86,292	233,327
	11,540,137	262,793	330,116	192,077	229,562	154,735
	5,387,366	197	2,184	-	155,009	2,362
	1,467,963	6,810	3,633	786	32,122	10,397
	3,985,312	86,690	31,396	13,766	67,807	15,898
	27,091,126	1,496,357	283,512	577,183	786,752	427,074
	1,877,548	2,865	30,679	-	73,139	38,602
	-	-	-	-	-	-
	7,955,751	96,402	253,385	13,726	347,708	123,329
	199,116,733	182,896	1,392,814	50,708	2,716,845	826,256
	419,956,811	175,463	10,007	1,601	51,232	287,164
	1,258,001,172	23,759,754	14,487,657	16,826,177	18,777,754	12,558,984



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan -

Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
31 Desember 2019	
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengilangan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>impaired</i>) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	107,493,867	12,076,731	1,413,319	3,402,328	2,899,084	1,710,589
	5,794,348	134,753	591,591	302,359	238,879	125,871
	16,681,669	2,046,006	46,378	1,014,932	549,841	108,536
	80,409,619	5,139,203	9,922,609	8,755,735	1,636,860	650,278
	40,898,491	144,446	892,375	528,840	727,792	10,695
	42,995,187	1,344,296	671,606	587,366	672,882	1,655,878
	284,731,153	2,452,465	6,198,323	901,323	8,977,522	8,842,397
	10,581,415	1,190,709	441,808	211,947	273,470	153,248
	22,838,918	1,088,274	399,655	478,506	500,262	1,551,064
	9,815,828	74,081	43,073	19,241	173,594	23,116
	10,485,478	162,410	310,183	81,794	232,038	246,681
	5,364,788	303	8,004	-	157,069	6,402
	1,743,033	5,034	12,448	1,280	41,993	9,271
	7,650,827	54,391	22,843	7,142	71,527	33,288
	30,911,165	1,397,106	385,707	667,289	1,059,620	495,170
	1,701,038	3,557	28,238	-	69,250	46,385
	88	-	-	-	9	-
	24,440,680	81,154	477,338	104,852	729,476	25,489
	196,744,088	199,412	1,316,580	79,458	2,985,507	1,374,845
	473,797,367	180,290	16,073	1,462	54,648	437,873
	1,375,079,047	27,774,621	23,198,151	17,145,854	22,051,323	17,507,076



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual

(dalam juta rupiah)

No.		Keterangan	31 Desember 2018	
			CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)		(3)	(4)
1		Saldo awal CKPN	12,831,413	16,230,849
2		Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6,254,403	11,187,344
3		CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(2,620,325)	(9,559,081)
4		Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	245,277
		Saldo akhir CKPN	16,465,491	18,104,389

(dalam juta rupiah)

No.		Keterangan	31 Desember 2019	
			CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)		(3)	(4)
1		Saldo awal CKPN	16,465,491	18,104,389
2		Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	3,831,806	16,603,394
3		CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(4,063,584)	(12,942,780)
4		Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(460,782)
		Saldo akhir CKPN	16,233,713	21,304,221

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.6.b Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan

(dalam juta rupiah)

		31 Desember 2018	
No.	Keterangan	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	13,323,725	16,781,220
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6,163,892	11,648,849
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(2,661,440)	(9,897,544)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	245,229
	Saldo akhir CKPN	16,826,177	18,777,754

(dalam juta rupiah)

		31 Desember 2019	
No.	Keterangan	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	16,826,177	18,777,754
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	4,383,261	17,177,754
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(4,063,584)	(13,443,492)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(460,692)
	Saldo akhir CKPN	17,145,854	22,051,324



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
1	Kas
2	Penempatan Pada Bank Indonesia
3	Penempatan pada Bank Lain
4	Surat Berharga
5	Kredit yang diberikan
6	Tagihan lainnya
7	Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
1	Dana Pihak Ketiga
2	Kewajiban pada Bank Indonesia
3	Kewajiban pada bank lain
4	Surat berharga yang Diterbitkan
5	Pinjaman yang Diterima
6	Kewajiban Lainnya
7	Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
1	Komitmen
2	Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
1	Komitmen
2	Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2018						
Saldo	Jatuh Tempo					
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
25,922,039	25,922,039	-	-	-	-	
44,987,205	44,987,205	-	-	-	-	
6,927,459	6,607,459	120,000	200,000	-	-	
133,307,970	101,715,712	3,437,061	6,243,306	608,345	21,303,546	
690,303,000	9,387,391	5,173,406	10,523,649	44,367,713	620,850,841	
83,325,444	59,661,778	8,799,365	12,263,939	2,528,861	71,501	
57,409,715	10,221,479	4,665,947	142,556	9,454	42,370,279	
1,042,182,832	258,503,063	22,195,779	29,373,450	47,514,373	684,596,167	
781,715,291	534,708,143	227,999,440	8,945,457	3,024,348	7,037,903	
-	-	-	-	-	-	
6,611,613	6,568,603	43,010	-	-	-	
23,931,736	-	1,018,500	2,436,602	20,476,634	-	
28,528	85	6,381	-	-	22,062	
58,463,690	33,973,153	1,572,365	6,396,720	2,463,408	14,058,044	
5,542,456	1,079,782	3,534,245	415,959	12,311	500,159	
876,293,314	576,329,766	234,173,941	18,194,738	25,976,701	21,618,168	
165,889,518	(317,826,703)	(211,978,162)	11,178,712	21,537,672	662,977,999	
9,811,005	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,515,120	
3,823	-	-	-	-	3,823	
9,814,828	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,518,943	
108,366,650	14,705,558	10,767,016	21,081,712	13,723,501	48,088,863	
19,484,535	4,999,937	2,764,291	3,791,816	3,679,272	4,249,219	
127,851,185	19,705,495	13,531,307	24,873,528	17,402,773	52,338,082	
(118,036,357)	(14,739,762)	(11,905,848)	(24,115,951)	(16,455,657)	(50,819,139)	
47,853,161	(332,566,465)	(223,884,010)	(12,937,239)	5,082,015	612,158,860	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2019					
Saldo	Jatuh Tempo				
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28,707,946	28,707,946	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
67,951,091	65,134,179	2,816,912	-	-	-
144,202,490	109,901,638	5,447,347	296,136	4,594,720	23,962,649
747,164,947	11,374,347	6,978,699	10,959,239	52,791,784	665,060,878
81,280,549	60,717,284	8,511,931	9,753,563	1,881,944	415,827
59,854,072	7,777,225	3,192,061	1,182,547	28,302	47,673,937
1,129,161,095	283,612,619	26,946,950	22,191,485	59,296,750	737,113,291
829,934,620	694,240,709	94,973,315	12,742,948	9,447,589	18,530,059
-	-	-	-	-	-
12,804,411	11,804,461	999,950	-	-	-
24,508,838	-	-	1,743,375	980,342	21,785,121
28,193	85	-	-	6,380	21,728
70,753,620	43,798,384	9,174,380	4,127,653	162,021	13,491,182
6,287,308	1,638,193	3,495,132	28,216	17,550	1,108,217
944,316,990	751,481,832	108,642,777	18,642,192	10,613,882	54,936,307
184,844,105	(467,869,213)	(81,695,827)	3,549,293	48,682,868	682,176,984
3,767,825	2,566,053	661,984	274,058	265,730	-
881	-	-	-	-	881
3,768,706	2,566,053	661,984	274,058	265,730	881
132,134,382	27,129,758	25,779,286	24,713,558	18,755,008	35,756,772
19,202,454	3,954,280	2,068,400	3,943,505	3,979,414	5,256,855
151,336,836	31,084,038	27,847,686	28,657,063	22,734,422	41,013,627
(147,568,130)	(28,517,985)	(27,185,702)	(28,383,005)	(22,468,692)	(41,012,746)
37,275,975	(496,387,198)	(108,881,529)	(24,833,712)	26,214,176	641,164,238



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2018					
Saldo	Jatuh Tempo				
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,248,545	1,248,545	-	-	-	-
17,823,278	17,823,278	-	-	-	-
12,943,658	11,029,264	1,575,207	339,187	-	-
42,084,796	27,305,602	4,617,466	34,512	-	10,127,216
79,465,552	2,179,107	15,449,333	1,625,843	1,415,439	58,795,830
36,064,958	26,904,719	4,905,528	2,980,851	1,254,215	19,645
2,386,420	70,938	688,240	1,275,423	324	351,495
192,017,207	86,561,453	27,235,774	6,255,816	2,669,978	69,294,186
116,317,273	49,214,097	47,429,866	7,172,277	12,490,042	10,991
-	-	-	-	-	-
2,492,761	2,492,761	-	-	-	-
7,142,940	-	-	-	-	7,142,940
39,344,382	830,193	3,637,058	7,912,167	-	26,964,964
10,652,247	1,360,604	5,786,880	2,562,016	940,968	1,779
938,542	68,315	404,267	326,687	-	139,273
176,888,145	53,965,970	57,258,071	17,973,147	13,431,010	34,259,947
15,129,062	32,595,483	(30,022,297)	(11,717,331)	(10,761,032)	35,034,239
10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
-	-	-	-	-	-
10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
51,879,148	6,996,912	19,372,370	6,799,297	6,544,059	12,166,510
26,329,441	1,797,166	1,692,696	5,938,963	4,345,047	12,555,569
78,208,589	8,794,078	21,065,066	12,738,260	10,889,106	24,722,079
(67,819,209)	(5,097,433)	(16,315,375)	(12,043,949)	(9,805,139)	(24,557,313)
(52,690,147)	27,498,050	(46,337,672)	(23,761,280)	(20,566,171)	10,476,926



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2019						
Saldo	Jatuh Tempo					
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1,223,270	1,223,270	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
46,461,607	7,526,280	38,935,327	-	-	-	
49,339,321	36,140,111	2,400,999	528,487	263,768	10,005,956	
74,855,414	2,608,789	1,289,009	926,852	1,705,166	68,325,598	
40,643,909	26,747,749	4,334,506	3,896,782	5,664,872	-	
1,393,244	166,127	485,501	138,713	30,168	572,735	
213,916,765	74,412,326	47,445,342	5,490,834	7,663,974	78,904,289	
139,815,386	97,107,281	15,006,361	9,837,717	17,089,943	774,084	
-	-	-	-	-	-	
5,067,180	4,025,992	1,041,188	-	-	-	
13,807,293	-	-	-	-	13,807,293	
29,132,943	-	5,553,000	-	-	23,579,943	
6,344,511	1,269,195	2,679,206	1,191,903	496,128	708,079	
928,095	205,203	432,369	152,280	16,549	121,694	
195,095,408	102,607,671	24,712,124	11,181,900	17,602,620	38,991,093	
18,821,357	(28,195,345)	22,733,218	(5,691,066)	(9,938,646)	39,913,196	
3,234,678	1,115,899	1,221,904	712,336	184,539	-	
2,924	-	-	-	-	2,924	
3,237,602	1,115,899	1,221,904	712,336	184,539	2,924	
39,225,047	4,151,647	19,953,592	3,185,079	2,949,470	8,985,259	
25,633,822	2,914,757	1,201,505	7,471,354	3,659,451	10,386,755	
64,858,869	7,066,404	21,155,097	10,656,433	6,608,921	19,372,014	
(61,621,267)	(5,950,505)	(19,933,193)	(9,944,097)	(6,424,382)	(19,369,090)	
(42,799,910)	(34,145,850)	2,800,025	(15,635,163)	(16,363,028)	20,544,106	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.c Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2018						
Saldo	Jatuh Tempo					
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
26,155,113	26,155,113	-	-	-	-	
50,518,622	50,518,622	-	-	-	-	
6,071,680	5,751,680	120,000	200,000	-	-	
152,878,121	109,390,997	6,252,460	8,678,041	2,615,095	25,941,528	
728,003,382	10,805,131	8,787,727	12,158,135	47,482,455	648,769,933	
85,996,032	62,306,336	8,825,395	12,263,939	2,528,861	71,501	
53,216,461	10,691,497	4,665,947	142,556	383,087	37,333,374	
1,102,839,411	275,619,376	28,651,529	33,442,671	53,009,498	712,116,336	
826,222,359	564,139,784	241,112,477	10,877,707	3,054,488	7,037,903	
-	-	-	-	-	-	
6,743,526	6,692,865	50,661	-	-	-	
24,047,276	-	1,018,500	2,436,602	20,592,174	-	
483,123	50,085	-	406,382	-	26,656	
58,950,357	34,136,786	1,598,395	6,396,720	2,463,408	14,355,048	
16,016,772	1,746,135	3,574,501	912,616	23,290	9,760,230	
932,463,413	606,765,655	247,354,534	21,030,027	26,133,360	31,179,837	
170,375,998	(331,146,279)	(218,703,005)	12,412,645	26,876,138	680,936,500	
9,811,005	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,515,120	
112,273	17,154	21,751	5,949	20,277	47,142	
9,923,278	4,982,887	1,647,210	763,526	967,393	1,562,262	
110,132,763	14,886,748	11,073,660	21,460,727	14,156,806	48,554,822	
18,556,420	5,003,613	2,774,954	3,817,715	3,707,577	3,252,561	
128,689,183	19,890,361	13,848,614	25,278,442	17,864,383	51,807,383	
(118,765,905)	(14,907,474)	(12,201,404)	(24,514,916)	(16,896,990)	(50,245,121)	
51,610,093	(346,053,753)	(230,904,409)	(12,102,271)	9,979,148	630,691,379	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.c Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2019						
Saldo	Jatuh Tempo					
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
28,967,663	28,967,663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70,323,691	67,370,129	2,953,562	-	-	-	-
169,812,944	123,702,500	7,532,152	3,668,281	4,178,591	30,731,420	
791,529,041	13,115,122	10,584,204	12,908,781	56,901,716	698,019,218	
83,860,934	63,165,429	8,511,931	9,753,563	1,881,944	548,067	
55,587,614	8,308,003	3,228,855	1,185,860	551,808	42,313,088	
1,200,081,887	304,628,846	32,810,704	27,516,485	63,514,059	771,611,793	
729,940,859	729,940,859	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,999,010	11,999,059	999,951	-	-	-	-
24,815,034	-	-	-	2,686,847	22,128,187	
1,512,817	85	-	-	156,380	1,356,352	
71,300,965	43,945,889	9,191,126	4,127,653	162,021	13,874,276	
20,792,518	2,186,200	4,346,273	28,411	2,523,142	11,708,492	
861,361,203	788,072,092	14,537,350	4,156,064	5,528,390	49,067,307	
338,720,684	(483,443,246)	18,273,354	23,360,421	57,985,669	722,544,486	
3,767,825	2,566,053	661,984	274,058	265,730	-	
899	-	-	-	-	899	
3,768,724	2,566,053	661,984	274,058	265,730	899	
133,514,164	27,234,884	26,078,828	25,187,519	19,251,599	35,761,334	
19,414,907	3,970,543	2,099,557	3,971,802	4,102,182	5,270,823	
152,929,071	31,205,427	28,178,385	29,159,321	23,353,781	41,032,157	
(149,160,347)	(28,639,374)	(27,516,401)	(28,885,263)	(23,088,051)	(41,031,258)	
189,560,337	(512,082,620)	(9,243,047)	(5,524,842)	34,897,618	681,513,228	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.d Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2018					
Saldo	Jatuh Tempo				
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,266,512	1,266,512	-	-	-	-
17,823,278	17,823,278	-	-	-	-
12,604,471	11,029,264	1,575,207	-	-	-
42,307,757	27,312,592	4,617,466	34,512	159,263	10,183,924
79,991,899	2,179,822	15,449,335	1,656,501	1,428,068	59,278,173
37,412,268	28,252,029	4,905,528	2,980,851	1,254,215	19,645
2,652,696	71,012	688,256	1,538,892	957	353,579
194,058,881	87,934,509	27,235,792	6,210,756	2,842,503	69,835,321
118,046,378	49,441,160	48,914,840	7,189,170	12,490,217	10,991
-	-	-	-	-	-
2,387,632	2,387,632	-	-	-	-
7,142,940	-	-	-	-	7,142,940
39,974,306	830,193	3,637,058	8,542,091	-	26,964,964
10,656,707	1,365,050	5,786,894	2,562,016	940,968	1,779
951,585	76,831	404,267	326,687	2,083	141,717
179,159,548	54,100,866	58,743,059	18,619,964	13,433,268	34,262,391
14,899,333	33,833,643	(31,507,267)	(12,409,208)	(10,590,764)	35,572,930
10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
-	-	-	-	-	-
10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
51,887,669	7,003,440	19,372,702	6,799,297	6,545,720	12,166,510
26,329,631	1,797,166	1,692,696	5,938,963	4,345,237	12,555,569
78,217,300	8,800,606	21,065,398	12,738,260	10,890,957	24,722,079
(67,827,920)	(5,103,961)	(16,315,707)	(12,043,949)	(9,806,990)	(24,557,313)
(52,928,587)	28,729,682	(47,822,974)	(24,453,157)	(20,397,754)	11,015,617



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.d Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2019						
Saldo	Jatuh Tempo					
	≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1,251,551	1,251,551	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
46,531,036	7,526,280	39,004,756	-	-	-	
49,739,779	36,443,740	2,400,999	528,487	263,768	10,102,785	
76,663,575	2,636,279	1,349,521	1,068,528	2,224,350	69,384,897	
41,094,234	27,180,769	4,351,811	3,896,782	5,664,872	-	
1,398,925	166,179	485,517	138,713	30,801	577,715	
216,679,100	75,204,798	47,592,604	5,632,510	8,183,791	80,065,397	
139,885,425	97,177,320	15,006,361	9,837,717	17,089,943	774,084	
-	-	-	-	-	-	
4,970,819	3,929,631	1,041,188	-	-	-	
13,807,293	-	-	-	-	13,807,293	
29,408,954	-	4,894,434	-	-	24,514,520	
6,344,536	1,269,219	2,679,207	1,191,903	496,128	708,079	
919,755	205,203	432,369	152,280	16,549	113,354	
195,336,782	102,581,373	24,053,559	11,181,900	17,602,620	39,917,330	
21,342,318	(27,376,575)	23,539,045	(5,549,390)	(9,418,829)	40,148,067	
3,234,678	1,115,899	1,221,904	712,336	184,539	-	
2,924	-	-	-	-	2,924	
3,237,602	1,115,899	1,221,904	712,336	184,539	2,924	
39,305,767	4,164,767	19,961,928	3,231,821	2,961,992	8,985,259	
25,636,457	2,914,757	1,201,505	7,471,354	3,662,086	10,386,755	
64,942,224	7,079,524	21,163,433	10,703,175	6,624,078	19,372,014	
(61,704,622)	(5,963,625)	(19,941,529)	(9,990,839)	(6,439,539)	(19,369,090)	
(40,362,304)	(33,340,200)	3,597,516	(15,540,229)	(15,858,368)	20,778,977	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 10.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

31 DESEMBER 2018						
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	286,356,952	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75,001,743	1,627,557	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	64,289,162	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	46,873	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,920,473	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	154,833,450	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	308,835,050	1,253,506	-	18,858,390	-
9	Tagihan kepada Korporasi	244,941,300	20,303,139	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7,587,710	1,017	-	-	-
11	Aset Lainnya	73,378,404	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	1,218,191,117	23,185,219	-	18,858,390	-
B	Eksposur Rekening Adminsitratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13,140,348	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	16,960,309	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	348,395	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	4,863,633	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif	35,337,134	-	-	-	-
C	Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	391,032	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5,877,457	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1,338,893	-	-	-	-
	Total Eksposure <i>Counterparty Credit Risk</i>	14,354,663	-	-	-	-
	Total (A+B+C)	1,267,882,914	23,185,219	-	18,858,390	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019						
Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
286,356,952	319,757,841	-	-	-	-	319,757,841
73,374,186	73,139,134	1,838,595	-	-	-	71,300,539
-	-	-	-	-	-	-
64,289,162	54,867,715	-	-	-	-	54,867,715
46,873	4,792,954	-	-	-	-	4,792,954
2,920,473	7,744,517	-	-	-	-	7,744,517
154,833,450	160,847,222	-	-	-	-	160,847,222
288,723,154	345,748,548	2,186,660	-	18,587,857	-	324,974,031
224,638,161	242,921,116	21,474,822	-	-	-	221,446,294
7,586,693	8,034,785	1,090	-	-	-	8,033,695
73,378,404	72,785,710	-	-	-	-	72,785,710
1,176,147,508	1,290,639,542	25,501,167	-	18,587,857	-	1,246,550,518
24,449	259	-	-	-	-	259
13,140,348	10,822,339	-	-	-	-	10,822,339
-	-	-	-	-	-	-
16,960,309	19,435,867	-	-	-	-	19,435,867
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
348,395	84,844	-	-	-	-	84,844
4,863,633	4,022,605	-	-	-	-	4,022,605
-	-	-	-	-	-	-
35,337,134	34,365,914	-	-	-	-	34,365,914
6,747,281	19,791,896	-	-	-	-	19,791,896
391,032	145,845	-	-	-	-	145,845
-	-	-	-	-	-	-
5,877,457	2,450,383	-	-	-	-	2,450,383
-	-	-	-	-	-	-
1,338,893	899,292	-	-	-	-	899,292
14,354,663	23,287,416	-	-	-	-	23,287,416
1,225,839,305	1,348,292,872	25,501,167	-	18,587,857	-	1,304,203,848



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 10.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31 DESEMBER 2018						
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	290,819,879	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75,837,494	1,627,557	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	66,835,170	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	349,421	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,140,274	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	155,296,312	1,485	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	311,625,990	1,477,403	-	18,858,390	
9	Tagihan kepada Korporasi	255,847,710	21,123,364	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7,843,832	1,017	-	-	
11	Aset Lainnya	73,682,177	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	1,241,278,259	24,230,826	-	18,858,390	-
B	Eksposur Rekening Adminsitratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13,142,548	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	16,960,689	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	24,239	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	52	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	402,729	597	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	5,303,140	9,466	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,924	-	-	-	
	Total Eksposur Rekening Administratif	35,859,772	10,063	-	-	-
C	Eksposur <i>Counterparty Credit Risk</i>					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	391,032	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	5,877,457	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	1,338,893	-	-	-	
	Total Eksposure <i>Counterparty Credit Risk</i>	14,354,663	-	-	-	-
Total (A+B+C)		1,291,492,694	24,240,889	-	18,858,390	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019						
Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
290,819,879	323,514,100	-	-	-	-	323,514,100
74,209,937	74,544,631	1,838,595	-	-	-	72,706,036
-	-	-	-	-	-	-
66,835,170	55,431,903	-	-	-	-	55,431,903
349,421	5,178,297	-	-	-	-	5,178,297
3,140,274	7,753,877	-	-	-	-	7,753,877
155,294,827	161,497,948	-	-	-	-	161,497,948
291,290,197	348,276,036	2,312,219	-	18,587,857	-	327,375,960
234,724,346	256,089,312	22,191,892	-	-	-	233,897,420
7,842,815	8,928,928	1,090	-	-	-	8,927,838
73,682,177	73,123,633	-	-	-	-	73,123,633
1,198,189,043	1,314,338,665	26,343,796	-	18,587,857	-	1,269,407,012
24,449	259	-	-	-	-	259
13,142,548	10,850,339	-	-	-	-	10,850,339
-	-	-	-	-	-	-
16,960,689	19,435,867	-	-	-	-	19,435,867
2	-	-	-	-	-	-
24,239	108	-	-	-	-	108
52	16	-	-	-	-	16
402,132	118,533	-	-	-	-	118,533
5,293,674	4,255,095	-	-	-	-	4,255,095
1,924	-	-	-	-	-	-
35,849,709	34,660,217	-	-	-	-	34,660,217
6,747,281	22,060,877	-	-	-	-	22,060,877
391,032	145,845	-	-	-	-	145,845
-	-	-	-	-	-	-
5,877,457	2,450,383	-	-	-	-	2,450,383
-	-	-	-	-	-	-
1,338,893	899,292	-	-	-	-	899,292
14,354,663	25,556,397	-	-	-	-	25,556,397
1,248,393,415	1,374,555,279	26,343,796	-	18,587,857	-	1,329,623,626



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 11.a.1 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018							
No.	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. <i>Senior tranche</i>	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. <i>Junior tranche</i>						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Manajemen Risiko

Tabel 11.b.1 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018							
No.	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. <i>Senior tranche</i>	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. <i>Junior tranche</i>						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 11.a.2 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019							
No.	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior tranche	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Junior tranche						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Manajemen Risiko

Tabel 11.b.2 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2019							
No.	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior tranche	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Junior tranche						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 12.a. : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

No	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2019	
		Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Manajemen Risiko

Tabel 12.b. : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2019	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tabel 13.a. : Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan Kepada Bank	
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal	
6. Kredit Beragun Properti Komersial	
7. Kredit Pegawai/Pensiunan	
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
9. Tagihan Kepada Korporasi	
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	
11. Aset Lainnya	
TOTAL	

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan kepada Bank	
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal	
6. Kredit Beragun Properti Komersial	
7. Kredit Pegawai/Pensiunan	
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
9. Tagihan Kepada Korporasi	
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	
TOTAL	

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan kepada Bank	
5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
6. Tagihan Kepada Korporasi	
7. Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	
TOTAL	

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
286,356,952	-	-	319,757,841	-	-
75,001,743	36,391,010	35,577,231	73,139,134	36,472,405	35,553,108
-	-	-	-	-	-
64,289,162	20,036,190	20,036,190	54,867,715	20,584,049	20,584,049
46,873	13,795	13,795	4,792,954	1,379,419	1,379,419
2,920,473	2,920,473	2,920,473	7,744,517	7,744,517	7,744,517
154,833,450	77,416,725	77,416,725	160,847,222	80,423,611	80,423,611
308,835,050	231,626,288	220,314,044	345,748,548	259,311,411	247,448,095
244,941,300	242,849,960	222,546,821	242,921,116	242,740,861	221,266,039
7,587,710	11,381,058	11,379,533	8,034,785	12,020,147	12,018,512
73,378,404	-	46,230,856	72,785,710	-	42,886,018
1,218,191,117	622,635,499	636,435,668	1,290,639,542	660,676,420	669,303,368
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24,449	-	-	259	-	-
13,140,348	6,570,174	6,570,174	10,822,339	5,411,170	5,411,170
-	-	-	-	-	-
16,960,309	8,336,703	8,336,703	19,435,867	9,491,955	9,491,955
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
348,395	261,296	261,296	84,844	63,633	63,633
4,863,633	4,863,633	4,863,633	4,022,605	4,022,605	4,022,605
-	-	-	-	-	-
35,337,134	20,031,806	20,031,806	34,365,914	18,989,363	18,989,363
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6,747,280	-	-	19,791,896	-	-
391,032	181,600	181,600	145,845	57,160	57,160
-	-	-	-	-	-
5,877,457	1,429,803	1,429,803	2,450,383	513,003	513,003
-	-	-	-	-	-
1,338,893	1,338,893	1,338,893	899,292	899,292	899,292
-	-	92,268	-	-	193,123
14,354,663	2,950,297	3,042,564	23,287,416	1,469,455	1,662,577
-	-	(0)	-	-	-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1. <i>Delivery versus payment</i>	
a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	
b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	
c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	
d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	
2. <i>Non-delivery versus payment</i>	
TOTAL	

e. Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	<i>First Loss Facility</i>				
b.	<i>Second Loss Facility</i>				
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	Bank merupakan Kreditur Asal				
b.	Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	Bank merupakan Kreditur Asal				
b.	Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	<i>Senior Tranche</i>				
b.	<i>Junior Tranche</i>				
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-		-
TOTAL		-	-	-	-

Manajemen Risiko

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

f. Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	659,319,661	689,093,355
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL		



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 13.b. : Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dg Menggunakan Pendekatan Standar
- Bank secara Konsolidasi dg Perusahaan Anak

a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan Kepada Bank	
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal	
6. Kredit Beragun Properti Komersial	
7. Kredit Pegawai/Pensiunan	
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
9. Tagihan Kepada Korporasi	
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	
11. Aset Lainnya	
TOTAL	

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan kepada Bank	
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal	
6. Kredit Beragun Properti Komersial	
7. Kredit Pegawai/Pensiunan	
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
9. Tagihan Kepada Korporasi	
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	
TOTAL	

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
290,819,879	-	-	323,514,100	-	-
75,837,494	36,778,885	35,965,107	74,544,631	37,134,653	36,215,356
-	-	-	-	-	-
66,835,170	20,616,744	20,616,744	55,431,903	20,757,166	20,757,166
349,421	112,146	112,146	5,178,297	1,506,714	1,506,714
3,140,274	3,140,274	3,140,274	7,753,877	7,753,878	7,753,878
155,296,312	77,648,156	77,647,414	161,497,948	80,748,974	80,748,974
311,625,990	233,719,493	222,239,326	348,276,036	261,207,027	249,249,541
255,847,710	253,693,534	232,570,170	256,089,314	255,879,846	233,687,954
7,843,832	11,757,357	11,755,831	8,928,928	13,279,206	13,277,571
73,682,177	-	46,517,294	73,123,634	-	43,201,010
1,241,278,259	637,466,589	650,564,306	1,314,338,668	678,267,464	686,398,163
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24,449	-	-	259	-	-
13,142,548	6,571,274	6,571,274	10,850,339	5,425,170	5,425,170
-	-	-	-	-	-
16,960,689	8,336,893	8,336,893	19,435,867	9,491,955	9,491,955
2	1	1	-	-	-
24,239	24,239	24,239	108	108	108
52	26	26	16	8	8
402,729	302,047	301,599	118,535	88,902	88,901
5,303,139	5,303,140	5,293,674	4,255,094	4,255,094	4,255,094
1,924	2,886	2,886	-	-	-
35,859,771	20,540,506	20,530,592	34,660,218	19,261,237	19,261,236



TATA KELOLA PERUSAHAAN

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan <i>Multilateral</i> dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan kepada Bank	
a. Tagihan Jangka Pendek	
b. Tagihan Jangka Panjang	
5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
6. Tagihan Kepada Korporasi	
7. Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	
TOTAL	

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1. Delivery versus payment	
a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	
b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	
c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	
d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	
2. Non-delivery versus payment	
TOTAL	

e. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1. Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	
2. Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	
3. Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	
4. Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	
5. Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	
6. Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	
7. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.	
TOTAL	

f. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019	
No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Total Eksposur	-	16,817,831	-	19,719,349

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6,747,280	-	-	22,060,877	-	-
6,747,280	-	-	22,060,877	-	-
-	-	-	-	-	-
391,032	181,600	181,600	145,845	57,160	57,160
-	-	-	-	-	-
5,877,458	1,429,804	1,429,804	2,450,383	513,003	513,003
4,857,917	978,455	978,455	2,301,293	460,283	460,283
1,019,541	451,349	451,349	149,090	52,720	52,720
-	-	-	-	-	-
1,338,893	1,338,893	1,338,893	899,292	899,292	899,292
		92,268			193,123
14,354,663	2,950,298	3,042,566	25,556,397	1,469,455	1,662,577
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					-
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2019	
Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

g. Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	690,764,915	726,179,371
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL		



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Tabel 14 : Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2019			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	699	8,732	699	8,732	25,196	314,949	25,196	314,949
	b. Risiko Umum	15,152	189,397	21,926	274,082	154,172	1,927,156	171,936	2,149,206
2	Risiko Nilai Tukar	870,448	10,880,601	875,721	10,946,508	243,332	3,041,654	248,891	3,111,139
3	Risiko Ekuitas*)			-	-			-	-
4	Risiko Komoditas*)			-	-			-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	674,317	8,428,962	674,317	8,428,962
	Total	886,298	11,078,730	898,346	11,229,322	1,097,018	13,712,721	1,120,341	14,004,256

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2019

Analisa Kualitatif

- Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi Banking Book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI ter-capture dari penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas, hal ini dikarenakan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga fixed dan mempunyai repricing maturities lebih panjang.
- Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite Assets & Liability Management (ALCO) dan Risk Management Committee (RMC). ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management, dan capital management. Sedangkan RMC dilaksanakan setiap triwulan dengan salah satu pembahasannya adalah profil risiko pasar dan risk issue terkini.
- BRI melakukan perhitungan IRRBB secara triwulan dengan menggunakan metode Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI dan telah disesuaikan dengan guideline dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun.

Manajemen Risiko

Analisa Kualitatif

- 4 Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB BRI adalah sebagai berikut:
 - a. Parallel Up (400 bps)
 - b. Parallel Down (400 bps)
 - c. Steepener (350 bps)
 - d. Flattener (350 bps)
 - e. Short Rate Up (500 bps)
 - f. Short Rate Down (500 bps)
 - 5
 - a. Dalam perhitungan arus kas, instrument dari aset dan liabilitas dengan suku bunga float menggunakan risk free yang bersumber dari JIBOR & Government Bonds untuk mata uang rupiah. Risk free valas menggunakan LIBOR dan Government Bonds USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap segmen instrument. Instrument aset dan liabilitas dengan suku bunga fix menggunakan acuan yield yang dibebankan pada instrument sebagai dasar penentuan cashflow.
 - b. Account Non Maturity Deposit (NMD) yaitu giro dan tabungan ditempatkan pada jangka waktu overnight, skala waktu 3 s.d 4 tahun & 4 s.d 5 tahun sesuai dengan caps maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada skala waktu terpanjang merupakan core fund BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada non core fund yang ditempatkan pada skala waktu overnight.
 - c. Penentuan prepayment risk berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan baseline persentase prepayment merupakan ratas total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut per masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan early redemption, metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai dan menggunakan pendekatan lainnya yang relevan. Persentase baseline yang digunakan dalam early redemption merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
 - d. Selain permodelan prepayment risk dan early redemption, BRI juga menetapkan permodelan internal untuk account-account NPL. NPL Ritel Komersial dengan plafond maksimal 5 miliar rupiah ditempatkan pada skala waktu 3.5 tahun. Sedangkan NPL Menengah Korporasi dengan plafond di atas 5 miliar rupiah ditempatkan pada skala waktu 3 tahun. Account NPL termasuk non-rate dimana estimasi cashflow nya tidak memperhitungkan interest.
 - e. Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Semua mata uang selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.
-

Analisa Kuantitatif

- Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai maturity overnight. Secara behavioural, BRI menempatkan giro dan tabungan pada time bucket overnight, 3 s.d 4 tahun dan 4 s.d 5 tahun. Penyebaran Non Maturity Deposit BRI sesuai jangka waktu posisi 31 Desember 2019:
- a. Giro; Overnight (56,92%), 3 s.d 4 tahun (27,21%) dan 4 s.d 5 tahun (15,87%)
 - b. Tabungan; Overnight (17,62%) dan 4 s.d 5 tahun (82,38%)
-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2019

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	T	T - 1	T	T - 1
Parallel Up	(11,343,668)	(11,038,863)	(457,635)	(473,413)
Parallel Down	11,736,571	11,408,791	458,737	474,540
Steeper	(6,083,804)	(5,660,113)		
Flattener	3,323,392	2,981,774		
Short Rate Up	(4,312,673)	(4,561,670)		
Short Rate Down	4,327,963	4,578,375		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	11,343,668	11,038,863	457,635	473,413
Modal Tier 1(untuk Δ EVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	187,381,567	177,740,593	84,755,306	86,075,259
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	6.05%	6.21%	0.54%	0.55%

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)
Bulan Laporan : Desember 2019

Analisa Kualitatif

- Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi Banking Book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI ter-capture dari penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas, hal ini dikarenakan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga fixed dan mempunyai repricing maturities lebih panjang.

Manajemen Risiko

Analisa Kualitatif

- 2 Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite Assets & Liability Management (ALCO) dan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi. ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management, dan capital management. Sedangkan RMC Terintegrasi dilaksanakan secara bank wide dengan anak perusahaan yang membahas assessment profil risiko pasar dan risk issue terkini.
- 3 BRI melakukan perhitungan IRRBB Konsolidasi secara semesteran dengan menggunakan metode Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI dan telah disesuaikan dengan guideline dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun.
- 4 Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB BRI adalah sebagai berikut:
 - a. Parallel Up (400 bps)
 - b. Parallel Down (400 bps)
 - c. Steepener (350 bps)
 - d. Flatteners (350 bps)
 - e. Short Rate Up (500 bps)
 - f. Short Rate Down (500 bps)
- 5
 - a. Dalam perhitungan arus kas, instrument dari aset dan liabilitas dengan suku bunga float menggunakan risk free yang bersumber dari JIBOR & Government Bonds untuk mata uang rupiah. Risk free valas menggunakan LIBOR dan Government Bonds USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap segmen instrument. Instrument aset dan liabilitas dengan suku bunga fix menggunakan acuan yield yang dibebankan pada instrument sebagai dasar penentuan cashflow.
 - b. Account Non Maturity Deposit (NMD) yaitu giro dan tabungan ditempatkan pada jangka waktu overnight, skala waktu 3 s.d 4 tahun & 4 s.d 5 tahun sesuai dengan caps maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada skala waktu terpanjang merupakan core fund BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada non core fund yang ditempatkan pada skala waktu overnight.
 - c. Penentuan prepayment risk berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan baseline persentase prepayment merupakan rasio total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut per masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan early redemption, metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai dan menggunakan pendekatan lainnya yang relevan. Persentase baseline yang digunakan dalam early redemption merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
 - d. Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Semua mata uang selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.

Analisa Kuantitatif

Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai maturity overnight. Secara behavioural, BRI secara konsolidasi menempatkan giro dan tabungan pada 3 time bucket terpisah yaitu :

- a. Overnight (non corefund), Giro (56,77) dan Tabungan (17,63%)
- b. 3 s.d 4 tahun (corefund), Giro (28,06%) dan Tabungan (0,05%)
- c. 4 s.d 5 tahun (corefund), Giro (15,17%) dan Tabungan (82,33%)



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)
 Bulan Laporan : Desember 2019

Dalam Juta Rupiah		Δ EVE		Δ NII	
Periode	T	T – 1 (Juni)	T	T – 1 (Juni)	
Parallel Up	(12,372,900)	(11,512,920)	(476,222)	(475,778)	
Parallel Down	12,797,122	11,889,981	477,377	476,969	
Steeper	(6,599,391)	(5,800,602)	-	-	
Flattener	3,588,167	3,008,473	-	-	
Short Rate Up	(4,546,888)	(4,669,155)	-	-	
Short Rate Down	4,563,240	4,686,181	-	-	
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	12,372,900	11,889,981	476,222	476,969	
Modal Tier 1(untuk Δ EVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	196,586,828	177,754,217	89,104,918	92,356,053	
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	6.29%	6.69%	0.53%	0.52%	

Tabel 15 : Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

2018	NILAI LCR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	236.07%	219.87%	203.97%	201.29%
Bank Secara Konsolidasi	237.76%	218.91%	206.23%	204.60%

2019	NILAI LCR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	215.26%	201.76%	195.57%	229.98%
Bank Secara Konsolidasi	215.46%	203.47%	197.39%	227.12%

Manajemen Risiko

Tabel 15 : Pengungkapan Net Stable Funding Ratio (NSFR)

2018	NILAI NSFR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	128.31%	126.64%	130.40%	133.50%
Bank Secara Konsolidasi	129.66%	126.96%	129.87%	133.50%

2019	NILAI NSFR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	134.57%	128.69%	130.57%	136.17%
Bank Secara Konsolidasi	134.42%	128.41%	129.46%	135.91%

Tabel 16.a : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	79,045,252	11,856,788	148,209,848	88,647,633	13,297,145	166,214,312
	Total	79,045,252	11,856,788	148,209,848	88,647,633	13,297,145	166,214,312

Tabel 16.b : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	81,188,816	12,178,322	152,229,031	91,022,315	13,653,347	170,666,840
	Total	81,188,816	12,178,322	152,229,031	91,022,315	13,653,347	170,666,840
	Agro	464,178	69,627	870,333	-	-	-
	BBS	1,679,386	251,908	3,148,850	-	-	-



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Modal Inti Utama (Common Equity Tier I) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor	
1. Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	7,042,798
2. Laba ditahan	177,036,543
3. Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	20,569,085
4. Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET 1	N/A
5. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	1,979,595
6. CET 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	206,628,021
CET 1 : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)	
7. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	0
8. <i>Goodwill</i>	820,386
9. Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	6,257
10. Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A
11. <i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A
12. <i>Shortfall of provisions to expected losses</i>	N/A
13. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	0
14. Peningkatan / penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	0
15. Aset pensiun manfaat pasti	N/A
16. Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A
17. Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	0
18. Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
19. Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A
20. <i>Mortgage servicing rights</i>	0
21. Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10% net dari kewajiban pajak)	N/A
22. Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A
23. investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A
24. <i>Mortgage servicing rights</i>	N/A
25. pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A
26. Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	8,582,026
26a. Selisih PPA dan CKPN	66,101
26b. PPA atas aset non produktif	46,059
26c. Aset Pajak Tangguhan	4,291,091
26d. Penyertaan	4,166,431
26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	0
26.f Eksposur sekuritisasi	0
26.g Lainnya	12,344

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

27.	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya.	0
28.	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	9,408,669
29.	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1) : instrumen	197,219,352
30.	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	0
31.	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	0
32.	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	0
33.	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A
34.	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	0
35.	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
36.	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i> Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)	0
37.	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A
38.	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain.	0
39.	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
40.	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	N/A
41.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	
41.a	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	0
42.	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	0
43.	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	0
44.	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	0
45.	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1) Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan cadangan	197,219,352
46.	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	1,150,000
47.	Modal yang termasuk <i>phase out</i> Tier 2	N/A
48.	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	0
49.	Modal yang diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
50.	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko Kredit	9,046,077
51.	Jumlah Modal Pelengkap (Tier2) sebelum faktor pengurang Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)	10,196,077
52.	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	N/A
53.	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain	0



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

54.	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
55.	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi <i>short</i> yang diiperkenankan)	N/A
56.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	
56.a	Sinking Fund	0
56.b	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	35,999
57.	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	35,999
58.	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah <i>regulatory adjustment</i>	10,029,307
59.	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	207,379,430
60.	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	910,850,467
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)	
61.	Rasio Modal Inti Utama (CET 1) - persentase terhadap ATMR	21.65%
62.	Rasio Modal Inti (Tier 1) - persentase terhadap ATMR	21.65%
63.	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR	22.77%
64.	Tambahan modal (buffer) - persentase terhadap ATMR	
65.	<i>Capital conservation Buffer</i>	2.50%
66.	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%
67.	<i>Capital surcharge</i> untuk D-SIB	2.50%
68.	Untuk bank umum konvensional: Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (Buffer) – persentase terhadap ATMR Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer. National minimal (jika berbeda dari Basel 3)	
69.	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
70.	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

71.	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3) Jumlah dibawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)	N/A
72.	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A
73.	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A
74.	Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak)	N/A
75.	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak) Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2	N/A
76.	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A
77.	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A
78.	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A
79.	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 sd 1 Jan 2022)	N/A
80.	Cap pada CET 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
81.	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A
82.	Cap pada AT1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
83.	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A
84.	Cap pada Tier2 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
85.	Jumlah yang dikecualikan dari T2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A

Note : 1) Diisi oleh Bank berdasarkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara komponen permodalan sesuai Format Standar Pengungkapan Perhitungan Permodalan dengan pos-pos yang sama dalam Neraca yang dipublikasikan (hanya ditampilkan jika terdapat rekonsiliasi sebagaimana pada Bagian 2).



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam satuan Rupiah)

NO	POS - POS	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian		
		Neraca Publikasi		
		BI	Posisi	Posisi
		31-Dec-19		31-Dec-19
ASET				
1.	Kas	100	29,931,216	30,219,214
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	166,528,550	171,862,318
3.	Penempatan pada Bank Lain	130	26,885,477	27,005,763
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	135	193,091	210,396
5.	Surat Berharga			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	138	12,725,189	17,712,056
	b. Tersedia untuk dijual	143	71,596,668	78,149,825
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	38,876,554	51,079,219
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	145	33,876,763	33,876,762
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	160	50,030,136	50,030,136
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	164	20,313,264	22,582,244
8.	Tagihan Akseptasi	166	9,344,684	9,346,065
9.	Kredit			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-	-
	b. Tersedia untuk dijual	172	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	173	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	175	859,570,853	877,443,750
10.	Pembiayaan Syariah	174	-	25,021,168
11.	Piutang Sewa Pembiayaan		-	4,104,095
12.	Penyertaan	200	12,369,341	745,815
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(4,166,431)
	Diakui dalam perhitungan ATMR			1,646
	Penyertaan Perusahaan Anak			298
	Tidak diakui dalam CET 1			4,910,301
13.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-			
	a. Surat Berharga	201	(132,241)	(132,999)
	b. Kredit	202	(37,537,934)	(38,363,840)
	c. Lainnya	206	-	(50)
14.	Aset Tidak Berwujud	212		

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian		
		Neraca Publikasi		
		BI	Posisi	Posisi
		31-Dec-19	31-Dec-19	31-Dec-19
	<i>Goodwill</i>		-	749,622
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(820,386)
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(6,257)
	Tidak diakui dalam CET 1			1,576,265
	Aset Tidak Berwujud Lainnya			
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -/-	213	-	(21,742)
15.	Aset Tetap dan Inventaris	214	41,942,453	44,075,681
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	215	(11,876,990)	(12,643,051)
16.	Aset non produktif			
a.	Properti Terbengkalai	217	20,425	20,425
b.	Aset yang diambil alih	218	61,402	65,104
c.	Rekening Tunda	219	-	-
d.	Aset Antar Kantor			
17.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan -/-	225	-	-
18.	Sewa Pembiayaan	227	-	-
19.	Aset Pajak Tangguhan	228	4,023,020	4,541,300
	Diakui dalam Tier 1			4,291,091
	Tidak diakui dalam Tier 1			250,209
20.	Aset Lainnya	230	14,335,938	19,079,564
	TOTAL ASET		1,343,077,860	1,416,758,840
LIABILITAS DAN EKUITAS				
1.	Giro	300	167,842,557	168,484,601
2.	Tabungan	320	404,360,261	405,355,483
3.	Simpanan Berjangka	330	397,547,188	413,223,653
4.	Dana Investasi revenue sharing		-	33,791,388
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	58,667	58,667
6.	Pinjaman dari Bank Lain	350	18,018,416	18,458,190
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	351	167,858	184,605
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	352	49,902,938	49,902,938



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian		
		Neraca Publikasi		
		BI	Posisi 31-Dec-19	Posisi 31-Dec-19
9.	Utang Akseptasi	353	9,344,684	9,346,065
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	355	38,316,131	38,620,837
11.	Pinjaman yang diterima		29,645,439	32,371,188
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai Modal		500,000	500,000
	b. Pinjaman yang diterima Lainnya	360	29,145,439	31,871,188
	Diakui dalam Tier 2			1,150,000
	Tidak diakui dalam Tier 2			30,721,188
12.	Setoran Jaminan	370	15,141	17,561
13.	Liabilitas Antar Kantor			
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	393	-	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	394	-	-
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	396	-	-
15.	Liabilitas Lainnya	400	24,193,118	38,251,700
	TOTAL LIABILITAS		1,139,412,398	1,208,066,876
17.	Modal Disetor			
	a. Modal dasar	421	15,000,000	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(8,832,709)	(8,832,709)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-		(2,106,014)	(2,106,014)
18.	Tambahan modal disetor			
	a. Agio	431	2,981,523	2,982,189
	b. Disagio -/-	432	-	(81,195)
	e. Lainnya		21,796	44,865
	i. Faktor penambah	453		
	1) Waran yang diterbitkan			
	a) Berbasis saham biasa			
	b) Lainnya		-	23,069
	2) Opsi Saham		-	-
	a) Berbasis saham biasa		-	-
	b) Berbasis saham biasa yang khusus diterbitkan dalam rangka program kompensasi pegawai/manajemen		21,796	21,796
	c) Lainnya		-	-

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	Neraca Publikasi		Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	
		BI	Posisi	Posisi	
			31-Dec-19	31-Dec-19	
	3) Lainnya		21,796	21,796	
	ii. Faktor pengurang -/-	454	-	-	
	Lainnya		-	-	
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya				
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan		(14,868)	(14,971)	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	436	(14,868)	(14,971)	
i.	Faktor penambah		(14,868)	(14,868)	
ii.	Faktor pengurang -/-	445	-	-	
	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yg dilaporkan di CET 1		726,681	697,185	
	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yg tidak dilaporkan di CET 1		-	18,585	
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap		16,864,083	17,099,207	
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti			16,864,083	
23.	Cadangan				
a.	Cadangan Umum	451	3,022,685	3,022,685	
24.	Laba/rugi			3,022,685	
a.	Tahun-tahun lalu			0	
	Diakui dalam Tier 1	452	-	-	
	Tidak diakui dalam Tier 1	461	141,775,016	143,890,923	
b.	Tahun berjalan			142,937,516	
	Diakui dalam Tier 1			953,407	
	Tidak diakui dalam Tier 1	465	34,028,685	34,413,824	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		203,665,462	206,324,092	
25.	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	398	-	2,367,872	
	Diakui dalam CET 1			1,979,595	
	Tidak diakui dalam CET 1			388,278	
	TOTAL EKUITAS		203,665,462	208,691,964	
	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		1,343,077,860	1,416,758,840	



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Penerbit	BRI	Diisi dengan penerbit dari instrumen
2.	Nomor identifikasi	BBRI	Diisi dengan <i>unique identification</i> atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat dibursa ISIN, dll)
3.	Hukum yang digunakan	Indonesia	Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya : hukum Indonesia
	Perlakuan instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
	Perlakuan instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	Modal Disetor	
4.	Pada saat masa transisi	N/A	PBI tidak mengadopsi masa transisi
5.	Setelah masa transisi	N/A	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; AT2; atau Tidak <i>Eligible</i>
6.	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group dan Solo	N/A	Diisi dengan pilihan : Solo; Group; atau Group dan Solo
7.	Jenis instrumen	Saham biasa	Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan; Saham Biasa; Saham Preferen; Surat Berharga Subordinasi; Pinjaman Subordinasi; surat berharga atau pinjaman lainnya
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM		Diisi dalam Jutaan Rupiah
9.	Nilai Par dari instrumen	6,167,290.50	Diisi dalam Jutaan Rupiah
10.	Klasifikasi akuntansi	Ekuitas	Diisi dengan pilihan : Ekuitas, Liabilitas - <i>Amortised Cost</i> ; Liabilitas - Fair Value Option; Non-Pengendali
11.	Tanggal penerbitan	10-Nov-03	Diisi : hh/bb/yyyy
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Diisi dengan pilihan : Perpetual; Dengan Jatuh Tempo
13.	Tanggal jatuh tempo	N/A	Untuk instrumen dengan jatuh tempo, Diisi tanggal jatuh tempo; hh/bb/yyyy, untuk instrumen perpetual Diisi : Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
15.	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	Tidak	Diisi dengan tanggal <i>call option</i> (hh/bb/yyyy), persyaratan <i>Call Option</i> lainnya dan jumlah penarikan (Dalam juta rupiah)

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
16.	<i>Subsequent call option</i>	N/A	Diisi bila ada fitur jumlah <i>subsequent call option</i> (berapa kali <i>call option</i> dalam dilakukan)
	Kupon/dividen	N/A	
17.	<i>Fixed atau floating</i>	N/A	Diisi dengan pilihan :
18.	Tingkat dari kupon <i>rate</i> atau <i>index</i> lain yang menjadi acuan	N/A	Diisi dengan tingkat dari kupon atau <i>index</i> yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen
19.	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
20.	<i>Fully discretionary, partial</i> atau <i>mandatory</i>	N/A	Apakah bank memiliki hak penuh atau <i>partial</i> untuk membatalkan kupon atau dividen atau tidak dapat membatalkan kupon/dividen. Diisi dengan pilihan : <i>Fully discretionary</i> ; <i>Partially Discretionary</i> ; <i>Mandatory</i>
21.	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
22.	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	N/A	Diisi dengan pilihan : <i>Noncumulative</i> ; atau <i>Cumulative</i>
23.	<i>Convertible</i> atau non-convertible	N/A	Diisi dengan pilihan : <i>Convertible</i> ; Non-convertible
24.	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> -nya	N/A	Diisi dengan kondisi (<i>trigger point</i>) kapan instrumen dikonversi , termasuk point of <i>non-viability</i> .
25.	Jika, <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	N/A	Diisi dengan penjelasan untuk setiap <i>trigger point</i> apakah instrumen akan : (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian
26.	Jika dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A	Diisi dengan penjelasan <i>rate</i> konversi atas instrumen
27.	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A	Diisi dengan penjelasan <i>rate</i> konversi atas instrumen
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	Diisi dengan pilihan : <i>Mandatory</i> ; <i>Optional</i> ; N/A
29.	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; T2; atau N/A



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
30.	Fitur <i>write-down</i>	N/A	Diisi dengan penjelasan <i>issuer of instrument it converts into</i>
31.	Jika <i>write-down</i> sebutkan trigger-nya	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
32.	Jika <i>write-down</i> apakah penuh atau sebagian	N/A	Diisi dengan penjelasan kondisi atau <i>trigger point</i> fitur <i>write-down</i> , termasuk <i>point of non-viability</i> .
33.	Jika <i>write-down</i> permanen atau temporer	N/A	Diisi dengan pilihan : Permanen; atau Temporer
34.	Jika <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A	Diisi dengan penjelasan mekanisme <i>write-up</i>
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	N/A	Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi
36.	Apakah transisi untuk fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
37.	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A	Diisi dengan penjelasan fitur yang <i>non-compliant</i>
1.	Penerbit	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK	Diisi dengan penerbit dari instrumen
2.	Nomor identifikasi	IDA000091201 (ISIN CODE)	Diisi dengan <i>unique identification</i> atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat dibursa ISIN, dll)
3.	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya : hukum Indonesia
	Perlakuan instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4.	Pada saat masa transisi	-	PBI tidak mengadopsi masa transisi
5.	Setelah masa transisi	AT2	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; AT2; atau Tidak <i>Eligible</i>
6.	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group dan Solo	Solo	Diisi dengan pilihan : Solo; Group; atau Group dan Solo
7.	Jenis instrumen	Obligasi Subordinasi	Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan; Saham Biasa; Saham Preferen; Surat Berharga Subordinasi; Pinjaman Subordinasi; surat berharga atau pinjaman lainnya
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	50%	Diisi dalam Jutaan Rupiah

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
9.	Nilai Par dari instrumen	100%	Diisi dalam Jutaan Rupiah Diisi dengan pilihan : Ekuitas, Liabilitas - <i>Amortised Cost</i> ; Liabilitas - Fair Value Option; Non-Pengendali
10.	Klasifikasi akuntansi	Liabilitas	
11.	Tanggal penerbitan	6/26/2018	Diisi : hh/bb/yyyy
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo		Diisi dengan pilihan : Perpetual; Dengan Jatuh Tempo
13.	Tanggal jatuh tempo	6/26/2023	Untuk instrumen dengan jatuh tempo, Diisi tanggal jatuh tempo; hh/bb/yyyy, untuk instrumen perpetual Diisi : Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	-	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
15.	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	-	Diisi dengan tanggal <i>call option</i> (hh/ bb/yyyy), persyaratan <i>Call Option</i> lainnya dan jumlah penarikan (Dalam juta rupiah)
16.	<i>Subsequent call option</i>	-	Diisi bila ada fitur jumlah <i>subsequent call option</i> (berapa kali <i>call option</i> dalam dilakukan)
	Kupon/dividen	7.70%	
17.	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed</i>	Diisi dengan pilihan : - <i>Fixed</i> : bila kupon atau dividen adalah <i>fixed</i> selama jangka waktu instrumen; - <i>Floating</i> : bila kupon atau dividen adalah <i>floating</i> selama jangka waktu instrumen; - <i>Fixed to floating</i> : bila kupon/ dividen saat ini adalah <i>fixed</i> , namun bisa berubah menjadi <i>floating</i> dimasa mendatang atau ; - <i>Floating to fixed</i> : bila kupon/ dividen saat ini adalah <i>floating</i> , namun bisa berubah menjadi <i>fixed</i> dimasa mendatang.
18.	Tingkat dari kupon <i>rate</i> atau <i>index</i> lain yang menjadi acuan	-	Diisi dengan tingkat dari kupon atau <i>index</i> yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen
19.	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	-	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
20.	<i>Fully discretionary, partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Fully discretionary, partial</i> atau <i>mandatory call by OJK</i>	Apakah bank memiliki hak penuh atau <i>partial</i> untuk membatalkan kupon atau dividen atau tidak dapat membatalkan kupon/dividen. Diisi dengan pilihan : <i>Fully discretionary; Partially Discretionary; Mandatory</i>
21.	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
22.	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	<i>cummulative</i>	Diisi dengan pilihan : <i>Noncumulative</i> ; atau <i>Cumulative</i>
23.	<i>Convertible</i> atau <i>non-convertible</i>	<i>Non -convertible</i>	Diisi dengan pilihan : <i>Convertible</i> ; <i>Non-convertible</i>
24.	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> -nya	-	Diisi dengan kondisi (<i>trigger point</i>) kapan instrumen dikonversi , termasuk point of <i>non-viability</i> .
25.	Jika, <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	-	Diisi dengan penjelasan untuk setiap <i>trigger point</i> apakah instrumen akan : (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian
26.	Jika dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	-	Diisi dengan penjelasan <i>rate</i> konversi atas instrumen
27.	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	-	Diisi dengan penjelasan <i>rate</i> konversi atas instrumen
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	Diisi dengan pilihan : <i>Mandatory</i> ; <i>Optional</i> ; N/A
29.	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	-	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; T2; atau N/A
30.	Fitur <i>write-down</i>	Ya	Diisi dengan penjelasan <i>issuer of instrument it converts into</i>
31.	Jika <i>write-down</i> sebutkan trigger-nya	Ya	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
32.	Jika <i>write-down</i> apakah penuh atau sebagian	1. rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi $\leq 5,125\%$ 2. terdapat rencana otoritas untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan usahanya; dan 3. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan <i>write down</i> .	Diisi dengan penjelasan kondisi atau <i>trigger point</i> fitur <i>write-down</i> , termasuk ponit of <i>non-viability</i> .
33.	Jika <i>write-down</i> permanen atau temporer	Permanen/Temporer	Diisi dengan pilihan : Permanen; atau Temporer
34.	Jika <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	Perintah OJK	Diisi dengan penjelasan mekanisme <i>write-up</i>
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun	Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi
36.	Apakah transisi untuk fitur yang <i>non-compliant</i>	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
37.	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-complain</i>	Tidak	Diisi dengan penjelasan fitur yang <i>non-compliant</i>

Pedoman pengisian

1. Setiap instrumen permodalan yang diterbitkan bank harus diungkapkan dalam Pengungkapan Rincian Fitur Permodalan.
2. Pengungkapan tersebut menggunakan format yang disediakan oleh Basel, dan merupakan standar minimum. Bank dapat menambahkan fitur-fitur penting lain dalam bank berdasarkan penilaian bank atau pengawas Bank fitur tersebut penting untuk diungkapkan.
3. Bank diminta untuk mengkinikan pengungkapan tersebut bila terdapat perubahan fitur dari instrumen permodalan, misalnya bila terdapat penerbitan instrumen baru, pembayaran, penarikan atau konversi atau *write down*, atau perubahan lain yang material dari intrumen permodalan yang ada.
4. Dalam hal terdapat fitur yang tidak *applicable* atau tidak relevan, maka diisi dengan N/A.
5. Penjelasan definisi pos-pos dalam Pengungkapan Rincian Fitur Permodalan dapat dilihat pada Annex 3 pada dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, Juni 2012.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

		31 DESEMBER 2019	
		BRI	Konsolidasi
I.	MODAL INTI (Tier 1)	187,012,209	197,219,352
1.	Modal Inti Utama (CET 1)	187,012,209	197,219,352
1.1.	Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	6,424,794	6,424,794
a.	Saham biasa	6,424,794	6,424,794
b.	Saham preferen	0	0
1.2.	Cadangan Tambahan Modal *)	196,978,130	198,099,127
1.2.1.	Faktor Penambah :	197,035,154	198,254,264
1.2.1.1.	Pendapatan Komprehensif Lainnya	17,590,764	17,577,033
1.2.1.1.1.	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	0	0
1.2.1.1.2.	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	726,681	712,950
1.2.1.1.3.	Saldo surplus revaluasi aset tetap	16,864,083	16,864,083
1.2.1.2.	Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	179,444,390	180,677,232
1.2.1.2.1.	Agio	618,004	618,004
1.2.1.2.2.	Cadangan Umum	3,022,685	3,022,685
1.2.1.2.3.	Laba tahun-tahun lalu	141,775,016	142,937,516
a.	Laba tahun lalu	141,775,016	142,937,516
b.	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan	0	0
c.	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	0	0
1.2.1.2.4.	Laba tahun berjalan	34,028,685	34,099,027
a.	Laba tahun berjalan	34,028,685	34,099,027
1.2.1.2.5.	Dana Setoran Modal	0	0
1.2.1.2.6.	Lainnya	0	0
1.2.2.	Faktor Pengurang :	57,024	155,137
1.2.2.1.	Pendapatan Komprehensif Lainnya	14,868	30,633
1.2.2.1.1.	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	14,868	14,868

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

			31 DESEMBER 2019	
			BRI	Konsolidasi
	1.2.2.1.2.	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0	15,765
	1.2.2.2.	Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	42,156	124,504
	1.2.2.2.1.	Disagio	0	0
	1.2.2.2.2.	Rugi tahun-tahun lalu	0	0
	1.2.2.2.3.	Rugi tahun berjalan	0	0
	1.2.2.2.4.	Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	0	66,101
	1.2.2.2.5.	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	0	0
	1.2.2.2.6.	PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	42,156	46,059
	1.2.2.2.7.	Lainnya	0	12,344
1.3.	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan		0	1,979,595
1.4.	Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)		16,390,715	9,284,165
	1.4.1.	Perhitungan pajak tangguhan	4,023,020	4,291,091
	1.4.2.	<i>Goodwill</i>	0	820,386
	1.4.3.	Selisih aset tidak berwujud lainnya	0	6,257
	1.4.4.	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	12,367,695	4,166,431
	1.4.5.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	0	0
	1.4.6.	Eksposur sekuritisasi	0	0
	1.4.7.	Faktor pengurang modal inti utama lainnya	0	0
2.	Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1</i> (AT 1) *)		0	0
	2.1.	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1	0	0
	2.2.	Agio/Disagio	0	0
	2.3.	Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain *)	0	0



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM)M

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

		31 DESEMBER 2019	
		BRI	Konsolidasi
II.	MODAL PELENGKAP (Tier 2)	8,974,441	10,160,078
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	350,000	1,150,000
a	Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	0	0
b	Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	350,000	1,150,000
c	Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	0	0
d	Mandatory convertible bond	0	0
e	Penerbitan Tier 2 oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	0	0
f	Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa (+/-)	0	0
2	Agio/disagio	0	0
3	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	8,624,441	9,046,077
4	Faktor pengurang modal pelengkap *)	0	35,999
TOTAL MODAL		195,986,650	207,379,430
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			
ATMR RISIKO KREDIT		689,093,355	726,179,371
ATMR RISIKO PASAR		13,712,721	14,004,256
ATMR RISIKO OPERASIONAL		166,214,312	170,666,840
TOTAL ATMR		869,020,388	910,850,467
RASIO KPM)M SESUAI PROFIL RISK (%)		9.60%	9.61%
ALOKASI PEMENUHAN KPM)M			
Dari CET 1 (%)		8.57%	8.49%
Dari AT1 (%)		0.00%	0.00%
Dari Tier 2 (%)		1.03%	1.12%
RASIO KPM)M			
Rasio CET 1 (%)		21.52%	21.65%
Rasio Tier 1 (%)		21.52%	21.65%
Rasio Tier 2 (%)		1.03%	1.12%
Rasio Total (%)		22.55%	22.77%
CET UNTUK BUFFER (%)		12.95%	13.16%
PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)		5.000%	5.000%
Capital Conversion Buffer (%)		2.500%	2.500%
Countercyclical Buffer (%)		0.000%	0.000%
Capital Surcharge untuk D-SIB (%)		2.500%	2.500%

1)Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

Satu Layar Berjuta Transaksi

Nikmati kemudahan transaksi dengan Internet Banking BRI
yang menawarkan beragam fitur terdepan untuk urusan perbankan.



INTERNET BRI
Banking

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



BRI menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik terbaik GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai lembaga keuangan terbesar di Indonesia, Bank juga mendukung penuh komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BRI

Komitmen BRI dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan yang sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan para pemangku kepentingan tercermin dalam salah satu butir pernyataan Misi Perusahaan, yakni Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik terbaik *good corporate governance*.

Sesuai dengan pernyataan misi, BRI mendukung upaya pencapaian tujuan keberlanjutan dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank mendukung penuh Pemerintah Indonesia, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan prakarsa bersama skala global dalam menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek lingkungan, sosial dan ekonomi pada setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan, baik di

lingkup pemerintahan maupun dunia usaha, yang dirumuskan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan – Global Goals.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai Bank terbesar di Indonesia, BRI menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No.51/POJK.03/2017.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan perwujudan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, BRI menetapkan berbagai inisiatif strategis, mencakup:

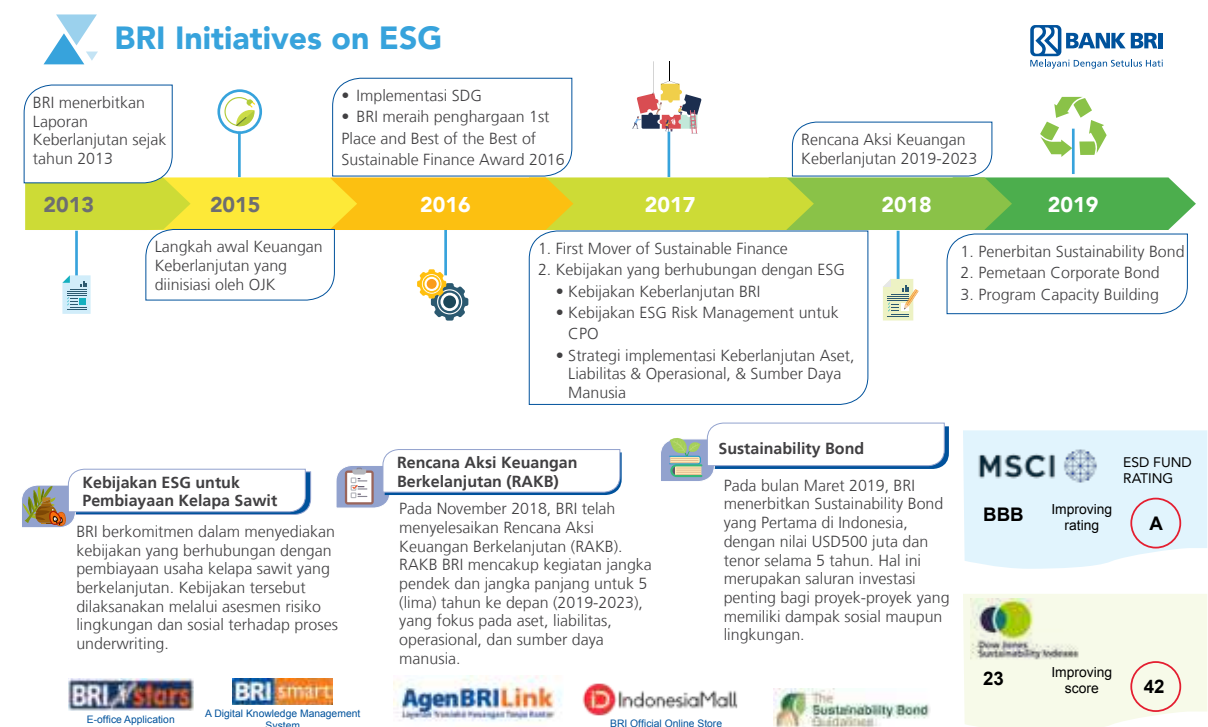
- Pemberian dukungan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, yakni sektor-sektor yang memiliki *multiflier effect* tinggi seperti energi, pertanian, industri pengolahan, infrastruktur, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Penyediaan akses keuangan bagi seluruh masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu dan daerah terpencil.
- Partisipasi aktif dalam mewujudkan upaya bersama bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam melestarikan lingkungan.
- Penerapan kebijakan pembiayaan kredit pada sektor-sektor usaha ramah lingkungan dan tersertifikasi pengelolaan analisis dampak lingkungan secara konsisten
- Pengelolaan operasional yang efisien dan ramah lingkungan
- Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman kebijakan serta prosedur sosial dan lingkungan serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

FIRST MOVER ON SUSTAINABLE BANKING – INISIATIF BRI DALAM ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE)

Sejak tahun 2017, BRI bersama enam bank nasional dan satu bank syariah lainnya telah ditetapkan sebagai 'First Movers on Sustainable Banking' oleh OJK sebagai bagian dari implementasi Rencana Jangka Menengah Peta Jalan Keuangan Keberlanjutan OJK 2015-2019. Sesuai dengan rencana tersebut di tahun 2018 BRI bersama ketujuh bank lainnya turut membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).

Pada kepemimpinan IKBI, BRI ditunjuk sebagai Ketua. Peran tersebut menunjukkan besarnya dukungan dan komitmen BRI terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan melalui penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pembentukan IKBI sebagai forum komunikasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya seluruh komitmen BRI dalam menerapkan seluruh program dalam peta jalan keuangan berkelanjutan beserta implementasinya, yaitu Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tersebut. Sebagai Ketua IKBI, BRI berupaya mengedepankan program-program strategis, melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan, serta menginisiasi beragam proyek-proyek rintisan dalam rangka mengembangkan model bisnis hijau yang aplikatif.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

DUE DILIGENT DAN MITIGASI TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Sebelum merumuskan dan menjalankan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, memperbaiki kualitas lingkungan serta meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan, BRI menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya secara komprehensif, untuk kemudian dilakukan langkah mitigasi yang relevan.

Mitigasi dampak sosial terhadap pekerja dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. Untuk mendapatkan *feed-back* atas mitigasi tersebut, BRI melaksanakan *survei engagement* pegawai secara berkala.

Mitigasi dampak sosial terhadap para nasabah

Bank BRI dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang perlindungan nasabah. Bank BRI juga telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional dan Pedoman (SOP) tentang Pengelolaan Pengaduan Nasabah. Langkah ini diikuti penerapan pedoman pengelolaan pengaduan nasabah dan pelaksanaan *survey Customer Satisfaction* secara berkala, terutama bagi nasabah retail, nasabah kecil, mikro maupun ultra mikro.

Untuk memitigasi dampak ekonomi, BRI telah menyusun Rencana Bisnis Bank guna mengarahkan kegiatan usaha yang efektif dan efisien dalam meraih target yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2018, BRI juga telah menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dokumen RAKB menjadi *guideline* bagi BRI agar jumlah portofolio pendanaan dan pembiayaan yang dikelolanya selaras dengan upaya pencapaian SDGs dan meningkatkan prosentase portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan.

Mitigasi dampak lingkungan dilaksanakan melalui program operasi perbankan ramah lingkungan serta penerapan kebijakan kredit yang ramah lingkungan. Dalam melaksanakan analisis kredit untuk segmen korporasi, Bank BRI mensyaratkan dipenuhinya ketentuan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), serta peninjauan kepatuhannya di lapangan secara berkala. Bank BRI juga memberikan dukungan pendanaan bagi organisasi yang bergerak dalam pengembangan energi terbarukan, pembangunan transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan berbagai inisiatif efisiensi energi, dan organisasi yang menerapkan konsep keberlanjutan.

BRI juga tengah merintis penyaluran pendanaan bagi inisiatif pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan infrastruktur sosial yang relevan dengan SDGs dari berbagai lembaga pendanaan global yang memiliki dedikasi tinggi terhadap isu-isu keberlanjutan.

Dengan demikian dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial lingkungan, BRI telah memenuhi prinsip-prinsip:

1. Kontribusi positif pada pencapaian SDGs.
2. Mendukung pemerataan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Melibatkan dan mengedepankan kerja sama harmonis untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memahami dan berempati pada keprihatinan masyarakat global terhadap isu-isu keberlanjutan.
6. Menjadi satu kesatuan dengan seluruh kegiatan usaha BRI.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK OLEH ATAU BERPENGARUH PADA KEGIATAN BANK

BRI telah mengidentifikasi dengan seksama kelompok *stakeholder* utama yang menerima dampak atau memberi dampak signifikan terhadap kegiatan usaha, agar dapat menjalankan pengelolaan sumber dayanya secara optimal dalam rangka mengembangkan skala usaha, menjaga keberlangsungan bisnis dan dapat memenuhi harapan para *stakeholder* dengan baik.

Hasil identifikasi menjadi dasar bagi BRI dalam mengelola pelibatan pemangku kepentingan, serta mengelola isu yang berkembang dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Bank BRI kemudian merumuskan program pemberdayaan masyarakat maupun program pendukung pelestarian lingkungan yang sesuai dengan konteks keberlanjutan sekaligus selaras dengan kegiatan usaha.

Uraian lengkap mengenai topik bahasan dan metode pelibatan kelompok pemangku kepentingan utama disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BRI – Identifikasi Kebutuhan dan Pendekatan Pemangku Kepentingan. Adapun kelompok pemangku kepentingan utama BRI yang diidentifikasi adalah:

- Investor
- Nasabah
- Pekerja dan Serikat Pekerja
- Masyarakat Setempat / Komunitas
- Pemerintah
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sesuai hasil identifikasi dimaksud, BRI mencatatkan 13 (tiga belas) topik material dengan dampak signifikansi tinggi terhadap keberlangsungan usaha Bank, sekaligus penting bagi pemangku kepentingan yakni:

- Kinerja Ekonomi dan Inklusi Keuangan
- Portofolio Produk dan Kualitas Pinjaman
- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Teknologi Informasi
- Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung
- Ketenagakerjaan
- Perlindungan Informasi Nasabah

- Anti Korupsi
- Pengelolaan Limbah
- Pengelolaan Emisi
- Pengelolaan Energi
- Investasi
- Komunitas Lokal.

BRI kemudian menyusun inisiatif strategis untuk memitigasi dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan dan merangkumnya ke dalam Inisiatif Strategis Pencapaian Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

- Inisiatif peningkatan pemahaman nilai tambah penerapan nilai-nilai keuangan berkelanjutan kepada Pekerja maupun Debitur, mencakup:
 - Melakukan koordinasi aktif dengan debitur korporasi melalui forum *gathering*, untuk bersama-sama berkomitmen dan menerapkan pengelolaan bisnis berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.
 - Mengikutsertakan pekerja Divisi terkait dalam Training Analisis Lingkungan (TAL) dengan topik Energi Baru Terbarukan maupun topik lain terkait *Sustainable Finance*.
- Inisiatif Penyusunan Strategi Keuangan Berkelanjutan dalam pengelolaan Aset, Liabilitas, Ekuitas dan *Human Capital*.
- Inisiatif Pengelolaan Operasional yang ramah lingkungan, dengan fokus pada:
 - Pengelolaan Energi
 - Pengelolaan Emisi
 - Pengelolaan Limbah
 - Dukungan Program Penghijauan
- Inisiatif *Green Funding*, mencakup penerbitan *Sustainable Bond* maupun kerjasama dengan *Sustainable Fund* Founding.
- Inisiatif *Green Lending*, mencakup penetapan Kebijakan ESG Dalam Pembiayaan Industri Minyak Kelapa Sawit, maupun kebijakan Pembiayaan Ramah Lingkungan lainnya.
- Inisiatif Digitalisasi BRI, meliputi: *Digital Core*, *Digital Ecosystem* dan *New Digital Preposition*
- Inisiatif Pemberdayaan Komunitas/Masyarakat.
- Inisiatif Literasi Keuangan dan Dukungan Inklusi Keuangan



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kemudian dalam aspek Ekonomi, sebagai salah satu Grup Usaha Keuangan terbesar di Indonesia, pengembangan usaha BRI dilakukan dengan mengacu pada konsep keuangan berkelanjutan, yakni:

1. Memiliki kebijakan pemberian yang menegaskan bahwa kredit hanya diberikan pada sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan dan telah tersertifikasi pengelolaan analisis dampak lingkungan.
2. Tidak memberikan pembiayaan kredit pada usaha yang merusak lingkungan.
3. Pengelolaan operasional perusahaan secara efisien, ramah dan tidak merusak lingkungan.
4. Berpartisipasi dalam pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan.

TATA KELOLA DAN STRATEGI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam memastikan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam penerapan RAKB, BRI telah memutuskan Kebijakan Umum Keberlanjutan BRI melalui SK Direksi no.05-DIR/EMP/O&/2018 dan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor S.17-DIR/DMR/04/2017.

Penyusunan RAKB BRI sendiri diawasi langsung oleh Direktur Manajemen Risiko, dengan anggota *Steering Committee* mencakup Direktur Keuangan, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Kepatuhan, dibantu dengan tim keuangan berkelanjutan (*sustainable finance/SF*) dari Divisi EMP, CDS, SKP, BUMN 2, Agribisnis, Bisnis Ritel dan Menengah, Divisi Kepatuhan, Divisi ARK, Divisi KRD dan Divisi ARK, serta satuan kerja Audit Internal BRI. Tim SF dikoordinasikan oleh Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio.

Sementara untuk kegiatan Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, BRI telah menetapkan unit kerja Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan (BKC) dan Divisi

Sekretariat Perusahaan (SKP) sebagai penanggung jawab program. Kegiatan pengembangan masyarakat dalam program CSR dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ini menjadi bagian dari tanggung jawab Divisi BKC dan Divisi SKP.

Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus untuk mendapatkan dukungan masyarakat bagi kesinambungan operasional maupun bisnis unit kerja BRI. Program Bina Lingkungan diwujudkan dengan program khusus BRI Peduli, yang terdiri dari beberapa program pendukung, yakni: Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari dan Indonesia Sejahtera. Program Kemitraan diwujudkan melalui pemberian pinjaman kemitraan dan bantuan hibah pembinaan yang dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Uraian lebih lengkap mengenai Program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan disampaikan pada bagian lain yang relevan dari uraian Bab ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Komitmen

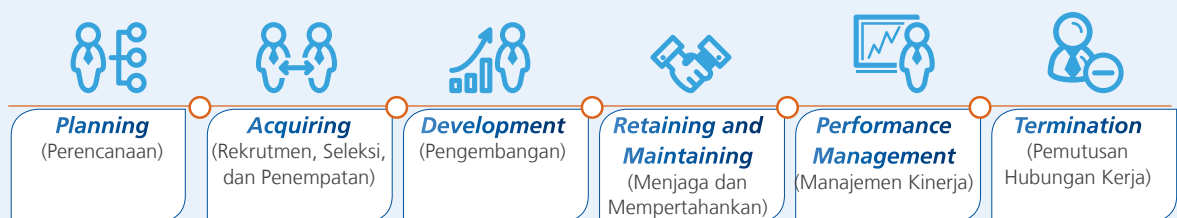
BRI berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia meliputi jaminan kebebasan berserikat, pencegahan tindakan diskriminasi, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, kebebasan dalam beribadah, dan lainnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kebijakan dan Strategi Penerapan

BRI menetapkan asas persamaan dan kesamaan kesempatan sebagai kebijakan dasar pengelolaan pekerja yang merupakan salah satu prinsip dasar HAM. Adapun strategi pengelolaan *Human Capital* yang diterapkan BRI mengacu pada Arsitektur *Human Capital* yang telah ditetapkan. Tujuan penerapan strategi adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh jajaran organisasi dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan bermartabat.

Implementasi Arsitektur *Human Capital* sendiri mencakup seluruh siklus tahapan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari tahap rekrutmen sampai dengan penghentian hubungan kerja, sebagai berikut.



Selanjutnya, dalam rangka mendapatkan umpan balik atas peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia dalam Arsitektur *Human Capital* tersebut, BRI menyelenggarakan survei keterikatan pegawai (*Employee Engagement Survey*).

Pembahasan mendetail mengenai implementasi Arsitektur *Human Capital* disampaikan pada uraian Pengelolaan Human Capital dalam Laporan Tahunan ini.

Implementasi Hak Asasi Manusia

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait Hak Asasi Manusia di BRI dilaksanakan melalui pemberian jaminan pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Jaminan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
Guna menciptakan hubungan industrial yang bermartabat dan saling menghormati, BRI membangun hubungan ketenagakerjaan dengan para pekerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibahas dan disepakati bersama Serikat Pekerja. PKB yang berlaku adalah PKB periode 2017 – 2019 sebagai hasil kesepakatan dan musyawarah manajemen dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan syah dari para karyawan BRI. Pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini, Manajemen BRI bersama-sama dengan Serikat Pekerja tengah melaksanakan serangkaian diskusi dan pembahasan bagi penyelesaian penyusunan PKB periode berikutnya.

BRI menjamin kebebasan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja, mendukung aktifitas mereka dan memperlakukan mereka sebagai mitra dalam membangun hubungan industrial yang bermartabat dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kelancaran pembahasan PKB tersebut diatas.

- Kepastian Waktu Kerja
BRI menjamin hak karyawan untuk bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan bersama dalam PKB dan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jika terdapat kondisi yang membuat suatu pekerjaan harus diselesaikan dan dilaksanakan diluar waktu kerja, BRI menjamin hak-hak karyawan untuk mendapatkan kompensasi yang memadai, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Kepegawaian.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- **Hak Cuti**
BRI menghormati hak pekerja untuk mengajukan cuti, untuk beristirahat dari rutinitas kerja, dengan tetap menanggung hak-hak keuangan pekerja. Sesuai butir-butir kesepakatan dalam PKB dan dalam Pedoman Kepegawaian, ada beberapa jenis cuti dalam tanggungan yang dapat diajukan oleh pekerja, meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Haid, Cuti Melahirkan, Cuti Keguguran dan Cuti Tugas Khusus.
- **Menunaikan Kewajiban Beragama**
BRI menghormati hak pekerja untuk mendapatkan waktu yang memadai guna menunaikan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan ritual ibadah sesuai agama masing-masing. Selain itu, atas permintaan pekerja, BRI dapat memberikan waktu bagi pekerja untuk melaksanakan perjalanan suci umat beragama sesuai ajaran agamanya.
- **Izin Tidak Masuk Kerja**
Untuk alasan pribadi tertentu sesuai Peraturan Kepegawaian dan sebagaimana disetujui dalam PKB, BRI dapat memberikan izin tidak masuk kerja bagi pekerja. Beberapa kondisi tertentu tersebut mencakup: Pernikahan, Menikahkan anak yang terdaftar pada Perusahaan, Kelahiran anak dari istri yang terdaftar, Khitanan anak yang terdaftar, Kematian anggota keluarga langsung dan sebagainya. Jumlah izin yang diberikan diatur dalam Peraturan Pekerja.
- **Pengaduan Masalah Kepegawaian**
BRI memberikan hak untuk menyampaikan pendapat terkait masalah kepegawaian dan menyediakan mekanisme penyelesaiannya.
- **Survei Keterikatan Pekerja**
Guna meningkatkan kualitas pengelolaan HC, di tahun 2019 BRI kembali melaksanakan survey keterikatan karyawan, sebagai sarana umpan balik dari seluruh pekerja. Hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen tersebut menunjukkan tingkat *engagement* pegawai sebesar 78,2%. Disisi lain tingkat turn-over pegawai di tahun 2019 adalah sebesar 2,29%, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan nasional.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen

BRI berkomitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil melalui implementasi kebijakan operasional yang memperhatikan asas *fairness*, transparansi maupun akuntabilitas dalam berhubungan dengan para mitra kerja, maupun interaksi dengan pihak internal. BRI memandang pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil juga merupakan wujud komitmen BRI untuk senantiasa meningkatkan kualitas terbaik penerapan GCG.

Kebijakan

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait praktik operasi yang adil diwujudkan BRI melalui penerapan kebijakan operasional mencakup pencegahan benturan kepentingan, kebijakan anti korupsi maupun *fraud* melalui implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Kode Etik, dan kebijakan anti gratifikasi.

Implementasi

Tanggung-jawab sosial terkait operasi yang adil diimplementasikan oleh BRI melalui:

- **Pencegahan Benturan Kepentingan**
Seluruh jajaran pengurus maupun pekerja BRI dilarang terlibat didalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan kondisi benturan kepentingan. Apabila ada potensi dimaksud, maka para pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, baik di tingkat manajemen, termasuk manajemen puncak maupun pekerja, dilarang terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
- **Pernyataan Integritas & Kepatuhan terhadap Kode Etik**
BRI mewajibkan seluruh jajaran manajemen dan pekerja membuat Pernyataan Integritas dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan secara berkala. Pernyataan integritas pertama kali dilaksanakan pada saat proses penerimaan sebagai pekerja, setelah mengikuti tahapan induksi mengenai nilai-nilai perusahaan dan butir-butir ketentuan kode etik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Penerapan kebijakan anti korupsi dan anti fraud melalui implementasi Whistleblowing System (WBS) Mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran fraud di BRI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image BRI ini dikelola dengan dukungan penuh manajemen puncak dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Pelaporan WBS dapat dilakukan melalui Website maupun PO BOX.
- Larangan Gratifikasi
 BRI menetapkan larangan pemberian maupun penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja. Untuk memastikan berlakunya larangan ini, BRI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada dalam pengelolaan Direktorat Kepatuhan. Bekerja sama dengan Direktorat Human Capital, unit ini mewajibkan seluruh jajaran manajemen dan pekerja BRI menanda tangani Pakta Integritas sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebagai penegasan kepada pihak eksternal, BRI selalu melakukan publikasi melalui media massa terkait pernyataan pelarangan memberi gratifikasi kepada seluruh pekerja BRI



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

BRI berkomitmen penuh untuk menjalankan kegiatan operasional dengan lebih ramah lingkungan. Selain itu, melalui kegiatan pembiayaan yang dijalankan, BRI juga bertekad untuk mendukung terlaksananya kegiatan perekonomian yang semakin ramah lingkungan.



KOMITMEN

Sebagai wujud komitmennya, BRI telah membentuk divisi khusus yang mengelola aspek lingkungan yang berada di bawah Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Divisi Pengadaan Barang & Jasa. Divisi ini menjalankan fungsi kebijakan, pemantauan, dan pengawasan strategis. Pengelolaan kelestarian lingkungan dalam hal operasional BRI dilakukan terhadap efisiensi air, pemakaian kertas, energi dan sumber daya alam lainnya.

Untuk melaporkan kegiatan dukungan terhadap pelestarian lingkungan, khususnya dan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan yang telah dijalankan secara lebih komprehensif, BRI juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan dengan mengacu pada standar pelaporan internasional, *Global Reporting Initiative* (GRI) secara rutin.

Kebijakan dan Strategi Penerapan

Sesuai dengan amanat POJK No.51/POJK.03/2017 dan mengacu pada undang-undang di bidang lingkungan yang relevan, BRI telah menyusun suatu kebijakan korporasi yang komprehensif, yang mengintegrasikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola ke dalam aspek ekonomi/bisnis yang selama ini telah berlangsung. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Keberlanjutan BRI melalui SK Nokep.S.16-DIR/DMR/04/2017, sebagai Kebijakan tertinggi implementasi Sustainable Finance BRI. Melalui kebijakan tersebut BRI menetapkan kerangka integrasi mitigasi risiko Lingkungan Sosial dan Tatakelola (LST) dalam proses pelayanan nasabah dan proses assesmen kredit dan termasuk kebijakan sektoral terhadap sektor komoditas yang terekspos risiko lingkungan, termasuk kerusakan hutan. Adapun strategi implementasi kebijakan ini dituangkan dalam SK Nokep.17-DIR/DMR/04/2017), merupakan strategi untuk masing-masing bidang yaitu: *Asset*, *Liabilities*, Operasional dan *Human Capital*.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

BRI juga menerbitkan kebijakan khusus terkait kegiatan perbankan ramah lingkungan, *green banking*, melalui penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sub Sektor Kelapa Sawit (SE Nose.S.27-DIR/DMR/04/2017), mengingat sub sektor ini ditengarai berdampak besar bagi lingkungan hutan tropis Indonesia. Kebijakan ini mengatur Indikator Penerapan LST yang harus dipertimbangkan di sektor kelapa sawit, dan *Checklist* persyaratan dokumen.

Secara keseluruhan, strategi BRI dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan adalah guna memastikan bahwa BRI memiliki bisnis yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Dasar penerapan kebijakan yang dijalankan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengedepankan prinsip penghematan energi, pelestarian lingkungan, perhatian pada aspek sosial dan tata kelola yang baik serta mengutamakan konservasi energi.
2. Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat disusun untuk menunjang kemajuan perusahaan dari segi *corporate image* yang dilakukan dengan efisiensi sumber daya.
3. Menerapkan inisiatif operasional: *paperless*, e-office, green building, green IT infrastructure, digital operation, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), CSR BRI Peduli, E-Learning, Penyediaan Parkir sepeda "Bike to Work" dan lain-lain.

Kegiatan yang Dilakukan

Realisasi kegiatan yang juga merupakan penerapan dari RAKB pada intinya terbagi kedalam empat kelompok besar, yakni: Pembiayaan Berwawasan Lingkungan, Pendanaan Berwawasan Lingkungan, CSR BRI Peduli, dan Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan.

Pembiayaan Berwawasan Lingkungan
BRI berkomitmen menerapkan Green Banking, yakni kegiatan pembiayaan yang menekankan pada pemenuhan aspek-aspek kelestarian dari pelaku bisnis yang menerima dukungan pembiayaan dari Bank. BRI telah menyusun kebijakan pembiayaan ramah lingkungan untuk sektor Kelapa Sawit. Selain memperhatikan persyaratan lingkungan, Bank juga memperhatikan aspek sosial dari pembiayaan kelapa sawit, meliputi pemetaan area perkebunan untuk menghindari tumpang tindih dengan masyarakat sekitar dan area konservasi.

Debitur kelapa sawit BRI diwajibkan telah mendaftarkan atau telah tersertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) atau *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Persyaratan ini diberlakukan bagi seluruh debitur korporasi.

Pendekatan yang sama diberlakukan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan sejenis di industri perkebunan lain, maupun di sektor lain yang membutuhkan pengelolaan lahan dalam jumlah yang luas maupun di sektor manufaktur.

BRI juga membuka kesempatan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan, seperti PLTB, PLTA maupun PLTS, termasuk pembangkit-pembangkit mikro hydro dipemukim yang dekat dengan kawasan hutan lindung.

Pendanaan Berwawasan Lingkungan

BRI telah menginisiasi penggalangan dana ramah lingkungan, berupa penerbitan Sustainability Bond pertama di Indonesia dengan nilai nominal sebesar US\$500 juta dan tenor 5 tahun di bulan Maret 2019. Seluruh dana yang diperoleh secara *mandatory* ditujukan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek-proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan keberlanjutan.

Selain melalui penerbitan Obligasi Keberlanjutan, BRI berusaha menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan global yang memiliki empati tinggi terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan.

Inisiatif Operasional Ramah Lingkungan

Beragam inisiatif ramah lingkungan yang dilaksanakan BRI diuraikan dalam pembahasan berikut.

• Pengelolaan Energi

Pengelolaan energi dilakukan dengan prinsip penghematan, sejalan dengan Surat Divisi JBR No.B.612-JBR/KJR/07/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang menghimbau penghematan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah melakukan penghematan konsumsi energi, baik energi listrik maupun BBM. Pengelolaan energi yang optimal akan berarti juga pengurangan potensi emisi gas karbondioksida (gas rumah kaca) yang optimal.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

Penghematan pemakaian listrik dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan, yakni:

1. Pemakaian lampu LED yang hemat energi
2. Penerapan budaya kerja untuk mematikan listrik di ruangan jika tidak ada aktivitas kerja.
3. Pengaturan jam operasional elevator.

Penghitungan pemakaian listrik berdasarkan angka meter pemakaian yang tercantum dalam rekening pembayaran listrik di Gedung Kantor Pusat, Jakarta. Efektivitas pengelolaan energi kemudian diukur dengan menghitung intensitas energi, yakni perbandingan antara total penggunaan listrik dengan total luas kantor Gedung Pusat yang digunakan.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa konsumsi listrik di kantor pusat selama tahun 2019 adalah sejumlah 11.742.243 kWh, naik 10,6% dari konsumsi sebesar 10.613.440 kWh di tahun 2018. Kenaikan terjadi semata-mata karena adanya penambahan kegiatan di Kantor Pusat, termasuk bertambahnya luasan ruangan kantor yang digunakan.

Komitmen BRI dalam menjaga lingkungan yang bersih juga diwujudkan dengan penggunaan Pertamina sebagai bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional perusahaan, menggantikan penggunaan Premium. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah sejak tahun 2012 yang mengharuskan kendaraan operasional semua badan usaha milik negara (BUMN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Upaya penghematan konsumsi BBM kendaraan operasional dilakukan dengan membatasi usia pakai kendaraan operasional dan melakukan pemeliharaan berkala, agar konsumsi BBM-nya lebih efisien. Selain itu, BRI juga mewajibkan setiap kendaraan menggunakan jenis BBM pertamax yang lebih ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka kenaikan volume konsumsi BBM kendaraan operasional Kantor Pusat dapat dikendalikan, yakni menjadi sebesar 262,26 kiloliter di tahun 2019, atau

hanya naik 13,8% dari 230,51 kiloliter di tahun 2018.

- **Penggunaan Sumber Energi Baru Terbarukan**

BRI juga berupaya mengoptimalkan penggunaan listrik dari sumber energi baru terbarukan. Operasional mesin ATM BRI di beberapa daerah telah dilengkapi perangkat sel surya sebagai pembangkit listrik. Hingga akhir tahun 2019, unit ATM yang dilengkapi perangkat sel surya telah mencapai 20 unit, dan berlokasi beberapa kota besar tanah air yang intensitas sinar matahari cukup memadai, yakni di Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Denpasar, Makassar, Manado dan Jayapura.

- **Pengelolaan Emisi**

BRI juga turut berpartisipasi mengendalikan emisi karbondioksida (Gas Rumah Kaca/GRK), yakni salah satu gas buang dari hasil penggunaan bahan bakar fosil (BBM, Batubara dan Gas) baik untuk kegiatan pembangkitan pusat tenaga listrik, maupun untuk kegiatan transportasi. Konsumsi listrik, BBM dan intensitas transportasi perjalanan dinas menghasilkan emisi GRK dengan jumlah volume yang berbanding lurus dengan besaran konsumsi dimaksud. Oleh karenanya pendekatan pengelolaan emisi GRK, sama dengan pendekatan yang dilakukan dalam mengelola konsumsi energi tersebut.

Dalam mengelola emisi GRK, BRI menjalankan kebijakan penghematan konsumsi listrik, efisiensi penggunaan kendaraan operasional dan pengelolaan intensitas perjalanan dinas.

Melalui pengembangan sistem komunikasi dan telekomunikasi berbasis teknologi digital via BRISat, Bank berupaya mengurangi intensitas perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dengan kantor-kantor Wilayah maupun Kantor Cabang. Rapat seperti ini, kini digantikan dengan sistem Teleconference. Perjalanan dinas kini diprioritaskan hanya dalam rangka kunjungan kepada calon nasabah atau dalam rangka site visit kepada nasabah

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

eksisting sebagai langkah pengawasan atas kinerja bisnis mereka.

Melalui pendekatan tersebut, intensitas perjalanan dinas berhasil dikelola, dari sejumlah 221.222 *business trip* di tahun 2018, menjadi sebesar 473.228 *business trip* di tahun 2019.

Inisiatif pengelolaan emisi lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan sumber energi baru terbarukan, seperti telah diterapkan pada fasilitas beberapa ATM di beberapa kota besar, seperti telah disinggung sebelumnya.

- **Paperless System**

BRI berkomitmen meningkatkan efisiensi operasional melalui penghematan pemakaian kertas tentunya dengan dukungan sistem teknologi yang selalu dikembangkan oleh BRI. Sistem Informasi yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan internal BRI dan Nasabah dengan ditunjang aplikasi-aplikasi yang secara implementasi sangat menunjang efisiensi operasional. Berbagai aplikasi *paperless* yang telah

diterapkan untuk nasabah BRI adalah:

1. *e-tax*, aplikasi pelaporan pajak bagi nasabah. BRI yang pertama di Indonesia;
2. *e-Form*, formless untuk pelayanan Frontliner di Unit Kerja BRI;
3. *e-statement*, memberikan informasi melalui email yang didaftarkan;
4. New account swap untuk membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro, tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;
5. ATM 'tanpa bukti cetak' (printreceipt);
6. BRISPOT, merupakan aplikasi menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinkan putusan pinjaman mikro untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan paperless;
7. MY BRI, merupakan aplikasi yang menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinkan putusan pinjaman konsumen untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan paperless.

Berbagai inisiatif kegiatan operasional berbasis paperless tersebut membuat konsumsi kertas BRI terus menurun, seperti tampak pada tabel berikut.

Keterangan	2019	2018	2017
Volume Pemakaian kertas (Rim)	11.877	13.641	30.800



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

Digitalisasi Proses – Penunjang Efisiensi Operasional BRI

Beragam aplikasi berbasis teknologi digital kini telah dikembangkan, sebagai berikut.

1. Intranet dan internet terhubung real untuk yang memungkinkan komunikasi secara real time.
2. Presensi pekerja BRI dilakukan dengan EDC.
3. Aplikasi terintegrasi BRISTARS yang mengimplementasikan efisiensi operasional, terdiri dari aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
 - a. e-Rekrutmen, sarana bagi para calon tenaga kerja yang ingin bergabung dengan BRI, melalui lamaran secara online.
 - b. Digitalisasi Assessment, penilaian kompetensi pekerja dilakukan secara online..
 - c. e-Mutasi, perpindahan pekerja antar unit kerja BRI yang diproses secara otomatis.
 - d. Data pribadi pekerja aplikasi data pribadi secara otomatis.
 - e. e-Cuti, untuk pekerja mengajukan permohonan pelaksanaan cuti serta proses persetujuan oleh atasan secara online.
 - f. e-SPJ, dimana pengajuan perjalanan dinas pekerja BRI tidak lagi menggunakan kertas namun menggunakan aplikasi untuk dokumentasi dan persetujuan pemutus.
 - g. e-Fasilitas Pinjaman Pekerja, untuk mengajukan permohonan fasilitas pinjaman secara online.
 - h. e-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, untuk mengajukan penggantian klaim biaya pengobatan dan proses penggantian secara online.
 - i. e-Lembur, untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja Lembur secara online dan pembayaran upah lembur secara otomatis.
4. BRIHC (BRI Human Capital), untuk mengelola proses bisnis SDM.
5. SMK (Sistem Manajemen Kinerja) online untuk monitoring kinerja pekerja.
6. Portal Hubungan Industrial, untuk monitoring pelanggaran disiplin pekerja.
7. e-Pensiun, untuk informasi benefit yang diperoleh untuk masa pensiun normal.
8. e-Corporate Culture, untuk monitoring implementasi budaya kerja pekerja BRI.
9. Konsultasi dan Informasi SDM, untuk informasi terkini mengenai SDM.
10. e-Filing, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai wajib pajak.
11. Digital Office, untuk efisiensi dan efektivitas surat menyurat internal.
12. Survey Online, survei kepuasan pelanggan dengan responden pekerja/unit kerja BRI.
13. BRISMILE (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik), yang terdiri dari Modul Pengadaan Aktiva Tetap, Modul Pengelolaan Aktiva Tetap, dan Modul Anggaran.
14. BRIPEDIA, merupakan aplikasi tentang ensiklopedia kebijakan dan prosedur BRI.
15. Portal inovasi, aplikasi sebagai wadah ide dan inovasi bagi Pekerja BRI.
16. BRISmart, aplikasi e-learning management system untuk Pekerja BRI.
17. BRIShare, aplikasi knowledge management system bagi Pekerja BRI.
18. BRISPOT, aplikasi credit approval system untuk kredit mikro.

• Pengelolaan Dampak Lingkungan Lainnya.

BRI juga menjalankan berbagai inisiatif lainnya sebagai wujud dukungan Bank dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Pengelolaan limbah padat bekerja sama dengan perusahaan berizin;
2. Pemakaian alat pemadam api ringan (APAR) berbahan yang ramah lingkungan;
3. Mengganti freon mengandung chlorofluorocarbon (CFC), dengan freon jenis halotron.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bank BRI berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak pekerjaanya, mengelola dan mengembangkan kompetensi mereka dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.



KOMITMEN

Bank senantiasa memastikan bahwa setiap pekerja memiliki peluang dan kesempatan yang sama baik dari sisi peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir maupun pengupahan. Bank juga berkomitmen untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan nyaman, yang membuat seluruh pekerja termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa memperbaiki kualitas pengelolaan human capital, BRI secara berkala menyelenggarakan survei keterikatan karyawan (EES – *Employee Engagement Survey*) guna mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan pengelolaan.

Kebijakan dan Strategi Penerapan

Kebijakan dasar yang diterapkan mencakup pemberian kesempatan yang setara, anti diskriminasi baik secara gender maupun suku serta keyakinan bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan diri, mendapatkan karir dan jabatan terbaik dan menerima imbal jasa sesuai

kinerja yang dihasilkan. Sementara strategi penerapan pemenuhan tanggung jawab terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan mengacu pada pelaksanaan kesepakatan kerja antara Bank dengan perwakilan pekerja dalam Serikat Pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

BRI secara rutin melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dengan maksimum perpanjangan selama satu tahun. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode tahun 2019-2021. PKB BRI telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain implementasi PKB, Bank menyusun dan memberlakukan kebijakan-kebijakan internal sebagai



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

pelengkap dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, meliputi:

1. Pengembangan Karir;
2. Kompensasi dan Benefit;
3. Manajemen Kinerja; dan
4. Hubungan Industrial.

Untuk memastikan butir-butir kesepakatan dalam PKB maupun kebijakan internal tersebut diterapkan dengan tepat dan optimal, pengelolaan human capital dijalankan dalam satu Kerangka Pengelolaan Human Capital yang menyatukan tiga unsur utama dalam pengelolaan HC, yakni Human Capital, Pengembangan Budaya dan Organisasi, seperti telah disampaikan pada pembahasan "Pengelolaan HC".

Selanjutnya Bank menetapkan pengelolaan dan pengembangan HC dibawah Direktur Human Capital dan Direktur Manajemen Risiko, meliputi Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital, Divisi Operasional Human Capital, Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak dan Outsourcing, BRI Corporate University dan Divisi Manajemen Risiko Operational & Pasar.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari:

- Pelaksanaan program ketenagakerjaan (implementasi kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, kesetaraan dalam

mengikuti program pendidikan dan pelatihan maupun dalam mendapatkan remunerasi yang *fair*, kebebasan berserikat, mekanisme pengaduan dan program pensiun.

- Program pemberian fasilitas kesehatan (Club Fitness, Klub Olahraga dan pemberian Asuransi BPJS), dan
- Program keselamatan kerja (inspeksi/pemeriksaan berkala terhadap APAR dan pelatihan kondisi darurat).

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Lebih lanjut implementasi dari kebijakan dan lingkup di atas dijelaskan melalui uraian berikut:

Kesetaraan Gender

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank menjamin tidak terdapat diskriminasi dalam hal gender, suku, agama, serta ras. Pekerja tetap wanita boleh menanggung keluarga tanpa syarat apapun. Kesempatan kerja dan pengembangan karir dilakukan dengan memerhatikan kompetensi setiap individu melalui metode yang terukur.

Komitmen ini dapat dilihat dari perbandingan pekerja wanita dan pria di BRI, yang menunjukkan angka sebesar 42,92% wanita (2018: 42,98%) dan 57,08% pria (2018: 57,01%) dari total 91.620 pekerja (2018: 89.943 pekerja).

BRI juga menunjukkan kesempatan berkarya yang sama untuk realisasi rekrutmen pegawai penyandang difabel dengan perbandingan pekerja wanita dan pria yang relatif berimbang, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Jenis Kelamin	2018		2019	
	Orang	%	Orang	%
Wanita	40	42,11%	33	50,00%
Pria	55	57,89%	33	50,00%
Total Pekerja Difabel	95		66	

Selanjutnya, terkait dengan pemberdayaan potensi pekerja lokal, Bank juga memberikan kesempatan yang sama untuk dapat bergabung dan memberikan kontribusi kepada BRI. Hal ini ditegaskan dalam kebijakan rekrutmen yang menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen di suatu daerah, jika terdapat hasil penilaian yang setara, maka calon dari wilayah sekitar lebih dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan berkarya di BRI.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kesempatan Pengembangan Diri

Bank memberi kesempatan setara kepada seluruh pekerja, baik pria maupun wanita untuk mengikuti program pengembangan dan pelatihan serta untuk diberi kesempatan berkarir mencapai jenjang jabatan yang semakin tinggi, sesuai dengan kompetensi dan hasil kinerjanya.

Sejak 2016 BRI mengimplementasikan *Blended Learning*, yaitu metode pendidikan dengan perpaduan *in-class learning* secara tatap muka langsung dan *e-learning*. Bank telah menyelenggarakan berbagai program training dengan realisasi jumlah peserta pendidikan pada periode Januari – Desember 2019 sejumlah 4.231.199 peserta (2018: 2.803.224 peserta).

Remunerasi dan Benefit

Bank BRI memberikan kompensasi secara adil, kompetitif, serta memperhatikan strategi dan perkembangan bisnis. Struktur pengupahan BRI dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan kompetensi pekerja dan bobot jabatannya, tanpa membedakan gender. Kompensasi kepada pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompensasi yang bersifat tetap terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan, serta kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.

Bank menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula. Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.

BRI senantiasa memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah Perusahaan. Penambahan jumlah pekerja dan pemenuhan kompensasi dan benefitnya berdampak pada peningkatan alokasi dana bagi pekerja. Namun demikian, BRI memandang alokasi yang juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pekerja secara komprehensif ini merupakan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan kebijakan penetapan imbal jasa tersebut, maka sesuai dengan perkembangan skala usaha dan selaras dengan bertambahnya jumlah karyawan, biaya pengelolaan ketenagakerjaan BRI setiap tahun meningkat secara proporsional, sebagai berikut.

Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan

Komponen	Angka Bank Saja (Rp Juta)			
	2016	2017	2018	2019
Gaji, Upah, dan Tunjangan	8.542.413	9.096.616	10.590.613	14.061.266
Bonus, Insentif, dan Tantiem	5.816.691	6.234.168	5.874.193	5.926.232
Pendidikan dan Pengembangan	578.568	534.097	603.053	697.354
Tunjangan Kesehatan	358.918	371.686	397.009	444.399
Jaminan Jamsostek	522.249	606.823	678.206	758.300
Pemutusan Hubungan Kerja (Biaya Pesangon - Pekerja Tetap)	153.281	304.976	309.403	310.478
Pensiun Iuran Pasti	231.105	256.675	291.569	325.460
Cuti Besar	308.429	289.150	442.565	538.594
Pensiun Imbalan Pasti	513.384	457.552	744.509	432.692
Penghargaan Tanda Jasa	150.349	155.894	129.291	267.737
Biaya Lainnya	472.964	508.695	1.157.543	748.286
Total	17.648.351	18.816.332	21.217.954	24.510.799



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Employee Engagement

Setiap tahun BRI menyelenggarakan survei keterikatan Pekerja yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan Pekerja terhadap Perusahaan. Untuk menjaga independensi dan menghindari *conflict of interest*, survei keterikatan Pekerja di BRI dilaksanakan oleh Unit Kerja di luar Direktorat Human Capital yang membidangi riset korporasi.

Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam menganalisis engagement Pekerja adalah Aon Hewitt Engagement Model. Pendekatan ini mencoba melihat pengaruh dari *engagement drivers*, yang merupakan area di mana manajemen dapat melakukan kontrol dan tindakan, dalam memengaruhi keterikatan Pekerja. Adapun *engagement drivers* yang digunakan dalam survey ini di antaranya adalah:

1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Komunikasi
3. Kepemimpinan
4. Kerja Tim
5. Keseimbangan Kerja dan Pribadi
6. Kesempatan Berkembang
7. Kompensasi
8. Kondisi Tempat Kerja dan Sumber Daya

Employee Survey tahun 2019 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 78,2% Pekerja menyatakan terikat dengan Perusahaan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat dibandingkan *survey* tahun 2018 sebesar 76%. Sedangkan untuk tingkat *satisfaction* di tahun 2019, 97% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI.

Kepuasan Pekerja BRI terhadap pengelolaan *human capital* salah satunya tercermin dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2019, tingkat *turnover* Pekerja BRI tercatat sebesar 2,29%, nilai ini masih lebih rendah dari tingkat *turnover* Pekerja di industri yang mencapai 7%.

Kebebasan Berserikat

Bank memberi kebebasan kepada para karyawannya untuk berkumpul dan berserikat serta membentuk Serikat Pekerja yang kemudian bertindak sebagai perwakilan dari seluruh pegawai dalam menetapkan kesepakatan kerja sama yang saling menghormati demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Bank senantiasa melibatkan Serikat Pegawai secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia melalui kegiatan *co-creation*. Bank juga memfasilitasi kegiatan forum kemitraan sebagai sarana bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada manajemen BRI.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Bank senantiasa berupaya menangani pengaduan dari para pekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini merupakan bentuk penegasan komitmen BRI dalam menjaga keharmonisan hubungan antara Manajemen dengan seluruh Pekerja. Penegasan komitmen Manajemen terhadap penanganan komplain Pekerja tersebut diwujudkan melalui penerbitan kebijakan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS). WBS sendiri merupakan alat monitoring dan pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja melalui pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), surat tertulis, ataupun melalui elektronik form di website yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama BRI dan dikelola langsung oleh Top Management Perusahaan.

Selain melalui WBS, BRI pun memiliki saluran komunikasi *Call Center* SDM untuk penanganan komplain Pekerja di bidang SDM. Melalui *Call Center* SDM, pekerja dapat menyampaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan terkait pekerjaan maupun permasalahan pribadi yang membawa dampak secara langsung terhadap pekerjaan. Kedua sarana dan fasilitas komunikasi tersebut menunjukkan komitmen kuat BRI dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Perusahaan dan pekerja.

Program Pensiun

BRI juga memberi perhatian bagi kesejahteraan para pekerja pasca purna bakti. Sebagai wujud komitmen ini, BRI mengikutsertakan para pekerjanya pada program pensiun, dengan pilihan skema manfaat pasti dan iuran pasti. Selain itu Bank juga menyelenggarakan program persiapan pensiun dengan mayoritas kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan dengan mengundang para pekerja purna bakti yang telah berhasil membuka usaha secara mandiri.

Dampak Kegiatan Ketenagakerjaan

Dampak pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni rendahnya tingkat *turnover*, tingginya tingkat *employee engagement* pekerja dan meningkatnya produktivitas per pekerja.

Pada tahun 2019, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp556,16 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian EPE tahun 2018 yang sebesar Rp518,81 Juta/ Pekerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Bank BRI memahami bahwa lingkungan kerja menjadi faktor penting bagi kenyamanan karyawan dalam bekerja serta bagi seluruh stakeholder. Oleh karena itu, Bank BRI selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu risiko operasional yang penting dikelola oleh perusahaan. BRI memiliki strategi dan upaya untuk selalu mengutamakan keselamatan jiwa pekerja serta stakeholders BRI baik dalam kondisi normal maupun bencana. Strategi tersebut tertuang di dalam beberapa ketentuan antara lain:

1. Kebijakan *Business Continuity Management*
2. Panduan *Emergency Response Plan*
3. Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja

Upaya upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa pekerja dan stakeholders BRI antara lain:

1. Internalisasi Budaya Tanggap Darurat pada pekerja
2. Mengkomunikasikan prosedur tanggap darurat pada stakeholders yg berada di lingkungan BRI
3. Menyediakan peralatan tanggap darurat
4. Menyediakan perlengkapan medis di lingkungan tempat kerja
5. Melakukan simulasi tanggap darurat secara berkala
6. Melakukan identifikasi risiko bencana di lingkungan kerja BRI

Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja di BRI Di Area Bisnis (*Business Area*)

Di Area Bisnis (<i>Business Area</i>)	Di Luar Area Bisnis (<i>Non Business Area</i>)
Gedung bertingkat, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), maupun unit kerja mobile berbasis e-channel	Lokasi peninjauan pembangunan proyek dan kegiatan kunjungan nasabah
Pelaksanaan K3 difasilitasi kebijakan pengelolaan gedung	Pelaksanaan K3 difasilitasi pengelola proyek
Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala	Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti safety induction
Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran	Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal accident dan program Jaminan Kecelakaan Kerja



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Di Area Bisnis (<i>Business Area</i>)	Di Luar Area Bisnis (<i>Non Business Area</i>)
Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung	-
Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung Oksigen (O2), kotak obat P3K, perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (<i>exit window</i>)	-
Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diikuti oleh pekerja, sekuriti, dan pengelola gedung	-
Penyediaan dua mobil ambulans di kantor pusat dan bekerja sama dengan BRI Medika (Anak perusahaan Dapen BRI)	-

Fasilitas *General Medical Check Up (GMCU)* dan Santunan

BRI memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawan, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk mengobati karyawan yang sakit. BRI juga memberikan fasilitas GMCU dan fasilitas jaminan kesehatan. Kepada pekerja yang menderita cacat ringan, BRI menempatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan.

BRI memberikan fasilitas asuransi jiwa dan *personal accident* bagi seluruh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, dengan manfaat meninggal dunia atau cacat.

Dalam hal terdapat pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud, maka fasilitas tersebut diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



Sepanjang tahun 2019, Bank BRI telah menyalurkan dana untuk Program BRI Peduli sebesar Rp 226,58 miliar atau meningkat sebesar 38,47% dari tahun 2018 sebesar Rp163,63 miliar.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Tanggung jawab sosial Bank BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Program Bina Lingkungan (BL) yang disebut dengan Program BRI Peduli. Tanggung jawab sosial ini merupakan komitmen Bank BRI untuk berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diselaraskan dengan kegiatan operasional bisnis perusahaan.

Program BRI Peduli merupakan implementasi dari Surat Edaran NOSE. S.12–DIR/SKP/01/2018, tanggal 31 Januari 2018, perihal Pelaksanaan Program BRI Peduli Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir yakni Peraturan Menteri BUMN No Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.

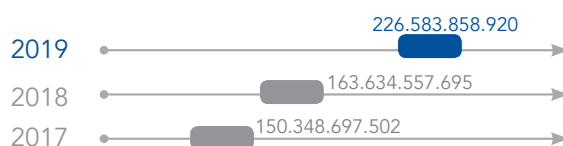
Kegiatan BRI Peduli juga mengacu pada konsep 3P (*People, Planet, Profit*) yang merupakan pilar utama dalam membangun bisnis berkelanjutan. *People* dalam konsep ini dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *Planet* merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan keragaman hayati, dan *Profit* dapat diartikan sebagai kegiatan perusahaan untuk terus dapat meningkatkan keuntungan dari operasional bisnis perusahaan yang terus berkembang. Bank BRI mengimplementasikan ketiga konsep tersebut kedalam 7 (tujuh) sektor bantuan BRI Peduli yaitu :



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Penyaluran Program BRI Peduli

Periode 2017-2019

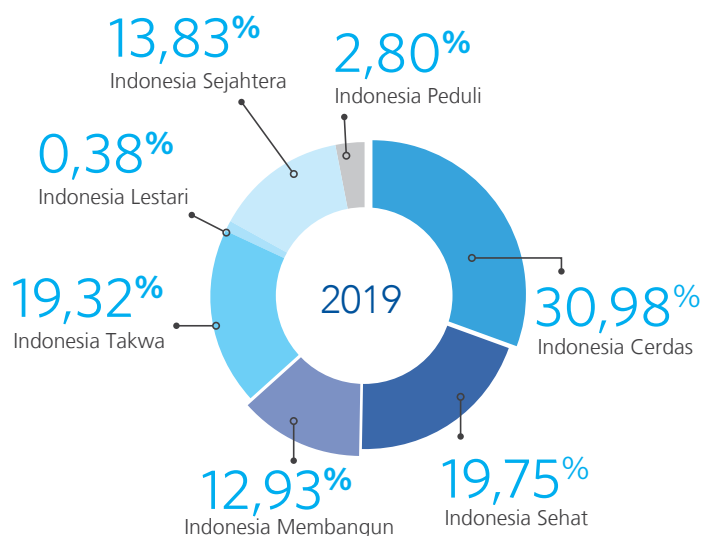


ANGGARAN PROGRAM BRI PEDULI TAHUN 2019

Pada tahun 2019, realisasi Program BRI Peduli mencapai sebesar Rp 226,58 miliar untuk 7 (tujuh) sektor penyaluran. Adapun data penyaluran dana Program BRI Peduli selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Sektor	2017	%	2018	%	2019	%
Indonesia Peduli	2.394.042.761	1,59%	6.845.484.366	4,18%	6.336.123.862	2,80%
Indonesia Cerdas	32.990.028.609	21,94%	53.087.712.848	32,44%	70.191.707.124	30,98%
Indonesia Sehat	21.596.164.343	14,36%	22.384.597.948	13,68%	44.759.761.982	19,75%
Indonesia Membangun	31.455.378.146	20,92%	22.895.422.555	13,99%	29.302.833.387	12,93%
Indonesia Takwa	29.095.446.575	19,35%	27.404.110.789	16,75%	43.785.086.953	19,32%
Indonesia Lestari	723.303.800	0,48%	722.965.000	0,44%	866.344.000	0,38%
Indonesia Sejahtera	32.094.333.268	21,35%	30.294.264.189	18,51%	31.342.001.612	13,83%
Total	150.348.697.502	100,00%	163.634.557.695	100,00%	226.583.858.920	100,00%

Realisasi Program BRI Peduli Tahun 2019





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Penghargaan Program BRI Peduli Tahun 2019

Selama tahun 2019, sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan BRI Peduli yang telah dijalankan, Bank BRI kembali mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Penghargaan tersebut yaitu :

1. Asiamoney 2019 – Best Bank For CSR In Indonesia
2. La Tofi School of CSR, Nusantara CSR Award 2019 – Kategori Peningkatan Mutu Pendidikan
3. La Tofi School of CSR, Nusantara CSR Award 2019 – Kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas
4. La Tofi School of CSR, Nusantara CSR Award 2019 – Kategori Pengembangan Desa Wisata
5. La Tofi School of CSR, Nusantara CSR Award 2019 – Kategori Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
6. La Tofi School of CSR, Nusantara CSR Award 2019 – Kategori Peningkatan Mutu Kesehatan



PROGRAM BRI PEDULI 2019

Sepanjang tahun 2019, Bank BRI telah melaksanakan berbagai kegiatan Program BRI Peduli yang meliputi:

A. INDONESIA PEDULI

Pada tahun 2019, beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bank BRI turut membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan terkait bencana alam sebesar Rp 6,34 miliar berupa bantuan sembako, selimut, obat-obatan, air bersih, dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana lainnya. Adapun beberapa kegiatan untuk Program BRI Peduli terkait tanggap darurat bencana tersebut antara lain sebagai berikut:



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Masyarakat

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Bantuan Korban Bencana Banjir	Bangkinang, Bantul, Bukittinggi, Curup, Kendari, Madiun, Makassar, Manna, Maros, Medan, Melawi, Merauke, Ngawi, Padang, Palopo, Pangkep, Ponorogo, Purworejo, Samarinda, Semarang, Sengkang, Solok, Sungguminasa, Teluk Betung, Pangakalan Kerinci, Teluk Kuantan, Arga Makmur, Pasir Pangaraian	1.005.200.370
2	Bantuan Korban Gempa Bumi	Masohi dan Ternate	389.730.000
3	Bantuan Korban Bencana Kekeringan	Bandung, Cilacap, Pacitan, Pemalang, Praya, Temanggung, Trenggalek	193.400.000
4	Bantuan Korban Tanah Longsor	Balige, Cibadak, Gombong, Sukabumi	119.050.000
5	Bantuan Korban Angin Puting Beliung	Cirebon, Pemalang	75.000.000



B. INDONESIA CERDAS

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, Bank BRI turut berperan dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Selama tahun 2019 Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 70,19 miliar melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Program Beasiswa

Bank BRI memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa/pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu melalui kerjasama dengan berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Pemberian beasiswa tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan prestasi terutama bagi generasi muda Indonesia.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
1	Beasiswa untuk Perguruan Tinggi	- Universitas Muhammadiyah Sukabumi - Beasiswa Kerjasama Yakespen - Universitas Terbuka - Universitas Ganesha Singaraja	8.270.000.000	1.720
2	Beasiswa pendidikan untuk siswa/ siswi Sekolah Menengah Atas/ sederajat	- Sekolah di Solo, Purwodadi, Semarang	3.852.000.000	268
3	Beasiswa Nusantara Cerdas Angkatan 4 Bekerja sama dengan Kemendikbud (Program lanjutan 2017)	- Universitas Syah Kuala - Universitas Mataram - Universitas Hasanuddin - Universitas Tanjung Pura - Universitas Mulawarman	912.100.000	25
4	Beasiswa Jurnalis Cerdas Angkatan 2 (Program Lanjutan 2017)	Jabodetabek	538.270.000	23

2. Bantuan sarana & prasarana pendidikan

Salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Bank BRI turut berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik dengan memberikan bantuan berupa pembangunan atau renovasi lembaga pendidikan, pembuatan laboratorium, taman baca, perpustakaan keliling, kendaraan penunjang pendidikan, dan sarana pendukung pendidikan lainnya. Beberapa bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah disalurkan antara lain sebagai berikut:



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Bantuan Pembangunan dan atau perbaikan gedung sekolah, pondok pesantren dan institusi pendidikan lainnya	- Universitas Brawijaya Malang - Kampus 2 IAIN samarinda - Sekolah Menengah Kejuruan PU - SMA LP Ma'arif Garut - SMK Ma'arif Garut - SMK Annuriyyah Gresik - SMA IT Darul Hikmah Pasaman Barat - SMP IT Mutiara Pariaman - SMPN 3 Ceper Klaten - SMPN 10 Langsa - Madrasah Tsanawiyah Persatuan Umat Islam (PUI) Almu Maniyah Garut - SD Angkasa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru - SDN Petunjunan 04 Brebes - SDN Kertasari IV Karawang - SDN Kertasari II Karawang - SDN Bantarsari Subang - SD Kemala Bhayangkari 5 Slog Jakarta - Ponpes Luhur Al Tsaqafah Jagakarsa - Ponpes Cipasung Singaparna - Ponpes Dzikrul Ghoflin Al-Hasyimiyyah Tegal - Pondok Pesantren Nuurudaaroin Tegal - Ponpes Nurul Hidayah Ciamis - Ponpes Miftahul Hidayah Garut	6.039.183.941
2	Bantuan pemberian perlengkapan pendidikan, seperti pengadaan peralatan laboratorium, buku literatur, alat multimedia, komputer, dan komponen pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya	- Universitas Yapis Papua - Universitas Mathlaul Anwar Banten - Universitas Dharmas Indonesia - Universitas Asahan - Institut Teknologi Bandung - SMA N 3 Tondano - SMAK Santo Aloysius Palangkaraya - SDN Pulau Messah - MI Nashirul Ummah Tuban - SMP Negeri 2 Ungaran - MTs Nurul Jannah	3.103.885.152
3	Bantuan kendaraan Penunjang Pendidikan (Bus/ Mobil)	- Universitas Lampung - Universitas Langlangbuana Bandung - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan - Universitas Muhammadiyah Purwokerto - Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kerinci - UIN Antasari Banjarmasin - Politeknik Negeri Bandung	3.298.795.000



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
4	Pembangunan Perpustakaan/ Mobil Perpustakaan dan Taman Bacaan	- Mobil Perpustakaan Keliling Pemerintah Daerah Banggai Laut, Sulawesi Tengah - Mobil Perpustakaan Keliling Polres Barito Kuala Banjarmasin - MTs Mambaul Hisan Tlogodepok, Kebumen	700.950.000

3. Bantuan Sarana & Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB)

Program ini merupakan bantuan kepada Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) dalam bentuk pembangunan/renovasi dan bantuan sarana pendukung pendidikan. Kegiatan dilakukan di 19 Kantor Wilayah BRI dengan total 57 SLB. Bantuan tersebut antara lain sebagai berikut:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
1	Bantuan sarana & Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB)	Pelaksanaan di 19 Kantor Wilayah BRI yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	5.700.000.000	57 SLB

4. Sadar Bahaya Narkoba

Program ini merupakan kegiatan sosialisasi anti narkoba yang dilakukan di 19 Kantor Wilayah BRI bekerja sama dengan BNN setempat. Jumlah peserta per Kantor Wilayah BRI adalah sebanyak 100 orang yang terdiri dari perwakilan Ketua OSIS dan guru dari 50 sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Peserta
1	Sosialisasi Sadar Bahaya Narkoba Bersama BRI	1900 Siswa dan Guru dari 950 Sekolah di 19 Kantor Wilayah BRI yaitu Kanwil Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	2.785.400.000	1900 Siswa dan Guru dari 950 Sekolah



C. INDONESIA SEHAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dana yang disalurkan untuk program ini mencapai Rp 44,76 miliar. Beberapa bantuan yang disalurkan antara lain:

1. Bantuan sarana penunjang kesehatan
 Bantuan ini berupa mobil ambulance dan peralatan penunjang kesehatan lainnya yang diserahkan kepada Instansi Pemerintah seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI, Polri, Rumah Sakit, yayasan dan instansi lainnya.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

No	Jenis Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
1	Bantuan 104 Mobil Ambulance	Ajibarang, Amuntai, Balikpapan, Bandung, Bangkalan, Banjarmasin, Banyumas, Banyuwangi, Barabai, Batam, Bekasi, Blitar, Bogor, Buleleng, Cepu, Cilacap, Cirebon, Demak, Depok, Gianyar, Gombong, Hulu Sungai Utara, Jakarta, Jember, Kalimantan Utara, Kotawaringin Timur, Kuala Kapuas, Kutai Timur, Lhokseumawe, Lubuk Linggau, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Martapura, Medan, Nabire, Nganjuk, Ogan Ilir, Oku Timur, Padang, Palembang, Pamekasan, Pangkal Pinang, Pangkalan Bun, Pasuruan, Payakumbuh, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Putussibau, Rejanglebong, Rembang, Salatiga, Sampit, Singaraja, Situbondo, Slawi, Subang, Sumbawa Barat Daya, Sumedang, Surabaya, Tanah Bumbu, Tangerang, Tabanan, Tapaktuan, Tarakan, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Wamena	29.194.648.125	104 Rumah Sakit/TNI/ POLRI/PEMDA/ Instansi/ Lembaga Lainnya
2	Bantuan Alat Penunjang Kesehatan	- Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo - Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung	921.197.400	2 Rumah Sakit
3	Pembangunan/ Renovasi Sarana Penunjang Kesehatan	- Rumah Bersalin Kartika Bunda Yonif Raider 323 Banjar - Klinik Utama PKU Aisyiyah Jepara - Posyandu di RW 02 Darmasuka Subang - Posyandu di Perumahan Griya Chantika Permai, Kampar, Riau - Posyandu dan Posbindu di Harum Sari RW.05, Tangkerang Selatan, Pekanbaru	360.000.000	5 Rumah Sakit/Klinik/ Posyandu



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

2. Layanan Kesehatan Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan rumah sakit/klinik/penyedia layanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk khitanan massal, operasi bibir sumbing, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan secara gratis.

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Operasi Celah Bibir, Khitanan Massal, Donor Darah	Bengkulu, Blitar, Cikampek, Curup, Denpasar, Duri, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Kediri, Lamongan, Langsa, Malang, Mataram, Palangkaraya, Probolinggo, Singaraja, Solo, Ternate, Pangkalan Bun, Tanjung Pandan, Pangkal Pinang	1.565.936.875

D. INDONESIA MEMBANGUN

Bantuan BRI Peduli pada sektor ini ditujukan untuk pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan fasilitas umum seperti balai warga, balai adat, jalan desa, jembatan, dan lain-lain. Pada tahun 2019, Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 29,30 miliar untuk program ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pembangunan/Perbaikan Jalan dan Jembatan beserta sarana pendukung	Banyuasin, Bondowoso, Brebes, Cianjur, Cilacap, Jember, Klaten, Langsa, Palembang, Prabumulih, Sragen, Subang, Sukabumi, Tembilahan, Wonogiri, Wonosari, Indragiri Hilir, Pangkalan Kerinci	5.244.421.640
2	Pembangunan dan perbaikan Pasar, Posko Keamanan, Balai warga, Panggung Terbuka, Sarana Olahraga, Gapura, Rabat Beton, Tembok Penahan Tanah, Talud, Pemagaran Makam, Mesin Genset, Sarana Penunjang Wisata, Landmark Alun-Alun	Amlapura, Banyuasin, Batang, Bogor, Cikarang, Cilacap, Denpasar, Jakarta, Klaten, Kuningan, Malang, Pandeglang, Ponorogo, Pringsewu, Probolinggo, Singaraja, Sragen, Subang, Sukabumi, Tembilahan, Wonogiri, Pondok Gede, Arga Makmur, Gunung Sitoli	3.371.149.725

E. INDONESIA TAKWA

Program BRI Peduli Indonesia Takwa dilaksanakan dalam bentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana ibadah, pembagian kitab suci, serta bantuan sarana pendukung ibadah lainnya. Adapun realisasi bantuan Program BRI Peduli Indonesia Takwa pada tahun 2019 mencapai Rp 43,78 miliar.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Jenis Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah	Banda Aceh, Tanjung Balai, Batu Bara, Rimbo Bujang, Pangkalan Bun, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Lubuk Linggau, Sungai Penuh, Tanjung Pinang, Tangerang Selatan, Kuantan Singingi, Abepura, Amlapura, Asahan, Asahan, Atambua, Bangkinang, Bangli, Bangli, Banjar, Bantul, Banyuasin, Batang, Batubara, Baturaja, Batusangkar, Bekasi, Bengkulu, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Brebes, Bukittinggi, Buleleng, Buntok, Cianjur, Cibinong, Cikampek, Cimahi, Ciputat, Demak, Denpasar, Depok, Dharmasraya, Dompu, Dumai, Gresik, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jepara, Joglo, Kampar, Karanganyar, Kebumen, Kefamenanu, Kisaran, Klaten, Klungkung, Kolaka, Kualasimpang, Lampung, Langsa, Larantuka, Lhoksumawe, Likupang, Lingga, Magetan, Makassar, Malang, Malang, Mamuju, Manado, Medan, Menpawah, Minahasa, Negara, Nganjuk, Padang, Padang, Palembang, Palembang, Palu, Pasuruan, Pekanbaru, Pekanbaru, Pelalawan, Poso, Pringsewu, Purbalingga, Purwokerto, Rangkasbitung, Rembang, Rembang, Renon, Sarolangun, Sekayu, Selong, Semarang, Serang, Serpong, Sigli, Singaraja, Sintang, Solok, Sorong, Sragen, Subang, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tabanan, Tabanan, Tahuna, Takengon, Tambun, Tangerang, Tasikmalaya, Tasikmalaya, Tegal, Tembilahan, Ternate, Toli-Toli, Trenggalek, Tuban, Yogyakarta	29.281.629.241
2	Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Ibadah	Banda Aceh, Teluk Betung, Indragiri Hulu, Tanjung Karang, Aceh, Ambon, Batang, Bukittinggi, Ciamis, Ciputat, Denpasar, Dompu, Jakarta, Jayapura, Karawang, Kediri, Lampung, Minahasa, Pekanbaru, Pringsewu, Serpong, Singaraja, Situbondo, Sunter, Tabanan, Tembilahan, Trenggalek	2.990.276.400



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan



F. INDONESIA LESTARI

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2019, jumlah bantuan yang disalurkan di sektor ini mencapai Rp866 juta. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	- Pohon Mangrove Pengabdian kepada Masyarakat STMA Trisakti - Bibit Pohon atau Tanaman Produktif di Godog, Bogor - Pot dan Tanaman Bunga untuk Taman Kota Magelang - Pemasangan Mooring Bouy di kawasan Laut Bali - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa Majasari, Kabupaten Subang - Bantuan motor roda tiga pengangkut sampah Ponpes Cipasung Kabupaten Tasikmalaya - Bantuan motor roda tiga pengangkut sampah Pemda Kabupaten Muara Enim, Palembang - Bantuan pembangunan taman rumah sakit umum St. Elisabeth Purwokerto	Jakarta, Bogor, Magelang, Bali, Subang, Tasikmalaya, Muara Enim, Purwokerto	866.344.000



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

G. INDONESIA SEJAHTERA



Program Indonesia Sejahtera adalah terkait dengan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selama tahun 2019, Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 31,34 miliar untuk program ini. Adapun beberapa kegiatan Program Indonesia Sejahtera antara lain:

a) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Bank BRI turut mendukung upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha di sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting ekonomi Indonesia yang sekaligus merupakan sektor utama bisnis perusahaan. Kegiatan pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta bantuan peralatan usaha.

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pelatihan 10.000 Pengusaha UMKM	Pelatihan 10.000 UMKM di 19 Kantor Wilayah BRI yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	1.915.219.978
2	Pelatihan UMKM dalam rangka Program Rumah Kreatif BUMN	Pelatihan UMKM di 53 RKB yang tersebar di wilayah kerja Kantor Wilayah BRI Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Jakarta 1, Jakarta 3, Jayapura, Lampung, Makassar, Malang, Manado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta	2.000.000.000
3	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha	Bondowoso, Garut, Gresik, Lamongan, Lampung, Liwa, Lumajang, Majalengka, Palembang, Pringsewu, Singaraja, Sinjai, Subang, Waingapu, Yogyakarta	1.357.526.050
4	Bantuan Pengadaan 50 Unit Gerobak dan Tenda Usaha	Poso, Sulawesi Tengah	332.750.000

- b) Bantuan sosial lainnya
Bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh Bank BRI dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pembagian sembako gratis dan santunan anak yatim	Pembagian Sembako Gratis dan santunan anak yatim di 19 Kantor Wilayah BRI yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura	13.004.893.990
2	Bantuan Bedah Rumah atau Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Ambon, Bangkinang, Brebes, Ciamis, Cilegon, Demak, Denpasar, Jakarta, Jayapura, Kuningan, Prabumulih, Purworejo, Putussibau, Solok, Sragen, Sumedang, Tasikmalaya, Tegal, Lubuk Sikaping	6.348.882.000
3	Sarana Air Bersih dan MCK	Bondowoso, Cirebon, Majalaya, Merauke, Subang, Tembilahan, Wamena, Wonogiri, Labuan Bajo	844.770.400



Realisasi Anggaran Program Bina Lingkungan BRI Peduli 2019

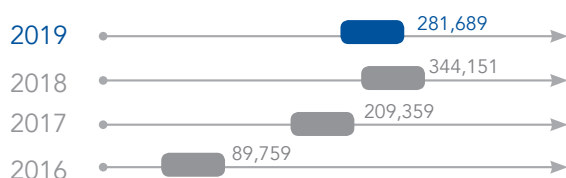
Pada tahun 2019, realisasi anggaran Program Bina Lingkungan BRI Peduli mencapai Rp. 226,58 M atau mengalami peningkatan sebesar 38,47% dari tahun 2018 sebesar Rp. 163,63 M. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,98% disalurkan untuk program bantuan pendidikan, 19,75% untuk program bantuan kesehatan, 19,32% untuk program bantuan sarana ibadah, 13,83% untuk bantuan sosial kemasyarakatan, 12,93% untuk bantuan perbaikan dan pembangunan sarana umum, 2,80% untuk bantuan bencana alam, dan 0,38% untuk bantuan pelestarian alam.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PROGRAM KEMITRAAN

Penyaluran Pinjaman Kemitraan



Penyaluran Pinjaman
Kemitraan mencapai
Rp281,689 miliar



Sebagai *Agent of Development*, BRI selalu berupaya dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung berbagai kalangan. Salah satu program yang dijalankan yaitu berpartisipasi aktif dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menggunakan dana Program Kemitraan (PK). Hal ini sebagai wujud atas pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN PER-02-MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam pelaksanaannya, BRI melakukan penyaluran Dana PK melalui dua skema, yakni:

- Pinjaman lunak
- Bantuan hibah pembinaan

Pinjaman yang disalurkan digunakan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Penyaluran pinjaman dilakukan oleh tenaga pemasar yang berada di unit kerja operasional BRI. Tujuannya membantu menumbuhkembangkan potensi perekonomian masyarakat sehingga mempunyai kemampuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang dimiliki dan ditekuni.

Sektor usaha yang menjadi sasaran penyaluran dana PK tersebar pada berbagai sektor, mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan jasa. Persyaratan umum untuk menjadi calon mitra binaan BRI, antara lain:

- Usaha milik warga negara Indonesia.
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Program Kemitraan

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar.
- Belum memenuhi persyaratan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
- Memiliki pengalaman usaha minimal 6 bulan.

Skema lain dalam penyaluran dana PK adalah bantuan hibah pembinaan. Yaitu untuk membantu mitra binaan meningkatkan kompetensi kewirausahaan, melalui pemberian pendidikan khusus kewirausahaan maupun pemasaran produk mitra binaan salah satunya melalui kegiatan pameran.

Oleh karena itu, penyaluran dana PK yang dilakukan melalui dua skema ini diharapkan dapat menjadikan usaha para Mitra Binaan terus berkembang dan pada akhirnya mampu menjelma menjadi usaha kecil maupun menengah, bahkan skala ekonomi besar sehingga memungkinkan untuk menjadi nasabah komersial BRI yang loyal dan dikenal karakternya sejak awal.

STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2019

Metode Penyaluran Program Kemitraan

Penyaluran dana PK ke calon mitra binaan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbankan yang terstruktur sebagaimana layaknya pemberian kredit bank. Pengenalan calon mitra binaan dilakukan dari berbagai aspek, meliputi pengenalan produk unggulan, proses kreatif yang dilakukan untuk menambah nilai produk, ketersediaan sekaligus kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mitra Binaan yang telah mendapatkan dana PK untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya juga akan memperoleh dana hibah program pembinaan. Hibah pembinaan diberikan berupa pendampingan dan pembinaan kewirausahaan dari BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk, tanpa biaya. Setelah melewati masa pembinaan dan pendampingan diharapkan para mitra binaan telah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengakses pembiayaan bank dengan skim komersial.

Hibah Pembinaan

Untuk mendukung dan memastikan tumbuh dan berkembangnya usaha mitra binaan, BRI juga memberikan dana hibah program pembinaan kemitraan yang ditujukan untuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan program lain yang dapat meningkatkan produktivitas maupun perkembangan usaha Mitra Binaan BRI.

Dengan dukungan dana tersebut, para Mitra Binaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis usaha, menambah wawasan dan ikut serta berpartisipasi dalam pameran-pameran untuk membuka pemasaran produknya. Beban pembinaan ini bersifat hibah yang besarnya maksimal 20% dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan dan hanya diberikan untuk kepentingan mitra binaan.

KINERJA PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, jumlah realisasi penyaluran dana PK untuk pemberdayaan ekonomi kecil sebesar Rp281,689 miliar. Dana pembinaan yang disalurkan kepada mitra binaan pada tahun 2019 sebesar Rp323 Juta.

Pada tahun 2019, BRI melakukan hibah dana PK kepada PT PNM sebesar Rp50 miliar. Hal ini didasari oleh Surat Kementerian BUMN No. S-198/D7.MBU/12/2018 tentang Penyaluran Dana PK Melalui BUMN Khusus. Dana yang dihibahkan kepada PT PNM, selanjutnya akan disalurkan melalui program MEKAAR, yaitu layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Melalui hibah ini, BRI memperoleh data calon penerima pinjaman yang potensial untuk menjadi nasabah komersial.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

Sektor Usaha	Realisasi 2016	%	Realisasi 2017	%	Realisasi 2018	%	2019	%
	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)		(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	
Industri	5,882	6.55%	7,060	3.37%	15,832	4.60%	12,299	4.37%
Perdagangan	59,167	65.92%	102,491	48.95%	217,970	63.34%	132,155	46.82%
Pertanian	3,645	4.06%	58,289	27.84%	11,680	3.39%	28,128	10.00%
Peternakan	9,269	10.33%	19,956	9.53%	34,479	10.02%	29,482	10.49%
Perkebunan	1,886	2.10%	4,085	1.95%	18,852	5.48%	20,221	7.19%
Perikanan	3,580	3.99%	3,876	1.85%	7,794	2.26%	13,980	4.97%
Jasa	6,329	7.05%	13,602	6.50%	33,929	9.86%	34,520	12.28%
Lainnya	-	0.00%	-	0.00%	3,615	1.05%	10,905	3.88%
Subtotal	89,758	100.00%	209,359	100.00%	344,151	100.00%	281,689	100%
Hibah kepada BUMN khusus							50,000	
Dana Pembinaan	-		0,198		0,323		0,323	
Total	89,758		209,557		344,474		332,012	

Seiring dengan meningkatnya penyaluran dana PK, realisasi dana hibah pembinaan kemitraan pada tahun 2019 mencapai Rp323 juta. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan dan promosi pemasaran produk mitra binaan melalui pameran yang diselenggarakan di berbagai tempat.

Kegiatan Pelatihan dan Pameran

No.	Tanggal	Kegiatan	Rp	Lokasi
1	28 - 29 Agustus 2019	Pelatihan Mitra Binaan Kw Malang	121.753.052	Malang
2	18 - 19 September 2019	Pelatihan Mitra Binaan Kw Manado	138.246.948	Manado
3	12 September 2019	Pelatihan Mitra Binaan KW Surabaya	7.030.500	Surabaya
4	16 - 20 Oktober 2019	Pameran Indonesia Trade Expo	5.550.415	Tangerang
5	9 - 13 Desember 2019	Pameran Hari Nusantara	50.000.000	Padang
		Total	322.580.915	

Mitra Binaan Naik Kelas

Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemberian Pinjaman Kemitraan adalah mampu menaik kelaskan mitra binaan. Indikator mitra binaan naik kelas dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penambahan tenaga kerja, perluasan pasar, peningkatan permintaan, peningkatan omset dan lainnya yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kebutuhan modal kerja.

Selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa trend mitra binaan naik kelas semakin meningkat. Tahun 2019 terdapat 488 mitra binaan yang migrasi dari Pinjaman Kemitraan ke skim pinjaman lain dengan plafond yang lebih besar. Mitra binaan naik kelas tahun 2019 meningkat 179% dari posisi tahun 2018 sebesar 272 mitra binaan.

Program Kemitraan

Mitra Binaan Naik Kelas

No.	Segmen	2017	2018	2019
1	Kredit Pangan	16	17	13
2	Kupedes	15	19	34
3	KUR Kecil	167	227	711
4	Ritel Komersial	5	9	0
Total Naik Kelas		203	272	758
Real Nasabah PK		3.070	5.470	4.476
Persentase Naik Kelas		6,61	4,97	11,93

Segmen pinjaman mitra binaan naik kelas didominasi oleh KUR Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas usaha mitra binaan semakin meningkat mengingat maksimal pemberian KUR Kecil sebesar Rp500 juta dari sebelumnya maksimal menikmati Pinjaman Kemitraan sebesar Rp75 juta.

PROGRAM LAINNYA

Bank BRI Untuk Indonesia

Keberadaan Divisi Bisnis Program dan Kemitraan BRI juga merupakan komitmen BRI dalam menyukseskan program pemerintah sebagai *agent of development*. Adapun program-program yang dilakukan, diantaranya:

Literasi dan Inklusi Keuangan

Kegiatan inklusi dan literasi keuangan adalah kegiatan berupa sosialisasi ataupun edukasi terkait pengenalan berwirausaha, pengembangan usaha, dan produk atau layanan perbankan BRI. Tujuan kegiatan tematik ini adalah untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas UMKM untuk naik kelas, dan UMKM diharapkan dapat lebih produktif, sehingga pada akhirnya dapat menunjang bisnis unit kerja Bank BRI. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- BRIncubator Tematik
- BRIncubator Reguler
- Kegiatan Tabungan BRI Simpanan Pelajar (SimPel)
- Enhancement Go Global

Adapun target sasaran kegiatan inklusi dan literasi keuangan adalah sebagai berikut:

- UMKM
- Pekerja dan keluarga migran (TKI/purna TKI)
- Petani atau para pelaku usaha komoditas unggulan di masing-masing wilayah

a. BRIncubator Tematik

Kegiatan BRIncubator Tematik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	BRIncubator Tematik	Peserta	Tempat	Pelaksanaan	Keterangan
1	Literasi keuangan peluang usaha bersama OJK	300	Kalibaru	25 Januari 2019	Bersama OJK
2	Bagaimana memilih biji kopi yang baik	50	Banyuwangi	20 Februari 2019	Desk IMR
3	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	120	Semarang	21 Februari 2019	Bersama Bekraf
4	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	150	Kendal	6 Maret 2019	Bersama Bekraf
5	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	120	Padang	6 Maret 2019	Bersama Bekraf
6	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	100	Tawangmangu	21 Maret 2019	Bersama Bekraf



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan

No.	BRIncubator Tematik	Peserta	Tempat	Pelaksanaan	Keterangan
7	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	100	Palangkaraya	28 Maret 2019	Bersama Bekraf
8	Santripreneur	150	Banyuwangi	30 Maret 2019	Desk IMR
9	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	100	Mataram	25 April 2019	Bersama Bekraf
10	Literasi keuangan peternak sapi	100	Padang	26 Juni 2019	Kanwil Padang
11	Penjualan ikan darat dan laut agar dapat skala ekspor	50	Sidoarjo	26 Juni 2019	Kanwil Surabaya
12	Literasi keuangan pelatihan umkm industri kreatif	50	Sidoarjo	27 Juni 2019	Bersama OJK
13	Temu bisnis industri kreatif bersama Bekraf	50	Manado	29 Juni 2019	Bersama Bekraf
14	Teknik menghasilkan sablon yang bagus	25	Surabaya	10 Juli 2019	Kanwil Surabaya
15	Literasi keuangan komunitas peternak sapi perah	150	Jombang	11 Juli 2019	Kanwil Surabaya
16	Kegiatan pelatihan untuk migran purna dan keluarganya	50	Surabaya	29 Juli 2019	Kanwil Malang
17	Literasi keuangan komunitas kopi	50	Kabangjahe	2 Agustus 2019	Kanwil Medan
18	Literasi keuangan komunitas petani jamur	50	Padang	5 Agustus 2019	Kanwil Padang
19	Pengolahan coklat menjadi minuman	50	Surabaya	7 Agustus 2019	Kanwil Surabaya
20	BRIncubator goes to UGM	85	Yogyakarta	6 Agustus 2019	Desk IMR
21	Literasi keuangan umkm kedai dan coffee house	195	Surabaya	9 Agustus 2019	Kanwil Surabaya
22	Literasi keuangan petani dan umkm kopi dlamayo	50	Gorontalo	21 Agustus 2019	Kanwil Manado
23	Literasi keuangan komunitas peternak sapi potong	50	Tuban	21 Agustus 2019	Kanwil Surabaya
24	Literasi keuangan komunitas petani gula aren	30	Rokan Hulu	5 September 2019	Kanwil Pekanbaru
25	Literasi keuangan komunitas pelaku usaha batik Bangkalan	150	Bangkalan	21 Oktober 2019	Kanwil Surabaya
26	Literasi keuangan komunitas pelaku usaha batik Pamekasan	50	Pamekasan	23 Oktober 2019	Kanwil Surabaya

Dalam pelaksanaan kegiatan BRIncubator Tematik dapat bekerja sama dengan pihak internal, misalnya Kanwil, Kanca, maupun Divisi terkait dan pihak eksternal, misalnya OJK dan Bekraf.

b. BRIncubator Reguler

BRIncubator merupakan proses pengembangan UMKM Anggota RKB sehingga dapat meningkatkan kapasitas serta kapabilitas (naik kelas), baik secara digital dan berorientasi pada ekspor. Tujuan BRIncubator Reguler adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi para *entrepreneur* (UMKM) Anggota RKB.
- Menyediakan Calon Peminjam dan Penabung Potensial (CPP) yang dapat ditindaklanjuti oleh uker untuk menjadi debitur/nasabah.

Program Kemitraan

- Meningkatkan kapasitas UMKM Anggota RKB, yaitu UMKM memiliki *skill* untuk mendukung pengembangan usahanya.
- Mendorong terwujudnya layanan *financial closed system* baik untuk kebutuhan transaksi maupun kegiatan bisnis UMKM Anggota RKB.
- Mempersiapkan UMKM Anggota RKB untuk masuk ke pasar global.

BRIncubator sampai dengan saat ini telah berlangsung sebanyak dua kali, yaitu BRIncubator 2018 yang berlokasi di lima (5) kota, yaitu: RKB Solo, RKB Malang, RKB Makassar, RKB Padang, dan RKB Bandung dengan total peserta sebanyak 500 UMKM. Adapun BRIncubator 2019 juga dilaksanakan di 5 kota, yaitu: RKB Jakarta Pusat, RKB Yogyakarta RKB Semarang, RKB Sidoarjo, RKB Gianyar dengan total peserta 500 UMKM.

c. Kegiatan Tabungan BRI SimPel

Kegiatan Tabungan BRI SimPel adalah program ataupun kegiatan untuk memperkenalkan tabungan maupun produk perbankan lainnya kepada pelajar sejak dini. Program kegiatan Tabungan BRI SimPel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- SimPel *Goes to School*
 1. Kegiatan edukasi, misalnya: materi pentingnya menabung dan manfaat menabung bagi pelajar. Contoh kegiatan SimPel *Goes to School* adalah Implementasi *One Student One Account*, yaitu kolaborasi Agen BRILink bersama SMPN 2 Tabanan Bali pada Kamis, 10 Oktober 2019 dengan tujuan untuk memudahkan akses keuangan bagi pelajar dan program bank sampah bagi para pelajar untuk mendapatkan tambahan saldo rekening Tabungan BRI SimPel
 2. Kegiatan akuisisi, misalnya: pelayanan pembukaan rekening, dan penyeteroran SimPel.
- Pemilihan Duta SimPel Sekolah
 1. Kegiatan perlombaan, misalnya: cerdas cermat, pidato, vlog, tari, dan sebagainya.
 2. Kegiatan akuisisi, misalnya: pelayanan pembukaan rekening, dan penyeteroran SimPel.

Sampai dengan Oktober 2019, Total rekening Tabungan SimPel adalah sebesar 22,1 juta rekening dengan total saldo sebesar Rp4,8 triliun. Adapun kegiatan SimPel *Goes to School* dan Pemilihan Duta SimPel Sekolah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	Uker	Kanwil	Pelaksanaan
1	Kanca Simpang Empat	Padang	Januari
2	Kanca Manado	Manado	Januari
3	Kanca Pluit	Jakarta 1	Januari
4	Kanca Semarapura	Denpasar	Januari
5	Kanca Merauke	Jayapura	Januari
6	Kanca Tapaktuan	Banda Aceh	Februari
7	Kanca Balikpapan A. Yani	Banjarmasin	Februari
8	Kanca Bagansiapiapi	Pekanbaru	Februari
9	Kanca Karawang	Jakarta 2	Februari
10	Kanca Jepara	Semarang	Februari
11	Kanca Surabaya Fatmawati	Surabaya	Februari
12	Kanca Kupang	Denpasar	Maret
13	Kanca Bitung	Manado	Maret
14	Kanca Baturaja	Palembang	Maret
15	Kanca Palangkaraya	Banjarmasin	Maret
16	Kanca Labuhan	Jakarta 3	Maret
17	Kanca Banyuwangi	Malang	Maret
18	Kanca Singaparna	Bandung	April
19	Kanca Yogya Adisucipto	Yogyakarta	April
20	Kanca Bagansiapiapi	Pekanbaru	April
21	Kanca Pringsewu	Bandar Lampung	April
22	Kanca Probolinggo	Malang	April
23	Kanca Banyuwangi	Malang	April
24	Kanca Sigli	Banda Aceh	Agustus
25	Kanca Mukomuko	Bandar Lampung	Agustus
26	Kanca Ampera	Jakarta 2	Agustus
27	Kanca Khatib Sulaiman	Padang	Agustus
28	Kanca Sungai Liat	Palembang	Agustus



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan

- **SimPel Day**
Kegiatan nasional bersama OJK untuk memperingati hari nabung nasional yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Mei 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta
- **Fin Expo 2019**
Fin Expo adalah kegiatan *event* dan pameran bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan produk keuangan dan perlindungan kepada konsumen. *Fin Expo* 2019 telah dilaksanakan di Mall Kota Kasablanka pada 17 s/d 20 Oktober 2019. Pada kegiatan ini Bank BRI dinobatkan sebagai Juara 1 Bank Terbaik dalam mendukung program pemerintah melalui SimPel, Juara 1 *Fin Idol Cilik*, dan Juara 2 untuk *Fin Expo Booth Award 2019* sebagai *booth* dengan konsep digital dan *hi-tech*.

d. **Enhancement Go Global**

Enhancement Go Global adalah pelatihan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM terpilih agar mampu memasarkan produknya secara global. Desk IMR dan Divisi Bisnis Internasional bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) dalam mengadakan kegiatan pelatihan ekspor ini.

Kegiatan *Enhancement Go Global* yang telah dilakukan di 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Peserta	Tempat	Pelaksanaan
1	30	Malang	23-25 April 2019
2	30	Solo	10-12 September 2019
3	30	Makassar	22-24 Oktober 2019
4	30	Bukit Tinggi	5-7 November 2019
5	30	Bandung	12-14 November 2019

Tujuan kegiatan inklusi dan literasi keuangan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya sebatas kegiatan seremonial atau *event* saja.
- Dapat menghasilkan menghasilkan CPP (Calon Potensial Penabung/Peminjam) yang selanjutnya dapat diakuisisi oleh unit kerja bisnis.
- Langkah awal dalam pembentukan *Cluster* UMKM yang dibina oleh BRI, sehingga terbentuk layanan *financial close system* dari hulu ke hilir, baik transaksi keuangan menggunakan BRI maupun pembiayaan untuk pelaku usaha di *cluster* tersebut

KARTU TANI

Kartu Tani merupakan kartu debit *co-branding* antara Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kartu ini diantaranya berfungsi untuk identitas petani, membaca kuota pupuk bersubsidi, transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap, dan transaksi perbankan melalui *electronic channel*.

Kartu Tani BRI pertama kali diinisiasi di provinsi Jawa Tengah pada 4 Maret 2015. Kemudian pada 20 Februari 2017, Menteri Pertanian bersama dengan Menteri BUMN menginstruksikan Bank HIMBARA untuk melaksanakan uji coba program Kartu Tani di Pulau Jawa. BRI mendapat tugas membagi Kartu Tani di wilayah Banten, Jateng, Yogyakarta, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, Kartu Tani diberikan kepada Petani yang tergabung di kelompok tani dan melakukan usaha tani dengan luasan lahan maksimal 2 Ha untuk sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perternakan serta maksimal 1 Ha untuk sektor Perikanan Budidaya. Petani bersama Kelompok tani wajib membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan

Program Kemitraan

Kelompok Pupuk Bersubsidi) yang akan diunggah di sistem E-RDKK Kementerian Pertanian oleh Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan. Selanjutnya Bank akan membuka rekening dan menerbitkan Kartu Tani bagi Petani yang sudah terdaftar di E-RDKK Kementan.

Setiap transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dapat dimonitor oleh pemerintah secara real-time online melalui dashboard yang disediakan BRI, sehingga pemerintah dapat memastikan penyaluran pupuk bersubsidi telah tepat sasaran *by name by address*. Selain itu dashboard monitoring membantu produsen pupuk dalam memperoleh data sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi dan data sumber penagihan subsidi biaya produksi pupuk ke pemerintah. BRI juga memanfaatkan data petani penerima Kartu Tani sebagai pipeline pinjaman untuk meningkatkan skala usaha budidaya petani.

Penggunaan Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap yang juga berperan sebagai agen Lakupandai, merupakan bentuk literasi dan inklusi keuangan bagi ekosistem pertanian Indonesia. Dengan adanya Kartu Tani, Petani mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga kegiatan budidaya tidak terganggu. Selain itu petani yang datanya sudah terdaftar di sistem berkesempatan mendapatkan manfaat tambahan seperti bantuan sarana produksi pertanian lainnya, penyerapan hasil panen dari perusahaan *off-taker*, pendaftaran asuransi pertanian, dan pembiayaan dari perbankan.

Posisi per 31 Desember 2019 BRI telah menyerahkan 3.246.109 Kartu Tani kepada Petani penerima Pupuk Subsidi sebanyak 6.109 Kios Pupuk Lengkap telah menjadi agen Brilink.

KARTU KUSUKA (PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Kartu KUSUKA adalah kartu debit *co-branding* yang diberikan kepada setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir, diantaranya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan dan pemasar perikanan. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

1. Bukti profesi Pelaku Utama
2. Basis data untuk pendataan sektoral bagi Pelaku Utama
3. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi Pelaku Utama.

Telah dilakukan Penandatanganan Kerjasama Pencetakan Kartu KUSUKA antara Direktur Mikro BRI bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Tanggal 10 Oktober 2019 di Kawasan Perikanan Mura Baru Jakarta.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan

RUMAH KREATIF BUMN

Indonesia saat ini mempunyai populasi lebih dari 259 juta dengan 55 juta tenaga kerja berpengalaman dan 53% populasi telah menyumbang 74% dari GDP. Indonesia juga menempati ranking ekonomi ke-15 di dunia dengan potensi pasar sebesar Rp6.500 triliun (BPS, 2015) UKM (Usaha Kecil Menengah) sebagai salah satu pelaku dalam sektor industri, merupakan penopang perekonomian negara Indonesia dan telah memberikan kontribusi lebih dari setengah GDP Indonesia. Untuk lebih memberdayakan UKM, maka Kementerian BUMN mencanangkan program Rumah Kreatif BUMN (RKB).

Rumah Kreatif BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Rumah Kreatif BUMN akan diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM. Saat ini jumlah RKB BRI sebanyak 54 unit, RKB yang terakhir dibangun adalah RKB Bakauheni di pelabuhan Eksekutif Bakauheni, Lampung.

Tujuan utama dari Rumah Kreatif BUMN adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM sehingga dapat terwujud UKM Indonesia yang berkualitas melalui Go Modern (adalah pelatihan untuk mempersiapkan dan membina UKM dalam peningkatan kualitas produk, branding dan Packaging), Go Digital (adalah pelatihan lanjutan dari Modul Go Modern, berisi materi terkait penggunaan aplikasi digital dan otomasi dalam proses bisnis dan pemasaran), Go Online (adalah pelatihan mengenai perluasan akses pasar secara online melalui market place yang sudah disediakan dengan Blanja.com, atau e-commerce lainnya).

Untuk mendukung learning material dan knowledge management terhadap pelatihan di semua RKB, maka dilakukan standarisasi kurikulum pelatihan. RKB juga bekerjasama/ partnership dengan berbagai instansi dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pelatihan

dan anggota RKB diharapkan membentuk komunitas sesuai bidang usahanya untuk lebih me-*empowering* usahanya. Ke depan, para UMKM anggota RKB akan disertifikasi sesuai dengan tingkatan pelatihan di RKB, yakni Sertifikat Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Posisi Desember 2019, UMKM sebanyak 329.969 dengan pelatihan sebanyak 4.133.

Keterlibatan BRI dalam program RKB mendapatkan apresiasi dari kementerian BUMN. Pada tanggal 7 Oktober 2019, BRI mendapatkan apresiasi BUHN Awards untuk RKB Terbaik Kategori C (Remote Area). Berikut 54 lokasi RKB BRI:

No.	Nama RKB	Kantor Wilayah
1	Gayo Lues	Banda Aceh
2	Aceh Singkil	Banda Aceh
3	Kota Banda Aceh	Banda Aceh
4	Tasikmalaya	Bandung
5	Kota Bandung	Bandung
6	Purwakarta	Bandung
7	Banjar	Banjarmasin
8	Hulu Sungai Utara	Banjarmasin
9	Gunung Mas	Banjarmasin
10	Gianyar	Denpasar
11	Kota Mataram	Denpasar
12	Lembata	Denpasar
13	Flores Timur	Denpasar
14	Timor Tengah Selatan	Denpasar
15	Sumba Timur	Denpasar
16	Rote Ndao	Denpasar
17	Jakarta Pusat	Jakarta 1
18	Sambas	Jakarta 3
19	Serang	Jakarta 3
20	Jayapura	Jayapura
21	Paniai	Jayapura
22	Mappi	Jayapura

Program Kemitraan

No.	Nama RKB	Kantor Wilayah
23	Mimika	Jayapura
24	Bakauheni	Lampung
25	Bengkulu Selatan	Lampung
26	Kepulauan Aru	Makassar
27	Maluku Tengah	Makassar
28	Makassar	Makassar
29	Bulukumba	Makassar
30	Pinrang	Makassar
31	Kendari	Makassar
32	Konawe	Makassar
33	Bombana	Makassar
34	Kota Malang	Malang
35	Bondowoso	Malang
36	Gorontalo Utara	Manado
37	Manado	Manado
38	Morowali Utara	Manado
39	Halmahera Selatan (Teras Kapal)	Manado
40	Kotamobagu	Manado
41	Morowali	Manado
42	Milangas, Kepulauan Talaud	Manado
43	Kota Bukittinggi	Padang
44	Padangpanjang	Padang
45	Kota Pagar Alam	Palembang
46	Merangin	Palembang
47	Ogan Komering Ulu Selatan	Palembang
48	Kab. Empat Lawang	Palembang
49	Bangka Selatan	Palembang
50	Pekalongan	Semarang
51	Kota Semarang	Semarang
52	Sidoarjo	Surabaya
53	Yogyakarta	Yogyakarta
54	Kota Solo/Surakarta	Yogyakarta



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Direktorat Jaringan & Layanan

Dengan jumlah jaringan kerja konvensional mencapai 9 ribu, jaringan *e-channel* mencapai lebih dari 220 ribu serta jaringan agen BRILink mencapai lebih dari 400 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia maka manajemen jaringan menjadi hal yang *critical* di BRI. Apalagi dengan jumlah nasabah BRI yang mencapai lebih dari 11 juta nasabah peminjam serta lebih dari 100 juta nasabah simpanan, maka peningkatan kualitas layanan perlu terus dilakukan untuk dapat melayani nasabah BRI lebih baik. Untuk itu Direktur Jaringan dan Layanan senantiasa memastikan pengelolaan jaringan kantor, *e-channel* & jaringan *branchless banking* yang efektif, meningkatkan kualitas layanan Unit Kerja Operasional dan meningkatkan kualitas data nasabah untuk semakin meningkatkan produktivitas Unit Kerja Operasional serta peningkatan *fee based income* dari bisnis *branchless banking* BRI.

BRI telah melakukan langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi nilai Budaya Layanan – SMART – yang *Customer Centric* untuk mewujudkan *Service Excellence* dengan menciptakan *Wow Customer Experience* yang melebihi harapan nasabah. SMART diciptakan untuk meningkatkan Kualitas Mutu dengan pengkinian nilai Budaya Layanan yang menekankan pada aspek keramahan, kecepatan, dan kemudahan bertransaksi yang juga didukung penggunaan teknologi digital.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Konsumen

Target dan Kegiatan yang Direncanakan Manajemen Tahun 2019

BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah yang berbasis *Customer Centric* dengan melakukan peningkatan performa pada jaringan komunikasi dan revitalisasi standar layanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat di Industri perbankan nasional akan terus meningkat. Kinerja BRI terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan kinerja diikuti oleh kualitas layanan yang semakin baik. Pada 2019, kinerja Perusahaan tumbuh diatas rata-rata industri.

Hasil Kinerja Pengawasan Layanan

Uraian	2016	2017	2018	2019
Kinerja BRI	4.0205	4.0046	4.0665	4.0946
Industri Perbankan	3.9979	3.9951	3.9999	4.0926

Sumber: Service Quality Index By CAREE

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan

Untuk mendukung kualitas layanan, BRI meningkatkan sistem layanan agar dapat melayani pengaduan nasabah dengan lebih baik, cepat, dan memuaskan. Penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan standar pengaduan dan penanganan nasabah yang telah ditetapkan oleh regulator dan kebijakan manajemen. BRI juga terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelayanan dan pengaduan nasabah agar pengaduan dapat direspon dengan cepat dan hasilnya memuaskan.

Pengembangan Layanan Tahun 2019

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk kepada nasabah selama 2019 adalah sebagai berikut:

- **Mengembangkan Chatbot Artificial Intelligence yang diberi nama "Sabrina"**

Sabrina merupakan Chatbot berbasis artificial intelligence yang memberikan layanan informasi produk; promo dan event; lokasi BRI; dan bantuan langsung oleh Agen Contact Center. Sabrina memiliki tujuan agar nasabah dapat dengan mudah berkomunikasi dan mendapat informasi terkait perbankan.

- **Transformasi Nilai Budaya Layanan Yang Berbasis Customer Centric**

BRI telah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi nilai Budaya Layanan yang *Customer Centric* sebagai strategi Layanan Bank BRI untuk mewujudkan *Service Excellence* dengan menciptakan *Wow Customer Experience* yang melebihi harapan nasabah. Adapun transformasi Nilai Budaya Layanan tersebut mencakup 5 poin yang disingkat SMART, sebagai berikut:



1. SIGAP
2. MUDAH
1. AKURAT
2. RAMAH
3. TERAMPIL

Transformasi nilai Budaya Layanan SMART merupakan salah satu Strategi Inisiatif yang tidak menggantikan atau meniadakan standar kualitas yang sudah ada, namun lebih kepada meningkatkan Kualitas Mutu dengan pengkinian nilai Budaya Layanan yang menekankan pada aspek keramahan, kecepatan, dan kemudahan bertransaksi yang juga didukung penggunaan teknologi digital. Sehingga Budaya Layanan SMART menjadi sebuah Value yang dapat menggambarkan strategi kualitas layanan Bank BRI di era digital dengan sebutan yang khas, mudah diingat, dan tertanam dalam benak seluruh insan BRI. Implementasi Nilai Budaya Layanan SMART pada seluruh aspek layanan akan memberikan pengalaman yang lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan Bank BRI.

- **Mengembangkan Sistem Complain Handling Yang Terintegrasi**

Sistem *complain handling* yang terintegrasi di Bank BRI diimplementasikan melalui pemanfaatan aplikasi BRICare dan BRISolutions. Aplikasi BRICare digunakan untuk mencatat, mengeskali,



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Konsumen

menyelesaikan, dan melaporkan pengaduan yang diterima Bank BRI. Dengan sistem penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi maka tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan nasabah menjadi terpantau dan mendukung upaya peningkatan kualitas layanan Bank BRI kepada nasabahnya.

Untuk permasalahan yang dialami oleh internal di Unit Kerja Operasional terkait sistem dan aplikasi, proses pencatatan dan eskalasi atas permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan melalui aplikasi BRISolutions. Fungsi sentral tim *helpdesk* dalam memberikan solusi dan penyelesaian setiap permasalahan sistem dan aplikasi, dapat lebih efektif termonitor untuk memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA). Dengan diimplementasikannya aplikasi BRISolutions maka jajaran Unit Kerja Operasional dapat lebih optimal dalam memberikan layanan ke nasabah.

Penyelenggaraan Hari Pelanggan Nasional

Sebagai Apresiasi terhadap nasabah BRI atas kesetiaan dalam menggunakan layanan dan produk perbankan BRI, Bank BRI menyelenggarakan Hari Pelanggan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2019.

Hari Pelanggan Nasional merupakan komitmen seluruh Direksi selaku Pembina untuk mewujudkan *Customer Experience* yang *excellent* dengan beorientasi pada Core Values BRI "Customer Centric" serta momentum untuk menciptakan *service awareness* mengenai pentingnya perbaikan Layanan di seluruh Unit Kerja Operasional.

Pada kegiatan Hari Pelanggan Nasional, Bank BRI dengan seluruh jajaran manajemen dan Direksi berinteraksi langsung dengan nasabah untuk mendapatkan feedback secara langsung bagi peningkatan kualitas layanan Bank BRI. Disamping itu, pemberian apresiasi kepada nasabah berupa souvenir seperti coklat, bunga, dll juga diselenggarakan di seluruh Unit Kerja Operasional BRI (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit).

Rincian Penyelesaian Keluhan

Sepanjang 2019, BRI mencatatkan kenaikan permintaan informasi dan pengaduan nasabah. Dari sejumlah keluhan yang masuk ke BRI senantiasa di respon dengan cepat sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Sampai dengan Desember 2019 permintaan informasi dan pengaduan nasabah yang masuk mencapai 4.284.801 keluhan, sementara yang telah diselesaikan mencapai 4.239.155 (98,9%).

Berikut adalah rincian penyelesaian keluhan nasabah.

Jenis Keluhan	2017		2018		2019	
	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan
Keuangan	831,586	759,718	997,629	968,791	1.431.933	1.412.205
Ketersediaan Informasi	888,687	884,065	1,212,812	1,209,197	1.805.236	1.804.980
Non Keuangan	1,272,962	1,284,117	1,328,864	1,306,394	1.040.243	1.014.727
Kualitas Layanan	5,719	3,263	4,920	4,415	7.389	7.243
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2,998,954	2,931,163	3,544,225	3,488,797	4.284.801	4.239.155

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Konsumen

Tata Cara Pengaduan

1. Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
2. Nasabah agar segera melaporkan pengaduannya kepada BRI melalui sarana yang telah ditentukan sesegera mungkin apabila nasabah mengalami kondisi pada poin 1.
3. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada:
 - a. Kantor Cabang Khusus/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit/Kantor Kas/Teras BRI diterima oleh *customer service*;
 - b. Sentra Layanan Prioritas dan Unit Kerja Digital Banking BRI (BRI Digital Branch) diterima oleh Priority Banking Assistant;
 - c. Call Center BRI Nomor Telepon 14017 atau 1500017;
 - d. E-mail BRI (melalui menu hubungi kami pada website www.bri.co.id dan atau callbri@bri.co.id);
 - e. Melalui media sosial resmi bank BRI
4. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dilengkapi dengan informasi:
 - a. Data Nasabah;
 - b. Permasalahan yang diadukan.
5. Pengaduan yang dilakukan yang secara tertulis yang disampaikan di Unit Kerja Operasional/melalui fax harus dilengkapi dengan:
 - a. Formulir pengaduan nasabah yang berisi data nasabah dan permasalahan yang diadukan;
 - b. Fotocopy kartu identitas nasabah (KTP);
 - c. Bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan atau dokumen pendukung lainnya yang terkait pengaduan.
6. Pengaduan melalui Email harus dilengkapi dengan:
 - a. Data nasabah dan permasalahan yang diadukan;
 - b. *Scan file/data capture* bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan pengaduan yang diajukan;
7. Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
8. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan.

Survey Kualitas Layanan 2019

Perusahaan secara periodik melakukan monitoring untuk mengetahui Kualitas Layanan Bank BRI melalui dua jenis pengukuran, yaitu:

1. Pengukuran Konsistensi Kualitas Layanan Unit Kerja BRI
Dilakukan dengan menggunakan metode *Mystery Shopping*, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas layanan Unit Kerja yang meliputi:
 - People (CS, Teller, Satpam)
 - E-Channel (ATM/CRM)
 - Premises
2. Survey Kepuasan Nasabah
Dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Telephonic Interview* (CATI) terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank BRI (maksimal 3 hari setelah bertransaksi).

Hasil survey dari dua sisi tersebut umumnya digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah. Untuk memperoleh hasil survey yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, BRI bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara objektif dengan menggunakan *variable* pembanding, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor di industri perbankan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PENGHARGAAN KUALITAS LAYANAN TAHUN 2019

1. Predikat *Diamond* pada kategori *Reguler Banking, Priority Banking, Silver Credit Card* dalam penghargaan *Service Quality Index* 2019 yang diselenggarakan oleh lembaga Carre.
2. Performa 10 Bank Terbaik dalam Pelayanan Prima dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia
3. Performa Terbaik Walk in Channel 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
4. Performa Terbaik Internet Banking 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
5. Performa Terbaik E-Banking 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
6. Performa Terbaik ATM Public Area 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
7. Performa Terbaik Mobile Banking 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
8. Performa Terbaik Satpam 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
9. Performa Terbaik CS 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
10. Performa Terbaik SMS Banking 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
11. Performa Terbaik Call Center 10 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
12. Performa Terbaik Opening Account Website Application 8 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
13. Performa Terbaik CDM/CRM 5 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
14. Performa Terbaik ChatBot 5 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
15. Performa Terbaik Opening Account Mobile Application 7 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
16. Performa Terbaik Digital Lounge 6 Bank dalam penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.

Pada Tahun 2019 BRI telah memperoleh penghargaan di bidang kualitas layanan diantaranya sebagai berikut:



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210,
Indonesia

☎ **Tel.** : (62-21) 251 0244, 251 0254

☎ **Fax.** : (62-21) 250 0065, 250 0077

🌐 **Website** : www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI 1 lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta
10210, Indonesia

☎ **Tel.** : (62-21) 575 1966

☎ **Fax.** : (62-21) 570 0916